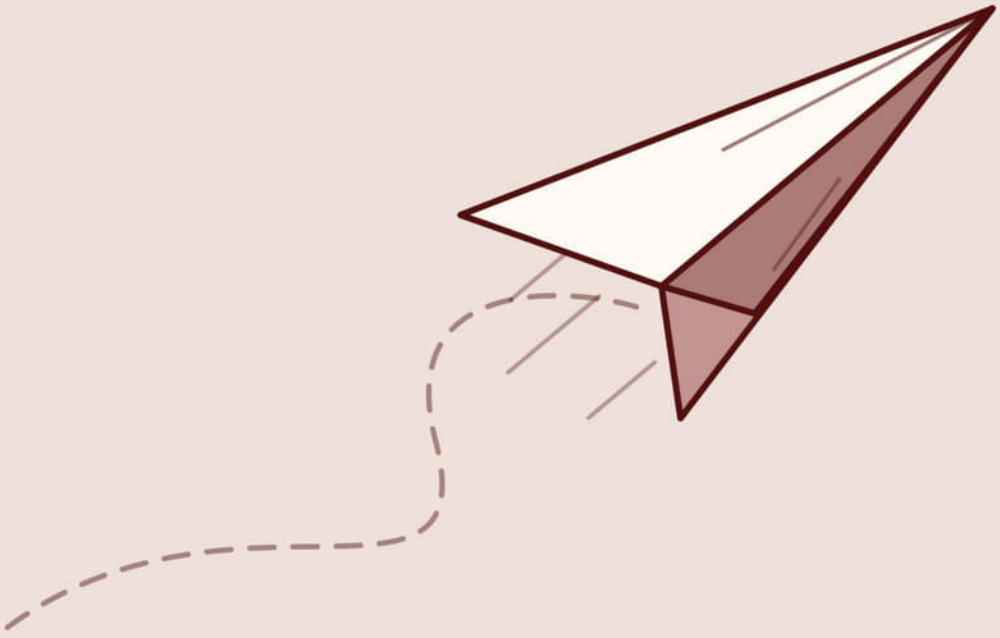
SERI PERSIAPAN TKA SMA

TKA SMA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Materi, Strategi, dan Simulasi



Handaka Lumu

by Next Level Study Indonesia

2026/2027 · PPKN

TKA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Materi, Strategi, dan Simulasi

Handaka Lumu

by Next Level Study Indonesia

The Dancer of the Silent Stage

"Semakin kau mengenalku, semakin banyak yang kamu tidak tahu"



KETERANGAN BUKU

TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Materi, Strategi, dan Simulasi

Penulis: Handaka Lumu

Penyusun soal: Tim Next Level Study Indonesia

Penerbit: Next Level Study Indonesia

Edisi: Edisi 1 · Gratis untuk pelajar Indonesia · 2026/2027 · Kode buku PPKN

© 2026 Next Level Study Indonesia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

GRATIS · TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Buku ini dibagikan gratis sebagai dedikasi Next Level Study Indonesia untuk bangsa. Boleh diperbanyak dan dibagikan untuk belajar, tetapi tidak untuk diperjualbelikan.

Sumber soal asli: Soal TKA SMA 2025 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pusat Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen), dimuat untuk keperluan belajar sesuai versi Bank Soal NLS; persentase benar nasional sesuai data yang menyertai berkas soal asli.

Acuan kisi-kisi: https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/tka/tka/view/mata-pelajaran-pilihan/sma/pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pendidikan-pancasila

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kata Pengantar

Kamu yang sedang bersiap,

Terima kasih sudah membuka buku ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sering disangka pelajaran hafalan: bunyi sila, nomor pasal, nama lembaga, tanggal sidang. Padahal PPKn adalah pelajaran tentang cara kita hidup bersama. Ia ada di rapat RT yang memanas, di grup percakapan kelas yang dipenuhi kabar bohong, di bilik suara tempat kamu kelak memberi pilihan pertamamu, dan di pulau terluar yang warganya ingin dilayani sama baiknya dengan warga kota.

Buku ini lahir dari satu kenyataan. Soal TKA PPKn 2025 hampir tidak pernah bertanya "sebutkan". Soal-soalnya menghadirkan pedagang yang berebut ruang dengan pengguna jalan, warga yang tercemar limbah pabrik, atau pelajar yang akan memilih untuk pertama kali, lalu meminta kamu menimbang mana sikap yang paling adil. Soal yang paling sulit justru soal yang jawabannya lebih dari satu: hanya sekitar satu dari lima peserta yang menjawabnya dengan tepat. Banyak siswa tersandung bukan karena tidak peduli, tetapi karena memilih jawaban yang terdengar baik tanpa memeriksa apakah jawaban itu benar-benar menjawab kasusnya.

Isi buku ini disusun mengikuti kisi-kisi resmi dan soal asli TKA 2025. Setiap sub bab menjelaskan apa yang diuji, konsep yang benar-benar terpakai, langkah menjawab, dan jebakan yang sering dipasang. Soal asli dibedah cara berpikirnya. Di akhir setiap bab ada kuis, dan di akhir buku ada simulasi TKA yang berwaktu seperti ujian sesungguhnya. Buku ini tidak menjanjikan nilai tertentu. Yang bisa saya janjikan hanyalah penjelasan yang jujur dan latihan yang terarah.

Bacalah berurutan. Kerjakan latihan dengan pensil di tangan. Bila skor kuis belum memuaskan, kembalilah ke sub bab yang ditunjuk tabel anjuran. Latihan dan kuis yang sama juga dapat kamu buka di LMS NLS lewat kode QR di dalam buku.

Negeri ini berdiri karena orang-orang yang berbeda mau berjanji untuk tetap bersama. Mereka berselisih, lalu bermusyawarah, lalu memilih persatuan. Belajarlah dengan semangat yang sama. Berjanjilah pada dirimu untuk menjadi warga negara yang berpikir jernih dan bersikap adil. Berbaktilah lewat kesungguhanmu hari ini, untuk orang tua yang mendoakanmu, untuk guru yang sabar menuntunmu, dan untuk tanah air yang kelak menunggu pengabdianmu. Ilmu yang kamu kumpulkan dengan sepenuh jiwa dan raga akan menjadi baktimu bagi negeri.

Selamat belajar. Saya percaya kamu bisa.

Oktober 2026

Handaka Lumu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Panduan Memakai Buku

Buku ini dipakai berurutan: kenali ujiannya (Bagian A), pelajari 4 bab materi (Bagian B), uji kesiapanmu dengan simulasi TKA berwaktu (Bagian C), lalu cocokkan jawaban dan pelajari pembahasannya (Bagian D).

Peta belajar

Langkah	Kamu mengerjakan	Hasil
1	Bagian A: kenali bentuk soal dan peta kisi-kisi	Tahu apa yang diuji
2	Bab demi bab: baca sub bab, kerjakan latihan, lalu Kuis Akhir Bab	Skor kuis per bab
3	Ulangi sub bab yang ditunjuk tabel anjuran di akhir kuis	Titik lemah berkurang
4	Bagian C: 5 simulasi TKA berwaktu	Skor simulasi
5	Bagian D: kunci dan pembahasan semua soal	Paham alasan, bukan hanya jawaban

Tanda di dalam buku

Tanda	Artinya
◎ APA YANG DIUJI	Tujuan belajar sub bab dan indikator resmi yang diuji
◆ KONSEP INTI	Materi lengkap: penjelasan runtut, gambar, dan contoh terselesaikan
▲ STRATEGI DAN JEBAKAN	Langkah menjawab dan pola pengecoh yang sering dipasang
● BEDAH SOAL	Soal dibahas langkah demi langkah
✎ LATIHAN	Soal untuk dikerjakan sendiri; kunci singkat di bawahnya
✔ PERIKSA DIRI	Pertanyaan refleksi dan hal yang perlu diingat
Kotak QR	Membuka latihan dan kuis yang sama di LMS NLS

Kode

PPKN-1.2 = sub bab 1.2; PPKN-KB1 = kuis akhir bab 1; PPKN-FIN1 = simulasi 1. Kode yang sama dipakai di LMS.

Belajar lewat PDF atau LMS

Semua latihan, kunci, dan pembahasan sudah ada di buku ini, jadi kamu bisa belajar hanya dengan PDF atau cetakan. LMS menambahkan latihan dan kuis interaktif, serta menyimpan skormu.

Buka buku ini di LMS NLS

Pindai untuk membuka course buku ini.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Panduan Memakai Buku iv
Bagian A · Mengenal TKA PPKn 1
Bagian B · Materi 9
Bab 1 · Pancasila 9
Sub bab 1.1 · Perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa 10
Sub bab 1.2 · Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum 22
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi 68
Kuis Akhir Bab 1 78
Bab 2 · Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 94
Sub bab 2.1 · Dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen 95
Sub bab 2.2 · Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya 107
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah 132
Sub bab 2.5 · Demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945 147
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM 169
Kuis Akhir Bab 2 181
Bab 3 · Bhinneka Tunggal Ika 197
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan 210
Sub bab 3.3 · Nilai dan prinsip gotong royong 222
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional 232
Kuis Akhir Bab 3 246
Bab 4 · Komitmen terhadap NKRI 262
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI 263
Sub bab 4.2 · Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial 276
Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia 287
Sub bab 4.4 · Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta 298
Sub bab 4.5 · Peran Indonesia dalam perdamaian dunia 307
Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula 317
Sub bab 4.7 · Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI 329
Kuis Akhir Bab 4 340
Bagian C · Simulasi TKA 356
Simulasi 1 — Soal Asli TKA 2025 357
Simulasi 2 — Prediksi TKA 2026 373

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 3 — Prediksi TKA 2026 388
Simulasi 4 — Prediksi TKA 2026 403
Simulasi 5 — Prediksi TKA 2026 418
Bagian D · Kunci dan Pembahasan 433
Penutup 533
Lampiran 534

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bagian A · Mengenal TKA PPKn

Apa itu TKA PPKn

Tes Kemampuan Akademik (TKA) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sering disingkat TKA PPKn, adalah salah satu mata pelajaran **pilihan** pada TKA jenjang SMA/MA/SMK. Menurut kerangka asesmen Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, tes ini mengukur kemampuan **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis** Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah melihat apakah kamu dapat berpikir sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab.

Muatannya disusun dari irisan PPKn Kurikulum 2013 dan Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka. Jadi, siswa dari kedua kurikulum mempelajari bahan yang sama.

> Halaman resmi Pusmendik tidak mencantumkan jumlah soal dan waktu TKA PPKn. Berkas soal asli 2025 yang dipakai NLS memuat indikator bernomor (1) sampai (30), sehingga ujian aslinya diperkirakan berisi **30 soal**; satu soal tidak terdokumentasi sehingga buku ini memuat 29 soal asli. Buku ini memakai anjuran **60 menit untuk 30 soal**, atau sekitar **2 menit per soal**. Pastikan ketentuan resminya lewat pengumuman Pusmendik menjelang ujian.

Apa yang diuji: empat elemen

Kisi-kisi resmi membagi muatan TKA PPKn menjadi empat elemen. Buku ini memakai empat elemen itu sebagai empat bab.

Elemen kisi-kisi	Isi menurut kisi-kisi	Bab di buku ini	Soal asli 2025
Pancasila	makna sila-sila, sejarah perumusan, dasar negara, ideologi, identitas nasional, HAM, demokrasi Pancasila, permasalahan dan solusi penerapan nilai Pancasila	Bab 1	8 soal
UUD NRI Tahun 1945	sejarah dan perkembangan UUD, kewenangan lembaga negara, hubungan pusat dan daerah, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, penegakan hukum dan perlindungan HAM	Bab 2	7 soal
Bhinneka Tunggal Ika	kebersamaan dalam keberagaman, kebinekaan sebagai modal sosial, gotong royong, ancaman terhadap keberagaman, integrasi nasional	Bab 3	9 soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia	perilaku warga negara menjaga keutuhan NKRI, bentuk negara dan sistem pemerintahan, Wawasan Nusantara, sistem pertahanan, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, pelopor pemilih pemula, pengaruh IPTEK	Bab 4	5 soal

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sebaran soal asli cukup merata. Bab 3 sedikit lebih banyak, dan di situlah letak soal-soal tersulit. Bab 4 paling sedikit soalnya, tetapi memuat soal dengan persentase benar terendah dari seluruh ujian: tujuan partisipasi pemilih pemula.

Beberapa topik kisi-kisi tidak muncul sebagai soal pada 2025, misalnya sejarah perumusan Pancasila, sejarah konstitusi, gotong royong, bentuk negara, dan sistem pertahanan. Topik itu tetap dibahas, dengan ringkas, karena ada di kisi-kisi dan contoh soal resmi Pusmendik. Sejarah dipakai untuk menalar, bukan untuk menghafal tanggal.

Konteks soal: kehidupan bernegara sehari-hari

Hampir setiap soal asli 2025 dibuka dengan sebuah ilustrasi, lalu baru bertanya. Tidak ada satu pun soal yang meminta kamu menyebutkan bunyi pasal atau nama tokoh. Bila sebuah pasal diperlukan, bunyinya dikutip di soal.

Konteks	Contoh pada soal asli 2025 (nomor = Simulasi 1)
Konflik kepentingan antarwarga	pedagang dan pengguna jalan berebut trotoar (No. 6), pedagang kecil yang tiba-tiba dilarang berjualan (No. 25)
Ketatanegaraan dan lembaga negara	wacana pemilihan presiden oleh MPR (No. 3), sengketa hasil Pilkada (No. 11), wewenang Mahkamah Konstitusi (No. 27)
Keberagaman dan integrasi	festival budaya (No. 13), Reog Ponorogo sebagai identitas nasional (No. 29), diskriminasi (No. 20)
Ancaman bagi keutuhan bangsa	radikalisme di media sosial (No. 21), hoaks yang memicu disintegrasi (No. 23)
Peran pelajar	sosialisasi bagi pemilih pemula (No. 18), festival toleransi pelajar (No. 28)

Ilustrasinya biasanya pendek, tetapi kata-katanya dipilih dengan cermat. Satu kata seperti *tanpa kesepakatan*, *tiba-tiba*, atau *mayoritas* sering menjadi kunci. **Bacalah kalimat pertanyaannya dulu**, lalu kembali ke ilustrasi untuk mencari bukti.

Pola soal TKA PPKn: dari kasus ke prinsip

Hampir semua soal asli mengikuti pola yang sama: sebuah kasus diberikan, lalu kamu diminta memilih nilai, alasan, tantangan, solusi, atau dampak yang **paling tepat**. Gunakan empat langkah berikut di setiap soal.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Langkah	Pertanyaan yang kamu ajukan	Contoh (No. 6, pedagang dan pengguna jalan)
1. Pelaku dan masalah	Siapa saja yang terlibat? Apa yang dipersoalkan?	pedagang ingin berjualan; pengguna jalan butuh trotoar yang aman
2. Kata tanya	Yang diminta nilai, alasan, tantangan, solusi, atau dampak?	**peran Pancasila** dalam menjamin keadilan
3. Prinsip	Prinsip PPKn mana yang dipakai?	menyeimbangkan hak dan kewajiban, tanpa memenangkan satu pihak
4. Uji pilihan	Pilihan mana yang memenuhi prinsip **dan** menjawab pertanyaan?	coret yang memenangkan satu pihak atau tidak menjawab "peran"

Langkah 4 adalah saringan terakhir. Pengecoh TKA PPKn hampir selalu **terdengar baik**. Tidak ada pilihan yang mengajak berbuat jahat. Karena itu, kamu harus memilih dengan ukuran yang tepat, bukan dengan perasaan "kalimat ini sopan".

Tiga pengecoh yang paling sering dipasang

Kenali tiga pola ini sejak awal. Setiap sub bab akan menunjukkan wujudnya dalam topik masing-masing.

Pola pengecoh	Ciri	Contoh
Baik, tetapi tidak menjawab	isinya benar dan bermoral, tetapi bukan jawaban atas kata tanya	ditanya **dampak** bagi integrasi, pilihan menyebut dampak ekonomi
Berlebihan atau mutlak	memakai kata *seluruh*, *pasti*, *selalu*, *dilarang sama sekali*, atau menghapus perbedaan demi persatuan	"memblokir semua media sosial", "menyeragamkan budaya agar bersatu"
Memenangkan satu pihak atau memindahkan kewajiban	mayoritas menang, pihak lemah disuruh mengalah, atau tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada orang lain	"mengikuti kelompok terbesar", "menyerahkan semuanya kepada aparat"

Ada satu pola tambahan pada soal bergaya "Nilai …, karena …": **sila yang benar dengan alasan yang salah**. Pilihan seperti itu tetap salah. Kedua bagiannya harus sesuai kasus.

Kata tanya menentukan jawaban

Banyak siswa memahami kasusnya, tetapi menjawab pertanyaan yang lain. Biasakan menandai kata tanya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kata tanya	Yang dicari	Yang **bukan** jawabannya
nilai yang diterapkan / dilanggar	sila atau nilai **beserta bukti** di kasus	nilai yang hanya disebut namanya tanpa bukti
alasan / pentingnya	mengapa sesuatu dilakukan atau dibutuhkan	cara melakukannya
tantangan / hambatan	apa yang menghalangi, sesuai yang tergambar di kasus	hambatan umum yang tidak disebut
solusi / upaya **terbaik**	langkah yang **menyasar akar** masalah dan adil bagi semua pihak	langkah seremonial, represif, atau sepihak
dampak / akibat	akibat **langsung** bagi hal yang ditanyakan	akibat di bidang lain atau akibat yang ditebak
tujuan	**untuk apa** sesuatu dilakukan	**bagaimana** caranya

Baris terakhir penting untuk soal tersulit 2025. Pada No. 18, peserta diminta memilih semua pernyataan yang menunjukkan **tujuan** partisipasi pemilih pemula. Hanya 12,8 % peserta yang menjawab benar. Semua pilihannya terdengar positif, dan ada pilihan yang menggabungkan sikap yang benar dengan sikap yang keliru dalam satu kalimat. Karena itu, setiap pilihan harus dibaca sampai habis dan diuji dengan pertanyaan "apakah ini tujuan, dan apakah seluruh kalimatnya benar?".

Tiga tingkat berpikir

Kerangka Pusmendik menyusun soal dalam tiga level kognitif.

Level	Yang diminta	Contoh pada soal asli 2025
1. Pemahaman	menjelaskan konsep Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI	wewenang Mahkamah Konstitusi (No. 27)
2. Penerapan	memakai konsep pada kasus	menentukan nilai Pancasila yang diterapkan warga perumahan (No. 4), hak yang mencerminkan Pasal 27 ayat (3) (No. 12)
3. Penalaran	menyelesaikan permasalahan: menilai tantangan, solusi, tujuan, dan dampak	menentukan lembaga yang tepat untuk sengketa Pilkada (No. 11), memilih cara menjaga kebinekaan sebagai modal sosial (No. 26)

Sebagian besar soal asli berada di level 2 dan 3. Soal level 3 jarang selesai dengan mengenali satu istilah. Setelah memahami kasusnya, kamu masih harus menimbang pilihan mana yang paling adil, paling tepat sasaran, atau paling sesuai kewenangan.

Bentuk soal dan cara menjawabnya

Soal asli PPKn 2025 memakai tiga bentuk.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bentuk	Jumlah pada 2025	Rata-rata benar	Cara menjawab
Pilihan ganda (PG)	20 soal	41,2 %	pilih **satu** jawaban dari lima pilihan A–E
PG kompleks kategori (Benar/Salah)	5 soal	69,8 %	tentukan **setiap** pernyataan Benar atau Salah
PG kompleks pilih lebih dari satu (MCMA)	4 soal	22,6 %	pilih **semua** pilihan yang benar; jumlahnya tidak disebutkan

Pilihan ganda. Kata "paling tepat" berarti bisa ada lebih dari satu pilihan yang tidak sepenuhnya salah. Pilih yang **paling lengkap memenuhi prinsip** dan **paling langsung menjawab** kata tanya. Pada soal bergaya "Nilai Persatuan, karena …", sering ada dua pilihan bersila sama dengan alasan berbeda. Bandingkan alasannya dengan bukti di kasus.

Benar/Salah. Perlakukan setiap baris sebagai soal kecil. Baris yang memakai istilah yang benar tetapi menghubungkannya secara keliru tetap Salah. Bentuk ini paling mudah bagi peserta 2025, tetapi satu baris yang terlewat sudah membuat jawaban salah.

Pilih lebih dari satu (MCMA). Inilah bentuk tersulit TKA PPKn. Keempat soal MCMA 2025 menempati empat urutan teratas soal tersulit, dengan rata-rata hanya **22,6 %**. Salah satu sebabnya terlihat dari soalnya sendiri: hampir setiap pilihan MCMA PPKn terdengar baik. Jangan menebak jumlah jawabannya. Uji setiap pilihan **satu per satu** dengan pertanyaan yang sama: "Apakah pilihan ini sesuai prinsip **dan** menjawab pertanyaan?" Pilih semua yang lolos, coret semua yang tidak.

Tingkat kesulitan nasional soal asli 2025

Tabel berikut memuat persentase peserta yang menjawab benar setiap soal asli TKA PPKn 2025. Angkanya diambil dari data yang menyertai berkas soal asli yang dipakai NLS, lalu dibulatkan satu angka di belakang koma. Nomor soal sesuai urutan di Simulasi 1. Tabel diurutkan dari yang paling sulit.

No.	Yang diuji	Bentuk	Benar	Sub bab
18	tujuan partisipasi pemilih pemula dalam demokrasi	MCMA	12,8 %	4.6
26	cara menjaga kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	MCMA	19,3 %	3.2
28	sikap positif yang dapat menjadi modal sosial	MCMA	28,3 %	3.2
24	tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	MCMA	30,1 %	3.4
6	peran Pancasila menyeimbangkan hak dan kewajiban	PG	30,7 %	1.3
21	upaya melindungi NKRI dari radikalisme di media sosial	PG	30,8 %	4.1
11	lembaga yang tepat untuk menyelesaikan sengketa Pilkada	PG	31,4 %	2.3
17	tantangan penegakan hukum pada kasus pencemaran	PG	33,0 %	2.7

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

29	latar belakang suatu tradisi menjadi modal sosial	PG	34,7 %	3.2
1	peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu	PG	36,6 %	1.3
7	alasan kerja sama pusat dan daerah	PG	38,0 %	2.4
10	perilaku yang berhubungan dengan dua sila sekaligus	PG	38,1 %	1.4
23	cara warga mengatasi tantangan disintegrasi	PG	38,8 %	4.1
8	perilaku HAM yang sesuai sila keempat	PG	39,7 %	1.5
19	hambatan integrasi nasional	PG	41,2 %	3.4
3	pentingnya Pancasila dalam masalah ketatanegaraan	PG	42,0 %	1.2
13	alasan suatu kegiatan memperkukuh persatuan	PG	44,1 %	3.1
9	keunggulan nilai Pancasila dalam aktivitas internasional	PG	44,5 %	1.6
16	pentingnya gatra ekonomi dalam Wawasan Nusantara	PG	44,9 %	4.3
4	nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bertetangga	PG	46,2 %	1.4
2	tantangan melaksanakan Pasal 27 ayat (2)	PG	47,2 %	2.6
25	solusi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban	PG	48,1 %	2.7
20	upaya menghadapi diskriminasi	PG	54,3 %	3.4
27	wewenang Mahkamah Konstitusi	Benar/Salah	54,6 %	2.3
12	hak warga negara menurut Pasal 27 ayat (3)	PG	60,3 %	2.6
22	peran warga menjaga NKRI di tengah globalisasi ekonomi	Benar/Salah	72,3 %	4.1
15	bukti Bhinneka Tunggal Ika mengatasi ancaman global	Benar/Salah	72,9 %	3.1
5	fungsi Pancasila dalam pergaulan global	Benar/Salah	74,2 %	1.6
14	upaya menjaga integrasi nasional	Benar/Salah	75,2 %	3.4

Rata-rata persentase benar seluruh soal adalah **43,6 %**, dan 14 dari 29 soal dijawab benar oleh kurang dari 40 % peserta. Ada tiga hal yang bisa kamu pelajari dari tabel ini.

1. **MCMA adalah pintu kegagalan terbesar.** Empat soal tersulit semuanya MCMA. Karena itu, setiap kuis akhir bab di buku ini memuat 5–7 soal MCMA, dan bagian ⚠ **Strategi dan jebakan** di sub bab 3.2 dan 4.6 membahas cara memeriksa pilihan satu per satu.
2. **Soal "peran", "upaya", dan "tujuan" lebih sulit daripada soal "nilai".** Soal yang meminta peran Pancasila (No. 6, 1), upaya terbaik (No. 21, 23), atau tujuan (No. 18, 24) rata-rata jauh di bawah soal yang meminta mengenali nilai atau hak. Pengecohnya adalah jawaban yang baik tetapi menjawab pertanyaan lain.
3. **Bab 3 dan Bab 4 menentukan.** Rata-rata per bab: Bab 1 sekitar 44 %, Bab 2 sekitar 45 %, Bab 3 sekitar 45 %, dan Bab 4 sekitar 40 %. Namun, empat soal tersulit berasal dari Bab 3 dan Bab 4, terutama sub bab 3.2 (modal sosial) dan 4.6 (pemilih pemula). Kedua sub bab itu diberi halaman lebih banyak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Keterampilan yang dipakai di semua bab

Keterampilan berikut tidak punya sub bab sendiri, tetapi dipakai di banyak soal.

Membaca pasal yang dikutip

Soal sering mengutip pasal UUD NRI 1945 atau undang-undang. Kamu tidak perlu menghafalnya, tetapi kamu harus membacanya dengan teliti.

- **Subjek:** siapa yang disebut? *Setiap orang*, *setiap warga negara*, *negara*, *pemerintah*, atau lembaga tertentu?
- **Kata kerja:** *berhak*, *wajib*, *dapat*, *menjamin*, atau *dipelihara oleh*? Hak dan kewajiban sering ditukar di pengecoh.
- **Batas:** cari anak kalimat seperti *sepanjang masih hidup*, *dengan memperhatikan pertimbangan*, atau *dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Pengecoh sering hanya membaca separuh pasal.

Membaca ilustrasi kasus

Seperti soal asli TKA 2025, hampir semua soal di buku ini diawali **ilustrasi**: satu paragraf berisi kasus warga, isu kebangsaan, kutipan pasal, atau peristiwa nyata. Soal asli PPKn tidak memakai grafik atau tabel data, dan soal latihan, kuis, serta simulasi di buku ini mengikuti pola itu. Baca ilustrasi dengan tiga pertanyaan: **siapa pelakunya** (warga, lembaga, pemerintah), **apa masalah atau tindakannya**, dan **apa yang ditanyakan** (nilai, alasan, tantangan, solusi, atau lembaga yang berwenang). Jawaban yang benar selalu didukung ilustrasi; pilihan yang benar secara umum tetapi tidak berkaitan dengan ilustrasi adalah pengecoh.

Mengenali sikap yang adil

Banyak soal menanyakan sikap atau solusi. Sikap yang paling sesuai Pancasila hampir selalu memenuhi tiga syarat: **melibatkan pihak yang terdampak** (musyawarah), **menghormati hak semua pihak** (tidak memenangkan satu pihak), dan **menyasar akar masalah** (tidak seremonial, tidak berlebihan).

Strategi 60 menit

1. **Putaran pertama (±35 menit):** kerjakan PG dan Benar/Salah yang kata tanyanya jelas. Tandai MCMA dan soal yang ragu, lalu lewati.
2. **Putaran kedua (±20 menit):** kembali ke MCMA. Uji setiap pilihan satu per satu. Tulis tanda ✓ atau ✗ di samping setiap pilihan sebelum memilih.
3. **Lima menit terakhir:** pastikan tidak ada soal kosong. Pada PG yang masih ragu, coret dulu pilihan yang berlebihan atau yang tidak menjawab kata tanya, lalu pilih dari sisanya.

Cara memakai buku ini

1. Baca Bagian A ini sampai selesai. Tabel kata tanya dan tiga pola pengecoh akan dipakai di semua bab.
2. Pelajari setiap bab secara berurutan. Di setiap sub bab, kerjakan ✍ **Latihan** sebelum melihat kunci di bawahnya. Pembahasan lengkap ada di Bagian D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Kerjakan **Kuis Akhir Bab** dengan waktu 60 menit. Isi tabel skor, lalu ikuti tabel anjuran: skor 70 % atau lebih, lanjut; 50–69 %, ulangi sub bab yang lemah; di bawah 50 %, baca ulang bab itu.
4. Setelah keempat bab selesai, kerjakan **Simulasi TKA** satu per satu dengan waktu sungguhan. Mulailah dari Paket 1, yaitu soal asli TKA 2025.
5. Soal asli yang dibahas di sub bab hanya dibedah cara berpikirnya, tanpa membuka kunci, supaya Simulasi 1 tetap berguna sebagai simulasi.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bagian B · Materi

Bagian ini memuat 4 bab. Tiap bab diakhiri kuis; kerjakan berurutan.

Bab 1 · Pancasila

PPKN-B1

Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat:

- menalar proses perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa
- membedakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional dalam kasus
- menentukan nilai sila yang diterapkan atau dilanggar beserta alasannya, termasuk keterkaitan antarsila
- menilai pelaksanaan HAM dan demokrasi Pancasila serta solusi atas tantangan penerapan nilai Pancasila di era global

Peta bab

Sub bab	Judul
1.1	Perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa
1.2	Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum
1.3	Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional
1.4	Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila
1.5	HAM dan demokrasi Pancasila
1.6	Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi

Bab 1 di LMS

Buka seluruh latihan bab ini di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-B1

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.1 · Perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa

PPKN-1.1

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi resmi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis sejarah perumusan Pancasila**. Soal tidak akan menanyakan "siapa yang berpidato pada 1 Juni 1945". Soal akan memberi potongan sejarah, lalu meminta kamu menalar: **mengapa** Pancasila disebut hasil kesepakatan, **apa pelajaran** dari cara para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan, dan **bagaimana** pelajaran itu dipakai dalam masalah hari ini.

Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi ada di kisi-kisi dan di contoh soal resmi Pusmendik. Contoh resmi itu menggambarkan perdebatan dasar negara pada awal kemerdekaan, lalu menanyakan alasan Pancasila akhirnya dipilih. Jawabannya bukan fakta hafalan, melainkan penalaran: Pancasila mampu **menyatukan pandangan semua golongan secara adil**.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai rangkaian musyawarah dan kompromi;
- menunjukkan bukti bahwa Pancasila adalah kesepakatan bangsa, bukan gagasan satu tokoh atau satu golongan;
- menerapkan cara para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan pada kasus masa kini.

◆ KONSEP INTI

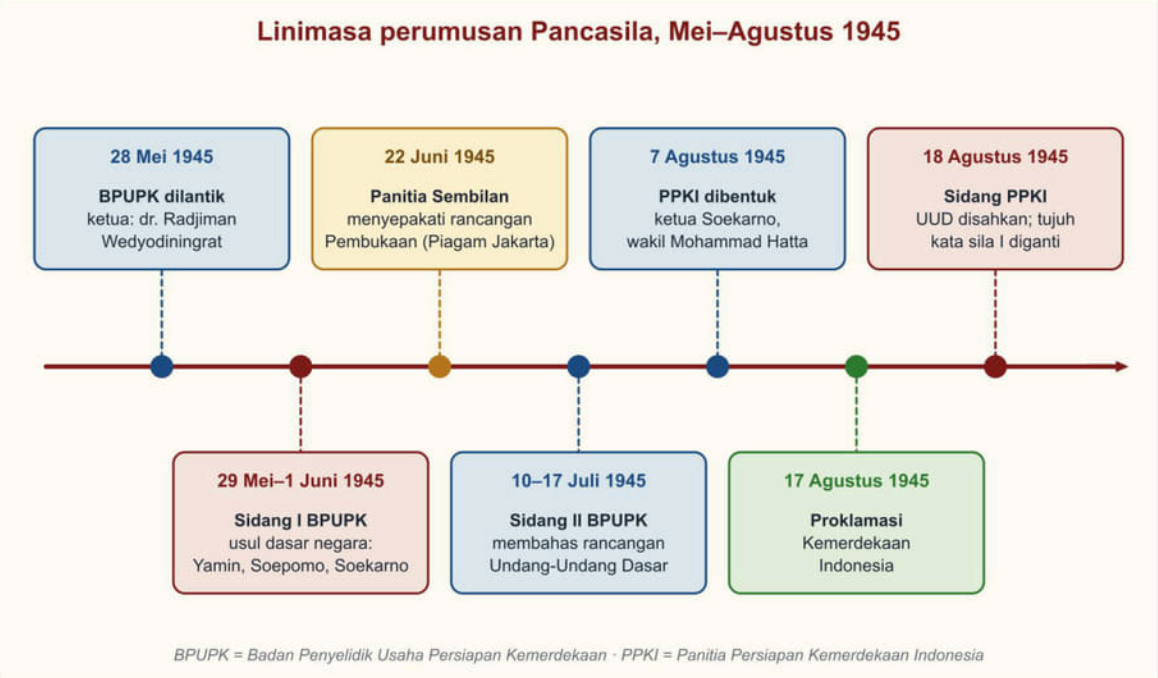
Setiap rumah berdiri di atas fondasi. Fondasi tidak terlihat ketika rumah sudah jadi, tetapi menentukan apakah rumah itu kokoh. Negara juga membutuhkan fondasi, yaitu **dasar negara**: nilai-nilai pokok yang menjadi pegangan untuk menyusun undang-undang dasar, membentuk pemerintahan, dan mengatur kehidupan bersama. Pada pertengahan 1945, para pendiri bangsa harus menyepakati fondasi itu dalam waktu yang sangat singkat, padahal mereka datang dari latar agama, suku, daerah, dan pandangan politik yang berbeda. Cara mereka mencapai kesepakatan itulah yang menjadi inti sub bab ini.

1. Latar: negara yang akan merdeka membutuhkan dasar

Menjelang akhir Perang Dunia II, kedudukan Jepang di Asia makin terdesak. Pemerintah pendudukan Jepang di Jawa lalu membentuk **Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)**, dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Badan ini dilantik pada **28 Mei 1945** dan diketuai **dr. Radjiman Wedyodiningrat**. Anggotanya tokoh-tokoh dari berbagai golongan: pemimpin pergerakan kebangsaan, ulama dan pemimpin organisasi Islam, ahli hukum, serta wakil golongan peranakan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada sidang adalah pertanyaan paling mendasar: di atas dasar apa negara Indonesia merdeka akan didirikan? Soekarno kemudian menyebut dasar itu dengan istilah Belanda *philosophische grondslag*, artinya fondasi filsafat, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya tempat sebuah negara dibangun. Seluruh rangkaian peristiwa sesudahnya, dari sidang pertama sampai pengesahan pada 18 Agustus 1945, dapat kamu ikuti pada linimasa di Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Linimasa perumusan Pancasila dari pelantikan BPUPK (28 Mei 1945) sampai sidang PPKI (18 Agustus 1945). Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Sidang pertama BPUPK: gagasan masih milik perorangan

Sidang pertama BPUPK berlangsung pada **29 Mei–1 Juni 1945** di gedung yang pada masa Belanda dipakai *Volksraad* (dewan rakyat) dan pada masa Jepang disebut gedung *Chuo Sangi In*, di Jalan Pejambon, Jakarta. Gedung itu kini bernama **Gedung Pancasila** dan berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri (lihat Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta, tempat sidang pertama BPUPK pada 29 Mei–1 Juni 1945. Sumber: Rochelimit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Selama empat hari itu, sejumlah anggota menyampaikan usulan dasar negara. **Muhammad Yamin** berbicara pada 29 Mei dengan gagasan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. **Soepomo** pada 31 Mei menekankan negara persatuan yang berasaskan kekeluargaan, yaitu negara yang tidak memihak golongan terkuat, melainkan mengatasi semua golongan. Pada **1 Juni 1945**, **Soekarno** mengusulkan lima dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ia menamai kelima dasar itu **Pancasila** (*panca* = lima, *sila* = dasar) dan menyebut bahwa intinya dapat diperas menjadi satu kata: **gotong royong**.

Perhatikan dua hal. Pertama, urutan dan bunyi usulan berbeda-beda. Kedua, gagasan pokoknya **berulang**: kebangsaan atau persatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan atau musyawarah, serta kesejahteraan atau keadilan muncul dalam usulan tokoh yang berbeda. Pengulangan itu menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak diciptakan satu orang, tetapi sudah hidup dalam masyarakat Indonesia dan tinggal dirumuskan bersama. Meskipun pidato 1 Juni disambut hangat, sidang pertama berakhir **tanpa rumusan yang disepakati**. Pada

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

tahap ini, gagasan masih milik perorangan.

3. Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta: kompromi pertama

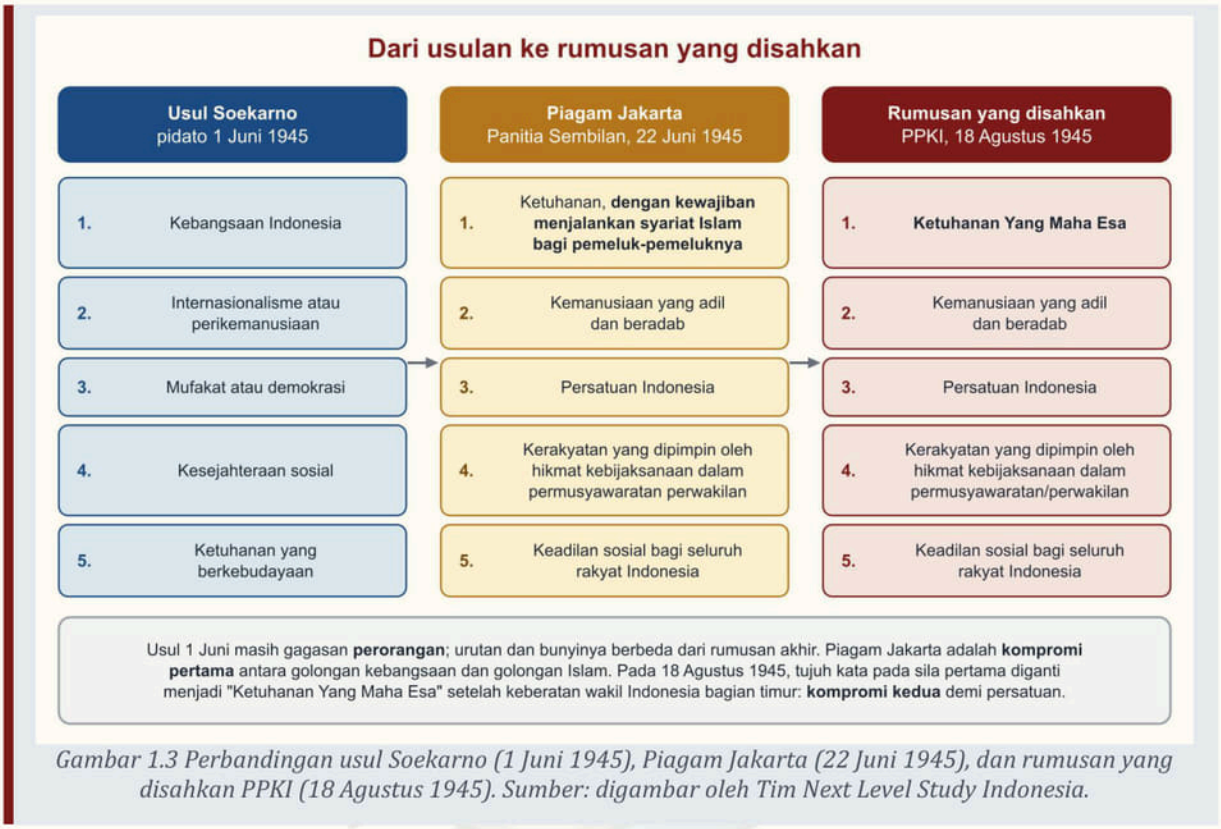
Perbedaan paling tajam di BPUPK terjadi antara dua golongan besar. **Golongan kebangsaan** menginginkan negara yang berdiri di atas persatuan seluruh rakyat tanpa mengikatkan diri pada satu agama. **Golongan Islam** menginginkan agar ajaran Islam, agama mayoritas penduduk, mendapat tempat dalam dasar negara. Keduanya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan; yang berbeda adalah cara menata negara sesudahnya.

Untuk menjembatani perbedaan itu dibentuk panitia kecil beranggotakan sembilan orang, yang dikenal sebagai **Panitia Sembilan**. Ketuanya Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta. Anggota lainnya mewakili kedua golongan: A.A. Maramis, Achmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin dari golongan kebangsaan; Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Wahid Hasjim dari golongan Islam. Pada **22 Juni 1945**, panitia ini menyepakati rancangan pembukaan undang-undang dasar yang kemudian dikenal sebagai **Piagam Jakarta**.

Piagam Jakarta memuat lima dasar dengan urutan yang hampir sama dengan rumusan sekarang. Bedanya ada pada sila pertama: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tujuh kata sesudah "Ketuhanan" itu adalah **jalan tengah**: golongan Islam memperoleh pengakuan atas aspirasinya, sedangkan golongan kebangsaan memperoleh rumusan yang tidak menjadikan Indonesia negara agama. Inilah kompromi pertama. Rancangan ini dibawa ke sidang kedua BPUPK (10–17 Juli 1945) yang membahas rancangan undang-undang dasar. Di sana pun sudah ada anggota yang menyatakan keberatan terhadap tujuh kata itu, antara lain Johannes Latuharhary dari Maluku. Bandingkan ketiga rumusan pada Gambar 1.3.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 1.3 Perbandingan usul Soekarno (1 Juni 1945), Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dan rumusan yang disahkan PPKI (18 Agustus 1945). Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. 18 Agustus 1945: kompromi kedua demi persatuan

Pada 7 Agustus 1945 dibentuk **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)**, diketuai Soekarno dengan wakil Mohammad Hatta. Sepuluh hari kemudian, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Negara sudah lahir, tetapi belum mempunyai undang-undang dasar yang disahkan.

Pada **17 Agustus sore**, menurut catatan Hatta, ia menerima kabar dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) yang menguasai wilayah Indonesia bagian timur. Wakil-wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah itu keberatan terhadap tujuh kata dalam Piagam Jakarta, karena merasa rumusan itu hanya mengikat sebagian warga negara. Bila tujuh kata itu tetap ada, mereka lebih suka berdiri di luar Republik. Ancamannya jelas: negara yang baru sehari merdeka bisa kehilangan sebagian wilayahnya.

Pagi **18 Agustus 1945**, sebelum sidang PPKI dibuka, Hatta mengajak bicara beberapa tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan. Pembicaraannya tidak mudah; Ki Bagus Hadikusumo termasuk yang paling kuat mempertahankan rumusan Piagam Jakarta. Namun, demi keutuhan bangsa, para tokoh itu akhirnya **bersedia** mengganti tujuh kata tersebut. Sila pertama menjadi "**Ketuhanan Yang Maha Esa**". Dalam sidangnya hari itu, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar beserta Pembukaannya, yang di dalam alinea keempatnya memuat lima sila Pancasila, serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Peristiwa ini sering disalahpahami sebagai kekalahan satu golongan. Kenyataannya terbalik. Golongan yang paling besar justru bersedia mengurangi keinginannya setelah **mendengar keberatan** golongan yang lebih kecil, karena **persatuan** bangsa yang baru merdeka lebih penting. Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" tetap menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama dan tetap diterima umat semua agama. Inilah kompromi kedua, dan inilah yang membuat Pancasila layak disebut milik seluruh bangsa.

5. Pancasila sebagai kesepakatan bangsa

Dari rangkaian peristiwa itu kita dapat memahami arti **kesepakatan bangsa** (*konsensus*), yaitu persetujuan bersama yang dicapai melalui musyawarah oleh pihak-pihak yang berbeda. Ada tiga bukti bahwa Pancasila adalah kesepakatan, bukan gagasan satu tokoh:

1. **Banyak pihak terlibat.** Rumusan akhir disusun dan disahkan oleh badan yang beranggotakan wakil berbagai golongan dan daerah, bukan ditetapkan satu orang.
2. **Ada pihak yang bersedia mengalah.** Kompromi terjadi dua kali, dan pada kompromi kedua yang mengalah adalah golongan yang besar.
3. **Rumusannya berbeda dari setiap usulan awal.** Rumusan 18 Agustus 1945 bukan salinan pidato siapa pun; urutan dan bunyinya hasil olahan bersama.

Karena Pancasila adalah kesepakatan dasar, bangsa Indonesia **menjaganya**. Ketika mengubah UUD pada 1999–2002, MPR lebih dahulu bersepakat untuk **tidak mengubah Pembukaan**, tempat Pancasila dirumuskan. Kebutuhan zaman ditampung lewat undang-undang dan kebijakan, bukan dengan menambah, mengurangi, atau mengganti sila.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Mengubah sila sama dengan membuka kembali kesepakatan dasar yang dulu dicapai dengan susah payah.

6. Hari Lahir Pancasila dan pelajaran untuk hari ini

Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani **Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016** yang menetapkan 1 Juni sebagai **Hari Lahir Pancasila** dan sebagai hari libur nasional. Bagian pertimbangan Keppres itu menjelaskan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, berkembang menjadi rumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, lalu disepakati sebagai rumusan final pada 18 Agustus 1945. Jadi, negara sendiri memandang ketiga tanggal itu sebagai **satu proses**. Tanggal 1 Juni adalah hari lahir istilah dan gagasannya; rumusan yang berlaku adalah rumusan 18 Agustus 1945.

Pelajaran dari proses itu tetap berguna di mana pun orang harus mengambil keputusan bersama, dari rapat OSIS sampai sidang parlemen. Para pendiri bangsa mewariskan tiga sikap: **mendengar keberatan** pihak lain, termasuk pihak yang jumlahnya kecil; **bersedia mengurangi keinginan sendiri** agar tercapai rumusan yang diterima semua; dan **mendahulukan persatuan** tanpa menghapus perbedaan. Ketiganya tidak sama dengan menunda keputusan tanpa batas, dan tidak sama dengan menyerahkan semuanya kepada suara terbanyak.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Aturan pekan olahraga pelajar

Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.

Pada 2026, wakil OSIS dari lima kecamatan di Kabupaten Sukadana (fiktif) menyusun aturan bersama Pekan Olahraga Pelajar. Rancangan aturan memuat butir "semua pertandingan final digelar di kecamatan kota". Wakil dua kecamatan pesisir yang kecil keberatan: siswa mereka harus menempuh perjalanan tiga jam, sehingga mereka mengancam tidak ikut. Wakil kecamatan kota, yang jumlahnya paling banyak, mengusulkan empat cara. Cara manakah yang paling meniru sikap PPKI pada 18 Agustus 1945?

1. Pemungutan suara segera, karena kecamatan kota pasti menang dan rapat cepat selesai.
2. Menunda pekan olahraga ke tahun depan sampai semua pihak setuju dengan sendirinya.
3. Meminta kecamatan pesisir menerima aturan karena jumlah siswanya lebih sedikit.
4. Sebelum rapat pengesahan, ketua forum mengajak wakil kecamatan kota mendengar alasan keberatan, lalu butir itu diganti menjadi "lokasi final dibagi bergiliran di setiap kecamatan".

Langkah menilai:

1. **Kenali peristiwa sejarah yang menjadi ukuran.** Pada 18 Agustus 1945, golongan besar mendengar keberatan golongan yang lebih kecil, lalu bersedia mengubah rumusan demi persatuan.
2. **Petakan pihaknya.** Kecamatan kota = pihak besar; kecamatan pesisir = pihak kecil yang keberatan; yang dipertaruhkan = keikutsertaan semua kecamatan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. **Uji setiap cara.** Cara 1 memenangkan mayoritas tanpa mendengar. Cara 2 menunda tanpa batas, padahal PPKI tetap mengambil keputusan pada hari itu juga. Cara 3 memaksa pihak kecil mengalah, kebalikan dari peristiwa 1945. Cara 4 memuat ketiga sikap: mendengar, pihak besar bersedia mengalah, dan semua pihak tetap ikut.

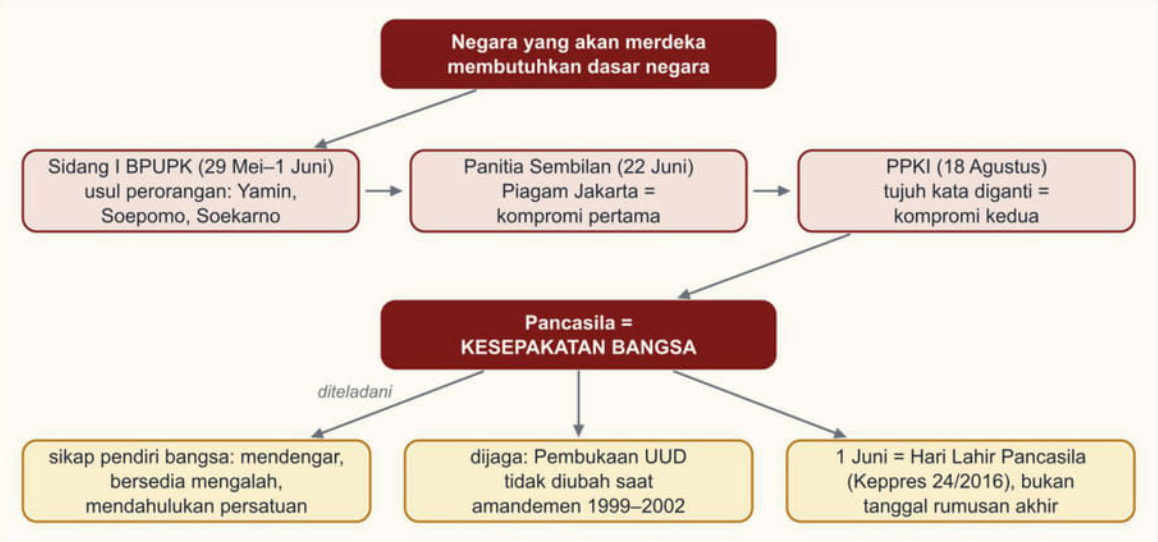
Jawaban: cara 4, karena pihak yang besar mendengar keberatan pihak kecil dan bersedia mengubah rumusan agar seluruh kecamatan tetap bersatu, seperti yang terjadi pada 18 Agustus 1945.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Perumusan Pancasila melewati tiga tahap: usulan perorangan di Sidang I BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945), kompromi pertama dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dan kompromi kedua dalam sidang PPKI (18 Agustus 1945).
- Tujuh kata pada sila pertama diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" setelah keberatan wakil Indonesia bagian timur; golongan besar bersedia mengalah demi persatuan.
- Bukti kesepakatan: banyak pihak terlibat, ada yang bersedia mengalah, dan rumusan akhir berbeda dari setiap usulan awal.
- Kesepakatan itu dijaga: Pembukaan UUD tidak diubah dan sila tidak ditambah atau diganti.
- 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila (Keppres 24/2016); rumusan yang berlaku adalah rumusan 18 Agustus 1945.

Bagan pada Gambar 1.4 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.4 Peta konsep perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Temukan peristiwa sejarah di stimulus.** Soal hampir selalu menuliskannya. Kamu tidak perlu mengingat tanggal.
2. **Tanyakan apa maknanya.** Siapa yang terlibat? Siapa yang mengalah? Apa yang didahulukan?
3. **Bila soal menanyakan bukti kesepakatan**, cari tahap yang menunjukkan **banyak pihak** terlibat dan **ada pihak yang bersedia mengalah**. Usulan satu tokoh, sepenting apa pun, tidak membuktikan kesepakatan.
4. **Bila soal membawa kasus masa kini**, cari pilihan yang meniru **cara** para pendiri bangsa: mendengar, berkompromi, mendahulukan persatuan.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Satu tokoh dianggap pemilik Pancasila.** Pilihan yang menonjolkan siapa yang pertama memperkenalkan istilah "Pancasila" tidak membuktikan kesepakatan.
- **Kompromi dianggap kekalahan.** "Golongan Islam menolak Pancasila" atau "kelompok kecil harus mengalah kepada mayoritas" adalah salah tafsir. Pada 1945, justru kelompok yang kuat bersedia menyesuaikan diri.
- **Mayoritas atau penundaan disangka meneladani pendiri bangsa.** Pemungutan suara cepat yang dimenangkan kelompok besar, atau menunda keputusan tanpa batas, bukan cara 18 Agustus 1945.
- **Ideologi terbuka disalahartikan.** "Karena terbuka, silanya boleh ditambah." Keterbukaan Pancasila ada pada penjabarannya, bukan pada rumusan sila.

> Contoh salah tafsir: seorang siswa menulis, "Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, jadi rumusan Pancasila sama dengan pidato Soekarno." Ia lupa bahwa rumusan yang disahkan berbeda urutan dan bunyinya, dan bahwa pengesahannya melalui Panitia Sembilan serta PPKI. Hari lahir sebuah istilah tidak sama dengan rumusan yang disepakati.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Petakan pihak besar dan kecil; pilih langkah ketika pihak besar mendengar lalu bersedia menyesuaikan diri demi persatuan.

►. Pada 2026, enam kampung adat di Lembah Saruni menyusun aturan bersama untuk menjaga hutan di hulu sungai. Kampung terbesar ingin seluruh aturan mengikuti hukum adatnya. Dua kampung kecil yang adatnya berbeda keberatan dan mengancam tidak ikut menjaga hutan.
Langkah yang paling meneladani sikap para perumus Pancasila pada 18 Agustus 1945

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. kampung terbesar menetapkan aturannya sendiri karena jumlah warganya paling banyak di lembah itu
B. pembahasan ditunda sampai kedua kampung kecil bersedia menerima hukum adat kampung terbesar
C. semua hukum adat dihapus, lalu diganti aturan baru yang disusun konsultan dari luar lembah
D. kampung terbesar mendengar keberatan itu, lalu mengubah butir yang hanya mengikat adatnya
E. kedua kampung kecil diminta mengalah karena keutuhan kesepakatan lebih penting daripada adatnya

Pembahasan **Kunci: D**

Konsep: pada 18 Agustus 1945, golongan yang besar **mendengar keberatan** wakil Indonesia bagian timur, lalu **bersedia mengubah** tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar seluruh wilayah tetap bersatu. Tiga sikap yang diwariskan: mendengar pihak yang kecil, bersedia mengurangi keinginan sendiri, dan mendahulukan persatuan tanpa menghapus perbedaan.

Langkah 1 – Petakan pihaknya. Kampung terbesar = pihak besar; dua kampung kecil = pihak kecil yang keberatan; yang dipertaruhkan = keikutsertaan semua kampung menjaga hutan.
Langkah 2 – Cari ukuran dari peristiwa 1945. Pihak besar yang menyesuaikan diri setelah mendengar pihak kecil, dan keputusan tetap diambil.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — menang karena jumlah, tanpa mendengar keberatan; kebalikan dari sikap PPKI.
• B ✗ — menunda sambil menunggu pihak kecil menyerah; bukan kompromi, dan PPKI tidak menunda keputusannya.
• C ✗ — perbedaan "diselesaikan" dengan menghapus semua adat; persatuan tidak menuntut penyeragaman.
• D ✓ — pihak besar mendengar, lalu mengubah butir yang hanya cocok bagi adatnya agar semua kampung tetap ikut.
• E ✗ — pengorbanan dipindahkan kepada pihak kecil; pada 1945 justru golongan besar yang mengalah.

Cek ulang: hanya D yang memuat ketiga sikap: mendengar, pihak besar bersedia berkompromi, dan semua pihak tetap bersatu.

Jawaban: D.

Jebakan: E memakai kata "keutuhan" sehingga terdengar meneladani 1945, padahal arahnya terbalik. B tampak sabar, tetapi sebenarnya menunggu satu pihak menyerah.

✎ LATIHAN

Kerjakan tanpa melihat kunci. Untuk setiap soal, tuliskan dulu sikap pendiri bangsa yang sedang diuji: mendengar, berkompromi, atau mendahulukan persatuan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Sebuah unggahan media sosial pada 2026 menyatakan bahwa satu kelompok masyarakat paling berhak menentukan tafsir Pancasila yang benar. Alasannya, tokoh pendahulu kelompok itu ikut duduk dalam Panitia Sembilan dan ikut merumuskan Piagam Jakarta pada 1945. Unggahan itu lalu memicu perdebatan di kalangan pelajar.
Penilaian yang paling tepat terhadap klaim tersebut adalah ....

A. tepat, karena tokoh pendahulu kelompok itu memang ikut menyusun rumusan dalam Panitia Sembilan
B. keliru, karena Pancasila disepakati wakil berbagai golongan sehingga milik seluruh bangsa
C. tepat, asalkan tafsir kelompok itu kemudian disetujui dan diumumkan oleh pemerintah pusat
D. keliru, karena hanya lembaga pembinaan ideologi negara yang berhak menafsirkan Pancasila
E. keliru, karena rumusan Pancasila sepenuhnya berasal dari pidato satu tokoh pada 1 Juni 1945

2. Pada 2026, Forum Anak Kabupaten Sendang Wangi menyusun deklarasi bersama. Wakil anak dari satu kecamatan keberatan karena semua kegiatan forum dijadwalkan Minggu pagi, saat sebagian besar anggotanya beribadah. Setelah mendengar keberatan itu, wakil kecamatan lain yang jumlahnya lebih banyak bersedia memindahkan jadwal ke Sabtu sore. Deklarasi lalu disetujui wakil semua kecamatan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang pelajaran perumusan Pancasila dalam ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kesediaan wakil yang lebih banyak mengubah jadwal mirip dengan sikap golongan besar pada 18 Agustus 1945.	○	○
Karena jadwal diubah, wakil kecamatan yang jumlahnya lebih banyak dapat disebut kalah dalam forum itu.	○	○
Deklarasi itu menjadi kesepakatan bersama karena disusun dan disetujui oleh wakil semua kecamatan.	○	○

Kunci singkat: 1. B 2. 1B 2S 3B

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu menjelaskan dengan kalimatmu sendiri mengapa perubahan tujuh kata adalah bukti kesepakatan, bukan penolakan?
- Pada latihan bergaya "terapkan nilai 18 Agustus 1945", apakah kamu sudah membandingkan setiap pilihan dengan tiga sikap pendiri bangsa?
- **Yang harus kuingat:** sejarah perumusan dipakai untuk menalar cara bersepakat, bukan untuk menghafal tanggal.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.1: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.1

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.2 · Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum

PPKN-1.2

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis pentingnya Pancasila sebagai dasar negara** dalam memecahkan masalah ketatanegaraan. Soal akan memberi peristiwa seperti perdebatan amandemen, peraturan daerah yang merugikan warga, atau perkara yang belum ada aturannya, lalu menanyakan peran Pancasila di sana.

Pada soal asli 2025, kemampuan ini diuji lewat wacana mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR. Sekitar 42 % peserta menjawab benar.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan Pancasila sebagai dasar negara dari Pancasila sebagai pandangan hidup;
- menjelaskan arti "sumber segala sumber hukum" dan memakainya untuk menilai peraturan;
- menentukan jalan hukum yang tepat bila sebuah peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

◆ KONSEP INTI

Indonesia mempunyai ribuan peraturan: undang-undang tentang pendidikan, pajak, lalu lintas, sampai peraturan daerah tentang pasar dan sampah. Peraturan sebanyak itu dibuat oleh lembaga yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Agar semuanya tidak saling bertabrakan dan tetap menuju tujuan yang sama, harus ada satu ukuran bersama di atas semuanya. Ukuran itu adalah Pancasila. Sub bab ini menjelaskan bagaimana Pancasila bekerja sebagai dasar negara, bagaimana nilainya turun menjadi peraturan, dan apa yang terjadi bila sebuah peraturan menyimpang darinya.

1. Arti dasar negara

Dasar negara adalah nilai pokok yang menjadi landasan dan pedoman seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, ketika PPKI mengesahkan UUD beserta Pembukaannya. Kelima sila tercantum dalam **alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945**, yaitu kalimat panjang yang menjelaskan tujuan negara lalu menyebut dasar yang dipakai untuk mencapainya.

Sebagai dasar negara, Pancasila mengikat **penyelenggara negara**: DPR dan Presiden ketika membentuk undang-undang, pemerintah ketika membuat kebijakan, dan hakim ketika memutus perkara. Bedakan dengan Pancasila sebagai **pandangan hidup**, yaitu pedoman sikap warga dalam kehidupan sehari-hari: cara bertetangga, bermusyawarah di RT, atau

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menyelesaikan perselisihan di sekolah. Keduanya bersumber dari nilai yang sama. Yang membedakan adalah **pelaku dan kegiatannya**. Pancasila sebagai dasar negara bekerja melalui hukum dan lembaga negara; Pancasila sebagai pandangan hidup bekerja melalui kesadaran warga, tanpa paksaan aturan.

Para ahli hukum menyebut kedudukan Pancasila ini sebagai **norma fundamental negara** (*staatsfundamentalnorm*), istilah yang dipakai ahli hukum Hans Nawiasky untuk norma paling dasar dalam sebuah negara. Norma ini tidak berbentuk pasal yang mengatur perbuatan tertentu. Ia menjadi sumber, arah, dan batas bagi semua norma di bawahnya.

2. Sumber segala sumber hukum dan penjabarannya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, menegaskan kedudukan itu dalam **Pasal 2**: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara." Penjelasan pasal itu menyebut Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara, sehingga **materi muatan setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila**.

Bagaimana nilai yang umum menjadi aturan yang rinci? Melalui penjabaran bertingkat (lihat Gambar 1.5). Ambil contoh hak atas pendidikan. Pembukaan menyebut tujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa", dan sila kelima menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai itu dijabarkan dalam **Pasal 31 UUD**: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal itu dijabarkan lagi dalam **UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, lalu dalam peraturan pemerintah tentang wajib belajar dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Makin ke bawah, aturannya makin rinci: dari "mencerdaskan kehidupan bangsa" menjadi jadwal penerimaan siswa baru di sebuah kabupaten.

Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



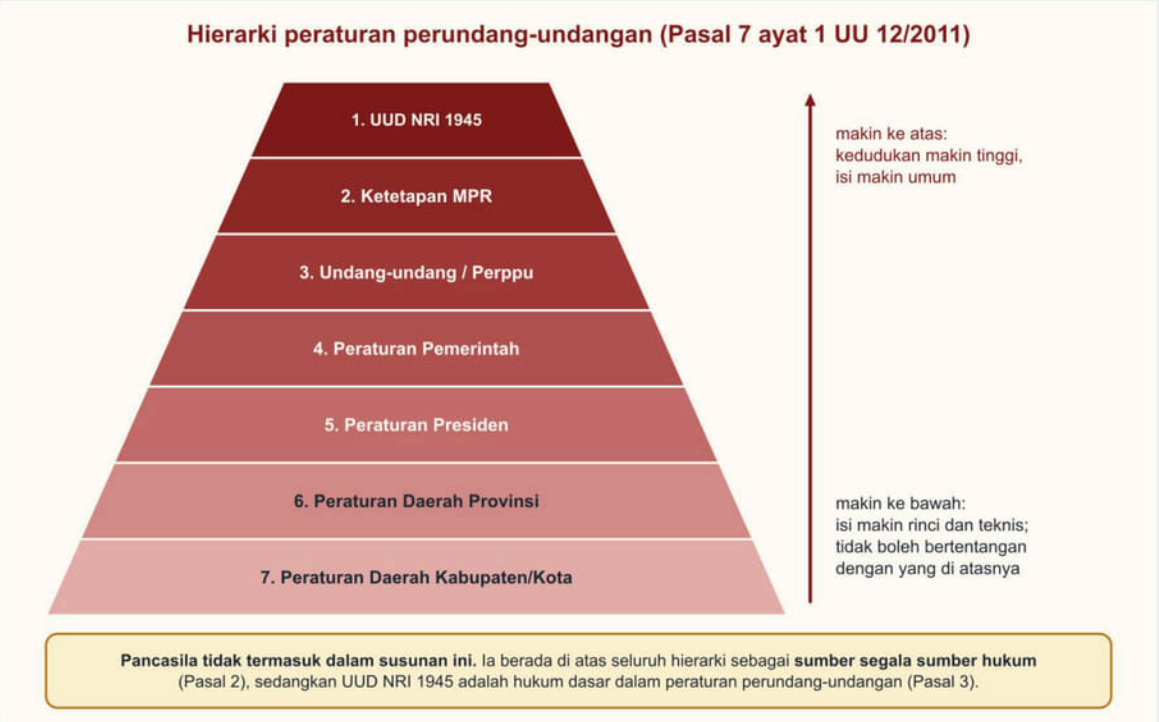
Gambar 1.5 Nilai Pancasila dijabarkan bertingkat dari UUD sampai aturan pelaksana, dengan contoh hak atas pendidikan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Penjabaran itu juga tampak dalam cara undang-undang dibuat. Setiap rancangan undang-undang disertai naskah akademik yang memuat **landasan filosofis**, yaitu alasan bahwa aturan itu dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD. Bagian "Menimbang" di awal undang-undang biasanya diawali pertimbangan semacam ini. Jadi, Pancasila tidak hanya diucapkan dalam upacara; ia menjadi alasan pertama mengapa sebuah aturan dibuat.

3. Hierarki peraturan perundang-undangan

Karena peraturan disusun bertingkat, harus jelas mana yang lebih tinggi. **Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011** menyusun jenis dan **hierarki** (urutan tingkat) peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu); (4) peraturan pemerintah; (5) peraturan presiden; (6) peraturan daerah provinsi; (7) peraturan daerah kabupaten/kota. Susunan ini digambarkan sebagai piramida pada Gambar 1.6.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 1.6 Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011; Pancasila berada di atas seluruh susunan sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Prinsip yang mengikat piramida itu sederhana: **peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi**. Perhatikan pula bahwa Pancasila **tidak** dimasukkan ke dalam daftar Pasal 7. Ia tidak sejajar dengan UUD atau undang-undang, tetapi berada di atas seluruh susunan sebagai sumbernya. Ada dua kaidah lain yang sering dipakai. Pertama, bila dua peraturan **setingkat** mengatur hal yang sama secara berbeda, yang berlaku umumnya peraturan yang **lebih baru**. Kedua, tingkat sebuah peraturan ditentukan oleh **jenisnya** dalam hierarki, bukan oleh seberapa berkuasa pejabat yang menandatanganinya.

4. Jalan hukum bila peraturan bertentangan

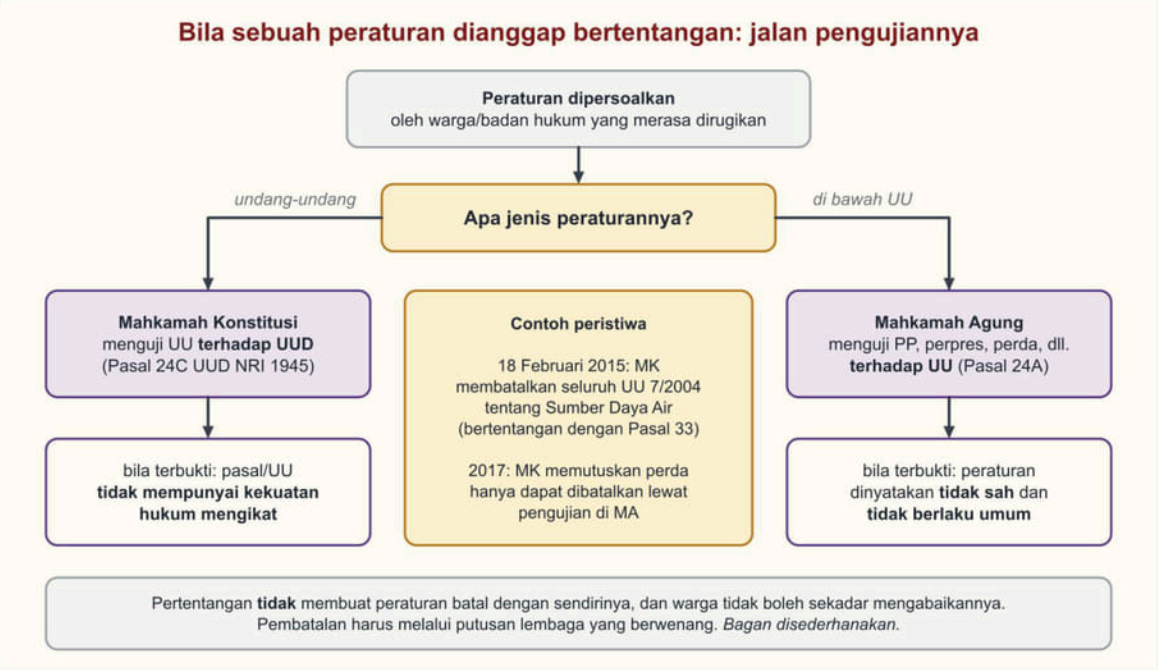
Pertentangan tidak membuat peraturan batal dengan sendirinya. Warga juga tidak boleh sekadar mengabaikan aturan yang dianggapnya salah. Harus ada **pengujian** (*judicial review*) oleh lembaga yang berwenang, dan jalannya ditentukan oleh jenis peraturan yang dipersoalkan (lihat Gambar 1.7).

- **Undang-undang** yang dianggap bertentangan dengan UUD diuji ke **Mahkamah Konstitusi** (Pasal 24C UUD NRI 1945). Bila permohonan dikabulkan, pasal atau seluruh undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Peraturan di bawah undang-undang**, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah, yang dianggap bertentangan dengan undang-undang diuji ke **Mahkamah Agung** (Pasal 24A).

Siapa yang boleh mengajukan pengujian? Bukan sembarang orang yang tidak setuju. Pemohon harus menunjukkan bahwa haknya **dirugikan** oleh aturan itu, misalnya warga

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

yang terkena larangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum seperti organisasi kemasyarakatan. Syarat ini disebut **kedudukan hukum** (*legal standing*). Dengan syarat itu, pengadilan memeriksa kerugian yang nyata, bukan sekadar perbedaan selera. Jalan ini terbuka bagi siapa saja yang dirugikan, termasuk warga biasa, sehingga pengujian peraturan juga menjadi cara rakyat ikut menjaga agar hukum tetap sejalan dengan Pancasila.



Gambar 1.7 Jalan pengujian peraturan yang dianggap bertentangan: undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Dua peristiwa nyata memperlihatkan cara kerja jalan ini. Pada **18 Februari 2015**, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan **seluruh** UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Permohonan diajukan antara lain oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menilai undang-undang itu membuka jalan bagi penguasaan air oleh swasta. MK menilai undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD, terutama amanat Pasal 33 bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, MK memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sampai undang-undang baru dibentuk. Di sini terlihat nilai keadilan sosial bekerja melalui jalur hukum: undang-undang yang sudah disetujui DPR dan Presiden pun dapat gugur bila menyimpang.

Peristiwa kedua menyangkut peraturan daerah. Undang-undang pemerintahan daerah sempat memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur untuk membatalkan perda. Melalui putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 (diucapkan **4 April 2017**) dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 (diucapkan **14 Juni 2017**), MK menyatakan wewenang itu tidak berlaku lagi, karena menguji perda terhadap undang-undang adalah wewenang Mahkamah Agung. Sejak itu, perda yang sudah berlaku hanya dapat dibatalkan melalui pengujian di MA, sementara pemerintah pusat masih dapat mengawasi rancangan perda

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

sebelum disahkan.

5. Pancasila sebagai batu uji perubahan dan sebagai pedoman hakim

Pancasila juga bekerja ketika aturan belum ada atau sedang diperdebatkan. Pertama, **hakim tidak boleh menolak perkara** dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim justru wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Nilai-nilai yang digali itu bersumber dari Pancasila.

Kedua, setiap usul mengubah aturan ketatanegaraan, misalnya usul mengubah cara memilih pemimpin, perlu ditimbang dengan nilai Pancasila. Pertanyaannya bukan "siapa yang paling kuat mendukung usul itu", melainkan "apakah perubahan itu tetap menjamin kedaulatan rakyat, permusyawaratan yang sehat, dan keadilan bagi semua warga?". Dengan cara ini, Pancasila mencegah perubahan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Inilah makna Pancasila sebagai dasar negara: bukan perangkat teknis milik satu lembaga, melainkan ukuran bagi semua lembaga.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Perda jam malam pelajar

Kasus disusun untuk contoh; daerah dan tokoh fiktif.

Pada 2026, DPRD dan Bupati Kabupaten Wanasari (fiktif) mengesahkan peraturan daerah yang melarang semua pelajar berada di luar rumah pukul 20.00–05.00 tanpa pengecualian, termasuk pulang les, bekerja membantu orang tua di pasar malam, atau mengikuti kegiatan ibadah. Pelajar yang melanggar tiga kali diancam dikeluarkan dari sekolah negeri. Seorang orang tua bernama Bu Ratih menilai perda itu merampas hak anaknya. Ia bertanya: aturan itu bertentangan dengan apa, ke mana diuji, dan nilai Pancasila apa yang menjadi ukurannya?

1. **Tentukan jenis aturannya.** Yang dipersoalkan adalah **peraturan daerah kabupaten**, tingkat ketujuh dalam hierarki Pasal 7.
2. **Tentukan aturan yang lebih tinggi.** Ancaman dikeluarkan dari sekolah menghalangi hak atas pendidikan yang dijamin Pasal 31 UUD dan dijabarkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional serta undang-undang perlindungan anak. Karena perda berada di bawah undang-undang, ukurannya adalah **undang-undang** tersebut.
3. **Tentukan jalannya.** Perda diuji terhadap undang-undang ke **Mahkamah Agung** (Pasal 24A). Bukan ke MK, karena MK menguji undang-undang terhadap UUD. Bupati atau gubernur juga tidak dapat membatalkan perda yang sudah berlaku sejak putusan MK tahun 2017; DPRD dan Bupati dapat mengubahnya sendiri, tetapi itu jalan politik, bukan pengujian hukum.
4. **Tentukan nilai Pancasila yang menjadi ukuran.** Hukuman yang memutus pendidikan karena pelanggaran jam malam tidak sebanding dan merendahkan martabat anak (sila kedua). Larangan tanpa pengecualian juga mengabaikan kebutuhan pelajar yang harus

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

bekerja atau beribadah, sehingga tidak adil bagi mereka (sila kelima). Menjaga keamanan pelajar adalah tujuan yang baik; yang bermasalah adalah caranya.

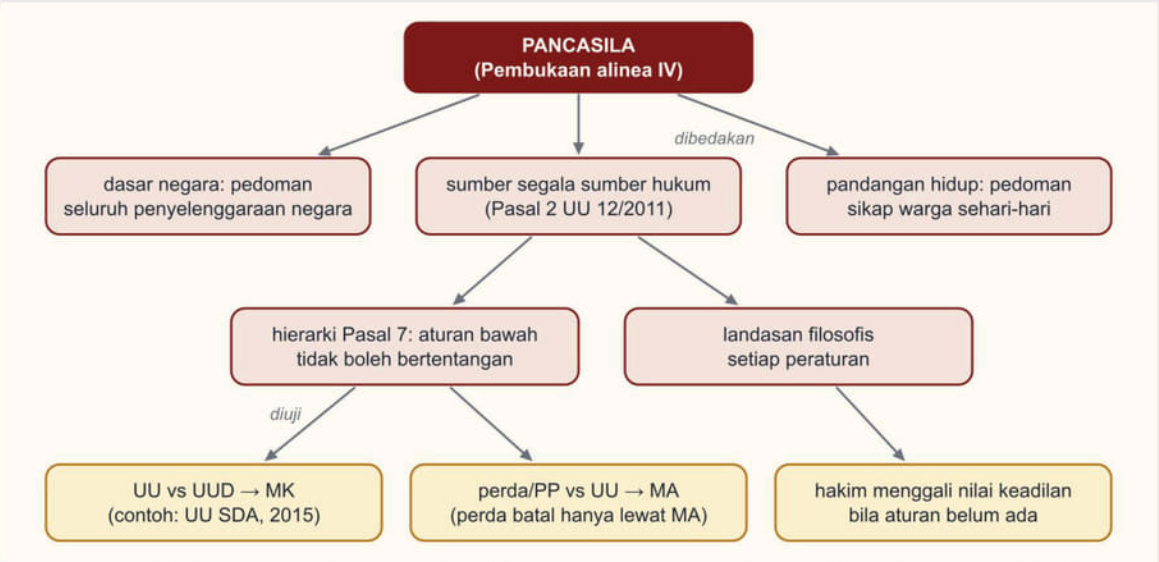
Jawaban: perda itu dapat diuji ke Mahkamah Agung karena diduga bertentangan dengan undang-undang yang menjamin hak pendidikan dan perlindungan anak, dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai ukuran filosofisnya.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Pancasila sebagai dasar negara mengikat penyelenggara negara; sebagai pandangan hidup menuntun sikap warga sehari-hari.
- Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU 12/2011); nilainya dijabarkan bertingkat dan menjadi landasan filosofis setiap peraturan.
- Hierarki Pasal 7: UUD, Tap MPR, UU/perppu, PP, perpres, perda provinsi, perda kabupaten/kota. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- Pengujian: UU terhadap UUD ke MK; peraturan di bawah UU terhadap UU ke MA. Pertentangan tidak membatalkan aturan dengan sendirinya.
- Hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat bila aturan belum lengkap.

Bagan pada Gambar 1.8 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.8 Peta konsep Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan pelaku dan jenis aturannya.** Apakah yang dipersoalkan undang-undang, perda, atau keputusan hakim? Fungsi Pancasila ditentukan oleh **siapa pelakunya dan apa kegiatannya**, bukan oleh kemiripan ceritanya.
2. **Tentukan nilai Pancasila yang dipertaruhkan.** Hak siapa yang terancam? Nilai keadilan, kemanusiaan, atau kedaulatan rakyat?
3. **Pilih pilihan yang benar dari dua sisi**: lembaganya tepat **dan** alasannya tepat.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Pancasila disempitkan menjadi alat satu lembaga.** Pancasila adalah dasar dan sumber nilai bagi seluruh penyelenggaraan negara, bukan perangkat teknis milik satu cabang kekuasaan.
- **Lembaga tertukar.** MK untuk undang-undang terhadap UUD; MA untuk peraturan di bawah undang-undang. Pengecoh sering mengirim perda ke MK.
- **"Batal dengan sendirinya" atau "langsung dicabut".** Pertentangan harus diuji melalui prosedur.
- **"Sah karena disahkan wakil rakyat."** Proses yang demokratis tidak membenarkan isi yang melanggar hak warga.
- **"Pancasila hanya pedoman moral."** Justru sebagai sumber segala sumber hukum, Pancasila menjadi ukuran untuk menilai peraturan.

> Contoh salah tafsir: dalam diskusi tentang rencana mengubah aturan pemilihan kepala desa, seorang siswa berkata, "Pancasila itu urusan DPR saja." Ia lupa bahwa Pancasila menjadi dasar menimbang setiap perubahan aturan, siapa pun yang membuat dan memutuskannya.

• BEDAH SOAL ASLI

Satu soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Soalnya ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana dengan waktu sungguhan. Di sini kita membedah cara berpikirnya tanpa membuka kuncinya.

Nomor 3 (wacana pemilihan presiden oleh MPR, PG, 42 % benar). Ilustrasi menggambarkan perdebatan antara pihak yang ingin presiden kembali dipilih MPR dan pihak yang mempertahankan pemilihan langsung, disertai kekhawatiran mundurnya demokrasi. Kamu diminta menentukan **mengapa Pancasila penting** untuk memecahkan masalah itu.

- Konsep kunci: Pancasila sebagai dasar negara dan batu uji setiap perubahan ketatanegaraan (bagian 1 dan 5).
- Langkah: perhatikan bahwa soal menanyakan **pentingnya Pancasila**, bukan lembaga mana yang memutuskan → cari pilihan yang menempatkan Pancasila sebagai dasar menimbang, dengan nilai yang relevan dengan kasus (kedaulatan rakyat dan keadilan).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang terdengar resmi dan teknis, tetapi menyempitkan kedudukan Pancasila. Periksa apakah sebuah pilihan menjawab **mengapa Pancasila penting** dengan nilai yang relevan bagi kasus.

Rujukan: soal nomor 3 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tentukan jenis aturan, aturan yang lebih tinggi, lalu pilih opsi yang lembaga dan alasannya sama-sama tepat.

►. Pada 2026, Bupati Lembah Arum menerbitkan peraturan bupati yang mewajibkan siswa SD dan SMP negeri membeli seragam dan buku hanya di koperasi milik dinas pendidikan, dengan harga jauh di atas harga pasar. Banyak orang tua dari keluarga miskin keberatan karena pendidikan dasar seharusnya terjangkau.
Jalan yang paling tepat beserta alasannya untuk mempersoalkan peraturan itu adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mengajukan pengujian ke MK, karena hak atas pendidikan dijamin langsung oleh UUD NRI 1945
B. meminta kepala sekolah membatalkannya, karena sekolah paling memahami keadaan para siswanya
C. mengajukan pengujian ke MA, karena kebijakan sekolah wajib disetujui oleh seluruh orang tua
D. membiarkannya tetap berlaku, karena bupati dipilih secara langsung oleh rakyat kabupaten tersebut
E. mengajukan pengujian ke MA, karena peraturan bupati diduga bertentangan dengan undang-undang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: E**

Konsep: sebagai sumber segala sumber hukum, nilai Pancasila dijabarkan bertingkat; peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Peraturan **di bawah undang-undang** (termasuk peraturan bupati) yang dianggap bertentangan dengan undang-undang diuji ke **Mahkamah Agung** (Pasal 24A UUD NRI 1945); undang-undang terhadap UUD diuji ke **Mahkamah Konstitusi**.

Langkah 1 – Tentukan jenis aturannya. Peraturan bupati = peraturan di bawah undang-undang.
Langkah 2 – Tentukan aturan yang lebih tinggi dan nilainya. UU Sistem Pendidikan Nasional menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya; harga paksa yang mahal mengabaikan keadilan sosial (sila kelima).
Langkah 3 – Pilih opsi yang lembaga DAN alasannya tepat:
• A ✗ — alasannya benar, tetapi lembaganya keliru: MK tidak menguji peraturan bupati.
• B ✗ — kepala sekolah tidak berwenang membatalkan peraturan bupati.
• C ✗ — lembaganya benar, tetapi alasannya keliru: ukuran pengujian adalah undang-undang, bukan persetujuan semua orang tua.
• D ✗ — dipilih rakyat tidak membuat isi peraturan pasti sesuai Pancasila.
• E ✓ — lembaga tepat (MA) dan alasan tepat (bertentangan dengan undang-undang).

Cek ulang: hanya E yang benar dari dua sisi sekaligus.

Jawaban: E.

Jebakan: A dan C masing-masing benar separuh. A mengirim perkara ke lembaga yang salah; C memakai lembaga yang benar dengan alasan yang salah.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan dulu jenis peraturan atau lembaga yang terlibat sebelum memilih jawaban.

1. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada 2027, sebuah undang-undang memuat pasal yang mensyaratkan calon kepala desa harus keturunan kepala desa sebelumnya. Sejumlah warga yang ingin mencalonkan diri merasa terhalang oleh pasal itu. Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pasal itu tetap sesuai Pancasila karena undang-undangnya telah disetujui DPR dan Presiden.
☐ B. Pasal itu dapat diuji terhadap UUD melalui permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.
☐ C. Warga yang terhalang mencalonkan diri berkepentingan mengajukan pengujian pasal itu.
☐ D. Pasal itu otomatis tidak berlaku sejak warga mengajukan permohonan pengujiannya.
☐ E. Syarat keturunan bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan persamaan kedudukan warga.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Ketika menyusun rancangan peraturan daerah tentang layanan bagi penyandang disabilitas, tim penyusun di banyak daerah menelusuri dasarnya secara bertingkat: nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, lalu undang-undang tentang penyandang disabilitas. Isi rancangan kemudian dibuat lebih rinci, misalnya lebar pintu dan jalur landai di setiap kantor pelayanan.
Pernyataan yang paling tepat tentang kedudukan Pancasila dalam penyusunan itu adalah ....

A. Pancasila menjadi sumber nilai yang dijabarkan makin rinci dari UUD sampai peraturan daerah
B. Pancasila setingkat dengan UUD sehingga tercantum di puncak daftar jenis peraturan negara
C. peraturan daerah boleh langsung merujuk Pancasila tanpa memperhatikan undang-undang di atasnya
D. undang-undang lebih tinggi daripada UUD karena isinya lebih rinci dan langsung dapat dijalankan
E. peraturan daerah setara dengan undang-undang karena sama-sama disahkan oleh lembaga wakil rakyat

Kunci singkat: 1. B, C, E 2. A

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu membedakan, dengan satu contoh masing-masing, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup?
- Bila sebuah perda merugikan warga, ke lembaga mana warga mengajukan pengujian, dan mengapa bukan ke lembaga yang lain?
- **Yang harus kuingat:** periksa dua sisi pilihan — lembaganya dan alasannya.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.2: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.
next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.2

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional

PPKN-1.3

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis peran Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup, dan identitas nasional**. Ini sub bab prioritas. Dua soal asli 2025 menguji peran Pancasila dalam kasus konflik, dan keduanya termasuk soal sulit: **peran Pancasila menyeimbangkan hak dan kewajiban** (31 % benar) dan **Pancasila sebagai ideologi pemersatu** (37 % benar).

Kata kuncinya adalah **peran**. Soal tidak bertanya "apa itu ideologi terbuka". Soal memberi kasus — pedagang dan pengguna jalan, umat beragama yang berbeda, kebijakan teknologi baru — lalu menanyakan apa yang dilakukan Pancasila di kasus itu.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis untuk menjelaskan keterbukaan Pancasila;
- menjelaskan peran Pancasila sebagai pemersatu dan sebagai pedoman menyeimbangkan hak dan kewajiban;
- membandingkan Pancasila dengan ideologi lain berdasarkan **kebijakan** yang dijalankan, bukan nama ideologinya;
- mengenali tindakan yang mencerminkan identitas nasional secara tepat.

◆ KONSEP INTI

Di sub bab sebelumnya kamu melihat Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ukuran bagi hukum dan lembaga negara. Pancasila juga bekerja di tempat lain: dalam cara bangsa ini memandang masa depannya, dalam cara warga menyelesaikan benturan kepentingan sehari-hari, dan dalam cara bangsa Indonesia tampil di tengah bangsa lain. Ketiga peran itu disebut **ideologi**, **pandangan hidup**, dan **identitas nasional**. Ketiganya bersumber dari lima sila yang sama, tetapi bekerja dengan cara yang berbeda.

1. Arti ideologi dan Pancasila sebagai ideologi negara

Kata **ideologi** berasal dari bahasa Yunani *idea* (gagasan, cita-cita) dan *logos* (ilmu, ajaran). Secara sederhana, ideologi adalah **seperangkat gagasan dan nilai yang diyakini bersama** oleh suatu masyarakat, yang memberi gambaran tentang kehidupan yang dicita-citakan dan cara mencapainya. Ideologi sebuah negara menjawab pertanyaan besar: masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun, bagaimana hubungan negara dengan warganya, dan bagaimana kekayaan serta kekuasaan dibagi.

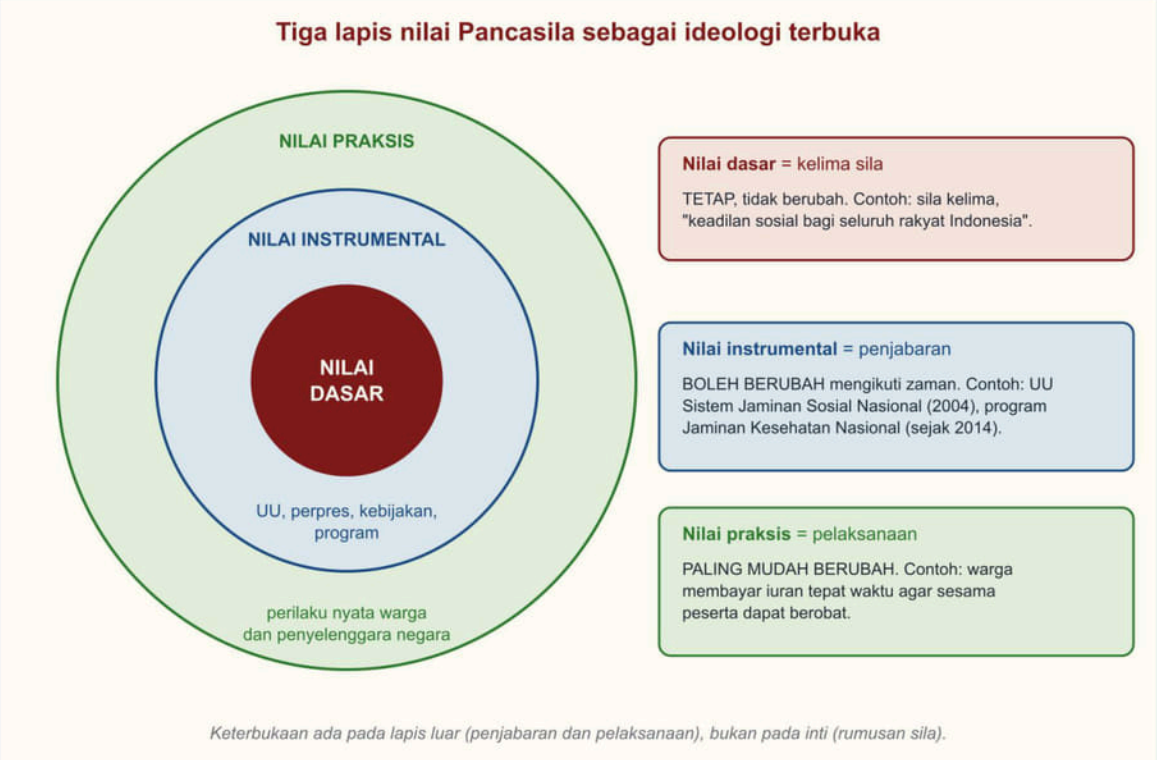
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Ideologi menjalankan setidaknya tiga fungsi. Pertama, **memberi arah**: kebijakan negara disusun menuju cita-cita yang sama. Kedua, **mempersatukan**: orang-orang yang berbeda agama, suku, dan pandangan mempunyai titik temu bersama. Ketiga, **menjadi ukuran**: tindakan pemerintah maupun warga dapat dinilai sesuai atau tidak dengan cita-cita bersama.

Fungsi pemersatu sangat penting bagi Indonesia, yang terdiri atas sangat banyak suku bangsa, enam agama yang dilayani negara serta berbagai aliran kepercayaan, dan ribuan pulau. Pancasila tidak menghapus perbedaan itu. Ia menyediakan **kesepakatan nilai bersama** tempat mayoritas, minoritas, dan pemerintah bertemu: semua mengakui Ketuhanan, menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, memutuskan dengan musyawarah, dan mengejar keadilan sosial. Karena itu, ketika terjadi konflik antarkelompok, peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu tampak pada penyelesaian yang **merangkul semua pihak** dalam kehidupan bernegara, bukan hanya membela satu kelompok.

2. Tiga lapis nilai: mengapa Pancasila disebut terbuka

Sebuah ideologi harus tetap relevan ketika zaman berubah. Pancasila dirumuskan pada 1945, ketika belum ada internet, kecerdasan buatan, atau perdagangan daring. Bagaimana nilai yang sama dapat membimbing masalah yang sama sekali baru? Jawabannya terletak pada pembedaan **tiga lapis nilai** (lihat Gambar 1.9).



Gambar 1.9 Tiga lapis nilai Pancasila: nilai dasar yang tetap, nilai instrumental yang dapat disesuaikan, dan nilai praksis dalam perilaku sehari-hari. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Nilai dasar adalah kelima sila itu sendiri. Nilai ini bersifat tetap, karena menjadi jati diri bangsa dan kesepakatan dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD. **Nilai instrumental** adalah penjabaran nilai dasar dalam bentuk undang-undang, peraturan, kebijakan, dan program. Nilai ini boleh berubah mengikuti kebutuhan zaman. **Nilai praksis** adalah pelaksanaan nyata oleh

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

warga dan penyelenggara negara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga paling cepat berubah.

Contoh rangkaian ketiga lapis itu dapat dilihat pada jaminan kesehatan. Nilai dasarnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumentalnya antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian dijalankan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014. Nilai praksisnya tampak ketika warga yang sehat membayar iuran secara rutin sehingga peserta lain yang sakit dapat berobat. Besaran iuran dan aturan layanan dapat berubah berkali-kali; yang tidak berubah adalah cita-cita keadilan sosialnya.

3. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup

Dengan tiga lapis itu, kita dapat memahami istilah **ideologi terbuka**, yaitu ideologi yang nilai dasarnya tetap tetapi penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif sesuai perkembangan zaman. Lawannya adalah **ideologi tertutup**, yaitu ideologi yang seluruh isinya dianggap mutlak, biasanya dirumuskan oleh penguasa atau satu kelompok, lalu dipaksakan kepada rakyat. Perbandingan keduanya dapat kamu lihat pada Gambar 1.10.



Gambar 1.10 Perbandingan ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup dari asal nilai, isi, cara berlaku, kedudukan warga, dan sikap terhadap kritik. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Pancasila memenuhi ciri ideologi terbuka. Nilainya **digali** dari kehidupan bangsa sendiri, seperti yang kamu pelajari dalam sejarah perumusannya. Ia dijalankan dengan musyawarah, bukan dengan paksaan. Penjabarannya terus diperbarui: misalnya, ketika kecerdasan buatan mulai dipakai dalam layanan publik, nilai kemanusiaan dan keadilan dapat dijabarkan dalam pedoman etika teknologi tanpa mengubah satu kata pun dari sila-sila Pancasila.

Namun, keterbukaan mempunyai **batas**. Nilai baru boleh diterima bila sejalan dengan nilai dasar. Keterbukaan tidak berarti semua paham asing boleh diambil langsung, tidak berarti

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

setiap orang bebas menafsirkan Pancasila sesuai kepentingannya, dan tidak berarti sila boleh ditambah atau diganti. Paham yang hendak mengganti dasar negara justru berada di luar keterbukaan itu.

4. Pancasila di antara ideologi besar dunia

Pada abad ke-20, dunia terbelah oleh dua ideologi besar. **Liberalisme** menempatkan kebebasan individu di atas segalanya. Dalam bentuk ekstremnya, negara sedikit sekali campur tangan, ekonomi diserahkan kepada pasar bebas, dan agama sepenuhnya urusan pribadi. **Sosialisme**, terutama dalam bentuk **komunisme**, menempatkan kepentingan bersama di atas individu: hak milik pribadi atas alat produksi dihapus, ekonomi direncanakan dan dikuasai negara, dan dalam praktik banyak negara komunis, kebebasan beragama serta berpendapat ditekan.

Pancasila mengambil jalan sendiri. Ia mengakui hak dan kebebasan individu, tetapi **menyeimbangkannya** dengan kepentingan bersama. Keseimbangan ini paling mudah dilihat dari **kebijakan**, bukan dari nama ideologinya. Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; dan bumi, air, serta kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, warga tetap bebas berusaha dan memiliki harta. Kebebasan itu dibatasi agar tidak merugikan orang banyak, misalnya oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Koperasi didorong sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan, dan negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Pasal 34).

Dalam soal agama, Pancasila juga tidak sama dengan keduanya. Indonesia bukan negara agama yang memberlakukan hukum satu agama bagi semua warga, tetapi juga bukan negara yang memisahkan diri sama sekali dari kehidupan beragama: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya (Pasal 29). Ringkasnya:

Kebijakan yang tampak	Kecenderungan ideologi
kebebasan individu seluas-luasnya, negara hampir tidak campur tangan, pasar menentukan semuanya	liberalisme
hak milik pribadi atas alat produksi dihapus, semua dikuasai dan direncanakan negara	komunisme
hukum satu agama berlaku bagi semua warga	negara agama
hak individu **diseimbangkan** dengan kepentingan bersama; usaha swasta boleh tetapi dibatasi; kebebasan beragama dijamin	Pancasila

5. Pancasila sebagai pandangan hidup

Pandangan hidup adalah pedoman yang dipakai seseorang atau suatu bangsa dalam bersikap, bertindak, dan memecahkan masalah sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila bekerja paling sering justru di luar gedung pemerintahan: di gang perumahan, di pasar, di sekolah, di

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

grup percakapan warga. Ia menjadi pegangan ketika kepentingan orang berbenturan.

Benturan kepentingan hampir selalu melibatkan dua pihak yang sama-sama punya hak. Pedagang berhak mencari nafkah; pejalan kaki berhak memakai trotoar dengan aman. Seorang warga berhak mengadakan hajatan; tetangganya berhak beristirahat. Pandangan hidup Pancasila menuntun penyelesaian dengan tiga ukuran. Pertama, **hak setiap pihak diakui**, sehingga tidak ada yang dikalahkan begitu saja hanya karena jumlahnya lebih sedikit atau datang belakangan. Kedua, **kewajiban dijalankan**, yaitu setiap pihak menghormati hak pihak lain. Ketiga, **penyelesaian dicari bersama** melalui musyawarah. Hasilnya bukan kemenangan satu pihak, melainkan kesepakatan yang membuat semua pihak tetap dapat menjalankan haknya.

Ciri penting lainnya: pandangan hidup bekerja **tanpa paksaan penguasa**. Bila sebuah komunitas menyusun aturan bersama yang bernilai Pancasila dan menaatinya atas kesadaran sendiri, itulah Pancasila sebagai pandangan hidup. Bila yang bekerja adalah undang-undang dan aparat negara, itu Pancasila sebagai dasar negara.

6. Pancasila dan identitas nasional

Identitas nasional adalah jati diri yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain sekaligus mempersatukan warganya. Unsurnya beragam. Ada yang ditetapkan dalam UUD, seperti bendera Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Pasal 36), lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Ada pula yang tumbuh dari budaya masyarakat. Pancasila menjadi inti identitas itu, karena nilai-nilainya merangkum cara hidup bangsa: religius, menghargai sesama, bersatu dalam perbedaan, bermusyawarah, dan bergotong royong.

Bahasa Indonesia adalah contoh identitas yang lahir dari kesepakatan. Pada **28 Oktober 1928**, para pemuda dari berbagai daerah dalam Kongres Pemuda II menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka berasal dari suku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi memilih satu bahasa bersama tanpa menghapus bahasa daerahnya.

Contoh lain adalah **batik** (lihat Gambar 1.11). Pada **2 Oktober 2009**, UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Yang diakui bukan hanya kainnya, melainkan juga teknik, simbol, dan budaya membatik yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah kemudian menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 1.11 Kain panjang batik dari Jawa, paruh pertama abad ke-20, koleksi Honolulu Museum of Art. Sumber: Hiart, Wikimedia Commons, CC0.

Sikap yang tepat terhadap identitas nasional adalah **bangga sekaligus terbuka**. Bangga berarti memakai, merawat, dan memperkenalkan budaya, bahasa, dan nilai bangsa sendiri. Terbuka berarti tetap menghormati bangsa lain dan mau belajar dari mereka. Merasa paling unggul, merendahkan budaya bangsa lain, atau menutup diri dari semua pengaruh luar bukanlah cara menjaga identitas.

7. Menjaga ideologi: pembinaan Pancasila

Ideologi yang tidak dipahami generasi berikutnya akan melemah. Karena itu, negara melakukan **pembinaan ideologi Pancasila**. Pada 2018, Presiden membentuk **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)** melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, menggantikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk setahun sebelumnya. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya antara lain membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai lembaga, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan.

Namun, pembinaan ideologi tidak hanya tugas satu badan. Pancasila sebagai ideologi terbuka hidup bila warga memahaminya, menjalankannya dalam keputusan sehari-hari, dan berani mengkritik penjabaran yang keliru melalui jalur yang sah. Di situlah ketiga peran yang dibahas di sub bab ini bertemu.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Bengkel las di gang perumahan

Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.

Pada 2026, Pak Darto membuka bengkel las di garasi rumahnya di sebuah gang perumahan. Usaha itu menjadi nafkah utama keluarganya. Pekerjaan las sering berlangsung sampai pukul 22.00; suaranya bising, dan asapnya masuk ke rumah tetangga. Bu Wulan, tetangga sebelah, merawat bayi dan ibunya yang sakit. Dalam rapat RT, muncul tiga usul: (a) bengkel ditutup

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

karena sebagian besar warga terganggu; (b) Pak Darto dibiarkan karena bekerja di tanahnya sendiri; (c) Pak Darto tetap bekerja, tetapi jam kerja dibatasi pukul 08.00–17.00, garasi diberi peredam suara dan cerobong asap, sementara warga sepakat tidak melaporkan usahanya selama kesepakatan dijalankan. Usul mana yang paling mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup?

1. **Petakan pihak dan haknya.** Pak Darto berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)). Bu Wulan dan warga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)).
2. **Uji usul (a).** Hak warga dilindungi, tetapi hak Pak Darto dikalahkan hanya karena jumlah warga lebih banyak. Ini bukan keseimbangan.
3. **Uji usul (b).** Hak Pak Darto dilindungi, tetapi kewajibannya menghormati hak tetangga diabaikan. Hak milik tidak membenarkan mengganggu orang lain.
4. **Uji usul (c).** Kedua hak diakui; setiap pihak menjalankan kewajiban (Pak Darto mengurangi gangguan, warga menghormati usahanya); keputusan diambil dalam musyawarah RT tanpa paksaan aparat.

Jawaban: usul (c), karena menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak melalui musyawarah, sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup.

Contoh 2 — Tiga usulan kebijakan ojek daring

Kasus disusun untuk contoh; daerah dan tokoh fiktif.

Pada 2027, Pemerintah Kota Sangkara (fiktif) menimbang tiga usulan aturan untuk layanan ojek daring. **Usulan P**: tarif, jumlah pengemudi, dan potongan aplikasi diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan aplikasi; pemerintah tidak campur tangan. **Usulan Q**: seluruh layanan ojek daring diambil alih menjadi usaha milik pemerintah kota, dan perusahaan swasta dilarang beroperasi. **Usulan R**: perusahaan swasta boleh beroperasi, tetapi pemerintah menetapkan batas bawah dan batas atas tarif, membatasi potongan aplikasi, mewajibkan pengemudi didaftarkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan mendorong pengemudi membentuk koperasi. Tentukan kecenderungan ideologi setiap usulan.

1. **Lihat kedudukan individu dan pasar pada Usulan P.** Kebebasan usaha tanpa batas dan negara tidak campur tangan sama sekali → kecenderungan **liberalisme**.
2. **Lihat hak milik pada Usulan Q.** Usaha swasta dihapus dan seluruh layanan dikuasai negara → kecenderungan **sosialisme/komunisme** dalam bidang ekonomi.
3. **Lihat keseimbangan pada Usulan R.** Usaha swasta tetap diakui (hak individu), tetapi dibatasi agar pengemudi dan penumpang tidak dirugikan (kepentingan bersama); jaminan sosial dan koperasi sejalan dengan Pasal 33 dan 34 → kecenderungan **Pancasila**.
4. **Periksa jebakan.** Usulan Q terdengar membela rakyat kecil, tetapi menghapus hak berusaha. Usulan P terdengar modern dan efisien, tetapi membiarkan pihak yang lemah tanpa perlindungan.

Jawaban: P cenderung liberal, Q cenderung sosialis/komunis, dan R paling sesuai dengan Pancasila karena menyeimbangkan kebebasan berusaha dengan keadilan sosial.

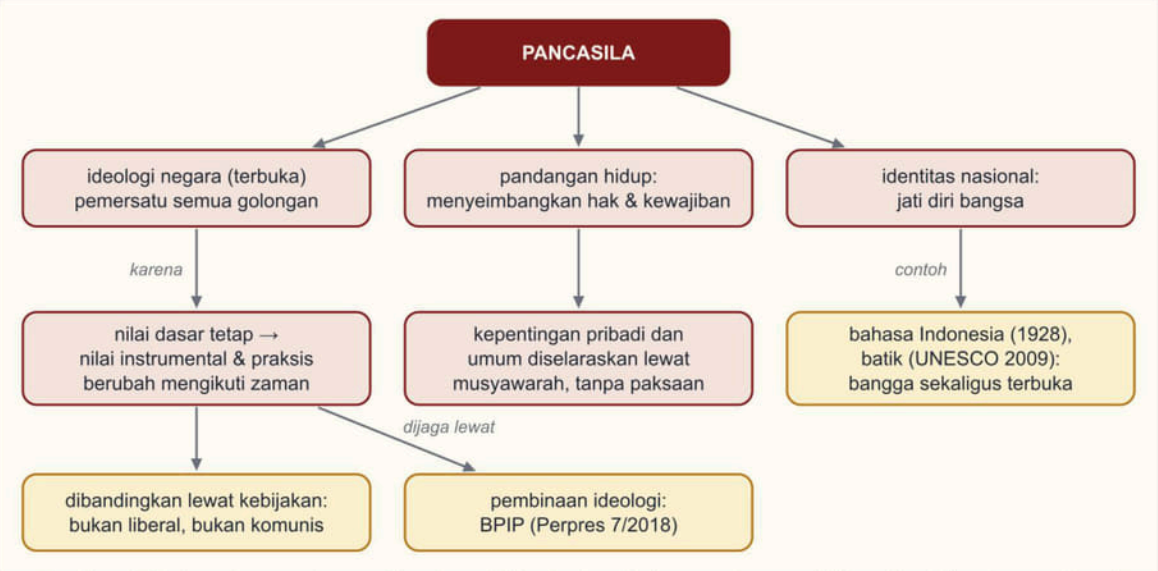
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Ideologi = gagasan dan nilai bersama yang memberi arah, mempersatukan, dan menjadi ukuran. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkul semua golongan.
- Tiga lapis nilai: nilai dasar (sila, tetap), nilai instrumental (UU, kebijakan, berubah), nilai praksis (perilaku). Keterbukaan Pancasila ada pada lapis instrumental dan praksis.
- Ideologi terbuka digali dari masyarakat dan dijalankan dengan musyawarah; ideologi tertutup mutlak dan dipaksakan. Keterbukaan Pancasila berbatas nilai dasar.
- Pancasila bukan liberalisme dan bukan komunisme: hak individu diseimbangkan dengan kepentingan bersama (Pasal 29, 33, 34).
- Pandangan hidup: semua hak diakui, kewajiban dijalankan, penyelesaian lewat musyawarah tanpa paksaan.
- Identitas nasional: bahasa Indonesia (1928), batik (UNESCO 2009); sikapnya bangga sekaligus terbuka. Pembinaan ideologi: BPIP (Perpres 7/2018).

Bagan pada Gambar 1.12 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.12 Peta konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Petakan pihak-pihak dalam kasus.** Siapa saja yang terlibat? Apa kepentingan masing-masing?
2. **Baca peran yang ditanyakan.** Pemersatu, penyeimbang hak dan kewajiban, ideologi terbuka, atau identitas? Bila sebuah kebijakan baru disebut "bukti Pancasila ideologi terbuka", periksa apakah yang berubah **penjabarannya** (benar) atau **nilai dasarnya** (salah).
3. **Pilih pilihan yang mencakup semua pihak** dan **menjawab peran itu secara langsung**. Bila soal memberi tabel kebijakan beberapa negara rekaan, nilai kecenderungan ideologinya dari kebijakan, bukan dari namanya.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Memenangkan satu pihak.** Pandangan hidup Pancasila tidak mengalahkan satu pihak begitu saja, sekalipun pihak itu lebih banyak atau lebih lama berada di tempat itu.
- **Urutan yang keliru.** Kalimat yang tampak seimbang, tetapi diam-diam mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.
- **Benar, tetapi lebih sempit dari yang ditanya.** Pilihan yang benar tentang satu bidang kehidupan, padahal peran **pemersatu** mencakup hubungan semua pihak dalam kehidupan bernegara.
- **Nilai dasar disangka boleh berubah.** "Nilai dasar disesuaikan dengan kebutuhan teknologi" adalah kebalikan dari ideologi terbuka.
- **Identitas disamakan dengan merasa paling unggul atau menutup diri.**

> Contoh salah tafsir: dalam perselisihan antara pengelola parkir dan pedagang kaki lima, seorang siswa mengusulkan "memberi pelatihan kepada pengelola parkir". Usul itu membantu, tetapi hanya mengurus satu pihak. Pandangan hidup Pancasila meminta penyelesaian yang adil bagi **semua** pihak.

• BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana. Di sini kita membedah cara berpikirnya tanpa membuka kunci.

Nomor 6 (pedagang dan pengguna jalan, PG, 31 % benar). Ilustrasi memaparkan dua kepentingan yang sama-sama sah dan saling berbenturan. Kamu diminta menentukan peran Pancasila dalam **memastikan semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan**.

- Konsep kunci: Pancasila sebagai pandangan hidup yang menyeimbangkan hak dan kewajiban (bagian 5).
- Langkah: catat kedua pihak → coret pilihan yang hanya mengurus satu pihak atau mendahulukan satu pihak → dari sisanya, pilih yang **benar-benar menyelaraskan kedua kepentingan dalam kasus**, bukan sekadar mengingatkan nilai secara umum.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang hanya mengurus satu pihak, pilihan yang urutannya diam-diam keliru, dan pilihan yang menyebut nilai yang benar secara umum. Bandingkan kata kerjanya dengan pertanyaan.

Rujukan: soal nomor 6 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 1 (masyarakat multikultural dan konflik antaragama, PG, 37 % benar). Ilustrasi menyebut konflik antaragama sebagai salah satu permasalahan masyarakat multikultural, lalu menanyakan peran Pancasila sebagai **ideologi negara yang menjadi pemersatu**.

- Konsep kunci: Pancasila sebagai titik temu semua pihak (bagian 1).
- Langkah: tanyakan "siapa saja yang harus dipersatukan dalam kehidupan bernegara?" → pilih peran yang mencakup semua pihak itu.
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang benar tentang kehidupan beragama, tetapi tidak menjelaskan peran Pancasila sebagai **ideologi pemersatu** dalam kehidupan bernegara.

Rujukan: soal nomor 1 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Kenali dua hak yang sah, tentukan siapa yang wajib mengurangi gangguan, lalu pilih penyelesaian musyawarah.

►. Pada 2026, beberapa pemuda yang menganggur di Gang Kenari membuka usaha cuci motor di tepi saluran air. Usaha itu memberi mereka penghasilan, tetapi lumpur dan air sabunnya menyumbat saluran sehingga gang tergenang setiap hujan. Warga mulai mengeluh di grup percakapan RT.
Penyelesaian yang paling mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. membiarkan usaha itu berjalan karena memberi pekerjaan bagi pemuda yang sebelumnya menganggur
B. menutup usaha itu karena sebagian besar warga di gang itu merasa dirugikan oleh genangan air
C. meminta warga membersihkan saluran secara bergiliran agar usaha para pemuda tetap lancar
D. bermusyawarah agar usaha tetap berjalan dengan bak penyaring lumpur yang dirawat para pemuda
E. melaporkan usaha itu kepada dinas terkait agar para pemiliknya segera diberi sanksi sesuai aturan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: D**

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun warga menyelesaikan benturan kepentingan dengan tiga ukuran: **hak setiap pihak diakui**, **kewajiban dijalankan** oleh pihak yang menimbulkan gangguan, dan **penyelesaian dicari bersama** lewat musyawarah tanpa paksaan aparat.

Langkah 1 – Kenali dua hak yang sah. Pemuda berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; warga berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Langkah 2 – Tentukan kewajiban. Pihak yang menimbulkan gangguan wajib menghentikan gangguannya tanpa harus kehilangan haknya.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — hanya membela hak pemuda; hak warga atas lingkungan diabaikan.
• B ✗ — warga menang karena jumlahnya banyak; hak pemuda atas pekerjaan dikorbankan.
• C ✗ — kewajiban dipindahkan kepada warga yang justru dirugikan.
• D ✓ — kedua hak terjaga, pemuda menjalankan kewajibannya, dan caranya musyawarah.
• E ✗ — langsung memakai paksaan aparat; itu jalur dasar negara, bukan penyelesaian warga atas kesadaran sendiri.

Cek ulang: hanya D yang memenuhi ketiga ukuran sekaligus.

Jawaban: D.

Jebakan: A beralasan baik (mengurangi pengangguran); C tampak gotong royong, padahal membebankan kewajiban kepada pihak yang salah.

✎ LATIHAN

Sebelum menjawab, tuliskan peran Pancasila yang ditanyakan di setiap soal.

1. Pada 2026, dua seruan ramai dibicarakan pelajar. Seruan pertama mengajak sekolah memakai bahasa asing dalam semua kegiatan, termasuk upacara, agar lulusannya siap bersaing di dunia. Seruan kedua mengajak pelajar berhenti menonton film dan mendengarkan musik dari luar negeri agar jati diri bangsa tidak luntur.
Sikap yang paling sesuai dengan Pancasila sebagai identitas nasional adalah ....

A. mendukung seruan pertama, karena kemampuan berbahasa asing paling menentukan masa depan bangsa kita
B. mendukung seruan kedua, karena budaya dari luar negeri pada dasarnya merusak kepribadian bangsa
C. menolak keduanya, karena jati diri dijaga dengan bangga pada milik sendiri tanpa menutup diri
D. menolak keduanya, karena identitas nasional cukup dijaga dengan memakai batik setiap hari Jumat
E. menyerahkan sikap kepada tiap sekolah, karena identitas nasional hanyalah soal selera pribadi

2. Negara Sentara memiliki ideologi resmi yang seluruh isinya dirumuskan oleh partai penguasa. Semua buku pelajaran wajib memuat tafsir resmi itu, dan warga yang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

mengkritiknya dapat dipenjara. Di sisi lain, pemerintah Sentara gencar membangun jaringan internet cepat dan memakai teknologi terbaru dalam layanan publik.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang ciri ideologi dalam ilustrasi tersebut dibandingkan dengan Pancasila!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Karena memakai teknologi terbaru, ideologi Sentara dapat digolongkan sebagai ideologi terbuka.	○	○
Ideologi Sentara tergolong tertutup karena isi dan tafsirnya ditentukan penguasa lalu dipaksakan.	○	○
Berbeda dengan Sentara, penjabaran Pancasila dapat dikritik warga melalui jalur yang sah.	○	○

Kunci singkat: 1. C 2. 1S 2B 3B

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu menjelaskan mengapa pedoman etika teknologi baru adalah contoh ideologi terbuka, sedangkan menambah sila baru bukan?
- Pada soal "peran Pancasila", apakah kamu sudah memeriksa bahwa pilihanmu mencakup **semua** pihak dalam kasus?
- **Yang harus kuingat:** peran pemersatu merangkul semua pihak; pandangan hidup menyeimbangkan hak dan kewajiban; keterbukaan ada pada penjabaran, bukan nilai dasar.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.3: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.3

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila

PPKN-1.4

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis makna sila-sila Pancasila**. Dua soal asli 2025 menguji sub bab ini: menentukan **nilai Pancasila yang diterapkan** dalam kehidupan bertetangga (46 % benar) dan memilih **perilaku yang berhubungan dengan dua sila sekaligus** (38 % benar).

Soal jenis ini tampak mudah karena semua siswa hafal bunyi sila. Namun, pengecohnya justru memanfaatkan hafalan itu: pilihan memuat nama sila yang benar dengan alasan yang salah, atau perilaku yang baik tetapi hanya memuat satu sila.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menerjemahkan setiap sila menjadi perilaku yang dapat diamati;
- menentukan sila yang **paling tepat** dari bukti utama dalam kasus, beserta alasannya;
- menunjukkan keterkaitan dua sila atau lebih dalam satu perilaku.

◆ KONSEP INTI

Hampir setiap siswa di Indonesia dapat melafalkan kelima sila sejak sekolah dasar. Namun, hafal bunyi sila belum berarti memahami maknanya. Memahami sila berarti dapat **melihatnya dalam perbuatan**: tahu perilaku seperti apa yang mencerminkan sebuah sila, perilaku seperti apa yang melanggarnya, dan bagaimana kelima sila bekerja bersama dalam satu peristiwa. Sub bab ini membahas makna tiap sila, hubungan antarsila, lalu cara menentukan sila yang paling tepat ketika satu kasus menyentuh beberapa sila sekaligus.

1. Sila sebagai perilaku yang dapat diamati

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 29 UUD NRI 1945). Rumusan ini lahir dari kompromi 18 Agustus 1945 sehingga dapat diterima umat semua agama. Perilaku yang mencerminkannya ada dua sisi: menjalankan ibadah menurut keyakinan sendiri, **dan** menghormati serta memberi ruang bagi pemeluk agama lain beribadah. Memaksakan keyakinan atau menghalangi ibadah orang lain adalah pelanggaran sila ini, sekalipun dilakukan atas nama agama.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan sederajat. "Adil" berarti memperlakukan orang sesuai haknya; "beradab" berarti bertindak dengan sopan dan berbudi. Perilakunya tampak ketika seseorang menolong tanpa memandang suku, agama, atau status, membela orang yang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

diperlakukan tidak adil, dan tidak merendahkan orang lain. Perundungan, diskriminasi, dan main hakim sendiri melanggar sila ini.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut kesediaan mendahulukan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, atau daerah. Persatuan **bukan** penyeragaman: semboyan Bhinneka Tunggal Ika justru mengakui perbedaan. Perilakunya tampak dalam kerja sama orang-orang yang berbeda latar belakang, cinta tanah air, dan bangga memakai produk serta budaya bangsa. Mendahulukan warga sedaerah atau sesuku dalam urusan bersama, atau menyebar kebencian antarkelompok, melanggar sila ini.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah sila yang paling panjang. Kalimatnya dapat diurai: kekuasaan berasal dari rakyat (*kerakyatan*); keputusan diambil dengan akal sehat dan hati nurani (*hikmat kebijaksanaan*); caranya melalui musyawarah, baik langsung maupun lewat wakil (*permusyawaratan/perwakilan*). Perilakunya tampak ketika keputusan bersama diambil setelah mendengar semua pihak, perbedaan pendapat dihormati, dan keputusan yang sudah disepakati dijalankan dengan tanggung jawab. Bila mufakat tidak tercapai, pemungutan suara boleh dipakai, asalkan semua pihak sudah didengar. Memaksakan kehendak, atau keputusan sepihak yang mengabaikan pihak terdampak, melanggar sila ini.

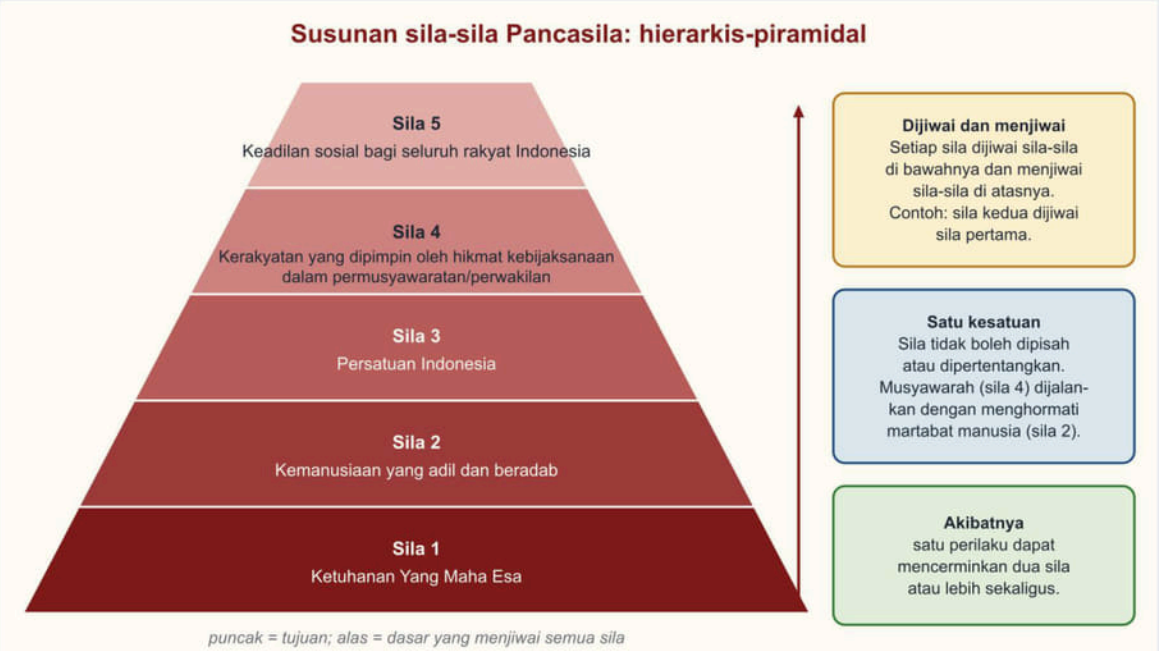
Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah tujuan yang hendak dicapai. Keadilan sosial berarti setiap warga mendapat bagian sesuai **hak, jasa, dan kebutuhannya**, serta yang lemah dibantu agar dapat hidup layak. Kata kuncinya bukan "sama rata". Beasiswa diberikan kepada siswa yang membutuhkan, bukan dibagi rata kepada semua siswa; bantuan bencana didahulukan bagi korban yang rumahnya rusak berat. Korupsi, pemerasan, dan bantuan yang hanya diberikan kepada kerabat melanggar sila ini.

Ringkasan perilaku dan pelanggaran tiap sila dapat kamu lihat pada Gambar 1.14 setelah bagian berikut.

2. Kesatuan sila: hierarkis-piramidal dan saling menjiwai

Kelima sila bukan lima nilai yang berdiri sendiri-sendiri. Para ahli filsafat Pancasila, antara lain Notonagoro dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan susunannya sebagai **hierarkis-piramidal** (lihat Gambar 1.13). *Hierarkis* berarti bertingkat; *piramidal* berarti berbentuk piramida. Sila pertama menjadi alas yang paling luas dan mendasari semua sila lain. Sila kelima berada di puncak sebagai tujuan. Di antaranya, setiap sila **dijiwai** oleh sila-sila di bawahnya dan **menjiwai** sila-sila di atasnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 1.13 Susunan hierarkis-piramidal: sila pertama sebagai dasar, sila kelima sebagai tujuan, dan setiap sila dijiwai sila di bawahnya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Susunan ini sejalan dengan bunyi alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Di sana kelima sila tidak ditulis sebagai daftar bernomor, tetapi dalam **satu kalimat**: negara disusun "dengan berdasar kepada" Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, "serta dengan mewujudkan suatu" keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan dua kata kerjanya. Empat sila pertama disebut sebagai **dasar** ("berdasar kepada"), sedangkan sila kelima disebut sebagai sesuatu yang harus **diwujudkan**. Jadi, bentuk kalimat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah tujuan, dan sila-sila sebelumnya adalah jalan untuk mencapainya. Karena ditulis dalam satu kalimat, kelima sila juga tidak dapat dipotong-potong: mengambil satu sila dan membuang yang lain berarti mengubah makna seluruh kalimat.

Apa artinya dalam kehidupan nyata? Ambil sila keempat. Musyawarah yang sesuai Pancasila bukan sekadar rapat yang hasilnya ditentukan suara terbanyak. Musyawarah itu dijiwai sila pertama (dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab), sila kedua (setiap peserta dihargai martabatnya, termasuk yang pendapatnya kalah), dan sila ketiga (hasilnya menjaga persatuan, bukan memecah). Musyawarah itu juga mengarah pada sila kelima: keputusannya harus adil bagi semua. Karena sila-sila saling menjiwai, **satu perilaku dapat mencerminkan dua sila atau lebih sekaligus**. Petani yang bermusyawarah menentukan giliran air irigasi, lalu mendahulukan sawah yang paling kering, menjalankan sila keempat (cara memutuskan) sekaligus sila kelima (pembagian sesuai kebutuhan).

Kesatuan ini juga berarti sila tidak boleh **dipertentangkan**. Tidak benar bila seseorang berkata, "demi persatuan, hak kelompok kecil boleh diabaikan", karena persatuan yang mengorbankan martabat manusia bertentangan dengan sila kedua. Tidak benar pula "demi keadilan, keputusan boleh diambil tanpa musyawarah", karena keadilan yang dipaksakan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

sepihak bertentangan dengan sila keempat.

Sila sebagai perilaku yang dapat diamati

SILA	CONTOH PERILAKU	CONTOH PELANGGARAN
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	beribadah menurut keyakinan sendiri; memberi ruang dan menghormati ibadah pemeluk agama lain	memaksakan keyakinan; mengejek atau menghalangi ibadah orang lain
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	memperlakukan setiap orang setara dan bermartabat; menolong tanpa memandang latar belakang	merendahkan, merundung, atau membeda-bedakan perlakuan karena suku, agama, atau kondisi
3. Persatuan Indonesia	bekerja sama dan rukun meski berbeda; mendahulukan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan atau daerah	mengutamakan warga sedaerah atau sesuku; menyebar kebencian antarkelompok
4. Kerakyatan … permusyawaratan/ perwakilan	memutuskan bersama lewat musyawarah; mendengar semua pihak; menerima keputusan bersama dengan tanggung jawab	memaksakan kehendak; keputusan diambil satu orang tanpa mendengar pihak terdampak
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat	membagi manfaat sesuai hak, jasa, dan kebutuhan; membantu yang lemah; tidak boros dan tidak memeras	mengambil hak orang lain; korupsi; bantuan hanya untuk kerabat

Keadilan sosial ≠ sama rata; persatuan ≠ mendahulukan daerah sendiri. Bagan disederhanakan.

Gambar 1.14 Setiap sila diterjemahkan menjadi contoh perilaku yang dapat diamati dan contoh pelanggarannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Menentukan sila dari bukti utama

Karena satu peristiwa hampir selalu menyentuh beberapa sila, pertanyaan "nilai Pancasila apa yang **paling tepat**?" tidak dijawab dengan mencari sila yang "ada", melainkan sila yang ditunjukkan oleh **bukti utama** kasus. Bukti utama adalah perbuatan inti yang membuat cerita itu terjadi atau yang ditekankan oleh pertanyaan. Kesalahan paling umum adalah memilih sila dari **kata yang kebetulan muncul**: kasus menyebut "agama", lalu langsung dipilih sila pertama; kasus menyebut "rapat", lalu langsung dipilih sila keempat. Alur memilih sila yang paling tepat dapat kamu ikuti pada Gambar 1.15.



Gambar 1.15 Alur memilih sila yang paling tepat dari bukti utama kasus, bukan dari kata yang muncul. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ada satu syarat lagi. Banyak soal berbentuk "Nilai X, karena …". Pilihan yang benar harus memenuhi **dua** syarat: silanya sesuai dengan bukti utama, **dan** alasannya sesuai dengan kasus. Pilihan yang menyebut sila yang benar, tetapi alasannya menambahkan hal yang tidak ada di kasus atau menafsirkan sila secara keliru (misalnya keadilan sebagai sama rata), tetap salah. Misalnya, pada kasus warga yang bergiliran menjaga rumah tetangga yang sedang mudik, pilihan "sila ketiga, karena warga hidup rukun dan saling membantu" sesuai kasus, sedangkan "sila ketiga, karena warga hanya mau menjaga rumah tetangga yang sedaerah" memakai sila yang sama dengan alasan yang justru melanggarnya.

4. Sila-sila dalam peristiwa nyata

Musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur **musyawarah desa** dalam Pasal 54, yaitu forum yang diikuti Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis. Hal strategis itu antara lain perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa, serta kejadian luar biasa. Musyawarah desa wajib diadakan paling sedikit sekali setahun. Ketentuan ini

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

adalah wujud sila keempat di tingkat paling dekat dengan warga: keputusan penting tentang desa tidak diambil kepala desa sendirian. Dalam praktiknya, musyawarah yang baik juga dijiwai sila kedua dan kelima: kelompok yang sering tidak terdengar, seperti perempuan, warga miskin, dan penyandang disabilitas, diundang dan didengar, dan hasilnya diarahkan untuk keadilan bagi seluruh warga desa.

Relawan lintas agama pascagempa Cianjur. Pada **21 November 2022**, gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan banyak warga mengungsi. Rumah ibadah pun ikut rusak, sebagian besar masjid, tetapi juga gereja. Pertolongan datang dari banyak arah. Pengurus Nahdlatul Ulama Cianjur membuka posko bantuan, Paroki Santo Petrus Cianjur membuka pos pelayanan kesehatan dan dapur umum, dan relawan Buddha Tzu Chi menggelar layanan kesehatan bagi warga di pengungsian. Mereka melayani korban tanpa menanyakan agamanya. Peristiwa ini menunjukkan beberapa sila sekaligus. Bukti utamanya adalah **menolong sesama manusia tanpa membedakan latar belakang** (sila kedua). Kerja sama lembaga yang berbeda agama memperkuat **persatuan** (sila ketiga), dan semuanya digerakkan oleh keyakinan masing-masing yang saling menghormati (sila pertama). Bila sebuah soal menekankan bahwa korban ditolong tanpa memandang agamanya, sila yang paling tepat adalah sila kedua; bila soal menekankan lembaga-lembaga berbeda agama yang bekerja bersama, sila ketiga menjadi lebih tepat.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Ambulans desa tengah malam

Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.

Pada 2026, Pak Hasan adalah sopir ambulans milik Desa Sukarame (fiktif). Peraturan desa membolehkan ambulans dipakai dalam keadaan darurat, tetapi sebagian warga berpendapat ambulans sebaiknya hanya untuk warga desa sendiri. Suatu malam, warga kampung tetangga yang berbeda agama menelepon: istrinya akan melahirkan dan mengalami perdarahan. Pak Hasan segera mengantar mereka ke rumah sakit tanpa memungut biaya, lalu melapor kepada kepala desa keesokan paginya. Nilai Pancasila apa yang paling tepat diterapkan Pak Hasan?

1. **Baca kasus utuh.** Pelaku: Pak Hasan. Perbuatan: mengantar orang yang nyawanya terancam. Yang ditekankan: ia tidak membedakan asal kampung dan agama pasien.
2. **Tulis bukti utama dalam satu kalimat.** "Pak Hasan menolong orang dalam keadaan darurat tanpa memandang latar belakangnya."
3. **Terjemahkan ke sila.** Menolong tanpa membedakan latar belakang dan menjaga keselamatan manusia adalah perilaku **sila kedua**.
4. **Tolak sila dari kata yang muncul.** Kata "berbeda agama" menggoda ke sila pertama, tetapi Pak Hasan tidak sedang menghormati ibadah. "Tanpa memungut biaya" menggoda ke sila kelima, tetapi intinya bukan pembagian manfaat. "Kampung tetangga" menggoda ke sila

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

ketiga, tetapi kasus tidak menekankan kerja sama atau keutuhan bangsa. Laporan kepada kepala desa menunjukkan tanggung jawab, tetapi bukan bukti utama.

Jawaban: sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena Pak Hasan menolong orang yang terancam keselamatannya tanpa memandang asal dan agamanya.

Contoh 2 — Dua pilihan bersila sama

Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.

Pada 2027, siswa SMA Tunas Bangsa dan SMK Karya Mandiri (fiktif) beberapa kali saling mengejek di media sosial sampai nyaris bentrok. Ketua OSIS kedua sekolah lalu sepakat membuat mural bersama di dinding pasar kecamatan. Setiap kelompok kerja berisi siswa dari kedua sekolah, dan rancangan mural memuat lambang kedua sekolah berdampingan. Sejak itu ejekan mereda. Manakah analisis yang paling tepat?

- (P) Sila ketiga, karena kedua sekolah mengganti permusuhan dengan kerja sama dalam satu karya tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
- (Q) Sila ketiga, karena kedua sekolah akhirnya disatukan menjadi satu sekolah agar tidak ada lagi perbedaan.
- (R) Sila keempat, karena mural dikerjakan oleh beberapa kelompok kerja.
- (S) Sila kelima, karena dinding pasar dipakai bersama oleh kedua sekolah.

1. **Tulis bukti utama.** "Dua sekolah yang bermusuhan menjadi rukun melalui kerja sama." Ini perilaku **sila ketiga**.
2. **Coret pilihan yang silanya tidak cocok.** R memilih sila dari kata "kelompok", padahal kasus tidak menceritakan musyawarah untuk memutuskan sesuatu. S memilih sila dari kata "dipakai bersama", padahal tidak ada pembagian manfaat sesuai hak dan kebutuhan.
3. **Bandingkan dua pilihan yang silanya sama.** P dan Q sama-sama menyebut sila ketiga. Alasan P sesuai kasus: kerja sama, identitas sekolah tetap dihargai (lambang berdampingan). Alasan Q menambahkan peristiwa yang tidak ada di kasus dan menyamakan persatuan dengan penyeragaman.

Jawaban: P, karena silanya sesuai bukti utama **dan** alasannya sesuai kasus; Q gugur karena alasannya keliru walaupun silanya benar.

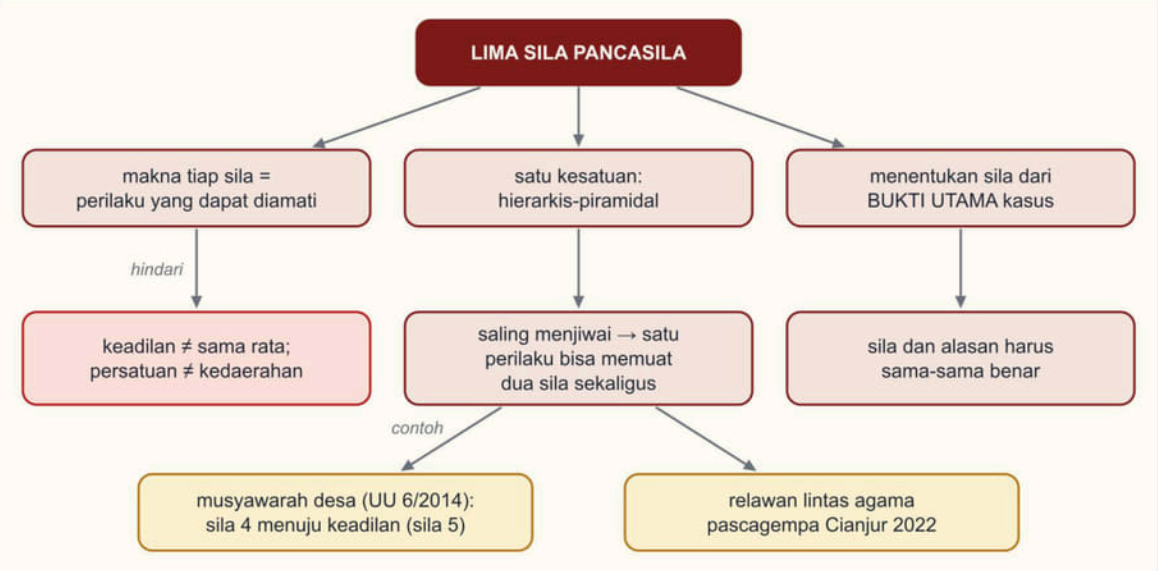
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Setiap sila dapat dilihat sebagai perilaku: menghormati ibadah (1), memperlakukan orang setara (2), rukun dan bekerja sama dalam perbedaan (3), memutuskan lewat musyawarah (4), membagi sesuai hak dan kebutuhan (5).
- Susunan sila hierarkis-piramidal: sila pertama dasar, sila kelima tujuan; setiap sila dijiwai dan menjiwai sila lain, sehingga satu perilaku dapat memuat beberapa sila.
- Sila yang paling tepat ditentukan oleh bukti utama kasus, bukan kata yang muncul; sila dan alasannya harus sama-sama benar.
- Keadilan sosial bukan sama rata; persatuan bukan kedaerahan atau penyeragaman.
- Peristiwa nyata: musyawarah desa (Pasal 54 UU 6/2014); pertolongan lintas agama pascagempa Cianjur 2022.

Bagan pada Gambar 1.16 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.16 Peta konsep makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tulis bukti utama kasus dalam satu kalimat.** Misalnya "warga berbeda agama hidup rukun".
2. **Terjemahkan bukti itu ke sila** dengan Gambar 1.14.
3. **Periksa alasan setiap pilihan**: apakah alasannya benar-benar ada di kasus?
4. **Untuk soal dua sila**, pastikan perilaku dalam pilihan **memuat keduanya**, bukan hanya salah satunya.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Dua pilihan bersila sama, alasannya berbeda.** Satu alasannya sesuai kasus, satu lagi menambah hal yang tidak disebut.
- **Kata-kata alasan menyebut dua sila, perilakunya tidak.** Sebuah pilihan bisa menulis "... sehingga bangsa makin bersatu" padahal perilakunya hanya beribadah sendiri. Nilai dari perilaku, bukan dari kata-kata alasannya.
- **"Merata tanpa kecuali".** Alasan keadilan sosial yang berbunyi sama rata hampir selalu pengecoh.
- **Perilaku baik, satu sila saja.** Bila soal meminta dua sila, perilaku yang hanya memuat salah satunya tetap salah, sebaik apa pun perilakunya.

> Contoh salah tafsir: pada kasus panitia lomba yang menjadwalkan ulang acara karena bertepatan dengan hari raya salah satu peserta, seorang siswa memilih sila kelima karena kasusnya menyebut "panitia membagi jadwal". Ia memilih dari **kata yang muncul**, bukan dari **inti kasus**, yaitu menghormati ibadah peserta (sila pertama).

● BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana.

Nomor 4 (warga perumahan yang beragam, PG, 46 % benar). Kamu diminta memilih nilai Pancasila yang **paling tepat** diterapkan.

- Konsep kunci: bukti utama menentukan sila; sila dan alasan harus sama-sama benar (bagian 3).
- Langkah: rumuskan inti kasus dalam satu kalimat → cari pilihan dengan sila yang cocok → bila ada dua pilihan bersila sama, bandingkan alasannya dengan kalimat di ilustrasi.
- Pengecoh yang dipasang: alasan yang menambah hal yang tidak ada di ilustrasi, dan alasan keadilan yang bermakna sama rata.

Rujukan: soal nomor 4 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 10 (perilaku sila kedua dan keempat, PG, 38 % benar). Kamu diminta memilih perilaku yang berhubungan dengan **kedua** sila.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Konsep kunci: sila saling menjiwai (bagian 2).
- Langkah: tandai setiap pilihan dengan sila yang **benar-benar tampak** dari perilakunya → pilih yang memuat musyawarah **dan** kemanusiaan.
- Pengecoh yang dipasang: perilaku yang baik tetapi hanya memuat satu dari dua sila, atau memuat sila yang lain.

Rujukan: soal nomor 10 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tulis bukti utama, coret sila dari kata yang muncul, lalu bandingkan alasan opsi yang silanya sama.

►. Menjelang Hari Kemerdekaan 2026, pemuda masjid, pemuda gereja, dan pemuda pura di Kampung Sidomulyo bersama-sama memperbaiki balai warga yang atapnya bocor. Mereka membagi tugas, memakai kaus seragam kampung, dan tetap mencantumkan nama organisasi masing-masing di spanduk kegiatan. Balai itu lalu dipakai untuk lomba anak-anak kampung.
Nilai Pancasila yang paling tepat tercermin dari ilustrasi tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. Nilai Ketuhanan, karena kegiatan itu dijalankan oleh organisasi-organisasi keagamaan
B. Nilai Persatuan, karena pemuda berbeda agama bekerja sama untuk kepentingan kampung
C. Nilai Persatuan, karena mereka memakai kaus seragam agar perbedaan agama tidak tampak
D. Nilai Kerakyatan, karena para pemuda membagi tugas dahulu sebelum memperbaiki balai warga
E. Nilai Keadilan Sosial, karena balai yang diperbaiki dapat dipakai oleh seluruh warga

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: B**

Konsep: sila yang paling tepat ditentukan oleh **bukti utama** kasus, bukan oleh kata yang kebetulan muncul. Opsi yang benar harus memenuhi dua syarat: **silanya** sesuai bukti utama **dan alasannya** sesuai kasus.

Langkah 1 – Tulis bukti utama dalam satu kalimat. "Pemuda dari tiga agama bekerja sama memperbaiki balai kampung tanpa menghilangkan identitas organisasinya."
Langkah 2 – Terjemahkan ke sila. Kerja sama orang-orang berbeda latar belakang untuk kepentingan bersama = **sila ketiga**.
Langkah 3 – Coret sila dari kata yang muncul. A memilih dari kata "masjid, gereja, pura"; D dari kata "membagi tugas" (tidak ada musyawarah pengambilan keputusan); E dari kata "seluruh warga" (tidak ada pembagian hak sesuai kebutuhan).
Langkah 4 – Bandingkan dua opsi bersila sama. B: alasannya sesuai kasus. C: alasannya keliru, karena nama organisasi masing-masing justru tetap dicantumkan; kaus seragam bukan untuk menghapus perbedaan.

Jawaban: B.

Jebakan: C memakai sila yang benar dengan alasan penyeragaman. Persatuan bukan menyembunyikan perbedaan.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan bukti utama kasus sebelum memilih.

1. Di sejumlah desa, lumbung pangan warga kembali dihidupkan. Setiap keluarga menyetor gabah sesuai kemampuan, sedangkan keluarga yang kekurangan boleh meminjam lebih dahulu. Pengurus dipilih dalam rapat warga, dan laporan lumbung dibacakan setiap bulan. Warga dari berbagai agama dan suku sama-sama menjadi anggota.
Pernyataan manakah yang tepat tentang nilai Pancasila dalam ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

- ☐ A. Setoran sesuai kemampuan dan pinjaman bagi keluarga yang kekurangan mencerminkan sila kelima.
- ☐ B. Karena setoran tiap keluarga tidak sama besar, lumbung itu belum mencerminkan keadilan sosial.
- ☐ C. Pemilihan pengurus dalam rapat dan laporan terbuka setiap bulan mencerminkan sila keempat.
- ☐ D. Keanggotaan warga berbagai agama dan suku menunjukkan persatuan tanpa menghapus perbedaan.
- ☐ E. Lumbung itu hanya mencerminkan sila kelima karena tujuan utamanya adalah urusan pangan.

2. Dalam rapat paguyuban pedagang Pasar Cempaka pada 2026, Bu Lastri mengusulkan agar iuran kebersihan dipungut setiap hari. Setelah semua anggota menyampaikan pendapat, rapat memutuskan iuran dipungut sebulan sekali. Bu Lastri tetap membayar iuran bulanan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

tepat waktu dan mengajak pedagang lain mematuhi keputusan itu.

Sikap Bu Lastri paling tepat mencerminkan nilai sila ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pertama, karena ia menjalankan kewajiban membayar iuran dengan penuh rasa syukur
B. kedua, karena ia memperlakukan semua pedagang di pasar itu dengan sopan dan beradab
C. ketiga, karena ia menjaga agar para pedagang di pasar itu tetap kompak dan hidup rukun
D. kelima, karena iuran bulanan membuat semua pedagang membayar dengan jumlah sama
E. keempat, karena ia menjalankan keputusan musyawarah walaupun usulnya sendiri kalah

Kunci singkat: 1. A, C, D 2. E

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu memberi satu perilaku yang memuat sila pertama dan ketiga sekaligus?
- Pada soal "Nilai …, karena …", apakah kamu memeriksa **alasannya**, bukan hanya nama silanya?
- **Yang harus kuingat:** keadilan bukan sama rata; persatuan bukan kedaerahan; pilih sila dari inti kasus, bukan dari kata yang muncul.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.4: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.4

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila

PPKN-1.5

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi Pancasila**. Soal biasanya menghadirkan peristiwa demokrasi — pemilu, musyawarah, unjuk rasa, kebijakan yang menyangkut warga — lalu meminta perilaku yang **mencerminkan HAM sesuai sila tertentu**, atau penyelesaian yang paling sesuai dengan HAM dan demokrasi Pancasila.

Pada soal asli 2025, kemampuan ini diuji lewat perilaku dalam pemilu yang mencerminkan HAM sesuai sila keempat. Sekitar 40 % peserta menjawab benar.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan hak asasi dari kepatuhan buta dan dari kebebasan tanpa batas;
- memakai Pasal 28J untuk menilai apakah sebuah pembatasan hak sah atau tidak;
- mengenali ciri demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan dan pemilu;
- memilih penyelesaian yang melibatkan warga terdampak sejak awal.

◆ KONSEP INTI

Hak asasi manusia dan demokrasi sering dibicarakan bersama, karena keduanya saling memerlukan. Demokrasi memberi rakyat kekuasaan untuk menentukan arah negara; hak asasi memastikan kekuasaan itu tidak dipakai untuk menindas siapa pun, termasuk kelompok yang kalah suara. Demokrasi tanpa perlindungan hak dapat berubah menjadi kekuasaan mayoritas yang sewenang-wenang. Sebaliknya, hak asasi sulit dilindungi di negara yang rakyatnya tidak dapat mengawasi penguasa. Sub bab ini menjelaskan apa itu HAM, bagaimana HAM dijamin dan dibatasi di Indonesia, lalu bagaimana demokrasi Pancasila menjalankan keduanya.

1. Arti hak asasi manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia karena ia manusia, bukan karena pemberian penguasa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskannya sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Dari pengertian itu tampak tiga ciri. HAM bersifat **universal**, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status. HAM **tidak dapat dicabut** sesuka hati, karena tidak berasal dari negara. HAM juga **tidak dapat dipisah-pisahkan**: hak

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

hidup tidak banyak artinya tanpa hak atas kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Undang-undang yang sama juga mengenal **kewajiban dasar manusia**, yaitu seperangkat kewajiban yang bila tidak dilaksanakan membuat HAM tidak mungkin terlaksana. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak orang lain.

2. Jaminan HAM di Indonesia: dari Reformasi sampai Pasal 28A–28J

UUD 1945 yang asli sudah memuat beberapa hak warga negara, misalnya persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan hak mendapat pengajaran. Namun, rumusannya singkat dan banyak hak penting belum disebut. Pada masa Orde Baru, perlindungan HAM juga lemah dalam praktik.

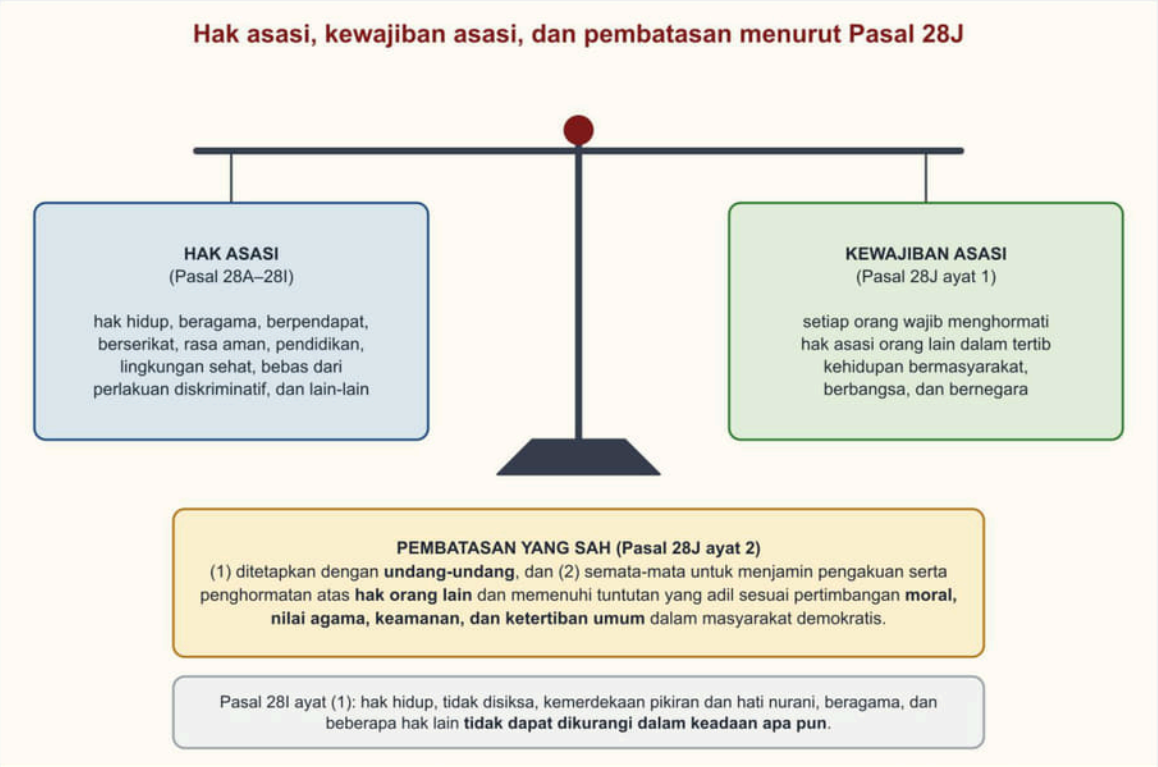
Langkah kelembagaan pertama terjadi pada **7 Juni 1993**, ketika Presiden membentuk **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)** dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Setelah Reformasi 1998, jaminan HAM diperkuat berturut-turut. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada 1999 lahir **UU Nomor 39 Tahun 1999**, yang mengatur HAM secara rinci dan mengukuhkan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dengan dasar undang-undang. Puncaknya, pada **18 Agustus 2000**, amandemen kedua UUD menambahkan **Bab XA tentang Hak Asasi Manusia**, berisi **Pasal 28A sampai 28J**. Sejak itu, HAM dijamin langsung oleh konstitusi, bukan hanya oleh undang-undang. Pada tahun yang sama dibentuk pula pengadilan HAM melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat.

Isi Pasal 28A–28I sangat luas: hak hidup (28A); hak membentuk keluarga dan hak anak atas perlindungan (28B); hak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan (28C); kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum (28D); kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (28E); hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (28F); hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi (28G); hak hidup sejahtera, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan (28H); dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif (28I).

3. Hak, kewajiban, dan batas: membaca Pasal 28J

Hak yang luas itu tidak berarti kebebasan tanpa batas. Bayangkan bila setiap orang memakai haknya tanpa memedulikan orang lain: hak berpendapat seseorang dapat dipakai untuk memfitnah, hak berkumpul dapat menutup jalan yang dibutuhkan ambulans. Karena itu, Bab XA ditutup dengan **Pasal 28J** yang berfungsi sebagai penyeimbang (lihat Gambar 1.17).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 1.17 Hak asasi (Pasal 28A–28I) diimbangi kewajiban asasi (Pasal 28J ayat 1), dan pembatasan yang sah harus memenuhi syarat Pasal 28J ayat (2). Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ayat (1) menetapkan kewajiban: setiap orang **wajib menghormati** hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Ayat (2)** menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **wajib tunduk pada pembatasan** yang memenuhi dua syarat. Pertama, pembatasan itu **ditetapkan dengan undang-undang**, bukan dengan keputusan sepihak pejabat. Kedua, tujuannya **semata-mata** untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dua syarat itu memberi alat untuk menilai. Aturan lalu lintas yang membatasi kecepatan kendaraan sah, karena ditetapkan undang-undang dan melindungi keselamatan orang lain. Larangan mengkritik pejabat karena kritik itu dianggap "merusak wibawa" tidak sah, karena tujuannya melindungi gengsi penguasa, bukan hak orang lain. Pembatasan yang sah umumnya mengatur **cara** memakai hak (kapan, di mana, dengan tertib), bukan menilai **isi** pendapat. Perlu diingat pula Pasal 28I ayat (1): beberapa hak, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama, **tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**.

4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. **Demokrasi Pancasila** adalah demokrasi yang dijiwai kelima sila, terutama sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

permusyawaratan/perwakilan. Ia berbeda dari demokrasi yang hanya menghitung suara terbanyak, dan berbeda pula dari pemerintahan yang memusatkan keputusan pada satu orang.

Ciri-cirinya paling mudah dipahami bila dibayangkan dalam satu musyawarah (lihat Gambar 1.18). Pertama, **kedaulatan rakyat**: pihak yang terdampak keputusan diundang dan dilibatkan sejak perencanaan, bukan diberi tahu setelah semuanya diputuskan. Kedua, **perlindungan hak semua warga**: kelompok kecil, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat ikut didengar. Bila perlu, mereka diberi perlakuan khusus agar benar-benar dapat ikut serta, karena Pasal 28H ayat (2) menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; contohnya fasilitas yang dapat dijangkau pengguna kursi roda atau kuota keterwakilan perempuan. Ketiga, **musyawarah untuk mufakat**: semua pihak berusaha mencari jalan tengah; bila mufakat tidak tercapai, pemungutan suara dipakai secara jujur. Keempat, **menghormati perbedaan**: pihak yang pendapatnya kalah tidak dimusuhi, dan pilihan setiap orang dihargai. Kelima, **tanggung jawab**: keputusan yang sah dijalankan, dan keberatan disalurkan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan.



Gambar 1.18 Lima ciri demokrasi Pancasila yang tampak dalam satu proses musyawarah. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

5. Hak, kewajiban, dan kepatuhan: tiga hal yang berbeda

Dalam kasus sehari-hari, tiga hal ini sering tercampur. **Hak** adalah sesuatu yang boleh kita tuntut atau lakukan, misalnya memilih calon yang kita yakini atau menyampaikan pendapat dalam rapat. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus kita lakukan, misalnya menghormati pilihan orang lain atau menaati hasil musyawarah yang sah. **Kepatuhan buta** adalah sekadar mengikuti arahan pihak lain tanpa memakai hak sendiri, misalnya mencoblos calon karena disuruh atasan, atau diam dalam rapat "agar cepat selesai". Kepatuhan buta mungkin terlihat tertib, tetapi bukan pelaksanaan HAM dan bukan sikap demokratis, karena orang itu tidak memakai haknya dan tidak bertanggung jawab atas pilihannya.

6. HAM dan demokrasi dalam peristiwa nyata

UU TPKS. Pada **12 April 2022**, rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang kemudian diundangkan sebagai **UU Nomor 12 Tahun 2022** pada 9 Mei 2022. Undang-undang ini menjabarkan hak atas rasa aman dan perlindungan martabat (Pasal 28G) bagi korban kekerasan seksual. Ia mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, serta menegaskan bahwa perkaranya tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali bila pelakunya anak. Undang-undang ini juga memperlihatkan Pasal 28J bekerja: kebebasan pelaku dibatasi dengan undang-undang demi hak orang lain. Prosesnya pun demokratis, karena pembahasan melibatkan masukan dari Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil.

Pemilu 2024. Pada **14 Februari 2024**, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 22E UUD menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap asas melindungi hak warga: **bebas** berarti tidak ada yang boleh memaksa pilihan seseorang; **rahasia** berarti pilihan itu tidak boleh diketahui pihak lain. Pemilih penyandang disabilitas berhak dibantu pendamping pilihannya sendiri, dan pendamping itu wajib merahasiakan pilihan pemilih. Dalam pemilu, perilaku yang mencerminkan HAM sesuai sila keempat adalah memakai hak pilih secara mandiri sambil **menghormati pilihan orang lain**, termasuk keluarga atau teman yang pilihannya berbeda.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Warga menolak rencana tempat pembuangan sampah

Kasus disusun untuk contoh; daerah dan tokoh fiktif.

Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Lembah Hijau (fiktif) mengumumkan rencana tempat pembuangan akhir sampah di dekat permukiman Desa Cikaret. Warga khawatir air sumur tercemar. Mereka melakukan beberapa hal: (1) mengirim surat keberatan dan meminta rapat dengar pendapat dengan DPRD; (2) menulis opini di media massa; (3) sebagian warga menutup jalan provinsi selama tiga hari sehingga ambulans dan truk sayur tidak dapat lewat; (4) seorang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

warga menyebarkan alamat rumah dan foto anak-anak pejabat dinas lingkungan hidup di media sosial. Mana yang termasuk pelaksanaan hak, mana yang melampaui batas, dan apa kewajiban para pihak?

1. **Tentukan hak yang dipakai.** Warga memakai hak mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3)) dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)).
2. **Uji setiap tindakan dengan Pasal 28J.** Tindakan (1) dan (2) menyampaikan pendapat tanpa merugikan hak orang lain → **pelaksanaan hak**. Tindakan (3) menghalangi hak orang lain atas keselamatan dan penghidupan selama berhari-hari → **melampaui batas** (hak orang lain dan ketertiban umum). Tindakan (4) melanggar hak orang lain atas perlindungan diri pribadi dan keluarga (Pasal 28G ayat (1)), apalagi menyasar anak yang tidak terlibat → **melampaui batas**.
3. **Tentukan kewajiban warga.** Menyampaikan keberatan dengan tertib, menghormati hak pengguna jalan dan privasi pejabat, serta menempuh jalur hukum bila keberatan tidak ditanggapi.
4. **Tentukan kewajiban pemerintah daerah.** Sesuai demokrasi Pancasila, warga terdampak dilibatkan sejak perencanaan: diberi informasi tentang dampak lingkungan dan didengar keberatannya, bukan sekadar diberi tahu setelah keputusan jadi.

Jawaban: tindakan (1) dan (2) adalah pelaksanaan hak; tindakan (3) dan (4) melampaui batas karena melanggar hak orang lain; warga wajib menghormati hak orang lain dan menempuh jalur yang sah, sedangkan pemerintah wajib melibatkan warga terdampak sejak awal.

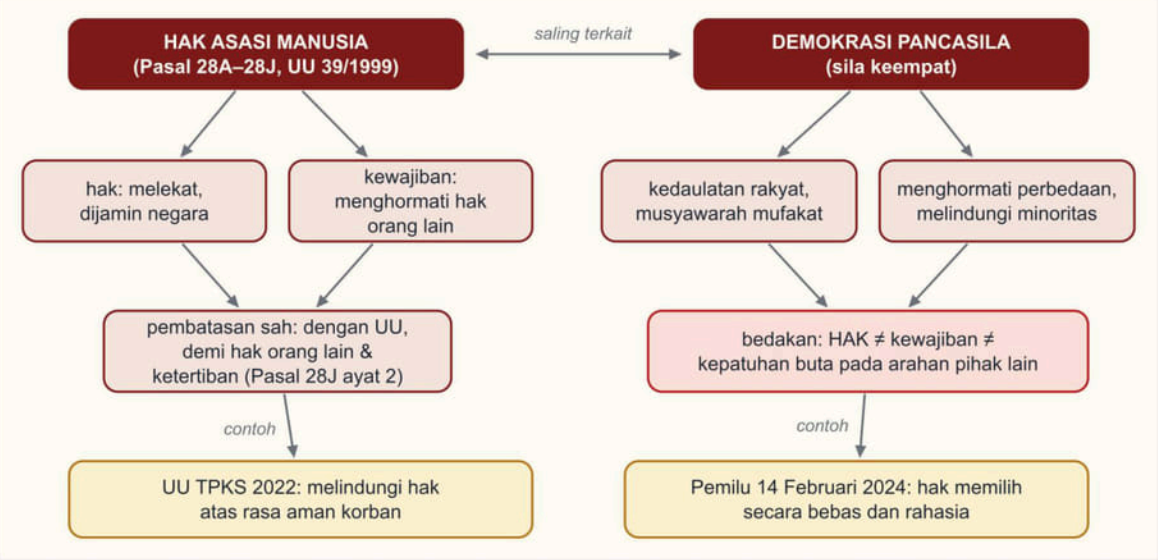
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- HAM melekat pada setiap manusia, universal, dan tidak dapat dicabut; dijamin Pasal 28A–28J (amandemen kedua, 18 Agustus 2000) dan UU 39/1999; Komnas HAM berdiri sejak 1993.
- Pasal 28J: setiap orang wajib menghormati hak orang lain; pembatasan sah hanya bila ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan melindungi hak orang lain serta ketertiban.
- Demokrasi Pancasila: kedaulatan rakyat, perlindungan hak semua warga, musyawarah untuk mufakat, menghormati perbedaan, dan tanggung jawab.
- Hak, kewajiban, dan kepatuhan buta adalah tiga hal berbeda; kepatuhan buta bukan pelaksanaan HAM.
- Peristiwa nyata: UU TPKS 2022 melindungi korban kekerasan seksual; Pemilu 14 Februari 2024 dengan asas bebas dan rahasia.

Bagan pada Gambar 1.19 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.19 Peta konsep HAM dan demokrasi Pancasila. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan hak siapa yang dipersoalkan** dan siapa yang mungkin terganggu.
2. **Uji dengan Pasal 28J**: apakah ada pembatasan? Pembatasan **sah** bila (a) ditetapkan dengan undang-undang **dan** (b) tujuannya melindungi hak orang lain atau ketertiban umum. Pembatasan untuk menjaga gengsi atau wibawa penguasa tidak termasuk.
3. **Cari ciri demokrasi Pancasila** di setiap pilihan: melibatkan, menghormati perbedaan, bertanggung jawab.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Kepatuhan disangka HAM.** Sikap yang hanya menurut kepada lembaga atau organisasi adalah kepatuhan, bukan pelaksanaan hak.
- **Kegiatan disangka nilai.** Ikut serta dalam suatu acara belum tentu mencerminkan nilai yang ditanyakan. Tanyakan: hak siapa yang dihormati?
- **Mayoritas mutlak.** Pilihan yang membenarkan apa pun asal didukung suara terbanyak mengabaikan perlindungan hak semua warga.
- **Melibatkan setelah keputusan jadi.** Terdengar demokratis, padahal warga tidak ikut memutuskan.
- **Solusi berlebihan.** Melarang semua hal demi melindungi satu pihak sama kelirunya dengan mengabaikan pihak itu.

> Contoh salah tafsir: dalam rapat kelas, seorang siswa berkata, "Saya ikut saja apa kata ketua, yang penting rapat cepat selesai." Temannya menganggap itu sikap demokratis. Padahal sikap itu hanya patuh; ia tidak memakai haknya berpendapat dan tidak menunjukkan penghormatan atas pendapat orang lain.

● BEDAH SOAL ASLI

Satu soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Soalnya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 8 (perilaku HAM sesuai sila keempat dalam pemilu, PG, 40 % benar). Ilustrasi menjelaskan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, lalu meminta perilaku yang mencerminkan **hak asasi manusia sesuai sila keempat**.

- Konsep kunci: hak dalam pemilu dan ciri menghormati perbedaan (bagian 4 dan 6).
- Langkah: tanyakan pada setiap pilihan, "apakah ini **menghormati hak dan pilihan orang lain**, atau hanya ikut serta, patuh, atau mengikuti arahan?".
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang tampak aktif atau tertib, tetapi tidak menunjukkan penghormatan atas hak.

Rujukan: soal nomor 8 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Uji dua syarat pembatasan: ditetapkan undang-undang dan bertujuan melindungi hak orang lain; tolak alasan "hak mutlak".

►. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pembatasan hak harus ditetapkan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil. Pada 2026, kepala sebuah dinas menerbitkan surat edaran yang melarang pegawainya mengunggah keluhan tentang gaji yang terlambat dibayar, dengan alasan menjaga nama baik dinas.
Penilaian yang paling tepat terhadap surat edaran itu adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tidak sah, karena tidak berdasar undang-undang dan bertujuan menjaga nama baik dinas
B. sah, karena setiap pegawai wajib mematuhi semua perintah atasan di tempatnya bekerja
C. sah, karena keluhan di media sosial dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat luas
D. tidak sah, karena kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi dalam keadaan apa pun juga
E. sah, asalkan para pegawai masih boleh menyampaikan keluhan secara lisan kepada atasan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: A**

Konsep: kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin Pasal 28E ayat (3). Pembatasannya sah hanya bila memenuhi **dua syarat** Pasal 28J ayat (2): (a) **ditetapkan dengan undang-undang**, dan (b) tujuannya **melindungi hak orang lain** atau memenuhi tuntutan yang adil (moral, agama, keamanan, ketertiban umum).

Langkah 1 – Tentukan hak yang dibatasi. Hak pegawai menyampaikan keluhan tentang haknya sendiri (gaji).
Langkah 2 – Uji syarat (a). Surat edaran kepala dinas bukan undang-undang → syarat (a) tidak terpenuhi.
Langkah 3 – Uji syarat (b). Tujuannya menjaga nama baik dinas, bukan melindungi hak orang lain → syarat (b) tidak terpenuhi.
Langkah 4 – Analisis opsi:
• A ✓ — kedua syarat gagal dipenuhi.
• B ✗ — kepatuhan kepada atasan tidak dapat menghapus hak yang dijamin UUD.
• C ✗ — alasan "ketertiban umum" dipaksakan; keluhan tentang gaji yang terlambat tidak mengganggu hak orang lain.
• D ✗ — kesimpulannya benar, tetapi alasannya keliru: hak berpendapat memang dapat dibatasi bila memenuhi syarat Pasal 28J.
• E ✗ — syarat kecil ("masih boleh lisan") tidak memperbaiki pembatasan yang sejak awal tidak sah.

Jawaban: A.

Jebakan: D paling menggoda karena kesimpulannya sama dengan A, tetapi alasannya menganggap hak berpendapat mutlak.

✎ LATIHAN

Sebelum menjawab, tandai hak yang dipersoalkan di setiap soal.

1. Di sejumlah daerah, pemerintah menggabungkan sekolah dasar yang muridnya sedikit ke sekolah yang lebih besar. Di satu kabupaten, rencana itu baru diumumkan setelah anggarannya disetujui. Orang tua di dusun terjauh keberatan karena anak mereka harus berjalan enam kilometer, sementara orang tua di pusat desa umumnya setuju.
Langkah yang paling sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah ....

A. melanjutkan penggabungan karena sebagian besar orang tua di pusat desa sudah menyetujuinya
B. membahas ulang rencana bersama orang tua dan guru, termasuk angkutan siswa dusun terjauh
C. menampung keluhan orang tua dusun terjauh melalui kotak saran setelah penggabungan berjalan
D. membatalkan seluruh rencana penggabungan karena masih ada sebagian orang tua yang belum setuju
E. menyerahkan keputusan kepada kepala desa karena ia paling mengenal keadaan warga desanya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 2026, warga RT 04 Kelurahan Pandanrejo memilih ketua RT secara langsung. Pak Darmo, calon yang kalah, datang memberi selamat kepada Bu Sinta yang terpilih. Mbah Karsi yang penglihatannya lemah dibantu cucunya di bilik suara. Seusai pemilihan, beberapa pendukung Bu Sinta mengusulkan agar warga yang tidak memilihnya tidak dilibatkan dalam kepanitiaan kampung.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan prinsip HAM dan demokrasi Pancasila!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Sikap Pak Darmo memberi selamat menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan pilihan warga.	○	○
Cucu yang membantu Mbah Karsi wajib membiarkan Mbah Karsi menentukan pilihannya sendiri.	○	○
Usul agar warga yang tidak memilih Bu Sinta tidak dilibatkan sesuai dengan demokrasi Pancasila.	○	○

Kunci singkat: 1. B 2. 1B 2B 3S

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu menjelaskan dua syarat pembatasan hak yang sah menurut Pasal 28J ayat (2)?
- Apa bedanya melibatkan warga sejak perencanaan dengan menyosialisasikan keputusan yang sudah jadi?
- **Yang harus kuingat:** HAM bukan kepatuhan dan bukan kebebasan tanpa batas; demokrasi Pancasila melibatkan, menghormati perbedaan, dan melindungi yang rentan.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.5: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.5

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi

PPKN-1.6

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis permasalahan dan solusi penerapan nilai-nilai Pancasila**. Soal biasanya memberi tantangan masa kini — korupsi, gaya hidup konsumtif, judi daring, pengangguran, intoleransi — atau peran Indonesia di tengah dunia, lalu menanyakan **fungsi Pancasila**, **keunggulan nilainya**, atau **solusi yang paling tepat**.

Dua soal asli 2025 menguji sub bab ini: fungsi Pancasila dalam pergaulan global (Benar/Salah, 74 % benar) dan keunggulan nilai Pancasila dalam misi perdamaian dunia (44 % benar). Soal kedua dikodekan Bank Soal pada topik perdamaian dunia, tetapi indikator resminya berada pada elemen Pancasila, sehingga dibedah di sini.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan tantangan penerapan Pancasila yang berasal dari dalam dan dari luar negeri;
- memilih solusi yang menyasar **akar** tantangan, bukan gejala;
- membaca data sosial tanpa menyimpulkan berlebihan;
- menjelaskan fungsi dan keunggulan nilai Pancasila dalam pergaulan internasional tanpa melebih-lebihkan.

◆ KONSEP INTI

Pancasila dirumuskan pada 1945, ketika kabar dari luar negeri sampai ke Indonesia lewat radio dan surat kabar dalam hitungan hari. Kini, sebuah video yang diunggah di belahan dunia lain dapat ditonton jutaan pelajar Indonesia dalam hitungan menit. Perubahan sebesar itu membawa peluang sekaligus tantangan bagi nilai-nilai Pancasila. Sub bab ini membahas apa itu globalisasi, tantangan apa saja yang muncul dari dalam dan dari luar negeri, bagaimana memilih solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah, dan bagaimana Pancasila justru dapat menjadi bekal Indonesia dalam pergaulan dunia.

1. Globalisasi dan dampak gandanya

Globalisasi adalah proses makin eratnya hubungan antarbangsa sehingga batas negara seolah makin tipis. Ada empat arus yang bergerak cepat: **barang** (produk dari berbagai negara dijual di toko daring), **informasi** (berita, video, dan unggahan media sosial), **gagasan** (paham politik, gaya hidup, nilai-nilai baru), dan **orang** (wisatawan, pelajar, dan pekerja yang berpindah antarnegara).

Setiap arus membawa dampak ganda. Arus informasi membuat siswa di desa terpencil dapat belajar dari kursus daring kelas dunia, tetapi juga membuat hoaks dan ajakan membenci

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menyebar cepat. Arus barang membuka pasar bagi produk Indonesia, tetapi juga mendorong gaya hidup serba membeli. Arus gagasan memperkenalkan nilai positif seperti disiplin dan kepedulian lingkungan, tetapi juga paham yang menolak dasar negara. Karena itu, sikap terhadap globalisasi tidak dapat disederhanakan menjadi "terima semua" atau "tolak semua". Yang diperlukan adalah kemampuan **menimbang**, dan Pancasila menjadi ukurannya.

2. Tantangan dari dalam dan dari luar

Tantangan penerapan Pancasila dapat dikelompokkan menurut **sumber pengaruhnya** (lihat Gambar 1.20).



Gambar 1.20 Tantangan penerapan Pancasila dari dalam dan dari luar negeri, solusi yang menyasar akarnya, serta tiga jenis tanggapan terhadap satu tantangan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Tantangan dari dalam bersumber dari perilaku dan keadaan di dalam negeri. **Korupsi** dan pungutan liar melanggar sila kelima, karena mengambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi; karena itulah negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU Nomor 30 Tahun 2002. **Intoleransi** dan politik identitas yang memusuhi kelompok lain melanggar sila pertama, kedua, dan ketiga. **Kesenjangan sosial dan antarwilayah**, misalnya perbedaan mutu sekolah, layanan kesehatan, dan akses internet antara kota besar dan daerah terpencil, menghambat terwujudnya keadilan sosial dan dapat melemahkan rasa persatuan.

Tantangan dari luar bersumber dari pengaruh yang masuk dari luar negeri. Ada **ideologi transnasional**, yaitu paham lintas negara yang menolak dasar negara dan sering menyebar lewat media sosial. Ada **gaya hidup konsumtif dan budaya pamer** yang ditiru dari tontonan global, sehingga sebagian orang berutang demi tampil mewah. Ada pula **kejahatan**

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

digital lintas negara, seperti judi daring dan penipuan daring, yang servernya berada di luar negeri tetapi korbannya warga Indonesia.

Perhatikan: asal tantangan ditentukan oleh **sumber pengaruhnya**, bukan oleh siapa pelakunya. Paham dari luar tetap tantangan dari luar walaupun yang terpengaruh warga Indonesia. Sebaliknya, korupsi tetap tantangan dari dalam walaupun uang hasil korupsinya disimpan di luar negeri.

3. Menyaring, bukan menolak semua

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak menolak semua yang datang dari luar. Sikap yang tepat adalah **menyaring**: mengambil yang sejalan dengan nilai Pancasila dan menolak yang bertentangan dengannya. Teknologi, ilmu pengetahuan, budaya kerja yang disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat diterima dan bahkan memperkaya kehidupan bangsa. Paham yang hendak mengganti dasar negara, budaya yang merendahkan martabat manusia, atau gaya hidup yang mendorong keserakahan perlu ditolak.

Ambil contoh budaya populer dari luar negeri yang digemari banyak pelajar, seperti musik, film, dan serial. Sikap menyaring tidak melarang pelajar menikmatinya. Pelajar dapat mengambil hal yang baik darinya, misalnya kerja keras para senimannya, kerapian produksinya, atau cara negara itu mempromosikan budayanya ke dunia, lalu memakai pelajaran itu untuk mengembangkan seni dan budaya Indonesia sendiri. Yang perlu ditolak adalah sikap yang ikut terbawa, misalnya merendahkan budaya sendiri, memuja penampilan fisik secara berlebihan, atau berutang demi membeli barang yang dipakai idolanya.

Sikap menutup diri dari segala pengaruh luar sering terdengar seperti cinta tanah air, padahal bertentangan dengan keterbukaan Pancasila dan merugikan bangsa sendiri. Indonesia yang menolak semua produk dan gagasan luar akan tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan sulit bekerja sama dengan bangsa lain.

4. Solusi yang menyasar akar

Untuk setiap tantangan, ada tiga jenis tanggapan yang dapat dibedakan (lihat bagian bawah Gambar 1.20). **Tanggapan seremonial** mengingatkan, tetapi tidak mengubah keadaan; contohnya memasang spanduk imbauan di jembatan agar warga tidak membuang sampah ke sungai. **Tanggapan represif semata** menghukum setelah pelanggaran terjadi tanpa mencegahnya; contohnya mendenda warga yang tertangkap membuang sampah, sementara tempat sampah dan pengangkutan tidak tersedia. **Tanggapan yang menyasar akar** mengubah keadaan yang membuat masalah terjadi; contohnya menyediakan pengangkutan sampah terjadwal dan bank sampah yang dikelola warga.

Tanggapan represif tidak selalu salah, karena penegakan hukum tetap perlu. Namun, bila yang ditanyakan adalah solusi yang **paling** tepat, tanggapan yang menyasar akar biasanya lebih kuat, terutama bila disertai penegakan hukum yang adil.

Ada satu ukuran lagi dari sila kedua: orang yang terjerat masalah harus diperlakukan secara **bermartabat**. Hukuman yang mempermalukan di depan umum, misalnya mengarak atau memajang foto pelaku pencurian kecil di media sosial, bertentangan dengan nilai

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

kemanusiaan. Cara itu juga jarang menyelesaikan masalah, karena orang yang terjerat justru akan menyembunyikan keadaannya dan tidak mencari pertolongan. Yang sesuai Pancasila adalah **memulihkan**: pendampingan, konseling, dan perbaikan keadaan yang menjeratnya.

Banyak tantangan disajikan bersama data. Bacalah dengan hati-hati: bedakan **persentase** dari **jumlah**, periksa apakah **periodenya** sama, ingat bahwa angka nasional tidak menggambarkan setiap daerah, dan satu penurunan belum berarti masalahnya selesai.

5. Pancasila dalam pergaulan dunia

Globalisasi tidak hanya membawa tantangan. Ia juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menyumbangkan nilai-nilainya kepada dunia. Dasarnya ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945: negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tiga peristiwa sejarah memperlihatkan bagaimana nilai itu dijalankan.

Konferensi Asia-Afrika (KAA), 18–24 April 1955. Sepuluh tahun setelah merdeka, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan 29 negara Asia dan Afrika di **Gedung Merdeka, Bandung** (lihat Gambar 1.21). Konferensi ini diprakarsai Indonesia bersama India, Pakistan, Burma (kini Myanmar), dan Sri Lanka, di tengah Perang Dingin dan masih banyaknya bangsa yang terjajah. Hasilnya, **Dasasila Bandung**, memuat sepuluh prinsip, antara lain menghormati hak asasi manusia dan Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa, mengakui persamaan semua ras dan bangsa, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan sila kedua dan kelima, dan kemudian menjadi salah satu dasar Gerakan Non-Blok.



Gambar 1.21 Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika, Bandung, tempat Konferensi Asia-Afrika 18–24 April 1955; kini menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Sumber: Chainwit., Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (dipotong dan diperkecil).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pidato Soekarno di PBB, 30 September 1960. Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-15 di New York, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul *To Build the World Anew* (Membangun Dunia Kembali). Ia memperkenalkan Pancasila kepada para pemimpin dunia dan mengajak membangun tatanan dunia yang bebas dari penjajahan, berdasar persaudaraan dan keadilan antarbangsa. Arsip pidato itu ditetapkan UNESCO sebagai bagian dari Ingatan Dunia (*Memory of the World*) pada 2023.

Kontingen Garuda sejak 1957. Setelah krisis Terusan Suez tahun 1956, PBB membentuk pasukan darurat untuk menjaga perdamaian di perbatasan Mesir. Pada Januari 1957, Indonesia mengirim **Kontingen Garuda I** ke Mesir sebagai bagian dari pasukan itu. Sejak itu, prajurit Indonesia terus ikut dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara yang dilanda konflik. Mereka bertugas di bawah mandat PBB, tidak memihak pihak yang bertikai, dan melindungi warga sipil. Di situlah nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila tampak dalam tindakan.

Ketiga peristiwa itu menunjukkan fungsi Pancasila dalam pergaulan dunia: menjadi **landasan** hubungan dan kerja sama internasional yang setara dan berkeadilan. Namun, berhati-hatilah dengan kesimpulan yang **berlebihan**, misalnya bahwa Pancasila membuat Indonesia otomatis lebih unggul daripada bangsa lain, bahwa nilai Pancasila pasti diterima semua bangsa, atau bahwa peran internasional Indonesia terutama untuk memenangkan persaingan kekuatan. Pancasila menjadi bekal untuk bekerja sama, bukan alasan untuk merasa paling tinggi.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Jasa joki tugas daring

Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.

Pada 2026, guru di SMA Cendekia Raya (fiktif) menemukan banyak tugas yang dikerjakan orang lain melalui jasa joki berbayar yang diiklankan di media sosial. Dari wawancara, para siswa mengaku tugas dari berbagai mata pelajaran menumpuk pada minggu yang sama, sebagian besar berupa ringkasan yang mudah dialihkan ke orang lain, dan mereka takut nilainya rendah. Sekolah menimbang empat tanggapan: (1) memasang poster "Jujur itu keren" di setiap kelas; (2) mengumumkan nama siswa yang ketahuan memakai joki saat upacara; (3) mengatur jadwal tugas antarguru agar tidak menumpuk, mengganti sebagian tugas ringkasan dengan proyek dan presentasi di kelas, serta membuka jam pendampingan belajar; (4) memblokir semua situs dan aplikasi dari luar negeri di jaringan sekolah. Tanggapan mana yang paling tepat?

1. **Rumuskan akar masalah dalam satu kalimat.** "Tugas menumpuk dan mudah dialihkan, sementara siswa takut nilainya rendah dan tidak mendapat bantuan belajar."
2. **Uji tanggapan (1).** Seremonial: mengingatkan kejujuran, tetapi keadaan pemicunya tidak berubah.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. **Uji tanggapan (2).** Represif dan mempermalukan: bertentangan dengan sila kedua, dan siswa justru akan makin menyembunyikan masalahnya.
4. **Uji tanggapan (4).** Menolak semua pengaruh luar: berlebihan, merugikan pembelajaran, dan tidak menyentuh akar karena jasa joki juga ada di dalam negeri.
5. **Uji tanggapan (3).** Mengubah keadaan pemicu (jadwal dan bentuk tugas) sekaligus membantu siswa (pendampingan belajar), sehingga kejujuran (sila pertama dan kelima) dan martabat siswa (sila kedua) terjaga.

Jawaban: tanggapan (3), karena menyasar akar masalah dan memperlakukan siswa secara bermartabat; aturan sekolah tentang kejujuran tetap ditegakkan, tetapi bukan dengan mempermalukan.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Globalisasi membawa arus barang, informasi, gagasan, dan orang; dampaknya ganda.
- Tantangan dari dalam (korupsi, intoleransi, kesenjangan) dan dari luar (ideologi transnasional, gaya hidup konsumtif, kejahatan digital lintas negara) dibedakan menurut sumber pengaruhnya.
- Sikap yang tepat adalah menyaring, bukan menolak semua pengaruh luar.
- Solusi terbaik menyasar akar masalah, bukan seremonial atau represif semata, dan memulihkan orang yang terjerat secara bermartabat.
- Pancasila menjadi landasan kerja sama dunia yang adil: KAA Bandung 1955, pidato Soekarno di PBB 1960, Kontingen Garuda sejak 1957; waspadai klaim "paling unggul".

Bagan pada Gambar 1.22 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 1.22 Peta konsep tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Rumuskan akar tantangan** dalam satu kalimat. Misalnya, "uang mudah berpindah tangan di loket" atau "siswa tidak memahami risiko utang".
2. **Uji setiap pilihan**: apakah mengubah akar itu? Apakah memperlakukan orang secara bermartabat?
3. **Untuk soal data**, baca judul, satuan, periode, lalu coret kesimpulan yang melampaui data.
4. **Untuk soal global**, pilih fungsi yang sesuai dengan ilustrasi, tolak klaim yang berlebihan.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Menutup diri dari semua pengaruh luar.** Terdengar nasionalis, tetapi bertentangan dengan keterbukaan Pancasila.
- **Solusi seremonial atau mempermalukan.** Terlihat tegas atau meriah, tetapi keadaan pemicunya tidak berubah.
- **Syarat yang menutupi masalah.** Pilihan yang membolehkan perilaku bermasalah "asalkan" memenuhi satu syarat kecil, padahal perilakunya sendiri bertentangan dengan nilai yang diuji.
- **Kesimpulan data berlebihan.** "Turun satu poin, berarti sudah teratasi"; "persentasenya lebih tinggi, berarti jumlahnya lebih banyak".
- **Klaim keunggulan yang berlebihan.** Pancasila menjadi landasan hubungan yang adil, bukan alasan merasa lebih tinggi dari bangsa lain.

> Contoh salah tafsir: seorang siswa membaca bahwa persentase pemuda yang tidak sekolah, bekerja, atau berlatih turun dari tahun lalu, lalu menyimpulkan "masalah ini sudah hampir teratasi". Ia lupa bahwa angkanya masih sekitar satu dari lima pemuda. Penurunan kecil belum berarti masalahnya selesai.

• BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 5 (fungsi Pancasila dalam pergaulan global, Benar/Salah, 74 % benar). Ilustrasi menggambarkan nilai Pancasila sebagai solusi bagi keberagaman dunia, lalu meminta kamu menilai tiga pernyataan tentang fungsinya.

- Konsep kunci: fungsi Pancasila dalam pergaulan global dan bahaya klaim berlebihan (bagian 5).
- Langkah: untuk setiap pernyataan, tanyakan "apakah ini **fungsi** yang didukung ilustrasi, atau **klaim** yang melampauinya?".
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang terdengar membanggakan, tetapi menilai derajat bangsa lebih tinggi daripada yang didukung ilustrasi.

Rujukan: soal nomor 5 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Nomor 9 (pasukan perdamaian Indonesia, PG, 44 % benar). Ilustrasi menyebut pengiriman pasukan perdamaian sejak 1957 sebagai perwujudan nilai Pancasila dan amanat Pembukaan. Kamu diminta menentukan **keunggulan nilai Pancasila** dalam peran tersebut.

- Konsep kunci: peran aktif Indonesia menjaga perdamaian berlandaskan kemanusiaan, tidak memihak, dan tidak untuk kepentingan kekuasaan (bagian 5; lihat juga sub bab 4.5).
- Langkah: hubungkan tindakan nyata (mengirim pasukan perdamaian ke negara konflik) dengan nilai yang paling langsung tampak → periksa apakah pilihan itu menyebut tujuan yang sesuai Pembukaan, bukan kepentingan geopolitik.
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang memakai nilai Pancasila lain dengan hubungan yang kurang langsung, dan pilihan yang menonjolkan posisi atau kepentingan strategis Indonesia.

Rujukan: soal nomor 9 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Rumuskan akar masalah; tolak solusi seremonial, represif semata, menolak semua pengaruh luar, atau melempar tanggung jawab.

►. Pada 2026, video dari luar negeri yang menyebut imunisasi anak berbahaya menyebar luas di grup percakapan warga. Di beberapa desa, banyak orang tua lalu menolak anaknya diimunisasi, padahal penyakit yang dapat dicegah imunisasi mulai muncul kembali. Petugas kesehatan dan sekolah mencari cara untuk mengatasinya.
Upaya yang paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. memblokir semua situs dan aplikasi dari luar negeri agar video serupa tidak masuk lagi
B. memasang spanduk ajakan imunisasi di setiap balai desa dan di gerbang sekolah setempat
C. memberi penjelasan berbasis bukti lewat tokoh tepercaya dan melatih warga memeriksa kabar
D. mendenda orang tua yang menolak imunisasi tanpa terlebih dahulu memberi mereka penjelasan apa pun
E. menyerahkan penanganan video itu sepenuhnya kepada perusahaan pemilik aplikasi percakapan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: C**

Konsep: tantangan globalisasi diatasi dengan solusi yang **menyasar akar**, bukan yang **seremonial**, **represif semata**, atau **menolak semua pengaruh luar**. Kabar bohong ini masuk dari luar (arus informasi), tetapi akarnya adalah kurangnya penjelasan yang dipercaya warga dan kemampuan memeriksa kabar.

Langkah 1 – Rumuskan akar masalah dalam satu kalimat. "Orang tua percaya kabar keliru karena tidak mendapat penjelasan yang dipercaya dan tidak terbiasa memeriksa kebenaran kabar."
Langkah 2 – Uji setiap upaya:
• A ✗ — menolak semua pengaruh luar: berlebihan dan merugikan, serta kabar serupa tetap dapat dibuat di dalam negeri.
• B ✗ — seremonial: mengingatkan, tetapi tidak menjawab keraguan orang tua.
• C ✓ — menjawab keraguan dengan bukti lewat orang yang dipercaya dan membekali warga kemampuan menyaring.
• D ✗ — represif tanpa penjelasan: tidak mengubah keyakinan, bahkan dapat menambah penolakan.
• E ✗ — memindahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak lain; petugas, sekolah, dan warga tetap berperan.

Cek ulang: hanya C yang mengubah keadaan pemicunya.

Jawaban: C.

Jebakan: A terdengar tegas dan "melindungi bangsa", padahal tidak menyentuh akar dan bertentangan dengan sikap menyaring.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tulis dulu akar tantangannya dalam satu kalimat.

1. Pada 1988 dan 1989, Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja beserta negara-negara di kawasan. Indonesia kemudian menjadi ketua bersama Prancis dalam Konferensi Internasional Paris tentang Kamboja, yang pada 23 Oktober 1991 menghasilkan perjanjian perdamaian. Kesimpulan yang paling tepat tentang peran Indonesia tersebut dikaitkan dengan nilai Pancasila adalah ....
Sumber: Library of Congress, Indonesia: A Country Study; Perpustakaan Digital PBB.

A. Indonesia berhak menentukan bentuk pemerintahan Kamboja karena telah berjasa dalam perundingan
B. perdamaian hanya dapat tercapai bila pihak yang bertikai menganut ideologi yang sama dengan Indonesia
C. peran itu terutama bertujuan memperluas pengaruh militer Indonesia di kawasan Asia Tenggara
D. Indonesia menerapkan nilai musyawarah dan perdamaian dengan menengahi perundingan tanpa memihak
E. nilai Pancasila terbukti pasti diterima oleh semua bangsa yang sedang mengalami konflik bersenjata

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Di banyak desa pedalaman, sekolah kekurangan guru tetap, jaringan internet lemah, dan siswa harus menempuh perjalanan jauh. Sementara itu, banyak sekolah di kota besar sudah memakai kelas digital. Kesenjangan ini membuat sebagian siswa pedalaman merasa tertinggal dan kurang diperhatikan negara.
Pernyataan manakah yang tepat tentang tantangan penerapan Pancasila dalam ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Karena kelas digital memakai teknologi buatan luar negeri, kesenjangan itu tantangan dari luar.
☐ B. Kesenjangan itu tantangan dari dalam yang menghambat keadilan sosial serta rasa persatuan.
☐ C. Lomba pidato bertema persatuan di sekolah pedalaman sudah menyasar akar kesenjangan tersebut.
☐ D. Memindahkan semua siswa pedalaman ke sekolah kota merupakan solusi yang paling adil bagi mereka.
☐ E. Penempatan guru tetap berinsentif dan perbaikan jaringan internet menyasar akar kesenjangan itu.

Kunci singkat: 1. D 2. B, E

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu memberi satu contoh tanggapan seremonial, satu represif, dan satu yang menyasar akar untuk masalah yang sama?
- Mengapa "menolak semua budaya asing" tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
- **Yang harus kuingat:** cari akar masalah; saring pengaruh luar; perlakukan orang yang terjerat secara bermartabat; jangan menyimpulkan melebihi data.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 1.6: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.
next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-1.6

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kuis Akhir Bab 1

PPKN-KB1

Jumlah soal: 30 **Waktu anjuran:** 60 menit

Kerjakan sendiri dan berwaktu. Setelah selesai, cocokkan dengan kunci di Bagian D, isi tabel skor, lalu lihat anjuran di bawahnya.

Kerjakan Kuis Bab 1 di LMS

Skor dan progresmu tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-KB1

1. Pada 17 Agustus 1945 sore, Mohammad Hatta menerima keberatan wakil rakyat dari Indonesia bagian timur terhadap tujuh kata dalam rancangan sila pertama Piagam Jakarta. Keesokan paginya, sebelum sidang PPKI, Hatta membicarakannya dengan beberapa tokoh golongan Islam. Mereka menyetujui tujuh kata itu diganti sehingga sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Makna sikap para tokoh golongan Islam tersebut bagi kehidupan berbangsa adalah ....

A. menunjukkan bahwa nilai agama tidak lagi menjadi bagian dari dasar negara Indonesia
B. mendahulukan keutuhan bangsa yang baru merdeka di atas kepentingan golongan sendiri
C. membuktikan bahwa keputusan penting sebaiknya diambil oleh satu tokoh yang paling dipercaya
D. menunjukkan bahwa wakil daerah yang jumlahnya sedikit selalu harus diikuti oleh mayoritas
E. membuktikan bahwa rumusan Piagam Jakarta disusun tanpa melibatkan wakil golongan Islam

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Dalam sidang BPUPK, para anggota menyampaikan usulan dasar negara yang berbeda-beda. Panitia Sembilan kemudian menyusun rumusan bersama, dan PPKI mengesahkan rumusan akhirnya setelah musyawarah. Proses ini sering dijadikan teladan bagi masyarakat yang beragam.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang pelajaran yang dapat diambil dari proses perumusan Pancasila!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dihindari.	○	○
Rumusan yang disepakati bersama menunjukkan bahwa Pancasila hanya mewakili satu golongan.	○	○
Kesediaan berkompromi dapat diteladani ketika warga menyusun aturan bersama di lingkungannya.	○	○

3. Korupsi masih menjadi tantangan penerapan Pancasila dari dalam negeri. Salah satu bentuknya terjadi ketika bantuan sosial bagi warga miskin dipotong oleh oknum petugas di tingkat desa, sehingga warga menerima kurang dari jumlah yang seharusnya.
Upaya yang paling tepat untuk mencegah kejadian serupa sesuai nilai Pancasila adalah ....

A. menghentikan bantuan sosial sampai semua petugas desa terbukti bersih dari korupsi
B. membuka daftar penerima dan jumlah bantuan agar warga dapat ikut mengawasi penyalurannya
C. menyerahkan seluruh penyaluran bantuan kepada tokoh masyarakat yang paling disegani di desa
D. meminta warga penerima bantuan bersyukur dan tidak mempersoalkan selisih jumlahnya
E. mengganti bantuan tunai dengan barang agar tidak ada lagi uang yang dapat dipotong

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Sebuah akun media sosial menyebarkan pendapat bahwa karena Pancasila adalah ideologi terbuka, sila-silanya boleh diganti kapan saja agar sesuai dengan selera generasi muda. Unggahan itu banyak dibagikan pelajar.
Penilaian yang paling tepat terhadap pendapat tersebut adalah ....

A. tepat, karena ideologi terbuka berarti semua nilainya mengikuti perkembangan zaman
B. tepat, karena generasi muda berhak menentukan sendiri ideologi yang mereka anut
C. kurang tepat, karena sila-sila hanya boleh diganti melalui pemungutan suara seluruh rakyat
D. keliru, karena keterbukaan berlaku pada cara pelaksanaan, sedangkan nilai dasarnya tetap
E. keliru, karena ideologi terbuka berarti Pancasila tidak boleh ditafsirkan atau dijabarkan sama sekali

5. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dijabarkan dalam berbagai kebijakan baru yang menjawab perkembangan zaman. Kebijakan itu boleh berubah, asalkan tetap berpijak pada nilai dasar sila-silanya.
Kebijakan manakah yang merupakan penjabaran baru dan tetap sesuai dengan nilai dasar Pancasila? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Mengganti musyawarah desa dengan keputusan kepala desa agar pembangunan berjalan lebih cepat.
☐ B. Menyediakan layanan administrasi kependudukan secara daring bagi warga di daerah terpencil.
☐ C. Membuat undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjaga martabat warga di era digital.
☐ D. Memasukkan gagasan ideologi asing ke rumusan sila agar lebih mudah diterima generasi muda.
☐ E. Menyertakan juru bahasa isyarat dalam siaran berita pemerintah agar warga tuli mendapat informasi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Dulu warga yang sakit umumnya membayar sendiri seluruh biaya berobat, sehingga keluarga miskin sering tidak mampu ke rumah sakit. Sejak 2014, pemerintah menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional: warga membayar iuran sesuai kemampuan dan iuran warga miskin dibayar negara. Caranya terus diperbaiki mengikuti kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ....

A. nilai dasar keadilan sosial tetap, sedangkan cara mewujudkannya disesuaikan dengan perkembangan
B. nilai dasar keadilan sosial diganti dengan nilai baru yang dianggap lebih sesuai dengan zaman sekarang
C. pemerintah boleh meniru sistem kesehatan negara mana pun tanpa menimbang nilai bangsa sendiri
D. kebijakan kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada pasar agar warga bebas memilih layanannya
E. semua warga wajib menerima layanan yang sama persis tanpa melihat kemampuan dan kebutuhannya

7. Dalam forum pemuda negara-negara ASEAN tahun 2026, Laras, delegasi pelajar Indonesia, diminta mengusulkan cara menyelesaikan perselisihan batas wilayah perairan antara dua negara anggota yang membuat hubungan kedua negara memanas.
Usulan Laras yang paling mencerminkan nilai Pancasila adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. kedua negara berunding secara damai dengan saling menghormati kedaulatan masing-masing
B. negara yang lebih kuat secara militer berhak menentukan sendiri batas wilayah perairannya
C. negara-negara ASEAN lain memilih salah satu pihak agar perselisihan cepat selesai
D. Indonesia mengambil alih pengelolaan perairan yang diperselisihkan sampai ada kesepakatan
E. kedua negara memutus hubungan dagang sampai pihak lawan mengakui klaimnya sendiri

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Banjir merendam permukiman di sebuah kota pada awal 2027. Warga dari berbagai agama dan suku membuka dapur umum bersama. Pengurus beberapa rumah ibadah menjadikan halamannya tempat mengungsi bagi siapa saja. Rapat warga memutuskan bantuan dibagikan lebih dahulu kepada lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang nilai Pancasila yang tercermin dalam ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Dapur umum lintas agama dan suku menunjukkan bahwa perbedaan agama perlu dihilangkan agar warga dapat bersatu.	○	○
Rumah ibadah yang menampung pengungsi tanpa memandang agama mencerminkan sila pertama yang dijalankan bersama sila kedua.	○	○
Keputusan rapat warga mendahulukan kelompok rentan mencerminkan musyawarah yang menghasilkan keputusan berkeadilan.	○	○

9. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 2026, sekelompok nelayan menilai sebuah undang-undang yang sudah berlaku mengutamakan pemodal besar dan mengabaikan nelayan kecil, sehingga bertentangan dengan keadilan sosial.
Langkah yang sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara untuk mempersoalkan undang-undang itu adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tidak mematuhi undang-undang itu sampai pemerintah bersedia mengubah isinya
B. meminta presiden mencabut undang-undang itu seketika melalui keputusan presiden
C. mengajukan pengujian undang-undang itu terhadap UUD ke Mahkamah Konstitusi
D. mengadukan undang-undang itu ke Mahkamah Agung agar dinyatakan tidak berlaku
E. membiarkan undang-undang itu karena yang sudah disahkan DPR pasti sesuai Pancasila

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Pada 2026, pemilik sebuah kafe menolak pengunjung yang memakai kursi roda dengan alasan "merepotkan pelayan". Pengunjung itu mengunggah kejadian tersebut ke media sosial dengan bahasa yang sopan dan meminta penjelasan pemilik kafe.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan prinsip HAM dalam ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Pemilik kafe bebas menolak siapa pun karena kafe itu miliknya sendiri.	○	○
Penolakan tersebut merupakan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.	○	○
Menyampaikan keberatan secara sopan di media sosial termasuk penggunaan hak berpendapat.	○	○

11. Koperasi siswa sebuah SMA membagikan sisa hasil usaha tahun 2026 kepada anggotanya. Pembagiannya tidak sama rata: anggota yang lebih sering berbelanja dan lebih aktif menjaga koperasi mendapat bagian lebih besar, sesuai aturan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
Alasan pembagian tersebut tetap sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. keadilan berarti semua anggota menerima jumlah yang sama persis tanpa melihat keaktifannya
B. anggota yang lebih aktif berhak menentukan sendiri besar bagian yang mereka terima
C. koperasi sekolah tidak terikat sila kelima karena bukan lembaga milik pemerintah
D. keadilan berarti bagian disesuaikan dengan kontribusi menurut aturan yang disepakati
E. pembagian yang tidak sama rata selalu menunjukkan adanya ketidakadilan di koperasi

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Judi daring makin banyak dimainkan pelajar karena iklannya mudah muncul di media sosial dan permainan daring. Sebagian pelajar terjerat utang dan prestasinya menurun. Sekolah dan orang tua di sebuah kota ingin mencari cara yang paling mengena untuk melindungi pelajar.
Solusi yang paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. melarang pelajar memakai semua aplikasi buatan luar negeri di ponsel masing-masing
B. mengadakan lomba poster antijudi daring setiap tahun di semua sekolah kota itu
C. menyerahkan sepenuhnya penanganan judi daring pelajar kepada aparat kepolisian
D. membekali pelajar literasi digital dan keuangan serta pendampingan keluarga
E. memberi hukuman berat kepada setiap pelajar yang ketahuan bermain tanpa pembinaan

13. Pada 18–24 April 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri 29 negara. Konferensi itu menghasilkan Dasasila Bandung, antara lain berisi penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap kedaulatan semua negara, dan pengakuan persamaan derajat semua bangsa, besar maupun kecil.
Keterkaitan peran Indonesia tersebut dengan nilai Pancasila dalam pergaulan antarbangsa adalah ....
Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Museum Konferensi Asia Afrika.

A. nilai kemanusiaan dan persatuan Pancasila dapat menjadi dasar kerja sama antarbangsa yang setara
B. bangsa-bangsa peserta wajib menjadikan Pancasila sebagai ideologi negaranya masing-masing
C. Indonesia memihak salah satu blok kekuatan dunia agar keamanan nasionalnya lebih terjamin
D. nilai Pancasila hanya berlaku bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pernah mengalami penjajahan
E. persamaan derajat bangsa berarti semua negara peserta harus memakai sistem pemerintahan yang sama

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Pada 2026, sebuah kabupaten menetapkan peraturan daerah yang membolehkan pabrik membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan, dengan alasan menarik investor. Warga di hilir yang memakai air sungai untuk sawah dan kebutuhan sehari-hari menolak aturan itu.
Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Peraturan daerah harus sejalan dengan undang-undang dan UUD yang memuat nilai-nilai Pancasila.
☐ B. Peraturan daerah itu tetap layak berlaku karena tujuannya meningkatkan pendapatan daerah.
☐ C. Warga dapat mengajukan pengujian peraturan daerah itu kepada Mahkamah Agung.
☐ D. Peraturan itu bertentangan dengan keadilan sosial karena merugikan warga yang bergantung pada sungai.
☐ E. Pabrik boleh menentukan sendiri batas limbahnya karena peraturan daerah sudah mengizinkannya.

15. Karang Taruna Desa Wanareja beranggotakan pemuda asli desa dan pemuda pendatang dari berbagai daerah. Saat menyusun anggaran dasar organisasi pada 2026, pemuda asli ingin nama organisasi memakai bahasa daerah setempat, sedangkan sebagian pendatang khawatir nama itu membuat mereka merasa bukan bagian organisasi. Rapat pun memanas. Sikap yang paling meneladani cara para pendiri bangsa merumuskan Pancasila adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. langsung memungut suara agar nama organisasi ditentukan oleh kelompok yang jumlahnya lebih banyak
B. menyerahkan keputusan nama organisasi kepada kepala desa sebagai tokoh yang paling dihormati warga
C. mengganti nama organisasi dengan istilah bahasa asing agar tidak ada kelompok yang merasa diutamakan
D. menunda pembahasan nama organisasi sampai kelompok pendatang bersedia menerima usulan pemuda asli
E. mencari nama bersama yang menghormati bahasa setempat dan membuat semua anggota merasa memiliki

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia. Pemerintah lalu menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sejak itu batik dipakai di sekolah, kantor, dan acara resmi, serta dibuat oleh perajin di banyak daerah dengan motif khas masing-masing.
Makna peristiwa tersebut bagi Pancasila sebagai identitas nasional adalah ....
Sumber: Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009; UNESCO.

A. batik menggantikan kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa di mata dunia
B. batik yang beragam motifnya memperlihatkan persatuan bangsa dalam keberagaman budaya
C. pengakuan dunia membuktikan budaya Indonesia lebih unggul daripada budaya bangsa lain
D. batik perlu dibuat seragam motifnya di seluruh daerah agar menjadi satu identitas
E. pengakuan dunia menjadikan batik tidak boleh lagi dikembangkan dengan motif baru

17. Dalam kehidupan sekolah, nilai sila-sila Pancasila tampak dari tindakan sederhana para siswa. Perhatikan beberapa perilaku siswa berikut.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hubungan perilaku dan sila Pancasila!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Meminta maaf kepada teman yang tersinggung oleh candaan tentang sukunya mencerminkan sila kedua dan ketiga.	○	○
Menolak teman sekelas yang berbeda agama ikut kelompok belajar mencerminkan sila pertama.	○	○
Memaksakan calon ketua kelas karena kelompoknya paling banyak mencerminkan sila keempat.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Di banyak desa, pembangunan jalan desa diputuskan dalam musyawarah desa. Warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan mendapat ganti rugi yang disepakati, pekerjaan ringan dikerjakan bersama warga, dan jalan dibangun menjangkau dusun-dusun yang paling terpencil.

Pernyataan manakah yang tepat tentang nilai Pancasila dalam ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

- ☐ A. Keputusan melalui musyawarah desa mencerminkan nilai sila keempat.
- ☐ B. Ganti rugi bagi pemilik tanah menunjukkan penghormatan atas hak warga.
- ☐ C. Karena sudah dimusyawarahkan, warga yang keberatan wajib menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi.
- ☐ D. Pekerjaan bersama warga menunjukkan sila pertama karena dilakukan secara sukarela.
- ☐ E. Jalan yang menjangkau dusun terpencil mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

19. Dalam musyawarah perencanaan anggaran desa 2027, warga terbelah antara membangun jembatan atau memperbaiki saluran irigasi. Setelah dua kali musyawarah, kesepakatan belum tercapai. Sebagian warga mendesak agar keputusan langsung diserahkan kepada kepala desa, sebagian lain ingin musyawarah diulang terus sampai semua warga setuju. Langkah yang sesuai dengan ciri demokrasi Pancasila adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menyerahkan keputusan kepada kepala desa karena ia yang bertanggung jawab atas anggaran

B. mengulang musyawarah terus sampai semua warga setuju, berapa pun lama waktunya

C. membatalkan kedua rencana agar tidak ada warga yang merasa usulannya dikalahkan

D. memilih usulan yang didukung tokoh desa paling berpengaruh tanpa pemungutan suara

E. mengambil keputusan dengan suara terbanyak, lalu semua pihak menerima hasilnya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada 2026, seorang pembuat konten merekam tetangganya yang sedang sakit parah, lalu mengunggahnya tanpa izin dengan tujuan menggalang empati warganet.
Penilaian yang paling tepat terhadap perbuatan pembuat konten tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tetap melanggar hak pribadi tetangganya, sehingga seharusnya meminta izin lebih dahulu
B. dibenarkan karena tujuannya baik dan dapat mendatangkan bantuan bagi tetangganya
C. dibenarkan karena kebebasan berekspresi di media sosial pada dasarnya tidak memiliki batasan
D. menjadi urusan pribadi kedua pihak sehingga tidak berkaitan dengan hak asasi manusia
E. melanggar hukum hanya bila unggahan itu dilihat oleh lebih dari seribu orang warganet

21. Dimas, siswa kelas XI, menemukan dompet berisi uang dan kartu identitas di kursi angkutan kota pada 2026. Ia sebenarnya sedang membutuhkan uang untuk membayar kegiatan sekolah, tetapi ia memilih mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya melalui alamat di kartu identitas.
Sikap Dimas menunjukkan fungsi Pancasila sebagai ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pandangan hidup yang menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari
B. dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan undang-undang
C. ideologi terbuka yang nilai dasarnya dapat diubah sesuai kebutuhan pribadi seseorang
D. perjanjian luhur yang hanya mengikat para tokoh yang hadir dalam sidang PPKI
E. sumber hukum yang mewajibkan aparat menghukum setiap orang yang menyimpan barang temuan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Sebelum sebuah rancangan peraturan menteri ditetapkan, tim penyusunnya wajib menelaah apakah isinya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan yang lebih tinggi. Rancangan yang memuat pasal yang membeda-bedakan warga menurut agama, misalnya, dikembalikan untuk diperbaiki.
Fungsi Pancasila yang paling tampak dalam kegiatan tersebut adalah sebagai ....

A. pandangan hidup yang menuntun sikap pribadi para penyusunnya dalam pergaulan sehari-hari
B. dasar negara yang menjadi ukuran sah tidaknya isi setiap peraturan yang dibuat negara
C. jiwa bangsa yang membedakan kepribadian bangsa Indonesia dari kepribadian bangsa-bangsa lain
D. perjanjian luhur yang mengikat para pendiri bangsa pada masa awal kemerdekaan saja
E. ideologi terbuka yang membolehkan nilai dasarnya diubah sesuai kebutuhan peraturan

23. Rapat warga sebuah kompleks perumahan pada 2026 memutuskan dengan suara terbanyak untuk mengusir keluarga penyewa yang belum membayar iuran keamanan selama tiga bulan. Keluarga itu tidak diundang ke rapat sehingga tidak dapat menjelaskan bahwa kepala keluarganya baru saja kehilangan pekerjaan.
Penilaian yang paling tepat terhadap keputusan rapat tersebut berdasarkan keterkaitan sila-sila Pancasila adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sesuai sila keempat karena keputusan diambil oleh suara terbanyak warga yang hadir
B. belum sesuai sila keempat karena musyawarahnya mengabaikan nilai kemanusiaan sila kedua
C. sesuai sila kelima karena setiap warga wajib menanggung iuran yang sama besarnya
D. belum sesuai sila ketiga karena keluarga penyewa bukan bagian dari warga kompleks
E. sesuai sila kedua karena warga lain sedang melindungi haknya dari penghuni yang tidak membayar

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di sisi lain, warga negara bebas mendirikan dan menjalankan usaha.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang ciri ideologi Pancasila yang tampak dari ketentuan tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kebebasan warga mendirikan usaha menunjukkan bahwa Pancasila sama dengan ideologi liberal.	○	○
Penguasaan negara atas cabang produksi penting bertujuan menjamin kepentingan orang banyak.	○	○
Pancasila menolak hak milik pribadi sehingga seluruh kekayaan harus menjadi milik negara.	○	○

25. Menjelang pemilihan kepala daerah 2026, media sosial dipenuhi kritik terhadap program para calon. Sebagian kritik disertai data dan argumen, sebagian lain berisi ejekan terhadap suku dan agama calon. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28J ayat (2) menyatakan pelaksanaan hak dibatasi undang-undang untuk menghormati hak orang lain.
Pernyataan manakah yang sesuai dengan pelaksanaan HAM dalam demokrasi Pancasila berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Kritik terhadap program calon yang disertai data dan argumen merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
☐ B. Semua kritik terhadap calon sebaiknya dilarang selama kampanye agar suasana pemilihan tetap tenang.
☐ C. Ejekan terhadap suku dan agama calon dapat dibatasi karena merendahkan hak dan martabat orang lain.
☐ D. Kebebasan berpendapat berarti setiap unggahan harus dibiarkan karena pembatasan bertentangan dengan HAM.
☐ E. Perbedaan pendapat tentang program calon dijawab dengan argumen, bukan dengan menyerang identitas.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

26. Media sosial dipenuhi unggahan gaya hidup mewah: barang bermerek, liburan mahal, dan tantangan membeli produk yang sedang tren. Banyak remaja merasa harus ikut agar diterima dalam pergaulan, meskipun kemampuan keluarganya terbatas.
Sikap manakah yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam menghadapi pengaruh tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Menyaring tren sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan sekadar mengikuti pergaulan.
☐ B. Menolak semua produk luar negeri agar tidak terpengaruh budaya bangsa lain.
☐ C. Menghargai produk dalam negeri tanpa merendahkan produk buatan bangsa lain.
☐ D. Meniru gaya hidup mewah sesekali agar tetap diterima oleh teman sepergaulan.
☐ E. Berhenti memakai media sosial sepenuhnya agar sama sekali tidak terpengaruh.

27. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyusun jenis peraturan secara berjenjang, dari UUD NRI 1945 di puncak, lalu antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah. Pada 2026, sebuah peraturan bupati tentang pengelolaan sampah ternyata bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang hal yang sama.
Berdasarkan ketentuan tersebut, aturan yang seharusnya dipedomani adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. peraturan bupati, karena dibuat oleh pemerintah yang paling dekat dengan warganya
B. peraturan yang paling baru ditetapkan, tanpa memperhatikan jenis dan jenjangnya
C. keduanya berlaku bersamaan dan warga bebas memilih aturan yang paling menguntungkan
D. peraturan pemerintah, karena kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan bupati
E. aturan yang dipilih DPRD kabupaten setelah membandingkan isi kedua peraturan itu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

28. Sekelompok remaja di Kampung Sukarame berlatih musik di garasi rumah salah satu anggotanya setiap malam sampai pukul 23.00 untuk persiapan lomba. Warga lansia dan keluarga yang memiliki bayi merasa terganggu, sedangkan para remaja menganggap berlatih di rumah sendiri adalah hak mereka. Ketua RT diminta menengahi.
Berdasarkan ilustrasi, peran Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menegaskan hak remaja berlatih di rumah sendiri karena kegiatan itu tidak melanggar hukum
B. mengarahkan warga yang terganggu agar memaklumi latihan malam karena kegiatan itu demi prestasi
C. menuntun kedua pihak menyepakati jam latihan yang menghormati hak remaja dan ketenangan warga
D. memberi wewenang ketua RT melarang semua latihan musik malam hari demi ketertiban seluruh kampung
E. meminta remaja memikirkan ketenangan warga setelah kebutuhan latihan mereka sendiri terpenuhi

29. Nelayan dua desa bertetangga sering berebut wilayah tangkapan. Pada 2026 mereka sepakat membagi wilayah tangkap secara bergiliran setiap bulan, sehingga nelayan perahu kecil tetap mendapat bagian di perairan yang banyak ikannya, tidak hanya nelayan berperahu besar.
Nilai Pancasila yang paling tepat tercermin dari isi kesepakatan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sila pertama, karena para nelayan bersyukur atas rezeki dari laut yang diberikan Tuhan
B. sila ketiga, karena nelayan dua desa melebur menjadi satu kelompok nelayan yang sama
C. sila keempat, karena kesepakatan dicapai melalui pemungutan suara para pemilik perahu
D. sila kedua, karena nelayan berperahu besar diminta mengalah tanpa memperoleh apa pun
E. sila kelima, karena pembagian bergiliran memberi kesempatan adil kepada semua nelayan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

30. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pada 2026, sebuah desa menetapkan peraturan desa yang hanya mengizinkan warga dari suku asli desa itu membuka lapak di pasar desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian yang paling tepat terhadap peraturan desa itu adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sah karena desa berwenang mengatur pasar miliknya sendiri sesuai asas otonomi desa
B. sah selama aturan itu disepakati sebagian besar warga dalam forum musyawarah desa
C. tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar hukum
D. tidak berlaku sehingga warga boleh langsung membongkar sendiri lapak dan papan aturan itu
E. tepat karena melindungi warga asli desa dari persaingan usaha yang tidak seimbang

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.1 · Perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa	1, 2, 15	___ / 3	Ulangi hlm. 10
Sub bab 1.2 · Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum	9, 14, 22, 27, 30	___ / 5	Ulangi hlm. 22
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	4, 5, 6, 16, 21, 24, 28	___ / 7	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	8, 11, 17, 18, 23, 29	___ / 6	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	10, 19, 20, 25	___ / 4	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	3, 7, 12, 13, 26	___ / 5	Ulangi hlm. 68

Skor 70 % atau lebih: lanjut ke bab berikutnya. Skor 50–69 %: ulangi sub bab pada tabel yang kurang dari separuh benar. Skor di bawah 50 %: baca ulang bab ini dari awal. (Angka ini anjuran belajar, bukan prediksi nilai TKA.)

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bab 2 · Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

PPKN-B2

Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat:

- menalar dinamika konstitusi dan kesepakatan dasar amandemen
- menghubungkan Pembukaan UUD NRI 1945 dengan sikap dan kebijakan negara
- menentukan lembaga negara yang berwenang dan hubungan pusat–daerah yang tepat dalam kasus
- menilai pelaksanaan demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta penegakan hukum yang berkeadilan

Peta bab

Sub bab	Judul
2.1	Dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen
2.2	Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya
2.3	Kewenangan lembaga-lembaga negara
2.4	Hubungan pemerintah pusat dan daerah
2.5	Demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945
2.6	Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD
2.7	Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions



Bab 2 di LMS

Buka seluruh latihan bab ini di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-B2

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.1 · Dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen

PPKN-2.1

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis sejarah dan perkembangan undang-undang dasar di Indonesia**. Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi ada di contoh soal resmi Pusmendik: masa UUDS 1950 ketika kabinet sering jatuh, lalu kamu diminta menentukan penyebab demokrasi tidak berjalan lancar.

Soal semacam ini tidak meminta tanggal. Soal meminta kamu membaca **masalah apa yang muncul** pada suatu masa dan **perbaikan apa yang dilakukan** kemudian.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan perubahan konstitusi Indonesia sebagai rangkaian masalah dan jalan keluar;
- menghubungkan kelemahan masa lalu dengan pasal hasil amandemen 1999–2002;
- menerapkan ketentuan perubahan UUD (Pasal 37) pada sebuah usul perubahan.

◆ KONSEP INTI

Setiap organisasi membutuhkan aturan dasar. OSIS punya anggaran dasar yang menentukan siapa ketua, bagaimana ia dipilih, dan berapa lama ia menjabat. Negara juga begitu, hanya jauh lebih besar dan lebih rumit. Aturan dasar negara disebut **konstitusi**. Di Indonesia, konstitusi tertulisnya disebut **Undang-Undang Dasar (UUD)**. Sejak merdeka, Indonesia pernah memakai tiga naskah konstitusi yang berbeda dan pernah mengubah UUD-nya empat kali. Perjalanan ini tidak terjadi secara kebetulan. Setiap perubahan lahir dari masalah nyata yang dihadapi bangsa pada masanya.

1. Konstitusi: aturan dasar yang membatasi kekuasaan

Konstitusi memuat tiga hal pokok. Pertama, **susunan negara**: lembaga apa saja yang ada dan apa wewenangnya. Kedua, **jaminan hak warga negara**. Ketiga, **pembatasan kekuasaan**, misalnya berapa lama seorang presiden boleh menjabat. Bagian ketiga inilah yang membuat konstitusi penting. Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan, siapa pun yang memegangnya.

Konstitusi ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah naskah resmi seperti UUD. Konstitusi tidak tertulis disebut **konvensi**, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang dijalankan terus-menerus dan diterima sebagai aturan. Contohnya pidato kenegaraan Presiden setiap pertengahan Agustus di depan sidang bersama DPR dan DPD. Tidak ada pasal UUD yang mewajibkan pidato itu, tetapi kebiasaan ini terus dijalankan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kedudukan UUD paling tinggi di antara peraturan lain. Undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengannya. Karena kedudukannya setinggi itu, UUD dibuat **sukar diubah**. Perubahannya tidak boleh mengikuti selera sesaat penguasa.

2. UUD 1945 dan masa awal kemerdekaan (1945–1949)

Rancangan UUD disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dalam sidang keduanya pada Juli 1945. Sehari setelah proklamasi, pada **18 Agustus 1945**, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkannya sebagai UUD negara. Naskah ini sangat singkat karena disusun dalam waktu sempit menjelang dan sesudah proklamasi. Para pendirinya sendiri menyebutnya UUD sementara yang kelak akan disempurnakan.

Belum genap tiga bulan, praktik pemerintahan sudah bergeser. Melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberi kekuasaan ikut membuat undang-undang. Lalu, melalui Maklumat Pemerintah 14 November 1945, para menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada Presiden. Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri. Inilah **sistem parlementer**, padahal UUD 1945 menghendaki menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Bunyi pasalnya tidak berubah, tetapi cara menjalankannya berubah. Pelajaran pertama dari masa ini: aturan konstitusi yang tidak tegas mudah dijalankan dengan cara yang berbeda dari maksud semula.

3. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 (1949–1959)

Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah perang dan perundingan, Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan pada **27 Desember 1949**. Syaratnya, Indonesia berbentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, sebuah negara federal. Konstitusi RIS berlaku sejak hari itu. RIS terdiri atas tujuh negara bagian, salah satunya Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta, serta sembilan satuan kenegaraan.

Bentuk serikat itu tidak bertahan lama. Banyak rakyat memandangnya sebagai warisan siasat Belanda untuk memecah belah. Satu demi satu negara bagian menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Pada **17 Agustus 1950**, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan **Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950**. Peristiwa ini menjadi alasan mengapa bentuk negara kesatuan kemudian dijaga sangat kuat dalam UUD sekarang.

UUDS 1950 memakai sistem parlementer. Kabinet dipimpin perdana menteri dan dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi tidak percaya. Partai politik sangat banyak dan tidak ada yang menang mayoritas, sehingga kabinet selalu berupa koalisi yang rapuh. Antara 1950 dan 1959, tujuh kabinet silih berganti. Rata-rata satu kabinet hanya bekerja sekitar satu setengah tahun, sehingga program pembangunan sering terputus.

UUDS 1950 memerintahkan pembentukan **Konstituante**, badan yang bertugas menyusun UUD tetap. Anggotanya dipilih dalam Pemilu Desember 1955 dan mulai bersidang di Bandung pada November 1956. Setelah bertahun-tahun, Konstituante tidak berhasil

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

mencapai suara dua pertiga yang diperlukan untuk menetapkan dasar negara. Pada **5 Juli 1959**, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekrit Presiden** yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Dekrit adalah tindakan darurat dalam keadaan buntu. Ia bukan cara biasa untuk mengganti konstitusi.

Seluruh perjalanan 1945–1959 tergambar pada Gambar 2.1. Perhatikan bahwa yang berganti adalah naskah konstitusi dan bentuk negara; Pancasila sebagai dasar negara selalu tercantum dalam pembukaan ketiga konstitusi itu.



Gambar 2.1 Linimasa konstitusi Indonesia dari 1945 sampai selesainya amandemen 2002, beserta masalah utama tiap masa. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. UUD 1945 tanpa pembatasan yang tegas (1959–1998)

Setelah Dekrit, UUD 1945 berlaku kembali, tetapi kelemahannya segera terlihat. Pasal 7 versi lama hanya berbunyi bahwa Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan **sesudahnya dapat dipilih kembali**, tanpa batas berapa kali. Presiden juga dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan sebagian anggota MPR diangkat, bukan dipilih rakyat.

Pada masa **Demokrasi Terpimpin**, kekuasaan terpusat pada Presiden. Tahun 1960, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan setelah menolak rancangan anggaran pemerintah, lalu diganti DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat Presiden. Tahun 1963, MPR Sementara bahkan mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Pada masa **Orde Baru**, pemilu dijalankan setiap lima tahun sejak 1971, tetapi Presiden Soeharto terus dipilih kembali oleh MPR selama sekitar tiga puluh tahun. Tidak ada lembaga yang dapat menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD. Hak asasi manusia hanya diatur dalam beberapa pasal pendek. Krisis ekonomi 1997–1998 memicu gerakan **Reformasi**. Soeharto berhenti pada **21 Mei 1998**, dan salah satu tuntutan utama Reformasi adalah mengubah UUD 1945.

Pelajaran dari masa ini jelas: UUD yang memberi kekuasaan besar tanpa batas waktu dan tanpa lembaga pengimbang membuka jalan bagi pemusatan kekuasaan, siapa pun presidennya.

5. Amandemen 1999–2002: memperbaiki tanpa mengganti

Amandemen berarti perubahan atas sebagian isi UUD, bukan penggantian naskah. Sebelum mulai mengubah, MPR hasil Pemilu 1999 menyepakati **lima kesepakatan dasar**:

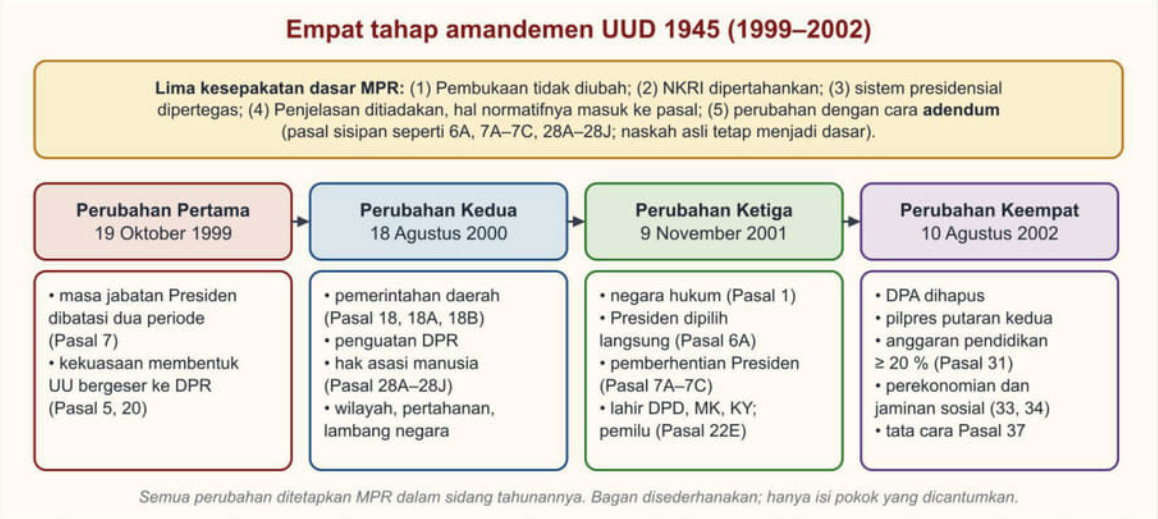
1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal normatif di dalamnya ke dalam pasal-pasal;
5. melakukan perubahan dengan cara **adendum**.

Adendum artinya perubahan ditambahkan pada naskah asli, bukan menulis ulang dari awal. Karena itu, pasal hasil perubahan diberi nomor sisipan, seperti Pasal 6A, 7A, 7B, 7C, atau 28A sampai 28J. Naskah asli 1945 tetap menjadi dasarnya.

Perubahan dilakukan bertahap dalam empat sidang MPR, seperti tampak pada Gambar 2.2. **Perubahan Pertama** (19 Oktober 1999) membatasi masa jabatan Presiden menjadi paling banyak dua periode dan menggeser kekuasaan membentuk undang-undang ke DPR. **Perubahan Kedua** (18 Agustus 2000) mengatur pemerintahan daerah, memperkuat DPR, dan menambahkan bab hak asasi manusia (Pasal 28A–28J). **Perubahan Ketiga** (9 November 2001) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, mengatur pemilihan Presiden secara langsung, aturan pemberhentian Presiden, serta melahirkan DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. **Perubahan Keempat** (10 Agustus 2002) menghapus Dewan Pertimbangan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Agung, mengatur pemilihan Presiden putaran kedua, menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 %, serta memperbarui Pasal 37 tentang tata cara perubahan UUD.



Gambar 2.2 Empat tahap amandemen UUD 1945 (1999–2002) dan isi pokok setiap tahap. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Cara terbaik memahami amandemen adalah memasangkan kelemahan lama dengan jawabannya. Masa jabatan tanpa batas dijawab Pasal 7: lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Presiden yang dipilih MPR dijawab Pasal 6A: dipilih langsung oleh rakyat. Tidak adanya penguji undang-undang dijawab Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi. Pembubaran DPR tahun 1960 dijawab Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Hak asasi yang diatur singkat dijawab Pasal 28A–28J. Pemerintahan yang terlalu terpusat dijawab Pasal 18, 18A, dan 18B tentang otonomi daerah.

Amandemen juga meluruskan masalah masa 1945. Sistem presidensial dipertegas: menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, Presiden memiliki masa jabatan tetap, dan Presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kebijakannya tidak disukai parlemen. Dengan begitu, kabinet yang jatuh bangun seperti masa 1950-an tidak terulang.

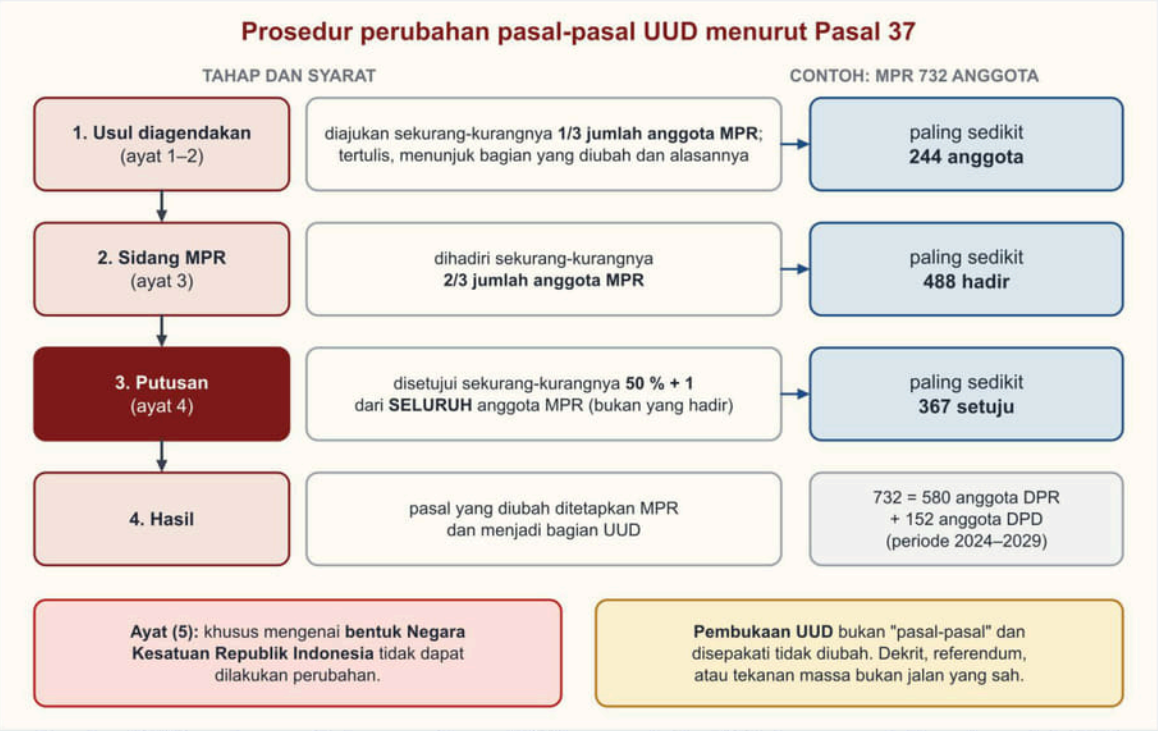
6. Cara mengubah UUD menurut Pasal 37

UUD hasil amandemen tetap dapat diubah lagi, tetapi hanya lewat **Pasal 37**. Pasal ini menetapkan lima ketentuan. Ayat (1): usul perubahan pasal dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3 jumlah anggota MPR**. Ayat (2): usul diajukan secara **tertulis**, menunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta **alasannya**. Ayat (3): sidang untuk mengubah pasal harus dihadiri sekurang-kurangnya **2/3 jumlah anggota MPR**. Ayat (4): putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya **50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR**. Ayat (5): khusus mengenai **bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan**.

Alurnya digambarkan pada Gambar 2.3. Ambil contoh MPR periode 2024–2029 yang beranggotakan 732 orang (580 anggota DPR dan 152 anggota DPD). Usul perubahan harus diajukan paling sedikit 244 anggota. Sidang sah bila dihadiri paling sedikit 488 anggota.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Putusan perubahan memerlukan persetujuan paling sedikit 367 anggota. Perhatikan bahwa ambang persetujuan dihitung dari **seluruh** anggota, bukan dari yang hadir. Jadi, walaupun yang hadir hanya 500 orang, tetap dibutuhkan 367 suara setuju.



Gambar 2.3 Prosedur perubahan pasal-pasal UUD menurut Pasal 37, dengan contoh angka untuk MPR beranggotakan 732 orang. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Dua hal tidak dapat disentuh lewat prosedur ini. Bentuk NKRI dikunci oleh ayat (5). Pembukaan tidak termasuk "pasal-pasal" yang dapat diubah menurut Pasal 37, dan sejak 1999 disepakati tidak diubah karena memuat dasar negara dan tujuan negara. Pasal 37 juga menutup jalan pintas: dekrit, referendum, atau tekanan massa bukan cara yang sah untuk mengubah UUD sekarang.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Usul memperpanjang masa jabatan Presiden

Pada 2026, sekelompok anggota MPR (fiktif) mengusulkan agar Pasal 7 diubah: masa jabatan Presiden menjadi tujuh tahun dan dapat dipilih kembali **tanpa batas**. Alasannya, "agar pembangunan tidak terputus setiap lima tahun". Bagaimana menilai usul ini dari sisi prosedur Pasal 37 dan dari sisi sejarah konstitusi? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. **Tentukan bagian yang hendak diubah.** Yang diubah adalah Pasal 7, yaitu bagian dari pasal-pasal UUD. Bagian ini bukan Pembukaan dan bukan bentuk NKRI, jadi secara prosedur boleh **diusulkan** melalui Pasal 37.
2. **Periksa syarat prosedurnya.** Usul harus tertulis dan disertai alasan, diajukan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR (244 dari 732), dibahas dalam sidang yang dihadiri sekurang-

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

kurangnya 2/3 anggota (488), dan baru sah bila disetujui sekurang-kurangnya 367 anggota. Tanpa itu, usul tidak dapat menjadi perubahan UUD.

3. **Bandingkan isi usul dengan pelajaran sejarah.** Pasal 7 lama yang membolehkan dipilih kembali tanpa batas adalah kelemahan yang membuat kekuasaan terpusat pada 1959–1998. Perubahan Pertama tahun 1999 justru dibuat untuk menutup celah itu. Usul ini mengembalikan masalah yang sudah diperbaiki.
4. **Uji alasan yang diajukan.** Kesinambungan pembangunan dapat dijaga dengan perencanaan jangka panjang yang ditetapkan undang-undang, bukan dengan menghapus batas masa jabatan. Alasan itu tidak menjawab bahaya pemusatan kekuasaan.

Jawaban: usul itu sah untuk **diajukan** bila memenuhi Pasal 37, tetapi isinya bertentangan dengan tujuan amandemen untuk membatasi kekuasaan; usul semacam ini mengulang kelemahan UUD 1945 sebelum amandemen.

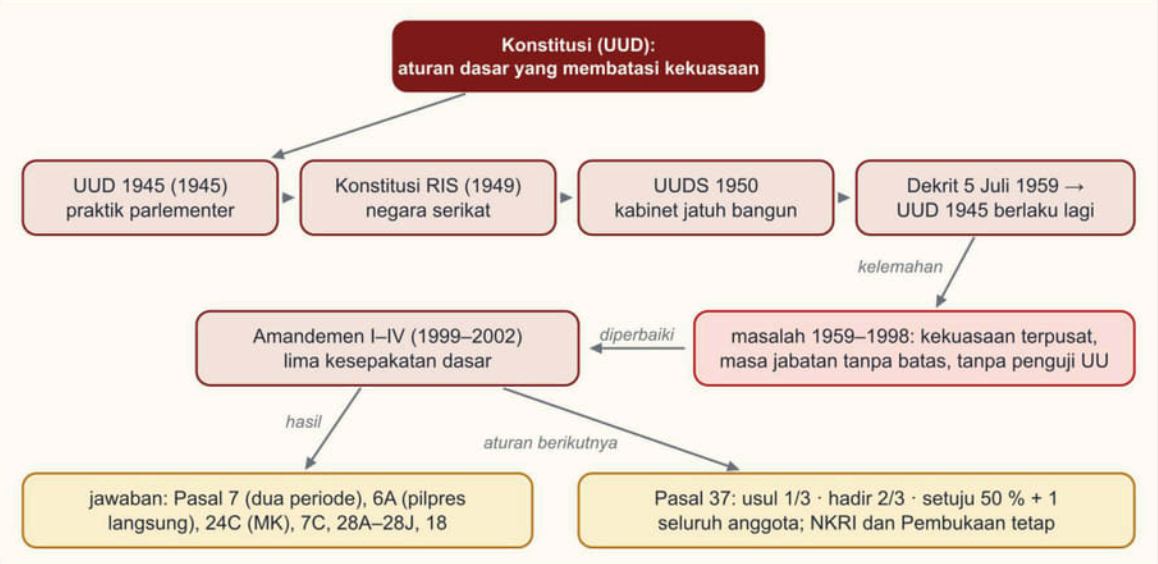
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Konstitusi Indonesia berganti dari UUD 1945 (1945) ke Konstitusi RIS (27 Desember 1949), UUDS 1950 (17 Agustus 1950), lalu kembali ke UUD 1945 lewat Dekrit 5 Juli 1959.
- Setiap pergantian lahir dari masalah: praktik parlementer tanpa dasar tegas, bentuk serikat yang ditolak rakyat, kabinet jatuh bangun, dan Konstituante yang buntu.
- Masa 1959–1998 memperlihatkan bahaya kekuasaan tanpa batas waktu dan tanpa lembaga pengimbang.
- Amandemen 1999–2002 berlangsung empat tahap dengan lima kesepakatan dasar; Pembukaan dan bentuk NKRI tidak diubah.
- Perubahan UUD sekarang hanya lewat Pasal 37: usul 1/3, hadir 2/3, setuju 50 % + 1 dari **seluruh** anggota MPR.

Hubungan antarkonsep di sub bab ini dirangkum pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Peta konsep dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen UUD. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tandai masa yang dibicarakan** dan masalahnya. Garis waktu di soal biasanya sudah memuatnya.
2. **Cari perbaikan yang menjawab masalah itu secara langsung.** Pasangan kelemahan dan jawabannya ada di bagian 5.
3. **Untuk soal hitungan Pasal 37**, tulis tiga ambang dulu (usul, hadir, setuju), lalu bandingkan dengan angka di soal.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Pelajaran yang terbalik.** Pilihan yang menarik kesimpulan berlawanan dengan arah sejarah pada garis waktu. Periksa ke mana perubahan itu bergerak.
- **Menyamakan semua yang berubah.** Konstitusi berganti, tetapi tidak semua hal ikut berganti. Bedakan bagian yang berubah dari yang tetap, misalnya dasar negara Pancasila.
- **Ambang dihitung dari yang hadir.** Putusan perubahan dihitung dari seluruh anggota MPR.
- **Peristiwa darurat dianggap cara biasa.** Dekrit 1959 adalah peristiwa sejarah, bukan jalan konstitusional untuk mengubah UUD sekarang.
- **Amandemen disamakan dengan mengganti Pembukaan.** Amandemen hanya menyentuh pasal-pasal.

> Contoh salah tafsir: seorang siswa menghitung syarat putusan perubahan UUD sebagai "lebih dari separuh anggota yang hadir dalam sidang". Ia lupa bahwa Pasal 37 ayat (4) menyebut **seluruh** anggota MPR, sehingga ambangnya tidak berubah walaupun yang hadir lebih sedikit.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tentukan tindakan yang hendak dicegah, lalu pilih ketentuan yang menyentuh tindakan itu secara langsung.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pada 1960, DPR hasil Pemilu 1955 menolak rancangan anggaran yang diajukan pemerintah. Tidak lama kemudian, Presiden membubarkan DPR itu melalui penetapan presiden, lalu membentuk DPR Gotong Royong yang seluruh anggotanya diangkat oleh Presiden. Saat itu UUD 1945 belum memuat ketentuan yang melarang tindakan semacam itu.

Ketentuan hasil amandemen UUD yang paling langsung mencegah Presiden mengulangi tindakan tersebut adalah ....

Sumber: Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 dan Nomor 4 Tahun 1960; laman DPR RI (dpr.go.id).

A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
B. Presiden memegang jabatan lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali
C. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
D. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
E. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk agar setiap provinsi memiliki wakil di tingkat pusat

Pembahasan **Kunci: D**

Konsep: amandemen 1999–2002 paling mudah dipahami dengan memasangkan **kelemahan lama** dengan **ketentuan yang menjawabnya**. Pembubaran DPR tahun 1960 memperlihatkan bahaya kekuasaan Presiden tanpa lembaga pengimbang. Perubahan Ketiga (2001) menjawabnya dengan Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Langkah 1 – Tentukan tindakan yang hendak dicegah. Yang dipersoalkan adalah Presiden **membubarkan DPR** setelah DPR menolak usul pemerintah.
Langkah 2 – Cari ketentuan yang menyentuh tindakan itu secara langsung. Ketentuan lain mungkin memperbaiki masalah lain, tetapi pertanyaannya meminta yang mencegah tindakan ini.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — pemilihan Presiden secara langsung memperbaiki cara memilih Presiden, bukan hubungan Presiden dengan DPR.
• B ✗ — pembatasan masa jabatan menjawab masalah jabatan tanpa batas, bukan pembubaran DPR.
• C ✗ — MK menguji undang-undang; ketentuan ini tidak melarang Presiden membubarkan DPR.
• D ✓ — larangan membubarkan DPR langsung menutup jalan yang dipakai pada 1960.
• E ✗ — DPD menambah wakil daerah, tetapi tidak melindungi DPR dari pembubaran.

Cek ulang: hanya D yang menyebut tindakan yang sama dengan peristiwa di ilustrasi.

Jawaban: D.

Jebakan: A, B, dan C semuanya ketentuan hasil amandemen yang benar dan penting, tetapi menjawab kelemahan yang lain. Pola ini sering dipakai: pilihan baik yang tidak menjawab pertanyaan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan dulu masa atau aturan yang dibicarakan.

1. Sebuah unggahan di media sosial menyebut Indonesia kini memakai "UUD baru" karena UUD 1945 sudah diamandemen empat kali pada 1999–2002. Padahal, perubahan itu dilakukan dengan cara adendum: pasal-pasal baru ditambahkan dengan nomor sisipan, seperti Pasal 6A dan Pasal 28A–28J, sedangkan naskah asli tetap menjadi dasarnya dan Pembukaan tidak diubah.

Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang amandemen UUD tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Dasar negara Pancasila tetap tercantum karena Pembukaan tidak termasuk bagian yang diubah.	○	○
Cara adendum berarti seluruh naskah UUD 1945 ditulis ulang dari awal oleh MPR.	○	○
Penambahan Pasal 28A–28J menunjukkan bahwa amandemen memperluas jaminan hak asasi warga.	○	○

2. Pada 2027, Gerakan Suara Muda mengumpulkan satu juta tanda tangan daring untuk mengubah salah satu pasal UUD tentang pemilu. Mereka menuntut MPR langsung mengagendakan perubahan itu dalam sidang terdekat atau, bila tidak, Presiden mengadakan referendum. Menurut mereka, jumlah pendukungnya sudah jauh melebihi jumlah anggota MPR.

Penilaian yang paling tepat terhadap tuntutan gerakan tersebut berdasarkan Pasal 37 UUD NRI 1945 adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tuntutan itu sah karena satu juta pendukung telah melampaui syarat sepertiga jumlah anggota MPR

B. aspirasi itu sah disampaikan, tetapi baru menjadi usul perubahan bila diajukan sepertiga anggota MPR

C. Presiden dapat mengadakan referendum karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung

D. tuntutan itu tidak sah karena warga negara sama sekali tidak boleh menyampaikan pendapat tentang isi UUD

E. MPR wajib menyetujui perubahan itu karena putusannya cukup didukung suara terbanyak anggota yang hadir

Kunci singkat: 1. 1B 2S 3B 2. B

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu menyebutkan dua kelemahan sebelum amandemen beserta pasal yang menjawabnya?
- Bila anggota MPR 732 orang, berapa anggota minimal yang harus menyetujui perubahan pasal? Mengapa angka itu tidak bergantung pada jumlah yang hadir?
- **Yang harus kuingat:** baca sejarah konstitusi sebagai masalah dan jalan keluar; Pembukaan dan bentuk NKRI tidak diubah.



Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.1: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.1

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.2 · Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya

PPKN-2.2

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi memuat **ketentuan UUD NRI 1945**, dan Pembukaan adalah bagian terpenting dari ketentuan itu. Soal tentang Pembukaan biasanya memberi **sikap atau kebijakan negara**, lalu meminta kamu menentukan alinea, tujuan negara, atau pokok pikiran yang paling tepat menjadi dasarnya. Tidak ada soal asli 2025 yang khusus menguji sub bab ini, tetapi beberapa soal asli menyebut amanat Pembukaan sebagai latar, misalnya soal tentang pasukan perdamaian.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan isi pokok keempat alinea Pembukaan;
- mencocokkan kebijakan dengan tujuan negara dalam alinea keempat;
- mencocokkan kebijakan dengan pokok pikiran Pembukaan beserta alasannya.

◆ KONSEP INTI

UUD NRI 1945 terdiri atas dua bagian: **Pembukaan** dan **pasal-pasal**. Pasal-pasal sudah diubah empat kali, tetapi Pembukaan tidak pernah disentuh. Mengapa? Karena Pembukaan bukan sekadar kata pengantar. Di dalamnya tertulis alasan bangsa ini merdeka, cita-cita yang hendak dicapai, tujuan pemerintah dibentuk, dan dasar negara Pancasila. Seluruh pasal UUD hanyalah penjabaran dari apa yang sudah digariskan Pembukaan. Memahami Pembukaan berarti memahami **arah** seluruh kebijakan negara.

1. Asal-usul dan kedudukan Pembukaan

Naskah Pembukaan berasal dari **Piagam Jakarta** yang dirumuskan Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Pada **18 Agustus 1945**, PPKI mengesahkannya sebagai Pembukaan UUD dengan satu perubahan penting pada rumusan sila pertama demi menjaga persatuan seluruh wilayah Indonesia (sejarahnya dibahas di Bab 1). Sejak itu, rumusan Pembukaan tidak pernah berubah.

Pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Para ahli hukum tata negara, seperti Notonagoro, menyebutnya **pokok kaidah negara yang fundamental** (dalam bahasa Jerman disebut *staatsfundamentalnorm*). Artinya, Pembukaan adalah norma paling dasar yang menjadi sumber bagi norma-norma di bawahnya. Pembukaan juga dapat dibaca sebagai pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci. Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dua kalimat. Pembukaan menjelaskan **mengapa** bangsa Indonesia merdeka dan **untuk apa** kemerdekaan itu.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Isi empat alinea

Pembukaan terdiri atas empat alinea (paragraf). Setiap alinea mempunyai pokok isi yang berbeda. Hubungan antara alinea, isinya, dan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya digambarkan pada Gambar 2.5.

Alinea pertama dibuka dengan kalimat bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Alinea ini memuat **dalil**: penjajahan salah bukan hanya bagi Indonesia, melainkan bagi bangsa mana pun. Karena itu, sejak awal Indonesia mendukung bangsa lain yang berjuang merdeka. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah adalah salah satu wujudnya.

Alinea kedua menyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia, yaitu mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**. Lima kata itu disebut **cita-cita nasional**. Perhatikan bedanya. *Merdeka* berarti bebas dari penjajahan. *Bersatu* berarti utuh, tidak terpecah. *Berdaulat* berarti menentukan sendiri hukum dan kebijakannya tanpa didikte pihak lain. *Adil* berarti setiap warga diperlakukan sepatutnya. *Makmur* berarti sejahtera secara ekonomi. Kata "pintu gerbang" juga penting: kemerdekaan baru pintu masuk, bukan akhir perjuangan.

Alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan dicapai **atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa** dan didorong oleh **keinginan luhur** supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea ini memperlihatkan dua sisi kemerdekaan: sisi religius (rasa syukur kepada Tuhan) dan sisi perjuangan manusia (tekad bangsa sendiri). Kemerdekaan bukan hadiah dari bangsa lain.

Alinea keempat adalah yang terpanjang dan paling sering dipakai. Isinya ada empat: (1) **tujuan negara**, yaitu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia; (2) ketentuan bahwa kemerdekaan itu disusun dalam suatu **Undang-Undang Dasar**; (3) **bentuk negara** republik yang berkedaulatan rakyat; dan (4) **dasar negara**, yaitu kelima sila Pancasila.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.5 Empat alinea Pembukaan UUD NRI 1945, isi pokoknya, dan empat pokok pikiran beserta sila yang sejalan dan contoh pasal penjabarannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Empat pokok pikiran

Penjelasan UUD 1945 yang asli merumuskan **empat pokok pikiran** yang terkandung dalam Pembukaan. Penjelasan itu kini sudah ditiadakan oleh amandemen, tetapi keempat pokok pikiran tetap dipakai untuk memahami jiwa Pembukaan. Pokok pikiran ini kemudian "diciptakan" atau diwujudkan dalam pasal-pasal UUD.

Pokok pikiran pertama: persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Artinya, negara tidak boleh hanya melayani satu suku, agama, daerah, atau kelompok politik. Pokok pikiran ini sejalan dengan sila ketiga.

Pokok pikiran kedua: keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan pembagian sama rata, melainkan upaya agar setiap orang memperoleh kesempatan dan kebutuhan dasarnya. Pokok pikiran ini sejalan dengan sila kelima dan dijabarkan antara lain dalam Pasal 33 (perekonomian) dan Pasal 34 (fakir miskin dan jaminan sosial).

Pokok pikiran ketiga: kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan bersama wakil-wakilnya. Pokok pikiran ini sejalan dengan sila keempat dan dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2), pasal tentang MPR, DPR, DPD, serta pemilu.

Pokok pikiran keempat: Ketuhanan. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dan menghormati martabat manusia. Pokok pikiran ini sejalan dengan sila pertama dan kedua, dan dijabarkan antara lain dalam Pasal 29 (agama) dan Pasal 28A–28J (hak asasi manusia).

Bedakan pokok pikiran dari tujuan negara. **Tujuan negara** menjawab pertanyaan "apa yang hendak dicapai pemerintah". **Pokok pikiran** menjawab pertanyaan "dengan semangat apa negara dijalankan". Sebuah kebijakan bisa dinilai dari keduanya, tetapi jawabannya tidak selalu sama.

4. Tujuan negara dalam kebijakan nyata

Alinea keempat menyebut empat tujuan dibentuknya pemerintah. Setiap tujuan dapat dikenali dari kebijakan nyata yang pernah dijalankan negara, seperti tampak pada Gambar 2.6.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang dilindungi adalah **orangnya** (setiap warga negara di mana pun berada) dan **wilayahnya** beserta kekayaannya. Contoh nyata terjadi pada awal Februari 2020. Ketika wabah COVID-19 merebak di Wuhan, Tiongkok, pemerintah menjemput 238 WNI dari Provinsi Hubei dan menempatkan mereka dalam observasi kesehatan selama sekitar 14 hari di Natuna sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Negara tidak memilih siapa yang dijemput berdasarkan asal daerah atau pekerjaannya.

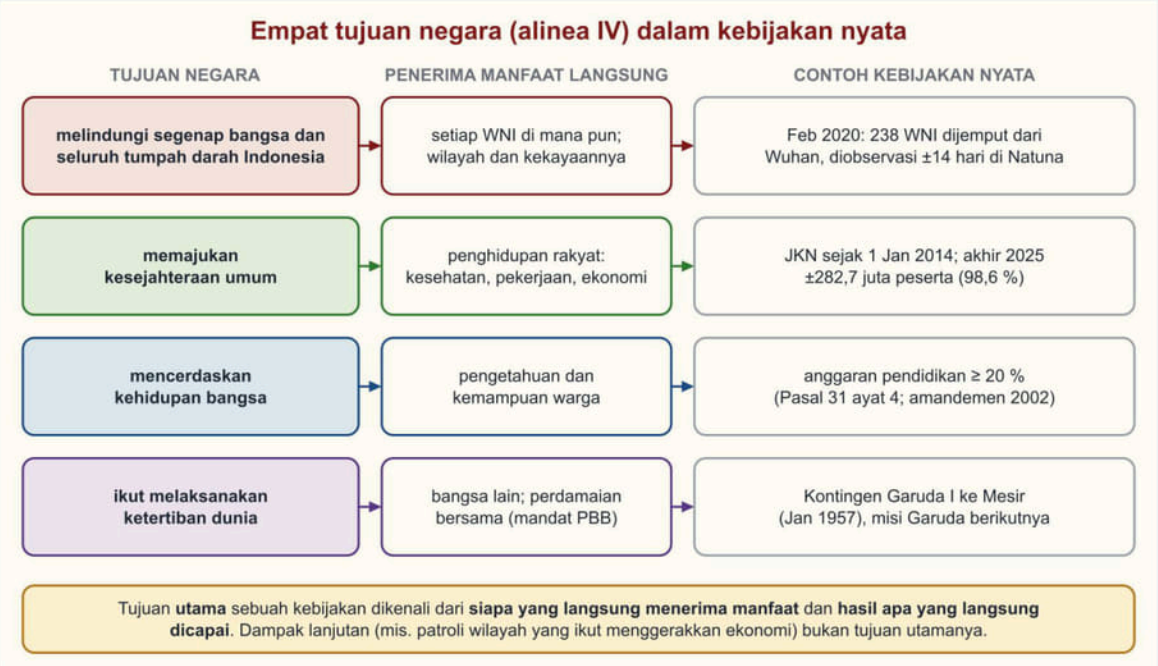
Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menyangkut penghidupan rakyat: kesehatan,

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

pekerjaan, dan ekonomi. Salah satu wujudnya adalah **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** yang dijalankan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014, sebagai pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) tentang sistem jaminan sosial. Iuran warga miskin dibayar negara. Menurut BPJS Kesehatan, pada akhir 2025 pesertanya sekitar 282,7 juta jiwa, atau 98,6 % penduduk.

Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dijabarkan dalam Pasal 31. Perubahan Keempat UUD (2002) menetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan **sekurang-kurangnya 20 %** dari APBN dan APBD (Pasal 31 ayat 4). Ketentuan ini tidak langsung dipenuhi. Pada 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang APBN yang anggaran pendidikannya masih di bawah 20 % bertentangan dengan UUD, dan pemerintah diminta memenuhinya paling lambat pada APBN 2009. Pada 27 Mei 2025, MK juga menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib dijamin tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini menghadap ke luar negeri. Sejak Januari 1957, ketika **Kontingen Garuda I** dikirim ke Mesir dalam pasukan darurat PBB, Indonesia terus mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke berbagai negara. Kata "ikut" menunjukkan bahwa Indonesia bekerja **bersama** bangsa lain, misalnya di bawah mandat PBB, bukan bertindak sendiri.



Gambar 2.6 Empat tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan, siapa yang menerima manfaat, dan contoh kebijakan nyata. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Satu kebijakan bisa berdampak pada beberapa tujuan sekaligus. Program beasiswa, misalnya, mencerdaskan dan dalam jangka panjang juga menyejahterakan. Untuk menentukan tujuan **utamanya**, lihat dua hal: **siapa yang langsung menerima manfaat** dan **hasil apa yang langsung dicapai**. Beasiswa langsung menghasilkan orang yang bersekolah, sehingga tujuan utamanya mencerdaskan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kebijakan yang sama juga dapat dibaca dari sisi pokok pikiran. Ambil JKN. Dari sisi **tujuan negara**, JKN memajukan kesejahteraan umum karena hasil langsungnya adalah warga yang dapat berobat. Dari sisi **pokok pikiran**, JKN mencerminkan keadilan sosial, karena iuran warga miskin ditanggung negara sehingga orang yang tidak mampu tetap memperoleh layanan yang sama. Kedua jawaban itu benar untuk pertanyaan yang berbeda. Karena itu, bacalah dulu apa yang ditanyakan: tujuan, cita-cita, alinea, atau pokok pikiran.

5. Mengapa Pembukaan tidak diubah

Ketika MPR mulai mengubah UUD pada 1999, kesepakatan dasar pertamanya adalah **tidak mengubah Pembukaan**. Ada tiga alasan. Pertama, Pembukaan memuat **dasar negara** Pancasila. Mengubahnya berarti mengubah fondasi tempat seluruh hukum berdiri. Kedua, Pembukaan memuat **pernyataan kemerdekaan dan tujuan negara** yang dirumuskan para pendiri negara. Mengubahnya sama dengan mengubah negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945; banyak ahli menyebutnya sama dengan membubarkan negara itu. Ketiga, Pembukaan adalah **kesepakatan bersama** seluruh golongan yang dicapai melalui kompromi pada 1945. Membukanya kembali dapat memecah persatuan yang sudah terbangun.

Karena itu, perubahan zaman dijawab dengan mengubah pasal-pasal atau membuat undang-undang baru, bukan dengan mengubah Pembukaan. Misalnya, kebutuhan akan perlindungan hak asasi yang lebih rinci dijawab dengan menambahkan Pasal 28A–28J, sedangkan cita-cita perikemanusiaan dalam Pembukaan tetap seperti semula.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Mencocokkan program dengan tujuan negara

Pada 2026, pemerintah menjalankan tiga program (fiktif): **(a)** kapal perpustakaan keliling yang singgah dua minggu sekali di pulau-pulau kecil untuk meminjamkan buku dan mengadakan kelas membaca; **(b)** pemasangan sirene peringatan dini tsunami dan latihan evakuasi di desa-desa pesisir; **(c)** pengiriman tim dokter dan rumah sakit lapangan ke negara tetangga yang dilanda gempa, atas permintaan negara itu dan bersama badan PBB. Tujuan negara manakah yang paling tepat untuk setiap program? *Kasus disusun untuk contoh; program fiktif.*

1. **Tentukan penerima manfaat langsung** setiap program. Program (a) untuk anak-anak dan warga pulau kecil; program (b) untuk warga pesisir yang terancam bencana; program (c) untuk warga negara lain.
2. **Tentukan hasil langsungnya.** Program (a) menambah kemampuan membaca dan pengetahuan; program (b) menjaga keselamatan jiwa warga; program (c) membantu pemulihan negara lain dan menjaga hubungan damai antarbangsa.
3. **Cocokkan dengan alinea keempat.** Pengetahuan → **mencerdaskan kehidupan bangsa**. Keselamatan jiwa warga dan wilayah → **melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah**. Kerja sama kemanusiaan dengan bangsa lain → **ikut melaksanakan ketertiban dunia**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. **Tolak jawaban dampak lanjutan.** Program (b) memang membuat ekonomi pesisir lebih aman, tetapi hasil langsungnya adalah perlindungan jiwa, bukan kesejahteraan.

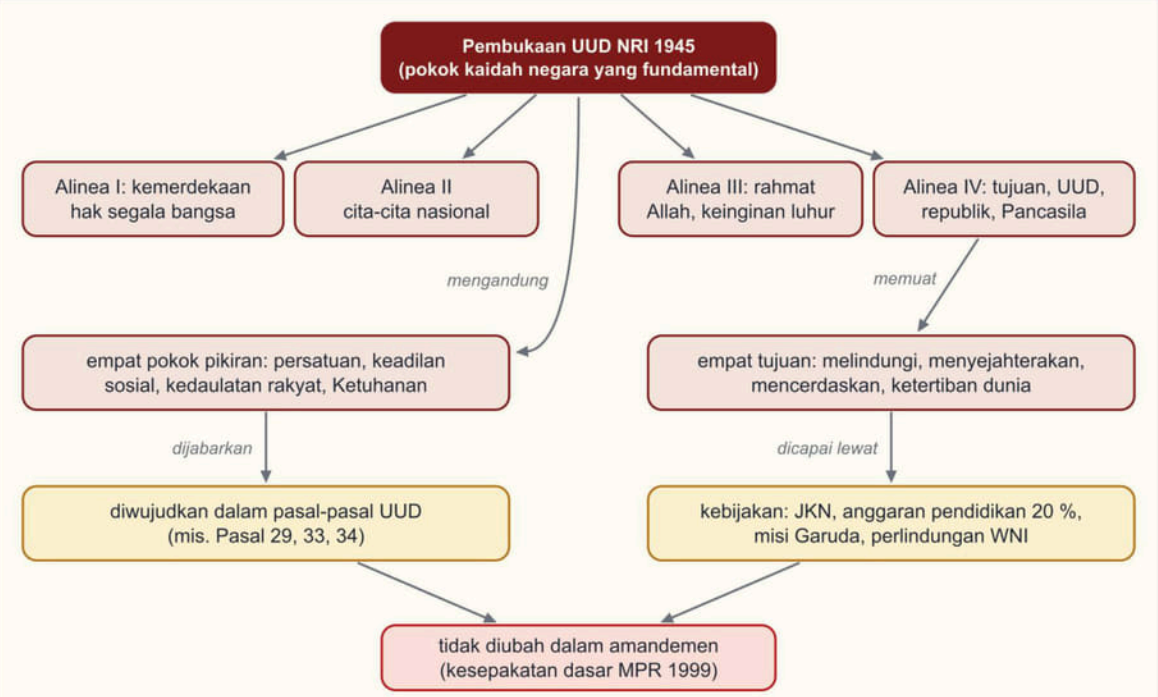
Jawaban: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (c) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dan disahkan PPKI 18 Agustus 1945; kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
- Alinea I: kemerdekaan hak segala bangsa. Alinea II: cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea III: rahmat Allah dan keinginan luhur. Alinea IV: tujuan negara, UUD, republik berkedaulatan rakyat, dan Pancasila.
- Empat pokok pikiran: persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, Ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Tujuan negara dikenali dari penerima manfaat dan hasil langsung kebijakan.
- Pembukaan tidak diubah karena memuat dasar negara, tujuan negara, dan kesepakatan pendiri bangsa.

Gambar 2.7 merangkum hubungan antarkonsep tersebut.



Gambar 2.7 Peta konsep Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Rumuskan inti tindakan** dalam satu kalimat: siapa yang dibantu, apa yang dicapai.
2. **Cocokkan dengan alinea, tujuan, atau pokok pikiran**, lalu periksa apakah alasan di pilihan **sesuai** dengan inti tindakan.
3. **Bila ada dua pilihan beralinea sama**, bandingkan alasannya.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Dampak lanjutan dikira tujuan utama.** Patroli wilayah memang bisa berdampak ekonomi, tetapi tujuan utamanya melindungi.
- **Alinea yang benar, alasan yang salah.** Alinea keempat sering disebut, tetapi tujuan yang dikutip tidak cocok dengan kasus.
- **Cita-cita tertukar.** Pasangan kebijakan dan cita-cita yang terdengar wajar, tetapi isinya tidak cocok. Uji dengan pertanyaan: apa yang langsung dicapai kebijakan itu?
- **"Melindungi" dan "memajukan kesejahteraan" tertukar.** Melindungi menyangkut keselamatan orang dan wilayah; kesejahteraan menyangkut penghidupan.
- **Keadilan sosial dimaknai sama rata.**

> Contoh salah tafsir: pemerintah membangun jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Seorang siswa menyebutnya wujud tujuan "ikut melaksanakan ketertiban dunia" karena programnya besar dan terkenal. Ia lupa bertanya siapa yang dilayani. Penerima manfaatnya rakyat sendiri, sehingga tujuan yang paling langsung adalah memajukan kesejahteraan umum.

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Cari penerima manfaat dan hasil langsung; tolak dampak lanjutan dan alasan yang tidak cocok.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Abrasi menggerus pantai di sejumlah daerah pesisir sehingga rumah warga, jalan desa, dan makam terancam hilang ke laut. Pemerintah lalu membangun pemecah gelombang, menanam kembali hutan bakau, dan memindahkan warga yang rumahnya paling terancam ke tempat yang aman. Setelah pantai pulih, tambak dan wisata hutan bakau juga mulai mendatangkan penghasilan bagi warga.
Tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang paling langsung diwujudkan oleh kebijakan tersebut adalah ....

A. memajukan kesejahteraan umum, karena tambak dan wisata bakau mendatangkan penghasilan bagi warga
B. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, karena keselamatan warga dan daratannya dijaga
C. ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena hutan bakau ikut mengurangi pemanasan bumi bagi semua bangsa
D. mencerdaskan kehidupan bangsa, karena warga pesisir belajar cara menanam dan merawat hutan bakau
E. melindungi segenap bangsa, karena warga dipindahkan ke tempat baru tanpa perlu meminta persetujuan

Pembahasan **Kunci: B**

Konsep: tujuan negara dikenali dari **penerima manfaat langsung** dan **hasil langsung** kebijakan. "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" mencakup **orangnya** (keselamatan warga) dan **wilayahnya** beserta kekayaannya.

Langkah 1 – Rumuskan inti tindakan. Negara menahan abrasi dan menyelamatkan warga pesisir dari ancaman kehilangan rumah dan daratan.
Langkah 2 – Tentukan hasil langsungnya. Keselamatan warga dan daratan pantai terjaga. Penghasilan dari tambak dan wisata muncul **setelah** pantai pulih, jadi itu **dampak lanjutan**.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — penghasilan warga adalah dampak lanjutan, bukan hasil langsung kebijakan.
• B ✓ — kebijakan menjaga keselamatan warga dan wilayah daratan dari abrasi.
• C ✗ — manfaat bagi dunia tidak menjadi tujuan kebijakan ini; penerima manfaat langsungnya warga pesisir Indonesia.
• D ✗ — tidak ada kegiatan pendidikan yang menjadi inti kebijakan.
• E ✗ — tujuannya memang melindungi, tetapi alasannya salah dan tidak ada di ilustrasi; perlindungan tidak berarti mengabaikan hak warga untuk didengar.

Cek ulang: siapa yang paling langsung dilindungi dan dari apa? Warga dan daratan pesisir, dari abrasi → B.

Jawaban: B.

Jebakan: A memakai dampak lanjutan yang memang disebut di ilustrasi; E memakai tujuan yang benar dengan alasan yang keliru.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan inti tindakannya dalam satu kalimat sebelum memilih.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Pemerintah menetapkan kode etik bagi pejabat dan pegawai negara. Mereka wajib bersikap jujur, menolak hadiah dari warga yang mereka layani, berbicara santun, dan menghormati martabat setiap orang yang datang meminta layanan. Pegawai yang melanggar kode etik itu dapat dijatuhi sanksi, mulai dari teguran sampai pemberhentian. Pokok pikiran Pembukaan UUD NRI 1945 yang paling tepat menjadi dasar aturan tersebut adalah ....

A. persatuan, karena kode etik itu berlaku sama bagi pegawai dari semua suku dan daerah
B. kedaulatan rakyat, karena gaji pegawai negara dibayar dari pajak yang disetor rakyat
C. keadilan sosial, karena pegawai yang melanggar kode etik dijatuhi sanksi yang sama
D. Ketuhanan, karena setiap pegawai negara wajib menjalankan ibadah sesuai agamanya
E. Ketuhanan menurut kemanusiaan, karena penyelenggara negara wajib berbudi luhur

2. Sebuah program pemerintah membuka sekolah berasrama tanpa biaya bagi anak dari keluarga sangat miskin di berbagai provinsi. Anak dari suku, agama, dan daerah mana pun dapat diterima asalkan memenuhi syarat keadaan ekonomi keluarganya. Para siswa tinggal di asrama dan belajar dengan kurikulum nasional seperti siswa sekolah lain. Pernyataan manakah yang tepat tentang kaitan program tersebut dengan Pembukaan UUD NRI 1945? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Tujuan utama program ini memajukan kesejahteraan umum, karena keluarga miskin tidak lagi menanggung biaya sekolah.
☐ B. Dari sisi tujuan negara, program ini terutama mencerdaskan kehidupan bangsa karena anak dapat bersekolah.
☐ C. Program ini mencerminkan pokok pikiran keadilan sosial karena anak tidak mampu tetap mendapat kesempatan.
☐ D. Program ini bertentangan dengan keadilan sosial karena tidak semua anak di Indonesia dapat diterima.
☐ E. Penerimaan siswa tanpa membedakan suku, agama, dan daerah asal mencerminkan pokok pikiran persatuan.

Kunci singkat: 1. E 2. B, C, E

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu memberi satu kebijakan untuk setiap tujuan negara dalam alinea keempat?
- Apa beda cita-cita "berdaulat" dan "makmur"? Berikan satu contoh kebijakan untuk masing-masing.
- **Yang harus kuingat:** cari inti tindakan dulu, baru cocokkan dengan alinea, tujuan, atau pokok pikiran; periksa alasannya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.2: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.2

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara

PPKN-2.3

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis cara menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara**. Ini sub bab prioritas. Pada soal asli 2025, sengketa hasil Pilkada yang harus diarahkan ke lembaga yang tepat hanya dijawab benar oleh sekitar **31 %** peserta. Soal Benar/Salah tentang wewenang Mahkamah Konstitusi dijawab benar oleh sekitar 55 % peserta.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan perubahan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD;
- menjelaskan wewenang MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, serta penyelenggara pemilu beserta contoh peristiwanya;
- menjelaskan alur pembentukan undang-undang dan alur pemberhentian Presiden;
- menentukan lembaga yang berwenang dari **jenis perkaranya**.

◆ KONSEP INTI

Negara modern tidak dijalankan oleh satu orang atau satu badan. Ada yang membuat aturan, ada yang menjalankannya, ada yang mengadili bila terjadi sengketa, dan ada yang memeriksa uang negara. Badan-badan itu disebut **lembaga negara**. Wewenangnya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau oleh undang-undang. Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak; lembaga yang bertindak di luar wewenangnya membuat tindakannya tidak sah. Karena itu, pertanyaan pertama dalam setiap masalah ketatanegaraan selalu sama: **siapa yang berwenang?**

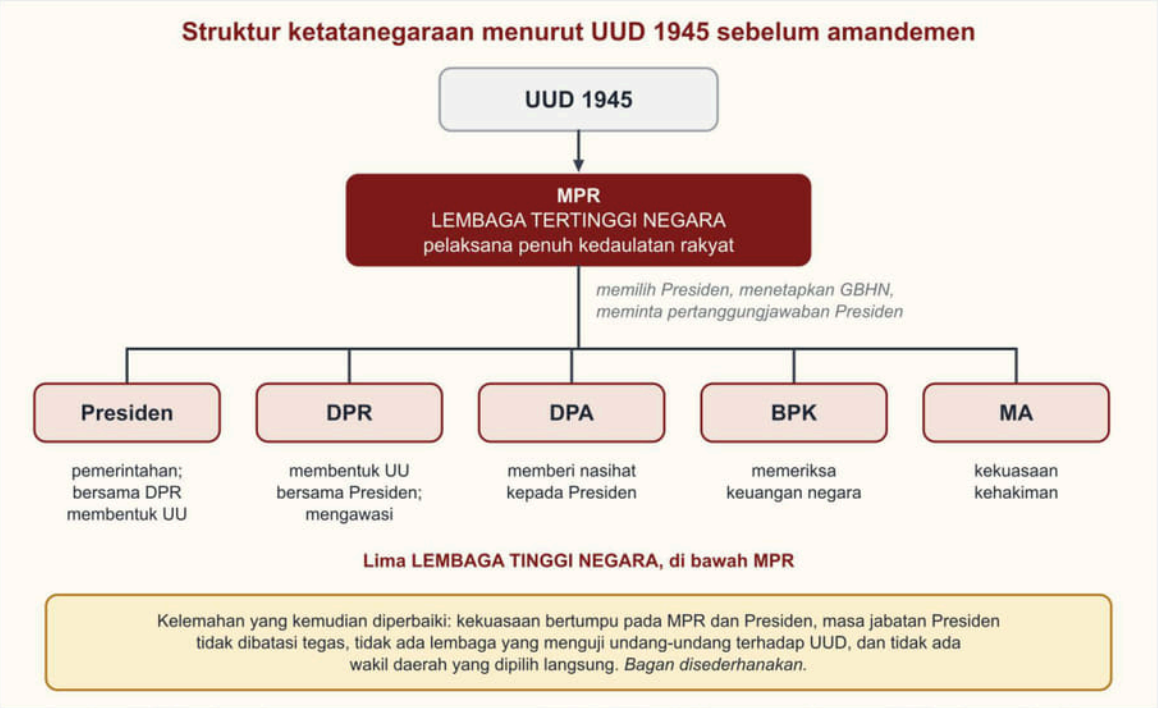
1. Dari "lembaga tertinggi" ke lembaga yang sederajat

Gagasan pembagian kekuasaan berasal dari pemikir Prancis abad ke-18, Montesquieu, yang membedakan kekuasaan **legislatif** (membuat undang-undang), **eksekutif** (menjalankan undang-undang), dan **yudikatif** (mengadili). Ajaran ini dikenal sebagai *trias politica*. Tujuannya sederhana: kekuasaan yang terkumpul di satu tangan mudah disalahgunakan.

UUD 1945 sebelum amandemen menata kekuasaan dengan cara yang khas (lihat Gambar 2.8). **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)** ditempatkan sebagai **lembaga tertinggi negara** dan "pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat". MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Di bawahnya ada lima **lembaga tinggi negara**: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

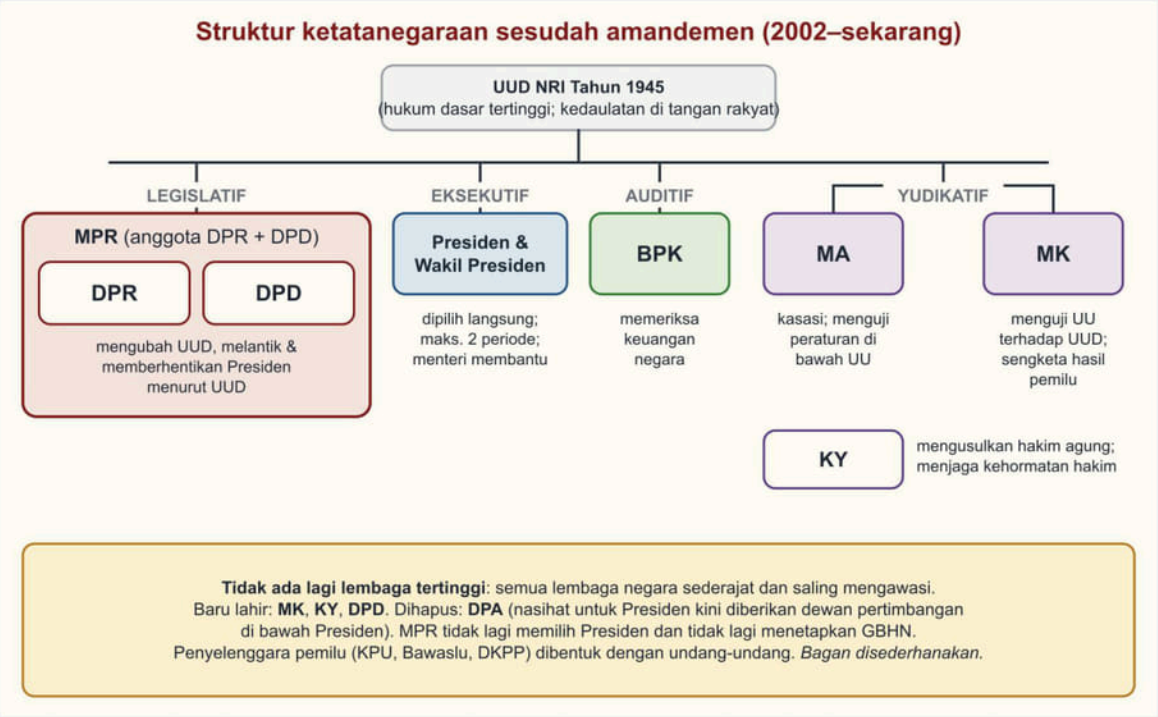


Gambar 2.8 Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebelum amandemen: MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara di bawahnya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Dalam praktik Orde Baru, susunan ini memperlihatkan kelemahannya. Presiden dipilih berulang kali oleh MPR yang sebagian anggotanya diangkat, sehingga masa jabatan Presiden praktis tidak terbatas. Tidak ada lembaga yang dapat menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD. Daerah tidak mempunyai wakil yang dipilih langsung di tingkat pusat. Amandemen UUD tahun 1999–2002 memperbaiki hal-hal itu.

Hasilnya tampak pada Gambar 2.9. **Tidak ada lagi lembaga tertinggi.** Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2), sehingga semua lembaga negara berkedudukan **sederajat** dan masing-masing menjalankan wewenang yang diberikan UUD. Tiga lembaga baru lahir: **Mahkamah Konstitusi (MK)**, **Komisi Yudisial (KY)**, dan **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**. DPA dihapus. MPR tidak lagi memilih Presiden dan tidak lagi menetapkan GBHN, karena Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.9 Struktur ketatanegaraan sesudah amandemen UUD: lembaga-lembaga negara sederajat menurut cabang kekuasaannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Susunan baru ini dijalankan dengan prinsip **saling mengawasi dan mengimbangi** (*checks and balances*). Artinya, banyak wewenang penting tidak bisa dijalankan satu lembaga sendirian. Undang-undang dibentuk DPR **bersama** Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dibuat Presiden dalam keadaan genting harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Hakim agung diusulkan KY, disetujui DPR, lalu ditetapkan Presiden. Sembilan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga berbeda: tiga oleh MA, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden. Dengan begitu, tidak ada lembaga yang berkuasa tanpa batas. Namun, saling mengawasi **tidak** berarti satu lembaga boleh mencampuri isi putusan lembaga lain. Presiden atau DPR, misalnya, tidak boleh mengubah putusan pengadilan.

2. Wewenang setiap lembaga negara

MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Wewenangnya kini terbatas dan jelas (Pasal 3): mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden **menurut UUD**. Bila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1) dan mempunyai tiga fungsi: **legislasi** (membuat undang-undang), **anggaran** (membahas dan menyetujui APBN bersama Presiden), dan **pengawasan** (mengawasi pemerintah menjalankan undang-undang). Untuk mengawasi, DPR mempunyai hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah), hak angket (menyelidiki kebijakan yang diduga melanggar undang-undang), dan hak menyatakan pendapat.

DPD dipilih dari setiap provinsi dan menjadi suara daerah di tingkat pusat. Menurut Pasal

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22D, DPD dapat **mengajukan** dan **ikut membahas** rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, dan **mengawasi** pelaksanaannya. Yang perlu dicatat: DPD **tidak ikut menyetujui** undang-undang. Persetujuan tetap berada di tangan DPR dan Presiden.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat bersama Wakil Presiden (Pasal 6A) untuk masa lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama (Pasal 7). Presiden dibantu para menteri yang diangkat dan diberhentikannya sendiri. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, dan memberi grasi serta rehabilitasi (dengan pertimbangan MA) maupun amnesti serta abolisi (dengan pertimbangan DPR).

BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E). Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Bila menemukan dugaan tindak pidana, BPK melaporkannya kepada penegak hukum; BPK sendiri **tidak** mengadili.

Mahkamah Agung (MA) adalah puncak peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. MA mengadili pada **tingkat kasasi** (tingkat terakhir setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan **menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**, misalnya peraturan menteri atau peraturan daerah (Pasal 24A).

Mahkamah Konstitusi (MK) lahir dari amandemen ketiga (2001) dan mulai bekerja tahun 2003. Menurut Pasal 24C, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk:

1. menguji undang-undang terhadap UUD;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, MK **wajib** memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melanggar hukum. Sejak undang-undang pilkada menetapkannya, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga diperiksa MK.

Satu contoh nyata menunjukkan kekuatan wewenang menguji undang-undang. Pada **18 Februari 2015**, MK membatalkan **seluruh** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena dinilai belum menjamin bahwa air, sebagai kebutuhan hidup orang banyak, dikuasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, MK memberlakukan kembali undang-undang pengairan yang lama sampai undang-undang baru dibentuk. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa undang-undang yang sudah disetujui DPR dan Presiden pun dapat dinyatakan tidak berlaku bila bertentangan dengan UUD.

Komisi Yudisial (KY) bukan pengadilan. Tugasnya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B). Bila seorang hakim diduga menerima suap atau berperilaku tidak pantas, KY

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

memeriksa pelanggaran **kode etiknya**, sedangkan perkara pidananya ditangani penegak hukum.

Penyelenggara pemilu. Pasal 22E ayat (5) menyebut bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengaturnya menjadi tiga lembaga yang saling melengkapi: **KPU** menyelenggarakan tahapan pemilu, **Bawaslu** mengawasi tahapan itu serta menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses, dan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)** memeriksa pelanggaran **kode etik** anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Contoh nyata wewenang DKPP terjadi pada **3 Juli 2024**: DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU karena terbukti melanggar kode etik, lalu Presiden menindaklanjutinya dengan keputusan presiden.

3. Alur pembentukan undang-undang

Undang-undang mengikat semua orang, sehingga pembentukannya harus melewati jalan yang terbuka dan melibatkan lebih dari satu lembaga. Perhatikan Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Alur pembentukan undang-undang dari perencanaan sampai pengundangan, beserta dua keadaan khusus menurut Pasal 20. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

1. **Perencanaan.** Rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu daftar prioritas yang disusun DPR bersama pemerintah.
2. **Pengusulan.** RUU dapat berasal dari DPR, dari Presiden, atau dari DPD untuk bidang yang berkaitan dengan daerah.
3. **Pembahasan tingkat I.** DPR (melalui komisi atau panitia khusus) dan pemerintah (melalui menteri yang ditunjuk Presiden) membahas RUU pasal demi pasal. Pada tahap

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

ini masyarakat dapat menyampaikan masukan, misalnya dalam rapat dengar pendapat umum.

4. **Pembahasan tingkat II.** Rapat paripurna DPR mengambil keputusan. Bagian terpenting dari seluruh alur ada di sini: RUU harus mendapat **persetujuan bersama DPR dan Presiden**. Bila tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama (Pasal 20 ayat 3).
5. **Pengesahan.** Presiden menandatangani RUU yang telah disetujui bersama. Bila dalam **30 hari** Presiden tidak menandatanganinya, RUU itu **tetap sah** menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat 5). Aturan ini mencegah Presiden membatalkan secara diam-diam sesuatu yang sudah ia setujui bersama DPR.
6. **Pengundangan.** Undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Sejak itu semua orang dianggap mengetahuinya dan wajib menaatinya.

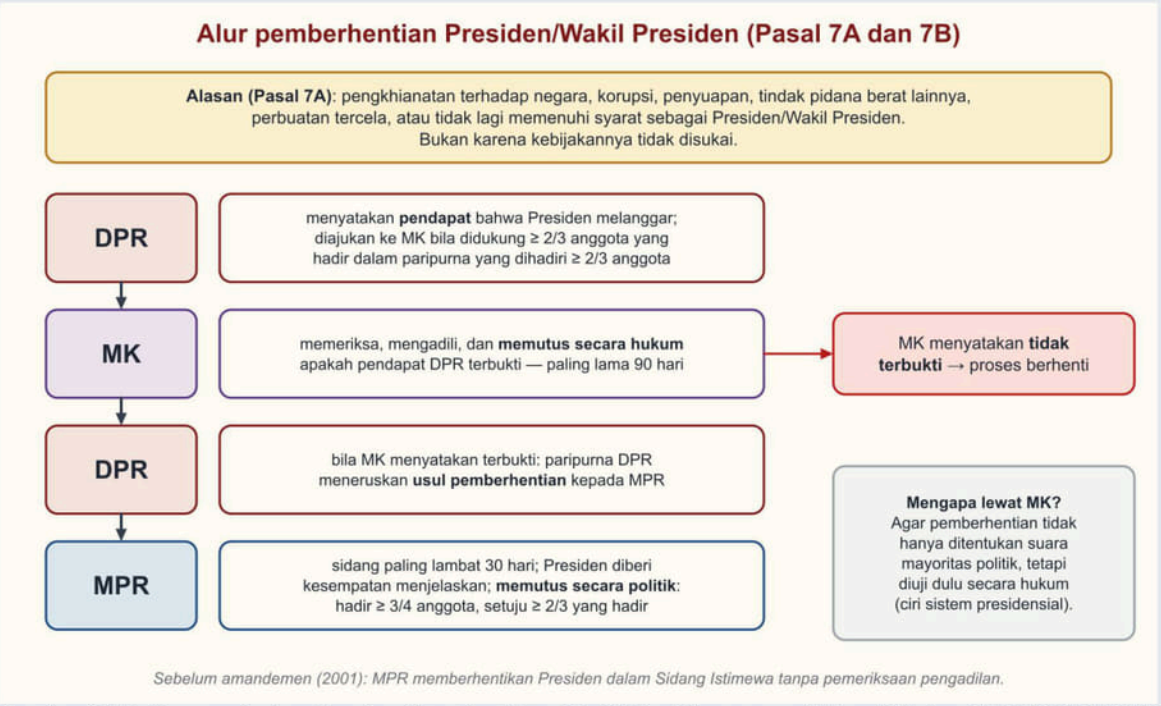
Bila setelah berlaku sebuah undang-undang dianggap merugikan hak konstitusional warga, jalan yang tersedia bukan unjuk rasa yang memaksa atau mengabaikan undang-undang itu, melainkan **pengujian ke MK**.

4. Alur pemberhentian Presiden

Sebelum amandemen, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR dapat memberhentikannya. Peristiwa nyata terjadi pada **23 Juli 2001**: dalam Sidang Istimewa, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Saat itu belum ada pengadilan yang memeriksa apakah alasan pemberhentiannya terbukti secara hukum; keputusan sepenuhnya diambil secara politik.

Amandemen ketiga mengubahnya. Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ia tidak boleh diberhentikan hanya karena kebijakannya tidak disukai mayoritas di parlemen. Pasal 7A membatasi **alasan** pemberhentian: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Pasal 7B mengatur **jalannya** (Gambar 2.11):

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.11 Alur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

1. **DPR menyatakan pendapat** bahwa Presiden melakukan pelanggaran. Pendapat itu dibawa ke MK bila didukung sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR.
2. **MK memeriksa, mengadili, dan memutus** apakah pendapat DPR terbukti, paling lama 90 hari. Di sinilah alasan pemberhentian diuji **secara hukum**. Bila MK menyatakan tidak terbukti, proses berhenti.
3. Bila MK menyatakan terbukti, **DPR meneruskan usul pemberhentian** kepada MPR.
4. **MPR bersidang** paling lambat 30 hari. Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Inilah keputusan **politik** yang terakhir.

Jadi, pemberhentian Presiden kini melibatkan tiga lembaga: DPR mengusulkan, MK menguji secara hukum, dan MPR memutus. Alur ini adalah contoh paling jelas prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.

5. Menentukan lembaga dari jenis perkara

Dalam kehidupan bernegara, masalah sering muncul dalam bentuk **sengketa**. Kunci menyelesaikannya: kenali dulu **jenis perkaranya**, baru tentukan lembaganya (Gambar 2.12).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.12 Jenis perkara ketatanegaraan dan pemilu beserta lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ambil contoh pemilu. Dalam satu pemilihan bisa muncul beberapa jenis masalah sekaligus. Bila calon dicoret dari daftar karena dianggap tidak memenuhi syarat, itu **sengketa proses**, dan pengaduannya ke Bawaslu. Bila seorang tim sukses membagi-bagikan uang kepada pemilih, itu **tindak pidana pemilu**, ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, lalu diadili di pengadilan. Bila anggota KPU daerah menerima hadiah dari salah satu calon, itu **pelanggaran kode etik penyelenggara**, dan yang memeriksa adalah DKPP. Bila hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU dianggap keliru atau dipengaruhi kecurangan, itu **perselisihan hasil**, dan yang memutus adalah **MK**.

Peristiwa nyata memperlihatkan wewenang terakhir ini. Pada **24 Februari 2025**, MK membacakan putusan sengketa hasil Pilkada 2024 dan memerintahkan **pemungutan suara ulang** di 24 daerah. Di beberapa daerah MK menemukan masalah yang memengaruhi keabsahan hasil, misalnya calon yang ternyata tidak memenuhi syarat karena sudah dua kali menjabat. KPU kemudian menjalankan putusan itu. Perhatikan pembagian perannya: KPU **menyelenggarakan** pemungutan suara ulang, tetapi **perintahnya** datang dari MK sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil.

Perbedaan MA dan MK juga sering dipertanyakan. Ukurannya ada pada **apa yang diuji dan terhadap apa**. Undang-undang yang dipersoalkan terhadap UUD diuji ke MK. Peraturan daerah, peraturan menteri, atau peraturan lain di bawah undang-undang yang dipersoalkan terhadap undang-undang diuji ke MA.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▣ CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Perda pajak yang dipersoalkan

Pada 2026, DPRD dan Bupati Tanjung Asri (daerah fiktif) mengesahkan peraturan daerah yang memungut pajak dari pedagang kaki lima dengan tarif yang lebih tinggi daripada batas dalam undang-undang tentang pajak daerah. Sekelompok pedagang ingin aturan itu dibatalkan. Ke lembaga mana mereka harus mengajukan pengujian, dan mengapa bukan ke MK? *Kasus disusun untuk contoh; daerah fiktif.*

1. Tentukan **apa yang dipersoalkan**: sebuah peraturan daerah, yaitu peraturan **di bawah** undang-undang.
2. Tentukan **ukurannya**: perda itu dianggap bertentangan dengan **undang-undang** tentang pajak daerah, bukan langsung dengan UUD.
3. Cocokkan dengan wewenang: menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah wewenang **MA** (Pasal 24A).
4. Tolak pilihan yang menggoda: MK hanya menguji **undang-undang** terhadap UUD; Bupati dan DPRD adalah pembuat perda, jadi bukan pihak yang menguji; DPRD dapat mengubah perdanya sendiri, tetapi itu jalan politik, bukan pengujian hukum.

Jawaban: pengujian diajukan ke Mahkamah Agung, karena yang diuji adalah peraturan di bawah undang-undang dan ukurannya undang-undang.

Contoh 2 — Anggota KPU daerah menerima hadiah

Menjelang Pilkada 2026, seorang anggota KPU kabupaten fiktif ketahuan menerima telepon genggam mahal dari tim salah satu pasangan calon. Pasangan calon lain melapor dan meminta "agar MK membatalkan pencalonan pasangan itu". Apakah permintaan itu tepat? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. Pisahkan **pelaku** dan **perbuatannya**: pelaku adalah **penyelenggara** pemilu (anggota KPU), perbuatannya menerima hadiah dari peserta. Ini menyangkut **kode etik** penyelenggara: kemandirian dan ketidakberpihakan.
2. Cocokkan dengan lembaga: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diperiksa **DKPP**, yang dapat menjatuhkan teguran sampai pemberhentian tetap.
3. Periksa permintaan pelapor: MK memutus **perselisihan hasil** pemilihan, bukan memeriksa etik penyelenggara, dan saat itu belum ada hasil yang diperselisihkan. Bila pemberian hadiah juga memenuhi unsur pidana, laporan itu dapat diteruskan ke Gakkumdu.

Jawaban: permintaan kepada MK tidak tepat; dugaan pelanggaran etik anggota KPU diadukan ke DKPP, dan unsur pidananya (bila ada) ditangani Gakkumdu.

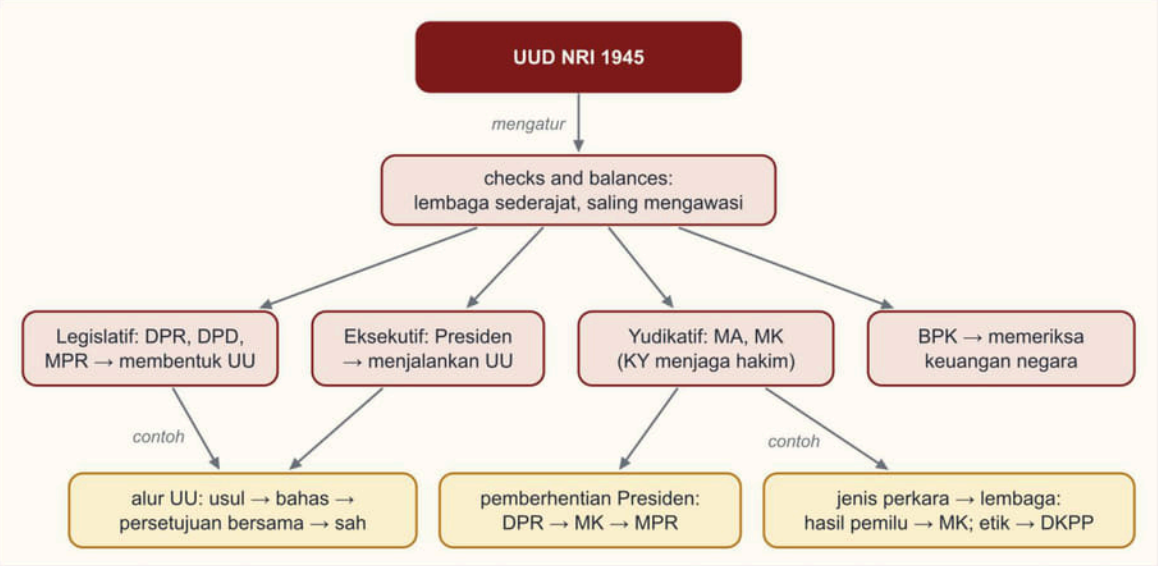
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Sesudah amandemen tidak ada lembaga tertinggi; lembaga negara sederajat dan saling mengawasi. Lahir MK, KY, DPD; DPA dihapus.
- Undang-undang sah setelah **persetujuan bersama** DPR dan Presiden; tanpa tanda tangan Presiden dalam 30 hari, tetap sah.
- Pemberhentian Presiden: DPR mengusulkan → MK menguji secara hukum → MPR memutus.
- Jenis perkara menentukan lembaga: undang-undang terhadap UUD dan hasil pemilu → MK; peraturan di bawah undang-undang → MA; etik penyelenggara pemilu → DKPP; etik hakim → KY; administrasi dan sengketa proses pemilu → Bawaslu.
- Lembaga yang terlibat belum tentu lembaga yang berwenang memutus.

Bagan pada Gambar 2.13 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 2.13 Peta konsep kewenangan lembaga negara. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan jenis perkara**: hasil pemilu, pengujian peraturan, etik, administrasi, atau pidana?
2. **Cocokkan dengan lembaga** pada Gambar 2.12.
3. **Periksa kata kerja di pilihan**: menguji, memutus, mengawasi, mengusulkan, menyetujui. Lembaga yang benar dengan kata kerja yang salah tetap salah.

Jebakan yang sering dipasang:

- **MA dan MK tertukar.** Ukurannya: apa yang diuji dan terhadap apa.
- **Lembaga yang terlibat tetapi tidak berwenang memutus.** KPU dan Bawaslu terlibat dalam pemilu, tetapi perselisihan hasil diputus MK.
- **"Pemisahan kekuasaan mutlak".** UUD NRI 1945 justru menata kerja sama dan pengawasan antarlembaga.
- **Wewenang yang mirip ditukar.** Mengusulkan, membahas, menyetujui, dan mengawasi adalah empat hal berbeda; DPD, misalnya, ikut membahas tetapi tidak ikut menyetujui undang-undang.

> Contoh salah tafsir: dalam pemilihan ketua OSIS yang disimulasikan seperti pemilu, panitia bertanya ke mana pasangan calon harus mengadu bila hasil hitung dianggap keliru. Seorang siswa menjawab "ke pengawas pemilu, karena ia mengawasi seluruh tahapan". Ia mencampur **pengawasan tahapan** dengan **memutus perselisihan hasil**, padahal dalam sistem ketatanegaraan keduanya dipegang lembaga yang berbeda.

● BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 11 (sengketa hasil Pilkada, PG, 31 % benar). Ilustrasi menggambarkan dua pasangan calon yang saling mengklaim kemenangan dan dugaan kecurangan yang memengaruhi hasil. Kamu diminta cara penyelesaian **sesuai kewenangan lembaga negara**.

- Konsep kunci: jenis perkara menentukan lembaga (bagian 5).
- Langkah: kenali jenis perkaranya, yaitu perselisihan **hasil** → cari lembaga yang **memutus** perselisihan itu.
- Pengecoh yang dipasang: lembaga lain yang terdengar bisa membantu, tetapi tidak memegang wewenang memutus jenis perkara ini.

Rujukan: soal nomor 11 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 27 (wewenang Mahkamah Konstitusi, Benar/Salah, 55 % benar). Kamu menilai tiga pernyataan tentang wewenang MK.

- Konsep kunci: wewenang MK dan MA (bagian 2).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Langkah: untuk setiap pernyataan, tanyakan "apakah ini tercantum dalam Pasal 24C?" dan "apakah ini sebenarnya wewenang lembaga lain?".
- Pengecoh yang dipasang: wewenang yang milik lembaga lain atau kewenangan yang tidak dimiliki lembaga mana pun.

Rujukan: soal nomor 27 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tentukan jenis perkara dan tahapnya, baru pilih lembaganya; periksa kata kerja wewenangnya.

►. Pak Hasan kalah dalam gugatan sengketa batas tanah di pengadilan negeri. Ia mengajukan banding, tetapi pengadilan tinggi menguatkan putusan itu. Pada 2026, ia berencana membawa perkaranya ke Mahkamah Konstitusi karena menurutnya "MK adalah pengadilan tertinggi yang putusannya final". Ia juga merasa hakim pengadilan tinggi keliru menilai bukti yang ia ajukan.
Langkah hukum yang sesuai dengan kewenangan lembaga negara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mengajukan perkara itu ke Mahkamah Konstitusi karena putusan lembaga itu bersifat final dan mengikat
B. melaporkan hakim ke Komisi Yudisial agar putusan pengadilan tinggi itu dibatalkan dan diperiksa ulang
C. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir pemeriksaan perkara tersebut
D. meminta DPR memanggil hakim dan meninjau ulang isi putusan pengadilan tinggi yang dianggap keliru
E. memohon Presiden memberi grasi agar putusan pengadilan tinggi itu tidak perlu dijalankan lagi

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: C**

Konsep: jenis perkara menentukan lembaga. **Mahkamah Agung** adalah puncak peradilan umum dan mengadili pada **tingkat kasasi** setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (Pasal 24A). **Mahkamah Konstitusi** menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai, dan perselisihan hasil pemilu (Pasal 24C); MK tidak memeriksa sengketa tanah antarwarga.

Langkah 1 – Tentukan jenis perkara. Sengketa batas tanah antarwarga = perkara perdata di peradilan umum.
Langkah 2 – Tentukan tahapnya. Sudah diputus pengadilan negeri dan pengadilan tinggi → tahap berikutnya kasasi.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — putusan MK memang final, tetapi perkara ini bukan wewenang MK.
• B ✗ — KY menjaga perilaku hakim; KY tidak dapat membatalkan atau menilai isi putusan.
• C ✓ — kasasi ke MA adalah jalan yang tersedia setelah banding.
• D ✗ — DPR mengawasi pemerintah, bukan meninjau putusan pengadilan; itu mencampuri kekuasaan kehakiman yang merdeka.
• E ✗ — grasi diberikan kepada terpidana dalam perkara pidana, bukan untuk sengketa tanah.

Jawaban: C.

Jebakan: A memakai ciri MK yang benar (putusan final) untuk perkara yang salah; B memakai lembaga yang mengawasi hakim, padahal yang dipersoalkan isi putusan.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan jenis perkara dan lembaganya sebelum memilih.

1. Pasal 22D UUD NRI 1945 menyatakan DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, serta mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Warga sebuah provinsi mengadu kepada anggota DPD dari provinsinya tentang tambang yang dinilai merusak sumber air mereka.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang peran DPD dalam masalah tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
DPD dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang di bidang sumber daya alam dan menyampaikan hasilnya kepada DPR.	○	○
DPD berwenang langsung mencabut izin tambang itu karena anggotanya dipilih oleh warga provinsi tersebut.	○	○
Bila undang-undang pertambangan hendak diubah, perubahan itu baru sah setelah DPD ikut menyetujuinya.	○	○

2. Ketika sebuah partai politik peserta pemilu diduga menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, warga sering mendesak berbagai pihak

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

segera bertindak. Ada yang meminta KPU mencoret partai itu dari daftar peserta pemilu. Ada pula yang meminta Presiden langsung membubarkannya, seperti yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Penyelesaian yang paling sesuai dengan kewenangan lembaga negara menurut UUD NRI 1945 adalah ....

A. pembubaran partai itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang memutusnya berdasarkan bukti di sidang
B. KPU mencoret partai itu dari daftar peserta pemilu karena KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu
C. Presiden membubarkan partai itu dengan keputusan presiden karena ia kepala negara dan pemerintahan
D. DPR membubarkan partai itu melalui rapat paripurna karena partai merupakan peserta pemilu anggota DPR
E. Mahkamah Agung membubarkan partai itu karena merupakan puncak dari seluruh lingkungan peradilan

Kunci singkat: 1. 1B 2S 3S 2. A

✔ PERIKSA DIRI

- Bila sebuah peraturan menteri dianggap bertentangan dengan undang-undang, ke mana pengujiannya diajukan? Bagaimana bila yang dipersoalkan undang-undang?
- Mengapa pemberhentian Presiden sekarang harus melewati MK lebih dulu, padahal dulu cukup diputus MPR?
- **Yang harus kuingat:** tentukan jenis perkara dulu, baru lembaganya; lembaga yang terlibat belum tentu lembaga yang berwenang memutus.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.3: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.3

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah

PPKN-2.4

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah**. Ini sub bab prioritas. Pada soal asli 2025, peserta diminta menentukan **alasan** kerja sama pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; hanya sekitar 38 % yang menjawab benar. Contoh soal resmi Pusmendik juga memuat tiga soal tentang topik ini: tantangan hubungan pusat–daerah, solusi penolakan masyarakat adat terhadap program pemerintah, dan manfaat koordinasi pembangunan rumah sakit.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- membedakan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- menjelaskan hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan antara pusat dan daerah;
- menjelaskan alasan dan manfaat kerja sama pusat–daerah serta tantangan otonomi;
- menilai kedudukan daerah khusus dan istimewa dalam NKRI.

◆ KONSEP INTI

Indonesia terbentang lebih dari 5.000 kilometer dari barat ke timur, dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan keadaan daerah yang sangat berbeda. Kebutuhan warga di pegunungan Papua tidak sama dengan kebutuhan warga di kota pelabuhan Jawa. Bila semua keputusan diambil di Jakarta, banyak keputusan akan terlambat atau tidak cocok dengan keadaan setempat. Sebaliknya, bila setiap daerah berjalan sendiri-sendiri, layanan antardaerah bisa timpang dan persatuan terancam. Hubungan pusat dan daerah adalah cara UUD NRI 1945 menjawab dua kebutuhan itu sekaligus: **dekat dengan warga** dan **tetap satu negara**.

1. Negara kesatuan yang memberi otonomi

Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia adalah **negara kesatuan** berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya satu dan berada di tingkat nasional. Daerah tidak mempunyai UUD sendiri dan tidak berdaulat. Ini berbeda dengan negara federal, tempat negara bagian mempunyai konstitusi dan kekuasaan aslinya sendiri. Pengalaman Republik Indonesia Serikat 1949–1950 membuat bangsa Indonesia memilih kembali bentuk kesatuan.

Namun, negara kesatuan tidak berarti semua diatur dari pusat. Pasal 18 hasil Perubahan Kedua (2000) membagi negara atas **provinsi**, dan provinsi dibagi atas **kabupaten** dan **kota**. Setiap daerah itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut **asas**

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2). Otonomi dijalankan **seluas-luasnya**, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (ayat 5). Daerah berhak menetapkan **peraturan daerah** (perda) untuk melaksanakan otonominya (ayat 6). Kepala daerah dipilih secara demokratis (ayat 4) dan DPRD dipilih melalui pemilu (ayat 3).

Otonomi daerah artinya hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Gagasan ini menguat setelah Reformasi 1998. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi otonomi luas kepada kabupaten dan kota, kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kini berlaku **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. Kini Indonesia mempunyai 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota.

2. Tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

UU 23/2014 mengenal tiga asas. Cara membedakannya: lihat **siapa pemilik urusannya** dan **atas nama siapa** kegiatan dijalankan, bukan di mana kantornya berada (Gambar 2.14).

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Setelah diserahkan, urusan itu menjadi milik daerah. Daerah merencanakan, membiayai dengan APBD, melaksanakan, dan bertanggung jawab atasnya. Contohnya, pemerintah kota mengelola puskesmas dan taman kota, kabupaten mengelola sekolah dasar dan SMP, sedangkan provinsi mengelola SMA dan SMK.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat kepada **gubernur sebagai wakil pemerintah pusat**, kepada **instansi vertikal** (kantor kementerian di daerah), atau kepada kepala daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Urusannya tetap milik pusat. Gubernur, misalnya, membina dan mengawasi kabupaten dan kota di wilayahnya atas nama pemerintah pusat. Kantor wilayah Kementerian Agama di sebuah provinsi juga menjalankan urusan pusat, walaupun kantornya berada di daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (atau dari provinsi kepada kabupaten/kota) untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pihak yang menugaskan. Daerah bekerja, tetapi urusan dan dananya berasal dari pihak yang menugaskan, dan daerah melaporkan pelaksanaannya kepadanya. Contohnya, sebuah kementerian menugaskan kabupaten membangun sarana tertentu dengan dana dari APBN.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.14 Tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014: siapa pemilik urusan, siapa pelaksana, dan dari mana dananya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Pembagian urusan pemerintahan

UU 23/2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kelompok (Gambar 2.15).

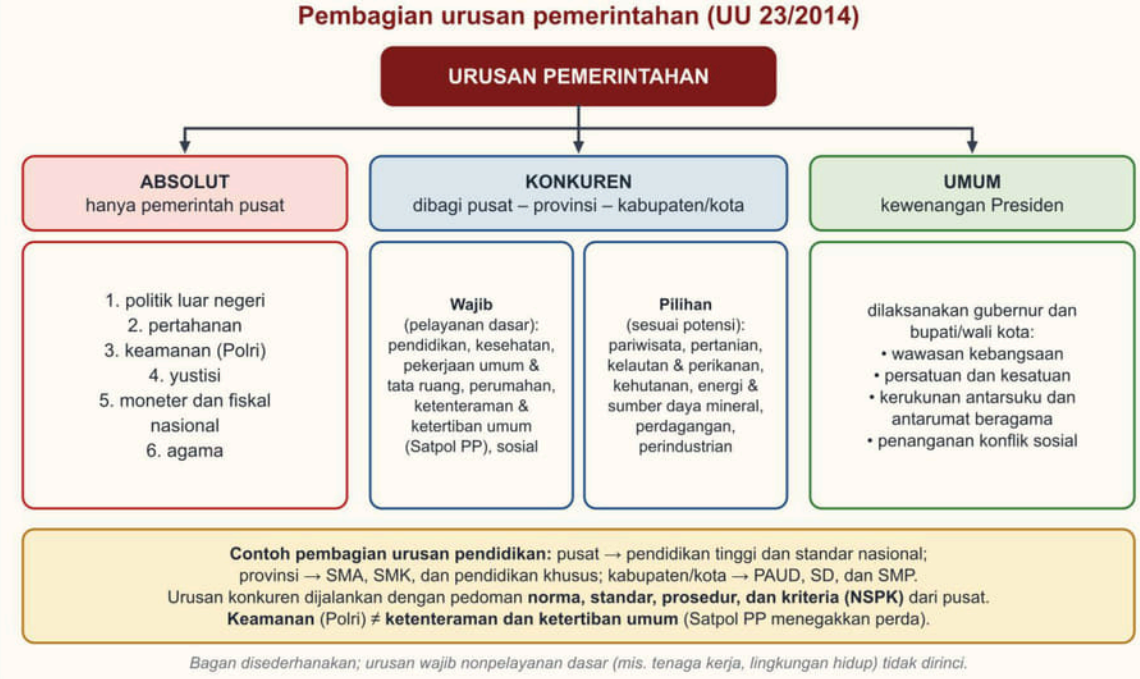
Urusan absolut sepenuhnya milik pemerintah pusat. Jumlahnya enam: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan dan hukum), moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan ini menyangkut keutuhan negara dan harus seragam di seluruh wilayah. Tidak ada daerah yang boleh mencetak uang sendiri, membuat perjanjian dengan negara lain, atau membentuk angkatan bersenjata. Pemerintah pusat dapat menjalankannya sendiri atau melimpahkan pelaksanaannya kepada instansi vertikal, tetapi tidak menyerahkannya kepada daerah.

Urusan konkuren dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar otonomi. Ada urusan **wajib** dan urusan **pilihan**. Urusan wajib yang berkaitan dengan **pelayanan dasar** ada enam: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial. Urusan wajib lainnya antara lain tenaga kerja, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan perhubungan. Urusan **pilihan** disesuaikan dengan potensi daerah, misalnya pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, atau perdagangan. Dalam menjalankan urusan konkuren, daerah wajib berpedoman pada **norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)** yang ditetapkan pusat, supaya mutu layanan di semua daerah tidak timpang.

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh gubernur serta bupati/wali kota di wilayah masing-masing. Isinya antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan antarumat beragama, serta penanganan konflik sosial.

Perhatikan satu pasangan yang sering tertukar. **Keamanan** adalah urusan absolut yang dijalankan Polri. **Ketenteraman dan ketertiban umum** adalah urusan konkuren daerah, dijalankan antara lain oleh **satuan polisi pamong praja (Satpol PP)** untuk menegakkan perda. Satpol PP menertibkan pedagang yang melanggar perda tata ruang, tetapi menangkap pelaku perampokan adalah tugas Polri.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.15 Pembagian urusan pemerintahan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014: absolut, konkuren (wajib dan pilihan), dan umum, beserta contoh. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Hubungan kewenangan, keuangan, dan pengawasan

Pasal 18A mengatur bahwa hubungan pusat dan daerah meliputi **hubungan wewenang** serta **hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya**, yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Hubungan kewenangan sudah tampak pada pembagian urusan di atas. Daerah berwenang, tetapi dalam batas yang ditentukan undang-undang dan NSPK.

Hubungan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah mempunyai **pendapatan asli daerah (PAD)**, misalnya pajak daerah dan retribusi. Namun, sebagian besar daerah belum mampu membiayai dirinya sendiri, sehingga pusat menyalurkan **transfer ke daerah**. Bentuk utamanya ada tiga. **Dana Alokasi Umum (DAU)** diberikan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah; daerah yang miskin sumber pendapatan menerima lebih banyak. **Dana Alokasi Khusus (DAK)** diberikan untuk kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, misalnya membangun ruang kelas atau puskesmas. **Dana Bagi Hasil (DBH)** adalah bagian daerah dari penerimaan negara tertentu, seperti pajak atau hasil sumber daya alam, sehingga daerah penghasil ikut menikmati hasil kekayaan di wilayahnya. Selain itu ada dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Hubungan pengawasan memastikan otonomi tidak menyimpang. Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pusat membina serta mengawasi pemerintahan daerah. Rancangan perda tertentu, seperti APBD, pajak daerah, dan tata ruang, dievaluasi lebih dulu sebelum ditetapkan. Dulu, perda yang sudah berlaku juga dapat dibatalkan oleh menteri atau gubernur. Pada 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatalan perda oleh pemerintah itu bertentangan dengan UUD; pengujian perda yang sudah berlaku menjadi wewenang **Mahkamah Agung** (lihat juga sub bab 2.3).

5. Daerah khusus dan istimewa

Pasal 18B ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat **khusus** atau **istimewa** yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) mengakui **kesatuan masyarakat hukum adat** beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI. Kekhususan diberikan karena sejarah, budaya, atau keadaan tertentu suatu daerah, dan selalu **di dalam** NKRI (Gambar 2.16).

Aceh. Setelah konflik bersenjata selama hampir tiga puluh tahun dan bencana tsunami 26 Desember 2004, pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususannya antara lain peraturan daerah yang disebut **qanun**, pelaksanaan syariat Islam, partai politik lokal, dan lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu adat.

Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan dana

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

otonomi khusus, membentuk **Majelis Rakyat Papua (MRP)** untuk melindungi hak orang asli Papua, dan memberi kesempatan lebih besar bagi orang asli Papua dalam jabatan pemerintahan. Pada 2022, wilayah Papua dimekarkan sehingga kini terdiri atas enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Semuanya berstatus otonomi khusus.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII menyatakan wilayah mereka menjadi bagian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menghormati sejarah itu: gubernur dan wakil gubernur **ditetapkan** dari Sultan dan Adipati Paku Alam yang bertakhta, bukan dipilih melalui pilkada. Keistimewaan lain menyangkut kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Jakarta. Kekhususan Jakarta lahir karena kedudukannya sebagai ibu kota. Di Jakarta tidak ada DPRD kabupaten atau kota; wali kota dan bupati di sana diangkat gubernur sebagai wilayah administrasi, bukan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyiapkan Jakarta tetap berstatus daerah khusus, terutama sebagai pusat perekonomian nasional, setelah ibu kota pindah ke Nusantara (IKN). Pemindahan itu baru berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam putusan 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa selama keputusan presiden itu belum ditetapkan, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara.



Gambar 2.16 Peta provinsi di Indonesia dengan daerah berotonomi khusus (Aceh dan enam provinsi di Papua), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Jakarta. Sumber: peta dasar "Indonesia provinces outline map" oleh Afrogindahood, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; diwarnai dan diberi label oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Kerja sama pusat–daerah dan tantangan otonomi

Pusat dan daerah membutuhkan satu sama lain karena kelebihan mereka berbeda. **Pusat** menetapkan kebijakan nasional, standar, dan sebagian besar dana, sehingga layanan merata di seluruh Indonesia. **Daerah** paling dekat dengan warganya: mengenal siapa yang membutuhkan, di mana masalahnya, dan cara yang cocok dengan budaya setempat.

Penanganan **stunting** (anak bertubuh terlalu pendek akibat kekurangan gizi kronis) adalah contoh nyata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pusat menetapkan strategi nasional dan target, menyediakan dana, serta menyusun standar layanan. Daerah membentuk tim percepatan penurunan stunting sampai ke tingkat desa, mendata keluarga berisiko, dan menggerakkan posyandu. Desa dapat memakai dana desa untuk makanan tambahan bergizi. Menurut Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting turun dari 24,4 % (2021) menjadi 21,6 % (2022), lalu 19,8 % (2024). Tidak ada satu pihak pun yang dapat mencapai hasil itu sendirian.

Otonomi juga menghadapi tantangan. Pertama, **ketergantungan fiskal**: banyak daerah membiayai sebagian besar belanjanya dari transfer pusat karena PAD-nya kecil. Kedua, **pemekaran daerah**: setelah 1999, jumlah daerah otonom bertambah pesat, tetapi banyak daerah baru tetap bergantung pada dana pusat. Karena itu, pemerintah memberlakukan **moratorium** (penghentian sementara) pembentukan daerah otonom baru, dengan pengecualian pemekaran Papua pada 2022. Ketiga, **kebijakan daerah yang tidak sejalan** dengan aturan nasional, misalnya perda yang memungut pungutan di luar ketentuan undang-undang. Keempat, **kesiapan aparatur** dan **ketimpangan antardaerah**. Tantangan ini dijawab bukan dengan menarik semua urusan kembali ke pusat, melainkan dengan pembinaan, pengawasan, dan kerja sama yang lebih baik.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Banjir yang melintasi tiga kabupaten

Awal 2026, Sungai Larasati (fiktif) meluap dan merendam permukiman di tiga kabupaten dalam satu provinsi. Bupati Hilir menyalahkan kabupaten di hulu yang membiarkan hutan ditebang, sedangkan warga menuntut "pemerintah pusat mengambil alih semuanya". Bagaimana pembagian peran yang tepat? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

1. **Tentukan urusannya.** Ada dua urusan: penanggulangan bencana dan pengelolaan sungai. Keduanya urusan **konkuren**, bukan absolut, sehingga pusat, provinsi, dan kabupaten sama-sama punya peran.
2. **Tentukan tingkat pemerintahan dari luas wilayahnya.** Sungai yang melintasi beberapa kabupaten dalam satu provinsi dikelola di tingkat **provinsi**; sungai lintas provinsi atau sungai strategis nasional dikelola **pusat**. Karena itu, provinsi mengoordinasikan ketiga kabupaten.
3. **Bagi peran sesuai kelebihannya.** Kabupaten paling dekat dengan warga: mengevakuasi, mendata korban, dan membuka posko melalui badan penanggulangan bencana daerah.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Provinsi menyatukan rencana hulu–hilir. Pusat menetapkan standar, membantu dana atau peralatan bila kemampuan daerah tidak cukup.

4. **Tolak jawaban ekstrem.** "Pusat mengambil alih semuanya" mengabaikan otonomi dan kedekatan daerah dengan warga; "setiap kabupaten mengurus sendiri" mengabaikan sifat sungai yang lintas wilayah.

Jawaban: penanganan dilakukan bersama; provinsi mengoordinasikan pengelolaan sungai lintas kabupaten, kabupaten menangani warga terdampak, dan pusat mendukung dengan standar serta bantuan sesuai kebutuhan.

Contoh 2 — Kota yang ingin memungut bea masuk sendiri

Pada 2027, DPRD dan Wali Kota Bandar Samudra (fiktif), sebuah kota pelabuhan, menyusun rancangan perda yang mewajibkan setiap barang impor yang masuk lewat pelabuhannya membayar "bea masuk daerah". Alasannya, kota butuh dana untuk memperbaiki jalan yang rusak oleh truk kontainer. Apakah perda itu dapat dibenarkan? *Kasus disusun untuk contoh; tempat fiktif.*

1. **Tentukan jenis urusannya.** Bea masuk adalah bagian dari kebijakan **fiskal nasional**, yang termasuk urusan **absolut** pusat.
2. **Periksa kewenangan daerah.** Daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi yang jenisnya ditetapkan undang-undang. Pasal 23A juga menegaskan bahwa pajak dan pungutan memaksa harus diatur dengan undang-undang.
3. **Pisahkan tujuan dari caranya.** Tujuan memperbaiki jalan itu sah, tetapi caranya keliru. Jalan yang tepat: mengusulkan DAK atau bantuan pusat untuk jalan, memakai bagian DBH, atau mengoptimalkan pajak daerah yang memang menjadi haknya.
4. **Ingat akibat hukumnya.** Rancangan perda pajak dievaluasi lebih dulu oleh pemerintah; bila tetap disahkan, perda itu dapat diuji ke Mahkamah Agung.

Jawaban: perda itu tidak dapat dibenarkan karena bea masuk termasuk urusan fiskal nasional yang absolut milik pusat; kebutuhan kota dipenuhi lewat jalur keuangan pusat–daerah yang sah.

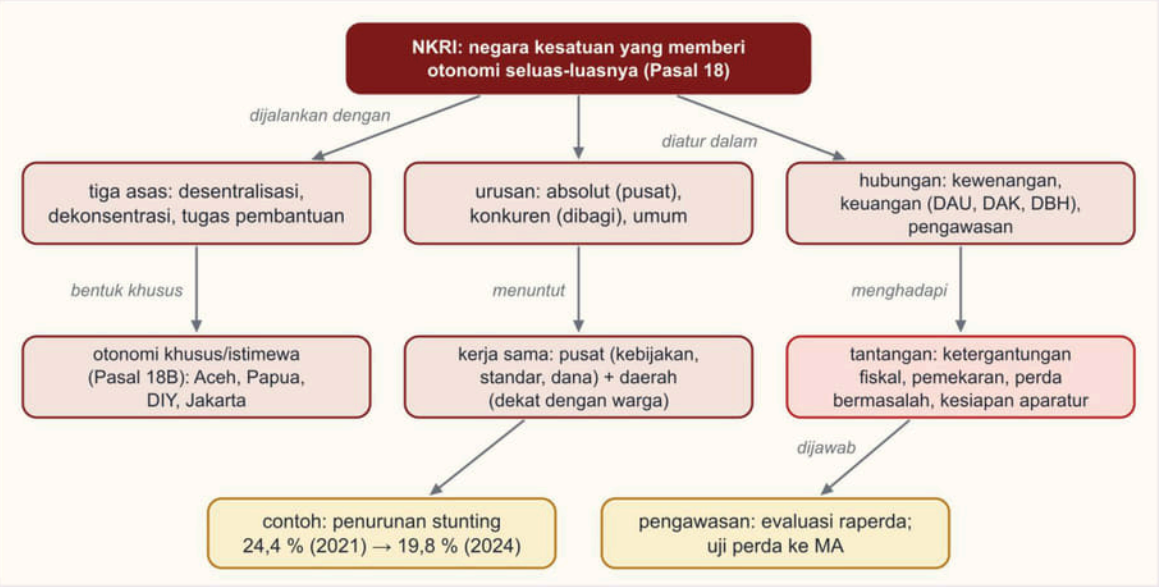
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Indonesia negara kesatuan yang memberi otonomi seluas-luasnya kepada provinsi, kabupaten, dan kota (Pasal 18), tetapi daerah tidak berdaulat.
- Desentralisasi = urusan diserahkan dan menjadi milik daerah; dekonsentrasi = urusan pusat dilimpahkan kepada gubernur atau instansi vertikal; tugas pembantuan = daerah mengerjakan urusan pihak yang menugaskan dengan dananya.
- Urusan absolut (luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) hanya milik pusat; urusan konkuren dibagi dan berpedoman pada NSPK.
- Hubungan pusat–daerah meliputi kewenangan, keuangan (PAD, DAU, DAK, DBH), dan pengawasan.
- Aceh, Papua, DIY, dan Jakarta punya kekhususan yang diatur undang-undang, tetap di dalam NKRI.
- Kerja sama pusat–daerah menggabungkan peran pusat (kebijakan, standar, dana) dengan kedekatan daerah dengan warga.

Bagan pada Gambar 2.17 merangkum hubungan antarkonsep tersebut.



Gambar 2.17 Peta konsep hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan urusan apa** yang dibicarakan dan **siapa pemiliknya** (Gambar 2.15).
2. **Untuk soal alasan atau manfaat kerja sama**, cari pilihan yang menyebut **peran khas** pihak yang ditanyakan dan **hubungannya** dengan pihak lain.
3. **Coret pilihan "semua atau tidak sama sekali".**

Jebakan yang sering dipasang:

- **Lokasi dikira penentu asas.** Kantor instansi pusat yang berada di daerah tetap urusan pusat.
- **Otonomi disamakan dengan kemerdekaan penuh.** Daerah tidak boleh mengatur urusan absolut atau mengabaikan standar nasional.
- **Pusat atau daerah menanggung semuanya.** Kerja sama tidak berarti salah satu pihak menyerahkan seluruh tanggung jawabnya.
- **Isi program disangka alasan kerja sama.** Pilihan yang hanya menyebut kegiatan program, tanpa menjelaskan mengapa perlu bekerja sama, belum menjawab pertanyaan "mengapa".
- **Kekhususan disangka keluar dari NKRI.**

> Contoh salah tafsir: pada sebuah program air bersih, seorang siswa menjawab bahwa kerja sama pusat–daerah dilakukan "karena daerah dapat membangun sumur di desa-desa". Kalimat itu benar, tetapi hanya menyebut **isi kegiatan**. Pertanyaannya meminta **alasan** kerja sama, yaitu kelebihan daerah yang membuat pusat membutuhkannya.

• BEDAH SOAL ASLI

Satu soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Soalnya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 7 (kerja sama penanggulangan kemiskinan, PG, 38 % benar). Ilustrasi menjelaskan bahwa pusat memberi kebijakan dan program, sedangkan daerah melaksanakannya. Kamu diminta menentukan **mengapa** kerja sama itu dilakukan.

- Konsep kunci: alasan kerja sama adalah keunggulan yang saling melengkapi (bagian 6).
- Langkah: semua pilihan menyebut hal yang bisa dilakukan daerah atau pusat → pilih yang menjelaskan **mengapa daerah diperlukan** dalam hubungan dengan pusat, bukan sekadar daftar kegiatan.
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang berisi kegiatan nyata dan terdengar meyakinkan, tetapi tidak menjelaskan alasan kerja sama.

Rujukan: soal nomor 7 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Bedakan alasan kerja sama (kelebihan khas tiap pihak) dari isi kegiatan program.

►. Indonesia termasuk negara dengan kasus tuberkulosis (TBC) yang tinggi. Dalam penanggulangannya, pemerintah pusat menetapkan strategi nasional dan standar pengobatan, serta menyediakan obat tanpa biaya. Pemerintah kabupaten dan kota menggerakkan puskesmas serta kader untuk menemukan warga bergejala, memeriksa orang serumah dengan pasien, dan mendampingi pasien minum obat sampai tuntas. Alasan pemerintah pusat membutuhkan peran pemerintah daerah dalam program tersebut adalah ....

A. pemerintah pusat tidak mempunyai dana untuk membeli obat bagi seluruh pasien di Indonesia
B. pemerintah daerah berkuasa penuh atas urusan kesehatan sehingga pusat cukup mengikuti saja
C. pemerintah daerah dapat membagikan obat tuberkulosis kepada para pasien di puskesmas wilayahnya
D. tanggung jawab penanggulangan penyakit menular dapat dialihkan sepenuhnya kepada daerah
E. pemerintah daerah paling dekat dengan warga sehingga mampu menemukan dan mendampingi pasien

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: E**

Konsep: kerja sama pusat–daerah terjadi karena **kelebihan keduanya berbeda**. Pusat menetapkan kebijakan nasional, standar, dan dana agar layanan merata. Daerah **paling dekat dengan warga**: tahu siapa yang membutuhkan dan cara menjangkaunya. Kesehatan adalah urusan konkuren, sehingga pusat dan daerah sama-sama berperan.

Langkah 1 – Tentukan yang ditanyakan. Pertanyaan meminta **alasan** pusat membutuhkan daerah, bukan isi kegiatan daerah.
Langkah 2 – Cari kelebihan khas daerah yang tidak dimiliki pusat: kedekatan dengan warga.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — ilustrasi justru menyebut pusat menyediakan obat; alasan ini tidak didukung.
• B ✗ — kesehatan adalah urusan konkuren yang mengikuti standar pusat; daerah tidak berkuasa penuh.
• C ✗ — kalimatnya benar, tetapi hanya menyebut **isi kegiatan**, belum menjelaskan mengapa pusat membutuhkan daerah.
• D ✗ — kerja sama tidak berarti salah satu pihak melepas tanggung jawab.
• E ✓ — kedekatan daerah dengan warga membuat penemuan dan pendampingan pasien mungkin dilakukan.

Jawaban: E.

Jebakan: C adalah pola pengecoh yang sama dengan soal asli tentang penanggulangan kemiskinan: kegiatan program disangka alasan kerja sama.

✎ LATIHAN

Untuk setiap soal, tuliskan pemilik urusannya sebelum memilih.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Dulu, menteri dalam negeri dan gubernur dapat membatalkan peraturan daerah yang sudah berlaku bila dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembatalan perda oleh pemerintah itu bertentangan dengan UUD. Sejak itu, perda yang sudah berlaku diuji ke Mahkamah Agung, sedangkan pemerintah tetap mengevaluasi rancangan perda tertentu sebelum ditetapkan.
Pernyataan manakah yang tepat tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah setelah putusan tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 (2017).

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Sejak putusan itu, daerah bebas membuat perda tanpa memperhatikan undang-undang yang lebih tinggi.
☐ B. Pusat tetap mengawasi, antara lain dengan mengevaluasi rancangan perda tertentu sebelum ditetapkan.
☐ C. Putusan itu memindahkan wewenang membentuk perda dari DPRD dan kepala daerah kepada Mahkamah Agung.
☐ D. Perda yang sudah berlaku dan dinilai bertentangan dengan undang-undang dapat diuji ke Mahkamah Agung.
☐ E. Putusan itu menunjukkan bahwa daerah kini berdaulat penuh dan terlepas dari seluruh bentuk pengawasan pusat.

2. Maraknya pencurian sepeda motor pada 2027 membuat Bupati Lembah Tirta berencana membentuk "pasukan keamanan daerah" yang dipersenjatai senjata api dan berwenang menangkap serta menahan pelaku kejahatan. Pasukan itu akan dibiayai APBD dan bertanggung jawab langsung kepada bupati.
Penilaian yang paling tepat terhadap rencana bupati tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena otonomi daerah memberi bupati wewenang mengurus semua urusan di wilayahnya
B. tepat, selama pasukan itu dibiayai sendiri dari APBD tanpa meminta dana pemerintah pusat
C. tidak tepat, karena keamanan urusan absolut pusat; daerah dapat bekerja sama dengan polisi
D. tidak tepat, karena pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki urusan ketertiban di wilayahnya
E. tepat, asalkan rencana itu disetujui DPRD kabupaten dan dituangkan dalam peraturan daerah

Kunci singkat: 1. B, D 2. C

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Dapatkah kamu memberi satu contoh untuk setiap asas: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan?
- Mengapa satuan polisi pamong praja boleh dibentuk daerah, sedangkan urusan keamanan tidak?
- **Yang harus kuingat:** otonomi berada di dalam negara kesatuan; alasan kerja sama = keunggulan yang saling melengkapi, bukan daftar kegiatan.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.4: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.4

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.5 · Demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945

PPKN-2.5

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi memuat **demokrasi** sebagai bagian dari elemen UUD NRI 1945. Tidak ada soal asli 2025 yang khusus menguji sub bab ini, tetapi dua contoh soal resmi Pusmendik menguji pelajaran dari masa lalu: pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru dan pada masa UUDS 1950. Soal prediksi juga sering memakai **data indeks demokrasi** dan **putusan Mahkamah Konstitusi** tentang pemilu.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) dan saluran pelaksanaannya;
- menarik pelajaran dari masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru;
- menilai partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan kebijakan;
- membaca data indeks demokrasi dan putusan pengadilan tanpa menyimpulkan berlebihan.

◆ KONSEP INTI

Kata **demokrasi** berasal dari bahasa Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun, rakyat Indonesia berjumlah lebih dari 280 juta orang. Tidak mungkin semua orang berkumpul di satu lapangan untuk memutuskan setiap undang-undang. Karena itu, UUD NRI 1945 mengatur **jalur-jalur** yang membuat kekuasaan rakyat benar-benar bekerja: pemilu, lembaga perwakilan, kebebasan berpendapat, dan pengawasan terhadap penguasa. Sejarah Indonesia juga menunjukkan bahwa demokrasi bisa melemah bila jalur-jalur itu ditutup.

1. Kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam negara. Sebelum amandemen, Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilakukan sepenuhnya oleh MPR**. Rumusan ini membuat MPR seolah-olah menjadi pemilik kedaulatan, padahal sebagian anggotanya diangkat. Perubahan Ketiga (2001) mengubah bunyinya: kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar**.

Perubahan kecil ini sangat penting. Sejak itu, MPR tidak lagi disebut lembaga tertinggi negara, dan semua lembaga negara menjalankan sebagian kedaulatan rakyat sesuai wewenang yang diberikan UUD kepadanya. Kini kedaulatan tidak lagi "diserahkan" kepada satu lembaga. Rakyat menjalankannya melalui jalur-jalur yang diatur UUD: memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD; mengawasi pemerintah; berserikat; dan menyampaikan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

pendapat. Bagian kalimat "menurut Undang-Undang Dasar" juga berarti kekuasaan rakyat tidak boleh dijalankan dengan sembarang cara. Sekelompok orang yang memaksakan kehendak "atas nama rakyat" di luar prosedur hukum, misalnya menduduki kantor pemerintahan agar seorang pejabat mundur saat itu juga, tidak sedang menjalankan kedaulatan rakyat menurut UUD.

2. Pemilu dalam UUD NRI 1945

Jalur utama kedaulatan rakyat adalah **pemilihan umum (pemilu)**. Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilu dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)** setiap lima tahun sekali. *Langsung* berarti pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perantara. *Umum* berarti semua warga yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa diskriminasi. *Bebas* berarti memilih tanpa paksaan. *Rahasia* berarti pilihan tidak diketahui orang lain. *Jujur* dan *adil* berlaku bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih: setiap suara dihitung apa adanya dan setiap peserta diperlakukan sama.

Pemilu memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 22E ayat 2). Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A). Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat 5), yang kini dijalankan KPU bersama Bawaslu dan DKPP (lihat sub bab 2.3).

3. Perjalanan demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia tidak lahir dalam bentuk yang sudah jadi. Ia melewati beberapa masa dengan ciri yang berbeda (Gambar 2.18).

Demokrasi Parlementer (1950–1959). Di bawah UUDS 1950, pemerintahan dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kebebasan pers dan berpendapat cukup luas. Puncaknya adalah **Pemilu 1955**, pemilu pertama Indonesia, untuk memilih anggota DPR (September 1955) dan anggota Konstituante (Desember 1955). Pemilu ini diikuti banyak partai dan dikenal berjalan relatif bebas. Kelemahannya, tidak ada partai yang menang mayoritas, koalisi mudah pecah, dan tujuh kabinet silih berganti dalam sembilan tahun. Pemerintah sulit menjalankan program jangka panjang.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Setelah Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan demokrasi harus "dipimpin". Dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada Presiden. Tahun 1960, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan dan diganti DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat Presiden. Tahun 1963, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Partai yang berseberangan dibubarkan dan sejumlah surat kabar dilarang terbit. Masa ini berakhir dengan krisis politik dan ekonomi setelah peristiwa 1965.

Orde Baru (1966–1998). Pemerintahan Soeharto menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Pemilu diadakan rutin sejak 1971, tetapi sejak 1977 pesertanya hanya tiga setelah partai-partai digabungkan (fusi) pada 1973. MPR, yang sebagian anggotanya diangkat, terus

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

memilih presiden yang sama. Kritik dibatasi: pada 21 Juni 1994, misalnya, pemerintah mencabut izin terbit majalah *Tempo*, *DeTik*, dan *Editor*. Pembangunan ekonomi memang berjalan, tetapi pengawasan terhadap kekuasaan lemah, sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang.

Reformasi (1998–sekarang). Setelah Soeharto berhenti pada 21 Mei 1998, kebebasan dipulihkan. Pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers. UUD diamandemen. Pada 2004, untuk pertama kalinya rakyat memilih Presiden secara langsung, dalam dua putaran (5 Juli dan 20 September 2004). Sejak Juni 2005, kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat.



Gambar 2.18 Linimasa masa demokrasi di Indonesia, ciri utama tiap masa, dan peristiwa penting. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Pelajaran: ciri yang harus dicegah

Perjalanan itu memberi pelajaran yang jelas. Demokrasi melemah ketika muncul empat gejala: **kekuasaan terpusat** pada satu orang atau lembaga; **masa jabatan tidak dibatasi**; **pendapat dan pers dibungkam**; dan **pemilu tidak memberi pilihan yang nyata**. Sebaliknya, ketidakstabilan pada masa parlementer mengajarkan bahwa demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang cukup stabil untuk bekerja.

Amandemen UUD menjawab pelajaran itu. Masa jabatan Presiden dibatasi (Pasal 7). Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C). Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dijamin (Pasal 28E ayat 3), begitu pula hak memperoleh dan menyampaikan informasi (Pasal 28F). Pemilu diselenggarakan lembaga yang mandiri (Pasal 22E). Undang-undang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Sistem presidensial dengan masa jabatan tetap membuat pemerintahan tidak mudah jatuh bangun seperti tahun 1950-an.

Masa Reformasi pun mempunyai tantangannya sendiri. Kebebasan yang luas membuka ruang bagi **politik uang**, yaitu membeli suara pemilih dengan uang atau barang, serta penyebaran **hoaks** dan ujaran kebencian menjelang pemilu. Jawabannya bukan menutup kebebasan, melainkan menegakkan hukum pemilu, memperkuat pengawasan, dan mendidik pemilih agar menilai calon dari rekam jejak dan programnya. Di sinilah peran pemilih pemula, termasuk kamu, menjadi penting (lihat Bab 4).

Pelajaran ini juga dipakai untuk menilai kebijakan masa kini. Kebijakan yang menjanjikan "stabilitas" dengan cara membatasi kritik, melarang pertemuan, atau memperpanjang kekuasaan tanpa batas sebenarnya mengulang ciri yang dulu melemahkan demokrasi.

5. Partisipasi bermakna di luar pemilu

Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Di antara dua pemilu, rakyat tetap berdaulat melalui berbagai jalur (Gambar 2.19). Warga dapat menyampaikan pendapat di muka umum secara damai menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menyampaikan aspirasi kepada wakilnya, mengikuti rapat dengar pendapat, mengajukan petisi, memakai pers dan media sosial secara bertanggung jawab, serta menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan mutu partisipasi itu. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan 25 November 2021, MK menyatakan pembentukan undang-undang harus memenuhi **partisipasi yang bermakna** (*meaningful participation*). Partisipasi bermakna memenuhi tiga hak: hak untuk **didengar** pendapatnya, hak untuk **dipertimbangkan** pendapatnya, dan hak untuk **mendapat penjelasan** atas pendapat yang diberikan. Mengundang segelintir orang secara tertutup atau mengesahkan undang-undang dengan tergesa-gesa tidak memenuhi syarat ini.

Pers juga merupakan saluran kedaulatan rakyat, karena memberi warga informasi untuk mengawasi kekuasaan. Bila sebuah pemberitaan dianggap keliru, penyelesaiannya melalui **hak jawab** dan **Dewan Pers**, bukan dengan menutup media. Kebebasan ini tetap mempunyai batas: Pasal 28J ayat (2) membolehkan pembatasan hak, tetapi hanya **dengan undang-undang** dan semata-mata untuk menghormati hak orang lain, moral, nilai agama,

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

keamanan, dan ketertiban umum.

Untuk mengukur keadaan demokrasi, pemerintah menyusun **Indeks Demokrasi Indonesia** yang terdiri atas beberapa aspek, seperti kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Data semacam ini perlu dibaca sampai ke aspek-aspeknya. Skor total yang naik tidak berarti semua aspek membaik. Bisa saja aspek kesetaraan naik tajam, sementara aspek kebebasan justru turun sedikit. Kesimpulan yang tepat harus menyebut aspek mana yang membaik dan mana yang memburuk, tanpa menambahkan sebab yang tidak tertulis di data.

Partisipasi yang bermakna juga dapat dilakukan di lingkungan terdekat. Warga desa ikut musyawarah perencanaan pembangunan desa, siswa menyampaikan usulan dalam rapat OSIS dan menerima penjelasan bila usulannya ditolak, dan warga kota memberi masukan tertulis atas rancangan perda yang diumumkan DPRD. Semua itu melatih kebiasaan yang sama: pendapat disampaikan secara tertib, didengar, dipertimbangkan, dan dijawab.



Gambar 2.19 Jalur-jalur pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945: pemilu, wakil rakyat, pengawasan, dan partisipasi warga. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Membatasi kritik demi stabilitas

Pada 2026, Pemerintah Kota Arunagiri (fiktif) menerbitkan surat edaran: setiap unggahan media sosial yang mengkritik kebijakan wali kota harus "diizinkan" dinas kominfo lebih dulu, dan pelanggarnya dilarang memperoleh layanan administrasi. Alasannya, "menjaga stabilitas menjelang pembangunan besar". Bagaimana menilai kebijakan ini dengan ketentuan UUD dan pelajaran sejarah demokrasi? *Kasus disusun untuk contoh; tempat fiktif.*

1. **Tentukan hak yang disentuh.** Kebijakan itu membatasi kebebasan menyampaikan pendapat (Pasal 28E ayat 3) dan hak menyampaikan informasi (Pasal 28F).
2. **Uji apakah pembatasannya sah.** Menurut Pasal 28J ayat (2), pembatasan hak hanya sah bila ditetapkan dengan **undang-undang** dan bertujuan menghormati hak orang lain, moral,

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

agama, keamanan, atau ketertiban umum. Surat edaran wali kota bukan undang-undang, dan "kritik terhadap wali kota" bukan pelanggaran hak orang lain.

3. **Bandingkan dengan sejarah.** Membungkam kritik demi stabilitas adalah ciri masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru yang ingin dicegah oleh amandemen. Kritik justru bagian dari pengawasan rakyat terhadap penguasa.
4. **Pisahkan kritik dari pelanggaran hukum.** Unggahan berisi fitnah atau ujaran kebencian tetap dapat diproses menurut undang-undang, tetapi itu berbeda dengan kritik terhadap kebijakan.
5. **Cari jalan yang sesuai demokrasi.** Bila pemerintah kota khawatir informasi keliru, ia dapat membuka data, memberi penjelasan, dan menjawab kritik secara terbuka.

Jawaban: kebijakan itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), 28F, dan syarat pembatasan Pasal 28J ayat (2), serta mengulang ciri yang dulu melemahkan demokrasi; stabilitas dicapai dengan keterbukaan, bukan dengan membungkam kritik.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

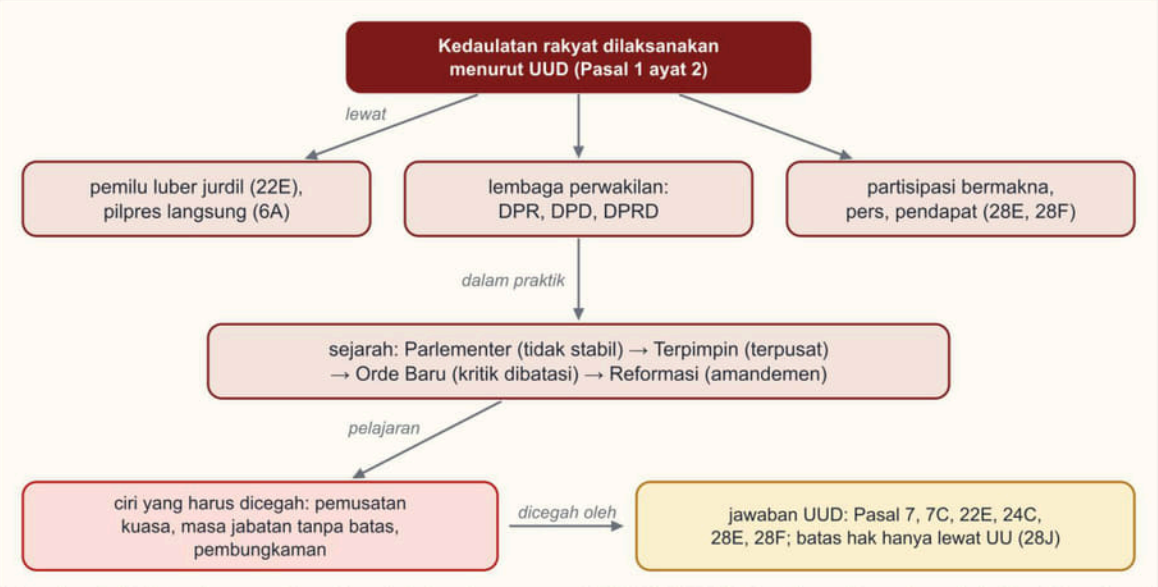
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan menurut UUD** (Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen), bukan diserahkan kepada satu lembaga.
- Pemilu luber jurdil setiap lima tahun memilih DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 22E, 6A); kepala daerah dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4).
- Masa parlementer (1950–1959): bebas tetapi tidak stabil. Masa terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru (1966–1998): stabil tetapi kekuasaan terpusat dan pendapat dibatasi.
- Reformasi: Pemilu 1999, kebebasan pers, pilpres langsung pertama 2004, pilkada langsung sejak 2005.
- Partisipasi bermakna: didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.

Bagan pada Gambar 2.20 merangkum hubungan antarkonsep tersebut.



Gambar 2.20 Peta konsep demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan apakah soal menanyakan prinsip, pelajaran sejarah, atau pembacaan data.**
2. **Untuk prinsip**, periksa apakah pilihan menyalurkan aspirasi **menurut UUD**.
3. **Untuk data**, baca setiap angka dan aspek; coret pilihan yang menambah sebab atau melampaui data.

Jebakan yang sering dipasang:

- **"Atas nama rakyat" tanpa prosedur.** Kedaulatan rakyat tidak membenarkan pemaksaan di luar hukum.
- **Stabilitas dengan membatasi pendapat.** Terdengar tertib, tetapi mengulang kesalahan masa lalu.
- **Penyederhanaan partai sebagai obat semua masalah.** Masalah masa parlementer tidak hanya jumlah partai, tetapi juga sistem yang membuat kabinet mudah jatuh.
- **Partisipasi formal.** Mengundang pihak tertentu secara tertutup atau sosialisasi setelah keputusan jadi.
- **Kesimpulan data berlebihan.** Kesimpulan yang lebih luas daripada yang ditunjukkan angka. Periksa juga arah ukuran: pada beberapa ukuran, angka yang lebih kecil justru berarti lebih baik.
- **Salah paham putusan MK.** Menganggap putusan menunggu revisi undang-undang dulu, atau berlaku surut terhadap hasil pemilu yang sudah selesai. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.

> Contoh salah tafsir: sebuah survei sekolah menunjukkan 70 % siswa merasa bebas menyampaikan pendapat di kelas. Seorang siswa menyimpulkan "semua siswa sudah bebas berpendapat". Ia lupa bahwa 30 % lainnya belum merasakannya, dan bahwa angka sekolahnya tidak mewakili sekolah lain.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tentukan perbuatan yang dipersoalkan, lalu cocokkan dengan arti tiap asas; periksa semua asas, bukan satu saja.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Menjelang pemilihan bupati 2027, seorang kepala dusun di Desa Sukatani mengumpulkan warga penerima bantuan sosial. Ia mengatakan bantuan hanya akan diteruskan kepada warga yang memilih pasangan calon tertentu. Warga juga diminta memotret surat suaranya di bilik suara sebagai bukti. Pada hari pemungutan suara, warga tetap datang ke TPS dan mencoblos sendiri.

Penilaian yang paling tepat berdasarkan asas pemilu dalam UUD NRI 1945 adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. melanggar asas bebas dan rahasia, karena pilihan warga ditekan dan harus diperlihatkan
B. melanggar asas umum, karena tidak semua warga desa menerima bantuan sosial dari pemerintah
C. tidak melanggar asas pemilu, karena warga tetap datang ke TPS dan mencoblos surat suaranya sendiri
D. melanggar asas jujur penyelenggara, karena kepala dusun bertugas menghitung suara di TPS
E. tidak melanggar asas pemilu, karena bantuan sosial itu memang dikelola oleh pemerintah desa

Pembahasan **Kunci: A**

Konsep: Pasal 22E ayat (1): pemilu dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**. *Bebas* = memilih tanpa paksaan atau tekanan. *Rahasia* = pilihan tidak diketahui orang lain. *Langsung* = pemilih memberikan suaranya sendiri.

Langkah 1 – Tentukan perbuatan yang dipersoalkan. Ancaman menghentikan bantuan dan kewajiban memotret surat suara.

Langkah 2 – Cocokkan dengan asas. Ancaman → menekan kebebasan memilih; memotret surat suara sebagai bukti → membuka kerahasiaan pilihan.

Langkah 3 – Analisis opsi:

• A ✓ — kedua perbuatan melanggar asas bebas dan rahasia.
• B ✗ — asas umum menyangkut hak memilih tanpa diskriminasi, bukan pembagian bantuan.
• C ✗ — warga memang mencoblos sendiri (asas langsung terpenuhi), tetapi pilihannya ditekan dan dibuka.
• D ✗ — ilustrasi tidak menyebut kepala dusun sebagai petugas penghitung suara.
• E ✗ — siapa pun pengelolanya, bantuan tidak boleh dipakai untuk menekan pilihan warga.

Jawaban: A.

Jebakan: C hanya memeriksa satu asas (langsung) lalu menyimpulkan tidak ada pelanggaran; D menambahkan fakta yang tidak ada di ilustrasi.

✎ LATIHAN

1. Sebuah rancangan undang-undang tentang pekerja platform daring, seperti pengemudi ojek daring dan kurir, memicu penolakan sebagian pengemudi karena dinilai merugikan penghasilan mereka. Sebagian ingin terlibat sebelum rancangan itu disahkan, sebagian lain bersiap menempuh jalan lain bila undang-undang itu tetap disahkan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Cara manakah yang merupakan saluran kedaulatan rakyat yang sah menurut UUD NRI 1945? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Menyampaikan masukan tertulis atau hadir dalam rapat dengar pendapat umum saat RUU dibahas.

☐ B. Memblokade jalan tol selama berhari-hari agar DPR terpaksa menghentikan seluruh pembahasan RUU tersebut.

☐ C. Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tertib sesuai ketentuan undang-undang.

☐ D. Mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi bila undang-undang itu disahkan dan merugikan hak.

☐ E. Mendesak Presiden membubarkan DPR karena anggotanya dianggap tidak mewakili para pengemudi.

2. Pada 1950-an, kebebasan pers dan berpendapat cukup luas, tetapi kabinet silih berganti sehingga program pemerintah sering terputus. Pada masa-masa sesudahnya, pemerintahan tampak lebih stabil, tetapi kekuasaan terpusat, masa jabatan tidak dibatasi, dan kritik dibungkam. Dalam sebuah diskusi kelas, siswa diminta menarik pelajaran dari perbandingan kedua masa itu.

Pelajaran yang paling tepat bagi pelaksanaan demokrasi menurut UUD NRI 1945 sekarang adalah ....

A. stabilitas pemerintahan lebih penting sehingga pembatasan kritik dapat dibenarkan demi pembangunan

B. jumlah partai cukup dibatasi menjadi sedikit agar kabinet dan pemerintahan tidak mudah jatuh lagi

C. sistem parlementer perlu dipulihkan karena terbukti paling menjamin kebebasan berpendapat warga

D. pemerintahan perlu stabil, tetapi kekuasaannya tetap dibatasi, diawasi, dan terbuka terhadap kritik

E. masa jabatan presiden perlu diperpanjang beberapa tahun agar program pembangunan tidak terputus di tengah jalan

Kunci singkat: 1. A, C, D 2. D

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Apa arti frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dalam Pasal 1 ayat (2)? Berikan dua saluran yang sah.
- Sebutkan satu ciri masa Demokrasi Terpimpin dan pasal UUD NRI 1945 yang mencegahnya terulang.
- **Yang harus kuingat:** kedaulatan rakyat dijalankan lewat jalur konstitusional; partisipasi harus bermakna; data dibaca sampai ke aspeknya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.5: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.5

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD

PPKN-2.6

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis hak dan kewajiban warga negara**. Dua soal asli 2025 menguji sub bab ini, keduanya tentang Pasal 27: **contoh hak dan kewajiban** yang mencerminkan Pasal 27 ayat (3) (60 % benar) dan **tantangan melaksanakan** Pasal 27 ayat (2) (47 % benar). Contoh soal resmi Pusmendik juga menguji makna Pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan.

Kunci sub bab ini adalah **membaca bunyi pasal dengan teliti**. Pasal hampir selalu dikutip di soal; yang diuji adalah apakah kamu memahami **siapa** yang berhak atau berkewajiban, **apa** yang dijamin, dan **apa yang tidak** dijamin.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan hak warga negara, kewajiban warga negara, dan tanggung jawab negara dalam sebuah pasal;
- memberikan contoh hak dan kewajiban yang sesuai dengan sebuah pasal;
- menganalisis tantangan pelaksanaan sebuah pasal dari kasus atau data.

◆ KONSEP INTI

Setiap hari kamu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sering tanpa menyadarinya. Kamu bersekolah, berobat ke puskesmas, menyampaikan pendapat di media sosial, dan kelak membayar pajak serta memilih dalam pemilu. Semua itu berpijak pada pasal-pasal UUD NRI 1945. **Hak** adalah sesuatu yang boleh kamu terima atau lakukan dan dilindungi hukum. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Di antara keduanya ada pihak ketiga yang sering terlupa: **negara**, yang dibebani tanggung jawab agar hak warganya dapat benar-benar dinikmati.

1. Siapa warga negara?

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2) membedakan **warga negara** dari **penduduk**. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Seorang pekerja asing yang tinggal di Jakarta adalah penduduk, tetapi bukan warga negara. Perbedaan ini penting, karena sebagian hak, misalnya hak memilih dalam pemilu, hanya dimiliki warga negara. Sebaliknya, ada hak yang dimiliki setiap orang yang berada di Indonesia, misalnya hak untuk tidak disiksa dan hak beribadat. Karena itu, perhatikan apakah pasal memakai kata "warga negara", "penduduk", atau "setiap orang".

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Aturan rincinya ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Indonesia terutama memakai asas **keturunan** (*ius sanguinis*): anak dari ayah atau ibu WNI adalah WNI, di mana pun ia lahir. Asas **tempat kelahiran** (*ius soli*) dipakai terbatas, misalnya bagi anak yang lahir di Indonesia tetapi kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, agar tidak ada anak tanpa kewarganegaraan. Pada dasarnya Indonesia menganut **kewarganegaraan tunggal**. Kewarganegaraan ganda hanya diberikan secara terbatas kepada anak dari perkawinan campuran, dan setelah berusia 18 tahun atau menikah, anak itu harus memilih salah satu. Pasal 28D ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

2. Membaca rumusan pasal: hak, kewajiban, atau tanggung jawab negara?

Bunyi pasal biasanya memberi petunjuk dari **subjek** dan **kata kerjanya** (Gambar 2.21).

- Bila subjeknya warga negara atau setiap orang dan kata kerjanya *berhak*, *bebas*, atau *memperoleh*, itu **hak**. Contoh: Pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- Bila kata kerjanya *wajib*, itu **kewajiban**. Contoh: Pasal 28J ayat (1), setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
- Bila tertulis *berhak dan wajib*, pasal itu memuat **hak sekaligus kewajiban**. Contoh: Pasal 27 ayat (3) tentang pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (1) tentang pertahanan dan keamanan negara.
- Bila subjeknya *negara* atau *pemerintah*, itu **tanggung jawab negara**. Contoh: Pasal 34 ayat (1), fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.21 Pasal 26–34 UUD NRI 1945 dikelompokkan menurut isinya: hak, kewajiban, hak sekaligus kewajiban, dan tanggung jawab negara. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Pasal 27 sampai 34 dan pelaksanaannya

Pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan **wajib** menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal ini memuat hak (diperlakukan sama) sekaligus kewajiban (menaati hukum). Pejabat dan rakyat biasa diadili dengan hukum yang sama (dibahas lagi di sub bab 2.7).

Pasal 27 ayat (2): tiap warga negara berhak atas **pekerjaan dan penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan. Kata "layak" penting. Bekerja saja belum cukup; pekerjaan itu harus memberi penghasilan dan perlindungan yang manusiawi. Tantangan pelaksanaannya nyata. Menurut Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2026), pada Februari 2026 sekitar 59,4 % penduduk yang bekerja berada di **sektor informal**, misalnya pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja lepas, yang umumnya tanpa kontrak kerja, jaminan sosial, atau penghasilan tetap.

Pasal 27 ayat (3): setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam upaya **pembelaan negara**. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata. Belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, melawan hoaks, dan membayar pajak juga termasuk bela negara dalam arti luas. Warga juga dapat secara sukarela menjadi **komponen cadangan** menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **Pasal 28A–28J** memuat hak asasi manusia secara rinci (dibahas di Bab 1), dan Pasal 28J ayat (2) mengatur batasnya.

Pasal 29 ayat (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Perhatikan subjeknya: **tiap penduduk**, bukan hanya warga negara.

Pasal 30 ayat (1): tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha **pertahanan dan keamanan negara**. Usaha itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 31 tentang pendidikan memuat ketiga jenis rumusan sekaligus (Gambar 2.22). Ayat (1): setiap warga negara **berhak** mendapat pendidikan. Ayat (2): setiap warga negara **wajib** mengikuti pendidikan dasar dan **pemerintah wajib membiayainya**. Ayat (3) dan (4): pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan **sekurang-kurangnya 20 %** dari APBN dan APBD. Pelaksanaan pasal ini terus diperjuangkan. Pada 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan APBN yang anggaran pendidikannya di bawah 20 % bertentangan dengan UUD, dan ketentuan itu mulai dipenuhi dalam APBN 2009. Pada 27 Mei 2025, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pendidikan dasar (SD dan SMP) tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Pasal 32 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, serta menghormati bahasa

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

daerah. **Pasal 33** mengatur perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara (ayat 1), negara mengembangkan **sistem jaminan sosial** bagi seluruh rakyat (ayat 2), dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak (ayat 3). Wujud nyatanya adalah **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** yang berjalan sejak 1 Januari 2014. Iuran warga miskin dibayar negara sebagai **penerima bantuan iuran**. Menurut BPJS Kesehatan, pada akhir 2025 pesertanya sekitar 282,7 juta jiwa atau 98,6 % penduduk. Namun, tidak semua peserta aktif membayar iuran, sehingga sebagian warga yang terdaftar tidak dapat langsung memakai layanannya. Ini contoh tantangan pelaksanaan: hak sudah dijamin di atas kertas, tetapi belum dinikmati merata.

Satu pasal di luar rentang ini juga penting: **Pasal 23A** menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Membayar pajak adalah kewajiban warga, tetapi pungutan memaksa tanpa dasar undang-undang tidak sah.



Gambar 2.22 Satu pasal, tiga rumusan: hak warga, kewajiban warga, dan tanggung jawab negara dalam Pasal 31 tentang pendidikan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Hak tidak sama dengan jaminan hasil

Hak dalam UUD menjamin **kesempatan dan perlakuan**, tidak selalu menjamin **hasil tertentu**. Pasal 31 ayat (1) menjamin setiap warga berhak mendapat pendidikan. Itu tidak berarti setiap orang pasti diterima di sekolah atau perguruan tinggi pilihannya. Yang dijamin adalah kesempatan yang adil, tanpa diskriminasi, dan, untuk pendidikan dasar, tanpa biaya. Begitu pula Pasal 27 ayat (2) tidak berarti negara wajib memberi setiap orang pekerjaan tertentu; negara wajib membuka kesempatan kerja dan melindungi pekerja.

Hak juga tidak boleh dilebih-lebihkan dengan menambah isi yang tidak ada di pasal. Membaca pasal dengan tepat berarti menjawab tiga pertanyaan: **siapa** subjeknya, **apa** yang dijamin atau diwajibkan, dan **sampai mana** batasnya.

Hak dan kewajiban juga selalu berpasangan. Hak seseorang untuk berpendapat diimbangi kewajiban menghormati hak orang lain. Hak atas pendidikan diimbangi kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari JKN diimbangi kewajiban membayar iuran bagi peserta yang mampu, karena dana itu dipakai bersama oleh seluruh peserta yang sakit. Jadi, setiap kali membaca sebuah hak, tanyakan juga kewajiban apa yang menyertainya dan siapa yang dibebani tanggung jawab memenuhinya. Warga yang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, atau negara yang hanya menuntut kewajiban tanpa memenuhi tanggung jawabnya, sama-sama merusak keseimbangan yang diatur UUD.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Tidak lolos ke perguruan tinggi negeri

Pada 2026, Dimas (tokoh fiktif), lulusan SMA dari keluarga berpenghasilan rendah, tidak lolos seleksi masuk program studi kedokteran di sebuah perguruan tinggi negeri. Ia menulis di media sosial: "Negara melanggar hak pendidikan saya menurut Pasal 31 ayat (1), karena tidak menjamin saya kuliah kedokteran." Apakah pendapat Dimas tepat? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. **Baca bunyi pasal.** Pasal 31 ayat (1): setiap warga negara **berhak mendapat pendidikan**. Subjeknya warga negara, rumusannya hak.
2. **Tentukan apa yang dijamin.** Pasal ini menjamin kesempatan memperoleh pendidikan secara adil. Kewajiban pemerintah membiayai dalam ayat (2) berlaku untuk **pendidikan dasar**, bukan pendidikan tinggi. Pasal ini tidak menjamin seseorang diterima di program studi tertentu.
3. **Periksa apakah ada pelanggaran.** Pelanggaran terjadi bila Dimas ditolak karena hal yang tidak adil, misalnya suku, agama, atau karena tidak mampu membayar padahal ia memenuhi syarat. Bila ia tidak lolos karena hasil seleksi yang terbuka dan sama bagi semua peserta, haknya tidak dilanggar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. **Cari bentuk pemenuhan hak yang tersedia.** Negara memenuhi hak itu antara lain dengan membuka seleksi yang sama bagi semua dan menyediakan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dimas dapat mengikuti seleksi lain atau memilih program studi lain.

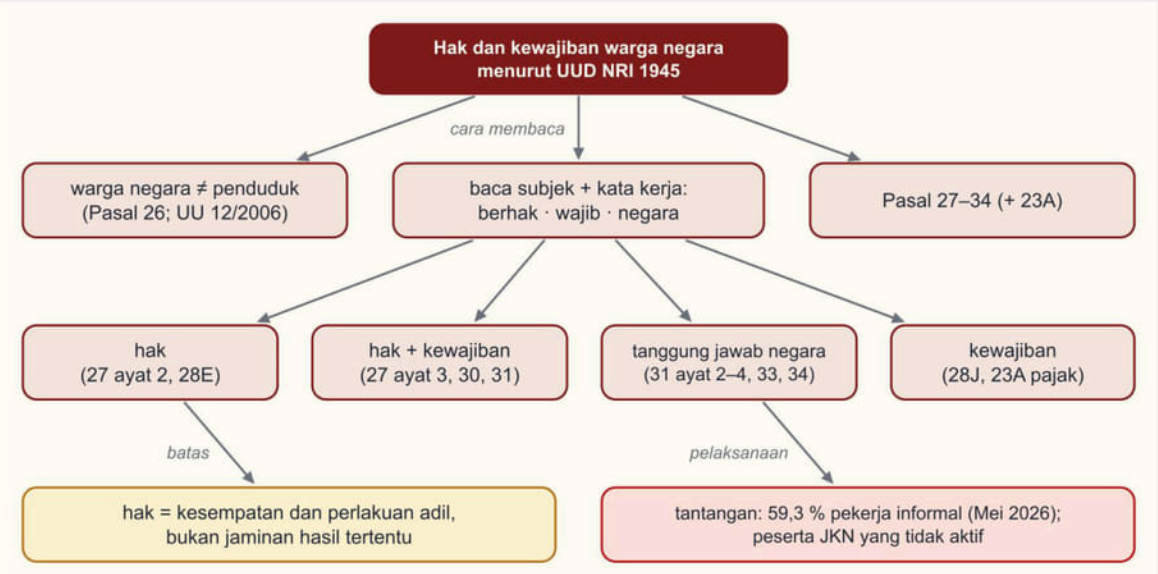
Jawaban: pendapat Dimas kurang tepat; Pasal 31 ayat (1) menjamin hak dan kesempatan mendapat pendidikan, bukan jaminan diterima di program studi pilihan, sehingga haknya baru dilanggar bila ia diperlakukan tidak adil dalam seleksi.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Warga negara berbeda dengan penduduk (Pasal 26); Indonesia terutama memakai asas keturunan dan kewarganegaraan tunggal.
- Kenali rumusan dari subjek dan kata kerja: *berhak* = hak, *wajib* = kewajiban, *berhak dan wajib* = keduanya, *negara/pemerintah* = tanggung jawab negara.
- Pasal 27 (persamaan, pekerjaan layak, bela negara), 28E (pendapat), 29 (agama), 30 (pertahanan), 31 (pendidikan), 32 (kebudayaan), 33 (ekonomi), 34 (fakir miskin, jaminan sosial).
- Hak menjamin kesempatan dan perlakuan yang adil, tidak selalu hasil tertentu.
- Tantangan pelaksanaan adalah hambatan nyata yang membuat hak belum dinikmati merata, misalnya pekerja informal dan peserta JKN yang tidak aktif.

Gambar 2.23 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 2.23 Peta konsep hak dan kewajiban warga negara menurut UUD NRI 1945. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Garis bawahi subjek dan kata kerja** dalam pasal yang dikutip.
2. **Untuk soal contoh**, pastikan isi pilihan sesuai dengan pasal yang dikutip, bukan pasal lain.
3. **Untuk soal tantangan**, cari hambatan yang menyebabkan hak dalam pasal itu tidak dinikmati merata.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Hak dan kewajiban dari pasal lain.** Contohnya benar sebagai perilaku warga, tetapi tidak berasal dari pasal yang ditanya.
- **Melebihi bunyi pasal.** "Negara menjamin semua warga kuliah" melebihi Pasal 31.
- **Hak disangka boleh diabaikan.** Untuk hak yang sekaligus kewajiban, seperti pendidikan dasar, warga tidak bebas memilih untuk tidak menjalankannya.
- **Tantangan yang sebenarnya bukan tantangan.** Pilihan yang menggambarkan keadaan yang sudah baik, atau yang tidak berkaitan dengan pasal.
- **Tanggung jawab dipindahkan.** Menyatakan suatu masalah sepenuhnya urusan keluarga, padahal pasal menyebut negara.

> Contoh salah tafsir: membaca Pasal 28C ayat (1) tentang hak mengembangkan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, seorang siswa menyimpulkan bahwa negara wajib memberinya gawai terbaru. Ia melebihi bunyi pasal: pasal itu menjamin hak, bukan menjanjikan barang tertentu.

● BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 12 (Pasal 27 ayat (3), PG, 60 % benar). Pasal yang dikutip menyatakan setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kamu diminta memilih rumusan hak dan kewajiban yang mencerminkan pasal itu.

- Konsep kunci: contoh harus berasal dari pasal yang dikutip (bagian 2 dan 3).
- Langkah: tanyakan pada setiap pilihan, "apakah isi hak dan kewajibannya berkaitan dengan **pembelaan negara**?".
- Pengecoh yang dipasang: pasangan hak dan kewajiban yang baik dan umum, tetapi tidak berkaitan dengan pembelaan negara.

Rujukan: soal nomor 12 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 2 (Pasal 27 ayat (2), PG, 47 % benar). Kamu diminta menentukan **tantangan** melaksanakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- Konsep kunci: tantangan adalah hambatan nyata bagi pemenuhan hak secara merata (bagian 3 dan 4).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Langkah: untuk setiap pilihan, tanyakan "apakah ini benar-benar menghalangi warga memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak secara merata?".
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang terdengar seperti masalah ketenagakerjaan, tetapi bukan hambatan utama terpenuhinya hak tersebut bagi semua warga.

Rujukan: soal nomor 2 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Garis bawahi subjek, isi, dan tujuan pasal; periksa alasan, bukan hanya penilaian.

►. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada 2026, seleksi masuk SMA negeri di sebuah kota menyediakan sebagian kursi bagi anak dari keluarga tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Sejumlah orang tua memprotes karena menurut mereka semua anak harus bersaing dengan nilai saja.

Tanggapan yang paling tepat terhadap protes tersebut adalah ....

A. protes itu benar, karena perlakuan khusus bagi sebagian anak melanggar persamaan di depan hukum
B. protes itu kurang tepat, karena perlakuan khusus dimaksudkan agar kesempatan anak menjadi setara
C. protes itu kurang tepat, karena sekolah negeri hanya wajib menerima anak dari keluarga yang tidak mampu
D. protes itu benar, karena hak atas pendidikan hanya dijamin bagi anak yang nilainya paling tinggi
E. protes itu kurang tepat, karena orang tua tidak berhak mempersoalkan kebijakan sekolah negeri

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: B**

Konsep: membaca pasal berarti menjawab tiga pertanyaan: **siapa** subjeknya, **apa** yang dijamin, dan **sampai mana** batasnya. Pasal 28H ayat (2) menjamin hak atas **perlakuan khusus** agar orang yang keadaannya berbeda memperoleh **kesempatan yang sama**. Perlakuan berbeda seperti ini tidak bertentangan dengan persamaan; justru tujuannya mencapai persamaan.

Langkah 1 – Baca bunyi pasal. Subjeknya setiap orang; isinya hak atas kemudahan dan perlakuan khusus; tujuannya persamaan dan keadilan.
Langkah 2 – Cocokkan dengan kebijakan. Kursi khusus bagi anak tidak mampu dan penyandang disabilitas adalah perlakuan khusus agar mereka punya kesempatan yang setara.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — persamaan tidak berarti perlakuan yang sama persis bagi keadaan yang berbeda; Pasal 28H ayat (2) membolehkannya.
• B ✓ — sesuai bunyi dan tujuan pasal.
• C ✗ — melebihi bunyi pasal; kursi khusus hanya sebagian, sekolah negeri tetap terbuka bagi semua.
• D ✗ — hak atas pendidikan (Pasal 31) dimiliki setiap warga negara, bukan hanya yang nilainya tertinggi.
• E ✗ — penilaiannya benar, tetapi alasannya salah; menyampaikan keberatan adalah hak orang tua.

Jawaban: B.

Jebakan: A memakai asas persamaan yang benar dengan pemahaman yang keliru; E menilai protes dengan tepat, tetapi beralasan salah.

✎ LATIHAN

1. Pada 2027, sejumlah pemuda pencari kerja di Kabupaten Sungai Lebar berunjuk rasa menuntut pemerintah kabupaten mengangkat mereka semua menjadi pegawai pemerintah daerah. Mereka merujuk Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bupati menjawab bahwa pasal itu hanya melindungi warga yang sudah bekerja.
Penilaian yang paling tepat terhadap kedua pendapat tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tuntutan para pemuda tepat, karena pasal itu mewajibkan pemerintah mengangkat setiap pencari kerja menjadi pegawai
B. pendapat bupati tepat, karena hak atas pekerjaan baru dimiliki seseorang setelah ia diterima bekerja
C. keduanya kurang tepat; pasal itu menjamin hak atas kesempatan kerja yang layak, bukan jabatan tertentu
D. keduanya tepat, karena pasal itu mengatur hak para pencari kerja sekaligus hak orang yang sudah bekerja
E. keduanya kurang tepat, karena urusan mencari pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam sebuah diskusi daring tentang mahalnya harga rumah di kota besar, muncul berbagai pendapat tentang makna hak bertempat tinggal dalam pasal tersebut.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna pasal tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Pasal itu mewajibkan negara memberi setiap warga rumah gratis di lokasi yang ia pilih sendiri.	○	○
Program rumah bersubsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah termasuk upaya memenuhi hak itu.	○	○
Menempati lahan milik orang lain tanpa izin dapat dibenarkan dengan alasan hak bertempat tinggal.	○	○

Kunci singkat: 1. C 2. 1S 2B 3S

✔ PERIKSA DIRI

- Dalam Pasal 31, bagian mana yang merupakan hak warga, kewajiban warga, dan tanggung jawab pemerintah?
- Mengapa "bekerja" belum tentu berarti hak dalam Pasal 27 ayat (2) sudah terpenuhi?
- **Yang harus kuingat:** baca subjek dan kata kerja pasal; jangan melebihi bunyi pasal; contoh harus berasal dari pasal yang ditanya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.6: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.6

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM

PPKN-2.7

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis perilaku taat hukum, penegakan hukum, dan perlindungan HAM**. Ini sub bab prioritas. Dua soal asli 2025 mengujinya: **tantangan penegakan hukum** pada kasus pencemaran lingkungan (33 % benar) dan **solusi** atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban (48 % benar).

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menerapkan asas negara hukum: persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, dan peradilan yang adil;
- menjelaskan tugas lembaga penegak hukum dan alur peradilan pidana;
- mengenali tantangan penegakan hukum dari sebuah kasus dan memilih solusi yang memulihkan hak;
- membedakan upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), termasuk keadilan restoratif dan diversi.

◆ KONSEP INTI

Hukum dibuat agar orang dapat hidup bersama dengan aman dan adil. Aturan saja tidak cukup. Aturan harus **ditegakkan**: pelanggar diproses, korban dipulihkan, dan semua orang diperlakukan sama. Penegakan hukum yang baik juga harus **berkeadilan**, artinya tidak hanya mengikuti bunyi pasal secara kaku, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan hak asasi semua pihak, termasuk hak orang yang dituduh. Sub bab ini menjelaskan asas yang menjadi pegangan, lembaga yang menjalankan, jalannya perkara, serta tantangan dan jalan keluarnya.

1. Indonesia negara hukum

Pasal 1 ayat (3), hasil Perubahan Ketiga (2001), menyatakan **Negara Indonesia adalah negara hukum**. Artinya, kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak orang yang berkuasa. Presiden, menteri, hakim, polisi, sampai warga biasa sama-sama tunduk pada hukum. Lawan dari negara hukum adalah negara kekuasaan, tempat hukum hanya menjadi alat penguasa.

Negara hukum ditopang beberapa asas.

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa tidak boleh membuat seseorang kebal hukum. Peristiwa

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

nyata memperlihatkan asas ini. Pada Oktober 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, karena menerima suap dalam pengurusan sengketa pilkada. Pada 30 Juni 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan pada 23 Februari 2015 Mahkamah Agung menolak kasasinya. Ketua lembaga peradilan tertinggi pun diadili dengan hukum yang sama.

Praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka atau didakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Karena itu, menyebarkan data pribadi tersangka atau menghakiminya beramai-ramai melanggar asas ini, walaupun perbuatannya tampak jelas.

Peradilan yang bebas dan adil. Pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh ditekan siapa pun. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum, berhak tidak disiksa (Pasal 28G ayat 2 dan 28I ayat 1), dan berhak atas proses yang terbuka. Warga yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum gratis menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Kepastian hukum. Proses harus berjalan menurut aturan dan dalam waktu yang wajar. Laporan yang didiamkan tanpa kejelasan merusak kepastian hukum.

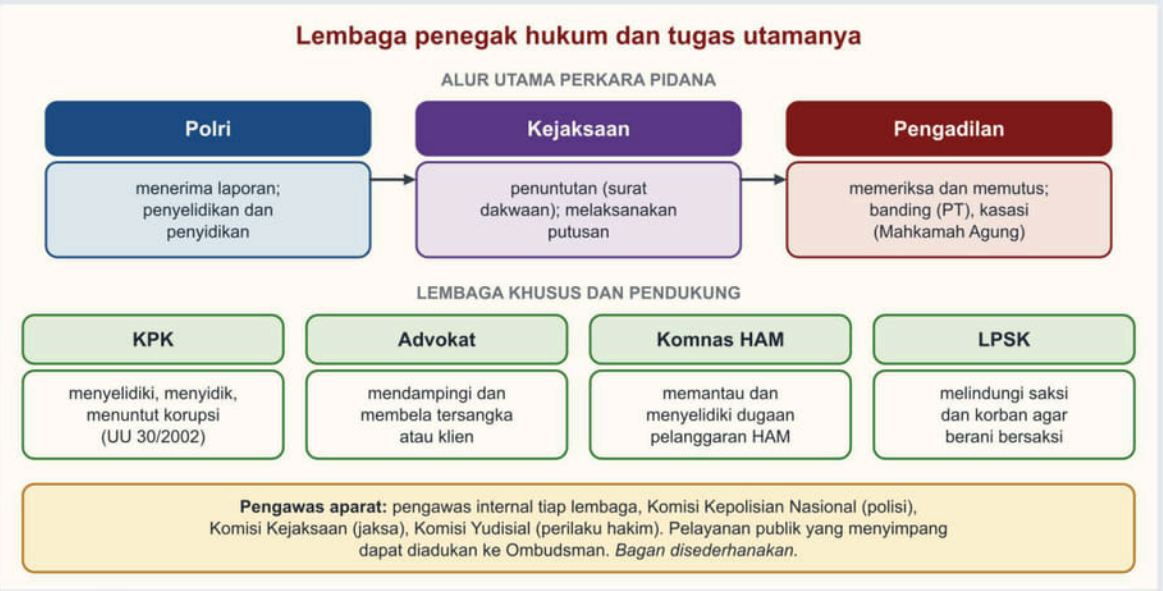
2. Lembaga penegak hukum

Penegakan hukum melibatkan banyak lembaga dengan tugas yang berbeda (Gambar 2.24).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjaga keamanan dan ketertiban, menerima laporan, serta melakukan **penyelidikan** (mencari tahu apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana) dan **penyidikan** (mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka). **Kejaksaan** melakukan **penuntutan**, yaitu membawa perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan, dan melaksanakan putusan. **Pengadilan** memeriksa dan memutus perkara. Di puncaknya ada Mahkamah Agung, yang membawahkan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Beberapa lembaga lain melengkapi. **KPK**, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi, termasuk melalui operasi tangkap tangan. **Advokat** mendampingi dan membela kepentingan hukum klien. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)** memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)** melindungi saksi dan korban agar berani memberi keterangan. Pengawasan terhadap aparat dilakukan antara lain oleh pengawas internal, **Komisi Kepolisian Nasional**, **Komisi Kejaksaan**, dan **Komisi Yudisial** untuk perilaku hakim.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.24 Lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung beserta tugas utamanya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Alur peradilan pidana

Perkara pidana berjalan melalui tahap-tahap yang berurutan (Gambar 2.25). Sejak 2 Januari 2026, tahapan ini diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru**, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

1. **Laporan atau pengaduan.** Korban atau siapa pun yang mengetahui tindak pidana melapor kepada polisi. Perkara juga dapat bermula dari tertangkap tangan.
2. **Penyelidikan.** Polisi mencari tahu apakah peristiwa itu tindak pidana.
3. **Penyidikan.** Penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka. Pada tahap ini tersangka berhak didampingi penasihat hukum.
4. **Penuntutan.** Berkas diserahkan kepada jaksa. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.
5. **Pemeriksaan di sidang pengadilan.** Hakim memeriksa bukti dan mendengar saksi, jaksa, serta terdakwa dan pembelanya. Sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu seperti perkara anak.
6. **Putusan.** Hakim memutus terdakwa bersalah atau tidak. Bila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan.
7. **Upaya hukum.** Pihak yang tidak puas dapat mengajukan **banding** ke pengadilan tinggi, lalu **kasasi** ke Mahkamah Agung. Setelah berkekuatan hukum tetap, masih ada **peninjauan kembali** dengan syarat tertentu.
8. **Pelaksanaan putusan.** Jaksa melaksanakan putusan, misalnya memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.



Gambar 2.25 Alur peradilan pidana dari laporan sampai pelaksanaan putusan, beserta lembaga yang berperan di setiap tahap. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Tantangan penegakan hukum

Hukum yang baik di atas kertas belum tentu berjalan baik di lapangan. Tantangan penegakan hukum adalah **hambatan dalam proses hukum** yang membuat keadilan sulit dicapai. Sumbernya dapat berasal dari tiga arah.

Dari **aparat dan lembaga**: suap dan uang pelicin, intervensi orang berkuasa, perkara yang berlarut-larut, dan penegakan yang tebang pilih (keras kepada rakyat kecil, lunak kepada orang berpengaruh). Dari **sistem perlindungan**: saksi dan pelapor yang diintimidasi, kurangnya ahli (misalnya ahli forensik digital atau ahli lingkungan), serta biaya dan jarak yang menyulitkan warga miskin dan warga di daerah terpencil. Dari **masyarakat**: rendahnya kesadaran hukum, budaya main hakim sendiri, dan anggapan bahwa tindak pidana berat cukup diselesaikan "secara kekeluargaan".

Bedakan tantangan dari **pelanggaran**. Pada kasus pembalakan liar, menebang pohon di hutan lindung adalah pelanggaran. Saksi yang tidak berani bersaksi karena diancam adalah tantangan penegakan hukumnya. Penyebab dan jalan keluarnya juga berbeda. Pelanggaran dijawab dengan penindakan terhadap pelaku, sedangkan tantangan dijawab dengan memperbaiki prosesnya.

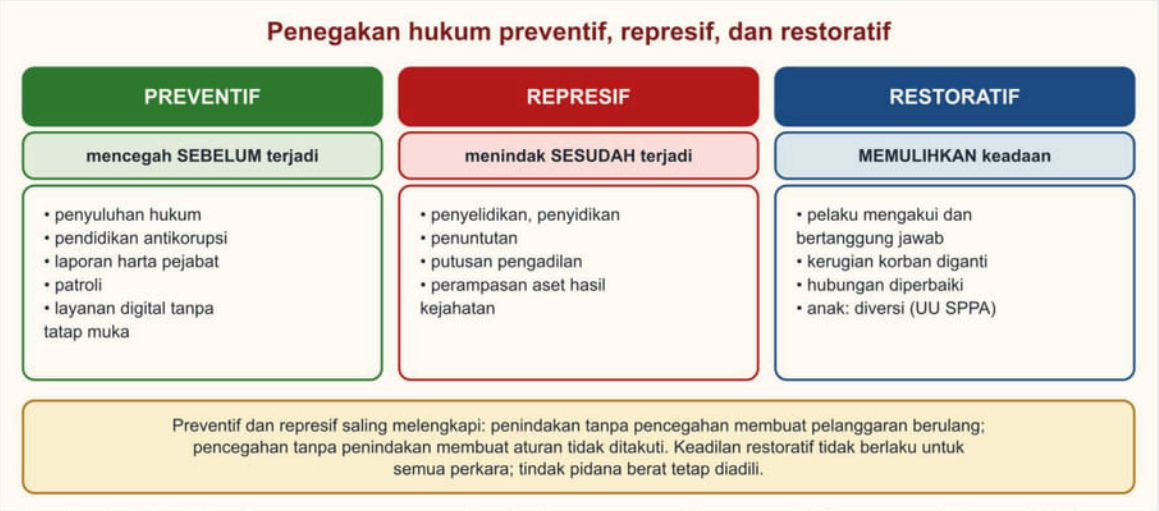
Setiap tantangan mempunyai jalan keluar yang sesuai. Suap dan uang pelicin dijawab dengan pengawasan yang independen dan layanan yang transparan. Saksi yang takut dijawab dengan perlindungan dari LPSK. Warga miskin yang kesulitan biaya dijawab dengan bantuan hukum gratis. Perkara yang berlarut-larut dijawab dengan batas waktu yang jelas dan hak pelapor untuk mengetahui perkembangan laporannya. Solusi yang baik selalu menyasar hambatan yang memang tergambar dalam kasus.

Penegakan hukum juga dapat memulihkan hak warga yang dilanggar oleh lembaga negara sendiri. Pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan sekelompok warga tentang buruknya kualitas udara Jakarta dan menyatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lalai. Pada November 2023, Mahkamah Agung menolak kasasi pemerintah. Putusan ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) dapat diperjuangkan melalui pengadilan. Pelaksanaan putusan seperti ini tetap perlu dikawal.

5. Preventif, represif, dan keadilan restoratif

Upaya penegakan hukum dibagi dua (Gambar 2.26). **Preventif** berarti mencegah sebelum pelanggaran terjadi, misalnya penyuluhan hukum, pendidikan antikorupsi, kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaannya, patroli, dan sistem layanan digital yang mengurangi pertemuan tatap muka sehingga peluang suap berkurang. **Represif** berarti menindak setelah pelanggaran terjadi, misalnya penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Keduanya diperlukan. Penindakan tanpa pencegahan membuat pelanggaran terus berulang; pencegahan tanpa penindakan membuat aturan tidak ditakuti.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 2.26 Perbandingan upaya penegakan hukum preventif (mencegah) dan represif (menindak), serta keadilan restoratif. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Penegakan hukum juga tidak selalu berarti penjara. Kasus **nenek Minah** di Banyumas memperlihatkan mengapa. Pada 2009, nenek Minah memetik tiga buah kakao di kebun sebuah perusahaan untuk dijadikan bibit. Ia mengaku dan mengembalikannya, tetapi tetap dilaporkan dan diadili dengan pasal pencurian. Pada 19 November 2009, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, sehingga ia tidak perlu menjalani hukuman selama tidak berbuat pidana lagi dalam masa itu. Kasus ini ramai dibicarakan karena dinilai jauh dari rasa keadilan, dan sejak itu sering disebut sebagai pendorong penerapan **keadilan restoratif**.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk **memulihkan keadaan**, bukan semata-mata membalas. Pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, korban dipulihkan, dan hubungan sosial diperbaiki. KUHAP baru mengatur mekanisme ini, tetapi tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara itu.

Untuk anak, pendekatan ini diwajibkan. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**, yang berlaku sejak 31 Juli 2014, mengatur **diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, misalnya musyawarah dengan korban. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi **wajib diupayakan** pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan bila tindak pidananya diancam pidana penjara **di bawah tujuh tahun** dan **bukan pengulangan**. Tujuannya agar anak tidak kehilangan masa depan karena penjara, tetapi tetap bertanggung jawab dan korban tetap dipulihkan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▣ CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Pelajar 15 tahun mengambil ponsel

Pada 2026, Raka (15 tahun, tokoh fiktif) mengambil ponsel milik teman sekelasnya dan menjualnya untuk membayar utang permainan daring. Ini perbuatan pertamanya. Orang tua korban melapor ke polisi. Seorang warga di media sosial menuntut "Raka harus dipenjara agar jera". Bagaimana penanganan yang sesuai hukum? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. **Tentukan status pelaku.** Raka berumur 15 tahun, jadi ia **anak yang berkonflik dengan hukum** (12 sampai belum 18 tahun). Perkaranya ditangani menurut UU SPPA.
2. **Periksa syarat diversi.** Pencurian biasa diancam pidana penjara paling lama lima tahun, yaitu **di bawah tujuh tahun**, dan ini **bukan pengulangan**. Karena itu, diversi **wajib diupayakan** sejak tahap penyidikan.
3. **Rancang isi diversi.** Musyawarah melibatkan Raka dan orang tuanya, korban dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Kesepakatan dapat berupa pengembalian kerugian, permintaan maaf, dan kewajiban mengikuti pembinaan atau kegiatan pelayanan masyarakat.
4. **Bila diversi gagal.** Bila tidak tercapai kesepakatan, perkara berlanjut ke pengadilan anak, dengan sidang tertutup dan hakim anak.
5. **Tanggapi tuntutan warganet.** Tuntutan "harus dipenjara" mengabaikan aturan diversi; menyebarkan identitas Raka di media sosial juga dilarang karena identitas anak wajib dirahasiakan.

Jawaban: perkara Raka wajib diupayakan diversi karena ia masih anak, ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, dan bukan pengulangan; penyelesaiannya memulihkan kerugian korban sekaligus membina Raka.

Contoh 2 — Laporan pungutan liar yang tidak ditindaklanjuti

Pada 2027, Bu Sari (tokoh fiktif), pedagang makanan, melaporkan petugas di kantor perizinan Kabupaten Wanasari (fiktif) yang meminta "uang percepatan" agar izin usahanya terbit. Lima bulan berlalu tanpa kabar. Petugas itu tetap bertugas di loket yang sama, dan Bu Sari mendengar bahwa atasannya adalah kerabat petugas tersebut. Apa tantangan utama penegakan hukum dalam kasus ini, dan apa jalan keluarnya? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

1. **Pisahkan pelanggaran dari tantangan.** Meminta "uang percepatan" adalah **pelanggaran** oleh petugas. Pertanyaannya meminta **tantangan**, yaitu hambatan dalam proses menindaklanjuti laporan.
2. **Cari hambatan proses yang tergambar.** Laporan didiamkan lima bulan (proses berlarut-larut, tanpa kepastian), petugas tetap di posisinya, dan ada hubungan kekerabatan dengan atasannya (**konflik kepentingan** yang melemahkan pengawasan internal).
3. **Tolak tantangan yang tidak tergambar.** Misalnya "masyarakat tidak mau melapor": dalam kasus ini justru Bu Sari sudah melapor.
4. **Pilih solusi yang menyasar hambatan itu.** Laporan diteruskan ke pengawas yang tidak memiliki konflik kepentingan, misalnya inspektorat daerah, Ombudsman (untuk pelayanan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

publik yang menyimpang), atau aparat penegak hukum bila ada unsur pidana. Petugas dibebastugaskan sementara selama pemeriksaan, dan pelapor dilindungi.

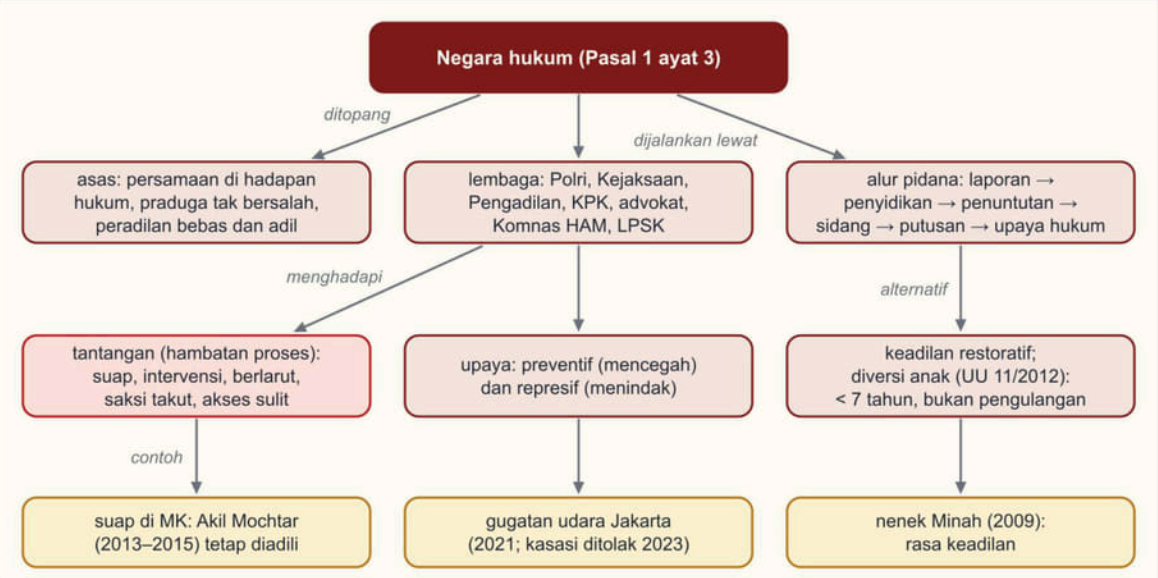
Jawaban: tantangan utamanya adalah konflik kepentingan dalam pengawasan internal yang membuat laporan tidak ditindaklanjuti; solusinya membawa laporan ke pengawas yang independen dan melindungi pelapor, bukan sekadar menegur petugas.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Indonesia negara hukum (Pasal 1 ayat 3): persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, peradilan yang bebas dan adil, kepastian hukum.
- Polri menyelidiki dan menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus; KPK menangani korupsi; Komnas HAM, LPSK, dan komisi pengawas melengkapi.
- Alur pidana: laporan → penyelidikan → penyidikan → penuntutan → sidang → putusan → banding/kasasi → pelaksanaan.
- Tantangan = hambatan dalam proses hukum, berbeda dari perbuatan pelanggar.
- Preventif mencegah, represif menindak; keadilan restoratif memulihkan; diversi wajib bagi anak bila ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan.

Gambar 2.27 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 2.27 Peta konsep penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan yang ditanyakan**: pelanggaran, tantangan, solusi, atau asas?
2. **Untuk tantangan**, cari hambatan dalam **proses hukum** yang tergambar di kasus.
3. **Untuk solusi**, pilih yang **menyelesaikan perselisihan bagi kedua pihak** dan memulihkan hak.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Pelanggaran dikira tantangan penegakan hukum.** Perbuatan pelaku bukan hambatan proses hukumnya.
- **Tantangan yang tidak tergambar di kasus.** Pilihan yang benar secara umum, tetapi tidak ada buktinya di ilustrasi.
- **Main hakim sendiri dikira tegas.** Menghukum tanpa proses melanggar praduga tak bersalah.
- **Solusi sepihak atau hanya menghukum.** Langkah yang sah, tetapi hanya memperjuangkan satu sisi atau tidak memulihkan hak korban.
- **"Kekeluargaan" untuk perkara pidana berat.** Santunan atau damai tidak otomatis menghentikan tuntutan pidana.

> Contoh salah tafsir: pada kasus penipuan daring, seorang siswa menyebut "pelaku sangat pandai menyamar" sebagai tantangan penegakan hukum. Kalimat itu menjelaskan cara pelaku berbuat, bukan hambatan dalam proses hukum. Hambatan proses hukum misalnya aparat kekurangan ahli forensik digital atau korban enggan melapor.

● BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 17 (pencemaran dan proses hukum yang lambat, PG, 33 % benar). Ilustrasi menggambarkan pencemaran, laporan warga yang tidak diproses dengan baik, dan kabar adanya uang pelicin. Kamu diminta menentukan **tantangan dalam penegakan hukum**.

- Konsep kunci: bedakan pelanggaran dari tantangan penegakan hukum (bagian 4).
- Langkah: pisahkan kalimat tentang **perbuatan** pelaku dari kalimat tentang **proses hukum** → tentukan hambatan yang tergambar di bagian proses hukum.
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang benar secara umum, tetapi tidak menjawab hambatan proses hukum yang tergambar di ilustrasi.

Rujukan: soal nomor 17 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 25 (pedagang kecil kehilangan tempat berjualan, PG, 48 % benar). Ilustrasi menyebut pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban untuk saling menghormati kepentingan. Kamu diminta menentukan **solusi**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Konsep kunci: solusi yang mempertemukan para pihak dan memulihkan hak (bagian 5).
- Langkah: tanyakan pada setiap pilihan, "apakah ini menyelesaikan perselisihan bagi **kedua** pihak, atau hanya memperkuat posisi satu pihak?".
- Pengecoh yang dipasang: langkah-langkah yang sah dan wajar, tetapi belum tentu menyelesaikan perselisihan bagi semua pihak.

Rujukan: soal nomor 25 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pisahkan perbuatan pelaku dari hambatan proses hukum; pilih hambatan yang tergambar di ilustrasi.

►. Sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melapor karena masalah keluarga dianggap aib yang tidak pantas dibawa ke luar rumah. Ada pula korban yang sudah melapor, tetapi diminta petugas berdamai saja dengan pelaku karena kasusnya dianggap urusan keluarga. Akibatnya, banyak korban tidak memperoleh perlindungan dan pelakunya tidak diproses.

Tantangan penegakan hukum yang paling tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....

A. anggapan bahwa kekerasan adalah urusan keluarga, baik pada korban maupun pada petugas
B. pelaku melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anggota keluarganya di dalam rumah
C. aparat penegak hukum menerima suap dari pelaku agar laporan korban tidak diproses lebih lanjut
D. undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga belum pernah dibuat di Indonesia
E. korban tidak memiliki hak untuk melapor karena peristiwanya terjadi di dalam rumah pribadi

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: A**

Konsep: tantangan penegakan hukum adalah hambatan dalam **proses hukum** yang membuat keadilan sulit dicapai, misalnya budaya masyarakat, sikap aparat, atau sistem perlindungan yang lemah. Tantangan berbeda dari **pelanggaran**, yaitu perbuatan pelaku itu sendiri.

Langkah 1 – Pisahkan pelanggaran dari tantangan. Kekerasan oleh pelaku adalah pelanggaran. Yang ditanya hambatan proses hukumnya.
Langkah 2 – Cari hambatan yang tergambar. Korban malu melapor karena dianggap aib; petugas menyuruh berdamai karena dianggap urusan keluarga.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — hambatan dari masyarakat dan aparat yang sama-sama tergambar di ilustrasi.
• B ✗ — ini pelanggarannya, bukan hambatan penegakan hukum.
• C ✗ — suap tidak disebut di ilustrasi; benar secara umum, tetapi tidak tergambar.
• D ✗ — keliru; larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur undang-undang (UU 23/2004).
• E ✗ — keliru; korban berhak melapor dan dilindungi, di mana pun peristiwanya terjadi.

Jawaban: A.

Jebakan: B adalah pola pengecoh paling sering: perbuatan pelaku disangka tantangan penegakan hukum. C menyebut tantangan yang nyata di tempat lain, tetapi tidak ada buktinya di ilustrasi.

✎ LATIHAN

1. Pada 2026, warga Kampung Bayur menangkap seorang pemuda yang diduga mencuri tabung gas dari sebuah warung. Sebagian warga memukulinya, sementara yang lain merekam kejadian itu untuk diunggah ke media sosial. Ketua RT kemudian menghentikan pemukulan, menenangkan warga, dan menghubungi polisi.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan prinsip negara hukum!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Memukuli terduga pencuri dapat dibenarkan karena akan membuat pelaku dan orang lain jera.	○	○
Langkah ketua RT menghubungi polisi sesuai dengan penegakan hukum melalui proses yang sah.	○	○
Pemuda itu tetap berhak tidak disiksa dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 2027, pengembang perumahan di Desa Lereng Sari menimbun saluran irigasi yang melintasi lahannya. Akibatnya, sawah puluhan petani di hilir kekeringan dan gagal tanam. Pengembang beralasan saluran itu berada di atas tanah yang sudah dibelinya secara sah. Sebagian petani marah dan berencana membongkar paksa timbunan itu pada malam hari. Solusi yang paling tepat untuk memulihkan hak para petani adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. petani membongkar timbunan bersama-sama karena saluran irigasi itu sudah lama mereka gunakan
B. petani melaporkan pengembang ke polisi agar dipenjara, tanpa perlu memikirkan pulihnya aliran air sawah
C. petani menerima keadaan karena pengembang telah membeli tanah itu secara sah dan memiliki izin
D. kedua pihak dimediasi agar aliran air pulih; bila mediasi gagal, petani menggugat ke pengadilan
E. petani meminta DPR membatalkan izin pembangunan perumahan itu melalui keputusan rapat paripurna

Kunci singkat: 1. 1S 2B 3B 2. D

✔ PERIKSA DIRI

- Apa beda pelanggaran hukum dan tantangan penegakan hukum? Berikan satu contoh masing-masing dari kasus yang sama.
- Mengapa menyebarkan alamat dan foto keluarga tersangka bertentangan dengan penegakan hukum yang berkeadilan?
- **Yang harus kuingat:** hukum sama bagi semua; tersangka tetap dilindungi; solusi yang baik mempertemukan para pihak dan memulihkan hak.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 2.7: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-2.7

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kuis Akhir Bab 2

PPKN-KB2

Jumlah soal: 30 **Waktu anjuran:** 60 menit

Kerjakan sendiri dan berwaktu. Setelah selesai, cocokkan dengan kunci di Bagian D, isi tabel skor, lalu lihat anjuran di bawahnya.

Kerjakan Kuis Bab 2 di LMS

Skor dan progresmu tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-KB2

1. Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pada 2027, sejumlah anggota MPR mengusulkan bentuk negara federal dengan alasan pembangunan antardaerah belum merata. Usul tertulis itu ditandatangani lebih dari sepertiga anggota MPR.

Penilaian yang paling tepat terhadap usul tersebut adalah ....

Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. dapat diubah karena usulnya sudah memenuhi syarat sepertiga anggota MPR dalam Pasal 37

B. tidak dapat diubah walaupun syarat pengusul terpenuhi; pemerataan ditempuh lewat otonomi

C. dapat diubah bila sidang dihadiri dua pertiga anggota dan disetujui separuh lebih satu anggota

D. tidak dapat diubah oleh MPR, tetapi dapat diputuskan melalui referendum seluruh rakyat

E. dapat diubah bila Presiden mengeluarkan dekrit seperti yang pernah terjadi pada tahun 1959

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 2027, warga Desa Rawa Indah melaporkan sebuah gudang yang diduga menimbun solar bersubsidi. Polisi menindaklanjuti laporan itu, tetapi sopir truk yang menjadi saksi kunci tiba-tiba menolak bersaksi setelah rumahnya didatangi orang tak dikenal yang mengancam keluarganya. Pemeriksaan pun tersendat.
Tantangan utama penegakan hukum dalam kasus tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. perbuatan pemilik gudang yang menimbun solar bersubsidi untuk keuntungan pribadinya
B. lemahnya perlindungan bagi saksi sehingga keterangan penting sulit diperoleh penyidik
C. rendahnya kesadaran hukum warga desa yang enggan melaporkan kejahatan di sekitarnya
D. belum adanya aturan yang melarang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di negara ini
E. jarak desa yang terlalu jauh dari kantor polisi sehingga laporan sulit untuk disampaikan

3. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (3) menyatakan, jika tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pada 2027, wakil pemerintah menolak menyetujui sebuah RUU dalam rapat paripurna DPR.
Akibat yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. RUU tetap sah bila disetujui lebih dari separuh anggota DPR yang hadir dalam paripurna itu
B. RUU diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pihak yang pendapatnya benar
C. RUU tetap berlaku karena DPR adalah lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
D. Presiden dapat langsung mengganti RUU itu dengan peraturan pemerintah buatannya sendiri
E. RUU tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang itu, tetapi dapat dibahas pada masa lain

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Di sebuah kabupaten, loket pelayanan kartu tanda penduduk berada di lantai tiga tanpa lift atau jalur landai, sehingga warga pengguna kursi roda harus digendong petugas.
Penerapan ketentuan tersebut yang paling tepat adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga pengguna kursi roda cukup mewakilkan urusannya kepada anggota keluarga yang sehat
B. penyediaan akses ke loket itu sepenuhnya menjadi kewajiban pengusaha swasta di sekitarnya
C. warga pengguna kursi roda menanggung sendiri biaya pembangunan jalur landai bagi dirinya
D. pemerintah daerah menyediakan loket di lantai dasar atau akses yang terjangkau semua
E. pelayanan itu baru wajib diperbaiki setelah ada perda khusus tentang penyandang disabilitas

5. Dalam pembahasan rancangan APBN, DPR dan Presiden berbeda pendapat tentang besarnya subsidi pupuk. Rapat berlangsung berminggu-minggu: sebagian anggota DPR mengkritik keras usulan pemerintah, sementara menteri keuangan menjelaskan alasan pemerintah di depan komisi. Banyak orang menilai pembahasan itu terlalu alot.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hubungan antarlembaga negara dalam ilustrasi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Bila pembahasan buntu, Presiden dapat membubarkan DPR agar APBN segera dapat disahkan.	○	○
Perdebatan itu merupakan wujud fungsi anggaran DPR dan prinsip saling mengawasi antarlembaga.	○	○
Karena DPR dan Presiden sederajat, APBN boleh ditetapkan Presiden sendiri tanpa persetujuan DPR.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pada 2026, seorang pekerja asing yang tinggal dan bekerja di sebuah pabrik di Indonesia meminta waktu untuk beribadat. Atasannya menolak dengan alasan jaminan UUD hanya berlaku bagi warga negara Indonesia.
Penilaian yang paling tepat terhadap alasan atasan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. keliru, karena pasal itu menjamin tiap penduduk, termasuk orang asing yang tinggal di sini
B. tepat, karena hak yang dijamin UUD memang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia
C. keliru, karena setiap orang asing yang bekerja di Indonesia otomatis menjadi warga negara Indonesia
D. tepat, karena urusan ibadah pekerja diatur sepenuhnya oleh peraturan internal perusahaan
E. keliru, karena pekerja asing berhak meninggalkan pekerjaannya kapan saja tanpa izin atasan

7. Pada pemilihan bupati 2027 di Kabupaten Sungai Rengas, pengawas TPS memergoki Hendra mencoblos untuk kedua kalinya di TPS lain dengan memakai surat pemberitahuan milik tetangganya yang sedang merantau. Pengawas segera mencatat kejadian itu dan mengamankan barang buktinya.
Penanganan selanjutnya yang sesuai dengan kewenangan lembaga adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. diproses Sentra Gakkumdu sebagai dugaan tindak pidana pemilihan, lalu diadili di pengadilan
B. diadukan ke DKPP karena perbuatan itu terjadi di TPS yang dikelola penyelenggara pemilihan
C. diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena perbuatan itu dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan bupati
D. diputus sendiri oleh KPU kabupaten dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tersebut
E. diserahkan kepada Komisi Yudisial karena menyangkut pelanggaran hukum dalam pemilihan bupati

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Selama tahapan pemilihan wali kota 2027 di Kota Batu Ampar, warga, peserta, dan pemantau melaporkan berbagai persoalan, mulai dari pencalonan, perilaku penyelenggara, sampai penetapan hasil. Setiap persoalan harus dibawa ke lembaga yang tepat agar dapat diselesaikan secara sah.

Pasangan persoalan dan lembaga yang berwenang menanganinya manakah yang tepat? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Selisih hasil penghitungan yang ditetapkan KPU kota dan menentukan pemenang diputus Mahkamah Agung.

☐ B. Bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU kota mengajukan sengketa proses ke Bawaslu.

☐ C. Calon yang diduga memalsukan ijazah untuk syarat pencalonan diadukan ke DKPP sebagai pelanggaran etik.

☐ D. Anggota Bawaslu kota yang ternyata menjadi anggota tim kampanye salah satu calon diperiksa oleh DKPP.

☐ E. Hakim perkara pidana pemilihan yang diduga bertemu diam-diam dengan terdakwa diperiksa Komisi Yudisial.

9. Pada 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, MK memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sampai undang-undang baru dibentuk.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ....

Sumber: Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013; hukumonline.com, "MK Batalkan UU Sumber Daya Air" (18/2/2015).

A. MK kini menjadi lembaga tertinggi negara yang berkedudukan di atas DPR dan Presiden

B. undang-undang yang disetujui DPR dan Presiden tetap dapat dibatalkan bila melanggar UUD

C. MK berwenang menyusun sendiri undang-undang baru untuk mengganti undang-undang yang dibatalkan

D. putusan MK baru berlaku setelah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna berikutnya

E. pengujian undang-undang terhadap UUD seharusnya diajukan oleh warga ke Mahkamah Agung

10. Pasal 7A UUD NRI 1945 menyatakan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Pada 2027, mayoritas anggota DPR kecewa terhadap kebijakan impor pangan Presiden dan ingin segera meminta MPR memberhentikannya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Penilaian yang paling tepat terhadap keinginan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. sah apabila keinginan itu didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir
B. sah karena MPR berwenang memberhentikan Presiden yang kebijakannya ditolak wakil rakyat
C. tidak sah karena Presiden hanya dapat diberhentikan apabila rakyat menyetujuinya melalui pemilu
D. tidak tepat karena kebijakan yang tidak disukai bukan pelanggaran hukum dan harus diuji MK
E. tepat asalkan Mahkamah Konstitusi langsung memberhentikan Presiden setelah menerima usul

11. Pak Darto, pedagang daring berpenghasilan cukup, berhenti membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional mandiri sejak 2026 karena merasa jarang sakit. Ketika harus menjalani operasi terjadwal pada 2027, ia menuntut biayanya ditanggung penuh dengan alasan kesehatan adalah hak yang dijamin UUD dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial.
Penilaian yang paling tepat terhadap tuntutan Pak Darto adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena UUD mewajibkan negara menanggung seluruh biaya kesehatan setiap warganya
B. tepat, karena Pak Darto sudah membayar pajak sehingga iuran jaminan tidak diperlukan lagi
C. kurang tepat, karena kesehatan sepenuhnya urusan pribadi dan negara tidak ikut bertanggung jawab
D. kurang tepat, karena jaminan kesehatan dari negara hanya diberikan kepada pegawai negeri
E. kurang tepat, karena hak atas jaminan diimbangi kewajiban membayar iuran bagi peserta mampu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Harga semen dan beras di pulau-pulau terpencil dulu bisa berlipat dibandingkan di kota besar karena ongkos angkutnya mahal. Pemerintah kemudian menjalankan pelayaran kapal barang bersubsidi yang singgah secara terjadwal di pelabuhan-pelabuhan kecil agar warga pulau terpencil dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Pokok pikiran Pembukaan UUD NRI 1945 yang paling tepat menjadi dasar kebijakan tersebut adalah ....

A. persatuan, karena kapal menghubungkan pulau-pulau sehingga wilayah negara tidak terpecah
B. kedaulatan rakyat, karena rute kapal ditentukan oleh suara terbanyak warga setiap pulau
C. Ketuhanan, karena pemerintah menjalankan kewajiban moral menolong sesama yang kesulitan
D. persatuan, karena warga di setiap pulau diwajibkan membeli barang dengan harga yang sama persis
E. keadilan sosial, karena warga pulau terpencil mendapat kesempatan memenuhi kebutuhan pokok

13. Pada tahun anggaran yang sama, tiga kabupaten menerima transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten P, penghasil gas bumi, menerima bagian dari penerimaan negara atas gas yang diambil di wilayahnya. Kabupaten Q, yang pendapatan asli daerahnya kecil, menerima dana umum yang lebih besar. Kabupaten R menerima dana untuk membangun puskesmas sesuai prioritas nasional.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam ilustrasi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Bagian yang diterima Kabupaten P merupakan dana bagi hasil karena gas diambil dari wilayahnya.	○	○
Dana umum yang lebih besar bagi Kabupaten Q bertujuan memeratakan kemampuan keuangan antardaerah.	○	○
Dana puskesmas bagi Kabupaten R boleh dipakai untuk kegiatan apa saja karena sudah menjadi milik daerah.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Pada 2027, sebuah lembaga keuangan asing menawarkan pinjaman besar kepada pemerintah Indonesia untuk membangun pelabuhan. Syaratnya, Indonesia harus mengubah beberapa undang-undang ketenagakerjaan sesuai rancangan yang disiapkan pemberi pinjaman. Pemerintah menolak syarat itu dan memilih mencari skema pembiayaan lain.
Cita-cita nasional dalam alinea kedua Pembukaan yang paling tepat tercermin dari sikap pemerintah adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. merdeka, karena Indonesia menolak segala bentuk kerja sama dengan pihak dari luar negeri
B. makmur, karena pemerintah berusaha memperoleh pinjaman dengan bunga yang paling rendah
C. berdaulat, karena Indonesia menentukan sendiri isi undang-undangnya tanpa didikte
D. bersatu, karena seluruh pekerja Indonesia akan diatur oleh undang-undang yang sama
E. merdeka, karena Indonesia sudah terbebas dari penjajahan bangsa lain sejak tahun 1945

15. Dalam program perbaikan rumah tidak layak huni, kementerian menetapkan standar rumah sehat dan menyediakan sebagian dana. Pemerintah kabupaten memilih keluarga penerima, memeriksa kepemilikan lahan, menggerakkan warga bergotong royong, dan melaporkan hasilnya. Beberapa kabupaten juga menambah dana dari APBD.
Pernyataan manakah yang tepat menjelaskan alasan kerja sama pusat dan daerah dalam program tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pemerintah kabupaten memperbaiki dinding, atap, dan lantai rumah keluarga penerima di desa-desa.
☐ B. Pemerintah kabupaten paling mengenal keluarga yang benar-benar membutuhkan dan keadaan lahan warganya.
☐ C. Pemerintah pusat menyerahkan seluruh tanggung jawab sehingga tidak perlu lagi memantau hasil program.
☐ D. Standar dari pusat menjaga agar mutu rumah yang diperbaiki tidak timpang antara satu daerah dan lainnya.
☐ E. Perumahan rakyat termasuk urusan absolut sehingga daerah hanya boleh menjalankan perintah pusat saja.

16. Pada 2027, ratusan warga Kota Bukit Indah tertipu investasi arisan daring yang dikelola Yuni. Para korban melapor ke kepolisian, dan perkara itu kemudian berlanjut sampai ke pengadilan negeri. Beberapa korban yang menjadi saksi sempat menerima pesan ancaman dari orang yang tidak dikenal.
Pernyataan manakah yang tepat tentang peran lembaga dalam penanganan perkara

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. KPK berwenang menyidik perkara itu karena kerugian warga sangat besar dan korbannya banyak.
☐ B. Penyidik kepolisian mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangkanya.
☐ C. Kejaksaan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri setempat.
☐ D. Komnas HAM memutus bersalah atau tidaknya Yuni setelah mendengar keterangan para korban.
☐ E. LPSK dapat memberikan perlindungan kepada korban yang menjadi saksi dan menerima ancaman.

17. Warga Kabupaten Tanah Merah mengeluhkan lamanya pelayanan pencatatan nikah di kantor urusan agama kecamatan, yang merupakan bagian dari Kementerian Agama. Mereka mendatangi DPRD kabupaten dan meminta bupati segera mengganti kepala kantor itu karena kantornya berada di wilayah kabupaten.
Tanggapan yang paling tepat terhadap tuntutan warga tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. keluhan disampaikan ke Kementerian Agama karena kantor itu instansi vertikal urusan pusat
B. bupati berwenang mengganti kepala kantor itu karena semua kantor di wilayahnya menjadi urusan daerah
C. DPRD dapat membuat perda yang mengatur kantor itu karena pelayanannya dirasakan oleh warga kabupaten
D. bupati dapat mengambil alih kantor itu bila Kementerian Agama tidak segera memperbaiki pelayanannya
E. warga tidak dapat mengadu kepada siapa pun karena urusan agama hanya diatur oleh tokoh agama setempat

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Sebuah kabupaten berencana menerbitkan "kupon belanja daerah" yang wajib diterima semua toko di wilayahnya sebagai alat pembayaran pengganti rupiah. Pemerintah kabupaten berharap kupon itu membuat uang berputar di dalam daerah dan menguatkan usaha kecil setempat. Rencana itu diajukan dengan alasan otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya.
Penilaian yang paling tepat terhadap rencana tersebut adalah ....

A. dapat dibenarkan karena otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya menurut Pasal 18 UUD
B. dapat dibenarkan bila rencana itu terlebih dahulu disetujui oleh DPRD kabupaten tersebut
C. dapat dibenarkan asalkan kupon itu hanya berlaku di dalam wilayah kabupaten itu saja
D. tidak dapat dibenarkan karena moneter termasuk urusan absolut yang hanya dimiliki pusat
E. tidak dapat dibenarkan karena usaha kecil tidak termasuk urusan yang boleh diserahkan ke daerah

19. Pada 2027, Paguyuban Nelayan Teluk Sari menilai dua aturan merugikan anggotanya. Pertama, sebuah undang-undang tentang zonasi laut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kedua, sebuah peraturan menteri pelaksananya memuat larangan yang bertentangan dengan undang-undang perikanan.
Langkah hukum yang sesuai dengan kewenangan lembaga negara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. kedua aturan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena keduanya menyangkut hak konstitusional nelayan
B. undang-undang diuji ke Mahkamah Agung, sedangkan peraturan menteri diuji ke Mahkamah Konstitusi
C. undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan menteri diuji ke Mahkamah Agung
D. kedua aturan diajukan ke Mahkamah Agung karena lembaga itu puncak dari seluruh badan peradilan
E. kedua aturan diadukan ke DPR karena DPR bersama Presiden yang membentuk undang-undang tersebut

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Sebuah pemerintah kota memindahkan seluruh pengurusan izin usaha ke layanan daring sehingga pemohon tidak perlu bertatap muka dengan petugas. Kota itu juga mewajibkan pejabatnya melaporkan harta kekayaan setiap tahun dan memasang papan tarif resmi di semua kantor pelayanan.
Langkah-langkah tersebut termasuk upaya penegakan hukum yang bersifat ....

A. preventif, karena mempersempit peluang suap sebelum pelanggaran terjadi
B. represif, karena menindak petugas yang terbukti menerima suap dari warga
C. represif, karena pejabat yang melaporkan harta langsung diadili pengadilan
D. preventif, karena pelaku suap dihukum lebih berat agar orang lain jera
E. restoratif, karena pelaku dan korban suap dipertemukan untuk berdamai

21. Setiap pertengahan Agustus, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD. Tidak ada pasal UUD yang mewajibkan pidato itu, tetapi kebiasaan tersebut dijalankan terus-menerus dan diterima sebagai bagian dari penyelenggaraan negara.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang kedudukan kebiasaan tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kebiasaan itu merupakan contoh konvensi, yaitu aturan dasar tidak tertulis yang melengkapi UUD.	○	○
Karena tidak tercantum dalam pasal UUD, kebiasaan itu melanggar konstitusi dan seharusnya dihentikan.	○	○
Bila sebuah kebiasaan ketatanegaraan bertentangan dengan pasal UUD, kebiasaan itulah yang didahulukan.	○	○

22. Dalam sebuah diskusi daring, seorang warganet berpendapat: "Pasal-pasal UUD sudah diubah empat kali. Agar adil, Pembukaan juga perlu ditulis ulang supaya bahasanya lebih modern dan tujuan negaranya disesuaikan dengan zaman."
Pernyataan manakah yang tepat untuk menanggapi pendapat tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pembukaan memuat dasar negara Pancasila sehingga mengubahnya berarti mengubah fondasi seluruh hukum.
☐ B. Pembukaan boleh ditulis ulang asalkan usulnya diajukan sepertiga anggota MPR seperti pasal-pasal lain.
☐ C. Pembukaan hanya berfungsi sebagai kata pengantar sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai norma hukum.
☐ D. Kebutuhan zaman dapat dijawab dengan mengubah pasal-pasal atau membuat undang-undang yang baru.
☐ E. Pembukaan memuat kesepakatan para pendiri negara yang dicapai melalui kompromi berbagai golongan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

23. Pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan sekelompok warga tentang buruknya kualitas udara Jakarta. Pengadilan menyatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan langkah pengendalian pencemaran udara. Banding pemerintah ditolak, dan pada November 2023 Mahkamah Agung menolak kasasinya.
Makna peristiwa tersebut bagi penegakan hukum yang berkeadilan adalah ....
Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Agung, perkara Nomor 2560 K/PDT/2023; Greenpeace Indonesia, siaran pers 16/9/2021.

A. gugatan warga terhadap pemerintah melanggar asas praduga tak bersalah bagi para pejabat
B. pengadilan berwenang memberhentikan pejabat yang terbukti lalai mengendalikan pencemaran
C. pemerintah pun tunduk pada hukum dan hak atas lingkungan sehat dapat dituntut di pengadilan
D. masalah pencemaran udara Jakarta otomatis selesai sejak putusan pengadilan itu dibacakan
E. warga sebaiknya menempuh unjuk rasa dahulu sebelum diizinkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

24. Sejumlah pelajar di sebuah kota berencana menyampaikan penolakan terhadap rencana penebangan hutan kota melalui aksi damai di depan gedung DPRD. Mereka menyiapkan poster, perwakilan yang akan berdialog dengan anggota dewan, dan regu kebersihan setelah aksi. Seorang guru berpendapat pelajar tidak berhak ikut mengkritik kebijakan pemerintah.
Tanggapan yang paling tepat terhadap pendapat guru tersebut adalah ....

A. tepat, karena pendapat tentang kebijakan hanya boleh disampaikan oleh warga yang sudah memilih
B. tepat, karena kritik terhadap pemerintah daerah dapat mengganggu stabilitas pembangunan kota
C. kurang tepat, karena menyampaikan pendapat secara damai dijamin UUD sebagai hak warga
D. kurang tepat, karena dalam aksi itu pelajar boleh melakukan apa saja tanpa batasan dari hukum
E. kurang tepat, karena pelajar seharusnya langsung menghentikan sendiri penebangan hutan kota

25. Pada 2026, Forum Pelajar Kabupaten Lamuru hendak merevisi anggaran dasarnya yang sudah berumur dua puluh tahun. Sebagian pengurus ingin menulis ulang seluruh naskah, termasuk mukadimah yang memuat tujuan berdirinya forum. Seorang anggota mengusulkan agar forum meniru cara MPR mengubah UUD pada 1999–2002.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Usulan yang paling sesuai dengan cara MPR tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menulis ulang seluruh naskah agar anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan para pengurus sekarang
B. menyerahkan revisi kepada ketua forum agar selesai cepat tanpa rapat anggota yang panjang
C. mengubah mukadimah lebih dahulu karena tujuan forum harus mengikuti perubahan zaman
D. mempertahankan mukadimah, lalu menambah pasal sisipan pada naskah lama sebagai dasarnya
E. membuat naskah baru tanpa mukadimah karena tujuan forum sudah diketahui semua anggotanya

26. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; ayat (2) menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada 2027, sekelompok pelajar membentuk komunitas yang memantau akun penyebar hasutan kekerasan di media sosial.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang penerapan pasal tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Melaporkan akun penyebar hasutan kepada kepolisian merupakan wujud ikut serta dalam usaha keamanan negara.	○	○
Karena berhak menjaga keamanan, komunitas itu boleh membobol akun tersebut dan menyebarkan identitas pemiliknya.	○	○
Peran komunitas itu bersifat mendukung dan tidak menggantikan tugas Polri dalam menindak para pelaku.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

27. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sebuah kantor kelurahan, kerabat pejabat dilayani tanpa antre, sementara beberapa warga mencoba menyelipkan uang agar didahulukan.
Pernyataan manakah yang sesuai dengan ketentuan tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pelayanan tanpa antre bagi kerabat pejabat bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam pemerintahan.

☐ B. Loket prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas ikut bertentangan karena semua harus disamakan.

☐ C. Warga yang menyelipkan uang agar didahulukan melanggar kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

☐ D. Ketentuan itu hanya mengikat warga biasa, sedangkan pejabat kelurahan tunduk pada aturan kepegawaian.

☐ E. Kewajiban menjunjung hukum berlaku bagi petugas kelurahan maupun bagi warga yang sedang dilayani.

28. Sebuah unggahan yang banyak dibagikan berbunyi: "Demokrasi terlalu ribut. Lebih baik negara dipimpin satu tokoh kuat yang menjabat lama tanpa diganggu kritik, asalkan pemilu tetap diadakan rutin. Dulu pembangunan juga berjalan stabil dengan cara itu."
Tanggapan yang paling tepat berdasarkan perjalanan demokrasi Indonesia adalah ....

A. setuju, karena pembangunan ekonomi pernah berjalan stabil ketika kritik dibatasi pemerintah

B. setuju, karena pemilu yang diadakan secara rutin sudah cukup menjamin kedaulatan rakyat

C. menolak, karena demokrasi berarti negara tidak boleh dipimpin oleh tokoh yang kuat sama sekali

D. menolak, karena masa parlementer membuktikan bahwa kabinet yang sering berganti lebih baik

E. menolak, karena kekuasaan lama tanpa kritik dulu membuat kekuasaan terpusat dan KKN tumbuh

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

29. Menjelang pembacaan putusan sebuah perkara korupsi yang menjadi sorotan, ratusan orang berunjuk rasa damai di luar gedung pengadilan. Pada saat yang sama, seorang pejabat daerah menelepon ketua pengadilan dan meminta agar terdakwa, yang merupakan rekannya, dibebaskan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang penegakan hukum yang berkeadilan dalam ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Agar putusannya dianggap adil, hakim sebaiknya mengikuti tuntutan kelompok yang paling banyak berunjuk rasa.	○	○
Permintaan pejabat daerah itu bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut UUD.	○	○
Unjuk rasa damai di luar gedung termasuk penyampaian pendapat selama tidak memaksa hakim atau mengganggu sidang.	○	○

30. Pada 2027, DPRD Kota Teluk Damar membahas rancangan perda penataan kawasan pesisir yang akan memindahkan permukiman nelayan. Naskah rancangan baru diunggah di laman DPRD sehari sebelum rapat paripurna, lalu perda disahkan. Sepekan kemudian, DPRD mengadakan sosialisasi dan menyebutnya sebagai bukti telah melibatkan warga. Penilaian yang paling tepat terhadap proses tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sudah demokratis karena perda itu disahkan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu
B. belum bermakna karena warga tidak sempat didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan
C. sudah memadai karena naskah rancangan telah diumumkan secara terbuka di laman resmi DPRD
D. belum sah karena setiap perda wajib disetujui oleh seluruh warga yang akan terkena dampaknya
E. sudah melibatkan warga karena sosialisasi tetap diadakan walaupun setelah perda disahkan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 2.1 · Dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen	1, 21, 25	___ / 3	Ulangi hlm. 95
Sub bab 2.2 · Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya	12, 14, 22	___ / 3	Ulangi hlm. 107
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	3, 5, 7, 8, 9, 10, 19	___ / 7	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	13, 15, 17, 18	___ / 4	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.5 · Demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945	24, 28, 30	___ / 3	Ulangi hlm. 147
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	4, 6, 11, 26, 27	___ / 5	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	2, 16, 20, 23, 29	___ / 5	Ulangi hlm. 169

Skor 70 % atau lebih: lanjut ke bab berikutnya. Skor 50–69 %: ulangi sub bab pada tabel yang kurang dari separuh benar. Skor di bawah 50 %: baca ulang bab ini dari awal. (Angka ini anjuran belajar, bukan prediksi nilai TKA.)

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bab 3 · Bhinneka Tunggal Ika

PPKN-B3

Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan makna kebersamaan dalam keberagaman dan alasan suatu kegiatan memperkukuh persatuan
- menganalisis bagaimana kebinekaan menjadi modal sosial pembangunan
- membedakan praktik yang mencerminkan nilai dan prinsip gotong royong
- menganalisis ancaman terhadap keberagaman dan memilih strategi integrasi nasional yang tepat

Peta bab

Sub bab	Judul
3.1	Makna kebersamaan dalam keberagaman
3.2	Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan
3.3	Nilai dan prinsip gotong royong
3.4	Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional

Bab 3 di LMS

Buka seluruh latihan bab ini di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-B3

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman

PPKN-3.1

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis kebersamaan dan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika**. Dua soal asli 2025 menguji sub bab ini: **alasan sebuah kegiatan budaya memperkukuh persatuan** (44 % benar) dan **bukti Bhinneka Tunggal Ika mampu menghadapi ancaman global** (Benar/Salah, 73 % benar).

Soal sub bab ini sering terlihat mudah karena semua pilihannya bernada positif. Kesulitannya ada pada memilih alasan yang **menjawab persatuan**, bukan manfaat lain dari kegiatan itu.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan asal dan makna "berbeda-beda tetapi tetap satu" dan menerapkannya pada kasus;
- membedakan persatuan dari penyeragaman dan dari hidup terpisah-pisah;
- menentukan alasan sebuah kegiatan memperkukuh persatuan bangsa;
- membedakan toleransi pasif dan toleransi aktif.

◆ KONSEP INTI

Coba hitung teman sekelasmu. Mungkin ada yang di rumahnya berbahasa Jawa, Batak, Bugis, atau Melayu; ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu; ada yang orang tuanya berasal dari dua daerah yang berbeda. Meskipun begitu, kalian duduk di kelas yang sama, belajar dengan bahasa yang sama, dan menyebut diri "orang Indonesia". Keadaan sehari-hari inilah yang dirangkum oleh semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Sub bab ini menjelaskan dari mana semboyan itu berasal, apa maknanya, dan bagaimana kebersamaan di tengah perbedaan dapat tumbuh, bukan sekadar diucapkan.

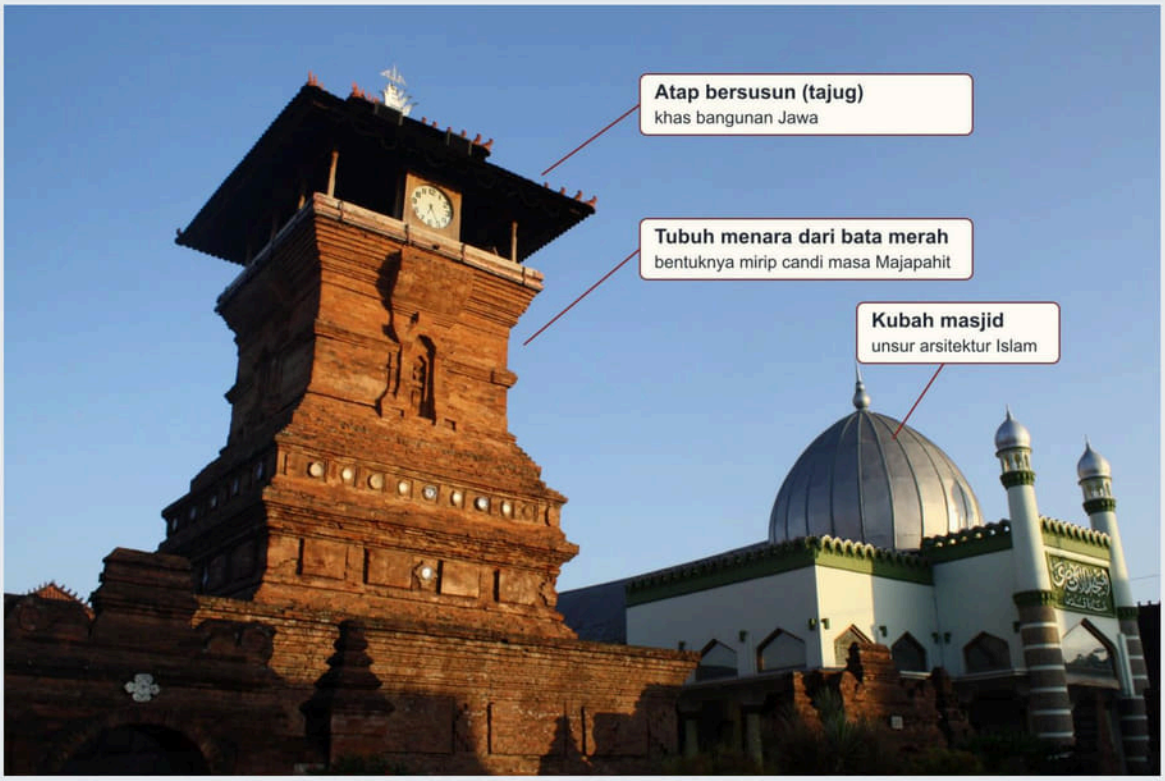
1. Asal semboyan: dari Majapahit ke lambang negara

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika jauh lebih tua daripada Republik Indonesia. Ungkapan ini berasal dari **kakawin *Sutasoma***, karya **Mpu Tantular**, seorang pujangga pada masa **Kerajaan Majapahit abad ke-14**, ketika Majapahit diperintah Raja Hayam Wuruk. *Kakawin* adalah puisi panjang berbahasa Jawa Kuno dengan aturan irama tertentu. Pada masa itu, di Majapahit hidup berdampingan pemeluk agama Siwa (Hindu) dan Buddha. Dalam salah satu baitnya, Mpu Tantular menulis *bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*. Artinya kira-kira: "berbeda-beda itu, tetapi satu jualah itu; tidak ada kebenaran yang mendua." Mpu Tantular ingin menunjukkan bahwa ajaran Siwa dan Buddha tampak berbeda, tetapi pada hakikatnya sama-sama mencari kebenaran, sehingga pemeluknya tidak perlu bermusuhan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Ratusan tahun kemudian, para pendiri bangsa mengambil ungkapan itu sebagai semboyan negara yang baru merdeka. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda dalam lambang negara, yang ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951** tentang Lambang Negara. Setelah amandemen kedua UUD tahun 2000, kedudukannya dikukuhkan dalam konstitusi. **Pasal 36A UUD NRI 1945** berbunyi: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Ketentuan rincinya kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Semangat menghargai perbedaan yang ditulis Mpu Tantular juga terlihat pada peninggalan sejarah. Salah satu contoh terbaik adalah **Menara Kudus** di Jawa Tengah (lihat Gambar 3.1). Masjid di kompleks ini didirikan pada abad ke-16, dan menurut tradisi setempat pendirinya adalah Sunan Kudus, salah seorang Wali Songo. Menaranya dibangun dari bata merah dengan bentuk yang mirip candi Jawa Timur masa Majapahit, dan atapnya bersusun seperti bangunan tradisional Jawa. Di dekatnya berdiri bangunan masjid dengan kubah yang merupakan unsur arsitektur Islam. Perpaduan unsur budaya yang berbeda sehingga melahirkan bentuk baru tanpa menghilangkan ciri asalnya disebut **akulturasi**. Masyarakat setempat tidak membuang budaya lama, tetapi juga tidak menolak ajaran baru. Keduanya dipadukan.



Gambar 3.1 Menara Kudus di Jawa Tengah: menara bata bergaya candi dengan atap bersusun khas Jawa berdiri berdampingan dengan bangunan masjid berkubah, contoh akulturasi budaya Hindu–Jawa dan Islam. Sumber: PL09Puryono, Wikimedia Commons, CC0 (label ditambahkan).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Makna semboyan: dua syarat sekaligus

Kata *bhinneka* berarti beraneka atau berbeda-beda, *tunggal* berarti satu, dan *ika* berarti itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini memuat **dua syarat yang harus hadir bersamaan**:

1. **Bhinneka**: perbedaan **diakui dan dihargai**. Suku, agama, bahasa, dan adat tidak dihapus atau dipaksa sama.
2. **Tunggal ika**: ada **kebersamaan**, yaitu rasa satu bangsa, kesediaan bekerja sama, dan kepedulian kepada sesama warga.

Bila salah satu syarat hilang, makna semboyan itu tidak terpenuhi. Perhatikan tiga keadaan berikut.

Keadaan	Keragaman diakui?	Ada kebersamaan?	Sesuai Bhinneka Tunggal Ika?
setiap kelompok hidup dan berkegiatan sendiri-sendiri	ya	tidak	belum
semua dipaksa memakai satu budaya	tidak	ya (semu)	tidak
kegiatan bersama, setiap budaya tetap tampil	ya	ya	ya

Keadaan pertama sering dikira rukun karena tidak ada pertengkaran. Namun, kelompok yang tidak pernah bertemu juga tidak pernah saling mengenal, sehingga prasangka mudah tumbuh. Keadaan kedua disebut **penyeragaman**: kebersamaan dibeli dengan menghapus perbedaan. Kebersamaan seperti itu semu, karena kelompok yang budayanya dihapus akan merasa tidak dihargai. Hanya keadaan ketiga yang memenuhi kedua syarat.

Makna ini juga menjelaskan **identitas berlapis**. Seseorang bisa sekaligus orang Minahasa, pemeluk agama tertentu, warga Kota Manado, dan orang Indonesia. Identitas daerah adalah bagian dari identitas nasional, bukan saingannya. Menjadi orang Indonesia tidak menuntut seseorang berhenti menjadi orang Minahasa.

3. Seberapa beragam Indonesia?

Keragaman Indonesia sangat besar, dan angkanya dapat diperiksa. **Sensus Penduduk 2010** yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat **1.331 kategori suku**. Angka ini mencakup nama suku, nama lain suatu suku, subsuku, dan sub-subsuku, karena sensus mencatat suku menurut pengakuan setiap penduduk. Setelah dikelompokkan ulang oleh BPS bersama lembaga penelitian ISEAS pada 2013, kategori itu menjadi **633 kelompok suku besar**. Di berbagai tulisan, termasuk ilustrasi soal TKA, sering muncul angka "lebih dari 1.300" atau "1.340 suku bangsa". Angka-angka itu berbeda karena cara menghitungnya berbeda, tetapi pesannya sama: Indonesia memiliki ratusan sampai ribuan kelompok suku.

Keragaman bahasa juga besar. **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** (Badan Bahasa) mencatat **718 bahasa daerah** dari hasil pemetaan tahun 1991–2019; sebagian besar berada di Papua dan Maluku. Di samping itu, penduduk Indonesia memeluk agama yang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

beragam dan sebagian menganut kepercayaan lokal. UUD NRI 1945 melindungi keragaman ini: **Pasal 29 ayat (2)** menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, **Pasal 32 ayat (2)** menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, dan **Pasal 18B ayat (2)** mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Keragaman sebesar ini tidak dengan sendirinya menjadi kekuatan. Ia menjadi kekuatan bila ada kebersamaan, dan dapat menjadi sumber salah paham bila setiap kelompok menutup diri. Di sinilah toleransi dan kegiatan bersama berperan.

4. Toleransi pasif dan toleransi aktif

Toleransi berarti sikap menghargai dan memberi ruang kepada orang yang berbeda pendapat, kebiasaan, atau keyakinan. Dalam praktik, toleransi dapat dibedakan menjadi dua tingkat (lihat Gambar 3.2).



Gambar 3.2 Contoh toleransi pasif dan toleransi aktif dalam kehidupan sehari-hari, beserta batas yang berlaku untuk keduanya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Toleransi pasif adalah sikap membiarkan dan tidak mengganggu. Contohnya, kamu tidak menyalakan musik keras ketika tetangga sedang beribadah, atau tidak menertawakan logat teman yang berasal dari daerah lain. Sikap ini sudah baik dan menjadi syarat minimum hidup bersama.

Toleransi aktif melangkah lebih jauh: kamu menghormati perbedaan sekaligus **ikut menciptakan suasana yang mendukung** dan menjalin kerja sama. Contohnya, pemuda sebuah kampung membantu mengatur parkir dan menjaga ketenangan ketika umat agama lain merayakan hari besarnya, atau seorang siswa belajar beberapa kata bahasa daerah temannya agar temannya merasa diterima.

Ada satu batas yang berlaku untuk kedua jenis toleransi: **tidak mencampuradukkan keyakinan**. Menghormati ibadah orang lain tidak berarti ikut menjalankan ibadahnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Membantu menjaga keamanan perayaan hari besar agama lain adalah toleransi aktif. Ikut memimpin ritual agama lain bukan toleransi, melainkan mencampuradukkan keyakinan, dan justru tidak menghormati kekhasan setiap agama.

5. Mengapa kegiatan bersama memperkukuh persatuan?

Pemerintah, sekolah, dan masyarakat sering mengadakan kegiatan yang mempertemukan orang dari latar berbeda. Mengapa kegiatan seperti itu dapat **memperkukuh persatuan**? Jawabannya ada pada apa yang terjadi di antara manusianya, bukan pada kemeriahan acaranya. Gambar 3.3 menunjukkan lima tahap yang biasanya terjadi.



Gambar 3.3 Tahap-tahap sebuah kegiatan bersama memperkukuh persatuan, serta perbedaan antara alasan persatuan dan manfaat lain. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Pertama, orang-orang yang biasanya tidak pernah bertemu berada di satu tempat dan satu kegiatan. Kedua, mereka saling mengenal: nama, cerita, kebiasaan, dan budaya masing-masing. Ketiga, karena sudah kenal, **prasangka** (anggapan buruk tentang kelompok lain yang belum tentu benar) berkurang dan perbedaan mulai dihargai. Keempat, mereka bekerja sama mencapai tujuan bersama dan merasakan bahwa mereka saling membutuhkan. Kelima, tumbuh **rasa memiliki** dan rasa senasib sebagai satu bangsa.

Jadi, alasan sebuah kegiatan memperkukuh persatuan selalu kembali ke **hubungan antarwarga**: mempertemukan, mengenalkan, menumbuhkan penghargaan, dan menumbuhkan rasa senasib. Kegiatan yang sama mungkin juga menaikkan pendapatan pedagang, mendatangkan wisatawan, atau memperkenalkan produk daerah. Manfaat itu nyata dan baik, tetapi berada di bidang lain. Manfaat itu tidak menjelaskan **mengapa persatuan** menjadi lebih kuat.

6. Kebersamaan dalam keberagaman dalam sejarah Indonesia

Peristiwa nyata menunjukkan bahwa kebersamaan dalam keberagaman bukan gagasan kosong.

Sumpah Pemuda 1928. Pada **27–28 Oktober 1928**, pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan dan keagamaan, antara lain Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Islamieten Bond, berkumpul dalam **Kongres Pemuda II** di

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Batavia (kini Jakarta). Sidang terakhirnya berlangsung di gedung Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Mereka mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan **menjunjung bahasa persatuan**, bahasa Indonesia. Perhatikan pilihan katanya: para pemuda tidak berjanji menghapus bahasa daerah. Mereka berjanji menjunjung satu bahasa persatuan sambil tetap menjadi orang Jawa, Batak, Minahasa, atau Ambon. Inilah Bhinneka Tunggal Ika dalam tindakan: perbedaan tetap ada, tetapi ada ikatan yang menyatukan.

Pela gandong di Maluku. Di Maluku hidup tradisi **pela gandong**, yaitu ikatan persaudaraan adat antara dua atau lebih *negeri* (desa adat). *Gandong* berarti saudara kandung. Negeri-negeri yang terikat pela sering berbeda agama, misalnya negeri yang penduduknya Islam dengan negeri yang penduduknya Kristen. Mereka saling membantu, misalnya ikut bergotong royong ketika negeri saudaranya membangun masjid atau gereja, dan memperbarui ikatan itu dalam upacara adat. Setelah konflik sosial di Maluku pada 1999–2002 (dibahas di sub bab 3.4), ikatan pela gandong ikut dipakai untuk memulihkan hubungan antarwarga.

Akulturasi budaya. Menara Kudus (Gambar 3.1) menunjukkan bahwa perjumpaan budaya dapat melahirkan karya baru yang indah. Contoh serupa banyak ditemukan, misalnya pada seni, kuliner, dan bahasa sehari-hari yang menyerap kata dari berbagai bahasa.

7. Bhinneka Tunggal Ika di tengah dunia

Dunia saat ini menghadapi ancaman bersama, seperti perubahan iklim, konflik antarnegara, dan **polarisasi** (masyarakat terbelah menjadi kelompok yang saling bermusuhan). Bangsa yang terbiasa mengelola perbedaan memiliki bekal untuk menghadapinya. Warga yang terbiasa bekerja sama dengan kelompok berbeda lebih mudah bergotong royong ketika bencana datang, lebih tahan terhadap hasutan yang memecah belah, dan lebih siap bekerja sama dengan bangsa lain. Hal yang perlu diingat: Bhinneka Tunggal Ika **tidak** berarti menghapus perbedaan supaya kompak. Maknanya justru menghargai perbedaan untuk bersatu.

NEXT LEVEL STUDY

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Siniar "Cerita dari Rumah"

Pada 2026, lima siswa SMA dari Ambon, Kupang, Medan, Pontianak, dan Yogyakarta bertemu dalam sebuah kelas daring. Mereka membuat siniar (*podcast*) "Cerita dari Rumah". Setiap pekan, satu siswa menceritakan cerita rakyat daerahnya dalam bahasa Indonesia, lalu teman-temannya bertanya dan membandingkannya dengan cerita di daerah mereka sendiri. Setelah tiga bulan, mereka mulai saling menyapa dengan beberapa kata bahasa daerah teman dan merencanakan kunjungan bersama. Guru mereka mencatat beberapa dampak: (a) jumlah pendengar siniar mencapai ribuan; (b) cerita rakyat yang hampir terlupakan terdokumentasi; (c) kelima siswa saling mengenal budaya temannya, prasangka berkurang, dan mereka merasa sebagai "satu tim". Dampak manakah yang menjadi **alasan** kegiatan itu memperkukuh persatuan? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Tentukan **yang ditanyakan**: alasan kegiatan **memperkukuh persatuan**, bukan manfaat kegiatan secara umum.
2. Ingat ukuran persatuan: ada perjumpaan, saling kenal, saling menghargai, kerja sama, dan rasa memiliki (Gambar 3.3).
3. Nilai dampak (a): jumlah pendengar menunjukkan kegiatan itu **populer**. Itu manfaat di bidang lain dan tidak menunjukkan hubungan antarwarga yang menguat.
4. Nilai dampak (b): dokumentasi cerita rakyat adalah manfaat **pelestarian budaya**. Penting, tetapi belum menjelaskan persatuan.
5. Nilai dampak (c): siswa dari daerah berbeda saling mengenal, prasangka berkurang, dan tumbuh rasa satu tim. Ini tepat tahap 2, 3, dan 5 pada Gambar 3.3. Kedua syarat Bhinneka Tunggal Ika juga terpenuhi: setiap budaya tetap tampil (bhinneka), dan ada kebersamaan (tunggal ika).

Jawaban: dampak (c), karena persatuan diperkukuh oleh hubungan antarwarga yang saling mengenal dan menghargai; dampak (a) dan (b) adalah manfaat di bidang lain.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

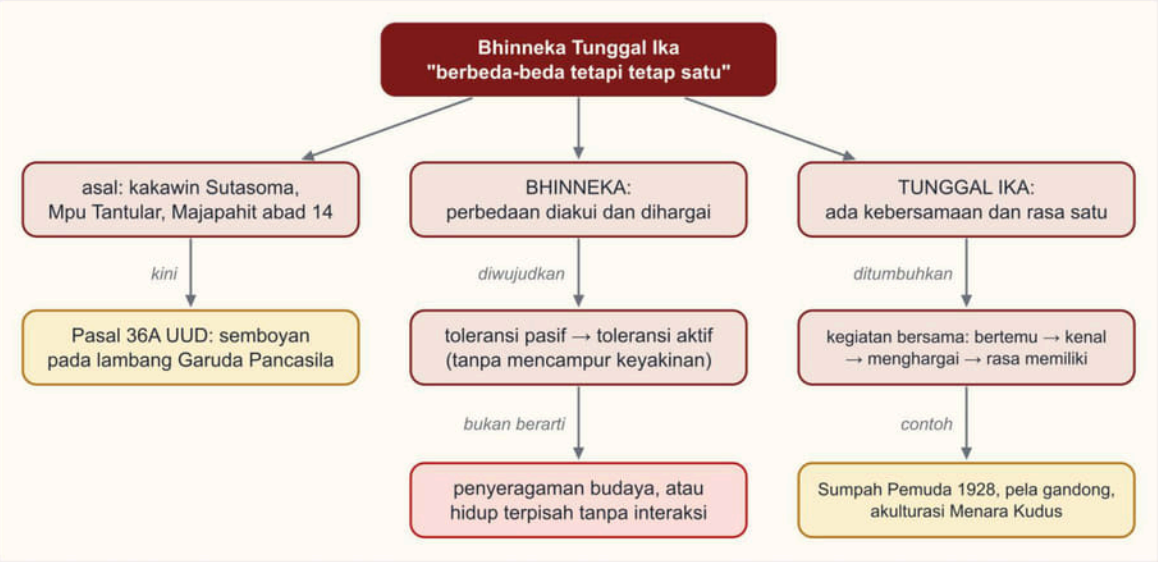
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kakawin *Sutasoma* karya Mpu Tantular (Majapahit, abad ke-14) dan kini tercantum dalam Pasal 36A UUD NRI 1945.
- Dua syarat harus hadir sekaligus: perbedaan **diakui** dan ada **kebersamaan**. Penyeragaman dan hidup terpisah-pisah sama-sama belum sesuai.
- Toleransi pasif = membiarkan dan tidak mengganggu; toleransi aktif = menghormati sambil ikut mendukung dan bekerja sama. Keduanya tidak mencampuradukkan keyakinan.
- Kegiatan bersama memperkukuh persatuan karena mempertemukan, mengenalkan, menumbuhkan penghargaan, dan rasa memiliki; manfaat ekonomi atau wisata adalah manfaat lain.
- Contoh nyata: Sumpah Pemuda 1928, pela gandong di Maluku, dan akulturasi Menara Kudus.

Bagan pada Gambar 3.4 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 3.4 Peta konsep makna kebersamaan dalam keberagaman. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Uji dua syarat**: apakah keragaman diakui, dan apakah ada kebersamaan?
2. **Untuk soal "alasan memperkukuh persatuan"**, coret pilihan yang menjelaskan manfaat di bidang lain (ekonomi, wisata, popularitas, pelestarian saja).
3. **Untuk soal Benar/Salah**, tandai pernyataan yang memaknai persatuan sebagai **menghapus perbedaan**.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Manfaat lain dikira alasan persatuan.** Benar sebagai manfaat, tetapi tidak menjelaskan hubungan antarwarga.
- **Persatuan disamakan dengan keseragaman.** Semboyan yang dimaknai "menghilangkan perbedaan".
- **Hidup terpisah dianggap rukun.** Tidak bertengkar belum berarti bersatu.
- **Toleransi dianggap mencampur ibadah.**

> Contoh salah tafsir: sebuah sekolah menggelar pekan kuliner nusantara. Seorang siswa menulis bahwa kegiatan itu memperkukuh persatuan "karena omzet kantin meningkat". Pernyataan itu mungkin benar, tetapi tidak menjawab hubungannya dengan persatuan, yaitu siswa dari berbagai daerah saling mengenal dan menghargai budaya temannya.

● BEDAH SOAL ASLI

Dua soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Keduanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 13 (Festival Budaya Nusantara, PG, 44 % benar). Ilustrasi menggambarkan festival yang melibatkan komunitas dari seluruh provinsi. Kamu diminta menentukan **alasan** kegiatan itu memperkukuh persatuan.

- Konsep kunci: alasan persatuan kembali ke hubungan antarwarga (bagian 5).
- Langkah: untuk setiap pilihan, tanyakan "apakah ini menjelaskan **persatuan**, atau manfaat lain?".
- Pengecoh yang dipasang: beberapa pilihan menyebut manfaat yang benar-benar mungkin terjadi, tetapi berada di bidang lain.

Rujukan: soal nomor 13 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 15 (Bhinneka Tunggal Ika dan ancaman global, Benar/Salah, 73 % benar). Kamu menilai tiga pernyataan tentang bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika dapat mengatasi ancaman dalam kehidupan global.

- Konsep kunci: Bhinneka Tunggal Ika menghargai perbedaan, tidak menghapusnya (bagian 2 dan 7).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Langkah: baca setiap pernyataan sampai habis; satu anak kalimat dapat mengubah makna seluruh pernyataan.
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang dibuka dengan kalimat benar, lalu diakhiri dengan makna yang keliru tentang perbedaan.

Rujukan: soal nomor 15 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pilih alasan yang menunjukkan hubungan antarwarga (bertemu, saling kenal, rasa memiliki); coret manfaat di bidang lain dan penyeragaman.

►. Warga Perumahan Bukit Damar berasal dari berbagai suku dan agama, dan dulu setiap blok meronda sendiri. Pada 2026, warga sepakat membentuk regu ronda campuran lintas blok. Sambil berjaga, anggota regu bercerita tentang kampung halaman masing-masing, dan kini mereka saling berkunjung saat hari raya.
Alasan cara meronda yang baru itu dapat memperkukuh persatuan warga adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. angka pencurian di perumahan menurun karena jumlah warga yang berjaga setiap malam makin bertambah
B. warga yang dulu jarang bertemu menjadi saling mengenal, prasangka berkurang, dan tumbuh rasa memiliki
C. setiap blok tetap dapat menjaga wilayahnya sendiri tanpa harus bergantung pada warga dari blok lain
D. iuran keamanan menjadi lebih ringan karena perumahan tidak perlu lagi membayar petugas keamanan
E. perbedaan suku dan agama tidak lagi terlihat karena semua anggota regu memakai seragam ronda yang sama persis

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: B**

Konsep: sebuah kegiatan **memperkukuh persatuan** karena apa yang terjadi di antara warganya: orang yang jarang bertemu berjumpa, saling mengenal, prasangka berkurang, bekerja sama, lalu tumbuh **rasa memiliki**. Manfaat lain (keamanan, penghematan) nyata, tetapi tidak menjelaskan persatuan. Kebersamaan juga tidak boleh dicapai dengan menghapus perbedaan.

Langkah 1 – Tentukan yang ditanyakan. Yang ditanya adalah **alasan memperkukuh persatuan**, bukan manfaat ronda secara umum.

Langkah 2 – Cari bukti hubungan antarwarga di ilustrasi. Regu campuran lintas blok → bercerita tentang kampung halaman → saling berkunjung saat hari raya. Itu tahap perjumpaan, saling kenal, dan rasa memiliki.

Langkah 3 – Analisis opsi:

- A ✗ — manfaat di bidang keamanan; tidak menunjukkan hubungan antarwarga yang menguat.
- B ✓ — perjumpaan, saling kenal, prasangka berkurang, dan rasa memiliki adalah inti persatuan.
- C ✗ — justru gambaran cara lama: setiap blok hidup sendiri-sendiri, tanpa kebersamaan.
- D ✗ — manfaat ekonomi; lagi pula ilustrasi tidak menyebut petugas keamanan berbayar.
- E ✗ — penyeragaman: kebersamaan seolah-olah diperoleh dengan menyembunyikan perbedaan.

Cek ulang: hanya B yang sekaligus mengakui keragaman warga dan menunjukkan kebersamaan.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan D benar sebagai manfaat, tetapi tidak menjawab "persatuan". E terdengar kompak, padahal Bhinneka Tunggal Ika tidak menuntut perbedaan dihilangkan.

✎ LATIHAN

1. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta berdiri berseberangan dan dihubungkan oleh Terowongan Silaturahim. Saat berkunjung ke Istiqlal pada 5 September 2024, Paus Fransiskus menyebut tujuan terowongan itu sebagai tempat dialog dan perjumpaan. Pada Misa Natal 2024, umat yang memarkir kendaraan di Istiqlal berjalan ke Katedral melalui terowongan tersebut.

Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna peristiwa tersebut!

Sumber: NU Online (5/9/2024); Metrotvnews.com (24/12/2024).

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kesediaan Istiqlal menyediakan tempat parkir bagi umat yang merayakan Natal merupakan wujud toleransi aktif.	○	○
Agar toleransi terwujud, umat kedua rumah ibadah itu perlu ikut menjalankan ibadah agama yang lain.	○	○
Terowongan penghubung itu menunjukkan bahwa perbedaan agama perlu dihapus agar warga dapat bersatu.	○	○

2. Sekolah-sekolah menanggapi keragaman agama siswanya dengan cara berbeda. Sebagian sekolah meniadakan semua peringatan hari besar keagamaan agar dianggap netral. Sebagian lain memperingati hari besar setiap agama secara bergiliran dengan panitia

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

siswa lintas agama, sementara ibadahnya tetap dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Penilaian yang paling tepat terhadap kedua cara tersebut berdasarkan makna Bhinneka Tunggal Ika adalah ....

A. cara pertama lebih tepat karena sekolah yang netral tidak akan pernah mengalami pertengkaran antarsiswa
B. kedua cara sama baiknya karena keduanya sama-sama mencegah perselisihan akibat perbedaan agama siswa
C. cara kedua lebih tepat karena setiap siswa diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah agama lain
D. cara kedua lebih tepat karena keragaman tetap diakui dan siswa yang berbeda agama bekerja bersama
E. cara pertama lebih tepat karena urusan agama sebaiknya tidak dibawa sama sekali ke lingkungan sekolah

Kunci singkat: 1. 1B 2S 3S 2. D

✔ PERIKSA DIRI

- Mengapa "semua warga memakai satu adat agar kompak" tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika?
- Berikan satu contoh toleransi pasif dan satu contoh toleransi aktif di sekolahmu.
- **Yang harus kuingat:** dua syarat sekaligus — keragaman diakui dan ada kebersamaan; alasan persatuan selalu tentang hubungan antarwarga.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 3.1: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-3.1

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan

PPKN-3.2

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis kebinekaan sebagai modal sosial**. Inilah sub bab tersulit di seluruh TKA PPKn 2025. Tiga soal asli mengujinya, dan ketiganya berada di antara soal yang paling sedikit dijawab benar:

- cara menjaga kebinekaan agar menjadi modal sosial pembangunan nasional (MCMA, **19 %** benar — tersulit kedua dari 29 soal);
- sikap positif yang dapat menjadi modal sosial (MCMA, 28 % benar);
- latar belakang sebuah tradisi daerah menjadi modal sosial pembangunan (PG, 35 % benar).

Dua di antaranya berbentuk **pilih lebih dari satu (MCMA)**. Karena itu, sub bab ini juga melatih cara menilai setiap pernyataan satu per satu.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan unsur modal sosial dan mengenalinya dalam kasus;
- membedakan modal sosial dari modal ekonomi, modal fisik, dan manfaat promosi;
- menjelaskan syarat yang membuat kebinekaan menjadi modal sosial, bukan beban;
- menilai sikap dan upaya yang menjadikan kebinekaan modal sosial pembangunan, satu pernyataan demi satu pernyataan.

◆ KONSEP INTI

Bayangkan dua desa yang sama-sama mendapat dana untuk membangun saluran air. Di desa pertama, warga saling percaya, terbiasa bermusyawarah, dan mau bergiliran bekerja. Saluran selesai cepat dan dirawat bersama. Di desa kedua, warga saling curiga, setiap kelompok hanya mau bekerja di dekat rumahnya sendiri, dan rapat selalu berakhir dengan pertengkaran. Dananya sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Yang membedakan kedua desa itu bukan uang, bukan alat, dan bukan kepintaran warganya, melainkan **hubungan antarwarganya**. Hubungan yang membuat orang mudah bekerja sama itulah yang disebut **modal sosial**. Sub bab ini menjelaskan apa itu modal sosial dan mengapa keragaman Indonesia dapat menjadi modal sosial yang besar, asalkan dikelola.

1. Apa itu modal sosial?

Kata *modal* biasanya dipakai untuk uang usaha. Dalam ilmu sosial, kata itu dipakai lebih luas untuk segala sesuatu yang membantu orang mencapai tujuan. Ada **modal ekonomi** (uang, tabungan), **modal fisik** (jalan, gedung, mesin), **modal manusia** (pengetahuan dan keterampilan seseorang), dan **modal sosial**. Gagasan modal sosial dipopulerkan para

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

ilmuwan sosial pada akhir abad ke-20, antara lain ilmuwan politik Amerika Robert Putnam, yang meneliti mengapa sebagian daerah lebih berhasil membangun daripada daerah lain.

Modal sosial adalah **kepercayaan**, **jaringan hubungan**, dan **norma timbal balik** yang memudahkan orang-orang bekerja sama (lihat Gambar 3.5).



Gambar 3.5 Tiga unsur modal sosial, contohnya, dan hasilnya berupa kerja sama yang lebih mudah, serta hal-hal yang bukan modal sosial. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

1. **Kepercayaan** adalah keyakinan bahwa orang lain akan berlaku jujur dan menepati janji. Warga yang saling percaya mau meminjamkan alat tanpa jaminan, menitipkan anaknya kepada tetangga, atau menyerahkan uang iuran kepada bendahara tanpa curiga.
2. **Jaringan** adalah hubungan yang menghubungkan banyak orang dan kelompok. Semakin luas jaringan seseorang, semakin mudah ia mendapat informasi dan bantuan. Jaringan yang menghubungkan kelompok yang **berbeda**, misalnya forum warga lintas suku, sangat berharga karena menyatukan sumber daya yang sebelumnya terpisah.
3. **Norma timbal balik** adalah kebiasaan bersama yang ditaati tanpa paksaan, misalnya "hari ini aku dibantu, besok aku membantu", atau jadwal giliran yang dipatuhi semua orang walaupun tidak ada yang mengawasi.

Ketiga unsur itu menghasilkan satu hal: **kerja sama yang lebih mudah dan murah**. Warga yang saling percaya tidak perlu banyak perjanjian tertulis, pengawas, atau sanksi untuk bekerja bersama. Karena itu, modal sosial tidak berupa uang atau bangunan, tetapi membuat uang dan bangunan dapat dipakai bersama secara efektif.

Dari pengertian ini kamu dapat membedakan modal sosial dari hal-hal lain yang juga bermanfaat. Kenaikan harga hasil panen, bantuan dana, dan gedung baru adalah modal ekonomi atau fisik. Promosi wisata dan pengakuan internasional adalah manfaat citra. Jumlah penduduk yang besar baru merupakan **potensi**; ia menjadi modal sosial hanya bila penduduk itu saling percaya dan bekerja sama.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Modal sosial dalam tradisi: subak di Bali

Bangsa Indonesia mewarisi banyak tradisi yang sebenarnya adalah modal sosial yang terpelihara selama berabad-abad. Salah satu contoh paling terkenal adalah **subak** di Bali (lihat Gambar 3.6).



Gambar 3.6 Sawah berundak di Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, salah satu kawasan subak yang menjadi bagian Warisan Dunia UNESCO "Lanskap Budaya Provinsi Bali" (2012). Sumber: Globe-trotter, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (dipotong; label ditambahkan).

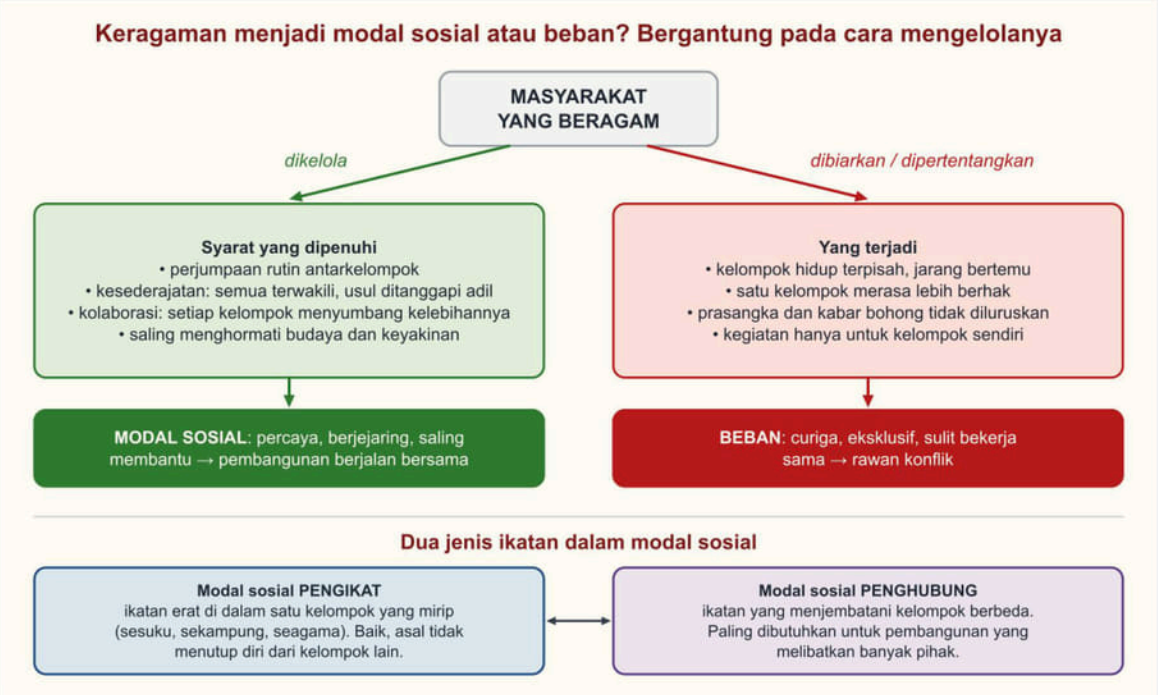
Subak adalah organisasi petani yang bersama-sama mengelola air irigasi untuk sawah mereka. Sistem ini, menurut UNESCO, sudah ada sejak sekitar abad ke-9. Air dari mata air, danau, dan sungai dialirkan melalui saluran dan bendung, lalu dibagi ke petak-petak sawah anggota. Masalahnya, air terbatas dan sawah bertingkat-tingkat: petani di hulu bisa saja mengambil air sebanyak-banyaknya. Subak mengatasinya dengan musyawarah. Anggota menyepakati jadwal pembagian air dan waktu tanam, memilih pemimpinnya sendiri, dan mematuhi aturan yang mereka buat. Kegiatan subak juga berpusat pada pura air, karena subak berpegang pada filosofi **Tri Hita Karana**, yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam.

Ketiga unsur modal sosial tampak jelas dalam subak: **kepercayaan** bahwa petani lain tidak mencuri jatah air, **jaringan** antarpetani dan antarsubak, dan **norma** giliran air yang ditaati tanpa perlu diawasi polisi. Pada **2012**, UNESCO menetapkan "Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Perwujudan Filosofi Tri Hita Karana" sebagai **Warisan Dunia**. UNESCO menyebut subak sebagai praktik pertanian yang demokratis dan setara. Perhatikan bahwa yang membuat subak berharga bukan pengakuan UNESCO itu sendiri. Pengakuan datang **karena** modal sosialnya sudah lama hidup.

3. Keragaman: modal atau beban?

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Indonesia memiliki ratusan kelompok suku dan ratusan bahasa daerah (sub bab 3.1). Apakah keragaman sebesar itu otomatis menjadi modal sosial? **Tidak.** Keragaman menjadi modal sosial bila **dikelola**, dan dapat menjadi beban bila dibiarkan atau dipertentangkan (lihat Gambar 3.7).



Gambar 3.7 Syarat yang membuat keragaman menjadi modal sosial, keadaan yang membuatnya menjadi beban, serta dua jenis ikatan dalam modal sosial. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Keragaman menjadi modal sosial bila empat syarat terpenuhi.

- **Perjumpaan rutin.** Kelompok yang berbeda sering bertemu dalam kegiatan bersama, sehingga saling mengenal.
- **Kesederajatan.** Setiap kelompok diperlakukan setara: terwakili dalam kepengurusan, didengar usulnya, dan mendapat manfaat yang adil. Tidak ada kelompok yang merasa "tamu" di rumahnya sendiri.
- **Kolaborasi yang saling melengkapi.** Setiap kelompok menyumbangkan kelebihannya. Kelompok yang pandai berdagang, yang mahir bertani, dan yang menguasai kerajinan saling melengkapi, sehingga hasilnya lebih besar daripada bila masing-masing bekerja sendiri.
- **Saling menghormati** budaya dan keyakinan masing-masing.

Sebaliknya, keragaman menjadi beban bila kelompok hidup terpisah dan jarang bertemu, satu kelompok merasa lebih berhak daripada yang lain, prasangka dan kabar bohong dibiarkan tanpa diluruskan, dan setiap kegiatan hanya untuk kelompok sendiri. Dalam keadaan itu, warga mudah curiga, bersikap **eksklusif** (menutup diri dari kelompok lain), dan sulit diajak bekerja sama. Dua kampung dengan susunan penduduk yang sama persis dapat berakhir berbeda karena cara mengelolanya berbeda.

4. Modal sosial pengikat dan penghubung

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Para ahli membedakan dua jenis ikatan dalam modal sosial (bagian bawah Gambar 3.7). **Modal sosial pengikat** adalah ikatan erat di dalam kelompok yang mirip, misalnya sesama suku, sesama kampung asal, atau sesama anggota satu perkumpulan. Ikatan ini memberi rasa aman dan saling tolong. Contohnya, paguyuban perantau dari satu daerah yang saling membantu ketika anggotanya sakit.

Modal sosial penghubung adalah ikatan yang menjembatani kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya, forum pengurus paguyuban dari berbagai daerah di sebuah kota yang bersama-sama mengatur keamanan lingkungan. Pembangunan sebuah kota, kabupaten, atau negara melibatkan banyak kelompok, sehingga modal sosial penghubung paling dibutuhkan. Keduanya baik dan saling melengkapi. Masalah muncul hanya bila ikatan pengikat begitu kuat sehingga kelompok **menutup diri** dan memandang kelompok lain sebagai saingan.

5. Sikap positif sebagai modal sosial

Modal sosial tumbuh dari sikap orang per orang. **Sikap positif** dalam keberagaman adalah sikap yang **membuka diri** kepada kelompok lain dan **memperkuat hubungan** dengannya. Wujudnya antara lain mau berkenalan dengan orang dari latar berbeda, mempelajari budaya teman, mengajak teman dari kelompok lain dalam kegiatan, menepati janji kepada siapa pun, dan memperlakukan semua orang setara.

Untuk menilai sebuah sikap, periksa dua hal. Pertama, **arahnya**: apakah sikap itu memperluas hubungan ke kelompok lain, atau hanya menguatkan hubungan di dalam kelompok sendiri? Kedua, **tujuannya**: sikap yang tampak sopan belum tentu memperkuat hubungan bila tujuannya lain, misalnya hanya ingin terlihat baik di depan juri atau mencari keuntungan pribadi. Seorang mahasiswa rantau yang mengajak teman kos dari daerah lain memasak bersama dan saling mengajarkan resep daerah sedang membangun modal sosial penghubung. Mahasiswa yang hanya bergaul dengan teman sedaerahnya tidak berbuat salah, tetapi belum menambah modal sosial penghubung.

6. Tradisi daerah sebagai modal sosial

Mengapa sebuah tradisi daerah, misalnya tarian, upacara adat, atau sistem kerja bersama, sering disebut modal sosial pembangunan? Alasannya bukan karena tradisi itu menarik wisatawan atau mendapat pengakuan dunia. Sebuah tradisi menjadi modal sosial karena ia **mempererat warga**: menjadi **identitas bersama** yang menumbuhkan rasa memiliki, mempertemukan warga dalam persiapan dan pelaksanaannya, dan mewariskan norma kerja sama dari generasi ke generasi. Ketika warga bangga pada tradisi yang sama dan bekerja bersama merawatnya, kepercayaan dan jaringan di antara mereka ikut menguat.

Manfaat ekonomi tradisi itu, seperti kunjungan wisatawan atau penjualan cendera mata, adalah akibat lanjutan. Manfaat itu nyata, tetapi berbeda dari peran sosialnya.

7. Peristiwa nyata: membangun kembali bersama-sama

Gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada **27 Mei 2006** merusak ratusan ribu rumah. Dalam pembangunan kembali, pemerintah bersama lembaga donor menjalankan program **Rekompak** (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Masyarakat). Menurut catatan Bank Dunia, warga diperlakukan sebagai mitra setara: mereka membentuk kelompok yang masing-masing terdiri atas sekitar sepuluh keluarga, mengelola dana bantuan sendiri, dan membangun rumah mereka dengan pendampingan tenaga teknis serta fasilitator. Bank Dunia menggambarkannya dengan kalimat sederhana: masyarakat menjadi "kontraktor" rumah yang mereka bangun.

Program semacam ini hanya dapat berjalan bila ada modal sosial. Sepuluh keluarga yang mengelola dana bersama harus **saling percaya**. Mereka perlu **jaringan** dengan tukang, pemasok bahan, dan pendamping. Mereka juga perlu **norma** bergiliran membantu membangun rumah anggota lain. Pengalaman ini menunjukkan bahwa modal sosial bukan sekadar teori, melainkan sumber daya nyata dalam pembangunan, terutama ketika bencana datang.

8. Menilai pernyataan satu per satu

Soal tentang modal sosial sering berisi beberapa pernyataan yang semuanya terdengar baik. Cara berpikir yang paling aman adalah menilai **setiap** pernyataan dengan ukuran yang sama, bukan menebak jumlah jawaban. Untuk setiap pernyataan, tanyakan:

1. Apakah pernyataan ini **menjawab yang ditanyakan**? Bila yang ditanyakan adalah *upaya menjaga* kebinekaan, pernyataan tentang *hasil akhir* pembangunan belum tentu menjawab.
2. Apakah pernyataan ini menyentuh **hubungan antarkelompok**, yaitu kepercayaan, jaringan, atau norma timbal balik?
3. Apakah **seluruh kalimatnya** benar, termasuk anak kalimat dan tujuan yang disebut di akhir?

Contoh terselesaikan 2 di bawah memperlihatkan cara berpikir ini.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Kampung nelayan Teluk Sari

Kampung Teluk Sari (fiktif) dihuni nelayan keturunan Bugis, Bajo, Buton, dan Jawa. Pada 2026, kepala kampung mencatat enam hal: (1) harga ikan di pelelangan naik 15 %; (2) nelayan dari keempat kelompok berbagi kabar cuaca lewat radio dan grup pesan bersama sebelum melaut; (3) kampung menerima bantuan dua perahu baru dari pemerintah; (4) nelayan yang perahunya rusak dipinjami perahu oleh nelayan dari kelompok lain tanpa jaminan; (5) kampung itu diliput televisi sebagai tujuan wisata bahari; (6) aturan zona tangkap dan musim larangan menangkap kepiting bertelur disepakati bersama dan dipatuhi semua kelompok. Hal manakah yang menunjukkan kebinekaan warga berfungsi sebagai **modal sosial**? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

1. Tentukan ukurannya: modal sosial = kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik **antarkelompok** yang memudahkan kerja sama (Gambar 3.5).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Hal (1) adalah kenaikan harga, yaitu **modal ekonomi**. Hal itu tidak menunjukkan hubungan antarwarga.
3. Hal (2) menunjukkan **jaringan** yang menghubungkan keempat kelompok. Ini modal sosial penghubung.
4. Hal (3) adalah bantuan barang, yaitu **modal fisik**.
5. Hal (4) menunjukkan **kepercayaan** lintas kelompok: meminjamkan perahu tanpa jaminan.
6. Hal (5) adalah **manfaat citra** dan wisata.
7. Hal (6) menunjukkan **norma** yang disepakati dan ditaati bersama tanpa paksaan, seperti norma giliran air dalam subak.

Jawaban: hal (2), (4), dan (6) menunjukkan modal sosial; hal (1), (3), dan (5) bermanfaat, tetapi merupakan modal ekonomi, modal fisik, dan manfaat citra.

Contoh 2 — Lima usulan untuk tim relawan siaga bencana

Pada 2026, Kecamatan Sukarasa (fiktif) membentuk tim relawan siaga bencana. Anggotanya berasal dari berbagai suku dan agama. Camat meminta usulan agar keragaman anggota menjadi **modal sosial** yang memperkuat tim. Lima usulan masuk:

- (A) Membagi anggota ke dalam regu campuran lintas suku dan agama yang berlatih bersama setiap bulan.
- (B) Memilih koordinator regu secara bergiliran dari berbagai kelompok, dan setiap usulan anggota dibahas dalam rapat terbuka.
- (C) Membeli perahu karet dan tenda baru agar tim lebih siap ketika banjir datang.
- (D) Menyusun regu menurut suku masing-masing agar anggota lebih kompak karena bahasanya sama.
- (E) Mengadakan kunjungan bergiliran ke rumah ibadah dan kampung adat setiap kelompok, sehingga anggota mengenal kebiasaan setempat sebelum bertugas di sana.

Usulan manakah yang tepat? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

1. Tetapkan yang ditanyakan: **upaya** menjadikan keragaman anggota **modal sosial**. Ukurannya: apakah usulan itu menumbuhkan kepercayaan, jaringan, atau norma **antarkelompok**?
2. Usulan (A): regu campuran yang berlatih bersama menciptakan **perjumpaan rutin** dan membangun jaringan penghubung. Tepat.
3. Usulan (B): giliran memimpin dan rapat terbuka mewujudkan **kesederajatan**; setiap kelompok merasa dihargai, sehingga kepercayaan tumbuh. Tepat.
4. Usulan (C): perahu dan tenda adalah **modal fisik**. Berguna bagi tim, tetapi tidak menjawab bagaimana keragaman anggota menjadi modal sosial. Tidak tepat.
5. Usulan (D): regu menurut suku hanya menguatkan **modal sosial pengikat** dan memisahkan kelompok. Alasannya terdengar masuk akal ("lebih kompak"), tetapi arahnya justru menutup diri. Tidak tepat.
6. Usulan (E): saling mengunjungi dan mempelajari kebiasaan setiap kelompok menumbuhkan saling kenal dan saling menghormati, sekaligus memperluas jaringan. Tepat.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

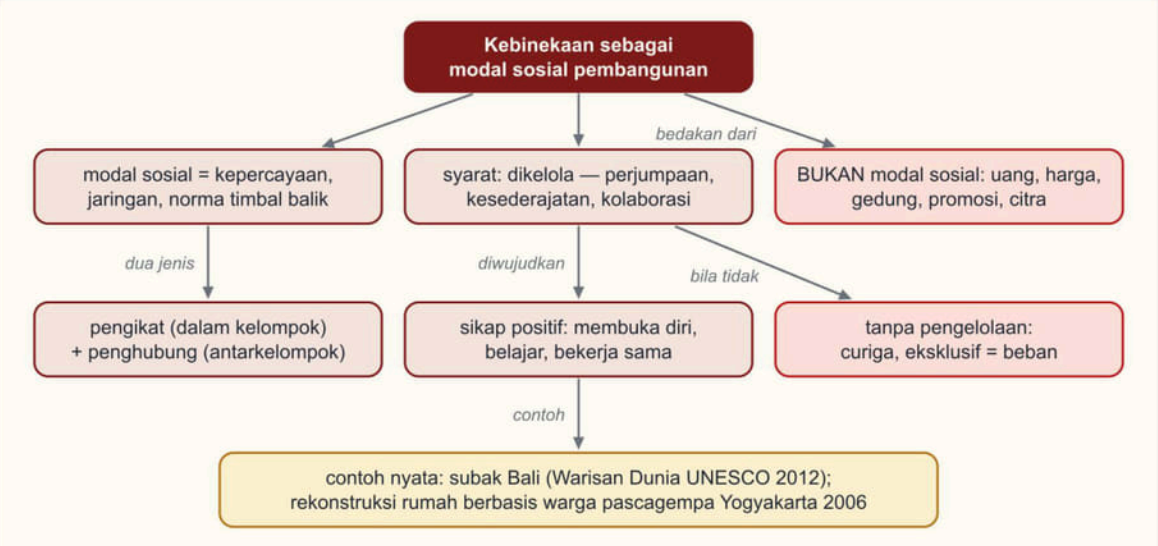
Jawaban: usulan (A), (B), dan (E). Usulan (C) adalah modal fisik, dan usulan (D) memisahkan kelompok.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Modal sosial = **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma timbal balik** yang memudahkan kerja sama. Ia berbeda dari modal ekonomi (uang, harga), modal fisik (gedung, alat), dan manfaat citra (promosi, pengakuan).
- Keragaman **tidak otomatis** menjadi modal sosial. Syaratnya: perjumpaan rutin, kesederajatan, kolaborasi yang saling melengkapi, dan saling menghormati. Tanpa itu, keragaman menjadi beban.
- Modal sosial **pengikat** mengeratkan kelompok sendiri; modal sosial **penghubung** menjembatani kelompok berbeda dan paling dibutuhkan untuk pembangunan.
- Sikap positif = membuka diri dan memperkuat hubungan dengan kelompok lain; periksa juga tujuannya.
- Tradisi daerah menjadi modal sosial karena mempererat warga sebagai identitas bersama; manfaat ekonominya adalah akibat lanjutan.
- Contoh nyata: subak Bali (Warisan Dunia UNESCO 2012) dan rekonstruksi rumah berbasis warga setelah gempa Yogyakarta 2006.

Bagan pada Gambar 3.8 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 3.8 Peta konsep kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Soal MCMA sub bab ini sulit karena **hampir semua pilihan terdengar baik**. Pakai tiga pertanyaan yang sama untuk **setiap** pilihan:

1. **Apakah sesuai dengan yang ditanyakan?** Bila ditanya *cara menjaga kebinekaan*, pilihan tentang hasil akhir pembangunan belum tentu menjawab.
2. **Apakah menyentuh hubungan antarkelompok?** Modal sosial selalu tentang hubungan: interaksi, pertukaran, kerja sama.
3. **Apakah seluruh kalimatnya benar?** Pilihan panjang sering benar di awal, lalu menambahkan hal yang keliru di akhir.

Tulis ✓ atau ✗ di samping setiap pilihan sebelum memilih. Jangan menebak jumlah jawabannya.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Manfaat ekonomi atau citra dikira modal sosial.**
- **Kalimat umum tentang pembangunan.** Benar dan mulia, tetapi tidak menyebut hubungan antarkelompok yang menjadi inti modal sosial.
- **Sikap yang tampak sopan dengan tujuan yang keliru.** Baca tujuan di akhir kalimat sebelum menilai sikapnya.
- **Rukun hanya dengan kelompok sendiri.**
- **Keragaman disalahkan.** "Terlalu beragam sehingga sulit bekerja sama."

> Contoh salah tafsir: pada soal tentang festival kuliner perantau, seorang siswa memilih "kegiatan itu meningkatkan pendapatan pedagang" sebagai alasan kegiatan itu menjadi modal sosial. Pendapatan adalah modal ekonomi. Modal sosialnya adalah kepercayaan dan jaringan antarkelompok perantau yang tumbuh dari kegiatan itu.

• BEDAH SOAL ASLI

Tiga soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Ketiganya ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana.

Nomor 26 (cara menjaga kebinekaan sebagai modal sosial, MCMA, 19 % benar). Ilustrasi menjelaskan kerja sama dan toleransi sebagai konsep penting menjaga kebinekaan. Kamu diminta memilih **semua** pernyataan yang menunjukkan **upaya menjaga kebinekaan** agar menjadi modal sosial.

- Konsep kunci: modal sosial tumbuh dari hubungan, pertukaran, dan kerja sama antarkelompok (bagian 1 dan 3).
- Langkah: terapkan tiga pertanyaan MCMA pada setiap pilihan. Pilihan-pilihannya panjang; bacalah sampai titik.
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang benar dan mulia tentang pembangunan, tetapi tidak menjawab bagaimana kebinekaan dijaga.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Rujukan: soal nomor 26 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 28 (sikap positif dalam festival pelajar, MCMA, 28 % benar). Kamu diminta memilih **semua** sikap positif yang dapat menjadi modal sosial pembangunan.

- Konsep kunci: sikap yang membuka diri kepada kelompok lain (bagian 5).
- Langkah: tanyakan pada setiap pilihan, "apakah sikap ini memperkuat hubungan dan penghargaan antarbudaya?". Periksa juga tujuan yang disebut di akhir kalimat.
- Pengecoh yang dipasang: sikap yang tampak baik, tetapi belum tentu memperkuat hubungan antarkelompok.

Rujukan: soal nomor 28 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 29 (Reog Ponorogo, PG, 35 % benar). Ilustrasi menyebut Reog sebagai identitas budaya yang diakui UNESCO dan menjadi modal sosial pembangunan. Kamu diminta menentukan **latar belakangnya**.

- Konsep kunci: tradisi menjadi modal sosial karena perannya sebagai identitas bersama (bagian 6).
- Langkah: bedakan pilihan yang menjelaskan **peran sosial** tradisi itu dari pilihan yang menjelaskan manfaat lain.
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang menggoda karena memakai informasi yang memang ada di ilustrasi.

Rujukan: soal nomor 29 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pilah setiap keadaan: ekonomi, fisik, citra, atau hubungan antarkelompok; modal sosial selalu tentang hubungan.

►. Pengemudi ojek di Pangkalan Sukaraja berasal dari berbagai suku dan dulu sering bertengkar soal giliran penumpang. Pada 2026, mereka membentuk paguyuban. Setahun kemudian, pendapatan pengemudi naik, pangkalan mendapat bantuan jas hujan, antrean yang disepakati dipatuhi tanpa pengawas, dan pangkalan itu diliput televisi lokal. Bukti bahwa kebinekaan para pengemudi telah menjadi modal sosial adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pendapatan para pengemudi naik setelah paguyuban lintas suku itu terbentuk
B. pangkalan itu menerima bantuan jas hujan dari pemerintah kota setempat
C. pangkalan itu diliput televisi lokal sebagai contoh pangkalan ojek yang tertib
D. aturan antrean yang disepakati bersama dipatuhi walaupun tidak ada pengawas
E. jumlah pengemudi yang bergabung dengan paguyuban itu terus bertambah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: D**

Konsep: modal sosial adalah **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma timbal balik** yang memudahkan kerja sama. Modal sosial berbeda dari modal ekonomi (uang, pendapatan), modal fisik (barang, alat), dan manfaat citra (liputan, pengakuan).

Langkah 1 – Tetapkan ukurannya. Cari bukti hubungan antarkelompok: saling percaya, berjejaring, atau menaati norma bersama.
Langkah 2 – Pilah keadaan di ilustrasi. Pendapatan naik = ekonomi; jas hujan = fisik; liputan televisi = citra; antrean dipatuhi tanpa pengawas = norma.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — modal ekonomi; hasil, bukan hubungan antarpengemudi.
• B ✗ — modal fisik berupa bantuan barang.
• C ✗ — manfaat citra.
• D ✓ — norma yang disepakati pengemudi lintas suku dan ditaati tanpa paksaan; inilah modal sosial.
• E ✗ — jumlah anggota baru merupakan potensi; ilustrasi pun tidak menyebutnya.

Cek ulang: hanya D yang menunjukkan cara para pengemudi berhubungan dan bekerja sama.

Jawaban: D.

Jebakan: A paling menggoda karena tampak sebagai hasil pembangunan, padahal pendapatan adalah modal ekonomi, bukan modal sosial.

✎ LATIHAN

1. Setiap tahun ajaran, banyak sekolah menerima siswa pindahan dari daerah lain karena orang tuanya pindah tugas. Siswa pindahan sering merasa canggung: logatnya berbeda, kebiasaannya belum sama, dan ia belum punya teman. Sebagian siswa setempat menyambut mereka, sebagian lain tidak peduli.
Sikap siswa setempat yang paling dapat menjadi modal sosial bagi sekolah adalah ....

A. bersikap ramah kepada siswa pindahan agar kelasnya mendapat penilaian baik dari wali kelas dan kepala sekolah
B. menyarankan siswa pindahan bergaul dengan siswa lain yang sedaerah agar ia lebih cepat merasa nyaman
C. mengajak siswa pindahan ke kelompok belajar dan saling bertukar cerita tentang daerah masing-masing
D. meminta siswa pindahan segera mengubah logatnya agar ia tidak lagi menjadi bahan tertawaan di kelas
E. menunggu siswa pindahan mendekat lebih dahulu agar tidak dianggap ikut mencampuri urusan pribadinya

2. Banyak desa kini mengelola usaha bersama melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Di desa-desa yang warganya beragam suku dan agama, hasilnya berbeda walaupun modal awalnya hampir sama. Sebagian BUMDes berkembang pesat, sedangkan sebagian lain macet karena pengurusnya hanya berasal dari satu kelompok dan warga lain curiga terhadap pengelolaan dananya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

- ☐ A. Kepercayaan antarkelompok warga ikut menentukan berhasil atau tidaknya usaha bersama desa.
- ☐ B. Pengelolaan usaha sebaiknya diserahkan kepada kelompok terbesar agar keputusan cepat diambil.
- ☐ C. Pengurus yang mewakili berbagai kelompok dan laporan dana yang terbuka dapat menumbuhkan kepercayaan.
- ☐ D. Keragaman warga menjadi penyebab utama macetnya usaha sehingga keragaman itu perlu dikurangi.
- ☐ E. Modal uang yang besar dengan sendirinya mengubah keragaman warga menjadi modal sosial pembangunan.

Kunci singkat: 1. C 2. A, C

✔ PERIKSA DIRI

- Sebutkan tiga unsur modal sosial dan beri satu contoh untuk masing-masing dari lingkunganmu.
- Mengapa "pengakuan UNESCO" atau "kunjungan wisatawan" bukan inti modal sosial?
- **Yang harus kuingat:** modal sosial = kepercayaan, jaringan, norma lintas kelompok; kebinekaan menjadi modal sosial bila dikelola; periksa setiap pilihan MCMA dengan tiga pertanyaan yang sama.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 3.2: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-3.2

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 3.3 · Nilai dan prinsip gotong royong

PPKN-3.3

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menerapkan dan menganalisis implementasi prinsip gotong royong**. Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi ada di contoh soal resmi Pusmendik: kerja sama warga lintas suku membersihkan lingkungan kota, lalu kamu menilai pernyataan tentangnya.

Soal gotong royong menguji kemampuan **membedakan** praktik yang benar-benar gotong royong dari praktik yang tampak bersama-sama, tetapi melanggar prinsipnya.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan asal gagasan, nilai, dan prinsip gotong royong;
- mengenali ragam tradisi gotong royong di Nusantara;
- membedakan gotong royong dari kerja yang dipaksakan, dari kebersamaan untuk menyimpang, dan dari layanan berbayar;
- menilai cara menyesuaikan gotong royong dengan kehidupan kota dan dunia digital.

◆ KONSEP INTI

Hampir setiap orang Indonesia pernah melihat atau ikut kerja bakti: membersihkan selokan, memperbaiki jalan kampung, atau membantu tetangga yang sedang punya hajat. Kegiatan seperti itu terasa biasa, tetapi di baliknya ada gagasan besar yang pernah diusulkan sebagai inti dasar negara. Sub bab ini menjelaskan apa itu gotong royong, nilai dan prinsip yang membuatnya berbeda dari sekadar "bekerja bersama-sama", serta bentuk-bentuk yang hanya tampak seperti gotong royong.

1. Gotong royong: arti dan asal gagasannya

Kata *gotong royong* berasal dari bahasa Jawa: *gotong* berarti mengangkat atau memikul, dan *royong* berarti bersama-sama. Arti dasarnya adalah **memikul beban bersama**. Dalam pengertian yang lebih luas, gotong royong adalah **kerja bersama secara sukarela untuk kepentingan bersama**, yang dilandasi rasa kekeluargaan. Wujud yang paling mudah dikenali adalah kerja bakti warga (lihat Gambar 3.9).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 3.9 Warga sebuah kampung bekerja bakti membersihkan rumput dan sampah di tepi jalan. Sumber: Fajrul Fala, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (dipotong; label ditambahkan).

Gotong royong pernah ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi dalam sejarah bangsa. Pada **1 Juni 1945**, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), **Soekarno** berpidato tentang dasar negara dan mengusulkan lima dasar yang ia namai Pancasila. Ia lalu menawarkan pilihan: bila ada yang tidak menyukai angka lima, kelima dasar itu dapat **diperas** menjadi tiga (Trisila), dan ketiganya dapat diperas lagi menjadi satu (**Ekasila**), yaitu **gotong royong**. Menurut Soekarno, negara Indonesia yang didirikan haruslah negara gotong royong: semua golongan bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Trisila dan Ekasila hanya ditawarkan sebagai pilihan; yang kemudian disepakati bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan lima sila. Namun, pidato itu menunjukkan bahwa gotong royong dipandang sebagai **jiwa** yang menyatukan semua sila.

2. Nilai-nilai gotong royong

Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan berharga, yang menjadi alasan orang melakukan sesuatu. Gotong royong digerakkan oleh beberapa nilai.

- **Kebersamaan**: merasa sebagai bagian dari satu kelompok yang saling membutuhkan.
- **Kekeluargaan**: memperlakukan tetangga dan sesama warga seperti keluarga sendiri.
- **Kepedulian**: tergerak membantu ketika ada yang kesulitan.
- **Tanggung jawab**: ikut menanggung beban bersama, tidak hanya menikmati hasilnya.
- **Persatuan**: kerja bersama mempererat hubungan antarwarga, termasuk yang berbeda suku dan agama.

Nilai menjelaskan **mengapa** orang bergotong royong. Agar nilai itu benar-benar terwujud, cara melaksanakannya harus mengikuti prinsip tertentu.

3. Lima prinsip pelaksanaan gotong royong

Prinsip adalah aturan dasar yang menjadi ukuran benar atau tidaknya sebuah tindakan. Sebuah kegiatan disebut gotong royong bila kelima prinsip berikut terpenuhi **sekaligus**.

Prinsip	Artinya	Contoh

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

sukarela	ikut karena kesadaran, bukan karena dipaksa atau diancam	warga datang kerja bakti tanpa ancaman denda
musyawarah	cara, waktu, dan pembagian tugas disepakati bersama	jadwal kerja bakti ditentukan dalam rapat RT
adil	setiap orang berkontribusi sesuai kemampuan; tidak ada yang dibebani berlebihan	warga lanjut usia menyiapkan minuman, yang muda mengangkat material
kepentingan bersama	tujuannya untuk kebaikan bersama dan dibenarkan hukum serta moral	membersihkan saluran air agar kampung tidak banjir
terbuka	pengelolaan dana dan hasil dapat diketahui semua	catatan sumbangan dan pengeluaran ditempel di pos ronda

Prinsip **adil** perlu dijelaskan lebih jauh, karena sering disalahpahami. Adil tidak berarti semua orang mengerjakan hal yang sama atau menyumbang jumlah yang sama. Dalam membangun pos ronda, misalnya, ada warga yang menyumbang tenaga, ada yang meminjamkan alat, ada yang menggambar rancangan, dan ada yang menyediakan makanan. Yang penting setiap orang ikut menanggung beban sesuai kemampuannya, dan tidak ada yang dipaksa melebihi kemampuannya.

Prinsip **sukarela** juga perlu dipahami dengan tepat. Sukarela tidak berarti tidak ada kesepakatan. Warga boleh bermusyawarah menyepakati jadwal dan pembagian tugas. Yang melanggar kesukarelaan adalah kewajiban yang ditetapkan **sepihak** lalu disertai ancaman, denda, atau tindakan mempermalukan orang yang tidak ikut.

4. Ragam tradisi gotong royong di Nusantara

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi gotong royong dengan nama sendiri. Beberapa contohnya:

- **Sambatan** di Jawa: warga beramai-ramai membantu tetangga yang membangun rumah atau tertimpa musibah. Tuan rumah biasanya menyediakan makanan, sedangkan tetangga menyumbang tenaga.
- **Mapalus** di Minahasa, Sulawesi Utara: tradisi yang berakar pada pertanian. Sekelompok petani bekerja **bergiliran** di lahan setiap anggota, sehingga semua lahan tergarap. Kini mapalus juga dipakai untuk membangun rumah, membantu biaya pernikahan, dan menolong warga yang tertimpa bencana.
- **Marsiadapari** di Tanah Batak, Sumatra Utara: warga bergantian mengerjakan sawah atau ladang anggota kelompok untuk meringankan beban pekerjaan.
- **Subak** di Bali: organisasi petani yang bermusyawarah membagi air irigasi (sub bab 3.2).

Di banyak daerah pesisir dan pedesaan, rumah panggung dari kayu atau bambu bahkan dapat dipindahkan secara utuh dengan dipikul beramai-ramai (lihat Gambar 3.10). Tidak ada satu orang pun yang sanggup memindahkan rumah sendirian; tetapi puluhan warga yang bekerja serentak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Inilah makna asli kata *gotong royong*: memikul bersama.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 3.10 Warga komunitas nelayan di pesisir Binuangeun, Kabupaten Lebak, Banten, memindahkan rangka rumah salah satu warga dengan memikulnya bersama-sama (foto 2010). Sumber: Herusutimbul, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (label ditambahkan).

Tradisi-tradisi ini memperlihatkan pola yang sama: **timbal balik** (hari ini aku membantu, besok aku dibantu), **giliran** yang disepakati, dan **kebersamaan** yang mempererat warga. Pola itu adalah modal sosial yang sudah dibahas di sub bab 3.2.

5. Yang hanya tampak seperti gotong royong

Tidak semua kegiatan yang dikerjakan bersama-sama adalah gotong royong. Gambar 3.11 membandingkan gotong royong dengan empat bentuk yang hanya tampak serupa.

Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 3.11 Lima prinsip gotong royong dibandingkan dengan empat bentuk kegiatan bersama yang bukan gotong royong. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

1. **Kerja yang dipaksakan.** Kegiatan diwajibkan sepihak, lalu yang tidak ikut didenda atau dipermalukan, misalnya namanya diumumkan di depan umum. Kegiatannya mungkin bermanfaat, tetapi melanggar prinsip sukarela dan musyawarah.
2. **Kebersamaan untuk menyimpang.** Sekelompok orang bekerja sama untuk tujuan yang melanggar hukum atau moral, misalnya bersama-sama menyontek dalam ujian, menutupi kesalahan teman, atau **kolusi**. Kolusi adalah kerja sama diam-diam secara tidak jujur untuk menguntungkan pihak tertentu, misalnya antara pejabat dan pengusaha dalam proyek pemerintah. Semangat "setia kawan" dalam kasus seperti ini bukan gotong royong.
3. **Alat kepentingan pribadi atau golongan.** Kerja bakti yang dijadikan ajang kampanye, ajang pamer, atau cara mengendalikan warga demi kepentingan kelompok tertentu tidak lagi untuk kepentingan bersama.
4. **Layanan yang dibeli.** Bila warga hanya membayar pihak lain untuk mengerjakan semuanya, tidak ada kerja bersama warga. Membayar jasa memang sah, tetapi itu transaksi jual beli, bukan gotong royong.

Satu hal penting: ukurannya adalah **prinsip**, bukan hasil. Kegiatan yang cepat selesai, rapi, atau menghasilkan banyak dana belum tentu gotong royong bila salah satu prinsipnya dilanggar.

6. Gotong royong di kota dan di dunia digital

Kehidupan di kota berbeda dengan di desa. Banyak warga bekerja sampai malam, tidak saling kenal, dan tinggal di apartemen atau perumahan. Apakah gotong royong masih mungkin? Bentuknya boleh berubah mengikuti zaman, **asal nilai dan prinsipnya tetap dijaga**. Kerja bakti dapat diatur pada akhir pekan dengan jadwal yang disepakati. Warga yang tidak bisa hadir dapat menyumbang dengan cara lain secara sukarela, misalnya menyediakan konsumsi atau

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

meminjamkan alat.

Teknologi juga melahirkan **gotong royong digital**, misalnya **penggalangan dana daring** untuk korban bencana atau warga yang sakit. Bentuk baru ini tetap harus memenuhi prinsip yang sama:

- **sukarela**: tidak ada tekanan atau ancaman bagi yang tidak menyumbang;
- **terbuka**: penggalang dana melaporkan jumlah yang terkumpul dan penggunaannya;
- **kepentingan bersama**: dana sampai kepada yang berhak dan tidak dipakai untuk kepentingan pribadi;
- **inklusif**: cara baru tidak menyingkirkan warga yang tidak memiliki ponsel atau rekening digital; tetap tersedia cara lain untuk ikut berpartisipasi.

Gotong royong digital yang tidak terbuka, misalnya dana dikumpulkan tanpa laporan, justru merusak kepercayaan, padahal kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga.

7. Gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Gotong royong mempunyai peran khusus di negara yang beragam. Ketika warga yang berbeda suku dan agama bekerja bersama membersihkan sungai, membangun jembatan, atau menolong korban bencana, mereka bertemu, saling mengenal, dan merasakan bahwa mereka saling membutuhkan. Inilah tahap-tahap yang memperkukuh persatuan (sub bab 3.1). Tradisi pela gandong di Maluku, misalnya, mewujud dalam gotong royong antarnegeri yang berbeda agama ketika membangun masjid atau gereja. Gotong royong lintas kelompok seperti ini menumbuhkan modal sosial penghubung yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Klub pecinta alam menanam mangrove

Pada 2026, klub pecinta alam sebuah SMA di Kota Pantai Indah (fiktif) bekerja bersama warga pesisir menanam bibit mangrove untuk menahan abrasi. Pengurus klub mencatat empat keadaan:

- (1) Pembagian tugas disepakati dalam rapat bersama warga: siswa menanam, nelayan menunjukkan lokasi yang tepat, ibu-ibu menyiapkan bibit.
- (2) Seorang pengurus mengusulkan agar anggota yang tidak ikut menanam "dilarang ikut perjalanan kemah klub dan namanya diumumkan di grup sekolah".
- (3) Laporan jumlah bibit, dana sumbangan, dan pengeluaran dibagikan kepada semua anggota dan warga.
- (4) Ketua klub mengusulkan agar daftar hadir diisi lengkap untuk semua anggota, termasuk yang tidak datang, "supaya nilai keaktifan kita semua bagus".

Keadaan manakah yang sesuai dengan nilai dan prinsip gotong royong, dan mana yang bukan? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Siapkan ukurannya: lima prinsip gotong royong, yaitu sukarela, musyawarah, adil, kepentingan bersama, dan terbuka (Gambar 3.11).
2. Keadaan (1): tugas disepakati dalam rapat (**musyawarah**) dan dibagi menurut kemampuan setiap pihak (**adil**). Sesuai.
3. Keadaan (2): kewajiban disertai sanksi dan tindakan mempermalukan. Ini **kerja yang dipaksakan**; melanggar prinsip sukarela. Tidak sesuai, walaupun tujuannya baik.
4. Keadaan (3): laporan dibagikan kepada semua pihak (**terbuka**). Sesuai.
5. Keadaan (4): "kebersamaan" dipakai untuk memalsukan daftar hadir. Ini **kebersamaan untuk menyimpang**; tujuannya tidak dibenarkan moral dan aturan sekolah. Tidak sesuai, walaupun disebut demi kepentingan semua anggota.

Jawaban: keadaan (1) dan (3) sesuai dengan gotong royong; keadaan (2) melanggar kesukarelaan, dan keadaan (4) adalah kebersamaan untuk menyimpang.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Gotong royong = memikul beban bersama: kerja bersama secara sukarela untuk kepentingan bersama. Soekarno menyebutnya sebagai perasan Pancasila menjadi Ekasila dalam pidato 1 Juni 1945.
- Nilainya: kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian, tanggung jawab, persatuan.
- Lima prinsipnya harus terpenuhi sekaligus: **sukarela, musyawarah, adil, kepentingan bersama, terbuka**.
- Ragam tradisi: sambatan (Jawa), mapalus (Minahasa), marsiadapari (Batak), subak (Bali).
- Bukan gotong royong: kerja yang dipaksakan, kebersamaan untuk menyimpang (termasuk kolusi), alat kepentingan pribadi atau golongan, layanan yang dibeli.
- Bentuk baru (kota, digital) boleh, asal prinsipnya tetap dijaga dan inklusif.

Bagan pada Gambar 3.12 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 3.12 Peta konsep nilai dan prinsip gotong royong. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Uji setiap pilihan dengan lima prinsip**: sukarela, musyawarah, adil, kepentingan bersama, terbuka.
2. **Coret pilihan yang melanggar satu prinsip saja**, walaupun prinsip lain terpenuhi.
3. **Untuk soal bentuk baru**, periksa apakah ada warga yang tersingkir.
4. **Untuk soal data**, bila data menunjukkan **jumlah** desa atau warga, bandingkan dengan jumlah keseluruhan sebelum menyimpulkan wilayah mana yang paling bergotong royong.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Satu prinsip terpenuhi, prinsip lain dilanggar.** Sukarela tetapi tidak terbuka, atau terbuka tetapi diwajibkan.
- **Hasil dijadikan ukuran.** "Selesai lebih cepat" atau "lebih rapi" bukan ukuran gotong royong.
- **Solidaritas untuk curang.** Berbagi jawaban saat ujian disebut kebersamaan.
- **Kepentingan sebagian orang.** Kegiatan bersama yang diam-diam menguntungkan sebagian pihak saja, atau dipakai untuk mengendalikan kepentingan kelompok lain.
- **Bentuk baru yang menyingkirkan.** Cara baru yang membuat sebagian warga tidak bisa ikut.

> Contoh salah tafsir: sebuah kelas mengumpulkan sumbangan untuk teman yang rumahnya terbakar. Seorang siswa mengusulkan agar daftar siswa yang belum menyumbang ditempel di papan kelas "supaya semua cepat menyumbang". Usul itu efektif, tetapi melanggar kesukarelaan dan mempermalukan teman. Gotong royong diukur dari prinsipnya, bukan dari kecepatan hasilnya.

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Uji lima prinsip satu per satu dengan bukti di ilustrasi; satu prinsip dilanggar sudah cukup.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pada 2027, ketua pemuda Dusun Sukawangi menetapkan sendiri jadwal dan pembagian tugas mengecat balai dusun, lalu mengumumkannya lewat grup pesan. Para pemuda datang tanpa paksaan, rincian sumbangan dan pengeluaran dibagikan kepada semua pemuda, dan balai itu dipakai seluruh warga. Namun, beberapa pemuda mengeluh tidak pernah ditanya pendapatnya.
Prinsip gotong royong yang belum terpenuhi dalam kegiatan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sukarela, karena sebagian pemuda tidak dapat hadir pada hari pengecatan balai
B. terbuka, karena jadwal kegiatan hanya diumumkan melalui grup pesan para pemuda
C. kepentingan bersama, karena balai dusun lebih sering dipakai oleh para pengurus
D. adil, karena semua pemuda diberi tugas yang sama berat tanpa melihat kemampuannya
E. musyawarah, karena jadwal dan pembagian tugas ditetapkan sepihak oleh ketua

Pembahasan **Kunci: E**

Konsep: sebuah kegiatan disebut gotong royong bila **lima prinsip** terpenuhi sekaligus: **sukarela**, **musyawarah**, **adil**, **kepentingan bersama**, dan **terbuka**. Satu prinsip yang dilanggar sudah cukup membuat kegiatan itu belum sepenuhnya gotong royong.

Langkah 1 – Siapkan ukuran. Uji kegiatan dengan lima prinsip satu per satu.
Langkah 2 – Cocokkan dengan bukti di ilustrasi. Datang tanpa paksaan → sukarela ✓. Rincian sumbangan dibagikan → terbuka ✓. Balai dipakai seluruh warga → kepentingan bersama ✓. Jadwal dan tugas ditetapkan sendiri oleh ketua, pemuda tidak ditanya → musyawarah ✗.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — ilustrasi tidak menyebut pemuda yang absen; lagi pula tidak hadir bukan pelanggaran kesukarelaan.
• B ✗ — rincian sumbangan dan pengeluaran justru dibagikan kepada semua; prinsip terbuka terpenuhi.
• C ✗ — bertentangan dengan ilustrasi: balai dipakai seluruh warga.
• D ✗ — ilustrasi tidak menyebut tugas yang sama berat.
• E ✓ — keputusan sepihak tanpa rapat melanggar prinsip musyawarah.

Cek ulang: keluhan "tidak pernah ditanya pendapatnya" menunjuk langsung pada musyawarah.

Jawaban: E.

Jebakan: B memakai bukti yang benar (pengumuman lewat grup), tetapi menempelkannya pada prinsip yang salah.

✎ LATIHAN

1. Di sejumlah kampung yang sulit mendapat air bersih, warga membuat sumur bor bersama. Ada warga yang menyumbang uang, ada yang menyumbang tenaga, dan ada yang merelakan sebagian tanahnya untuk lokasi sumur. Jadwal pembagian air dan besarnya iuran perawatan diputuskan dalam rapat warga.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan nilai dan prinsip gotong royong!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Warga yang menyumbang tanah, bukan uang, tetap ikut bergotong royong sesuai kemampuannya.	○	○
Warga yang menyumbang uang paling banyak berhak menentukan sendiri jadwal pembagian air.	○	○
Bila penggunaan iuran perawatan tidak pernah dilaporkan, prinsip terbuka belum terpenuhi.	○	○

2. Di beberapa permukiman, warga bergotong royong memasang pipa sambungan liar dari jaringan air bersih milik perusahaan daerah agar tidak perlu membayar. Pekerjaan dibagi dalam rapat, setiap keluarga menyumbang sesuai kemampuan, dan laporan dananya dibagikan. Akibatnya, aliran air di permukiman lain melemah dan pelanggan yang membayar ikut dirugikan.
Penilaian yang paling tepat terhadap kegiatan tersebut adalah ....

A. bukan gotong royong sejati karena tujuannya melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum
B. termasuk gotong royong karena pekerjaannya dibagi dalam rapat dan setiap keluarga menyumbang
C. termasuk gotong royong karena air bersih dari sambungan itu dinikmati semua keluarga di permukiman itu
D. bukan gotong royong karena kegiatan itu belum dimusyawarahkan dengan warga permukiman lain
E. bukan gotong royong karena warga seharusnya tidak bekerja sendiri tanpa memakai jasa tukang

Kunci singkat: 1. 1B 2S 3B 2. A

✔ PERIKSA DIRI

- Sebutkan lima prinsip gotong royong dan beri satu contoh pelanggaran untuk salah satunya.
- Mengapa sebuah kegiatan yang hasilnya bagus belum tentu gotong royong? Berikan satu contoh.
- **Yang harus kuingat:** gotong royong diukur dari prinsipnya — sukarela, musyawarah, adil, untuk kepentingan bersama, terbuka — bukan dari hasilnya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 3.3: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-3.3

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional

PPKN-3.4

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis potensi ancaman terhadap keberagaman** dan integrasi nasional. Ini sub bab dengan soal asli terbanyak: empat soal pada 2025.

Soal asli	Yang diuji	Bentuk	Benar
No. 24	tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	MCMA	30 %
No. 19	tantangan menjaga integrasi nasional	PG	41 %
No. 20	upaya menghadapi ancaman diskriminasi	PG	54 %
No. 14	upaya menjaga integrasi nasional	Benar/Salah	75 %

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan tujuan integrasi nasional serta faktor pendorong dan penghambatnya, dan membedakannya dari penyeragaman;
- mengenali ancaman terhadap keberagaman: primordialisme, etnosentrisme, diskriminasi, ujaran kebencian, hoaks, radikalisme, dan kesenjangan;
- membedakan akibat langsung sebuah ancaman dari akibat lanjutannya;
- memilih upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang menyasar akar dan adil bagi semua pihak, belajar dari perjanjian damai Malino dan Helsinki.

NEXT LEVEL STUDY

◆ KONSEP INTI

Keragaman Indonesia dapat menjadi modal sosial yang besar (sub bab 3.2), tetapi keragaman yang sama juga dapat menjadi sumber perpecahan bila dikelola dengan buruk. Sejarah Indonesia mencatat kedua sisi itu. Ada masa ketika warga yang bertetangga puluhan tahun tiba-tiba saling curiga, lalu terjadi konflik yang membuat ribuan keluarga mengungsi. Ada pula masa ketika para pihak yang berkonflik duduk bersama, berunding, dan menandatangani perjanjian damai. Sub bab ini menjelaskan apa yang dimaksud integrasi nasional, ancaman apa saja yang dapat merusaknya, bagaimana ancaman itu berkembang menjadi akibat, dan bagaimana bangsa Indonesia pernah menyelesaikan konflik lewat dialog dan keadilan.

1. Integrasi nasional: menyatukan tanpa menghapus

Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan daerah menjadi satu bangsa, dengan **tetap mengakui**

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

identitas setiap kelompok. Kata *integrasi* berasal dari bahasa Latin *integratio*, yang berarti penyatuan sehingga menjadi utuh.

Tujuan integrasi nasional berkaitan langsung dengan hubungan antarkelompok: menumbuhkan rasa senasib sebagai satu bangsa, menciptakan kehidupan yang rukun dan saling menghormati, membangun kerja sama lintas suku dan agama, serta menjaga ikatan agar bangsa tidak mudah dipecah belah. Setelah bangsa bersatu, mungkin menyusul manfaat lain, misalnya ekonomi tumbuh atau pariwisata berkembang. Manfaat itu baik, tetapi merupakan **dampak lanjutan**, bukan tujuan integrasi yang paling langsung.

Integrasi perlu dibedakan dari dua istilah yang mirip. **Asimilasi** adalah peleburan budaya sampai budaya asal suatu kelompok hilang dan berganti dengan budaya lain. **Akulturasi** adalah perpaduan budaya yang melahirkan bentuk baru tanpa menghilangkan ciri asalnya, seperti Menara Kudus (sub bab 3.1). Integrasi nasional Indonesia **tidak menuntut asimilasi**. Orang Dayak, Bugis, atau Sunda tidak harus meninggalkan budayanya untuk menjadi orang Indonesia. Integrasi yang memaksa semua kelompok melebur ke dalam satu budaya justru merupakan **penyeragaman**, yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Integrasi nasional diperkuat oleh **faktor pendorong** dan dilemahkan oleh **faktor penghambat** (lihat Gambar 3.13).



Gambar 3.13 Faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat integrasi nasional. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Faktor pendorong antara lain Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai titik temu, **bahasa Indonesia** sebagai bahasa persatuan yang memungkinkan orang dari Sabang sampai Merauke saling memahami, **sejarah perjuangan bersama** sejak Sumpah Pemuda 1928 sampai perang mempertahankan kemerdekaan, simbol negara, sekolah dan media nasional, perjumpaan antarwarga lewat merantau dan perkawinan campur, serta pembangunan yang adil dan sarana penghubung antarpulau.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Faktor penghambat antara lain wilayah kepulauan yang sangat luas dengan sarana penghubung yang belum merata, sikap primordial dan etnosentris, prasangka dan hoaks, kesenjangan dan rasa diperlakukan tidak adil, diskriminasi, serta radikalisme dan campur tangan pihak luar yang ingin memecah belah. Sebagian penghambat itu berupa **keadaan** (jarak, sarana), sebagian berupa **sikap** (prasangka, fanatisme kelompok), dan sebagian berupa **rasa tidak adil**. Ketiga jenis ini perlu dibedakan, karena cara mengatasinya berbeda.

2. Ancaman terhadap keberagaman

Ancaman terhadap keberagaman adalah sikap atau keadaan yang dapat merusak hubungan antarkelompok. Berikut ancaman yang paling sering dibahas.

Primordialisme adalah sikap mengutamakan ikatan asal, seperti suku, daerah, atau keluarga, secara berlebihan. Contohnya, memilih ketua organisasi hanya karena sedaerah, bukan karena kemampuannya. Mencintai daerah asal itu wajar; ia menjadi ancaman bila membuat seseorang menutup diri atau memperlakukan orang lain tidak adil.

Etnosentrisme adalah sikap menilai budaya lain dengan ukuran budaya sendiri, lalu menganggap budaya sendiri paling baik dan budaya lain lebih rendah. Contohnya, menganggap logat daerah lain kasar atau makanan daerah lain aneh hanya karena berbeda.

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Contohnya, menolak penyewa rumah karena agamanya, atau tidak menerima pelamar kerja karena sukunya. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang melarang perlakuan semacam itu, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif.

Ujaran kebencian dan hoaks. Ujaran kebencian adalah perkataan, tulisan, atau gambar yang menyerang dan merendahkan kelompok tertentu. Hoaks adalah kabar bohong yang disebarkan seolah-olah benar. Keduanya sangat berbahaya di era media sosial, karena dapat menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit dan menumbuhkan prasangka sebelum sempat diluruskan.

Radikalisme dalam pengertian yang dibahas di sini adalah paham yang menghendaki perubahan secara drastis dengan cara kekerasan dan menolak keberagaman. Paham semacam ini memandang kelompok lain sebagai musuh yang harus disingkirkan.

Kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok adalah ketimpangan dalam pembangunan, pendapatan, atau layanan publik. Warga di daerah yang tertinggal dapat merasa dianaktirikan. Rasa diperlakukan tidak adil ini sering menjadi bahan bakar konflik, terutama bila dimanfaatkan pihak yang ingin memecah belah.

3. Dari ancaman ke akibat: langsung dan lanjutan

Setiap ancaman menimbulkan akibat yang berantai. Penting sekali membedakan **akibat langsung** dari **akibat lanjutan** (lihat Gambar 3.14).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 3.14 Rantai dari ancaman terhadap keberagaman ke akibat langsung pada hubungan antarkelompok, lalu ke akibat lanjutan di bidang lain. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ambil contoh hoaks yang menuduh satu kelompok menimbun bahan makanan saat bencana. Akibat **langsung**nya terjadi pada **hubungan antarkelompok**: muncul prasangka, kelompok lain mulai curiga, dan hubungan yang sebelumnya baik menjadi renggang. Bila prasangka itu dibiarkan, menyusul akibat **lanjutan**: bentrokan, warga takut keluar rumah, pasar sepi, dan kegiatan ekonomi lesu.

Mengapa pembedaan ini penting? Karena integrasi nasional pada dasarnya adalah soal hubungan antarkelompok. Bila ditanya akibat sebuah ancaman **bagi integrasi**, yang paling tepat adalah akibat pada hubungan itu: prasangka, curiga, merenggang, bermusuhan, dan terpecah. Akibat ekonomi, turunnya kunjungan wisata, atau berkurangnya popularitas sebuah daerah mungkin saja terjadi, tetapi menyusul kemudian dan berada di bidang lain.

4. Upaya menjaga integrasi: dialogis atau represif?

Upaya menghadapi ancaman dapat dibedakan menjadi dua pendekatan.

Pendekatan represif menekan gejala dengan kekuatan: mengerahkan aparat, membubarkan pertemuan, melarang kegiatan, atau memisahkan kelompok yang berselisih. Dalam keadaan darurat, ketika kekerasan sedang terjadi, aparat memang perlu bertindak untuk melindungi nyawa warga. Namun, bila hanya itu yang dilakukan, akar masalahnya tetap ada. Ketegangan dapat muncul lagi begitu aparat ditarik.

Pendekatan dialogis mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari penyelesaian atas akar masalah. Upaya yang kuat biasanya memenuhi beberapa ciri berikut:

- **menyentuh akar** masalah, misalnya ketidakadilan, salah paham, atau kabar bohong;
- **mempertemukan** kelompok melalui dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

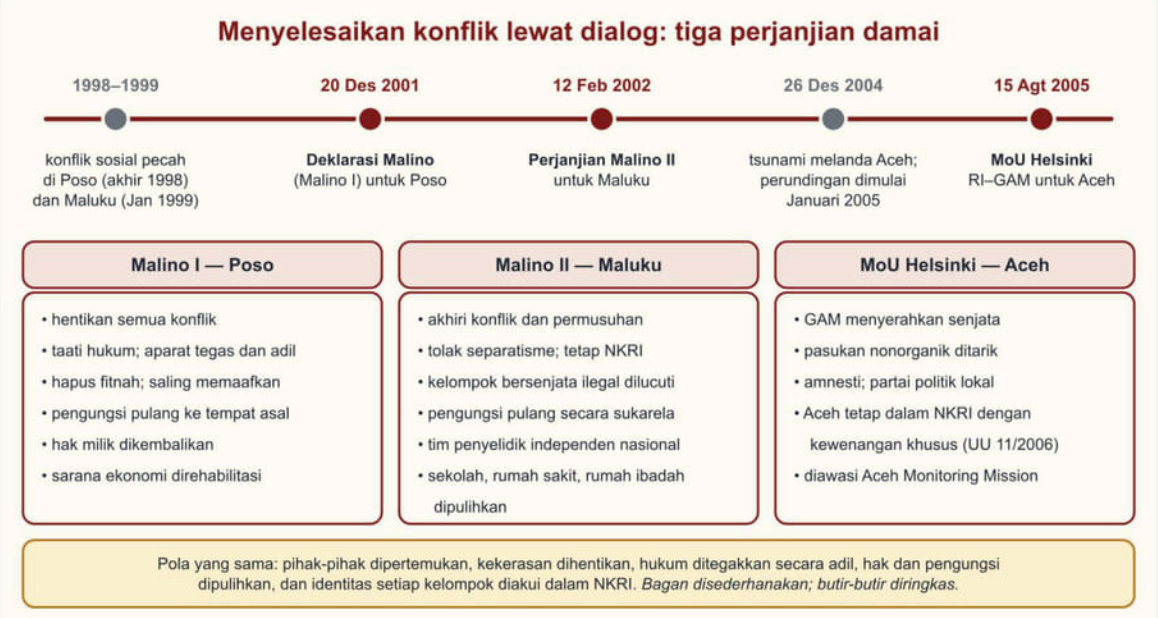
adat, dan tokoh agama;

- **memperlakukan setiap orang secara setara** dan **adil** bagi semua pihak, tidak memenangkan satu kelompok;
- **menegakkan hukum secara adil** terhadap siapa pun yang melanggar, tanpa memandang kelompoknya;
- **memulihkan hak** pihak yang dirugikan.

Upaya yang memisahkan kelompok secara permanen atau menuntut satu kelompok mengubah budayanya bukan upaya integrasi yang baik. Upaya seperti itu mungkin meredakan ketegangan untuk sementara, tetapi justru menjauhkan kelompok-kelompok yang seharusnya disatukan.

5. Belajar dari tiga perjanjian damai

Bangsa Indonesia pernah mengalami konflik besar di beberapa daerah pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Konflik itu menimbulkan korban jiwa dan pengungsian. Yang penting dipelajari di sini bukan siapa yang salah, melainkan **bagaimana konflik itu diselesaikan**. Gambar 3.15 menunjukkan urutan peristiwanya.



Gambar 3.15 Linimasa tiga perjanjian damai: Deklarasi Malino untuk Poso (2001), Perjanjian Malino II untuk Maluku (2002), dan MoU Helsinki untuk Aceh (2005), beserta ringkasan isinya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Poso dan Deklarasi Malino (2001). Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, perselisihan antarpemuda pada akhir Desember 1998 berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat yang berbeda agama. Konflik itu membesar karena berbagai faktor yang saling bertumpuk, antara lain prasangka, persaingan ekonomi dan politik lokal, rasa diperlakukan tidak adil, dan provokasi. Pada **20 Desember 2001**, pemerintah mempertemukan wakil-wakil kedua kelompok di **Malino**, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini difasilitasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat itu, Jusuf Kalla. Hasilnya adalah **Deklarasi Malino** (sering disebut Malino I) yang berisi sepuluh butir kesepakatan,

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

antara lain menghentikan semua bentuk konflik, menaati penegakan hukum dan meminta aparat bertindak tegas dan adil, menghapus fitnah serta saling memaafkan, mengembalikan pengungsi ke tempat asal, mengembalikan hak milik kepada pemilik yang sah, dan bersama pemerintah merehabilitasi sarana ekonomi. Deklarasi ini tidak serta-merta menghapus semua kekerasan; pemulihan berlangsung bertahun-tahun, dan sebagian butirnya masih dinilai belum tuntas. Namun, deklarasi itu menjadi titik balik: kedua pihak mengakui bahwa jalan keluar hanya dapat ditemukan bersama.

Maluku dan Perjanjian Malino II (2002). Di Maluku, konflik antarkelompok masyarakat pecah di Ambon pada Januari 1999 dan meluas ke berbagai pulau selama sekitar tiga tahun. Belajar dari Poso, pemerintah kembali mempertemukan wakil-wakil kelompok masyarakat Maluku di Malino pada **11–12 Februari 2002**. Kesepakatan yang dihasilkan, **Perjanjian Malino II**, memuat sebelas butir, antara lain mengakhiri semua konflik dan permusuhan, menegakkan hukum secara adil, menolak gerakan separatis karena Maluku adalah bagian NKRI, melucuti kelompok bersenjata yang tidak sah, membentuk tim penyelidik independen nasional, memulangkan pengungsi secara sukarela, dan memulihkan sarana pendidikan, kesehatan, serta rumah ibadah. Setelah perjanjian itu, masyarakat Maluku juga menghidupkan kembali ikatan adat seperti **pela gandong** (sub bab 3.1) untuk memulihkan persaudaraan antarnegeri.

Aceh dan MoU Helsinki (2005). Konflik di Aceh berbeda dari dua konflik sebelumnya. Ini konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan **Gerakan Aceh Merdeka (GAM)** yang berlangsung sejak 1976, dengan akar antara lain rasa ketidakadilan dalam pembagian hasil kekayaan alam dan pembangunan. Beberapa upaya damai sebelumnya gagal. Bencana **tsunami 26 Desember 2004** yang melanda Aceh mendorong kedua pihak kembali ke meja perundingan pada Januari 2005. Perundingan berlangsung di **Helsinki, Finlandia**, difasilitasi lembaga Crisis Management Initiative yang dipimpin mantan Presiden Finlandia **Martti Ahtisaari**. Pada **15 Agustus 2005**, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin (mewakili pemerintah) dan Malik Mahmud (mewakili GAM) menandatangani **Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki**. Isinya antara lain: GAM menyerahkan senjata dan membubarkan sayap militernya; pemerintah menarik pasukan nonorganik (pasukan yang didatangkan dari luar Aceh); pemerintah memberi amnesti kepada anggota GAM; Aceh boleh memiliki partai politik lokal; Aceh tetap berada dalam NKRI dengan kewenangan khusus; dan pelaksanaannya diawasi **Aceh Monitoring Mission** yang dibentuk Uni Eropa bersama sejumlah negara ASEAN. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**, yang disahkan pada 1 Agustus 2006.

Ketiga perjanjian memperlihatkan pola yang sama. Para pihak **dipertemukan** dan didengarkan. Kekerasan dihentikan. Hukum ditegakkan secara adil. Hak dan pengungsi dipulihkan. Identitas setiap kelompok diakui, sementara keutuhan NKRI dijaga. Inilah wujud nyata pendekatan dialogis: integrasi dibangun lewat **dialog dan keadilan**, bukan semata-mata lewat kekuatan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▣ CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Gedung olahraga kelurahan

Pada 2026, pengelola gedung olahraga milik Kelurahan Lembah Hijau (fiktif) menolak permohonan sewa sebuah klub bulu tangkis remaja. Alasannya, sebagian besar anggota klub itu warga pendatang dari suku tertentu, "sehingga gedung sebaiknya diutamakan untuk warga asli". Seorang guru PPKn meminta siswanya menentukan **akibat langsung** peristiwa itu **bagi integrasi**. Siswa mengusulkan empat jawaban: (a) pendapatan sewa gedung berkurang; (b) klub pindah berlatih ke kota lain sehingga prestasi bulu tangkis kelurahan menurun; (c) anggota klub merasa diperlakukan tidak adil, sehingga muncul rasa curiga dan hubungan antara warga pendatang dan warga lama merenggang; (d) terjadi bentrokan antarwarga di kelurahan itu. *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

1. Kenali **ancamannya**: penolakan karena suku adalah **diskriminasi**, perlakuan tidak adil karena latar belakang.
2. Kenali **yang ditanyakan**: akibat **langsung** bagi **integrasi**, yaitu akibat pada hubungan antarkelompok (Gambar 3.14, kolom tengah).
3. Jawaban (a) adalah akibat **ekonomi** bagi pengelola gedung, bukan akibat pada hubungan antarkelompok.
4. Jawaban (b) adalah akibat di bidang **olahraga**; tidak menyentuh hubungan antarkelompok.
5. Jawaban (c) menyentuh hubungan antarkelompok secara langsung: rasa tidak adil, curiga, dan merenggang.
6. Jawaban (d) memang menyangkut hubungan antarkelompok, tetapi bentrokan adalah akibat **lanjutan** yang baru terjadi bila rasa tidak adil dan curiga dibiarkan membesar.

Jawaban: (c), karena diskriminasi itu langsung merusak hubungan antara kelompok pendatang dan warga lama; (a) dan (b) berada di bidang lain, sedangkan (d) adalah akibat lanjutan.

Contoh 2 — Dua tanggapan atas protes warga

Pada 2026, warga Kecamatan Gunung Sari (fiktif) di sebuah kabupaten berunjuk rasa di kantor bupati. Jalan penghubung ke kecamatan mereka rusak bertahun-tahun, dan belum ada SMA terdekat sehingga banyak remaja putus sekolah. Sebagian pemuda mulai berkata, "Kami dianaktirikan." Pemerintah kabupaten mempertimbangkan dua tanggapan.

- **Tanggapan 1:** mengerahkan aparat untuk membubarkan unjuk rasa, melarang pertemuan warga selama tiga bulan, dan meminta tokoh masyarakat menenangkan warga tanpa mengubah rencana pembangunan.
- **Tanggapan 2:** mengundang perwakilan warga, tokoh adat, dan tokoh agama ke forum dialog; membuka data anggaran pembangunan; menyusun jadwal perbaikan jalan dan pembangunan sekolah bersama warga; dan memproses secara hukum siapa pun yang merusak fasilitas umum selama unjuk rasa, dari pihak mana pun.

Tanggapan manakah yang lebih tepat untuk menjaga integrasi? *Kasus disusun untuk contoh; tempat dan tokoh fiktif.*

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1. Temukan **akar masalahnya**: kesenjangan pembangunan dan rasa diperlakukan tidak adil (penghambat integrasi pada Gambar 3.13).
2. Nilai tanggapan 1: pendekatan **represif**. Unjuk rasa berhenti, tetapi jalan tetap rusak dan sekolah tetap tidak ada. Rasa dianaktirikan justru bertambah karena warga tidak didengar, sehingga ketegangan dapat muncul lagi dan mudah dimanfaatkan penghasut.
3. Nilai tanggapan 2: pendekatan **dialogis**. Warga dipertemukan dan didengar, keterbukaan anggaran menumbuhkan kepercayaan, dan jadwal pembangunan menyentuh akar masalah. Penegakan hukum tetap ada, tetapi adil dan berlaku untuk semua pihak.
4. Bandingkan dengan peristiwa nyata: perjanjian Malino dan Helsinki berhasil karena para pihak didengar, ketidakadilan diperbaiki, dan hukum ditegakkan secara adil.

Jawaban: tanggapan 2, karena menyelesaikan akar masalah (kesenjangan dan rasa tidak adil) melalui dialog dan keadilan; tanggapan 1 hanya menekan gejala.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

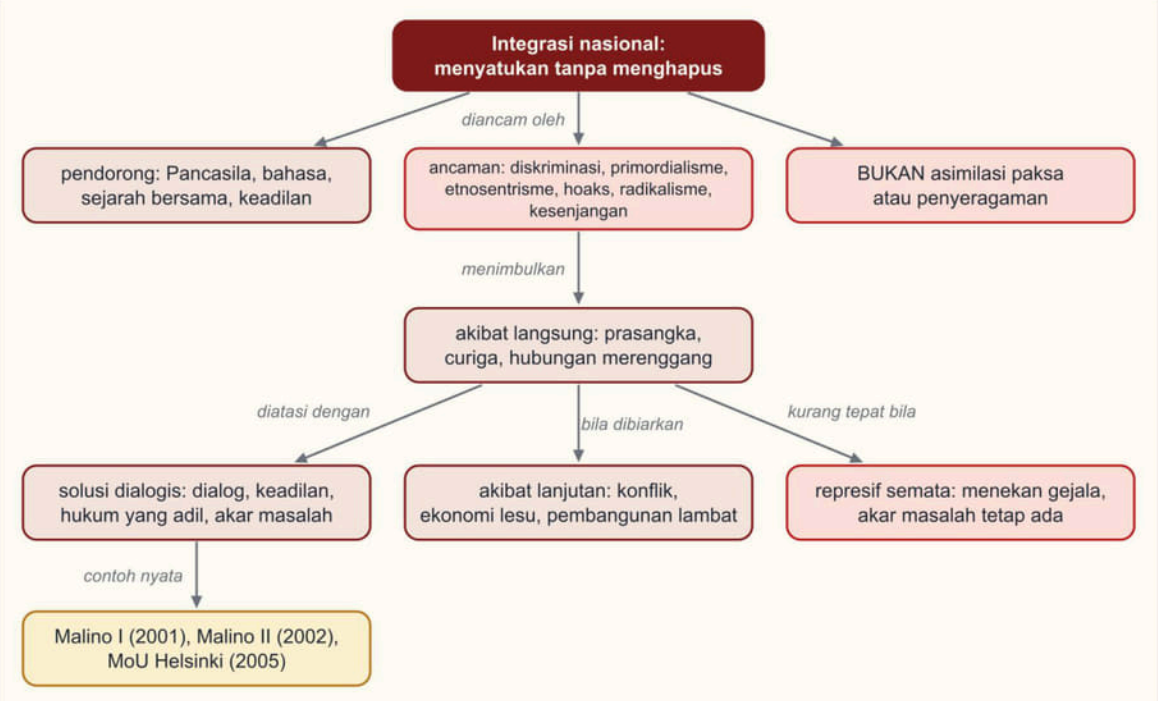
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Integrasi nasional = menyatukan berbagai kelompok menjadi satu bangsa **tanpa menghapus** identitasnya; bukan asimilasi paksa atau penyeragaman. Tujuannya langsung tentang persatuan dan kerja sama antarkelompok.
- Pendorong: Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah bersama, perjumpaan, pembangunan yang adil. Penghambat: keadaan (wilayah luas), sikap (prasangka, fanatisme), dan rasa tidak adil.
- Ancaman: primordialisme, etnosentrisme, diskriminasi, ujaran kebencian dan hoaks, radikalisme, kesenjangan.
- Akibat **langsung** bagi integrasi terjadi pada hubungan antarkelompok (prasangka, curiga, merenggang); akibat ekonomi atau konflik terbuka adalah akibat **lanjutan**.
- Upaya terbaik bersifat dialogis: menyentuh akar, mempertemukan, setara, adil, dan menegakkan hukum tanpa memandang kelompok. Contoh nyata: Deklarasi Malino (20 Desember 2001), Perjanjian Malino II (Februari 2002), MoU Helsinki (15 Agustus 2005).

Bagan pada Gambar 3.16 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 3.16 Peta konsep ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Kenali kata tanya**: tujuan, tantangan, upaya, atau akibat?
2. **Untuk tujuan**, pilih yang langsung tentang persatuan dan kerja sama; tolak dampak lanjutan.
3. **Untuk tantangan**, pilih yang tergambar di stimulus.
4. **Untuk upaya**, pilih yang menyasar akar, adil, dan menghormati martabat.
5. **Untuk akibat bagi integrasi**, pilih akibat pada hubungan antarkelompok, bukan akibat ekonomi atau akibat lanjutan.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Dampak lanjutan dikira tujuan.**
- **Hambatan yang tidak ada di stimulus.**
- **Upaya yang berlebihan atau menekan.** Memblokir semua, memisahkan kelompok, mengerahkan aparat semata, menghukum tanpa menyelesaikan akar.
- **Upaya yang baik, tetapi menyasar hal lain.** Periksa apakah upaya itu benar-benar menjawab akar ancaman yang ditanyakan; bantuan uang tunai, misalnya, tidak menyelesaikan prasangka.
- **Upaya yang menuntut kelompok mengubah budayanya.** Integrasi tidak menuntut penyeragaman atau asimilasi.

> Contoh salah tafsir: beredar kabar bohong bahwa sebuah kelompok menimbun bahan pokok saat banjir. Seorang siswa menjawab akibatnya "harga bahan pokok naik". Itu mungkin terjadi, tetapi soal menanyakan akibat **bagi integrasi**, yaitu tumbuhnya prasangka dan permusuhan antarkelompok.

NEXT LEVEL STUDY

● BEDAH SOAL ASLI

Empat soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Semuanya ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 24 (tujuan integrasi nasional, MCMA, 30 % benar). Kamu diminta memilih **semua** pernyataan yang menjelaskan tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

- Konsep kunci: tujuan integrasi berkaitan langsung dengan persatuan dan kerja sama antarkelompok (bagian 1).
- Langkah: untuk setiap pilihan, tanyakan "apakah ini tujuan **integrasi**, atau manfaat lain yang bisa menyusul?".
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang baik, tetapi tidak langsung tentang menyatukan kelompok yang beragam.

Rujukan: soal nomor 24 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Nomor 19 (tantangan integrasi di tengah ribuan suku, PG, 41 % benar). Ilustrasi menggambarkan kekayaan suku bangsa yang tersebar di banyak pulau. Kamu diminta menentukan tantangan menjaga integrasi.

- Konsep kunci: faktor penghambat integrasi (bagian 1) dan ancaman terhadap keberagaman (bagian 2).
- Langkah: tanyakan "dari keragaman suku seperti di ilustrasi, sikap apa yang paling mungkin mengancam persatuan?".
- Pengecoh yang dipasang: masalah sosial lain yang tidak berangkat dari keragaman yang digambarkan.

Rujukan: soal nomor 19 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 20 (diskriminasi, PG, 54 % benar). Kamu diminta menentukan upaya menghadapi ancaman diskriminasi.

- Konsep kunci: diskriminasi dilawan dengan perlakuan setara dan penghormatan martabat yang sama (bagian 2 dan 4).
- Langkah: tanyakan apa akar diskriminasi, lalu pilih upaya yang langsung menyasarnya.
- Pengecoh yang dipasang: upaya yang terdengar baik, tetapi menyasar hal lain.

Rujukan: soal nomor 20 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 14 (upaya menjaga integrasi, Benar/Salah, 75 % benar). Kamu menilai tiga upaya.

- Konsep kunci: upaya integrasi yang menghormati identitas (bagian 1 dan 4).
- Langkah: baca setiap pernyataan sampai akhir; anak kalimat terakhir dapat mengubah makna.
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang dimulai dengan upaya baik, lalu diakhiri dengan arah yang keliru.

Rujukan: soal nomor 14 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Kenali ancamannya, lalu pilih akibat pada hubungan antarkelompok; tolak akibat lanjutan dan akibat di bidang lain.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pada 2026, Ketua RW Perumahan Puri Kencana yang baru terpilih menunjuk seluruh pengurus RW dan ketua RT dari warga yang sesuku dengannya, padahal penghuni perumahan berasal dari berbagai suku. Warga lain yang selama ini aktif tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan lingkungan.
Akibat langsung tindakan tersebut bagi integrasi warga perumahan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. program kerja RW berjalan lebih lambat karena pengurus barunya belum berpengalaman
B. terjadi perkelahian antarwarga dari suku yang berbeda di lingkungan perumahan itu
C. warga dari suku lain merasa disisihkan sehingga muncul curiga dan hubungan merenggang
D. ketua RW yang baru diberhentikan oleh lurah karena dinilai melanggar aturan pemilihan
E. harga rumah di perumahan itu turun karena calon pembeli enggan tinggal di lingkungan tersebut

Pembahasan **Kunci: C**

Konsep: mengutamakan ikatan asal (suku) secara berlebihan disebut **primordialisme**. Akibat **langsung** sebuah ancaman bagi integrasi terjadi pada **hubungan antarkelompok** (rasa tidak adil, curiga, merenggang). Bentrokan, kerugian ekonomi, atau sanksi menyusul kemudian atau berada di bidang lain.

Langkah 1 – Kenali ancamannya. Pengurus dipilih hanya karena sesuku → primordialisme yang membuat kelompok lain diperlakukan tidak adil.
Langkah 2 – Kenali yang ditanyakan. Akibat **langsung** bagi **integrasi**, yaitu pada hubungan antarwarga.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — akibat pada kinerja organisasi; ilustrasi juga tidak menyebut pengalaman pengurus.
• B ✗ — menyangkut hubungan antarkelompok, tetapi perkelahian adalah akibat lanjutan bila curiga dibiarkan.
• C ✓ — rasa disisihkan, curiga, dan merenggang langsung muncul dari tindakan itu.
• D ✗ — konsekuensi administratif yang tidak disebut ilustrasi.
• E ✗ — akibat ekonomi lanjutan, di bidang lain.

Cek ulang: C satu-satunya akibat yang langsung dan menyangkut hubungan antarkelompok.

Jawaban: C.

Jebakan: B memang tentang hubungan antarkelompok, tetapi berada di ujung rantai akibat, bukan akibat langsungnya.

✎ LATIHAN

1. Di sejumlah kawasan industri baru, warga setempat merasa lowongan kerja lebih banyak diisi pekerja pendatang, sementara pemuda setempat belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pabrik. Kekecewaan itu memunculkan spanduk dan unggahan bernada "usir pendatang", dan beberapa kali terjadi keributan kecil antara pemuda setempat dan pekerja

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

pendatang.

Upaya yang paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. mengadakan dialog warga, perusahaan, dan pendatang serta membuka pelatihan dan rekrutmen yang adil
B. memulangkan sebagian pekerja pendatang ke daerah asal agar lowongan dapat diisi pemuda setempat
C. mengerahkan aparat untuk menjaga kawasan industri setiap hari tanpa mengubah cara perekrutan pekerja
D. memberikan bantuan tunai kepada pemuda setempat agar mereka tidak lagi memprotes perekrutan pekerja
E. mewajibkan pekerja pendatang meninggalkan adat daerah asalnya dan mengikuti seluruh adat setempat

2. Di banyak kota pelabuhan lama, kampung-kampung keturunan Arab, Tionghoa, Bugis, Melayu, dan Jawa tumbuh berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Setiap kelompok masih merayakan tradisinya, tetapi sehari-hari warganya berbahasa Indonesia, berdagang bersama, dan saling menghadiri perayaan. Banyak makanan dan kesenian setempat memadukan unsur beberapa budaya.

Pernyataan manakah yang tepat tentang integrasi nasional berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Integrasi nasional menuntut setiap kelompok keturunan meninggalkan tradisi leluhurnya.
☐ B. Bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari menjadi salah satu faktor pendorong integrasi.
☐ C. Makanan dan kesenian yang memadukan unsur beberapa budaya merupakan wujud akulturasi.
☐ D. Kampung yang hidup terpisah tanpa interaksi sudah terintegrasi asalkan tidak bertikai.
☐ E. Kegiatan bersama lintas kampung memperkuat integrasi tanpa menghapus identitas tiap kelompok.

Kunci singkat: 1. A 2. B, C, E

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Apa beda tujuan integrasi nasional dengan dampak lanjutan yang dapat menyusul setelah bangsa bersatu?
- Berikan satu contoh primordialisme dan satu contoh etnosentrisme, lalu jelaskan mengapa keduanya mengancam integrasi.
- **Yang harus kuingat:** integrasi menyatukan tanpa menghapus; upaya yang baik menyasar akar, adil, dan menghormati martabat; akibat bagi integrasi selalu tentang hubungan antarkelompok.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 3.4: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-3.4

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kuis Akhir Bab 3

PPKN-KB3

Jumlah soal: 30 **Waktu anjuran:** 60 menit

Kerjakan sendiri dan berwaktu. Setelah selesai, cocokkan dengan kunci di Bagian D, isi tabel skor, lalu lihat anjuran di bawahnya.

Kerjakan Kuis Bab 3 di LMS

Skor dan progresmu tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-KB3

1. Setelah gempa bumi melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006, program Rekompak membangun kembali rumah warga dengan cara khusus. Warga membentuk kelompok masyarakat berisi beberapa keluarga yang bertetangga, mengelola sendiri dana hibah, menentukan urutan rumah yang dibangun lebih dulu, dan bergiliran bekerja dengan pendampingan fasilitator teknis.
Modal sosial yang tampak dalam cara tersebut adalah ....
Sumber: Bank Dunia (Java Reconstruction Fund, program Rekompak).

A. dana hibah yang cukup besar sehingga setiap keluarga mampu membeli bahan bangunan
B. rumah tahan gempa yang dibangun dengan bahan dan rancangan yang jauh lebih kuat
C. keahlian fasilitator yang mendampingi warga sepanjang pembangunan rumah
D. kepercayaan antaranggota dalam mengelola dana dan kebiasaan saling membantu
E. pengakuan lembaga internasional yang membuat program itu dikenal di banyak negara

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Dalam sebuah diskusi daring, seorang warganet berpendapat bahwa daerah yang penduduknya sangat beragam akan sulit membangun. Menurutnya, perbedaan suku, agama, dan bahasa membuat warga sulit diajak bekerja sama, sehingga daerah yang penduduknya seragam akan lebih cepat maju.
Penilaian yang paling tepat terhadap pendapat tersebut adalah ....

A. tepat, karena perbedaan suku dan agama pada dasarnya selalu menghambat kerja sama warga
B. tepat, sehingga daerah yang beragam perlu membatasi kedatangan pendatang dari luar daerah
C. kurang tepat, karena keragaman menjadi modal bila ada perjumpaan dan kerja sama yang setara
D. kurang tepat, karena keragaman dengan sendirinya selalu menjadi modal bagi pembangunan daerah
E. keliru, karena kemajuan sebuah daerah semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah

3. Di Kota Bandar Raya, paguyuban perantau Batak, Minang, Jawa, dan Flores masing-masing sangat solid: anggotanya rutin berkumpul dan saling membantu saat ada yang sakit atau berduka. Namun, antarpaguyuban hampir tidak pernah bekerja sama. Pada 2026, wali kota ingin menjadikan keragaman paguyuban itu modal sosial pembangunan kota.
Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Karena setiap paguyuban sudah solid, kota itu otomatis memiliki modal sosial pembangunan yang kuat.
☐ B. Ikatan erat di dalam setiap paguyuban merupakan modal sosial pengikat yang bermanfaat bagi anggotanya.
☐ C. Pembangunan kota membutuhkan forum yang menjembatani kerja sama di antara paguyuban-paguyuban itu.
☐ D. Paguyuban sebaiknya dibubarkan agar seluruh perantau melebur menjadi satu kelompok warga kota.
☐ E. Ikatan di dalam paguyuban menjadi masalah bila membuat setiap kelompok menutup diri dari yang lain.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Menjelang perayaan Waisak 2027, sebuah vihara di Kota Tanjung Sari akan menggelar kirab umat dari vihara menuju taman kota. Rute kirab melewati permukiman yang sebagian besar warganya beragama Islam dan Kristen. Pengurus remaja masjid dan pemuda gereja setempat berdiskusi tentang cara menyikapi kegiatan tersebut.
Tindakan yang mencerminkan toleransi aktif tanpa mencampuradukkan keyakinan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. ikut membacakan doa dan memimpin sebagian ritual kirab sebagai tanda persaudaraan
B. tetap berada di rumah dan tidak mengganggu jalannya kirab ketika umat Buddha lewat
C. membantu mengatur lalu lintas dan menjaga kebersihan rute selama kirab berlangsung
D. meminta pengurus vihara memindahkan rute kirab agar tidak melewati permukiman warga
E. mengusulkan agar kirab digabung dengan acara agama lain menjadi satu perayaan bersama

5. Di media sosial, banyak pelajar memperkenalkan diri dengan kalimat seperti "Aku orang Sasak, besar di Mataram, kuliah di Malang, dan bangga menjadi orang Indonesia." Sebagian warganet menanggapi bahwa menyebut asal suku seperti itu justru melemahkan rasa kebangsaan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang tanggapan warganet tersebut berdasarkan makna Bhinneka Tunggal Ika!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Untuk memperkuat rasa kebangsaan, seseorang sebaiknya berhenti menyebut asal sukunya.	○	○
Identitas suku dan daerah merupakan bagian dari identitas nasional, bukan saingannya.	○	○
Menyebut asal suku menjadi masalah bila dipakai untuk merendahkan kelompok lain.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Panitia peringatan HUT RI 2026 di Kelurahan Cempaka Baru memutuskan peserta pawai memakai pakaian adat daerah asal masing-masing keluarga, bukan seragam satu warna seperti tahun lalu. Beberapa warga memprotes karena barisan dinilai kurang kompak, tetapi panitia tetap pada keputusannya.
Alasan keputusan panitia sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pawai dengan pakaian adat lebih meriah sehingga menarik lebih banyak penonton dari luar
B. keragaman budaya warga tetap tampil ketika semua warga merayakan kemerdekaan bersama
C. setiap kelompok suku dapat berbaris terpisah menurut daerah asalnya di dalam pawai
D. pakaian adat memperlihatkan kelompok suku mana yang jumlah warganya paling banyak
E. warga yang memprotes dianggap tidak cinta budaya daerah sehingga pendapatnya diabaikan

7. Desa Tanjung Rejeki di Kalimantan Selatan dihuni warga keturunan Banjar, Jawa, Bugis, dan Dayak. Pada 2026, pemerintah kabupaten memeriksa beberapa keadaan desa itu untuk menilai apakah keragaman warganya sudah berfungsi sebagai modal sosial pembangunan.
Keadaan yang paling menunjukkan hal tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. petani berbagai suku saling meminjamkan alat tanpa jaminan dan bergiliran menjaga irigasi
B. desa itu meraih penghargaan desa terbaik tingkat provinsi dan sering diliput oleh media massa
C. hasil panen padi desa itu meningkat setelah pemerintah membagikan bibit unggul dan pupuk gratis
D. desa itu mendapat jalan beton baru dan gedung serbaguna dari dana pembangunan kabupaten
E. jumlah penduduk desa itu terus bertambah karena makin banyak pendatang dari berbagai pulau

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Pada 2026, pemuda dari enam komunitas agama di Kota Sungai Lestari membentuk paduan suara bersama untuk peringatan Sumpah Pemuda. Setiap pekan mereka berlatih menyanyikan lagu-lagu daerah secara bergiliran di gedung milik tiap komunitas, lalu makan bersama seusai latihan.
Alasan kegiatan tersebut dapat memperkukuh persatuan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. penampilan paduan suara itu menarik banyak penonton dan dikenal luas oleh warga kota
B. kegiatan itu membuka peluang penghasilan bagi anggota melalui undangan pentas berbayar
C. lagu-lagu daerah yang dinyanyikan makin dikenal sehingga tidak mudah dilupakan warga
D. latihan bersama menunjukkan bahwa semua ajaran agama sama sehingga perbedaan tidak perlu ada
E. latihan rutin di tempat yang bergiliran membuat anggota saling mengenal dan menghargai

9. Makin banyak pelajar mengikuti proyek kelompok daring bersama rekan dari berbagai daerah dan agama, misalnya lomba karya ilmiah atau program magang. Kerja sama seperti ini dapat menumbuhkan modal sosial, tetapi dapat juga berakhir dengan saling curiga bila anggotanya tidak bersikap tepat.
Sikap manakah yang dapat menjadi modal sosial dalam kerja sama tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Menepati pembagian tugas kepada semua anggota tim tanpa membedakan asal daerahnya.
☐ B. Bersikap ramah kepada rekan dari daerah lain terutama ketika sedang dinilai pembimbing.
☐ C. Mempelajari kebiasaan rekan dari daerah lain agar kerja sama tim berjalan lebih lancar.
☐ D. Mengajak rekan yang pendiam dari kelompok lain menyampaikan usulnya dalam rapat tim.
☐ E. Mengajak rekan sedaerah saja ketika membentuk tim baru agar suasana terasa lebih nyaman.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Pada 2026, pengurus sebuah kompleks yang warganya berbeda agama mengusulkan doa bersama setiap bulan dengan tata cara agama mayoritas yang wajib diikuti semua warga, agar warga makin kompak.
Penilaian yang paling tepat terhadap usulan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena doa bersama setiap bulan mempererat hubungan antarwarga kompleks
B. tepat, selama usulan itu disetujui oleh sebagian besar warga dalam rapat warga kompleks
C. kurang tepat, karena kegiatan keagamaan sama sekali tidak boleh diadakan di kompleks
D. tidak tepat, karena kebersamaan tidak dibangun dengan memaksakan satu tata ibadah
E. tidak tepat, karena urusan agama warga sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah

11. Dalam berbagai perdebatan publik, warga kerap mengeluarkan anggota yang berbeda pendapat dari grup percakapan, sehingga setiap grup hanya mendengar pendapat kelompoknya sendiri. Lama-kelamaan, kelompok-kelompok warga mudah saling curiga, dan sebagian masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan.
Peran Bhinneka Tunggal Ika yang paling tepat untuk menghadapi kecenderungan tersebut adalah ....

A. membiasakan warga berdialog lintas kelompok sambil tetap menghargai perbedaan pandangan
B. menyarankan warga hanya bergabung dengan grup kelompoknya sendiri agar tidak terpancing
C. menyeragamkan pendapat seluruh warga agar tidak ada lagi perbedaan pandangan di masyarakat
D. menyerahkan sepenuhnya penanganan perpecahan warga kepada pengelola aplikasi percakapan
E. mendorong warga keluar dari semua grup percakapan agar sama sekali terhindar dari perpecahan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Di sejumlah forum pemuda lintas agama, kepengurusan bertahun-tahun dipegang anggota dari kelompok terbesar. Usulan anggota dari kelompok kecil jarang dibahas, dan kegiatan lebih sering diadakan di tempat milik kelompok terbesar. Lama-kelamaan, anggota dari kelompok kecil jarang hadir dan forum kehilangan semangat kerja sama.
Langkah yang paling tepat agar keragaman anggota forum menjadi modal sosial adalah ....

A. membagi forum menjadi beberapa forum menurut agama agar setiap kelompok lebih leluasa
B. menambah dana kegiatan forum agar anggota dari kelompok kecil tertarik untuk hadir kembali
C. menggilir kepengurusan dan tempat kegiatan serta membahas setiap usulan secara terbuka
D. mewajibkan setiap anggota hadir di semua kegiatan dengan sanksi bagi anggota yang absen
E. mempertahankan susunan pengurus karena kelompok terbesar memang paling banyak anggotanya

13. Di banyak daerah, warga memiliki tradisi makan bersama dari satu hidangan besar setelah panen atau pada hari besar. Warga dari berbagai kampung dan golongan duduk melingkar tanpa membedakan status, memasak bersama sejak sehari sebelumnya, dan para tetua menyampaikan nasihat tentang hidup rukun. Sebagian pemerintah daerah menyebut tradisi seperti ini modal sosial pembangunan.
Alasan tradisi tersebut dapat menjadi modal sosial pembangunan adalah ....

A. tradisi itu menarik banyak wisatawan sehingga menambah pendapatan warga dan pemerintah daerah
B. tradisi itu telah ditetapkan sebagai agenda budaya resmi oleh pemerintah daerah setempat
C. tradisi itu melestarikan resep masakan khas daerah sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu
D. tradisi itu membuktikan bahwa budaya daerah setempat lebih unggul daripada budaya daerah lain
E. tradisi itu menjadi identitas bersama yang mempertemukan warga dan membangun kepercayaan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Di sejumlah perumahan baru di kota besar, penghuni cenderung bertetangga dengan keluarga yang seasal daerah atau seagama. Setiap kelompok mempunyai perkumpulan, arisan, dan perayaan sendiri, dan hampir tidak pernah ada kegiatan bersama antarkelompok. Karena belum pernah terjadi pertengkaran, banyak pengurus menyebut lingkungannya sudah rukun.
Penilaian yang paling tepat terhadap keadaan tersebut berdasarkan makna Bhinneka Tunggal Ika adalah ....

A. sudah sesuai, karena tidak adanya pertengkaran menunjukkan persatuan telah terwujud
B. belum sesuai, karena keragaman sudah diakui tetapi kebersamaan antarkelompok belum tumbuh
C. belum sesuai, karena setiap kelompok seharusnya melebur ke dalam satu kebiasaan yang sama
D. sudah sesuai, karena setiap kelompok bebas menjaga kebiasaan dan identitasnya masing-masing
E. belum sesuai, karena pengurus wajib memindahkan sebagian penghuni agar setiap blok bercampur

15. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pada 2026, orang tua siswa dari berbagai suku di sebuah SD membentuk forum untuk mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan yang aman di depan sekolah.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Forum orang tua lintas suku itu merupakan wujud hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif.	○	○
Keberhasilan forum itu banyak bergantung pada rasa saling percaya antaranggota yang berbeda suku.	○	○
Karena haknya dijamin UUD, forum itu boleh menutup jalan sampai usulannya dikabulkan.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Selama sepuluh tahun, warga lintas suku di Kompleks Griya Asri mengumpulkan kas bersama untuk perayaan hari besar dan santunan warga yang sakit. Pada 2026, bendahara kas membawa lari uang itu. Sejak itu, warga menolak setiap usulan kegiatan yang memerlukan iuran bersama, termasuk perbaikan saluran air kompleks.
Penilaian yang paling tepat tentang akibat peristiwa tersebut bagi modal sosial warga kompleks adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. kerugian warga hanya bersifat ekonomi dan pulih begitu uang kas itu dikembalikan
B. kepercayaan antarwarga rusak sehingga kerja sama dalam kegiatan lain ikut terganggu
C. peristiwa itu menunjukkan bahwa warga sesuku dengan bendahara tidak dapat dipercaya lagi
D. peristiwa itu membuktikan kas lintas suku rawan sehingga sebaiknya dipisah menurut suku
E. peristiwa itu tidak berpengaruh karena hanya urusan pribadi antara bendahara dan anggota

17. Sebuah video kerusuhan dari negara lain disebarkan ulang di media sosial dengan keterangan palsu, seolah-olah kejadian itu terjadi di sebuah kota di Indonesia dan dilakukan oleh pemeluk agama tertentu. Dalam beberapa jam, video itu dibagikan ribuan kali sebelum diluruskan oleh pemerintah setempat.
Akibat langsung penyebaran video tersebut bagi integrasi nasional adalah ....

A. harga kebutuhan pokok di kota itu naik karena warga takut keluar rumah untuk berbelanja
B. jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota itu menurun beberapa bulan berikutnya
C. bentrokan fisik antarkelompok warga terjadi di berbagai sudut kota pada hari berikutnya
D. jumlah pengguna media sosial di kota itu berkurang karena warga tidak percaya informasi
E. tumbuh prasangka dan kecurigaan terhadap pemeluk agama tertentu di antara warga kota

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota antara lain bertugas berdialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta menyampaikan rekomendasi kepada bupati/wali kota. Pada 2026, kegiatan dua rumah ibadah bertetangga pada malam yang sama membuat jalan macet dan jemaah sempat beradu mulut.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
FKUB yang mengundang pengurus kedua rumah ibadah untuk berdialog sedang menjalankan tugasnya.	○	○
FKUB berwenang langsung menutup salah satu rumah ibadah dan menjatuhkan sanksi kepada pengurusnya.	○	○
Kesepakatan jadwal dan pengaturan parkir hasil dialog lebih menjaga integrasi daripada saling menekan.	○	○

19. Dalam rapat pada awal 2026, warga Perumahan Bukit Indah sepakat membersihkan saluran air setiap Minggu pertama. Beberapa bulan kemudian, kehadiran menurun. Ketua RT lalu mengusulkan agar seluruh pekerjaan diserahkan kepada jasa kebersihan berbayar yang dibiayai iuran wajib, sementara warga cukup membayar.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan nilai dan prinsip gotong royong!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kesepakatan jadwal dalam rapat warga sesuai dengan prinsip musyawarah dalam gotong royong.	○	○
Usulan ketua RT tetap merupakan gotong royong karena seluruh biayanya ditanggung bersama warga.	○	○
Agar kehadiran naik, warga yang absen sebaiknya didenda tanpa perlu dimusyawarahkan lagi.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Dalam kunjungan belajar ke Tana Toraja pada 2026, beberapa siswa sebuah SMA dari Jakarta menyebut upacara adat yang mereka saksikan "aneh dan kuno" dibandingkan adat di daerah mereka. Ucapan itu terdengar oleh warga setempat yang sedang menyiapkan upacara.
Tindakan guru pendamping yang paling tepat adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menghukum siswa tersebut dengan memulangkannya lebih awal tanpa memberi penjelasan
B. mengajak siswa meminta maaf dan mempelajari makna upacara itu dari para tokoh adat
C. membatalkan semua kunjungan belajar ke daerah lain agar kejadian serupa tidak terulang
D. meminta warga menyederhanakan upacara adatnya agar lebih mudah dipahami pengunjung
E. membiarkan ucapan itu karena setiap siswa bebas menyampaikan pendapat pribadinya

21. Di banyak daerah tujuan transmigrasi, penduduk setempat dan pendatang dari berbagai pulau telah beberapa generasi hidup berdampingan. Sejumlah pemerintah daerah menjalankan program integrasi berupa forum adat lintas suku, kegiatan sekolah lintas budaya, dan musyawarah pembagian lahan yang adil.
Pernyataan manakah yang merupakan tujuan integrasi nasional dari program tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pertunjukan budaya yang menarik wisatawan.
☐ B. Menumbuhkan rasa senasib sebagai satu bangsa di antara penduduk setempat dan pendatang.
☐ C. Menjadikan seluruh warga memakai adat yang sama agar tidak ada lagi sekat antarsuku.
☐ D. Membangun kerja sama lintas suku tanpa menghapus adat yang dimiliki setiap kelompok.
☐ E. Mencegah tumbuhnya kecurigaan antarkelompok yang dapat memecah belah warga daerah itu.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Banyak RT di kota kini memakai aplikasi daring untuk mengumpulkan sumbangan kerja bakti dan mengatur jadwal ronda. Cara ini cepat dan praktis. Namun, sebagian warga lanjut usia tidak memiliki ponsel pintar, dan beberapa pengurus jarang melaporkan pemakaian dana karena merasa semua catatan sudah tersimpan di aplikasi.
Penyesuaian yang paling sesuai dengan nilai dan prinsip gotong royong adalah ....

A. memakai aplikasi sambil menyediakan cara lain untuk warga tanpa ponsel dan melaporkan dana
B. mewajibkan semua warga memakai aplikasi karena pencatatan digital sudah pasti lebih transparan
C. menghentikan aplikasi dan kembali ke cara lama karena teknologi tidak sesuai dengan gotong royong
D. mengganti kerja bakti dengan jasa kebersihan berbayar yang biayanya ditagih melalui aplikasi
E. mengumumkan di grup nama warga yang belum menyumbang agar semua warga segera ikut berpartisipasi

23. Warga RT 04 Kampung Sukamaju sepakat memperbaiki taman bermain anak pada suatu Minggu pagi tahun 2027. Seorang pengurus mengusulkan agar setiap kepala keluarga wajib mengangkat material selama empat jam, termasuk warga lanjut usia dan warga yang sedang sakit, supaya beban kerja sama rata.
Tanggapan yang paling sesuai dengan prinsip gotong royong adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menerima usulan itu karena gotong royong berarti setiap warga mengerjakan hal yang sama
B. menolak kerja bersama dan menyerahkan perbaikan taman kepada tukang yang dibayar warga
C. menerima usulan itu asalkan warga yang tidak hadir dikenai denda yang ditetapkan pengurus
D. menunda perbaikan taman sampai seluruh warga sanggup bekerja dengan jumlah jam yang sama
E. membagi tugas sesuai kemampuan, misalnya warga lanjut usia menyiapkan minuman dan alat

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Menjelang pemilihan ketua koperasi karyawan sebuah pabrik pada 2026, beredar ajakan di grup percakapan karyawan: "Pilih yang sekampung, jangan beri jabatan kepada orang luar daerah." Akibatnya, calon yang paling berpengalaman mengelola koperasi kalah karena berasal dari daerah lain.
Ancaman terhadap keberagaman yang paling tergambar dalam ilustrasi tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. primordialisme, karena ikatan daerah asal diutamakan melebihi kemampuan calon
B. etnosentrisme, karena budaya daerah lain dinilai lebih rendah daripada budaya sendiri
C. radikalisme, karena karyawan ingin mengubah aturan koperasi dengan jalan kekerasan
D. kesenjangan, karena karyawan dari daerah lain menerima penghasilan lebih kecil
E. separatisme, karena sebagian karyawan ingin memisahkan diri dari koperasi pabrik

25. Pada 2027, warga dua kampung bertetangga yang berbeda suku di Kecamatan Lembah Raya berselisih tentang batas padang penggembalaan. Beberapa pemuda saling mengejek di media sosial, lalu seorang warga terluka dalam perkelahian. Warga kedua kampung mulai saling curiga dan melarang anak-anaknya bermain bersama.
Upaya yang paling tepat dilakukan pemerintah kecamatan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. memasang pagar pemisah dan melarang warga kedua kampung saling berkunjung untuk sementara
B. menempatkan aparat di perbatasan kedua kampung sampai suasana tenang tanpa langkah lain
C. mempertemukan tokoh adat dan warga untuk menyepakati batas serta memproses hukum pelaku
D. meminta kampung yang warganya lebih sedikit mengalah dalam soal batas demi ketenangan
E. membagikan bantuan tunai kepada warga kedua kampung agar ketegangan di antara mereka segera reda

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

26. Kata gotong royong sering dipakai untuk menyebut berbagai kegiatan yang dikerjakan bersama-sama. Padahal, tidak semua kegiatan bersama memenuhi nilai dan prinsip gotong royong. Perhatikan beberapa kegiatan warga di sejumlah desa berikut.
Kegiatan manakah yang sesuai dengan nilai dan prinsip gotong royong? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

- ☐ A. Warga menyepakati jadwal kerja bakti dalam rapat, dan warga yang berhalangan menyumbang konsumsi secara sukarela.
- ☐ B. Pengurus desa dan kontraktor bersepakat menaikkan harga proyek jalan, lalu membagi selisihnya untuk kas bersama.
- ☐ C. Pemuda membersihkan makam umum bergiliran setiap bulan, dan catatan sumbangan alat ditempel di balai warga.
- ☐ D. Kerja bakti diadakan bersamaan dengan kampanye calon kepala desa, dan peserta wajib memakai kaus calon itu.
- ☐ E. Warga bersama-sama membangun kembali rumah keluarga korban kebakaran dengan tenaga sesuai kemampuan.

27. Dalam siaran daring sebuah ajang pencarian bakat menyanyi tingkat nasional, kolom komentar sering dipenuhi ejekan yang merendahkan suku dan daerah asal para peserta. Beberapa peserta mengaku tertekan, dan para pendukung saling membalas dengan ejekan yang makin kasar.
Upaya penyelenggara yang paling tepat untuk menghadapi masalah tersebut adalah ....

A. menutup kolom komentar secara permanen untuk semua siaran acara itu pada masa mendatang
B. menghentikan acara antardaerah itu agar pendukung dari berbagai daerah tidak bertemu
C. menghapus komentar yang merendahkan peserta unggulan saja agar suasana tetap kondusif
D. menegakkan larangan ujaran kebencian bagi semua dan mengajak peserta memberi teladan
E. menyerahkan seluruh penanganan komentar penonton kepada kepolisian tanpa langkah sendiri

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

28. Pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman damai hasil perundingan yang difasilitasi pihak ketiga. Isinya antara lain: GAM menyerahkan senjata, pemerintah memberi amnesti dan menarik pasukan nonorganik, Aceh boleh memiliki partai politik lokal, dan Aceh tetap berada dalam NKRI.
Pelajaran yang paling tepat dari peristiwa tersebut bagi integrasi nasional adalah ....
Sumber: Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM (2005); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

A. integrasi nasional paling cepat dijaga dengan mengandalkan kekuatan aparat keamanan
B. daerah yang pernah berkonflik harus melepaskan identitas lokalnya agar tetap bersatu
C. perdamaian terwujud karena penyelesaian konflik sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing
D. perundingan yang mendengar tuntutan para pihak dapat mengakhiri konflik di dalam NKRI
E. konflik bersenjata hanya dapat berakhir setelah salah satu pihak dikalahkan sepenuhnya

29. Merantau, sekolah bersama, dan perkawinan antarsuku membuat makin banyak keluarga Indonesia memiliki latar budaya campuran. Seorang anak, misalnya, dapat berayah Bugis dan beribu Sunda, besar di Batam, dan sehari-hari bercakap dalam bahasa Indonesia dengan teman dari berbagai daerah.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang integrasi nasional berdasarkan ilustrasi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Integrasi nasional baru berhasil bila keluarga campuran meninggalkan adat kedua orang tuanya.	○	○
Perjumpaan antarwarga melalui merantau dan sekolah bersama merupakan faktor pendorong integrasi.	○	○
Karena keluarga campuran makin banyak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi diperlukan.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

30. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Pada 2026, setelah video perkelahian yang melibatkan dua pemuda asal Kabupaten Wae Lestari tersebar, beberapa pemilik kos di Kota Pelita menolak semua calon penyewa yang berasal dari kabupaten itu. Upaya manakah yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Memindahkan semua mahasiswa asal kabupaten itu ke asrama khusus agar tidak terjadi gesekan.

☐ B. Mempertemukan pemilik kos dan perwakilan mahasiswa asal kabupaten itu dalam dialog bersama.

☐ C. Membiarkan penolakan itu karena setiap pemilik kos berhak memilih penyewa untuk rumahnya.

☐ D. Menempatkan aparat untuk berjaga di kawasan kos tanpa disertai langkah penyelesaian lain.

☐ E. Memproses hukum pelaku perkelahian secara perorangan tanpa menyalahkan seluruh warga daerahnya.

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	4, 5, 6, 8, 10, 11, 14	___ / 7	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16	___ / 9	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.3 · Nilai dan prinsip gotong royong	19, 22, 23, 26	___ / 4	Ulangi hlm. 222
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30	___ / 10	Ulangi hlm. 232

Skor 70 % atau lebih: lanjut ke bab berikutnya. Skor 50–69 %: ulangi sub bab pada tabel yang kurang dari separuh benar. Skor di bawah 50 %: baca ulang bab ini dari awal. (Angka ini anjuran belajar, bukan prediksi nilai TKA.)

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bab 4 · Komitmen terhadap NKRI

PPKN-B4

Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat:

- menghubungkan perilaku warga negara dengan upaya menjaga keutuhan NKRI
- menilai peristiwa dengan ciri bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial
- menerapkan Wawasan Nusantara, Sishankamrata, dan politik luar negeri bebas aktif pada kasus
- menjelaskan tujuan dan peran pelajar sebagai pelopor pemilih pemula serta menilai pengaruh IPTEK terhadap NKRI

Peta bab

Sub bab	Judul
4.1	Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI
4.2	Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial
4.3	Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4.4	Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
4.5	Peran Indonesia dalam perdamaian dunia
4.6	Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula
4.7	Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI

Bab 4 di LMS

Buka seluruh latihan bab ini di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-B4

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI

PPKN-4.1

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI**. Ini sub bab prioritas. Tiga soal asli 2025 menguji sub bab ini:

Soal asli	Yang diuji	Bentuk	Benar
No. 21	upaya terbaik melindungi NKRI dari penyebaran paham radikal	PG	31 %
No. 23	cara warga mengatasi tantangan disintegrasi	PG	39 %
No. 22	peran warga menghadapi arus produk luar negeri	Benar/Salah	72 %

Dua soal PG di atas sulit karena **semua pilihannya terdengar baik**. Yang membedakan adalah ketepatan upaya: menyentuh akar masalah dan sesuai dengan peran orang yang melakukannya.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida terhadap NKRI;
- menjelaskan bela negara fisik dan nonfisik beserta lima nilai dasarnya;
- membedakan peran warga dari tugas aparat negara;
- menilai hubungan sebuah perilaku dengan keutuhan NKRI dan memilih upaya terbaik.

◆ KONSEP INTI

Keutuhan negara tidak terjadi dengan sendirinya. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam agama serta bahasa. Keragaman itu adalah kekayaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan pihak yang ingin memecah belah. Karena itu, menjaga keutuhan **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** bukan hanya tugas tentara di perbatasan. Setiap warga ikut menjaganya lewat perilaku sehari-hari: cara belajar, cara bergaul, cara berdagang, sampai cara memakai media sosial. Sub bab ini menjelaskan apa yang mengancam keutuhan itu, apa arti bela negara, dan perilaku seperti apa yang benar-benar menjaganya.

1. NKRI sudah final: mengapa keutuhan harus dijaga

Keutuhan berarti negara tetap utuh: wilayahnya tidak terlepas, bangsanya tidak terpecah, dan kedaulatannya tidak dikuasai pihak lain. Bentuk negara kesatuan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika UUD diamandemen pada 1999–2002, para anggota MPR sepakat untuk tidak mengubah bentuk itu. Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 37 ayat (5) hasil Perubahan Keempat: *"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."*

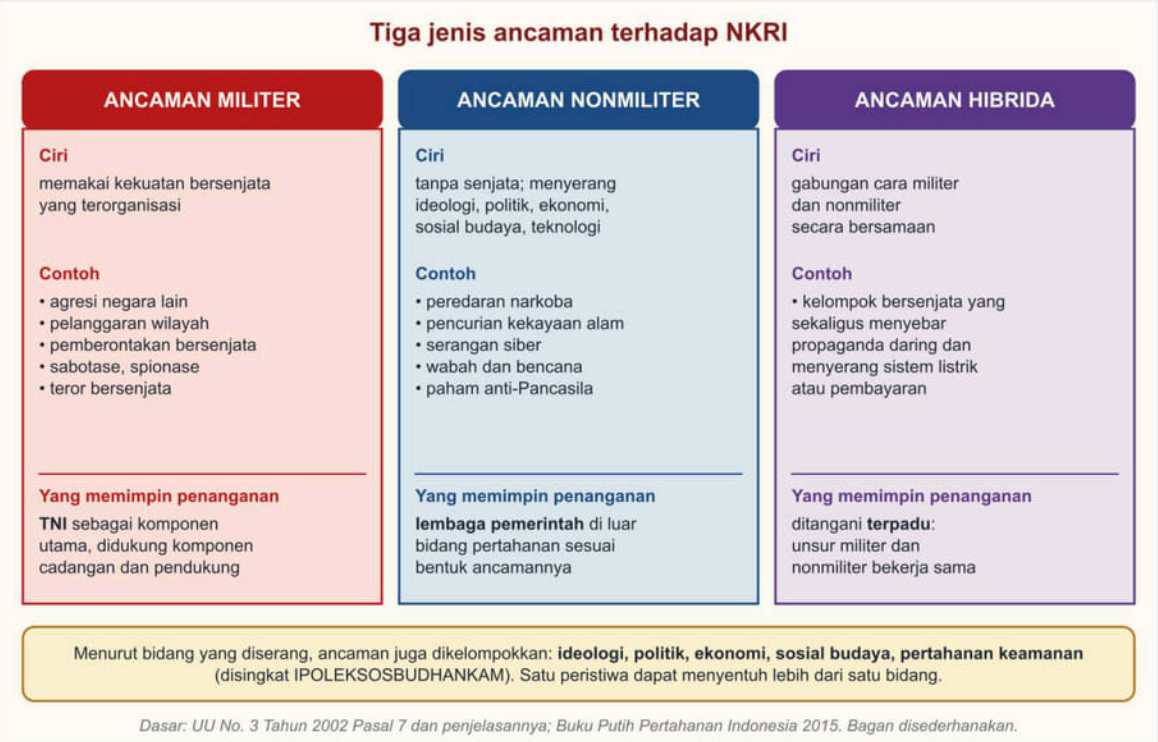
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Artinya, pasal lain dalam UUD boleh diubah melalui tata cara Pasal 37, tetapi bentuk negara kesatuan tidak. Itulah sebabnya NKRI sering disebut **sudah final**. Ketentuan ini lahir dari pengalaman sejarah. Pada 1949–1950 Indonesia pernah menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat), dan bentuk itu terbukti tidak sesuai dengan cita-cita persatuan, sehingga bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 (dibahas di sub bab 4.2).

Final bukan berarti selesai dijaga. Bentuk negara memang terkunci dalam UUD, tetapi keutuhan dalam kenyataan bergantung pada apakah warganya tetap merasa satu bangsa, apakah wilayahnya dijaga, dan apakah ancaman dapat ditangani.

2. Ancaman: militer, nonmiliter, dan hibrida

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, dari dalam maupun luar negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara membedakan dua jenis ancaman utama, dan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 yang diterbitkan Kementerian Pertahanan menambahkan jenis ketiga. Perhatikan Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tiga jenis ancaman terhadap NKRI beserta ciri, contoh, dan pihak yang memimpin penanganannya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ancaman militer memakai kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Penjelasan UU 3/2002 menyebut contohnya: agresi negara lain, pelanggaran wilayah, spionase (mata-mata), sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Menurut Pasal 7 ayat (2) undang-undang itu, ancaman militer dihadapi oleh **TNI sebagai komponen utama**, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ancaman nonmiliter tidak memakai senjata, tetapi menyerang sendi kehidupan bangsa.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bentuknya dapat berupa paham yang ingin mengganti Pancasila, ketergantungan ekonomi, pencurian kekayaan alam, peredaran narkoba, wabah, bencana, sampai serangan siber. Ancaman jenis ini sering lebih berbahaya justru karena tidak kelihatan seperti perang. Menurut Pasal 7 ayat (3), ancaman nonmiliter dihadapi oleh **lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan** sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancamannya. Narkoba, misalnya, dipimpin penanganannya oleh Badan Narkotika Nasional dan kepolisian, bukan oleh tentara.

Ancaman hibrida adalah gabungan keduanya yang dijalankan bersamaan. Contohnya kelompok bersenjata yang sekaligus menyebarkan propaganda di internet dan menyerang sistem listrik atau perbankan. Ancaman seperti ini harus dihadapi secara terpadu: unsur militer dan nonmiliter bekerja sama.

Ancaman juga dapat dikelompokkan menurut **bidang** yang diserang: **ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan**, yang sering disingkat **IPOLEKSOSBUDHANKAM**. Satu peristiwa bisa menyentuh beberapa bidang sekaligus. Kabar bohong yang mengadu domba suku, misalnya, menyerang bidang sosial budaya, tetapi bila memicu kerusuhan juga mengganggu keamanan.

3. Bela negara: hak dan kewajiban setiap warga

Menghadapi ancaman itu, UUD NRI 1945 tidak hanya mengandalkan aparat. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1) menegaskan hal serupa untuk usaha pertahanan dan keamanan. Kata "berhak" berarti negara tidak boleh menghalangi warga yang ingin membela negaranya; kata "wajib" berarti warga tidak boleh berpangku tangan.

Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga yang dijiwai kecintaan kepada NKRI untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bentuknya ada dua. Bela negara **fisik** dilakukan dengan kekuatan fisik dan, bila perlu, senjata, misalnya oleh prajurit TNI atau warga yang terpilih menjadi komponen cadangan. Bela negara **nonfisik** dilakukan tanpa senjata dan jauh lebih sering dijalankan: belajar sungguh-sungguh, bekerja jujur, taat hukum, menjaga kerukunan, menyaring informasi, dan mengharumkan nama bangsa. UU 3/2002 Pasal 9 ayat (2) menyebut jalur keikutsertaan warga, antara lain pendidikan kewarganegaraan dan **pengabdian sesuai profesi**. Seorang guru yang mengajar di daerah terpencil atau seorang perawat yang bertugas saat wabah sedang membela negara lewat profesinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merumuskan **lima nilai dasar bela negara** dalam Pasal 7 ayat (3). Gambar 4.2 memperlihatkan wujudnya dalam perilaku pelajar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.2 Lima nilai dasar bela negara menurut UU No. 23 Tahun 2019 dan contoh perilaku pelajar untuk setiap nilai. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

1. **Cinta tanah air**: mengenal, menghargai, dan merawat lingkungan, budaya, dan sejarah bangsa.
2. **Sadar berbangsa dan bernegara**: menyadari diri sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dan menaati aturan bersama.
3. **Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara**: menjadikan Pancasila pedoman dan menolak ajakan untuk menggantinya.
4. **Rela berkorban untuk bangsa dan negara**: mau menyisihkan waktu, tenaga, atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.
5. **Kemampuan awal bela negara**: memiliki kesiapan fisik dan mental, disiplin, serta keterampilan dasar, termasuk keterampilan memeriksa kebenaran informasi.

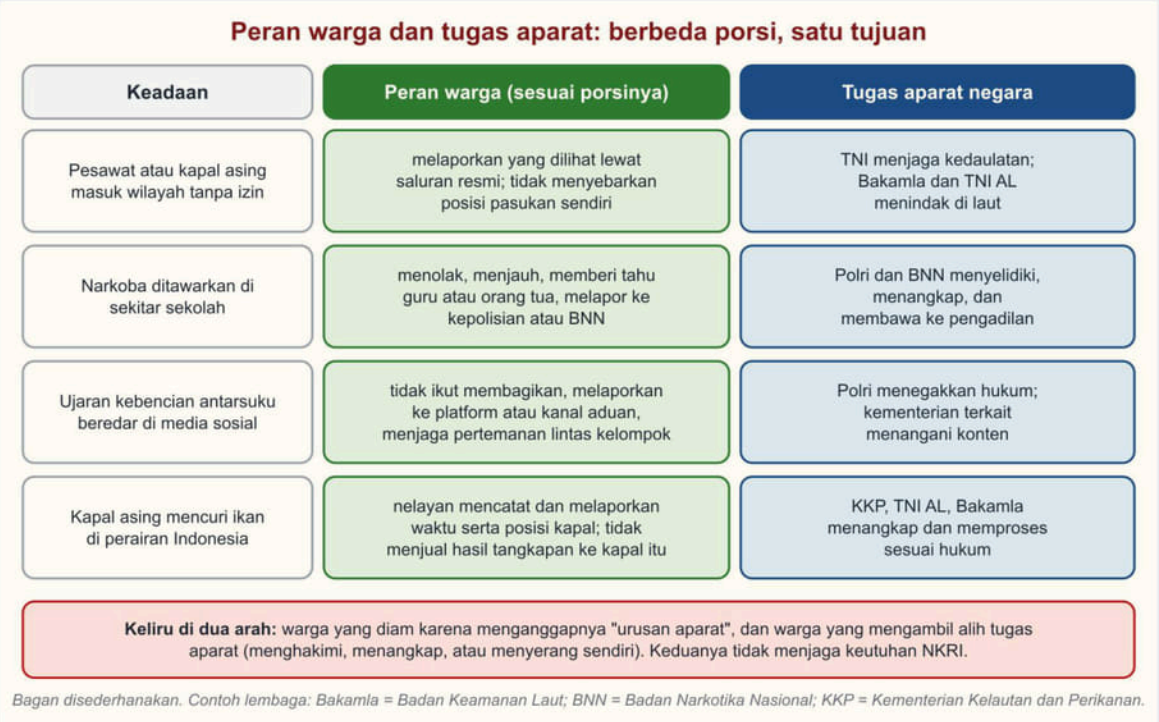
Kelima nilai itu saling terkait. Seorang siswa yang mengenal budaya daerah lain (nilai 1) lebih mudah menghargai teman yang berbeda asal (nilai 2), dan siswa yang terbiasa memeriksa kabar sebelum membagikannya (nilai 5) lebih sulit diadu domba.

4. Perilaku sesuai peran: warga bukan aparat

Setiap orang membela negara **sesuai perannya**. Pelajar menjaga keutuhan dengan belajar, bergaul tanpa membeda-bedakan, dan bijak di media sosial. Pedagang menjaganya dengan berdagang jujur dan tidak menimbun barang saat harga naik. Nelayan di pulau terluar menjaganya dengan melaporkan kapal asing yang mencuri ikan. Warganet menjaganya dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian.

Peran warga berbeda dari **tugas aparat**. Aparat negara (TNI, Polri, dan lembaga lain) diberi wewenang oleh undang-undang untuk menindak, menangkap, dan menegakkan hukum. Warga tidak memegang wewenang itu. Gambar 4.3 membandingkan keduanya dalam beberapa keadaan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.3 Peran warga sesuai porsinya dibandingkan dengan tugas aparat negara pada empat keadaan yang mengancam keutuhan NKRI. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Ada dua kekeliruan yang sama-sama tidak menjaga keutuhan. Kekeliruan pertama adalah **diam** karena menganggap semuanya "urusan aparat". Padahal ancaman nonmiliter seperti kabar bohong atau narkoba justru menyebar lewat warga yang tidak peduli. Kekeliruan kedua adalah **mengambil alih tugas aparat**: menghakimi orang yang dicurigai, menangkap sendiri, atau menyerang kelompok lain. Tindakan main hakim sendiri melanggar hukum dan sering memicu konflik baru yang lebih besar.

5. Upaya terbaik dan hubungan perilaku dengan keutuhan NKRI

Dalam menghadapi masalah, banyak upaya terdengar baik. Namun, tidak semua upaya sama kuatnya. Upaya yang **paling menyelesaikan** masalah biasanya memiliki tiga ciri.

Pertama, upaya itu **menyentuh akar masalah**, bukan hanya meredam gejalanya. Bila dua kelompok pelajar sering bentrok karena saling merendahkan asal daerah, penjagaan petugas dapat menghentikan bentrokan hari itu, tetapi prasangkanya tetap ada. Kegiatan bersama yang mempertemukan mereka menyentuh akar prasangka itu. Kedua, upaya itu **sesuai dengan peran pelakunya**. Pemerintah dapat membuat aturan dan menindak; sekolah dapat menyusun program; warga dapat mencegah, melapor, dan memberi contoh. Ketiga, upaya itu **berjangka panjang dan melibatkan banyak pihak**, sehingga membangun ketahanan, bukan reaksi sesaat. Tindakan tegas tetap perlu bila ada pelanggaran hukum, tetapi tindakan tegas saja jarang menghapus penyebabnya.

Perilaku warga juga harus dinilai dari **hubungannya** dengan keutuhan NKRI. Sebuah perilaku menjaga keutuhan bila hubungannya jelas: memperkuat persatuan, kedaulatan, ketahanan ekonomi, atau rasa memiliki terhadap bangsa. Rajin berolahraga itu baik, tetapi hubungannya dengan keutuhan negara jauh. Mengenal dan menghargai budaya teman dari

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

daerah lain hubungannya langsung, karena memperkuat rasa sebagai satu bangsa. Alasan di balik perilaku pun penting. Membeli produk dalam negeri karena ingin memperkuat usaha bangsa sendiri berhubungan dengan keutuhan; membelinya hanya karena kebetulan paling murah tidak menunjukkan sikap apa pun terhadap bangsa.

6. Peristiwa nyata: perilaku yang menjaga keutuhan

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II di Batavia (sekarang Jakarta), pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan Jong Celebes, berikrar mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat itu negara Indonesia belum ada. Yang ada adalah keputusan sekelompok anak muda untuk menempatkan persatuan di atas asal daerah masing-masing. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keutuhan bangsa dimulai dari **sikap warganya**, jauh sebelum ada tentara dan undang-undang.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, 14 Mei 2020. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah meresmikan gerakan ini untuk mendorong masyarakat membeli dan memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, terutama lewat perdagangan daring. Gerakan ini memperlihatkan bentuk bela negara di bidang **ekonomi**: ketergantungan berlebihan pada produk luar dapat melemahkan ketahanan ekonomi, sedangkan pilihan konsumen yang sadar ikut menopang lapangan kerja di berbagai daerah. Perannya ada pada semua pihak: pemerintah membuat program, pelaku usaha memperbaiki mutu, dan warga memilih dengan sadar.

Kedua peristiwa itu berbeda zaman, tetapi polanya sama: keutuhan dijaga ketika warga memilih perilaku yang memperkuat ikatan bersama, sesuai peran masing-masing.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Menggolongkan tiga ancaman

Pada 2026, di Provinsi Samudra Raya (fiktif) terjadi tiga peristiwa: (a) pesawat militer asing berulang kali terbang tanpa izin di atas sebuah pulau terluar; (b) jutaan lembar uang palsu beredar di pasar menjelang hari raya; (c) sebuah kelompok bersenjata merusak menara listrik sambil meretas sistem pembayaran pemerintah daerah dan menyebarkan video propaganda. Golongkan jenis ancamannya, tentukan siapa yang memimpin penanganan, lalu tentukan peran yang tepat bagi pelajar. *Kasus disusun untuk contoh; tempat fiktif.*

1. Periksa ada atau tidaknya **kekuatan bersenjata terorganisasi**. Peristiwa (a) memakai alat militer negara lain dan melanggar wilayah, jadi termasuk **ancaman militer**. Peristiwa (b) tidak memakai senjata dan menyerang bidang ekonomi, jadi termasuk **ancaman nonmiliter**. Peristiwa (c) memakai senjata sekaligus serangan siber dan propaganda, jadi termasuk **ancaman hibrida**.
2. Tentukan **unsur utama** penanganan. Untuk (a), TNI sebagai komponen utama. Untuk (b), lembaga di luar bidang pertahanan sesuai bentuk ancamannya: kepolisian menegakkan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

hukum dan Bank Indonesia sebagai otoritas peredaran uang. Untuk (c), penanganan terpadu: aparat bersenjata menghadapi kelompoknya, lembaga siber memulihkan sistem.

3. Tentukan **peran pelajar** sesuai porsinya: memeriksa keaslian uang yang diterima dan melaporkan uang yang diduga palsu ke bank atau polisi; tidak ikut menyebarkan video propaganda; melaporkan hal mencurigakan lewat saluran resmi. Pelajar tidak mengejar pelaku atau "menyerang balik" sistem orang lain.

Jawaban: (a) ancaman militer yang dihadapi TNI; (b) ancaman nonmiliter bidang ekonomi yang ditangani kepolisian dan Bank Indonesia; (c) ancaman hibrida yang ditangani terpadu; peran pelajar adalah waspada, memeriksa, menolak ikut menyebarkan, dan melapor lewat saluran resmi.

Contoh 2 — Kegiatan mana yang benar-benar menjaga keutuhan?

OSIS SMA Nusa Bakti (fiktif) menyiapkan peringatan Sumpah Pemuda 2026. Ada empat usulan: (A) lomba kebersihan kelas; (B) pameran "Kenali Nusantara" yang disusun tim campuran, dan setiap tim memperkenalkan daerah **lain**, bukan daerah asal anggotanya; (C) membagikan stiker bertuliskan semboyan kebangsaan kepada semua siswa; (D) lomba lari. Usulan mana yang paling memperkuat keutuhan NKRI? *Kasus disusun untuk contoh; sekolah fiktif.*

1. Ingat ukurannya: perilaku menjaga keutuhan bila **hubungannya jelas** dengan persatuan, kedaulatan, atau rasa memiliki terhadap bangsa.
2. Periksa (A) dan (D): bermanfaat bagi kebersihan dan kesehatan, tetapi hubungannya dengan persatuan bangsa jauh.
3. Periksa (C): semboyannya baik, tetapi membagikan stiker hanya menampilkan simbol. Tidak ada kegiatan yang membuat siswa saling mengenal atau mengubah prasangka.
4. Periksa (B): siswa yang berbeda asal bekerja dalam satu tim (memperkuat rasa sebagai satu bangsa), dan mereka mempelajari daerah lain (nilai **cinta tanah air** dan **sadar berbangsa**). Kegiatan ini meniru semangat 1928: menempatkan persatuan di atas asal daerah.

Jawaban: usulan (B), karena menyentuh langsung rasa persatuan lewat kerja sama lintas daerah dan pengenalan budaya daerah lain, sedangkan usulan lain baik tetapi hubungannya dengan keutuhan NKRI tidak langsung.

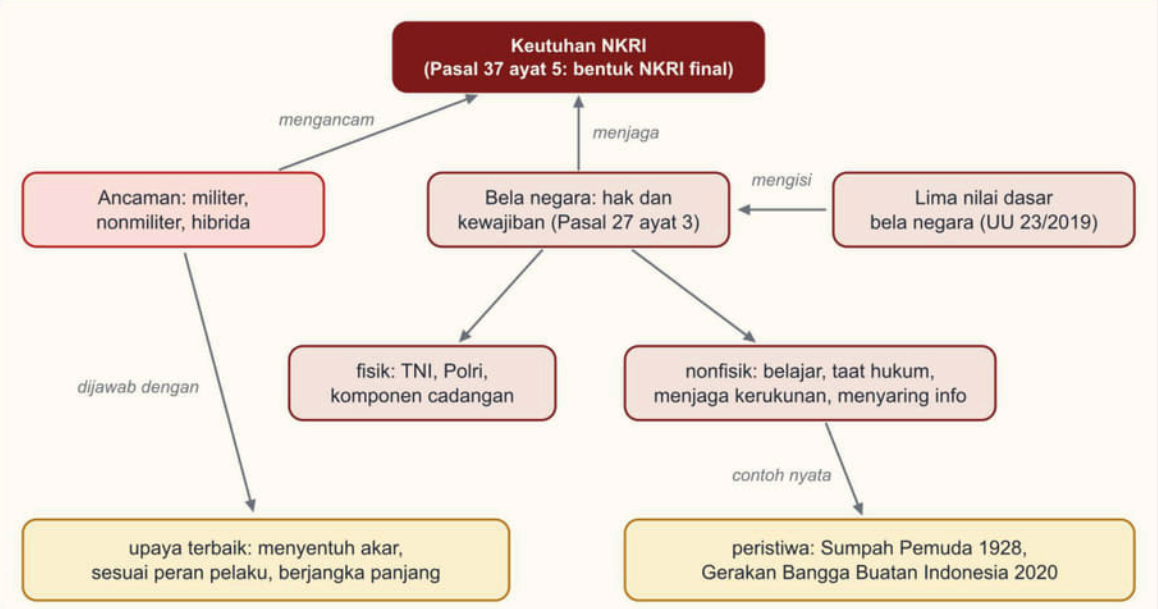
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Bentuk NKRI tidak dapat diubah (Pasal 37 ayat 5), tetapi keutuhannya tetap harus dijaga warga.
- Ancaman ada tiga jenis: **militer** (TNI memimpin), **nonmiliter** (lembaga sesuai bentuk ancaman memimpin), dan **hibrida** (ditangani terpadu).
- Bela negara adalah hak dan kewajiban (Pasal 27 ayat 3); bentuknya fisik dan nonfisik; nilainya lima (UU 23/2019).
- Warga berperan sesuai porsinya: tidak diam, tetapi juga tidak mengambil alih tugas aparat.
- Upaya terbaik menyentuh akar, sesuai peran pelaku, dan berjangka panjang; perilaku dinilai dari hubungannya dengan keutuhan bangsa.

Bagan pada Gambar 4.4 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.4 Peta konsep perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan ancamannya**: militer, nonmiliter, atau hibrida, dan di bidang apa.
2. **Tentukan pelakunya**: soal bertanya tentang warga, pelajar, sekolah, atau pemerintah?
3. **Cari akar masalah** di stimulus, lalu pilih upaya yang menyasarnya.
4. **Untuk Benar/Salah**, baca alasan di akhir pernyataan.

Petunjuk cepat membaca kasus:

Kasus menunjukkan ...	Konsep
kekuatan bersenjata terorganisasi	ancaman **militer**
paham, ekonomi, kabar bohong, siber, narkoba	ancaman **nonmiliter**
belajar, taat hukum, menjaga kerukunan	bela negara **nonfisik**
menghilangkan penyebab, sesuai peran, jangka panjang	**upaya terbaik**
hanya meredam akibat sesaat	upaya yang menyasar **gejala**

Jebakan yang sering dipasang:

- **Upaya yang menyasar gejala.** Upaya yang meredam akibat sesaat dikira upaya terbaik.
- **Upaya yang bukan porsi pelaku.** Tugas aparat atau pemerintah dipilih untuk pertanyaan tentang peran warga.
- **Upaya yang baik, tetapi menjawab masalah lain.** Periksa apakah upaya itu benar-benar menjawab ancaman di stimulus.
- **Alasan yang tidak berhubungan dengan bangsa.** Tindakannya benar, tetapi alasannya tidak menyentuh kepentingan bersama.

> Contoh salah tafsir: dua SMA di sebuah kota sering tawuran karena saling mengejek asal daerah siswanya. Seorang siswa menjawab bahwa upaya terbaik adalah "menambah patroli polisi di jam pulang sekolah". Patroli meredam bentrokan, tetapi akarnya adalah prasangka antarkelompok. Upaya yang lebih tepat: mempertemukan kedua sekolah dalam kegiatan bersama dan dialog, didampingi guru dan tokoh masyarakat.

● BEDAH SOAL ASLI

Tiga soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Ketiganya ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana.

Nomor 21 (paham radikal di media sosial, PG, 31 % benar). Stimulus menyebut paham radikal yang menyebar di media sosial dan menimbulkan konflik di masyarakat. Kamu diminta memilih **upaya terbaik** melindungi keutuhan NKRI.

- Konsep kunci: ciri upaya terbaik (bagian 5).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- Langkah: tanyakan "di mana akar masalahnya?", lalu periksa setiap pilihan dengan tiga ciri upaya terbaik.
- Pengecoh yang dipasang: beberapa pilihan memang bermanfaat, tetapi tidak semuanya menyelesaikan akar masalah.

Rujukan: soal nomor 21 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 23 (tantangan disintegrasi, PG, 39 % benar). Stimulus menyebut tiga pemicu disintegrasi di negara kepulauan yang beragam. Kamu diminta menentukan **cara warga negara** mengatasinya.

- Konsep kunci: peran warga sesuai porsinya (bagian 4) dan upaya yang menyentuh pemicu yang disebut (bagian 5).
- Langkah: daftar dulu pemicu dalam stimulus, lalu pilih cara yang menjawab pemicu itu secara langsung.
- Pengecoh yang dipasang: cara yang terdengar aman, tetapi tidak menjawab pemicu yang disebut stimulus.

Rujukan: soal nomor 23 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

Nomor 22 (produk luar negeri, Benar/Salah, 72 % benar). Kamu menilai tiga pernyataan tentang peran warga dalam menghadapi arus produk luar negeri.

- Konsep kunci: alasan di balik perilaku sama pentingnya dengan tindakannya (bagian 5).
- Langkah: untuk setiap pernyataan, tanyakan "apakah alasannya berhubungan dengan kekuatan ekonomi bangsa?".
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang baru dapat dinilai setelah alasannya dibaca sampai habis.

Rujukan: soal nomor 22 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pisahkan perkara pelaku (urusan aparat) dari prasangka antarkelompok (porsi warga); pilih upaya yang menyentuh akar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pada 2026, perkelahian dua mahasiswa di sebuah warung di Kota Tirtanadi berawal dari salah paham soal parkir. Videonya beredar dengan judul yang menyebut suku salah satu mahasiswa, lalu muncul seruan di grup warga agar mahasiswa asal daerah itu diusir dari asrama di lingkungan mereka. Ketua RW diminta warga segera mengambil sikap. Langkah ketua RW yang paling tepat untuk menjaga keutuhan NKRI adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mengumpulkan tanda tangan warga agar pengelola asrama memulangkan mahasiswa asal daerah itu
B. meminta warga tenang dan menyerahkan seluruh urusan kepada polisi tanpa ikut berbuat apa pun
C. menyerahkan perkara pelaku kepada polisi dan mempertemukan warga dengan pengurus asrama
D. meminta penghuni asrama menjaga diri sendiri karena warga sekitar sedang marah kepada mereka
E. membentuk regu ronda yang memeriksa setiap mahasiswa dari daerah itu saat keluar asrama

Pembahasan **Kunci: C**

Konsep: upaya terbaik menjaga keutuhan NKRI **menyentuh akar masalah**, **sesuai peran pelakunya**, dan tidak menimbulkan konflik baru. Warga berperan mencegah, meluruskan, dan melapor; menindak pelaku adalah tugas aparat.

Langkah 1 – Kenali masalahnya. Perkelahian pribadi soal parkir berubah menjadi isu suku karena judul video. Akar yang berbahaya adalah **prasangka antarkelompok** yang dipicu judul itu.
Langkah 2 – Kenali peran pelaku. Ketua RW adalah tokoh warga, bukan aparat: ia dapat menyerahkan perkara kepada polisi dan mempertemukan pihak-pihak yang bersitegang.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — menghukum seluruh kelompok atas perbuatan satu orang; justru memperdalam prasangka.
• B ✗ — "urusan aparat saja": perkara pidananya memang urusan polisi, tetapi prasangka di antara warga dibiarkan.
• C ✓ — perkara pelaku ditangani pihak berwenang, sedangkan dialog warga dan pengurus asrama meredakan prasangka yang menjadi akar ketegangan.
• D ✗ — memindahkan kewajiban menjaga kerukunan kepada pihak yang terancam.
• E ✗ — pemeriksaan khusus terhadap satu kelompok adalah diskriminasi dan mengambil alih tugas aparat.

Cek ulang: hanya C yang menangani pelaku lewat jalur hukum sekaligus menyentuh prasangka antarkelompok.

Jawaban: C.

Jebakan: B terdengar taat hukum, tetapi warga tidak boleh diam ketika prasangka menyebar; E terdengar menjaga keamanan, padahal menyasar satu kelompok.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✎ LATIHAN

1. Pada 2026, Yosua, siswa SMA di sebuah kecamatan yang berbatasan darat dengan negara tetangga, diminta pamannya ikut mengangkut gula dan minyak goreng dari seberang batas. Barang itu dibawa lewat jalan setapak yang tidak melewati pos lintas batas, karena harganya jauh lebih murah. Yosua menolak permintaan itu.
Alasan penolakan yang paling menunjukkan perilaku menjaga keutuhan NKRI adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. jalan setapak itu berbahaya bagi keselamatan dirinya dan pamannya bila dilalui malam hari
B. barang yang masuk tanpa pemeriksaan melemahkan kedaulatan negara dan usaha dalam negeri
C. membeli barang buatan luar negeri dalam keadaan apa pun berarti tidak mencintai tanah air
D. urusan barang di perbatasan adalah tugas aparat sehingga warga tidak boleh mendekati batas
E. barang dari seberang batas belum tentu aman dikonsumsi karena tanggal kedaluwarsanya tak jelas

2. Konten komedi yang menirukan logat daerah secara berlebihan lalu menjadikannya bahan tertawaan sering ramai ditonton di media sosial. Sebagian penonton dari daerah yang ditiru merasa direndahkan, sedangkan pembuat konten beralasan semuanya "hanya hiburan". Di kolom komentar, warganet dari berbagai daerah pun mulai saling mengejek. Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hubungan fenomena tersebut dengan keutuhan NKRI!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Karena dibuat untuk hiburan, konten itu tidak berkaitan dengan keutuhan NKRI.	○	○
Ejekan terhadap logat daerah dapat menumbuhkan prasangka dan melemahkan rasa sebagai satu bangsa.	○	○
Penonton yang tidak ikut membagikan konten itu dan menegur pembuatnya dengan santun menjalankan bela negara nonfisik.	○	○

Kunci singkat: 1. B 2. 1S 2B 3B

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Sebutkan satu ancaman nonmiliter di bidang ekonomi dan satu di bidang sosial budaya, lalu jelaskan siapa yang memimpin penanganannya dan apa peran pelajar.
- Mengapa upaya yang hanya meredam akibat sesaat belum tentu upaya terbaik? Berikan satu contoh dari lingkunganmu.
- **Yang harus kuingat:** upaya terbaik menyentuh akar, sesuai peran pelakunya, dan berjangka panjang; pada Benar/Salah, periksa alasannya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.1: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.1

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.2 · Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial

PPKN-4.2

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia**. Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi menjadi dasar banyak soal: kamu diminta **memakai ciri** negara kesatuan, republik, dan sistem presidensial untuk menilai sebuah peristiwa atau usulan.

Soal jenis ini jarang menanyakan definisi. Yang ditanyakan adalah: "dapatkah peristiwa ini terjadi di Indonesia?" atau "tanggapan mana yang paling tepat berdasarkan UUD?".

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- membedakan negara kesatuan dan negara federal, serta monarki dan republik;
- menjelaskan perjalanan bentuk negara Indonesia dari RIS kembali ke NKRI;
- menjelaskan ciri sistem presidensial menurut UUD NRI 1945 dan membandingkannya dengan sistem parlementer;
- menentukan pengisian jabatan bila presiden atau wakil presiden berhalangan.

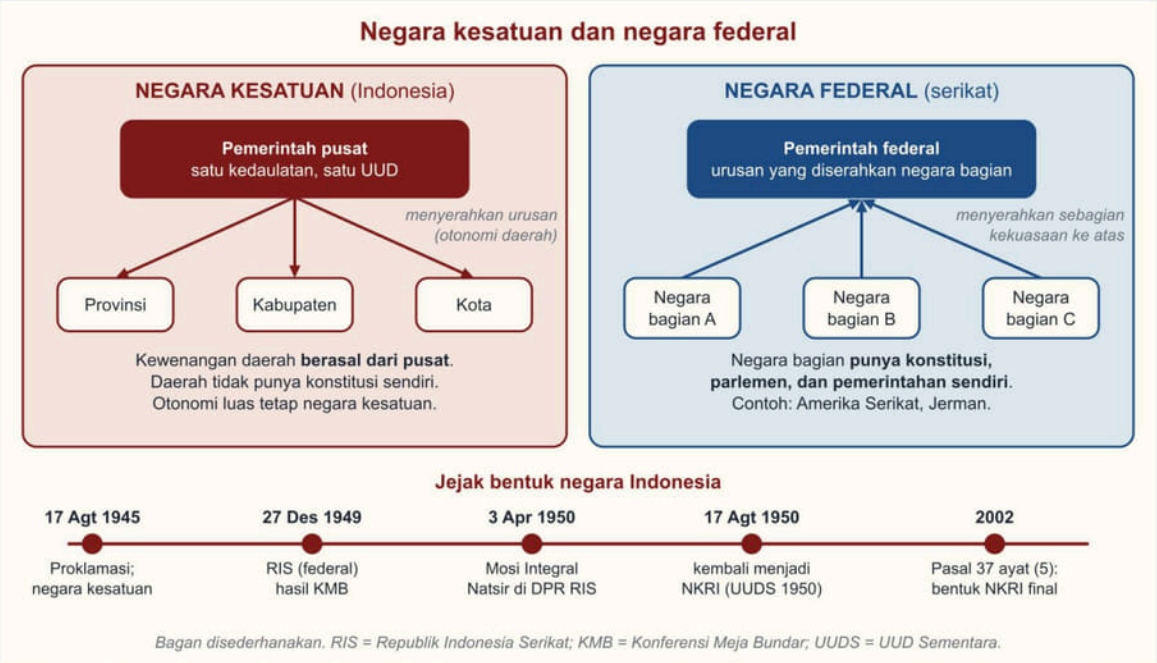
◆ KONSEP INTI

Setiap negara harus menjawab tiga pertanyaan dasar. Pertama, bagaimana kekuasaan dibagi antara pusat dan daerah? Jawabannya disebut **bentuk negara**. Kedua, bagaimana kepala negara diangkat? Jawabannya disebut **bentuk pemerintahan**. Ketiga, bagaimana hubungan antara pemegang kekuasaan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat? Jawabannya disebut **sistem pemerintahan**. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menjawab dua pertanyaan pertama dalam satu kalimat: Negara Indonesia ialah **Negara Kesatuan**, yang berbentuk **Republik**. Pertanyaan ketiga dijawab oleh pasal-pasal tentang Presiden dan DPR, yang menunjukkan bahwa Indonesia memakai **sistem presidensial**.

1. Bentuk negara: kesatuan atau federal

Dalam **negara kesatuan**, hanya ada satu kedaulatan, yaitu kedaulatan negara yang dijalankan pemerintah pusat. Ada satu UUD, satu lembaga pembentuk undang-undang nasional, dan satu sistem hukum. Daerah tetap boleh mengurus banyak hal sendiri, tetapi kewenangannya **berasal dari pusat** yang menyerahkannya lewat undang-undang. Dalam **negara federal** (serikat), sebaliknya, negara-negara bagian sudah memiliki kekuasaan sendiri: konstitusi sendiri, parlemen sendiri, dan pemerintahan sendiri. Negara-negara bagian itu lalu menyerahkan sebagian urusan, misalnya pertahanan dan hubungan luar negeri, kepada pemerintah federal. Amerika Serikat dan Jerman adalah contoh negara federal. Lihat Gambar 4.5.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.5 Perbedaan arah pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan dan negara federal, serta jejak bentuk negara Indonesia 1945–2002. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Indonesia menjalankan **otonomi daerah** (Pasal 18). Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur urusan pemerintahan sendiri, memiliki DPRD, dan memilih kepala daerah. Namun, otonomi seluas apa pun **tidak mengubah** Indonesia menjadi negara federal. Perhatikan arah panah pada Gambar 4.5: pada negara kesatuan, kewenangan mengalir dari pusat ke daerah; pada negara federal, kewenangan mengalir dari negara bagian ke pusat. Daerah otonom di Indonesia tidak membuat UUD sendiri, dan pembentukan atau penghapusan daerah ditetapkan dengan undang-undang nasional.

2. Peristiwa nyata: dari RIS kembali ke NKRI

Indonesia pernah mencoba bentuk federal. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam bentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, yang berlaku sejak **27 Desember 1949**. RIS terdiri atas beberapa negara bagian, antara lain Negara Republik Indonesia (berpusat di Yogyakarta), Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Sumatra Timur, ditambah sejumlah satuan kenegaraan lain. Banyak negara bagian itu dibentuk pada masa Belanda berusaha kembali berkuasa, sehingga rakyat di berbagai daerah memandangnya sebagai warisan siasat memecah belah.

Tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan muncul dari banyak daerah. Puncaknya terjadi di parlemen RIS. Pada **3 April 1950**, Mohammad Natsir, ketua Fraksi Masyumi, menyampaikan **Mosi Integral**: usul agar seluruh negara bagian dilebur kembali menjadi satu negara kesatuan melalui jalan konstitusional, bukan dengan kekerasan. Parlemen menerima mosi itu, dan pemerintah RIS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta menjadikannya pedoman. Setelah perundingan antara RIS dan Republik Indonesia, pada **17 Agustus 1950** RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia** dengan UUD Sementara

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

1950.

Peristiwa ini mengajarkan dua hal. Pertama, bentuk kesatuan dipilih karena paling sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa yang beragam. Kedua, perubahan besar dapat ditempuh secara damai lewat lembaga perwakilan. Pengalaman inilah yang kemudian dikunci dalam **Pasal 37 ayat (5)**: bentuk NKRI tidak dapat diubah.

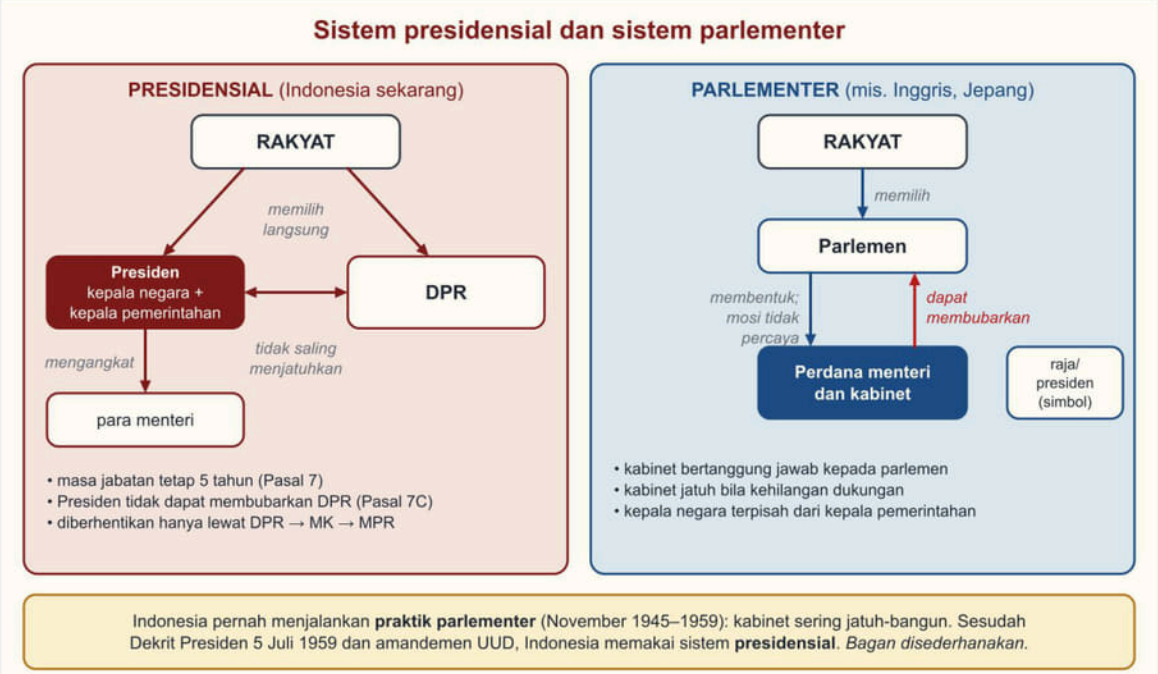
3. Bentuk pemerintahan: republik

Bentuk pemerintahan dibedakan menurut cara kepala negara diangkat. Dalam **monarki** (kerajaan), kepala negara adalah raja atau ratu yang jabatannya diwariskan dan biasanya seumur hidup. Dalam **republik**, kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu. Kata *republik* berasal dari bahasa Latin *res publica*, "urusan umum": negara dipandang sebagai milik bersama, bukan milik satu keluarga.

Indonesia adalah republik. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama (Pasal 7). Karena itu, gagasan "presiden menjabat seumur hidup" atau "jabatan presiden diwariskan kepada anaknya" bertentangan dengan bentuk republik. Perlu diingat juga bahwa ada monarki yang demokratis, seperti Inggris, Belanda, dan Jepang. Di sana raja atau kaisar hanya menjadi simbol, sedangkan pemerintahan dijalankan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

4. Sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer

Dua sistem pemerintahan yang paling banyak dipakai adalah sistem presidensial dan sistem parlementer. Gambar 4.6 membandingkan keduanya.



Gambar 4.6 Perbandingan hubungan rakyat, kepala pemerintahan, dan parlemen dalam sistem presidensial dan sistem parlementer. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Dalam **sistem parlementer**, rakyat memilih anggota parlemen. Partai atau gabungan partai yang menguasai mayoritas parlemen membentuk kabinet yang dipimpin **perdana menteri**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kabinet **bertanggung jawab kepada parlemen**: bila parlemen menyatakan **mosi tidak percaya**, kabinet jatuh dan harus diganti. Sebaliknya, kepala pemerintahan dapat meminta parlemen dibubarkan dan pemilu dipercepat. Kepala negara (raja atau presiden) terpisah dari kepala pemerintahan dan berperan sebagai simbol.

Dalam **sistem presidensial**, rakyat memilih presiden dan anggota parlemen secara terpisah. Presiden menjadi **kepala negara sekaligus kepala pemerintahan**, menjabat untuk masa yang tetap, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena keduanya sama-sama dipilih rakyat, presiden dan parlemen **tidak saling menjatuhkan**.

Indonesia pernah merasakan sistem parlementer. Sejak Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kabinet dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada masa UUD Sementara 1950, sistem parlementer berlaku penuh, dan dalam sembilan tahun Indonesia berganti tujuh kabinet, dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Djuanda. Kabinet sering jatuh sebelum programnya berjalan. Pengalaman ketidakstabilan ini menjadi salah satu latar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.

Kedua sistem punya kelebihan dan kelemahan. Sistem parlementer cepat menanggapi kehendak parlemen: pemerintah yang kehilangan dukungan dapat diganti tanpa menunggu akhir masa jabatan. Kelemahannya, pemerintahan mudah goyah bila partai-partai di parlemen terus berselisih, seperti yang dialami Indonesia pada 1950-an. Sistem presidensial lebih stabil karena masa jabatan presiden pasti, sehingga program pembangunan dapat dijalankan sampai selesai. Kelemahannya, bila presiden dan DPR berbeda pendapat, keputusan bisa tertunda lama karena tidak ada jalan pintas untuk mengganti pemerintah. Karena itu, sistem presidensial bergantung pada kemampuan kedua lembaga untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan.

5. Ciri sistem presidensial dalam UUD NRI 1945

Amandemen UUD 1999–2002 mempertegas sistem presidensial. Ciri-cirinya tersebar di beberapa pasal:

Ciri	Dasar
presiden memegang kekuasaan pemerintahan (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan)	Pasal 4 ayat (1)
presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan	Pasal 6A ayat (1)
masa jabatan tetap lima tahun, dapat dipilih kembali satu kali	Pasal 7
menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden	Pasal 17 ayat (2)
presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR	Pasal 7C
presiden hanya dapat diberhentikan karena pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat, melalui DPR → MK → MPR	Pasal 7A dan 7B

Pasal 7C punya latar sejarah. Pada Maret 1960, setelah DPR hasil Pemilu 1955 menolak

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

rancangan anggaran pemerintah, Presiden Soekarno membubarkan DPR itu dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk. Para perumus amandemen tidak ingin hal serupa terulang: lembaga yang dipilih rakyat tidak boleh dibubarkan oleh presiden.

Sebaliknya, DPR juga **tidak dapat menjatuhkan presiden** hanya karena tidak setuju dengan kebijakannya. Pemberhentian hanya mungkin bila presiden diduga melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, dan dugaan itu harus diuji dulu secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi (alurnya dibahas di sub bab 2.3).

Tidak saling menjatuhkan bukan berarti tidak saling mengawasi. DPR tetap memegang **fungsi pengawasan** dengan hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (menyelidiki), dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A). Bila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (Pasal 23 ayat 3), bukan membubarkan DPR atau mundur.

6. Pengisian jabatan bila presiden atau wakil presiden berhalangan

Karena masa jabatan presiden tetap, UUD mengatur dengan rinci apa yang terjadi bila jabatan itu kosong di tengah jalan (Pasal 8):

Keadaan	Yang terjadi	Dasar
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya	wakil presiden menggantikan sampai habis masa jabatan	Pasal 8 ayat (1)
jabatan wakil presiden kosong	paling lambat 60 hari, MPR bersidang memilih wakil presiden dari **dua calon yang diusulkan presiden**	Pasal 8 ayat (2)
presiden dan wakil presiden berhalangan bersamaan	Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan menjalankan tugas bersama-sama; paling lambat 30 hari MPR memilih pengganti dari dua pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya	Pasal 8 ayat (3)

Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden. Pada Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat MPR menjadi presiden, sehingga kursi wakil presiden kosong. Pada **26 Juli 2001**, MPR memilih **Hamzah Haz** sebagai wakil presiden. Saat itu pemilihannya masih dilakukan MPR di antara beberapa calon. Pengalaman tersebut ikut melatarbelakangi rumusan Pasal 8 hasil amandemen yang lebih rinci: sekarang calonnya dua orang usulan presiden, dan ada batas waktu yang jelas.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▣ CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Kursi wakil presiden kosong

Dalam sebuah simulasi sidang kelas tahun 2027, diceritakan bahwa wakil presiden mengundurkan diri karena sakit berat. Tiga siswa berpendapat: Andi, "Jabatan itu dibiarkan kosong sampai pemilu berikutnya"; Bella, "Presiden langsung menunjuk wakil presiden baru"; Citra, "Pemilu ulang harus segera digelar". Pendapat mana yang sesuai dengan UUD NRI 1945? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. Tentukan **jabatan yang kosong**: wakil presiden saja, sedangkan presiden tetap menjabat.
2. Cari **pasal yang mengatur keadaan itu**: Pasal 8 ayat (2), kekosongan wakil presiden.
3. Baca isinya: paling lambat **60 hari**, **MPR** bersidang memilih wakil presiden dari **dua calon yang diusulkan presiden**.
4. Uji ketiga pendapat. Andi keliru, karena UUD memberi batas waktu 60 hari. Bella keliru sebagian: presiden memang berperan, tetapi hanya **mengusulkan dua calon**; yang **memilih** adalah MPR. Citra keliru, karena dalam sistem presidensial masa jabatan tetap, dan UUD tidak mengenal pemilu ulang untuk mengisi kekosongan wakil presiden.

Jawaban: tidak ada pendapat yang tepat; menurut Pasal 8 ayat (2), presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong.

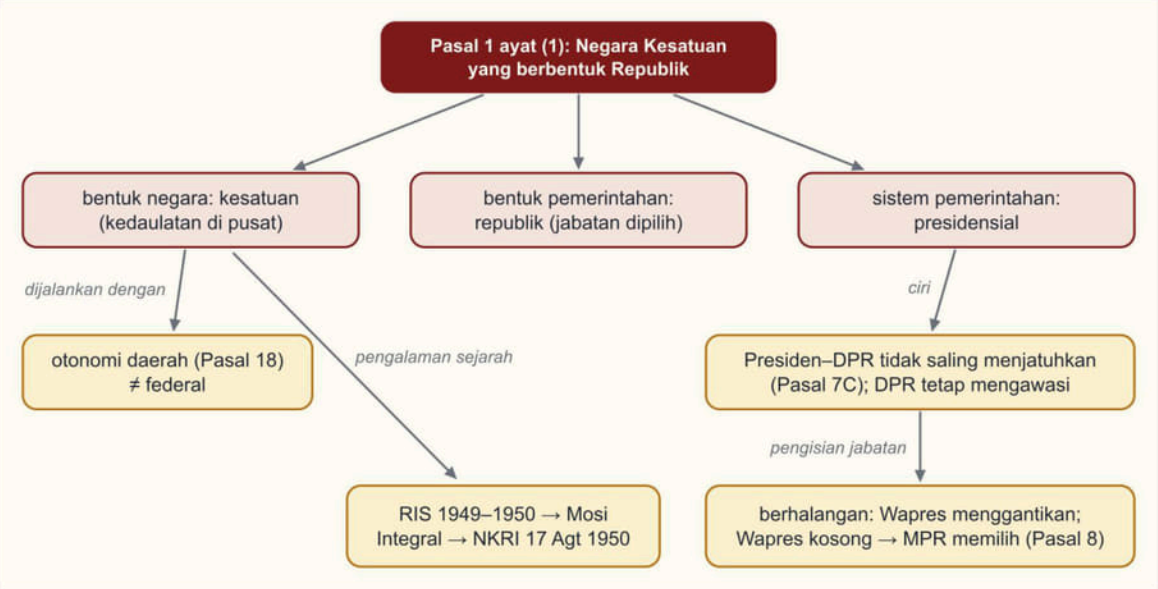
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Pasal 1 ayat (1): Indonesia negara **kesatuan** berbentuk **republik**; sistem pemerintahannya **presidensial**.
- Otonomi daerah yang luas tetap negara kesatuan, karena kewenangan daerah berasal dari pusat.
- RIS (27 Desember 1949) kembali menjadi NKRI (17 Agustus 1950) melalui Mosi Integral Natsir (3 April 1950); bentuk NKRI kini tidak dapat diubah (Pasal 37 ayat 5).
- Presiden dan DPR tidak saling menjatuhkan (Pasal 7C, 7A–7B), tetapi DPR tetap mengawasi (Pasal 20A).
- Kekosongan jabatan diatur Pasal 8: wapres menggantikan presiden; wapres kosong → MPR memilih dari dua calon usulan presiden.

Bagan pada Gambar 4.7 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.7 Peta konsep bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial Indonesia. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Kenali ciri yang diuji** dalam peristiwa: siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan siapa dapat memberhentikan siapa.
2. **Cocokkan dengan pasal** UUD NRI 1945, bukan dengan kebiasaan negara lain.
3. **Periksa alasan** di setiap pilihan: jawaban "dapat" atau "tidak dapat" sama-sama bisa salah bila alasannya keliru.
4. **Untuk pengisian jabatan**, catat siapa yang mengusulkan, siapa yang memilih, dan berapa batas waktunya.

Petunjuk cepat membaca kasus:

Kasus menunjukkan ...	Konsep
daerah punya konstitusi dan kedaulatan sendiri	**federal** (bukan Indonesia)
daerah mengatur urusan yang diserahkan pusat	**kesatuan** dengan otonomi
kabinet jatuh karena mosi parlemen	ciri **parlementer**
presiden diberhentikan lewat DPR → MK → MPR karena pelanggaran hukum	ciri **presidensial** Indonesia

Jebakan yang sering dipasang:

- **Ciri parlementer dikira berlaku.** Mosi tidak percaya, pembubaran parlemen, menteri bertanggung jawab kepada DPR.
- **Otonomi luas disamakan dengan federal.**
- **Alasan yang berlebihan.** Misalnya "presiden sama sekali tidak dapat diberhentikan", padahal ada mekanisme pemakzulan.
- **Lembaga yang keliru.** Peran MK, MPR, dan DPR dalam pemakzulan atau pengisian jabatan tertukar.

> Contoh salah tafsir: DPR menolak sebuah rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Seorang siswa menyimpulkan bahwa presiden "sudah kehilangan dukungan sehingga harus mengundurkan diri". Itu cara berpikir sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, presiden tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya; perbedaan kebijakan diselesaikan lewat pembahasan bersama, bukan dengan menjatuhkan presiden.

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pisahkan bagian alasan yang benar dari kesimpulan yang keliru; presiden dan DPR tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mengawasi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada 2027, seorang menteri menolak hadir dalam rapat DPR yang membahas terlambatnya penyaluran beasiswa pelajar. Ia beralasan, "Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, jadi saya tidak perlu menjelaskan apa pun kepada DPR."
Penilaian yang paling tepat terhadap alasan menteri tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena dalam sistem presidensial DPR tidak berwenang mengawasi kerja para menteri
B. keliru, karena menteri bertanggung jawab kepada DPR dan dapat dijatuhkan melalui mosi
C. tepat, karena hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa kebijakan para menteri
D. keliru, karena DPR berwenang langsung memberhentikan menteri yang menolak hadir rapat
E. keliru, karena meskipun bertanggung jawab kepada presiden, menteri tetap diawasi DPR

Pembahasan **Kunci: E**

Konsep: dalam **sistem presidensial**, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 ayat 2), sehingga menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR. Namun, presiden dan DPR **tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mengawasi**: DPR memegang **fungsi pengawasan** (Pasal 20A ayat 1) dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Langkah 1 – Pisahkan bagian alasan yang benar dan yang keliru. Benar: menteri bertanggung jawab kepada presiden. Keliru: kesimpulan bahwa menteri tidak perlu menjelaskan apa pun kepada DPR.
Langkah 2 – Baca pasal yang dikutip. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah fungsi DPR; menteri sebagai pelaksana kebijakan tetap diawasi.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — menghapus fungsi pengawasan yang justru dikutip dalam ilustrasi.
• B ✗ — ciri parlementer: menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan jatuh karena mosi.
• C ✗ — lembaga tertukar: MK tidak bertugas memeriksa kebijakan menteri.
• D ✗ — berlebihan: memberhentikan menteri tetap wewenang presiden, bukan DPR.
• E ✓ — mengakui pertanggungjawaban menteri kepada presiden sekaligus fungsi pengawasan DPR.

Cek ulang: B dan D sama-sama menilai "keliru", tetapi alasannya memakai ciri parlementer atau wewenang yang tidak dimiliki DPR.

Jawaban: E.

Jebakan: A mengambil bagian alasan menteri yang benar lalu menyimpulkannya berlebihan; B dan D benar menilai "keliru", tetapi dengan alasan yang salah.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✎ LATIHAN

1. Dalam sistem presidensial, rakyat memilih presiden dan anggota DPR secara terpisah. Akibatnya, dapat terjadi partai-partai pendukung presiden terpilih hanya memperoleh sedikit kursi di DPR, sedangkan mayoritas kursi dikuasai partai yang tidak mendukungnya. Seorang siswa lalu bertanya apakah keadaan itu membuat presiden harus diganti.
Jawaban yang sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah ....

A. presiden tetap menjabat sampai akhir masa jabatannya dan bekerja sama dengan DPR
B. presiden harus diganti oleh tokoh dari partai yang menguasai kursi terbanyak di DPR
C. presiden harus membubarkan DPR lalu menyelenggarakan pemilu ulang bagi anggota DPR
D. MPR segera bersidang untuk memilih presiden baru dari partai pemenang kursi DPR
E. presiden hanya boleh menjalankan pemerintahan setelah kabinetnya disetujui DPR

2. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pada 2026, DPRD dan bupati sebuah kabupaten menyusun beberapa rancangan peraturan daerah. Sebagian anggota DPRD berpendapat bahwa kabupaten boleh mengatur apa saja di wilayahnya.
Rancangan peraturan daerah manakah yang sesuai dengan kedudukan kabupaten dalam negara kesatuan? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Peraturan tentang penataan pasar tradisional dan retribusi pasar milik kabupaten.
☐ B. Peraturan yang membentuk pasukan bersenjata kabupaten di luar TNI dan Polri.
☐ C. Peraturan yang mewajibkan warga dari provinsi lain memiliki izin masuk seperti visa.
☐ D. Peraturan yang menyatakan kabupaten boleh menolak berlakunya undang-undang nasional.
☐ E. Peraturan yang menetapkan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah kabupaten.

Kunci singkat: 1. A 2. A, E

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Mengapa otonomi daerah yang luas tidak membuat Indonesia menjadi negara federal?
- Sebutkan dua ciri yang membedakan sistem presidensial Indonesia dari sistem parlementer, lengkap dengan pasalnya.
- **Yang harus kuingat:** Indonesia negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem presidensial; presiden dan DPR tidak saling menjatuhkan, tetapi DPR tetap mengawasi.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.2: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.2

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia

PPKN-4.3

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa** dalam menjaga keutuhan NKRI. Satu soal asli 2025 menguji sub bab ini: **pentingnya gatra ekonomi** Wawasan Nusantara bagi keutuhan NKRI (PG, 45 % benar).

Soal Wawasan Nusantara biasanya menyajikan sebuah kebijakan atau peristiwa, lalu memintamu **menjelaskan maknanya** bagi kesatuan bangsa. Sebagian soal memakai peta atau gambar skematis.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan makna Wawasan Nusantara dan wujudnya sebagai empat kesatuan;
- menjelaskan perjuangan dari TZMKO 1939, Deklarasi Djuanda, sampai UNCLOS 1982;
- membedakan laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen;
- memakai unsur astagatra untuk menjelaskan makna sebuah kebijakan atau peristiwa.

◆ KONSEP INTI

Bayangkan peta Indonesia. Pulau-pulaunya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan di antaranya terbentang laut yang luas. Laut itu bisa dipandang dengan dua cara: sebagai **pemisah** yang membuat setiap pulau berdiri sendiri, atau sebagai **penghubung** yang menyatukan semua pulau menjadi satu tanah air. Cara pandang yang dipilih bangsa Indonesia adalah yang kedua, dan cara pandang itu disebut **Wawasan Nusantara**. Pilihan ini bukan sekadar perasaan. Ia diperjuangkan lewat hukum dan diplomasi selama puluhan tahun, sampai akhirnya diakui dunia.

1. Wawasan Nusantara: cara pandang tentang diri dan wilayah

Geopolitik adalah cara sebuah bangsa memandang wilayah geografisnya untuk menentukan kebijakan politik demi kelangsungan hidupnya. Negara daratan yang dikelilingi negara lain akan berpikir berbeda dari negara kepulauan di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik). Wawasan Nusantara adalah geopolitik khas Indonesia: **cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah**. Landasan idiilnya Pancasila, dan landasan konstitusionalnya UUD NRI 1945.

Wujud Wawasan Nusantara adalah memandang kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam empat bidang:

- **kesatuan politik**: satu wilayah, satu bangsa, satu ideologi (Pancasila), satu hukum

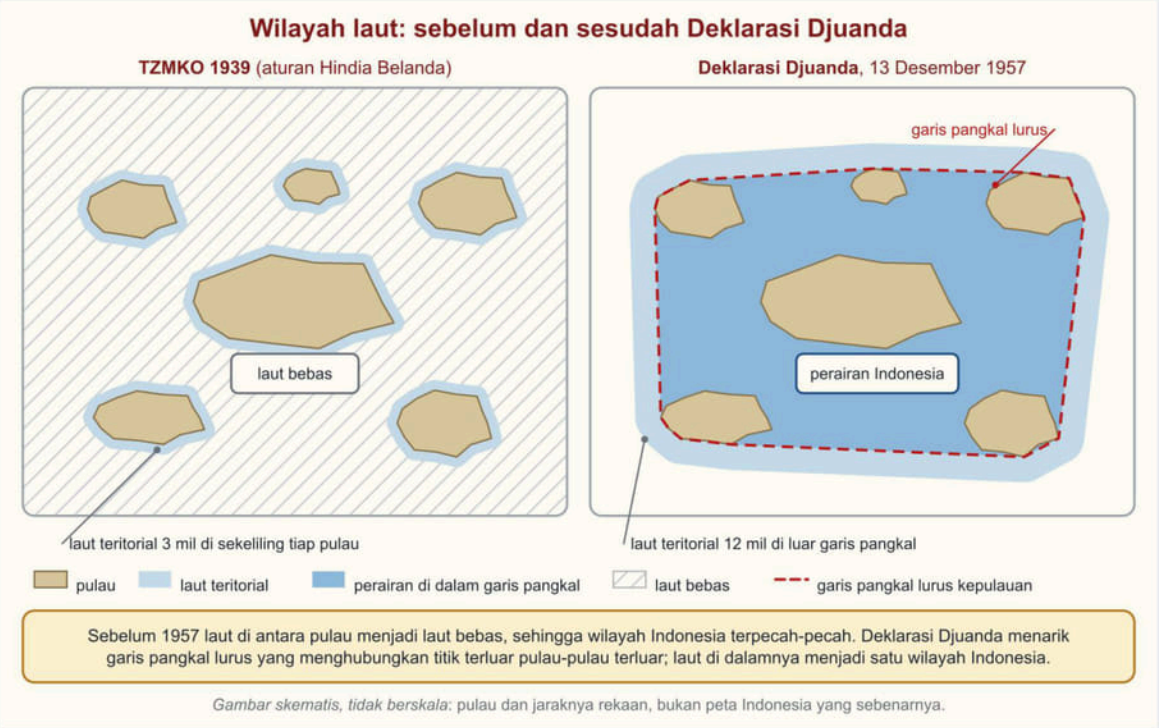
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

nasional, dan satu pemerintahan yang hadir sampai pulau terluar;

- **kesatuan ekonomi**: kekayaan wilayah, baik di darat maupun di laut, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan pembangunannya harus serasi dan seimbang di semua daerah;
- **kesatuan sosial budaya**: masyarakat yang beragam suku, agama, dan budayanya merasa sebagai satu bangsa;
- **kesatuan pertahanan keamanan**: ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa.

2. Sebelum 1957: laut sebagai pemisah

Setelah merdeka, Indonesia masih memakai aturan laut warisan Hindia Belanda, yaitu ***Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 (TZMKO 1939)**. Menurut aturan ini, laut teritorial hanya selebar **3 mil laut** yang diukur dari garis pantai **setiap pulau**. Akibatnya terlihat pada panel kiri Gambar 4.8: setiap pulau hanya dikelilingi jalur laut sempit, sedangkan laut di antara pulau-pulau besar, misalnya Laut Jawa, menjadi **laut bebas** (internasional). Kapal perang asing boleh berlayar di tengah wilayah Indonesia tanpa izin, dan kekayaan lautnya boleh diambil siapa saja.



Gambar 4.8 Peta skematis wilayah laut menurut TZMKO 1939 (kiri) dan menurut Deklarasi Djuanda 1957 (kanan). Gambar skematis, tidak berskala; pulau rekaan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Bagi negara kepulauan yang baru merdeka, keadaan ini berbahaya. Wilayahnya terpecah-pecah, sulit dipertahankan, dan rawan dimanfaatkan pihak asing. Pada akhir 1950-an, ketika Indonesia sedang menghadapi pergolakan di beberapa daerah dan sengketa Irian Barat dengan Belanda, kebutuhan untuk menyatukan wilayah laut makin mendesak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

3. Deklarasi Djuanda: laut sebagai pemersatu

Pada **13 Desember 1957**, Perdana Menteri **Djuanda Kartawidjaja** mengumumkan **Deklarasi Djuanda**. Isinya: semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian wilayah Negara Indonesia dan berada di bawah kedaulatan Indonesia. Batas laut teritorial ditarik **12 mil laut** dari **garis pangkal lurus** yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar (panel kanan Gambar 4.8). Dengan cara ini, laut di dalam garis pangkal tidak lagi menjadi laut bebas, melainkan perairan Indonesia.

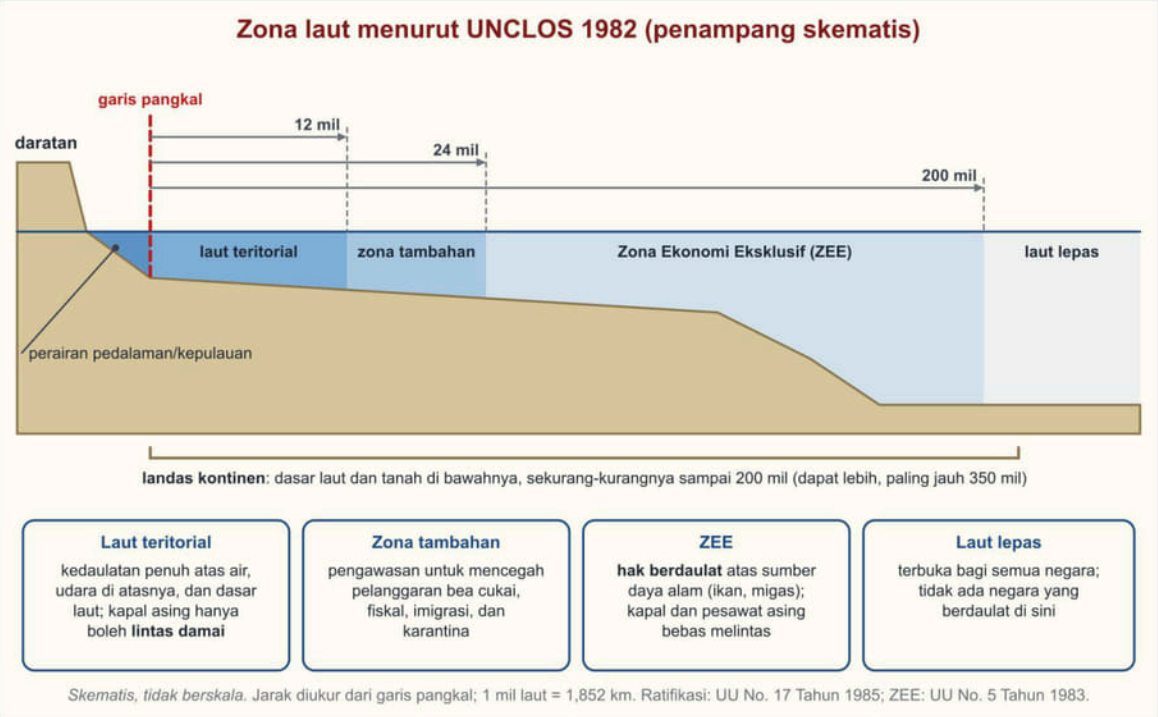
Deklarasi ini lalu dikukuhkan dalam **Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960** tentang Perairan Indonesia. Tanggal 13 Desember kemudian diperingati sebagai **Hari Nusantara**. Namun, deklarasi sepihak belum tentu diterima dunia. Pada Konferensi Hukum Laut PBB pertama di Jenewa tahun 1958, gagasan Indonesia belum diterima. Negara-negara besar yang ingin kapalnya bebas berlayar menolak. Indonesia kemudian berdiplomasi selama lebih dari dua puluh tahun. Salah satu tokohnya adalah ahli hukum laut **Mochtar Kusumaatmadja**, yang memperjuangkan konsep **negara kepulauan** (*archipelagic state*) di forum PBB.

4. Pengakuan dunia: UNCLOS 1982 dan zona laut

Perjuangan itu berhasil dalam **Konvensi Hukum Laut PBB 1982** (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, **UNCLOS**) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS mengakui asas negara kepulauan: negara yang seluruhnya terdiri atas gugusan pulau boleh menarik garis pangkal lurus kepulauan, dan perairan di dalamnya berada di bawah kedaulatannya. Indonesia meratifikasi UNCLOS dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985**, dan konvensi itu mulai berlaku secara internasional pada 1994. Sebelumnya, Indonesia telah mengatur Zona Ekonomi Eksklusif lewat **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983**.

UNCLOS membagi laut menjadi beberapa zona yang diukur dari garis pangkal. Hak negara berbeda di setiap zona, seperti tampak pada Gambar 4.9.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.9 Penampang skematis zona laut menurut UNCLOS 1982 dan hak negara pantai di setiap zona. Skematis, tidak berskala. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

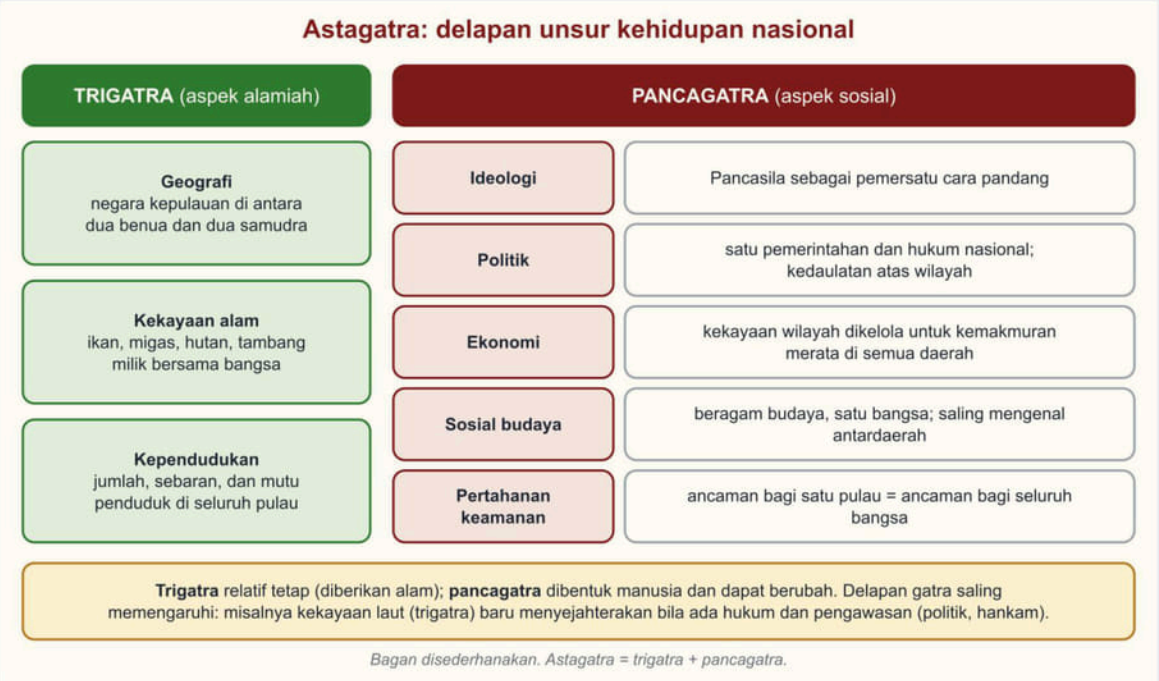
- **Perairan pedalaman dan perairan kepulauan** berada di sisi dalam garis pangkal. Negara berdaulat penuh di sini.
- **Laut teritorial** selebar **12 mil laut** dari garis pangkal. Negara memegang **kedaulatan penuh** atas airnya, ruang udara di atasnya, dan dasar lautnya. Kapal asing hanya boleh melakukan **lintas damai**, yaitu lewat tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban.
- **Zona tambahan** sampai **24 mil laut**. Negara boleh mengawasi untuk mencegah dan menindak pelanggaran aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan karantina.
- **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)** sampai **200 mil laut**. Negara memiliki **hak berdaulat** atas sumber daya alam, seperti ikan, minyak, dan gas. Namun, ZEE **bukan** wilayah kedaulatan penuh: kapal dan pesawat negara lain tetap bebas melintas.
- **Landas kontinen** adalah dasar laut dan tanah di bawahnya, sekurang-kurangnya sampai 200 mil laut, dan dapat lebih jauh bila tepi benuanya memanjang (paling jauh 350 mil laut).

Satu mil laut sama dengan 1,852 km. Bila jarak pantai dua negara terlalu dekat sehingga zonanya tumpang tindih, batasnya ditetapkan lewat **perundingan**. Perjanjian batas seperti ini berakibat luas bagi rakyat, sehingga memerlukan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2 UUD NRI 1945).

5. Astagatra: membaca kebijakan dengan delapan unsur

Untuk memahami kekuatan dan kelemahan bangsa, Wawasan Nusantara memakai konsep **astagatra**, yaitu delapan unsur (*gatra*) kehidupan nasional (Gambar 4.10).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.10 Astagatra: tiga gatra alamiah (trigatra) dan lima gatra sosial (pancagatra) beserta contohnya. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Trigatra adalah tiga aspek alamiah yang relatif tetap: **geografi** (letak dan bentuk wilayah), **kekayaan alam**, dan **kependudukan** (jumlah, sebaran, dan mutu penduduk). **Pancagatra** adalah lima aspek sosial yang dibentuk manusia dan dapat berubah: **ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan**. Kedelapannya saling memengaruhi. Kekayaan laut yang melimpah (trigatra) baru menyejahterakan rakyat bila ada hukum, pengawasan, dan pengelolaan yang adil (pancagatra).

Astagatra membantu kita menjelaskan **makna** sebuah kebijakan. Pembangunan jaringan listrik di pulau terpencil, misalnya, menyentuh gatra ekonomi: warga dapat membuka usaha, dan kesenjangan antara pusat dan daerah mengecil. Di sinilah hubungannya dengan keutuhan. Daerah yang merasa tertinggal dan diabaikan lebih mudah tergoda ajakan memisahkan diri. Pemerataan kesejahteraan membuat warga di mana pun merasa memiliki negara yang sama. Karena itu, **demokrasi ekonomi** dan pembangunan yang merata adalah bagian dari menjaga persatuan, bukan sekadar urusan angka pertumbuhan.

6. Peristiwa nyata: kedaulatan diuji di laut dan perbatasan

Sipadan dan Ligitan (2002). Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim dua pulau kecil di lepas pantai Kalimantan bagian timur ini. Kedua negara sepakat membawa sengketa ke **Mahkamah Internasional** di Den Haag. Pada **17 Desember 2002**, Mahkamah memutuskan kedua pulau menjadi milik Malaysia. Pertimbangan utamanya adalah ***effectivités***, yaitu bukti bahwa sebuah pemerintahan benar-benar mengelola pulau itu, misalnya mengatur pengambilan telur penyu dan membangun mercusuar pada masa pemerintahan kolonial di Kalimantan Utara. Pelajarannya jelas: kedaulatan atas wilayah tidak cukup diklaim di atas kertas. Negara harus **hadir** dan mengelolanya. Sejak itu Indonesia memberi perhatian lebih pada pulau-pulau kecil terluar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Laut Natuna Utara (2017). Pada **14 Juli 2017**, pemerintah meluncurkan peta NKRI yang diperbarui. Salah satu perubahannya adalah memberi nama **Laut Natuna Utara** pada perairan di utara Kepulauan Natuna yang termasuk ZEE dan landas kontinen Indonesia. Penamaan ini menegaskan wilayah hak berdaulat Indonesia di kawasan yang ramai dilalui kapal asing.

Penenggelaman kapal pencuri ikan (2014–2019). Pencurian ikan oleh kapal asing merugikan nelayan dan merampas kekayaan laut bangsa. Pada Oktober 2014 sampai Oktober 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan sekitar **556 kapal** pencuri ikan setelah ada putusan hukum. Kebijakan ini menyentuh gatra **ekonomi** (kekayaan laut kembali dinikmati nelayan Indonesia) dan gatra **pertahanan keamanan** (hak berdaulat di ZEE ditegakkan).

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong (2016). Pada **21 Desember 2016**, Presiden meresmikan PLBN Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di perbatasan darat dengan Malaysia. Pos lintas batas yang dulu sederhana dibangun ulang menjadi gerbang yang tertata. Bagi warga perbatasan, perubahan ini menunjukkan bahwa negara hadir di halaman depan mereka, sesuai semangat kesatuan politik dan ekonomi.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Tiga kapal di sekitar Pulau Karang Jingga

Pada 2026, petugas patroli di sekitar Pulau Karang Jingga (fiktif), sebuah pulau terluar Indonesia, mencatat tiga kejadian: (a) kapal tanker asing berlayar lurus tanpa berhenti 8 mil laut dari garis pangkal; (b) kapal asing menurunkan barang selundupan 20 mil laut dari garis pangkal; (c) kapal ikan asing menangkap ikan 90 mil laut dari garis pangkal tanpa izin. Apa hak Indonesia pada setiap kejadian, dan apa makna penegakan hak itu bagi Wawasan Nusantara? *Kasus disusun untuk contoh; tempat fiktif.*

1. Tentukan **zona** setiap kejadian dengan mengukur dari garis pangkal (Gambar 4.9): 8 mil = **laut teritorial**; 20 mil = **zona tambahan**; 90 mil = **ZEE**.
2. Tentukan **hak** di setiap zona. Kejadian (a): kapal asing berhak **lintas damai** di laut teritorial selama tidak mengganggu keamanan, jadi berlayar lurus tanpa berhenti tidak melanggar. Kejadian (b): di zona tambahan Indonesia berhak **mengawasi dan menindak pelanggaran bea cukai**, jadi penyelundupan dapat ditindak. Kejadian (c): di ZEE Indonesia memiliki **hak berdaulat atas ikan**, jadi menangkap ikan tanpa izin adalah pelanggaran yang dapat ditindak.
3. Hubungkan dengan **astagatra**. Menindak (b) dan (c) menyentuh gatra **ekonomi** (kekayaan laut milik bersama bangsa) dan gatra **pertahanan keamanan** (hak negara ditegakkan sampai batas terluar).
4. Hubungkan dengan **keutuhan**. Seperti pelajaran Sipadan–Ligitan, wilayah dan hak yang tidak dikelola dapat lepas. Penegakan hak di pulau terluar menunjukkan negara hadir dan memperkuat laut sebagai pemersatu.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

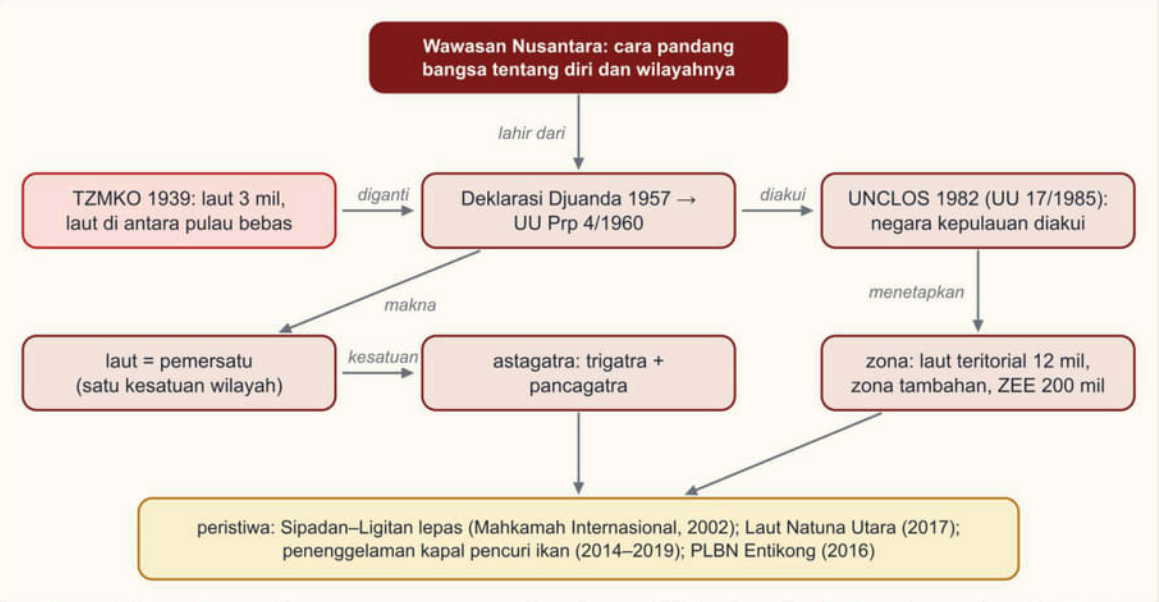
Jawaban: (a) tidak melanggar karena termasuk lintas damai; (b) dapat ditindak karena terjadi di zona tambahan; (c) dapat ditindak karena melanggar hak berdaulat Indonesia di ZEE; penegakannya bermakna menjaga kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan Nusantara.

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Wawasan Nusantara memandang Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; laut adalah **pemersatu**.
- TZMKO 1939 (laut 3 mil dari tiap pulau) → Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 (garis pangkal lurus, 12 mil) → UU Prp 4/1960 → UNCLOS 1982 (UU 17/1985).
- Laut teritorial 12 mil = kedaulatan penuh (ada lintas damai); zona tambahan 24 mil = pengawasan; ZEE 200 mil = hak berdaulat atas sumber daya, bukan kedaulatan penuh.
- Astagatra = trigatra (geografi, kekayaan alam, kependudukan) + pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam).
- Kedaulatan harus dikelola nyata: pelajaran Sipadan–Ligitan (2002).

Bagan pada Gambar 4.11 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.11 Peta konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan gatra** yang paling disentuh oleh kebijakan atau peristiwa di stimulus.
2. **Hubungkan dengan keutuhan**: apa makna kebijakan itu bagi kesatuan bangsa, bukan hanya manfaat teknisnya.
3. **Untuk soal zona laut**, ukur dari garis pangkal, lalu bedakan kedaulatan penuh dan hak berdaulat.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Gatra tertukar.** Program di satu bidang dijelaskan dengan gatra lain, misalnya pemerataan ekonomi dijelaskan sebagai urusan sosial budaya.
- **ZEE dikira kedaulatan penuh.**
- **Laut dianggap pemisah.**
- **Manfaat teknis dikira makna strategis.** "Lebih cepat" atau "lebih murah" benar, tetapi soal menanyakan makna bagi keutuhan NKRI.
- **Pengakuan internasional disamakan dengan keamanan semata.** Makna UNCLOS adalah diakuinya Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara kepulauan.

> Contoh salah tafsir: pemerintah memperluas jangkauan siaran televisi digital ke desa-desa perbatasan. Seorang siswa menyebut maknanya "warga dapat menonton dengan gambar lebih jernih". Itu manfaat teknis. Makna bagi Wawasan Nusantara: warga perbatasan memperoleh informasi yang sama dengan wilayah lain sehingga rasa sebagai satu bangsa menguat (kesatuan sosial budaya dan politik).

● BEDAH SOAL ASLI

Satu soal asli TKA 2025 menguji sub bab ini. Soal ini ada utuh di **Simulasi 1**.

Nomor 16 (gatra ekonomi, PG, 45 % benar). Stimulus menjelaskan panca gatra dan menyebut bahwa Wawasan Nusantara di bidang ekonomi mengamanatkan demokrasi ekonomi. Kamu diminta menentukan **pentingnya** hal itu bagi keutuhan NKRI.

- Konsep kunci: makna kesatuan ekonomi (bagian 1) dan astagatra (bagian 5).
- Langkah: tanyakan pada setiap pilihan, "apakah ini menjelaskan mengapa kesatuan ekonomi **menjaga keutuhan** bangsa?".
- Pengecoh yang dipasang: pilihan yang benar tentang ekonomi, tetapi tidak menjelaskan hubungannya dengan keutuhan wilayah dan bangsa.

Rujukan: soal nomor 16 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Tentukan gatra yang disentuh, lalu naikkan dari manfaat teknis ke makna bagi kesatuan bangsa.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

►. Pada 2027, KPU sebuah kabupaten kepulauan menyiapkan rencana pemungutan suara untuk pemilu berikutnya. Kotak suara dan petugas akan diangkut dengan perahu ke pulau-pulau kecil yang terlalu sepi untuk memiliki TPS tetap, sehingga warganya dapat memilih pada hari yang sama dengan warga kota. Sebagian orang menilai rencana itu terlalu mahal untuk pemilih yang jumlahnya sedikit.
Makna rencana tersebut berdasarkan Wawasan Nusantara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menghemat biaya pemilu karena perahu lebih murah daripada membangun TPS di setiap pulau
B. mempercepat penghitungan suara karena kotak suara dari pulau kecil segera dibawa ke kota
C. menegaskan bahwa warga pulau kecil sebaiknya diurus terpisah dari warga pulau besar
D. memperkuat kesatuan politik sebab warga pulau terjauh ikut memilih pemimpin yang sama
E. memperkuat pertahanan keamanan karena perahu pemilu dapat sekaligus berpatroli di laut

Pembahasan **Kunci: D**

Konsep: Wawasan Nusantara memandang Nusantara sebagai satu **kesatuan politik**: satu bangsa, satu pemerintahan, dan satu hukum yang hadir sampai pulau terluar. Laut dipandang sebagai **penghubung**, bukan pemisah.

Langkah 1 – Tentukan gatra yang disentuh. Kegiatannya adalah memastikan semua warga dapat memilih pemimpin → bidang **politik**.
Langkah 2 – Naikkan ke makna strategis. Warga di pulau terkecil ikut menentukan pemimpin yang sama dengan warga kota; mereka diperlakukan sebagai bagian penuh dari satu bangsa.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — tentang biaya; lagi pula ilustrasi justru menyebut rencana itu mahal.
• B ✗ — manfaat teknis, bukan makna bagi kesatuan bangsa.
• C ✗ — kebalikan Wawasan Nusantara: laut dan pulau kecil adalah bagian satu kesatuan.
• D ✓ — kesatuan politik: hak memilih yang sama sampai pulau terjauh.
• E ✗ — gatra tertukar; perahu pemilu tidak bertugas berpatroli.

Jawaban: D.

Jebakan: A dan B menyebut manfaat teknis yang terdengar masuk akal, tetapi soal menanyakan makna menurut Wawasan Nusantara. E memasang gatra yang keliru.

✎ LATIHAN

1. Sebagian pelajar masih menyebut laut di antara pulau-pulau "memisahkan" wilayah Indonesia. Padahal, setiap hari kapal penumpang dan kapal barang menghubungkan pelabuhan antarpulau, nelayan dari berbagai provinsi menangkap ikan di perairan yang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

sama, dan kapal asing yang melintas wajib menaati aturan Indonesia.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan Wawasan Nusantara!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Laut di antara pulau-pulau Indonesia dipandang sebagai penghubung yang menyatukan, bukan pemisah.	○	○
Karena laut dipandang sebagai pemersatu, kapal asing sama sekali tidak boleh melintasi perairan Indonesia.	○	○
Kekayaan ikan di laut antarpulau adalah modal milik bersama bangsa, bukan milik provinsi terdekat saja.	○	○

2. Di sebuah daerah penghasil tambang, sebagian pemuda mengeluh bahwa kekayaan daerahnya "hanya diangkut ke luar", sementara sekolah dan puskesmas di kampung mereka masih tertinggal. Sebuah akun anonim memanfaatkan keluhan itu untuk mengajak warga mengelola kekayaan daerahnya sendiri, terpisah dari Indonesia. Unggahan akun itu mulai banyak dibagikan.
Cara pandang yang paling sesuai dengan Wawasan Nusantara untuk menanggapi keadaan tersebut adalah ....

A. kekayaan tambang milik daerah penghasil saja, sehingga daerah berhak berpisah bila diabaikan
B. kekayaan alam milik bersama bangsa, dan hasilnya wajib dinikmati merata oleh semua daerah
C. kekayaan tambang milik pemerintah pusat sepenuhnya, sehingga warga daerah tak perlu dilibatkan
D. kesenjangan itu urusan gatra sosial budaya, sehingga cukup diatasi dengan festival budaya daerah
E. kekayaan alam termasuk trigatra yang tetap, sehingga memang tidak dapat menyejahterakan warga

Kunci singkat: 1. 1B 2S 3B 2. B

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Apa perbedaan hak Indonesia di laut teritorial dan di ZEE? Berikan satu contoh kejadian untuk masing-masing.
- Pilih satu kebijakan pemerintah yang kamu ketahui, lalu tentukan gatra yang paling disentuhnya dan maknanya bagi keutuhan NKRI.
- **Yang harus kuingat:** Wawasan Nusantara memandang Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; laut adalah pemersatu.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.3: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.3

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.4 · Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

PPKN-4.4

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara**. Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi ada di contoh soal resmi Pusmendik. Soalnya biasanya menyajikan sebuah ancaman, lalu menanyakan **siapa berperan apa**.

Kunci sub bab ini adalah satu gagasan: setiap pihak berperan **sesuai porsinya**. Warga tidak mengambil alih tugas TNI atau Polri, tetapi juga tidak berdiam diri.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan Sishankamrata dan tiga sifatnya beserta contoh sejarahnya;
- membedakan komponen utama, cadangan, dan pendukung;
- menentukan unsur utama untuk ancaman militer dan nonmiliter;
- menilai peran warga yang tepat dalam sebuah kasus.

◆ KONSEP INTI

Indonesia tidak pernah merdeka hanya karena kekuatan tentaranya. Pada masa revolusi, tentara Indonesia kalah jauh dalam senjata dibandingkan pasukan Belanda. Yang membuat perjuangan bertahan adalah dukungan rakyat: petani yang menyembunyikan gerilyawan, ibu-ibu yang memasak di dapur umum, pemuda yang menjadi kurir. Pengalaman itu melahirkan gagasan pertahanan yang khas Indonesia, yaitu pertahanan yang melibatkan **seluruh rakyat**, **seluruh sumber daya**, dan **seluruh wilayah**. Gagasan ini kini tertulis dalam UUD NRI 1945 dengan nama **sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)**.

1. Dasar konstitusional: Pasal 30

Pasal 30 UUD NRI 1945 mengatur pertahanan dan keamanan negara dalam lima ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menetapkan caranya: usaha itu dilaksanakan melalui Sishankamrata oleh **TNI dan Polri sebagai kekuatan utama**, dan **rakyat sebagai kekuatan pendukung**.

Ayat (3) dan (4) membagi tugas dua kekuatan utama itu. **TNI** (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Singkatnya, TNI menghadapi ancaman terhadap **negara**, terutama dari luar. **Polri** bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Singkatnya, Polri menghadapi gangguan terhadap **keamanan di dalam masyarakat**. Pencurian, penipuan, dan kerusuhan adalah urusan

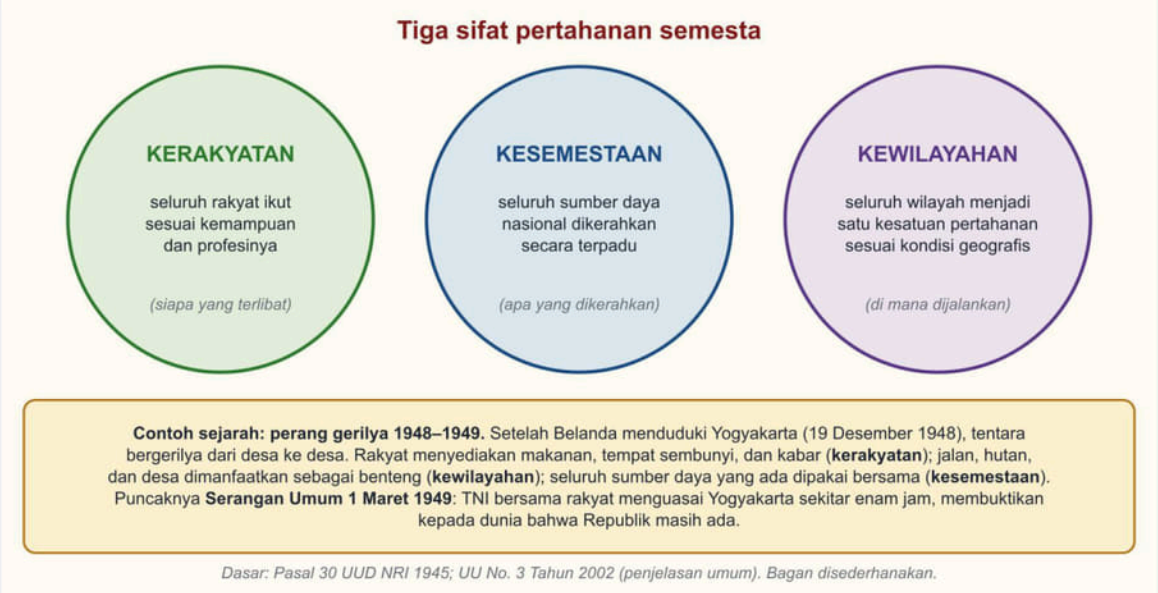
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Polri; pesawat tempur asing yang melanggar wilayah udara adalah urusan TNI. Pembagian tugas ini lahir dari pengalaman sejarah. Pada masa Orde Baru, kepolisian menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama tiga angkatan perang. Akibatnya, urusan keamanan masyarakat sehari-hari sering ditangani dengan cara militer. Gerakan reformasi menuntut pemisahan keduanya. Polri dipisahkan dari ABRI pada 1999, dan MPR menegaskan pemisahan TNI dan Polri dalam ketetapannya pada tahun 2000. Amandemen kedua UUD (2000) kemudian menuliskan pembagian tugas itu dalam Pasal 30. Sejak itu, TNI berfokus pada pertahanan, sedangkan Polri adalah aparat sipil yang menegakkan hukum.

Ayat (5) menyerahkan pengaturan rincinya kepada undang-undang, antara lain UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

2. Tiga sifat pertahanan semesta

Penjelasan UU 3/2002 menyebut bahwa pertahanan negara bersifat **semesta**: melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, serta menjadikan seluruh wilayah negara satu kesatuan pertahanan. Dari rumusan itu dikenal tiga sifat (Gambar 4.12).



Gambar 4.12 Tiga sifat Sishankamrata (kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan) dan contohnya dalam perang gerilya 1948–1949. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

- **Kerakyatan**: seluruh rakyat ikut serta sesuai kemampuan dan profesinya. Sifat ini menjawab pertanyaan **siapa** yang terlibat.
- **Kesemestaan**: seluruh sumber daya nasional, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana, dapat dikerahkan secara terpadu. Sifat ini menjawab pertanyaan **apa** yang dikerahkan.
- **Kewilayahan**: pertahanan dijalankan di seluruh wilayah sesuai kondisi geografisnya, sehingga setiap pulau dan daerah menjadi bagian dari satu kesatuan pertahanan. Sifat ini menjawab pertanyaan **di mana** pertahanan dijalankan.

Contoh sejarah paling jelas adalah **perang gerilya 1948–1949**. Pada **19 Desember 1948**,

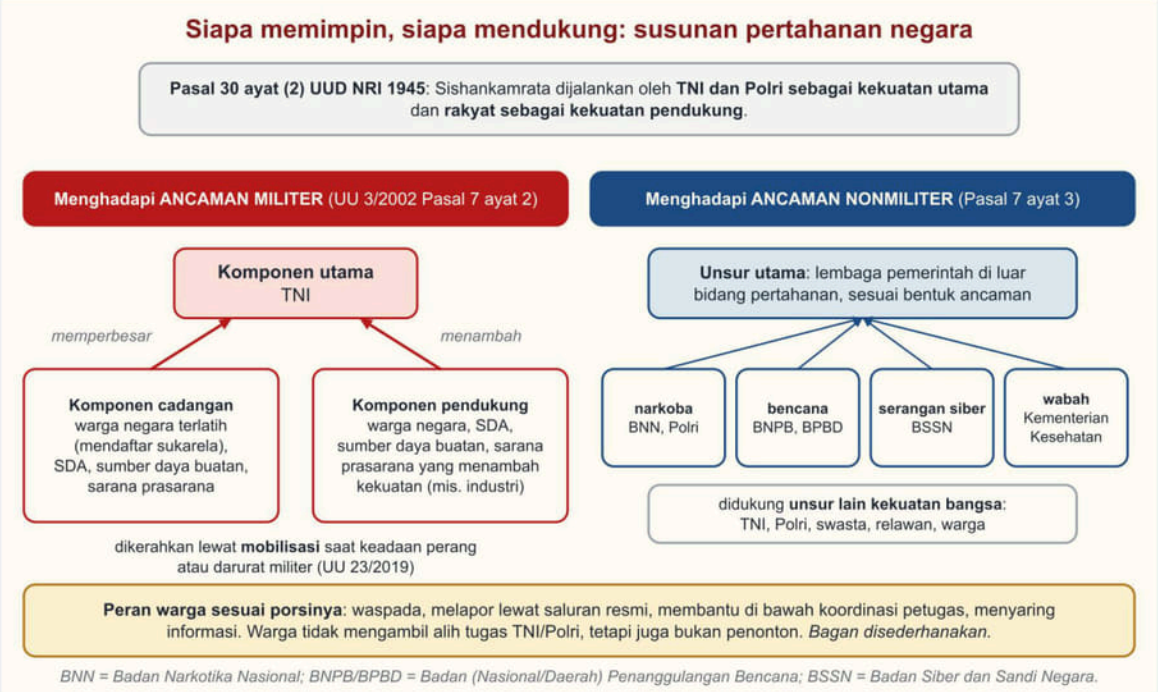
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Belanda menyerang dan menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu, dan menawan para pemimpin pemerintahan. Panglima Besar Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya dari desa ke desa. Rakyat menyediakan makanan, tempat bersembunyi, dan kabar tentang gerakan musuh (kerakyatan). Hutan, gunung, dan desa dijadikan benteng (kewilayahan). Apa pun yang ada, mulai dari bahan makanan sampai sarana komunikasi, dipakai bersama (kesemestaan). Puncaknya adalah **Serangan Umum 1 Maret 1949**: TNI bersama rakyat menyerbu dan menguasai Yogyakarta selama sekitar enam jam. Serangan singkat itu membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya masih ada, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional menuju pengakuan kedaulatan.

Ketiga sifat itu tetap berlaku di masa damai. Pertahanan tidak dibangun hanya ketika perang datang, tetapi disiapkan sejak dini. Sekolah yang mendidik warga taat hukum dan cinta tanah air menyiapkan sumber daya manusia (kerakyatan). Industri dalam negeri yang mampu membuat kapal, kendaraan, atau obat menambah sumber daya yang dapat dikerahkan (kesemestaan). Jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi di pulau-pulau terluar membuat setiap wilayah dapat dijangkau dan dijaga (kewilayahan).

3. Komponen pertahanan: utama, cadangan, dan pendukung

UU 3/2002 membedakan susunan pertahanan menurut jenis ancamannya (Gambar 4.13).



Gambar 4.13 Susunan pertahanan negara: komponen utama, cadangan, dan pendukung untuk ancaman militer, serta unsur utama untuk ancaman nonmiliter. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Untuk **ancaman militer**, Pasal 7 ayat (2) menempatkan **TNI sebagai komponen utama**, yaitu kekuatan yang siap dikerahkan kapan saja. TNI didukung dua komponen lain (Pasal 8). **Komponen cadangan** terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk memperbesar kekuatan komponen utama. **Komponen pendukung** terdiri atas sumber daya yang sama, tetapi perannya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

meningkatkan kekuatan komponen utama dan cadangan secara langsung atau tidak langsung, misalnya industri, tenaga ahli, dan jaringan transportasi.

Warga yang menjadi komponen cadangan ikut secara **sukarela**: mendaftar, lulus seleksi, dan mengikuti latihan dasar kemiliteran. Penetapan komponen cadangan dilakukan pertama kali di bawah UU 23/2019 pada **7 Oktober 2021**, ketika Presiden menetapkan **3.103 orang** anggota komponen cadangan di Batujajar, Jawa Barat. Mereka kembali ke pekerjaan masing-masing setelah ditetapkan, dan hanya dikerahkan melalui **mobilisasi** oleh Presiden, misalnya dalam keadaan perang. Jadi, komponen cadangan **bukan wajib militer** bagi semua warga, dan tidak semua warga harus menjadi anggotanya untuk dapat membela negara.

4. Ancaman nonmiliter: dipimpin lembaga yang sesuai

Untuk **ancaman nonmiliter**, Pasal 7 ayat (3) UU 3/2002 menempatkan **lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan** sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancamannya, didukung unsur lain kekuatan bangsa. Narkoba dipimpin Badan Narkotika Nasional dan Polri; bencana dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan daerahnya; wabah dipimpin Kementerian Kesehatan; serangan siber ditangani Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama kementerian terkait. TNI dan Polri tetap dapat membantu, misalnya mengirim pasukan untuk evakuasi korban bencana, tetapi yang memimpin penanganan adalah lembaga yang paling ahli di bidang itu.

Peristiwa nyata memperlihatkan seriusnya ancaman nonmiliter. Pada **20 Juni 2024**, **Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2** di Surabaya lumpuh akibat serangan **ransomware**, yaitu program jahat yang mengunci data lalu meminta tebusan. BSSN menyatakan program itu bernama Brain Cipher, pengembangan dari LockBit 3.0. Layanan lebih dari 200 instansi pusat dan daerah terganggu, termasuk pemeriksaan paspor di bandara. Pemerintah menolak membayar tebusan, dan layanan dipulihkan bertahap. Tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan, tetapi layanan negara bagi jutaan warga terhenti. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ketahanan negara bergantung pada kebiasaan pengamanan sehari-hari, seperti menyimpan cadangan data.

5. Peran warga sesuai porsinya

Rakyat adalah **kekuatan pendukung**. Kata "pendukung" penting: warga ikut menjaga, tetapi tidak menggantikan aparat. Peran yang tepat dapat dikenali dari empat pasangan berikut:

Tepat	Tidak tepat
mencegah, waspada, menjaga diri dan lingkungan	berdiam diri karena menganggapnya "urusan aparat"
melapor kepada pihak berwenang lewat saluran resmi	menghakimi atau menindak sendiri
membantu di bawah koordinasi petugas	bertindak tanpa koordinasi sehingga mengganggu penanganan
memeriksa informasi sebelum membagikannya	menyebarkan kabar yang belum jelas

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sifat kerakyatan juga hidup dalam keamanan sehari-hari. **Sistem keamanan lingkungan (siskamling)**, misalnya ronda malam yang dijadwalkan bergilir oleh warga, adalah contoh rakyat menjaga keamanan sesuai porsinya. Warga yang meronda bertugas mengamati, mencegah, dan memberi tahu petugas bila ada kejadian. Mereka tidak berwenang menghukum orang yang tertangkap; orang itu diserahkan kepada polisi. Di desa dan kelurahan, warga juga dapat berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas (anggota Polri pembina keamanan di desa) dan Babinsa (anggota TNI pembina desa).

Saat bencana, misalnya, relawan yang mendaftar di posko dan mengikuti arahan petugas sangat membantu. Sebaliknya, rombongan yang datang tanpa koordinasi dapat memacetkan jalan yang dibutuhkan ambulans. Di ruang digital, warga yang melaporkan situs penipuan ke kanal resmi ikut menjaga keamanan, sedangkan warga yang "membalas meretas" justru melanggar hukum.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Situs palsu yang meminta data pribadi

Pada 2026, Rafi (tokoh fiktif), siswa kelas XI, melihat tautan yang beredar di grup warga. Tautan itu menuju situs yang mengaku dari pemerintah dan menjanjikan "bantuan tunai" bagi siapa saja yang mengisi nomor induk kependudukan (NIK), foto KTP, dan foto wajah. Tampilan situsnya mirip situs resmi, tetapi alamatnya bukan alamat situs pemerintah. Teman Rafi mengusulkan tiga tindakan: (A) membiarkan saja karena "itu urusan polisi"; (B) meretas balik situs itu supaya mati; (C) tidak mengisi, memberi tahu keluarga dan warga grup bahwa situs itu diduga palsu, lalu melaporkannya ke kanal aduan resmi. Tindakan mana yang sesuai dengan peran warga dalam Sishankamrata? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. Tentukan **jenis ancaman**: pencurian data pribadi lewat situs palsu adalah **ancaman nonmiliter** di bidang teknologi. Data yang dicuri dapat dipakai untuk penipuan dan kejahatan lain.
2. Tentukan **unsur utama** penanganannya: lembaga di luar bidang pertahanan, yaitu kepolisian (penegakan hukum) dan lembaga yang membidangi ruang digital dan siber.
3. Tentukan **porsi warga**: mencegah (tidak mengisi), menyebarkan peringatan yang benar, dan melapor lewat saluran resmi.
4. Periksa **cara memberi peringatan**: Rafi cukup menyampaikan hal yang ia ketahui pasti (alamat situs tidak resmi, meminta data yang tidak wajar) dan menyarankan warga mengecek ke kantor desa atau situs resmi pemerintah. Ia tidak menambah kabar yang belum jelas, misalnya menuduh orang tertentu sebagai pelakunya.
5. Uji pilihan. (A) keliru karena rakyat adalah kekuatan pendukung, bukan penonton. (B) keliru karena mengambil alih tugas aparat dan meretas adalah perbuatan melanggar hukum. (C) memenuhi porsi warga.

Jawaban: tindakan (C), karena Rafi mencegah kerugian, mengingatkan warga dengan informasi yang benar, dan menyerahkan penindakan kepada lembaga yang berwenang.

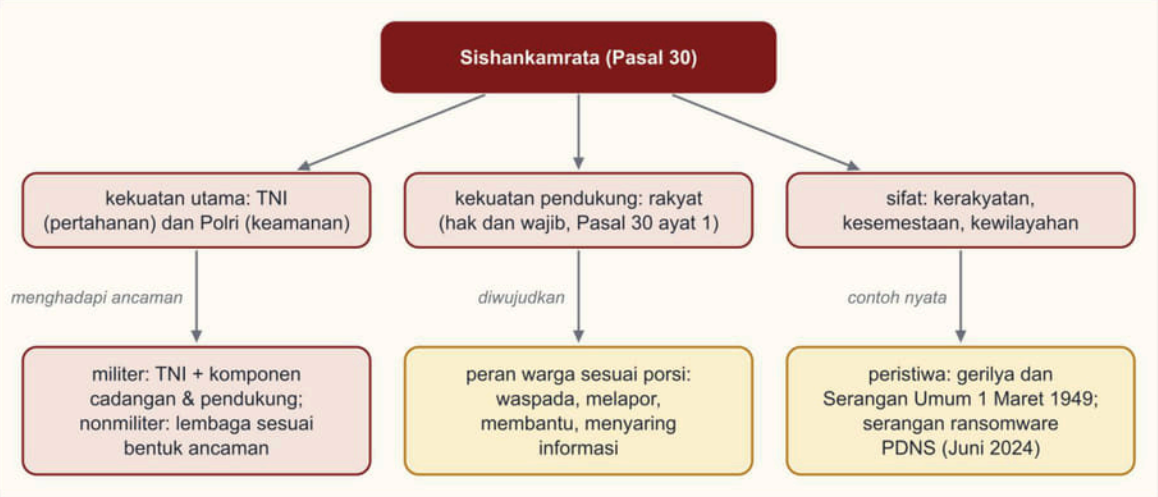
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Pasal 30: TNI dan Polri **kekuatan utama**, rakyat **kekuatan pendukung**; TNI menjaga kedaulatan negara, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Tiga sifat: **kerakyatan** (siapa), **kesemestaan** (apa), **kewilayahan** (di mana); contohnya perang gerilya dan Serangan Umum 1 Maret 1949.
- Ancaman militer: TNI komponen utama + komponen cadangan (sukarela) + komponen pendukung.
- Ancaman nonmiliter: lembaga di luar bidang pertahanan sesuai bentuk ancaman memimpin; contohnya serangan ransomware PDNS (Juni 2024).
- Peran warga: waspada, melapor, membantu di bawah koordinasi, menyaring informasi; tidak diam dan tidak main hakim sendiri.

Bagan pada Gambar 4.14 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.14 Peta konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan jenis ancaman**: militer atau nonmiliter.
2. **Tentukan siapa unsur utamanya** dan siapa pendukungnya.
3. **Nilai peran warga** dengan tabel di bagian 5: sesuai porsi atau tidak.

Jebakan yang sering dipasang:

- **Warga mengambil alih tugas aparat.** Terlihat berani, tetapi bukan porsinya.
- **"Urusan aparat saja".** Rakyat adalah kekuatan pendukung, bukan penonton.
- **Komponen cadangan dikira wajib bagi semua warga.**
- **Semua ancaman dikira urusan militer.**
- **Sifat Sishankamrata tertukar.** Kerakyatan (orangnya), kesemestaan (sumber dayanya), kewilayahan (tempatnya).

> Contoh salah tafsir: seorang siswa berpendapat, "Bela negara itu wajib bagi semua warga, jadi semua lulusan SMA harus ikut wajib militer." Pasal 27 ayat (3) memang mewajibkan bela negara, tetapi bentuknya beragam. Bela negara tidak sama dengan wajib militer; warga yang ingin memperkuat TNI dapat mendaftar komponen cadangan secara sukarela.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Bedakan komponen cadangan dari TNI aktif dan dari tugas Polri; ingat sifat sukarela dan mobilisasi oleh Presiden.

►. Pada 2026, Bayu (24 tahun), seorang teknisi listrik, mendaftar menjadi anggota komponen cadangan. Setelah lulus seleksi dan mengikuti latihan dasar kemiliteran, ia ditetapkan sebagai anggota, lalu kembali bekerja seperti biasa. Seorang tetangganya berkomentar bahwa Bayu kini sudah menjadi tentara dan berhak menindak pencuri di kampung mereka. Pernyataan yang paling tepat tentang kedudukan Bayu dalam Sishankamrata adalah .... *Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.*

A. Bayu tetap warga sipil dan baru dikerahkan bila ada mobilisasi oleh Presiden
B. Bayu menjadi prajurit TNI aktif sehingga wajib tinggal di markas satuannya
C. Bayu berwenang menangkap pelaku kejahatan di kampungnya seperti anggota Polri
D. Bayu dapat dikerahkan oleh kepala desa kapan saja untuk menjaga keamanan kampung
E. Bayu membuktikan bahwa semua pemuda wajib menjadi anggota komponen cadangan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: A**

Konsep: dalam menghadapi ancaman militer, TNI adalah **komponen utama**, didukung **komponen cadangan** dan **komponen pendukung**. Warga menjadi komponen cadangan secara **sukarela**; setelah ditetapkan, ia kembali ke pekerjaannya dan hanya dikerahkan lewat **mobilisasi oleh Presiden** (UU 23/2019). Menindak kejahatan tetap tugas Polri.

Langkah 1 – Kenali kedudukan Bayu. Ia anggota komponen cadangan, bukan prajurit TNI aktif dan bukan polisi.
Langkah 2 – Uji komentar tetangga. Komentar itu menukar komponen cadangan dengan TNI dan dengan tugas Polri.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — sesuai ketentuan: tetap bekerja seperti biasa, dikerahkan hanya lewat mobilisasi.
• B ✗ — komponen cadangan bukan prajurit TNI aktif; ilustrasi menyebut Bayu kembali bekerja.
• C ✗ — mengambil alih tugas Polri; menangkap pelaku kejahatan bukan wewenang komponen cadangan.
• D ✗ — pejabat yang berwenang mengerahkan adalah Presiden, bukan kepala desa.
• E ✗ — komponen cadangan bersifat sukarela; bela negara tidak sama dengan wajib militer.

Jawaban: A.

Jebakan: C mengulang komentar tetangga yang terdengar wajar; E menyamakan bela negara dengan wajib militer.

✎ LATIHAN

1. Sebagian orang berpendapat bahwa keterlibatan rakyat dalam pertahanan hanya cocok untuk masa perang gerilya dahulu. Menurut mereka, TNI kini sudah memiliki persenjataan modern, sehingga di masa damai warga sipil cukup belajar dan bekerja tanpa perlu memikirkan pertahanan negara. Pendapat ini cukup sering muncul dalam diskusi pelajar di media sosial.

Penilaian yang paling tepat terhadap pendapat tersebut adalah ....

A. tepat, karena dalam Sishankamrata TNI adalah komponen utama menghadapi ancaman militer
B. tepat, karena warga sipil dilarang terlibat dalam semua urusan pertahanan dan keamanan negara
C. keliru, karena setiap lulusan SMA wajib mengikuti latihan militer sebagai bela negara
D. keliru, karena dalam Sishankamrata rakyat adalah kekuatan utama, sedangkan TNI pendukung
E. keliru, karena sifat semesta tetap berlaku di masa damai lewat peran warga sesuai porsi

2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebut spionase (kegiatan mata-mata) sebagai salah satu bentuk ancaman militer, yang dihadapi TNI sebagai komponen utama. Pada 2026, warga sebuah kota pantai berulang kali melihat pesawat nirawak tak dikenal terbang rendah memotret kompleks pangkalan angkatan laut. Pesawat itu diduga dikendalikan dari kapal asing di lepas pantai.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembagian peran yang sesuai dengan Sishankamrata adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. Polri memimpin penanganan karena pesawat itu terbang di atas wilayah kota tersebut
B. warga menembak jatuh pesawat itu memakai senapan angin agar tidak dapat memotret lagi
C. BSSN memimpin penanganan karena pesawat nirawak itu termasuk perangkat teknologi digital
D. TNI menghadapi ancaman itu, sedangkan warga mencatat kejadian dan melapor ke aparat
E. pemerintah kota memimpin penanganan karena kejadian itu berlangsung di wilayahnya

Kunci singkat: 1. E 2. D

✔ PERIKSA DIRI

- Apa beda peran TNI dan Polri menurut Pasal 30 UUD NRI 1945? Berikan satu contoh kejadian untuk masing-masing.
- Siapa unsur utama dalam menghadapi wabah penyakit? Mengapa bukan TNI?
- **Yang harus kuingat:** TNI dan Polri kekuatan utama, rakyat kekuatan pendukung; setiap pihak berperan sesuai porsinya.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.4: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.4

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.5 · Peran Indonesia dalam perdamaian dunia

PPKN-4.5

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia**. Pada TKA 2025, topik ini muncul lewat soal pasukan perdamaian Indonesia (No. 9), yang sudah dibedah di sub bab 1.6 karena menguji keunggulan nilai Pancasila. Di sub bab ini, kamu memperdalam **politik luar negeri bebas aktif** dan cara memakainya untuk menilai sikap Indonesia.

Soal jenis ini hampir selalu menyajikan sebuah situasi internasional, lalu bertanya: "sikap mana yang paling sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif?"

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan dasar, asal-usul, dan makna politik luar negeri bebas aktif;
- menjelaskan bukti nyata peran Indonesia dalam perdamaian dunia beserta tahunnya;
- menilai sebuah sikap dengan dua syarat: bebas dan aktif;
- membedakan bebas aktif dari sikap netral pasif dan dari sikap ikut campur.

◆ KONSEP INTI

Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Pengalaman itu membentuk cara Indonesia memandang dunia: setiap bangsa berhak merdeka, perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan damai, dan negara yang baru merdeka tidak boleh sekadar menjadi pengikut negara besar. Cara pandang ini dirumuskan sebagai **politik luar negeri bebas aktif**. Politik luar negeri adalah sikap dan kebijakan sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain dan dengan masalah internasional. Sub bab ini menjelaskan dari mana bebas aktif berasal, apa artinya, dan bagaimana Indonesia menjalankannya dari tahun ke tahun.

1. Dasar konstitusional dan undang-undang

Dasar paling tinggi ada di **Pembukaan UUD NRI 1945**. Alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Alinea keempat menyebut salah satu tujuan negara: **ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, ikut menjaga perdamaian dunia bukan pilihan sampingan, melainkan amanat konstitusi.

Dasar yang lebih rinci adalah **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**. Pasal 3 menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip **bebas aktif** yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Penjelasan pasal itu menegaskan bahwa bebas aktif **bukan politik netral**. Indonesia bebas menentukan sikap terhadap

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

masalah internasional dan tidak mengikatkan diri sejak awal kepada satu kekuatan dunia, tetapi sekaligus secara aktif menyumbang bagi penyelesaian konflik, perdamaian, dan kesejahteraan dunia.

2. Asal-usul: "Mendayung di antara Dua Karang"

Gagasan bebas aktif lahir pada masa sulit. Setelah Perang Dunia II, dunia terbelah menjadi dua blok yang bersaing: **Blok Barat** yang dipimpin Amerika Serikat dan **Blok Timur** yang dipimpin Uni Soviet. Persaingan tanpa perang terbuka antara keduanya disebut **Perang Dingin**. Di dalam negeri, ada kelompok yang mendesak Indonesia memihak salah satu blok. Pada saat yang sama, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda dan membutuhkan dukungan dunia.

Pada **2 September 1948**, Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri **Mohammad Hatta** menyampaikan keterangan pemerintah di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) di Yogyakarta. Keterangan itu kemudian dikenal dengan judul **"Mendayung di antara Dua Karang"**. Hatta mengibaratkan Indonesia sebagai perahu yang harus melewati dua karang, yaitu dua blok besar. Perahu itu tidak boleh menabrak salah satunya. Indonesia harus menjadi **subjek** yang menentukan jalannya sendiri, bukan **objek** yang diperebutkan pihak lain. Sejak itulah sikap bebas aktif menjadi pegangan politik luar negeri Indonesia.

3. Makna bebas dan aktif

Kata **bebas** berarti Indonesia bebas menentukan sikap sendiri dan tidak mengikatkan diri pada satu blok kekuatan dunia, misalnya lewat pakta militer. Bebas tidak berarti memusuhi semua pihak atau menutup diri; Indonesia tetap bersahabat dan bekerja sama dengan banyak negara. Kata **aktif** berarti Indonesia tidak berdiam diri, tetapi ikut berusaha mewujudkan perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dunia. Aktif tidak berarti ikut campur urusan dalam negeri negara lain atau memaksakan kehendak.

Kedua syarat itu harus dipenuhi **bersama-sama**. Gambar 4.16 di bagian 5 memperlihatkan empat kemungkinan sikap. Sikap yang tidak memihak tetapi diam saja adalah **netral pasif**: memenuhi "bebas", tetapi gagal memenuhi "aktif". Sikap yang giat tetapi memihak satu blok gagal memenuhi "bebas". Hanya sikap yang tidak memihak **dan** ikut mengupayakan perdamaian yang disebut bebas aktif.

Dalam menjalankan sikap aktif, Indonesia memegang beberapa prinsip: menghormati kedaulatan negara lain, **tidak campur tangan** dalam urusan dalam negerinya, menyelesaikan perselisihan dengan **cara damai**, dan bertindak lewat **mekanisme bersama**, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, bukan secara sepihak.

4. Jejak peran Indonesia dari tahun ke tahun

Bebas aktif bukan hanya rumusan. Gambar 4.15 memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang membuktikannya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.15 Linimasa peran Indonesia dalam perdamaian dunia, 1948–2020. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Konferensi Asia Afrika (KAA), 18–24 April 1955. Indonesia bersama India, Burma (kini Myanmar), Pakistan, dan Sri Lanka menjadi sponsor konferensi di Bandung yang dihadiri 29 negara Asia dan Afrika. Banyak di antaranya baru merdeka atau masih berjuang merdeka. Konferensi menghasilkan **Dasasila Bandung**, sepuluh prinsip hubungan antarbangsa, antara lain menghormati kedaulatan, tidak campur tangan, dan menyelesaikan perselisihan dengan damai. KAA mendorong gelombang kemerdekaan di Asia dan Afrika. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah KAA hanya sepuluh tahun setelah proklamasi menunjukkan bahwa negara yang masih muda pun dapat memimpin. Indonesia tidak bergabung dengan blok mana pun (bebas), tetapi justru menghimpun bangsa-bangsa lain untuk memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian (aktif). Gedung tempat sidang berlangsung di Bandung kini menjadi Museum Konferensi Asia Afrika.

Gerakan Non-Blok (GNB), 1961. Semangat Bandung berlanjut dalam Konferensi Tingkat Tinggi I Gerakan Non-Blok di Beograd, Yugoslavia, pada **1–6 September 1961**. Presiden Soekarno termasuk tokoh pendirinya, bersama pemimpin India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. GNB menghimpun negara-negara yang tidak bergabung dengan Blok Barat maupun Blok Timur. Asas-asasnya bersumber dari Dasasila Bandung.

Kontingen Garuda, sejak 1957. Pada Januari 1957, Indonesia mengirim **Kontingen Garuda I**, sekitar 550 personel, untuk bergabung dengan pasukan darurat PBB (UNEF) di Mesir setelah Krisis Suez. Sejak itu Indonesia terus mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian ke berbagai negara, selalu atas **mandat PBB** dan bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik. Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB bekerja dengan tiga prinsip dasar: hadir dengan **persetujuan** pihak-pihak yang berkonflik, bersikap **tidak memihak**, dan **tidak menggunakan kekerasan** kecuali untuk membela diri dan menjalankan mandatnya. Prinsip ini sejalan dengan bebas aktif: pasukan Indonesia datang bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan untuk menjaga gencatan senjata,

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

melindungi warga sipil, dan membantu membangun kembali kehidupan. Di banyak tempat, prajurit Garuda juga dikenal lewat kegiatan kemanusiaan, seperti layanan kesehatan dan perbaikan sarana umum bagi warga setempat.

ASEAN, 8 Agustus 1967. Menteri Luar Negeri Adam Malik bersama menteri dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani **Deklarasi Bangkok** yang mendirikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Organisasi ini bertujuan memajukan kerja sama dan menjaga perdamaian kawasan.

Jakarta Informal Meeting (JIM), 1988–1989. Kamboja dilanda perang saudara yang melibatkan beberapa kelompok dan negara tetangga. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan informal yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai: JIM I pada Juli 1988 dan JIM II pada Februari 1989. Menteri Luar Negeri Ali Alatas memimpin pertemuan itu, dan Indonesia kemudian menjadi salah satu ketua bersama konferensi internasional di Paris yang menghasilkan perjanjian damai Kamboja. Indonesia tidak memihak dan tidak memaksakan keputusan; Indonesia menyediakan **jalan** bagi perundingan.

Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, 2019–2020. Pada 8 Juni 2018, Majelis Umum PBB memilih Indonesia dengan 144 suara untuk duduk di Dewan Keamanan, lembaga PBB yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional. Ini adalah keempat kalinya, setelah periode 1973–1974, 1995–1996, dan 2007–2008.

5. Menilai sikap dengan dua syarat

Ketika menghadapi konflik antarnegara, sikap Indonesia dapat diuji dengan dua pertanyaan: **apakah bebas?** (tidak memihak blok atau kubu) dan **apakah aktif?** (ikut mengupayakan perdamaian dengan cara damai). Gambar 4.16 menyusun keduanya menjadi empat kotak.



Gambar 4.16 Matriks bebas–aktif: hanya sikap yang tidak memihak dan ikut mengupayakan perdamaian memenuhi politik luar negeri bebas aktif. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Bentuk sikap aktif yang sesuai antara lain menyerukan gencatan senjata, menawarkan diri

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menjadi tempat atau penengah perundingan, mengirim bantuan kemanusiaan bagi korban sipil dari semua pihak, mengirim pasukan perdamaian bila ada mandat PBB, dan membawa masalah ke forum PBB atau ASEAN. Bentuk sikap yang tidak sesuai antara lain menjual senjata kepada satu pihak, bergabung dengan pakta militer, mengirim pasukan sendiri tanpa mandat, atau menyatakan "itu bukan urusan kita".

Politik luar negeri juga **diabdikan untuk kepentingan nasional** (UU 37/1999 Pasal 3). Kepentingan nasional dan perdamaian dunia tidak bertentangan. Dunia yang damai memberi Indonesia ruang untuk berdagang, menarik investasi, dan melindungi warga negaranya yang bekerja atau belajar di luar negeri. Sebaliknya, memihak satu kubu demi keuntungan sesaat dapat merusak hubungan dengan banyak negara lain dan menyeret Indonesia ke dalam konflik yang bukan miliknya. Karena itu, kepentingan nasional dalam bebas aktif dibaca secara **jangka panjang**: keamanan kawasan, kepercayaan dunia, dan kemampuan Indonesia menjadi penengah yang diterima semua pihak. Kepercayaan seperti itulah yang membuat Indonesia dipilih menjadi tuan rumah KAA, penengah konflik Kamboja, dan anggota Dewan Keamanan PBB.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Sengketa bendungan di perbatasan

Pada 2026, Negara Sagara dan Negara Tirta (keduanya fiktif) bersengketa tentang bendungan di sungai perbatasan. Bentrokan bersenjata pecah, dan ribuan warga sipil mengungsi. Kedua negara bersahabat dengan Indonesia. Empat usulan muncul dalam diskusi kelas: (A) Indonesia diam karena konflik terjadi jauh dari Asia Tenggara; (B) Indonesia mendukung Sagara karena Sagara mitra dagang terbesar; (C) Indonesia menyerukan gencatan senjata, menawarkan diri menjadi tempat perundingan, dan mengirim bantuan kemanusiaan melalui badan PBB untuk pengungsi kedua pihak; (D) Indonesia mengirim pasukan sendiri untuk menguasai bendungan agar bentrokan berhenti. Usulan mana yang paling sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif? *Kasus disusun untuk contoh; negara fiktif.*

1. Uji setiap usulan dengan syarat **bebas** (tidak memihak). (B) gagal karena memihak Sagara demi kepentingan dagang jangka pendek. (A), (C), dan (D) tidak memihak salah satu negara.
2. Uji dengan syarat **aktif** (ikut mengupayakan perdamaian). (A) gagal karena diam, itu netral pasif. (C) dan (D) sama-sama bertindak.
3. Uji **caranya**: damai dan lewat mekanisme bersama, atau sepihak? (D) gagal karena mengirim pasukan tanpa mandat PBB dan menguasai wilayah negara lain melanggar kedaulatan serta prinsip tidak campur tangan. (C) memakai cara damai dan jalur PBB, serta menolong korban dari kedua pihak.
4. Bandingkan dengan sejarah: usulan (C) mirip peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting, yaitu menyediakan jalan perundingan tanpa memihak.

Jawaban: usulan (C), karena memenuhi syarat bebas (tidak memihak), aktif (mengupayakan perdamaian), dan dijalankan dengan cara damai melalui mekanisme bersama.

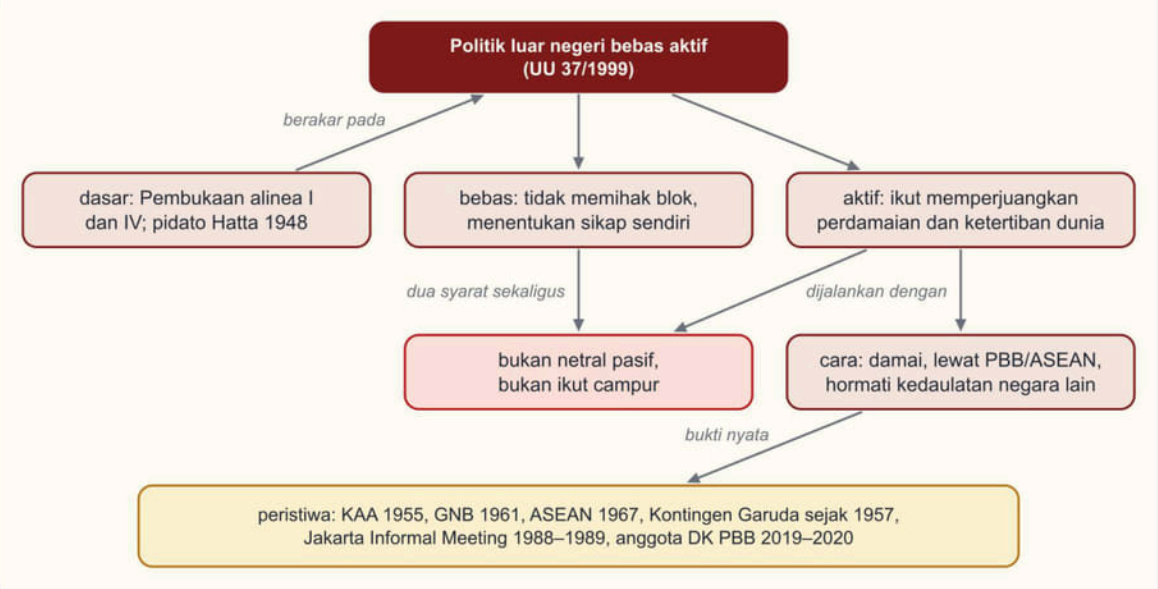
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Dasar: Pembukaan UUD NRI 1945 alinea I dan IV; UU No. 37 Tahun 1999; berakar pada pidato Hatta 2 September 1948.
- **Bebas** = tidak memihak blok, menentukan sikap sendiri; **aktif** = ikut memperjuangkan perdamaian dan ketertiban dunia. Keduanya wajib dipenuhi bersama.
- Bebas aktif **bukan netral pasif** dan **bukan ikut campur**; caranya damai, lewat PBB/ASEAN, menghormati kedaulatan.
- Bukti: KAA 1955, GNB 1961, Kontingen Garuda sejak 1957, ASEAN 1967, JIM 1988–1989, anggota DK PBB 2019–2020.

Bagan pada Gambar 4.17 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.17 Peta konsep peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Uji setiap pilihan dengan dua syarat**: apakah bebas (tidak memihak blok)? apakah aktif (ikut mengupayakan perdamaian)?
2. **Coret pilihan yang hanya memenuhi satu syarat.**
3. **Periksa caranya**: damai dan lewat mekanisme bersama, atau sepihak?

Petunjuk cepat membaca kasus:

Kasus menunjukkan ...	Konsep
tidak bergabung dengan blok, tetap berhubungan baik dengan semua	**bebas**
menawarkan jalan damai, memimpin kerja sama, mengirim misi PBB	**aktif**
diam, menunggu, menarik diri	**netral pasif** (bukan bebas aktif)
memihak satu blok atau satu kubu	melanggar unsur **bebas**
bertindak sendiri di negara lain tanpa mandat bersama	melanggar prinsip **tidak campur tangan**

Jebakan yang sering dipasang:

- **Bebas disamakan dengan diam.** Sikap pasif dikira paling aman.
- **Aktif disamakan dengan ikut campur.** Keterlibatan langsung di pihak salah satu kubu.
- **Kepentingan ekonomi jangka pendek** dijadikan alasan memihak.

> Contoh salah tafsir: ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan informal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Kamboja pada akhir 1980-an, seorang siswa menyebut tindakan itu "melanggar prinsip bebas karena ikut campur urusan negara lain". Keliru. Indonesia tidak memihak dan tidak memaksakan keputusan; Indonesia menyediakan tempat dan jalan bagi perundingan damai. Itulah unsur **aktif** yang tetap **bebas**.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Uji setiap sikap dengan dua syarat: bebas (tidak memihak) dan aktif (mengupayakan perdamaian dengan cara damai sesuai mandat).

►. Pada 2026, Kontingen Garuda bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Negara Valoria yang baru menyepakati gencatan senjata. Suatu hari, kepala sebuah desa meminta pasukan Indonesia ikut mengusir kelompok bersenjata lawan dari bukit di dekat desanya. Ia berjanji seluruh warganya akan membantu pasukan Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sikap pasukan Indonesia yang paling sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. membantu desa itu karena warganya adalah pihak yang lebih dahulu meminta pertolongan
B. menarik diri dari misi agar Indonesia tidak terseret ke dalam konflik negara tersebut
C. menolak ikut menyerang dan tetap melindungi warga sipil semua pihak sesuai mandat
D. menyerang kedua kelompok bersenjata sekaligus agar tidak ada lagi yang dapat berperang
E. membagikan senjata kepada warga desa itu agar mereka dapat membela dirinya sendiri

Pembahasan **Kunci: C**

Konsep: bebas berarti tidak memihak; **aktif** berarti ikut mengupayakan perdamaian dengan cara damai dan lewat mekanisme bersama. Pasukan perdamaian PBB bekerja dengan tiga prinsip: hadir atas **persetujuan** para pihak, **tidak memihak**, dan **tidak menggunakan kekerasan** kecuali untuk membela diri dan menjalankan mandat.

Langkah 1 – Uji syarat bebas. Ikut mengusir kelompok lawan berarti memihak.
Langkah 2 – Uji syarat aktif. Menarik diri berarti berhenti mengupayakan perdamaian.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — memihak; siapa yang lebih dahulu meminta tidak mengubah prinsip tidak memihak.
• B ✗ — netral pasif: memenuhi "bebas", tetapi gagal "aktif".
• C ✓ — tidak memihak, tetap menjalankan tugas perdamaian, dan menghormati mandat PBB.
• D ✗ — memakai kekerasan di luar mandat; perdamaian tidak dicapai dengan menyerang semua pihak.
• E ✗ — mempersenjatai satu pihak memihak sekaligus memperuncing konflik.

Jawaban: C.

Jebakan: A terdengar menolong warga; B terdengar aman. Keduanya hanya memenuhi satu dari dua syarat bebas aktif.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✎ LATIHAN

1. Pada 1–6 September 1961, Konferensi Tingkat Tinggi pertama Gerakan Non-Blok berlangsung di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri gerakan ini bersama pemimpin Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana. Gerakan Non-Blok menghimpun negara-negara yang tidak bergabung dengan Blok Barat maupun Blok Timur dan memperjuangkan perdamaian serta kemerdekaan bangsa-bangsa.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna peran Indonesia tersebut!
Sumber: Republika, "RI Minta Dukungan Nominasikan Arsip GNB" (12 Oktober 2021); Antara, "GNB Tetap Eksis hingga Abad 21".

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Ikut mendirikan Gerakan Non-Blok menunjukkan bahwa Indonesia memihak Blok Timur karena tidak bergabung dengan Blok Barat.	○	○
Menghimpun banyak negara untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan bangsa-bangsa mencerminkan unsur aktif.	○	○
Keanggotaan dalam Gerakan Non-Blok berarti Indonesia tidak boleh bekerja sama dengan negara mana pun dari kedua blok.	○	○

2. Pemilihan presiden di sebuah negara tetangga di Asia Tenggara berakhir dengan sengketa. Kedua kubu mengklaim menang, dan unjuk rasa mulai memanas di ibu kotanya. Di media sosial Indonesia, sebagian warganet mendesak pemerintah segera mengumumkan siapa pemenang yang sah, sedangkan sebagian lain mendesak pemerintah mengirim pasukan untuk menjaga ibu kota negara itu.
Sikap pemerintah Indonesia yang paling sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. mengumumkan kubu yang paling dekat dengan Indonesia sebagai pemenang yang sah
B. mengirim pasukan ke ibu kota negara itu agar unjuk rasa dapat segera dihentikan
C. tidak berkomentar apa pun karena sengketa itu sepenuhnya urusan negara tersebut
D. menghentikan kerja sama dengan negara itu sampai sengketanya selesai dengan sendirinya
E. menghormati kedaulatan negara itu dan mendorong jalan damai melalui forum ASEAN

Kunci singkat: 1. 1S 2B 3S 2. E

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Mengapa bebas aktif bukan politik netral? Jelaskan dengan satu contoh peristiwa.
- Sebutkan dua bukti peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia beserta tahunnya.
- **Yang harus kuingat:** bebas = tidak memihak blok; aktif = ikut mengupayakan perdamaian; jawaban yang tepat memenuhi keduanya, dengan cara damai dan lewat mekanisme bersama.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.5: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.5

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula

PPKN-4.6

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis peran pelajar sebagai pelopor pemilih pemula**. Ini sub bab prioritas utama. Satu soal asli 2025 menguji sub bab ini, dan soal itu adalah **soal yang paling sedikit dijawab benar dari 29 soal**: tujuan partisipasi pemilih pemula (MCMA, **13 %** benar).

Topik ini terlihat dekat dengan kehidupan siswa, tetapi soalnya menuntut ketelitian membedakan **tujuan** dari **cara**, dan membaca setiap pilihan sampai kata terakhir.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan syarat pemilih, asas pemilu, dan alur menjadi pemilih;
- membedakan tujuan partisipasi dari cara berpartisipasi;
- menjelaskan ciri pemilih cerdas dan peran pelopor pemilih pemula;
- menjelaskan pentingnya pemilih muda dengan data resmi KPU.

◆ KONSEP INTI

Banyak siswa kelas XI dan XII akan memakai hak pilihnya untuk pertama kali pada pemilu berikutnya. Hak itu tampak sederhana: datang, mencoblos, pulang. Padahal di balik satu coblosan ada hal besar yang dipertaruhkan, yaitu siapa yang akan membuat undang-undang, mengelola anggaran negara, dan memimpin pemerintahan selama lima tahun. Sub bab ini menjelaskan siapa yang berhak memilih, bagaimana prosesnya, untuk apa partisipasi itu, dan bagaimana pelajar dapat menjadi **pelopor**, yaitu orang yang memberi contoh dan mengajak teman sebayanya memakai hak pilih dengan benar.

1. Pemilu: sarana kedaulatan rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rakyat tidak mungkin memerintah bersama-sama setiap hari, sehingga rakyat memilih wakil dan pemimpin. Sarana untuk memilih itu adalah **pemilihan umum (pemilu)**. Menurut Pasal 22E, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Kepala daerah dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diatur undang-undang tersendiri.

Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama pada **1955**, ketika rakyat memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Pemilu itu sering dikenang sebagai pemilu yang demokratis, karena diikuti banyak partai dan berlangsung relatif tertib meskipun negara baru berumur sepuluh tahun. Setelah amandemen UUD, rakyat untuk pertama kalinya memilih presiden dan wakil presiden secara langsung pada **2004**. Sejak itu, setiap warga yang memenuhi syarat ikut

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menentukan siapa pemimpin negaranya. Pada Pemilu 2024, pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024: dalam satu hari, pemilih menerima beberapa surat suara sekaligus untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

2. Siapa yang berhak memilih?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut bahwa **pemilih** adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara **sudah genap berumur 17 tahun atau lebih**, **sudah kawin**, atau **sudah pernah kawin**. Ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, umur dihitung **pada hari pemungutan suara**, bukan pada hari pendaftaran atau awal tahun. Seseorang yang berulang tahun ke-17 sehari sebelum pemungutan suara sudah berhak memilih. Kedua, hak saja belum cukup. Agar dapat memakai haknya, seseorang harus **terdaftar** dalam daftar pemilih. Anggota TNI dan Polri yang masih aktif tidak menggunakan hak pilihnya, agar kedua lembaga itu tetap netral.

Dalam pembicaraan sehari-hari dikenal dua istilah. **Pemilih pemula** adalah pemilih yang baru pertama kali memakai hak pilihnya, umumnya berusia 17–21 tahun. **Pemilih muda** lebih luas, biasanya mencakup generasi Z dan milenial.

3. Asas pemilu: luber jurdil

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**, disingkat **luber jurdil**. Setiap asas punya arti nyata bagi pemilih:

Asas	Artinya bagi pemilih
langsung	memberikan suara sendiri, tidak diwakilkan
umum	semua warga yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial
bebas	memilih tanpa paksaan, ancaman, atau imbalan
rahasia	pilihannya tidak boleh diketahui orang lain, kecuali ia sendiri ingin memberitahukannya
jujur dan adil	semua pihak bertindak jujur; setiap pemilih dan peserta diperlakukan sama

Asas-asas ini saling menjaga. Asas **rahasia**, misalnya, melindungi asas **bebas**: karena tidak ada yang tahu pilihanmu, tidak ada yang dapat menghukum atau memberi imbalan atas pilihan itu. Karena itu, memotret surat suara yang sudah dicoblos untuk ditunjukkan kepada orang lain merusak kedua asas sekaligus.

4. Alur menjadi pemilih

Hak pilih baru dapat dipakai setelah melewati serangkaian tahap. Gambar 4.18 memperlihatkan alurnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.18 Alur menjadi pemilih, dari memenuhi syarat dan didata sampai suara dihitung secara terbuka di TPS. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

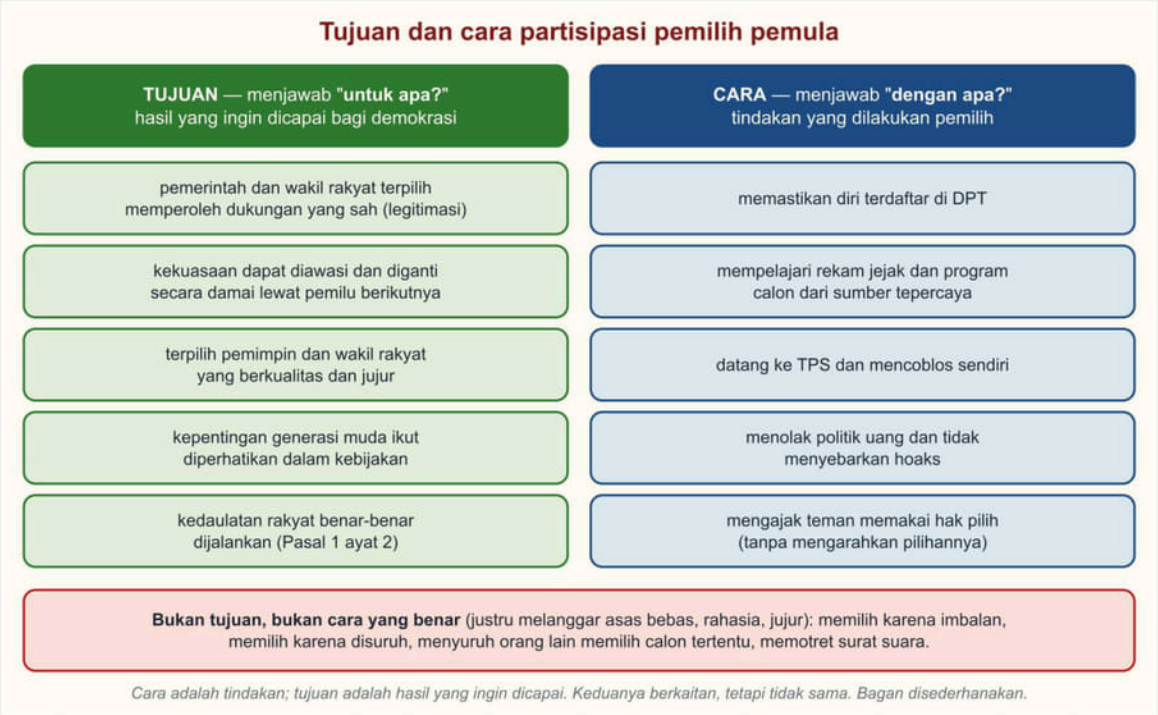
Sebelum hari pemungutan suara, KPU menyusun daftar pemilih. Data awal berasal dari data kependudukan pemerintah. Petugas pemutakhiran data pemilih (**Pantarlih**) lalu melakukan **pencocokan dan penelitian (coklit)**: mendatangi rumah warga untuk memastikan siapa yang memenuhi syarat, siapa yang sudah meninggal, dan siapa yang pindah. Hasilnya diumumkan sebagai **Daftar Pemilih Sementara (DPS)**. Pada tahap ini warga dapat memeriksa namanya dan memberi tanggapan bila ada yang keliru atau tertinggal. Setelah diperbaiki, KPU menetapkan **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**. Nama dalam DPT dapat dicek lewat layanan daring KPU atau di kantor desa/kelurahan.

Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke **tempat pemungutan suara (TPS)** sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan, membawa KTP elektronik, lalu mencoblos di bilik suara secara rahasia. Jarinya dicelup tinta sebagai tanda sudah memilih, agar tidak ada yang memilih dua kali. Setelah TPS ditutup, suara **dihitung secara terbuka** di TPS dan boleh disaksikan warga serta saksi peserta pemilu. Hasilnya direkapitulasi secara berjenjang sampai ditetapkan KPU. Pemilih yang pindah domisili atau sedang merantau dapat mengurus **pindah memilih** sebelum batas waktu yang ditentukan.

5. Tujuan dan cara partisipasi

Inilah bagian yang paling sering membuat siswa keliru. **Partisipasi politik** adalah keikutsertaan warga dalam proses politik, termasuk pemilu. Partisipasi itu dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda (Gambar 4.19).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.19 Tujuan partisipasi (untuk apa) dan cara berpartisipasi (dengan apa) bagi pemilih pemula, serta perilaku yang justru melanggar asas pemilu. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Tujuan partisipasi menjawab pertanyaan **"untuk apa?"**: hasil yang ingin dicapai bagi demokrasi dan bangsa. Ada beberapa tujuan penting. Pertama, **legitimasi**: pemerintah dan wakil rakyat yang dipilih oleh banyak warga memperoleh dukungan yang sah dan kuat untuk memimpin. Kedua, **kontrol**: kekuasaan dapat dinilai dan, bila perlu, diganti secara damai lewat pemilu berikutnya. Ketiga, **kualitas wakil**: makin banyak pemilih yang menimbang dengan cermat, makin besar peluang terpilihnya pemimpin yang jujur dan cakap. Keempat, **kepentingan generasi muda diperhatikan**: kelompok yang aktif memilih lebih didengar dalam pembuatan kebijakan, misalnya tentang pendidikan dan lapangan kerja. Semua tujuan itu bermuara pada **kedaulatan rakyat** yang benar-benar dijalankan.

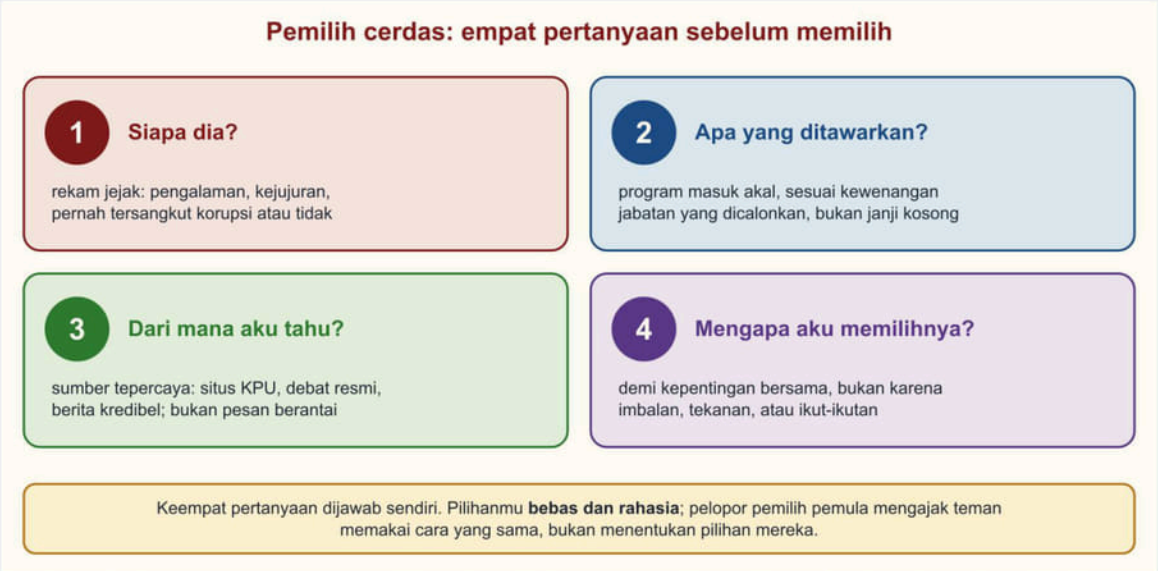
Cara berpartisipasi menjawab pertanyaan **"dengan apa?"**: tindakan yang dilakukan pemilih. Contohnya memastikan diri terdaftar di DPT, mempelajari rekam jejak dan program calon, mengikuti sosialisasi, datang ke TPS, menolak politik uang, tidak menyebarkan hoaks, dan mengajak teman memakai hak pilihnya.

Tujuan dan cara berkaitan: cara dijalankan untuk mencapai tujuan. Namun, keduanya **tidak sama**. "Datang ke TPS membawa KTP elektronik" adalah cara, bukan tujuan. "Pemerintahan memperoleh dukungan yang sah dari rakyat" adalah tujuan, bukan cara. Selain itu, ada perilaku yang **bukan keduanya**, karena justru melanggar asas: memilih karena menerima imbalan, memilih karena disuruh, atau menyuruh orang lain memilih calon tertentu.

6. Pemilih cerdas

Pemilih cerdas adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan karena ikut-ikutan, imbalan, atau tekanan. Gambar 4.20 merangkumnya dalam empat pertanyaan yang diajukan pemilih kepada dirinya sendiri.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan



Gambar 4.20 Empat pertanyaan pemilih cerdas sebelum menentukan pilihan. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Pertanyaan pertama menyangkut **rekam jejak**: apa yang sudah dilakukan calon, apakah ia jujur, dan apakah ia pernah tersangkut korupsi. Pertanyaan kedua menyangkut **program**: apakah janjinya masuk akal dan sesuai kewenangan jabatan yang dicalonkan. Calon anggota DPRD kabupaten, misalnya, tidak berwenang mengubah undang-undang nasional. Pertanyaan ketiga menyangkut **sumber informasi**: apakah informasinya berasal dari sumber tepercaya, seperti situs KPU, debat resmi, dan media kredibel, atau dari pesan berantai yang tidak jelas asalnya. Pertanyaan keempat menyangkut **alasan**: apakah pilihan didasarkan pada kepentingan bersama, bukan imbalan atau tekanan.

Pemilih cerdas juga **menolak politik uang**. Memberikan uang atau barang untuk memengaruhi pilihan dilarang dan diancam pidana dalam UU 7/2017. Politik uang merusak asas bebas dan jujur, dan calon yang "membeli" suara cenderung berusaha mengembalikan modalnya setelah menjabat.

7. Pelajar sebagai pelopor dan fakta pemilih muda

Pelopor pemilih pemula tidak hanya memilih untuk dirinya. Ia memberi contoh dan mengajak teman sebaya memakai hak pilih dengan benar: mengingatkan teman untuk mengecek DPT, membagikan informasi resmi tentang tahapan pemilu, mengajak berdiskusi tentang program calon dengan santun, dan menolak hoaks. Batasnya tegas: pelopor **tidak mengarahkan** teman memilih calon tertentu, karena pilihan setiap orang bebas dan rahasia. Mengajak memilih berbeda dengan mengajak memilih **seseorang**.

Banyak kegiatan pelopor berlangsung di ruang digital, karena di sanalah pemilih muda paling banyak memperoleh informasi. Menjelang pemilu, media sosial dipenuhi unggahan tentang calon. Sebagian berisi fakta, sebagian berisi potongan video tanpa konteks, dan sebagian lagi kabar bohong yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan atau mengangkat seseorang. Pelopor membiasakan diri dan temannya bertanya sebelum membagikan: siapa yang membuat unggahan ini, apa sumber aslinya, dan apakah media tepercaya juga memberitakannya. Pelopor

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

juga menjaga cara berdiskusi. Berbeda pilihan dengan teman adalah hal biasa dalam demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan itu tidak berubah menjadi saling menghina, memutus pertemanan, atau mengejek latar belakang suku dan agama. Pemilu berlangsung satu hari, tetapi persaudaraan sebagai satu bangsa harus bertahan sesudahnya. Dengan begitu, peran pelopor pemilih pemula juga terhubung dengan menjaga keutuhan NKRI yang dibahas di sub bab 4.1.

Mengapa peran ini penting? Data resmi KPU menjawabnya. Dalam rapat pleno **2 Juli 2023**, KPU menetapkan **Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024** sebanyak **204.807.222 pemilih**, terdiri atas sekitar 203,1 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta di luar negeri. Dari jumlah itu, pemilih **generasi milenial** sekitar **68,8 juta (33,60 %)** dan **generasi Z** sekitar **46,8 juta (22,85 %)**. Bila digabung, pemilih muda mencakup **56,45 %**, atau lebih dari separuh seluruh pemilih. Artinya, sikap generasi muda, apakah datang memilih dengan cermat, golput, atau mudah termakan hoaks, sangat memengaruhi mutu hasil pemilu. Pelajar yang menjadi pelopor ikut menentukan arah bangsa, bukan dengan menyuruh orang memilih calon tertentu, melainkan dengan memastikan sebanyak mungkin teman memilih secara sadar dan bebas.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Wulan belum yakin namanya terdaftar

Wulan (tokoh fiktif) lahir pada 2 Maret 2011. Pada 2027 ia duduk di kelas XI. Ia ingin memakai hak pilih pada pemilu berikutnya, yang dalam contoh ini dimisalkan berlangsung pada Februari 2029. Wulan baru pindah rumah ke kecamatan lain bersama keluarganya. Apa yang harus ia lakukan agar benar-benar dapat memilih? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif dan tanggal pemilu dimisalkan.*

1. Periksa **syarat umur** pada hari pemungutan suara. Wulan genap 17 tahun pada 2 Maret 2028, jadi pada Februari 2029 ia sudah berumur 17 tahun. Ia **memenuhi syarat**.
2. Siapkan **identitas**: Wulan melakukan perekaman KTP elektronik setelah berumur 17 tahun dan memperbarui alamatnya sesuai tempat tinggal baru.
3. Pastikan **terdaftar**. Saat Pantarlih melakukan coklit, Wulan dan keluarganya memastikan namanya tercatat di alamat baru. Ketika DPS diumumkan, ia mengecek namanya. Bila namanya belum ada atau tercatat di alamat lama, ia menyampaikan tanggapan kepada panitia pemungutan suara di desa/kelurahan sebelum DPT ditetapkan.
4. Cek kembali **DPT** lewat layanan daring KPU atau kantor desa/kelurahan, lalu catat lokasi TPS-nya.
5. Pada hari pemungutan suara, Wulan datang ke TPS membawa surat pemberitahuan dan KTP elektronik, lalu mencoblos sendiri secara rahasia.

Jawaban: Wulan sudah berhak memilih karena genap 17 tahun sebelum hari pemungutan suara; ia harus memastikan identitasnya sesuai alamat baru, namanya masuk DPS lalu DPT, dan mencoblos di TPS yang tercantum.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Contoh 2 — "Satu suaraku tidak ada artinya"

Menjelang pemilu, Rizal (tokoh fiktif, 18 tahun) berkata kepada teman-temannya di kelas: "Pemilihnya ratusan juta. Satu suaraku tidak ada artinya. Lebih baik aku liburan saja." Dimas, pengurus OSIS, ingin menanggapinya sebagai pelopor pemilih pemula. Tanggapan seperti apa yang tepat? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh fiktif.*

1. Pahami **posisi hukum**: memilih adalah hak. Rizal tidak dapat dipaksa, dan Dimas tidak boleh mengancam atau mempermalukannya.
2. Tunjukkan **tujuan partisipasi**: suara bukan hanya soal menang atau kalah. Makin banyak warga yang memilih secara sadar, makin kuat **legitimasi** pemerintah terpilih, dan makin besar perhatian para calon terhadap kebutuhan kelompok yang aktif memilih.
3. Pakai **data** yang benar: lebih dari separuh pemilih Pemilu 2024 adalah generasi milenial dan Z. Bila banyak anak muda berpikir seperti Rizal, kepentingan generasi muda kehilangan bobot.
4. Tawarkan **cara**: mengajak Rizal mengecek namanya di DPT dan mempelajari program calon dari sumber resmi bersama-sama.
5. Jaga **batas pelopor**: Dimas tidak menyarankan calon tertentu. Pilihan tetap milik Rizal.

Jawaban: Dimas menjelaskan tujuan partisipasi (legitimasi dan terwakilinya kepentingan generasi muda) dengan data resmi, mengajak Rizal menyiapkan diri sebagai pemilih cerdas, dan membiarkan pilihan calon sepenuhnya kepada Rizal.

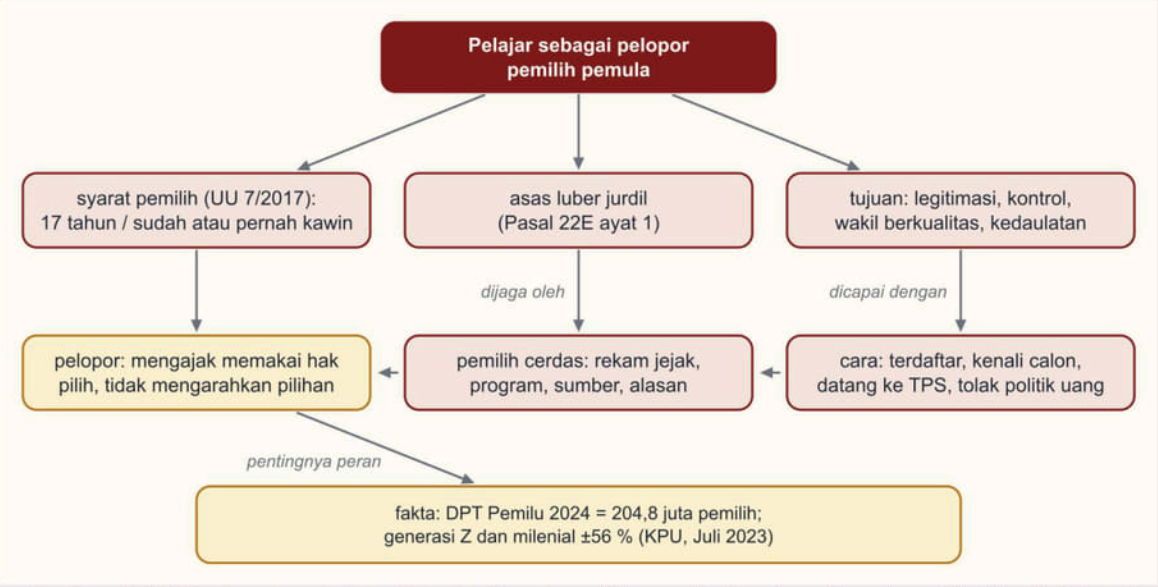
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Pemilih: WNI genap 17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau pernah kawin (UU 7/2017), dan harus **terdaftar** di DPT.
- Asas pemilu: luber jurdil (Pasal 22E ayat 1); asas rahasia melindungi asas bebas.
- **Tujuan** menjawab "untuk apa" (legitimasi, kontrol, wakil berkualitas, kepentingan generasi muda, kedaulatan rakyat); **cara** menjawab "dengan apa" (terdaftar, mengenali calon, datang ke TPS, menolak politik uang dan hoaks).
- Pemilih cerdas menimbang rekam jejak, program, sumber informasi, dan alasan memilih.
- Pelopor mengajak memakai hak pilih, tidak mengarahkan pilihan; pemilih muda lebih dari separuh DPT Pemilu 2024.

Bagan pada Gambar 4.21 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.21 Peta konsep pelajar sebagai pelopor pemilih pemula. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Garis bawahi kata tanya**: tujuan, cara, sikap, atau data?
2. **Untuk MCMA, periksa setiap pilihan satu per satu** dengan pertanyaan "untuk apa?" atau "dengan apa?". Jangan menebak jumlah jawaban.
3. **Baca setiap pilihan sampai titik.** Pilihan yang benar di awal dapat ditutup dengan bagian yang melanggar asas.
4. **Untuk data**, hitung dulu, baru menyimpulkan. Pernyataan "kelompok X menjadi penentu" butuh data bahwa kelompok itu **lebih dari separuh** pemilih, bukan sekadar kelompok terbesar.

Petunjuk cepat membaca kasus:

Kasus menunjukkan ...	Konsep
hasil yang ingin dicapai bagi demokrasi	**tujuan** partisipasi
tindakan mendaftar, datang, mempelajari	**cara** berpartisipasi
memilih berdasarkan rekam jejak dan program, menolak imbalan	**pemilih cerdas**
mengajak teman memakai hak pilih dengan benar	**pelopor** pemilih pemula
mengarahkan pilihan orang lain, menerima imbalan	melanggar asas **bebas** dan **jujur**

Jebakan yang sering dipasang:

- **Cara dikira tujuan.**
- **Pernyataan yang terdengar positif.** Baik, tetapi tidak menjawab "untuk apa" bagi demokrasi.
- **Kalimat gabungan.** Separuh pertama benar, separuh akhir melanggar asas.
- **Mengarahkan pilihan orang lain** dikira peran pelopor.
- **"Terbesar" disamakan dengan "penentu".**

> Contoh salah tafsir: ditanya "apa tujuan pemilih pemula ikut pemilu?", seorang siswa menjawab "membawa surat undangan dan KTP ke TPS tepat waktu". Itu **cara** memakai hak pilih, bukan tujuannya. Tujuannya menjawab pertanyaan "untuk apa", misalnya agar pemerintahan yang terpilih memperoleh dukungan yang sah dari rakyat.

● BEDAH SOAL ASLI

Soal asli TKA 2025 untuk sub bab ini ada utuh di **Simulasi 1**. Kerjakan dulu di sana.

Nomor 18 (tujuan partisipasi pemilih pemula, MCMA, 13 % benar). Stimulus menceritakan seorang siswa kelas XII yang mengikuti sosialisasi pemilih pemula dan mengajak teman-

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

temannya ikut pemilu. Kamu diminta memilih **semua** pernyataan yang menunjukkan **tujuan** partisipasi pemilih pemula.

- Konsep kunci: tujuan dan cara (bagian 5), pemilih cerdas (bagian 6).
- Langkah: tulis ✓ atau ✗ di samping setiap pilihan. Untuk setiap pilihan, tanyakan "apakah ini hasil yang ingin dicapai bagi demokrasi?" lalu baca sampai kata terakhir.
- Pengecoh yang dipasang: pernyataan yang terdengar positif tetapi tidak menjawab "tujuan", dan pernyataan yang memuat bagian keliru di akhir kalimat.

Rujukan: soal nomor 18 pada Soal Asli TKA 2025; pembahasannya ada di Bagian D.

• BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Kenali asas yang dilanggar, lalu pilih sikap yang menolak pelanggaran sekaligus menunjukkan jalan yang sah.

►. Ibu Fajar ditugaskan kantornya ke luar kota tepat pada hari pemungutan suara pemilu berikutnya. Ia lalu meminta Fajar (18 tahun), pemilih pemula, membawa KTP elektronik dan surat pemberitahuan milik ibunya agar Fajar sekalian mencoblos atas nama ibunya di TPS. "Pilihan kita toh sama," kata ibunya. Pemungutan suara masih beberapa bulan lagi. Sikap Fajar yang paling tepat sebagai pelopor pemilih pemula adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menuruti permintaan itu karena ibunya sudah setuju dan pilihan mereka memang sama
B. menolak karena suara tak boleh diwakilkan, lalu menyarankan ibu mengurus pindah memilih
C. menuruti permintaan itu asalkan Fajar memberi tahu petugas KPPS di TPS lebih dahulu
D. menolak lalu menyarankan ibunya tidak usah memilih karena tugas kantornya lebih penting
E. menuruti permintaan itu karena asas rahasia tetap terjaga selama tidak ada yang melihatnya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pembahasan **Kunci: B**

Konsep: asas **langsung** berarti setiap pemilih memberikan suaranya sendiri, tidak diwakilkan. Pemilih yang pada hari pemungutan suara berada di tempat lain dapat mengurus **pindah memilih** sebelum batas waktu. Pelopor pemilih pemula memberi contoh menaati asas pemilu dan membantu orang lain memakai haknya dengan benar.

Langkah 1 – Kenali pelanggarannya. Mencoblos atas nama orang lain melanggar asas langsung (dan jujur), walaupun pilihannya sama.
Langkah 2 – Cari jalan keluar yang sah. Waktu masih beberapa bulan, sehingga ibu Fajar dapat mengurus pindah memilih.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — persetujuan ibu dan kesamaan pilihan tidak menghapus pelanggaran asas langsung.
• B ✓ — menolak pelanggaran sekaligus menunjukkan cara sah agar ibunya tetap dapat memilih.
• C ✗ — petugas tidak berwenang membolehkan pemilih diwakilkan; memberi tahu petugas tidak membuatnya sah.
• D ✗ — menolaknya benar, tetapi menyarankan tidak memilih padahal ada jalan sah; pelopor justru mengajak memakai hak pilih.
• E ✗ — asas yang dilanggar adalah asas langsung; "tidak ada yang melihat" tidak membuat perbuatan itu sah.

Jawaban: B.

Jebakan: D menggoda karena separuh awalnya benar (menolak), tetapi separuh akhirnya mengabaikan hak pilih ibu.

✎ LATIHAN

1. Pada 2027, siniar OSIS sebuah SMA mewawancarai lima siswa yang baru berusia 17 tahun dan akan menjadi pemilih pemula. Pembawa acara mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka: "Mengapa kamu akan datang ke TPS pada pemilu nanti?" Jawaban kelima siswa itu kemudian ditulis ulang di akun media sosial sekolah.
Jawaban siswa manakah yang menunjukkan tujuan partisipasi politik pemilih pemula? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. "Aku akan datang membawa KTP elektronik dan surat pemberitahuan tepat waktu."
☐ B. "Supaya wakil rakyat yang terpilih memperoleh mandat yang sah dari banyak warga."
☐ C. "Supaya aku mendapat uang transport yang dijanjikan tim sukses seorang calon."
☐ D. "Supaya pemimpin yang ingkar janji dapat diganti secara damai pada pemilu nanti."
☐ E. "Karena aku sudah membaca rekam jejak semua calon di situs resmi milik KPU."

2. Menjelang pemilihan, grup percakapan kelas di banyak sekolah sering terbelah menjadi kubu-kubu pendukung calon. Diskusi tentang program berubah menjadi saling ejek, bahkan menyinggung suku dan agama calon, sampai ada siswa yang keluar dari grup.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pengurus OSIS yang ingin menjadi pelopor pemilih pemula pun bingung harus berbuat apa. Langkah pelopor pemilih pemula yang paling tepat dalam keadaan tersebut adalah ....

A. membubarkan grup kelas agar tidak ada lagi tempat bagi siswa untuk saling berselisih
B. mengajak semua teman memilih calon yang sama agar suasana kelas dapat kembali rukun
C. melarang siapa pun membicarakan pemilihan di grup kelas sampai hari pemungutan suara
D. mengajak teman membahas program dengan santun dan menegaskan bahwa beda pilihan wajar
E. membela kubu yang dianggap paling benar agar perselisihan di grup kelas lebih cepat berakhir

Kunci singkat: 1. B, D 2. D

✔ PERIKSA DIRI

- Tuliskan satu tujuan dan satu cara partisipasi pemilih pemula, lalu jelaskan bedanya.
- Mengapa seorang pelopor pemilih pemula tidak boleh mengarahkan temannya memilih calon tertentu?
- **Yang harus kuingat:** tujuan menjawab "untuk apa", cara menjawab "dengan apa"; baca setiap pilihan sampai kata terakhir.

Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.6: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.6

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab 4.7 · Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI

PPKN-4.7

◎ APA YANG DIUJI

Kisi-kisi meminta kamu **menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terhadap keutuhan NKRI**. Topik ini tidak muncul sebagai soal tersendiri pada TKA 2025, tetapi ada di contoh soal resmi Pusmendik. Soalnya biasanya menyajikan sebuah peristiwa tentang teknologi, lalu menanyakan dampak atau tindakan yang tepat.

Kesulitan utama sub bab ini: teknologi hampir selalu membawa **dua sisi** sekaligus, dan soal meminta kamu memilih sisi yang **ditunjuk stimulus** serta dampaknya bagi **keutuhan bangsa**, bukan sekadar dampak teknis.

Setelah mempelajari sub bab ini, kamu dapat:

- menjelaskan peran teknologi sebagai pemersatu Nusantara dengan contoh sejarahnya;
- menjelaskan dampak ganda kemajuan IPTEK bagi keutuhan NKRI;
- membedakan dampak teknis dari dampak strategis;
- menjelaskan ancaman siber, kedaulatan data, dan literasi digital.

◆ KONSEP INTI

Wilayah Indonesia membentang lebih dari 5.000 km dari barat ke timur, dipisahkan laut, gunung, dan hutan. Selama berabad-abad, kabar dari satu pulau ke pulau lain bisa tiba berminggu-minggu kemudian. Jarak seperti itu membuat persatuan sulit dirasakan: orang di satu pulau hampir tidak tahu apa yang terjadi di pulau lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengubah keadaan itu. Hari ini, siswa di Aceh dan di Papua dapat menonton siaran yang sama, belajar di kelas daring yang sama, bahkan bercakap langsung lewat video. Namun, teknologi yang sama juga dapat dipakai untuk menyebar kebencian, mencuri data, dan melumpuhkan layanan negara. Sub bab ini menjelaskan kedua sisi itu dan apa yang menentukan sisi mana yang lebih kuat.

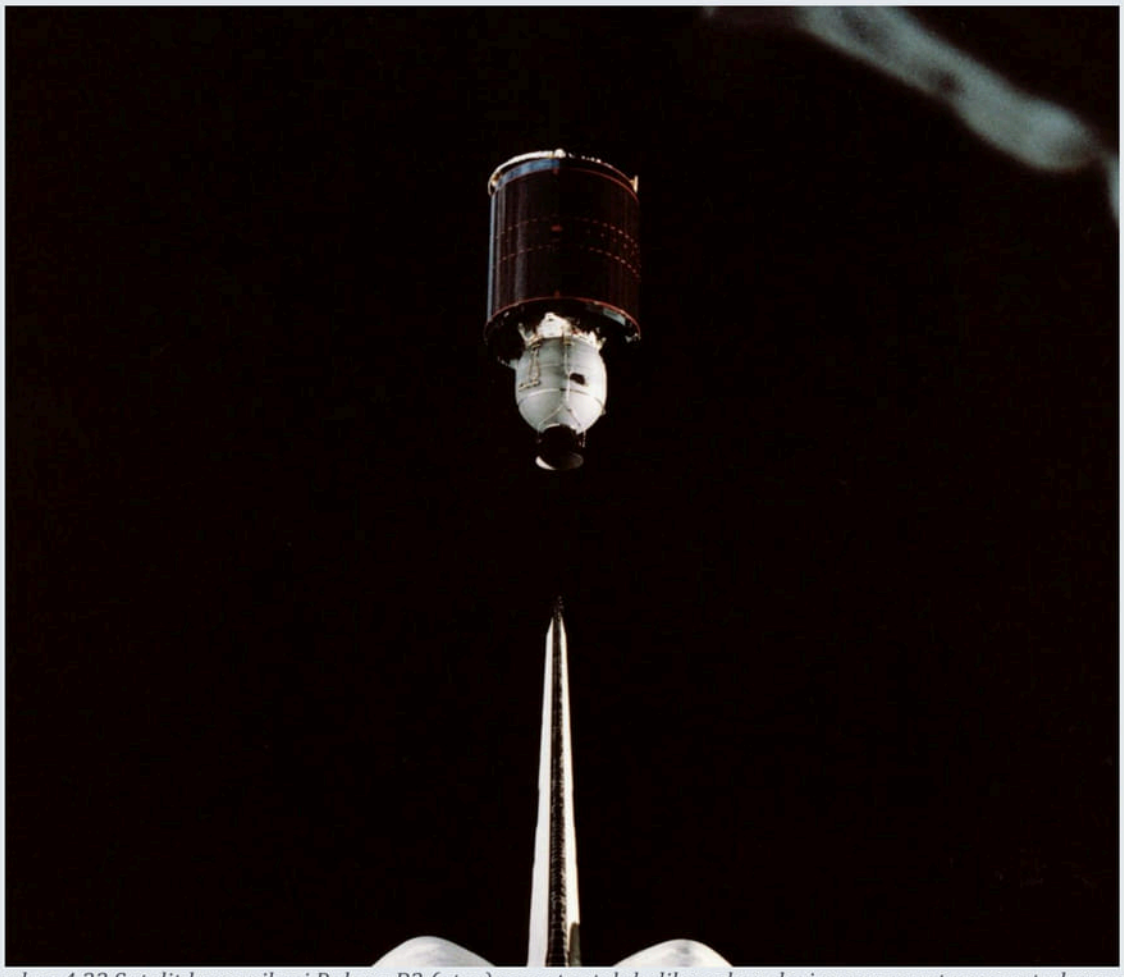
1. Teknologi sebagai pemersatu: dari Palapa sampai Palapa Ring

Pada 1970-an, pemerintah menyadari bahwa membangun jaringan telepon dan siaran lewat kabel darat ke ribuan pulau akan sangat mahal dan lama. Jalan keluarnya adalah satelit. Satelit komunikasi **Palapa A1** diluncurkan dengan roket Delta dari Cape Canaveral, Amerika Serikat, pada **8 Juli 1976** waktu setempat (9 Juli 1976 waktu Indonesia) dan mulai beroperasi pada 16 Agustus 1976. Dengan satelit itu, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan **sistem komunikasi satelit domestik**. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada, yang bertekad mempersatukan Nusantara. Pilihan nama itu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menunjukkan tujuan strategisnya: satelit bukan sekadar alat komunikasi, melainkan alat **pemersatu bangsa**. Lewat satelit, sambungan telepon jarak jauh dan siaran televisi dapat menjangkau provinsi-provinsi yang terpisah laut. Warga di berbagai pulau dapat mengikuti berita dan peristiwa nasional yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Generasi berikutnya menyusul. Gambar 4.22 memperlihatkan satelit **Palapa B2** sesaat setelah dilepaskan dari ruang muat pesawat ulang-alik *Challenger* milik NASA pada Februari 1984. Satelit ini kemudian gagal mencapai orbitnya karena motor pendorongnya tidak bekerja, lalu diambil kembali oleh pesawat ulang-alik lain pada November 1984. Kisah ini juga mengingatkan bahwa teknologi tinggi selalu mengandung risiko.



Gambar 4.22 Satelit komunikasi Palapa B2 (atas) sesaat setelah dilepaskan dari ruang muat pesawat ulang-alik Challenger (tampak ekornya di bawah), Februari 1984. Sumber: NASA, Wikimedia Commons, domain publik; dipotong dan diperkecil.

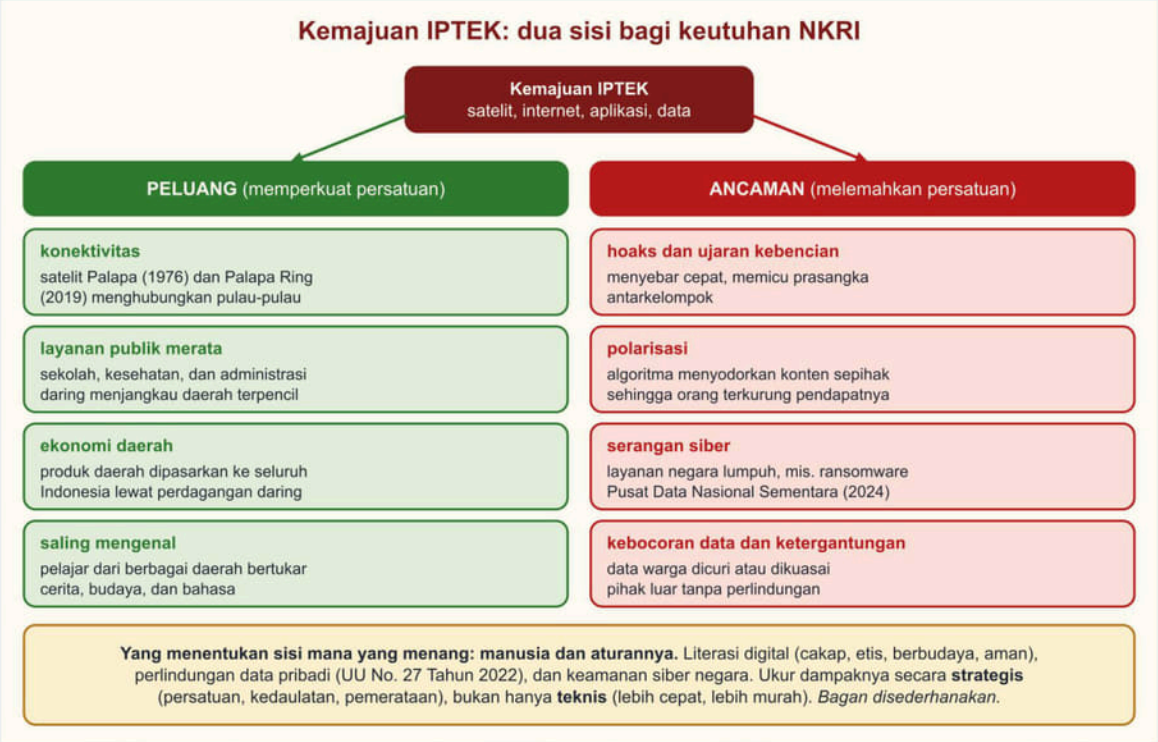
Satelit menghubungkan pulau lewat udara. Untuk internet cepat, dibutuhkan jaringan **serat optik**, yaitu kabel kaca halus yang mengalirkan data dengan cahaya. Pemerintah membangun **Palapa Ring**, jaringan tulang punggung serat optik yang dibagi menjadi paket barat, tengah, dan timur, sepanjang lebih dari 12.000 km di darat dan dasar laut. Paket timur, yang menjangkau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, selesai pada 2019, dan Presiden meresmikan Palapa Ring pada **14 Oktober 2019**. Jaringan ini menghubungkan 514 kabupaten/kota. Tujuannya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

mengurangi **kesenjangan digital**: sebelum ada Palapa Ring, banyak kabupaten di Papua sama sekali belum terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi.

2. Dampak ganda kemajuan IPTEK

Teknologi bersifat **ganda**: ia dapat memperkuat atau melemahkan persatuan, bergantung pada cara manusia memakainya. Gambar 4.23 menyusun kedua sisi itu.



Gambar 4.23 Peluang dan ancaman kemajuan IPTEK bagi keutuhan NKRI, serta hal yang menentukan sisi mana yang lebih kuat. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Di sisi **peluang**, teknologi menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat dan dengan daerah lain. Layanan publik, seperti pendaftaran sekolah, konsultasi kesehatan, dan administrasi kependudukan, dapat menjangkau warga yang dulu harus menempuh perjalanan berhari-hari. Pelaku usaha di daerah dapat menjual produknya ke seluruh Indonesia. Pelajar dari berbagai daerah dapat saling mengenal budaya dan bahasa satu sama lain. Semua itu memperkuat rasa sebagai satu bangsa.

Di sisi **ancaman**, kabar bohong (**hoaks**) dan ujaran kebencian menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Video rekayasa berbasis kecerdasan buatan (***deepfake***) dapat membuat seseorang tampak mengatakan hal yang tidak pernah ia katakan. Algoritma media sosial cenderung menyodorkan konten yang sesuai dengan pendapat penggunanya, sehingga orang terkurung dalam **ruang gema** (*echo chamber*) dan makin sulit menerima pandangan berbeda. Akibatnya adalah **polarisasi**: masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu yang saling curiga. Ancaman lain adalah **serangan siber** terhadap sistem negara dan **kebocoran data pribadi** warga. Semua ini termasuk **ancaman nonmiliter** (lihat sub bab 4.1 dan 4.4).

Penting diingat: teknologi **bukan penyebab tunggal**. Konflik yang meledak setelah sebuah hoaks menyebar biasanya juga punya akar lain, misalnya prasangka lama atau ketimpangan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Teknologi mempercepat dan memperluas, tetapi manusia dan keadaan sosialnya tetap ikut menentukan.

3. Dampak teknis dan dampak strategis

Untuk menilai pengaruh teknologi terhadap keutuhan NKRI, bedakan dua tingkat dampak. **Dampak teknis** menyangkut cara kerja: lebih cepat, lebih murah, lebih jernih, lebih praktis. **Dampak strategis** menyangkut kehidupan bangsa: persatuan, kedaulatan, pemerataan, dan rasa memiliki terhadap negara.

Ambil contoh Palapa Ring. Dampak teknisnya: internet di Papua menjadi lebih cepat dan stabil. Dampak strategisnya: warga Papua memperoleh akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih setara dengan daerah lain, sehingga kesenjangan yang dapat memicu rasa ditinggalkan berkurang. Dalam bahasa Wawasan Nusantara (sub bab 4.3), Palapa Ring memperkuat **kesatuan ekonomi** dan **kesatuan sosial budaya**. Soal tentang keutuhan NKRI hampir selalu menanyakan dampak strategis, bukan dampak teknis.

Hal yang sama berlaku untuk dampak negatif. Serangan siber terhadap pusat data, misalnya, berdampak teknis: layanan berhenti dan data tidak dapat dibuka. Dampak strategisnya lebih dalam: kepercayaan warga kepada layanan negara menurun, data warga terancam jatuh ke tangan pihak asing, dan negara terlihat lemah menjaga kedaulatannya di ruang digital. Begitu pula hoaks yang mengadu domba suku. Dampak teknisnya hanya berupa pesan yang tersebar cepat, tetapi dampak strategisnya adalah retaknya rasa saling percaya antarkelompok, yang dapat berujung pada konflik. Jadi, setiap kali menilai teknologi, ajukan pertanyaan lanjutan: "lalu apa artinya bagi persatuan dan kedaulatan bangsa?"

4. Ancaman siber dan kedaulatan data

Data adalah catatan tentang warga dan negara: identitas, kesehatan, keuangan, sampai lokasi. Di era digital, data menjadi sangat berharga, sehingga perlu dilindungi seperti wilayah. **Kedaulatan data** berarti negara mampu menguasai, mengatur, dan melindungi data warganya dan data penting negaranya, sehingga tidak disalahgunakan pihak lain.

Peristiwa nyata menunjukkan rawannya hal ini. Pada **Juni 2024**, serangan *ransomware* melumpuhkan **Pusat Data Nasional Sementara** di Surabaya dan mengganggu layanan lebih dari 200 instansi, termasuk layanan keimigrasian di bandara (sub bab 4.4). Lembaga negara yang membidangi keamanan siber adalah **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**.

Untuk melindungi data warga, Indonesia menetapkan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**, yang diundangkan pada **17 Oktober 2022**. Undang-undang ini mengatur, antara lain, bahwa pengolahan data pribadi harus memiliki dasar yang sah, misalnya persetujuan pemilik data; bahwa pemilik data berhak mengetahui dan meminta penghapusan datanya; dan bahwa pihak yang mengelola data wajib menjaga keamanannya. Pihak yang mengelola data diberi waktu dua tahun sejak undang-undang diundangkan untuk menyesuaikan diri.

5. Literasi digital: warga sebagai penentu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Aturan dan lembaga tidak cukup bila warganya tidak cakap. **Literasi digital** adalah kemampuan memakai teknologi digital secara cakap, beretika, dan aman. Kerangka literasi digital nasional memakai empat pilar:

Pilar	Isi
cakap digital	mampu memakai perangkat dan aplikasi, termasuk mencari dan memeriksa informasi
etika digital	sopan, jujur, dan bertanggung jawab di ruang digital
budaya digital	membawa nilai Pancasila dan kebinekaan ke ruang digital
aman digital	melindungi data pribadi dan mengenali penipuan

Memeriksa kebenaran informasi dapat dilakukan dengan langkah sederhana. Pertama, perhatikan **sumbernya**: apakah berasal dari lembaga resmi atau media yang jelas alamat dan penanggung jawabnya, atau dari akun tanpa identitas. Kedua, cari **berita yang sama** di beberapa media tepercaya; kabar penting yang benar biasanya diberitakan banyak media. Ketiga, periksa **tanggal dan konteks**: foto atau video lama sering diunggah ulang seolah-olah peristiwa baru. Keempat, waspadai judul yang memancing marah atau takut dan ajakan "sebarkan sebelum dihapus"; keduanya ciri umum hoaks. Bila ragu, jangan dibagikan. Satu orang yang berhenti meneruskan kabar bohong sudah ikut memutus rantai penyebarannya.

Warga yang cakap digital memeriksa kebenaran informasi sebelum percaya dan membagikannya, memakai kanal resmi untuk melapor, menjaga data pribadi, berdiskusi dengan santun dan berdasarkan data, serta membuka diri pada sudut pandang yang beragam. Dengan cara itu, warga ikut menentukan bahwa kemajuan IPTEK lebih banyak memperkuat persatuan daripada melemahkannya.

CONTOH TERSELESAIKAN

Contoh 1 — Aplikasi penerjemah bahasa daerah

Pada 2027, tim siswa SMA Cakrawala (fiktif) memenangi lomba inovasi dengan aplikasi "KawanBahasa". Aplikasi itu menerjemahkan percakapan antara bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah, dan belajar dari rekaman suara para penggunanya. Rekaman itu disimpan di server tanpa pemberitahuan kepada pengguna. Tiga siswa memberi pendapat: Laras, "Dampak terpentingnya, terjemahan jadi cepat dan gratis"; Bima, "Dampak terpentingnya, warga dari daerah berbeda lebih mudah saling memahami dan bahasa daerah ikut terpelihara"; Sari, "Karena manfaatnya besar, cara menyimpan rekaman suara tidak perlu dipersoalkan". Pendapat mana yang tepat, dan apa yang harus diperbaiki? *Kasus disusun untuk contoh; tokoh dan aplikasi fiktif.*

1. Pisahkan **dampak teknis** dan **dampak strategis**. Pendapat Laras (cepat, gratis) adalah dampak teknis: benar, tetapi bukan makna bagi keutuhan bangsa.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Periksa pendapat Bima: saling memahami antardaerah memperkuat **kesatuan sosial budaya**, dan terpeliharanya bahasa daerah menjaga kebinekaan. Ini **dampak strategis** yang tepat.
3. Periksa **sisi ancaman**: rekaman suara adalah **data pribadi**. Menyimpannya tanpa pemberitahuan dan persetujuan bertentangan dengan prinsip **UU PDP**. Pendapat Sari keliru, karena manfaat tidak menghapus kewajiban melindungi data.
4. Tentukan **perbaikan**: meminta persetujuan pengguna sebelum merekam, menjelaskan untuk apa rekaman dipakai, menjaga keamanan server, dan memberi pilihan untuk menghapus data.

Jawaban: pendapat Bima paling tepat karena menunjuk dampak strategis bagi persatuan; aplikasi harus diperbaiki dengan meminta persetujuan dan melindungi data suara pengguna sesuai UU PDP.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

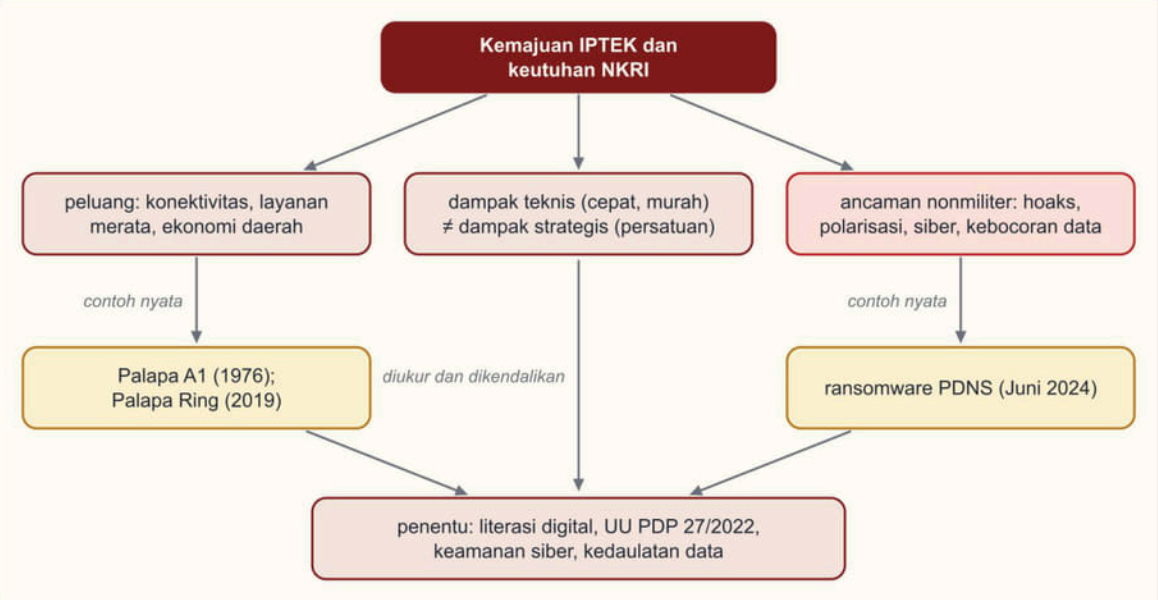
Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

❖ PETA KONSEP

Yang harus kamu ingat:

- Teknologi dapat menjadi pemersatu: satelit Palapa A1 (1976), Palapa Ring (diresmikan 14 Oktober 2019).
- IPTEK berdampak ganda: peluang (konektivitas, layanan merata, ekonomi daerah, saling mengenal) dan ancaman nonmiliter (hoaks, *deepfake*, polarisasi, serangan siber, kebocoran data).
- Dampak **teknis** (cepat, murah) berbeda dari dampak **strategis** (persatuan, kedaulatan, pemerataan).
- Kedaulatan data dilindungi BSSN dan UU No. 27 Tahun 2022; peristiwa nyata: serangan ransomware PDNS (Juni 2024).
- Penentu sisi mana yang menang: manusia, aturan, dan literasi digital warga sehari-hari.

Bagan pada Gambar 4.24 merangkum hubungan antarkonsep di sub bab ini.



Gambar 4.24 Peta konsep pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI. Sumber: digambar oleh Tim Next Level Study Indonesia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

▲ STRATEGI DAN JEBAKAN

Langkah menjawab:

1. **Tentukan sisi yang ditunjuk stimulus**: peluang atau ancaman?
2. **Naikkan ke tingkat strategis**: apa artinya bagi persatuan dan kedaulatan?
3. **Untuk tindakan**, pilih yang bertanggung jawab, sesuai porsi warga, dan tidak menambah masalah.
4. **Untuk data**, pastikan kesimpulan tidak melampaui angka yang ada.

Petunjuk cepat membaca kasus:

Kasus menunjukkan ...	Konsep
teknologi menghubungkan dan meratakan layanan	**peluang** bagi keutuhan
kabar bohong, polarisasi, serangan siber	**ancaman** nonmiliter
lebih cepat, lebih murah	dampak **teknis**
persatuan, kedaulatan, rasa memiliki	dampak **strategis**
menyaring, melindungi data, berdiskusi santun	**literasi digital**

Jebakan yang sering dipasang:

- **Sisi yang keliru.** Dampak positif dipilih padahal stimulus menunjuk risiko, atau sebaliknya.
- **Dampak teknis dikira makna strategis.**
- **Teknologi sebagai penyebab tunggal.**
- **Tindakan yang tampak waspada, tetapi ikut memperluas masalah.**
- **Menghindari perbedaan** dikira cara menjaga persatuan di ruang digital.

> Contoh salah tafsir: pada 2027, sebuah program kelas virtual menghubungkan siswa SMA di Aceh dan di Papua untuk belajar bersama setiap pekan. Seorang siswa menyebut dampaknya "siswa dapat belajar tanpa harus bepergian". Itu dampak teknis. Dampak strategisnya: siswa dari dua ujung Indonesia saling mengenal dan merasa sebagai satu bangsa.

● BEDAH SOAL PREDIKSI

Soal berikut dibedah langkah demi langkah. Sebelum membaca pembahasannya, coba kerjakan sendiri dengan langkah di blok Strategi dan jebakan. **Petunjuk:** Pisahkan dampak teknis (cepat, hemat) dari dampak strategis (rasa memiliki, kehadiran negara).

►. Sejak 2026, pemerintah sebuah provinsi kepulauan membuka layanan aduan daring. Warga di pulau-pulau kecil dapat melaporkan sekolah rusak, listrik padam, atau obat kosong di puskesmas lewat ponsel, dan setiap aduan wajib dijawab dinas terkait paling lambat tujuh hari. Sebelumnya, warga harus menyeberang ke ibu kota provinsi untuk menyampaikan keluhan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Dampak strategis layanan tersebut bagi keutuhan NKRI adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga di pulau terjauh merasa didengar negara sehingga rasa ditinggalkan berkurang
B. aduan warga dapat dikirim dengan cepat tanpa biaya perjalanan menyeberangi laut
C. pemerintah provinsi dapat mengurangi pemakaian kertas dalam mencatat setiap aduan
D. setiap pulau kecil dapat menentukan kebijakannya sendiri tanpa harus menunggu pemerintah
E. teknologi menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah di daerah

Pembahasan **Kunci: A**

Konsep: pengaruh teknologi dinilai pada dua tingkat. **Dampak teknis** menyangkut cara kerja (lebih cepat, lebih murah, lebih praktis). **Dampak strategis** menyangkut kehidupan bangsa: persatuan, pemerataan, dan rasa memiliki terhadap negara. Soal tentang keutuhan NKRI menanyakan dampak strategis.

Langkah 1 – Tentukan sisi yang ditunjuk ilustrasi: peluang (layanan menjangkau warga terpencil).
Langkah 2 – Naikkan ke tingkat strategis: warga yang aduannya dijawab merasa negara hadir; rasa ditinggalkan, yang dapat memicu ketidakpuasan terhadap negara, berkurang.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — dampak strategis: rasa memiliki dan kehadiran negara sampai pulau terjauh.
• B ✗ — dampak teknis (cepat, hemat); benar, tetapi bukan makna bagi keutuhan.
• C ✗ — dampak teknis administratif.
• D ✗ — keliru: aduan dijawab dinas pemerintah; pulau kecil tidak menentukan kebijakan sendiri.
• E ✗ — berlebihan; teknologi hanya alat, dan aduan tetap harus ditindaklanjuti manusia.

Jawaban: A.

Jebakan: B paling menggoda karena benar dan langsung terlihat dari ilustrasi, tetapi hanya dampak teknis.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✎ LATIHAN

1. Pada 2027, sebuah video beredar di grup percakapan warga sebuah kabupaten. Video itu menampilkan seorang tokoh adat seolah-olah menyerukan warga sukunya memusuhi para pendatang. Video tidak mencantumkan sumber maupun tanggal, dan belum ada media tepercaya yang memberitakannya. Meski begitu, sebagian warga mulai saling curiga. Tindakan manakah yang sesuai dengan literasi digital untuk menjaga keutuhan NKRI? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Meneruskan video ke grup lain disertai pesan "hati-hati, ini belum tentu benar".
☐ B. Mencari klarifikasi dari tokoh adat itu sendiri dan dari media yang tepercaya.
☐ C. Membuat video balasan yang mengejek suku tokoh adat itu agar dianggap impas.
☐ D. Berhenti memakai internet karena semua video di media sosial pasti merupakan rekayasa.
☐ E. Memberi tahu grup bahwa video itu diduga rekayasa sambil menunggu klarifikasi.

2. Pada 2026, bentrokan antarwarga dua desa di sebuah kabupaten pecah setelah beredar pesan berantai bohong bahwa warga desa sebelah akan menyerang. Penelusuran menunjukkan kedua desa sudah lama berselisih tentang pembagian air irigasi. Sebagian pihak lalu menyalahkan media sosial sepenuhnya dan mengusulkan agar internet di kabupaten itu diputus selamanya.
Penilaian yang paling tepat terhadap peristiwa tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. media sosial satu-satunya penyebab, sehingga memutus internet selamanya menyelesaikan masalah
B. perselisihan air satu-satunya penyebab, sehingga pesan berantai bohong tidak perlu ditangani
C. pesan bohong memicu bentrokan, tetapi perselisihan air sebagai akarnya harus diselesaikan
D. teknologi selalu memecah belah warga, sehingga desa sebaiknya berhenti memakai media sosial
E. penyebaran pesan bohong urusan pribadi pengirimnya, sehingga negara tidak perlu ikut campur

Kunci singkat: 1. B, E 2. C

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

✔ PERIKSA DIRI

- Berikan satu contoh teknologi yang memperkuat keutuhan NKRI dan satu contoh yang dapat mengancamnya.
- Apa beda dampak teknis dan dampak strategis? Jelaskan dengan contoh dari lingkunganmu.
- **Yang harus kuingat:** teknologi bersisi dua; soal keutuhan NKRI menanyakan dampak strategis; warga yang cakap digital ikut menjaga persatuan.



Latihan interaktif di LMS

Sub bab 4.7: kerjakan latihannya dan lihat progresmu.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-4.7

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Kuis Akhir Bab 4

PPKN-KB4

Jumlah soal: 30 **Waktu anjuran:** 60 menit

Kerjakan sendiri dan berwaktu. Setelah selesai, cocokkan dengan kunci di Bagian D, isi tabel skor, lalu lihat anjuran di bawahnya.

Kerjakan Kuis Bab 4 di LMS

Skor dan progresmu tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-KB4

1. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 menyebut jalur keikutsertaan warga dalam bela negara: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Pada 2026, dr. Nadira memilih bertugas di puskesmas pulau kecil yang kekurangan tenaga kesehatan. Seorang warganet menyebut pilihan itu sekadar pekerjaan, bukan bela negara.
Penilaian yang paling tepat terhadap komentar tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena bela negara hanya dapat dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata
B. tepat, karena pengabdian seseorang baru diakui bila dijalankan sebagai prajurit TNI
C. keliru, tetapi pengabdiannya baru termasuk bela negara bila ia bekerja tanpa menerima gaji
D. keliru, karena pengabdian sesuai profesi di daerah terpencil termasuk bela negara
E. keliru, karena kewajiban membela negara sebenarnya hanya berlaku bagi pegawai pemerintah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Batas wilayah dua kabupaten bertetangga di sebuah provinsi belum disepakati selama bertahun-tahun. Pada 2026, warga kedua kabupaten saling mengklaim lahan kebun di daerah perbatasan, memasang patok masing-masing, dan sempat bentrok. Ketegangan merembet ke media sosial dalam bentuk saling ejek antarwarga kedua daerah.
Upaya terbaik untuk menjaga keutuhan dan kerukunan dalam masalah tersebut adalah ....

A. menambah aparat yang berjaga di perbatasan sampai warga kedua kabupaten berhenti bentrok
B. meminta warga memasang patok baru bersama-sama sesuai ingatan para tetua di kedua kampung
C. memisahkan kegiatan warga kedua kabupaten sampai batas wilayah resmi selesai ditetapkan
D. menyerahkan lahan yang disengketakan kepada kabupaten yang penduduknya lebih banyak
E. menuntaskan penetapan batas lewat pemerintah sambil tokoh kedua pihak membangun dialog

3. Petugas di sejumlah pelabuhan beberapa kali menggagalkan penyelundupan burung dan satwa langka asal hutan Indonesia yang hendak dijual ke luar negeri. Pelakunya bekerja sama dengan pemburu di desa-desa sekitar hutan. Perdagangan gelap ini merampas kekayaan alam bangsa dan merusak keseimbangan lingkungan.
Penilaian yang paling tepat tentang kasus tersebut sebagai ancaman terhadap NKRI adalah ....

A. ancaman nonmiliter yang penanganannya dipimpin lembaga di luar bidang pertahanan
B. ancaman militer yang dihadapi TNI karena pelakunya membawa satwa melintasi batas negara
C. bukan ancaman bagi NKRI karena hanya menyangkut kepentingan ekonomi para pemburu satwa
D. ancaman hibrida karena pelakunya bekerja sama dengan warga yang tinggal di sekitar hutan
E. ancaman ideologi karena pembeli satwa berasal dari bangsa dengan pandangan hidup berbeda

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Saat mendaki di hutan perbatasan Kalimantan pada 2026, anggota klub pecinta alam SMA Harapan Bangsa menemukan sebuah patok batas negara yang roboh dan bergeser beberapa meter. Beberapa anggota mengusulkan memindahkan patok itu ke tempat yang mereka kira posisi semula.
Tindakan yang paling tepat dilakukan klub tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mencatat letak dan memotret patok, lalu melaporkannya ke pos penjaga perbatasan terdekat
B. memindahkan patok ke tempat yang diperkirakan benar agar wilayah Indonesia tidak berkurang
C. mengunggah foto patok ke media sosial lalu menuduh negara tetangga sengaja menggesernya
D. membiarkan patok itu karena urusan batas negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah
E. mencabut patok lalu membawanya pulang ke sekolah sebagai bukti untuk diserahkan kepada guru

5. Pada 2026, nelayan Desa Teluk Sari berkali-kali melihat kapal ikan berbendera asing menebar jaring di perairan Indonesia dekat desa mereka. Hasil tangkapan nelayan kecil pun menurun. Dalam rapat kelompok nelayan, muncul berbagai usulan untuk menyikapi kejadian itu.
Usulan manakah yang sesuai dengan peran warga dalam menjaga keutuhan NKRI? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Mengepung kapal asing dengan perahu nelayan lalu menyita jaring dan hasil tangkapannya.
☐ B. Mencatat waktu, posisi, dan ciri kapal, lalu melaporkannya kepada petugas pengawas perikanan.
☐ C. Tidak melakukan apa pun karena pengawasan laut sepenuhnya menjadi tugas TNI Angkatan Laut.
☐ D. Menyepakati jalur pelaporan bersama agar setiap kejadian serupa cepat diketahui petugas.
☐ E. Membakar kapal asing yang tertangkap agar pemiliknya jera dan tidak kembali lagi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Menjelang hari raya 2026, harga minyak goreng di Kecamatan Sukasari naik. Pak Darto, pedagang grosir, ditawari seorang rekan untuk menahan stok di gudang agar dapat dijual saat harga makin tinggi. Pak Darto menolak dan tetap menjual stoknya seperti biasa kepada pedagang kecil.
Sikap Pak Darto mencerminkan bela negara karena ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. ia menaati perintah aparat yang sedang berjaga di pasar menjelang hari raya
B. ia menjaga ketersediaan barang bagi warga sesuai perannya sebagai pedagang
C. ia mengorbankan seluruh keuntungannya dengan menjual barang di bawah harga modal
D. ia menjalankan tugas pemerintah untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar
E. ia membantu rekannya agar keuntungan para pedagang terbagi dengan merata

7. Di beberapa daerah muncul tuntutan agar penerimaan pegawai pemerintah daerah hanya terbuka bagi warga yang lahir dan bersuku asli daerah itu. Pendukungnya beralasan warga setempat paling memahami daerahnya, sedangkan penentangnya khawatir warga dari daerah lain merasa tidak diakui sebagai sesama warga negara.
Penilaian yang paling tepat terhadap tuntutan tersebut berdasarkan upaya menjaga keutuhan NKRI adalah ....

A. tepat, karena warga yang lahir di daerah itu pasti paling memahami kebutuhan daerahnya
B. tepat, asalkan aturan penerimaan pegawai itu disetujui oleh sebagian besar anggota DPRD
C. keliru, karena seleksi harus terbuka bagi semua warga dan warga setempat dibekali pendidikan
D. keliru, sehingga pegawai daerah sebaiknya selalu diambil dari luar daerah agar lebih netral
E. keliru, karena daerah sama sekali tidak berwenang mengurus pegawai pemerintahan daerahnya sendiri

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Pada 2026, grup musik pelajar SMA Tunas Nusa di Ambon mengaransemen ulang lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi dan mengunggahnya di kanal video sekolah. Setiap video diberi keterangan asal daerah lagu dan arti liriknya dalam bahasa Indonesia, sehingga banyak penonton dari daerah lain ikut mempelajarinya.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hubungan kegiatan tersebut dengan keutuhan NKRI!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kegiatan itu tidak berhubungan dengan keutuhan NKRI karena hanya termasuk kegiatan hiburan.	○	○
Keterangan asal daerah dan arti lirik membantu warga daerah lain mengenal budaya sesama bangsa.	○	○
Agar menjadi lagu persatuan, lirik bahasa daerah sebaiknya diganti seluruhnya dengan bahasa Indonesia.	○	○

9. Pada 2029, Nanda, pemilih pemula di Kabupaten Lembah Hijau, membaca janji kampanye seorang calon anggota DPRD kabupaten: "Bila terpilih, saya akan mengubah undang-undang sistem pendidikan nasional agar ujian sekolah dihapus." Banyak teman Nanda tertarik karena janji itu terdengar menguntungkan pelajar.
Sikap Nanda yang paling mencerminkan pemilih cerdas adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mendukung calon itu karena janjinya paling menguntungkan pelajar seperti dirinya
B. mengikuti pilihan sebagian besar temannya agar tidak berbeda sendiri dalam pergaulan
C. menilai janji itu dengan kewenangan DPRD kabupaten serta memeriksa rekam jejak calon
D. menolak semua calon yang berkampanye karena setiap janji kampanye pasti tidak ditepati
E. menyebarkan janji itu ke grup kelas sebagai bukti bahwa calon tersebut peduli pada pelajar

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sesuai bentuk dan sifat ancamannya. Pada 2026, wabah penyakit menular pada sapi menyebar cepat di beberapa provinsi dan mengancam peternakan rakyat.
Penerapan ketentuan tersebut yang paling tepat adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. TNI memimpin penanganan wabah karena setiap ancaman terhadap negara adalah urusan pertahanan
B. instansi yang membidangi kesehatan hewan memimpin, didukung unsur lain termasuk peternak
C. peternak menangani wabah sendiri karena ternak yang sakit merupakan milik pribadi mereka
D. Polri memimpin penanganan karena wabah ternak mengganggu ketertiban masyarakat desa
E. pemerintah memobilisasi komponen cadangan untuk memusnahkan semua ternak di provinsi itu

11. Setelah Konferensi Meja Bundar, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian. Pada 3 April 1950, Mohammad Natsir mengajukan Mosi Integral di parlemen RIS, yaitu usul agar negara-negara bagian dilebur kembali menjadi negara kesatuan. Parlemen menerimanya, dan NKRI terbentuk kembali pada 17 Agustus 1950.
Pelajaran terpenting peristiwa tersebut bagi bentuk negara Indonesia adalah ....
Sumber: ANTARA, "Natsir sang arsitek NKRI"; Kompas TV, "Mengenang Mosi Integral Natsir 3 April 1950".

A. bentuk negara serikat lebih menjamin persatuan karena setiap daerah dapat mengatur dirinya sendiri
B. persatuan bangsa diperjuangkan secara damai dan konstitusional melalui lembaga perwakilan
C. perubahan bentuk negara sebaiknya diputuskan sendiri oleh tokoh yang paling berpengaruh
D. negara kesatuan berarti daerah tidak lagi diberi wewenang mengurus urusan pemerintahannya
E. bentuk negara dapat diubah setiap kali parlemen menerima usul dari salah satu fraksinya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Karang Taruna Desa Sidomulyo menyiapkan spanduk ajakan bagi pemilih pemula menjelang pemilu 2029. Spanduk dibagi dua: bagian atas berjudul "Untuk apa kita memilih?" dan bagian bawah berjudul "Apa yang kita lakukan?". Panitia mengumpulkan beberapa kalimat usulan.
Kalimat manakah yang tepat dipasang di bagian atas spanduk? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Memastikan nama kita tercantum dalam daftar pemilih tetap.
☐ B. Agar pemimpin terpilih memperoleh dukungan yang sah dari rakyat.
☐ C. Agar calon dari desa kita sendiri pasti terpilih dan menang.
☐ D. Mempelajari rekam jejak dan program setiap calon.
☐ E. Agar kepentingan generasi muda ikut diperhatikan dalam kebijakan.

13. Pasal 7C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Dalam lomba debat antar-SMA 2027, topik yang dibahas menggambarkan DPR menolak rancangan APBN yang diajukan presiden. Satu tim mengusulkan presiden membubarkan DPR, sedangkan tim lain mengusulkan DPR memberhentikan presiden karena kehilangan dukungan.
Langkah yang sesuai dengan sistem presidensial menurut UUD NRI 1945 adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. presiden membubarkan DPR lalu menyelenggarakan pemilu ulang untuk memilih anggota baru
B. DPR memberhentikan presiden melalui mosi tidak percaya karena rancangannya ditolak
C. presiden mengundurkan diri karena tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota DPR
D. pemerintah menjalankan APBN tahun lalu, sedangkan kedua lembaga tetap menjabat
E. MPR mengambil alih penyusunan APBN karena presiden dan DPR gagal mencapai kesepakatan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Pada 2026, sebuah aplikasi kuis kepribadian viral di kalangan pelajar. Untuk melihat hasil kuis, pengguna diminta mengizinkan akses ke daftar kontak, galeri foto, dan lokasi, serta mengunggah foto KTP orang tuanya. Pengembangnya tidak jelas, dan servernya berada di luar negeri.
Tindakan manakah yang tepat untuk melindungi keamanan informasi pribadi warga? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; aplikasi fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Tetap memakai aplikasi itu karena hampir semua teman sekelas sudah memakainya.
☐ B. Menuduh pengembangnya sebagai mata-mata asing di media sosial agar warga waspada.
☐ C. Menolak memberi izin akses yang tidak berhubungan dengan fungsi aplikasi.
☐ D. Menghapus semua akun media sosial selamanya agar tidak pernah terkena risiko.
☐ E. Mengingatkan keluarga dan melaporkan aplikasi itu ke kanal aduan resmi.

15. Dalam diskusi kelas tahun 2027 tentang konflik bersenjata antara dua negara sahabat di kawasan lain, Bima berpendapat, "Indonesia sebaiknya tidak berkomentar dan tidak terlibat apa pun. Dengan begitu kita aman dan tetap bersahabat dengan kedua negara." Teman-temannya diminta menilai pendapat itu.
Penilaian yang paling tepat berdasarkan politik luar negeri bebas aktif adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena bebas aktif berarti Indonesia netral dan tidak mencampuri konflik apa pun
B. tepat, karena menjaga persahabatan dengan kedua negara itu jauh lebih penting daripada perdamaian
C. keliru, karena Indonesia seharusnya mendukung negara yang lebih erat hubungan dagangnya
D. keliru, karena tanpa memihak Indonesia tetap ikut mengupayakan perdamaian dengan cara damai
E. keliru, karena Indonesia berhak mengirim pasukan untuk menghentikan konflik kedua negara

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menjelang pemilu 2029, kakak Bagas meminta Bagas, pemilih pemula, memotret surat suaranya setelah dicoblos dan mengirimkannya ke grup keluarga supaya terlihat "kompak memilih calon keluarga".
Penilaian yang paling tepat terhadap permintaan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. dapat dibenarkan, karena pilihan Bagas memang sama dengan pilihan seluruh keluarganya
B. dapat dibenarkan, asalkan foto surat suara itu hanya dikirim ke grup keluarganya sendiri
C. tidak dapat dibenarkan, karena pemilih pemula belum berhak menentukan pilihannya sendiri
D. tidak dapat dibenarkan, karena melanggar asas langsung yang mewajibkan pemilih hadir sendiri
E. tidak dapat dibenarkan, karena merusak asas rahasia yang melindungi kebebasan memilih

17. Menjelang pemilu, banyak sekolah mengadakan kelas pemilih pemula. Dalam salah satu kelas, guru meminta siswa membedakan tujuan partisipasi, yang menjawab "untuk apa memilih?", dari cara berpartisipasi, yang menjawab "apa yang dilakukan pemilih?". Siswa lalu menilai beberapa pernyataan yang ditulis di papan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
"Datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik" merupakan tujuan partisipasi pemilih pemula.	○	○
"Agar kekuasaan dapat dinilai dan diganti secara damai melalui pemilu" merupakan tujuan partisipasi.	○	○
"Menolak politik uang dan tidak menyebarkan kabar bohong" merupakan cara berpartisipasi.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Lokapasar daring dan pembayaran digital kini memungkinkan perajin tenun di pelosok Nusa Tenggara Timur menjual kainnya langsung kepada pembeli di Sumatra dan Jawa. Sebelumnya, kain mereka hanya dijual di pasar setempat atau melalui pedagang perantara dengan harga rendah.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang pengaruh kemajuan teknologi tersebut terhadap keutuhan NKRI!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Transaksi yang lebih cepat dan murah adalah dampak teknis yang belum menjelaskan makna bagi keutuhan bangsa.	○	○
Terhubungnya perajin daerah terpencil dengan pasar nasional memperkuat kesatuan ekonomi karena kesejahteraan lebih merata.	○	○
Karena teknologi digital menguntungkan, perajin tidak perlu lagi menjaga keamanan akun dan informasi pembelinya.	○	○

19. Undang-undang memberi beberapa provinsi di Indonesia status otonomi khusus, sehingga provinsi itu dapat mengatur sejumlah urusan secara lebih luas daripada provinsi lain. Seorang warganet lalu menulis bahwa Indonesia sebenarnya sudah menjadi negara federal. Unggahan itu banyak dibagikan dan dikomentari pelajar.
Kesimpulan warganet tersebut keliru karena ....

A. provinsi dengan otonomi khusus tidak boleh mengatur urusan apa pun selain urusan budaya
B. otonomi khusus hanya berlaku sementara dan akan dicabut setelah daerah itu menjadi maju
C. kewenangan provinsi itu berasal dari pusat melalui undang-undang, bukan dari kedaulatannya
D. negara federal tidak mengenal daerah yang memiliki kewenangan lebih luas daripada daerah lain
E. negara federal hanya terbentuk bila seluruh provinsi meminta otonomi khusus bersama-sama

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Gempa dan tsunami melanda sebuah pulau di kawasan timur Indonesia pada 2026. Dalam beberapa hari, kapal dari berbagai pelabuhan mengangkut bahan makanan dan tenaga medis, relawan dari banyak provinsi berdatangan, dan pemerintah pusat mendirikan pos penanganan bencana di pulau tersebut.
Pernyataan manakah yang sesuai dengan cara pandang Wawasan Nusantara? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Laut yang luas membuat penanganan bencana itu sebaiknya diserahkan kepada warga pulau sendiri.
☐ B. Musibah di satu pulau dipandang sebagai musibah seluruh bangsa Indonesia.
☐ C. Laut menjadi jalur penghubung yang memungkinkan bantuan dari banyak pulau tiba.
☐ D. Bantuan antardaerah menjadikan kekayaan pulau terdampak milik daerah yang menyumbang.
☐ E. Kehadiran pemerintah pusat di pulau terdampak memperkuat kesatuan politik Nusantara.

21. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau milik Malaysia. Pertimbangan utamanya adalah bukti pengelolaan nyata oleh pemerintahan yang berkuasa di Kalimantan Utara, misalnya pengaturan pengambilan telur penyu, yang tidak pernah diprotes Belanda maupun Indonesia.
Pelajaran terpenting dari putusan tersebut untuk menjaga keutuhan wilayah adalah ....
Sumber: International Court of Justice, putusan 17 Desember 2002, perkara Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).

A. negara perlu hadir dan mengelola pulau terluarnya secara nyata, tidak cukup hanya mengklaim
B. sengketa pulau sebaiknya tidak dibawa ke lembaga internasional karena hasilnya merugikan
C. pulau kecil tanpa penduduk tidak penting bagi keutuhan wilayah sehingga boleh dilepaskan
D. klaim yang tercantum dalam peta resmi negara sudah cukup untuk membuktikan kedaulatan atas pulau
E. pengelolaan pulau terluar sebaiknya diserahkan kepada nelayan yang biasa mencari ikan di sana

22. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Pada 2027, dua negara besar terlibat perang dagang. Masing-masing meminta Indonesia memboikot produk negara lawannya dan menjanjikan keringanan bea masuk bila Indonesia bersedia.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sikap Indonesia yang paling sesuai dengan ketentuan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. menerima tawaran keringanan bea masuk terbesar karena paling sesuai kepentingan nasional
B. menghentikan perdagangan dengan kedua negara agar tidak dianggap memihak salah satunya
C. tetap berdagang dengan keduanya sambil mendorong penyelesaian sengketa di forum bersama
D. memboikot produk kedua negara secara bergantian sesuai keuntungan yang ditawarkan tiap bulan
E. mendiamkan perselisihan itu karena perang dagang bukan urusan negara yang tidak terlibat

23. Pada 2026, pemerintah sebuah kabupaten kepulauan mengirim kapal layanan keliling ke pulau-pulau kecil terluar. Di atas kapal, petugas menerbitkan KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga bagi warga yang selama ini harus menyeberang dua hari ke ibu kota kabupaten untuk mengurusnya.
Makna terpenting program tersebut berdasarkan Wawasan Nusantara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga pulau terluar dapat menghemat biaya perjalanan untuk mengurus dokumen kependudukan
B. pemerintah kabupaten memperoleh pendapatan baru dari layanan dokumen di atas kapalnya
C. warga pulau terluar tidak perlu lagi berhubungan dengan pemerintah kabupaten sama sekali
D. negara hadir sampai pulau terluar sehingga warganya diakui dan dilayani sebagai satu bangsa
E. laut di antara pulau tetap menjadi pemisah sehingga layanan harus didatangkan ke setiap pulaunya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Pada 2026, sebuah galangan kapal swasta di Batam menyelesaikan pesanan kapal patroli untuk pemerintah, sebuah perguruan tinggi meneliti bahan bakar alternatif untuk kapal, dan pemerintah membangun dermaga di beberapa pulau terluar. Ketiga kegiatan itu dibahas dalam diskusi kelas tentang pertahanan semesta.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang kegiatan tersebut!
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Industri dalam negeri yang mampu membuat kapal patroli termasuk sumber daya yang dapat mendukung pertahanan negara.	○	○
Karena pertahanan adalah urusan TNI, perusahaan swasta dan perguruan tinggi tidak berperan dalam pertahanan negara.	○	○
Pertahanan semesta berarti seluruh perusahaan dan warga langsung berada di bawah komando TNI setiap saat.	○	○

25. Pada Juli 1976, Indonesia meluncurkan satelit komunikasi Palapa A1. Namanya diambil dari Sumpah Palapa Gajah Mada yang bertekad mempersatukan Nusantara. Lewat satelit itu, sambungan telepon jarak jauh dan siaran televisi mulai menjangkau berbagai pulau yang sebelumnya sulit dihubungkan dengan jaringan kabel darat.
Dampak strategis satelit tersebut bagi keutuhan NKRI adalah ....
Sumber: tirto.id, "Sejarah Hari Satelit Palapa 9 Juli"; GNFI, "Hari Satelit Palapa: Sejarah dan Daftar Satelit".

A. biaya pembangunan jaringan telepon menjadi lebih murah dibandingkan memasang kabel darat
B. warga di berbagai pulau dapat mengikuti peristiwa nasional yang sama sebagai satu bangsa
C. Indonesia tidak lagi membutuhkan kapal dan pesawat untuk menghubungkan pulau-pulaunya
D. gambar siaran televisi yang diterima warga di berbagai daerah menjadi lebih jernih dan stabil
E. setiap daerah dapat menyiarkan programnya sendiri tanpa perlu terhubung dengan pusat

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

26. Setiap hari ratusan kapal asing melintasi perairan Indonesia, dan sebagian berlayar di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. Di media sosial, beberapa warganet menulis komentar tentang hak Indonesia atas laut tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah diratifikasi Indonesia.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang hak Indonesia atas laut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kapal asing harus meminta izin Indonesia setiap kali melintasi ZEE karena wilayah itu di bawah kedaulatan penuh Indonesia.	○	○
Laut di antara pulau-pulau Indonesia di sisi dalam garis pangkal kepulauan termasuk laut bebas yang tidak diatur Indonesia.	○	○
Kapal asing yang menangkap ikan di ZEE Indonesia tanpa izin melanggar hak berdaulat Indonesia atas kekayaan lautnya.	○	○

27. Pada 2026, warga Desa Mekarsari berselisih dengan sebuah perusahaan perkebunan tentang batas lahan. Setelah terjadi aksi saling dorong, perusahaan meminta satuan tentara terdekat berjaga di kebun, sedangkan sebagian warga berencana membentuk regu sendiri untuk mengusir pekerja perusahaan.
Penanganan yang paling sesuai dengan pembagian peran dalam sistem pertahanan dan keamanan negara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tentara berjaga di kebun karena perselisihan itu mengancam kedaulatan dan keutuhan negara
B. warga membentuk regu sendiri karena rakyat merupakan kekuatan pendukung pertahanan negara
C. tentara dan warga berjaga bersama di kebun sebagai wujud sifat kerakyatan pertahanan semesta
D. perusahaan menyewa petugas keamanan bersenjata untuk mengusir warga dari kebun sengketa
E. polisi menjaga ketertiban, sedangkan sengketa batas lahan diselesaikan lewat jalur hukum

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

28. Perang saudara di sebuah negara di kawasan lain menyebabkan jutaan warga sipil kelaparan. Sejumlah organisasi di Indonesia ingin menyalurkan bantuan, tetapi sebagian mengusulkan agar bantuan hanya dikirim ke wilayah yang dikuasai kelompok yang dianggap sepaham. Pemerintah Indonesia diminta menentukan sikap.
Sikap pemerintah yang paling sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif adalah ....
Disusun untuk latihan soal; peristiwa fiktif.

A. menyalurkan bantuan lewat badan PBB bagi korban sipil di semua wilayah tanpa memihak
B. mengirim bantuan hanya ke wilayah kelompok yang sepaham agar dukungan Indonesia jelas
C. menunda semua bantuan sampai perang selesai agar Indonesia tidak dianggap ikut campur
D. mengirim pasukan sendiri untuk mengamankan jalur bantuan tanpa menunggu mandat PBB
E. menyerahkan urusan bantuan sepenuhnya kepada organisasi warga sesuai pilihan masing-masing

29. Pada 2028, Salsa, ketua OSIS yang baru berusia 17 tahun, ingin menjadi pelopor pemilih pemula di sekolahnya. Ia menyusun daftar usulan kegiatan bersama pengurus OSIS. Pembina OSIS meminta mereka memilah mana yang merupakan cara berpartisipasi dan mana yang bukan.
Usulan manakah yang merupakan cara berpartisipasi yang tepat bagi pelopor pemilih pemula? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Mengajak teman mengecek namanya di daftar pemilih melalui layanan resmi KPU.
☐ B. Mengajak teman memilih calon yang sama agar suara angkatan kompak dan berpengaruh.
☐ C. Mengadakan diskusi program para calon dengan santun tanpa mengarahkan pilihan.
☐ D. Mengingatkan teman agar menolak uang atau barang yang dikaitkan dengan pilihan.
☐ E. Agar pemerintahan yang terpilih memperoleh legitimasi dari banyak warga negara.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

30. Sejak awal 2027, Rani, siswa kelas XI, menjadi relawan pengajar membaca bagi anak-anak di kampung nelayan dekat rumahnya setiap Sabtu. Untuk itu ia melepas jadwal latihan basket yang sangat ia sukai, karena menurutnya anak-anak itu juga berhak maju seperti anak-anak lain di negeri ini.
Nilai dasar bela negara yang paling menonjol dari sikap Rani adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. setia pada Pancasila, karena Rani menolak setiap ajakan untuk mengganti dasar negara
B. kemampuan awal bela negara, karena Rani melatih fisiknya lewat kegiatan olahraga basket
C. cinta tanah air, karena Rani merawat lingkungan pantai di kampung nelayan dekat rumahnya
D. sadar berbangsa, karena Rani menaati aturan sekolah tentang kegiatan pada hari Sabtu
E. rela berkorban, karena Rani menyisihkan waktu dan kesenangannya demi anak-anak itu

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30	___ / 9	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.2 · Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial	11, 13, 19	___ / 3	Ulangi hlm. 276
Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia	20, 21, 23, 26	___ / 4	Ulangi hlm. 287
Sub bab 4.4 · Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta	10, 24, 27	___ / 3	Ulangi hlm. 298
Sub bab 4.5 · Peran Indonesia dalam perdamaian dunia	15, 22, 28	___ / 3	Ulangi hlm. 307
Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula	9, 12, 16, 17, 29	___ / 5	Ulangi hlm. 317
Sub bab 4.7 · Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI	14, 18, 25	___ / 3	Ulangi hlm. 329

Skor 70 % atau lebih: lanjut ke bab berikutnya. Skor 50–69 %: ulangi sub bab pada tabel yang kurang dari separuh benar. Skor di bawah 50 %: baca ulang bab ini dari awal. (Angka ini anjuran belajar, bukan prediksi nilai TKA.)

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bagian C · Simulasi TKA

Kerjakan setelah semua bab selesai. Simulasi 1 memakai soal asli TKA 2025; simulasi berikutnya adalah paket prediksi. Kerjakan tiap simulasi dalam sekali duduk sesuai waktunya, tanpa membuka materi.

Daftar simulasi

Simulasi	Jumlah soal	Waktu	Kode LMS
Simulasi 1 — Soal Asli TKA 2025	29 soal	58 menit	PPKN-FIN1
Simulasi 2 — Prediksi TKA 2026	25 soal	50 menit	PPKN-FIN2
Simulasi 3 — Prediksi TKA 2026	25 soal	50 menit	PPKN-FIN3
Simulasi 4 — Prediksi TKA 2026	25 soal	50 menit	PPKN-FIN4
Simulasi 5 — Prediksi TKA 2026	25 soal	50 menit	PPKN-FIN5

Saran: beri jeda beberapa hari antarsimulasi. Setelah tiap simulasi, cocokkan jawaban di Bagian D lalu ulangi sub bab yang ditunjuk tabel anjuran sebelum mengerjakan simulasi berikutnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 1 — Soal Asli TKA 2025

PPKN-FIN1

Petunjuk

Jumlah soal: 29. Waktu: 58 menit.

Kerjakan sekaligus tanpa membuka materi. Tandai jawaban pada lembar jawaban. Kunci dan pembahasan ada di Bagian D; hitung skor dan lihat tabel anjuran di akhir paket.

Kerjakan Simulasi 1 di LMS

Hasil dan analisis per sub bab tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-FIN1

1. Dinamika masyarakat multikultural di Indonesia merupakan interaksi kompleks antarberbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan sistem nilai, yang menghasilkan berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat multikultural di Indonesia adalah konflik antaragama.

Peran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa berdasarkan ilustrasi di atas adalah ...

A. sebagai perekat hubungan umat beragama mayoritas dan minoritas serta pemerintah dalam kehidupan bernegara
B. menjadi pendorong adanya dialog sesama agama untuk meningkatkan kebersamaan umat dan mengurangi rasa curiga
C. menjadi dasar dalam melihat adanya perbedaan paham dari berbagai agama dan aliran kepercayaan dalam masyarakat
D. merupakan sarana untuk menguji kepekaan sosial dan rasa solidaritas kelompok dari umat beragama dalam masyarakat
E. sebagai dasar untuk menghargai dan menghormati perayaan hari-hari besar berbagai agama dalam masyarakat

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pasal tersebut adalah ....

A. penyusunan regulasi di bidang ketenagakerjaan yang membutuhkan waktu yang lama
B. adanya keterbatasan akses terhadap pekerjaan akibat ketidaksetaraan dan infrastruktur
C. tingkat keterampilan dan pendidikan di kalangan pencari kerja yang merata dan setara
D. adanya perbedaan standar kualitas pekerja yang berbeda-beda dari pemberi kerja
E. lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pekerja anak

3. Terjadi perdebatan sengit di masyarakat dan parlemen terkait wacana amandemen UUD 1945 di mana sebagian pihak mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, sedangkan sebagian lain ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan mundurnya demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan ilustrasi, pentingnya Pancasila untuk memecahkan masalah tersebut karena ....

A. menjadi dasar mempertimbangkan setiap perubahan agar tetap menjamin kedaulatan rakyat dan keadilan sosial secara seimbang
B. digunakan sebagai alat hukum tertinggi Indonesia agar perubahan aturan tidak menyalahi sistem pemerintahan yang sudah berlaku
C. menjadi acuan teknis lembaga legislatif di Indonesia dalam menentukan batasan perubahan agar tidak melewati kewenangan politik
D. digunakan oleh lembaga eksekutif agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia tetap stabil di tengah konflik politik yang terjadi
E. dijadikan dasar keputusan oleh lembaga yudikatif untuk menilai apakah usulan perubahan tersebut sesuai kepentingan negara

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Warga di sebuah lingkungan perumahan hidup berdampingan dalam keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Mereka saling menghargai, aktif dalam kegiatan sosial bersama, dan menjaga ketertiban dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan ilustrasi, nilai Pancasila yang paling tepat telah diterapkan pada kondisi tersebut adalah ....

A. Nilai Ketuhanan, karena setiap warga dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya
B. Nilai Kemanusiaan, karena masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakangnya
C. Nilai Persatuan, karena perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan harmonis
D. Nilai Persatuan, karena warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial sesuai peran kelompok budayanya
E. Nilai Keadilan Sosial, karena semua warga mendapatkan hak dan fasilitas secara merata tanpa kecuali

5. Perkembangan global menyebabkan Pancasila menjadi representasi dari keberagaman masyarakat dunia. Pancasila dengan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keadilan, menjadi solusi universal dalam mengatasi tantangan perbedaan budaya dan agama di dunia. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan bangsa Indonesia sebagai *role model* dalam mempromosikan kerukunan dan harmoni dari keberagaman masyarakat dunia.

Tentukan Benar atau Salah setiap pernyataan berikut terkait fungsi diterapkannya Pancasila dalam pergaulan kehidupan global berdasarkan ilustrasi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Pancasila dapat menjadi landasan untuk meningkatkan hubungan internasional yang harmonis dan berkeadilan	○	○
Pancasila dapat menjadi landasan untuk membangun kerja sama internasional yang efektif dan berkeadilan	○	○
Implementasi Pancasila di era global dapat meningkatkan derajat Indonesia sebagai bangsa yang unggul di dunia	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Kepentingan pedagang dan pengguna jalan sangat berbeda; pedagang ingin meningkatkan pendapatan dan menjual produk, sementara pengguna jalan membutuhkan kelancaran dan keamanan pergerakan di jalan umum. Namun, berjualan di fasilitas jalan seperti trotoar atau badan jalan dapat mengganggu fungsi jalan, membahayakan keselamatan, dan melanggar hukum.

Peran Pancasila dalam memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....

A. memberi panduan kepada pedagang cara berjualan yang dapat menjamin hak mendapatkan penghidupan yang layak
B. mengarahkan pedagang dan pengguna jalan agar mengutamakan kepentingan bersama setelah kepentingan pribadi terlaksana
C. mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam menjamin rasa keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
D. mengupayakan agar kegiatan pedagang mengutamakan kepentingan pengguna jalan untuk kenyamanan dan ketertiban
E. menyelaraskan dua kepentingan untuk menciptakan harmoni sosial yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban

7. Salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal Penanggulangan Kemiskinan. Kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan pemerintah pusat yang memberikan kebijakan dan program, sementara pemerintah daerah melaksanakan program tersebut di tingkat daerah termasuk bantuan sosial, pelatihan, dan pengembangan usaha mikro.

Bentuk kerja sama ini dilakukan karena ...

A. pemerintah pusat mengembangkan program-program yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti program pelatihan kerja, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal
B. pemerintah daerah dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan infrastruktur
C. pemerintah daerah dapat menyediakan program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin
D. pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan memetakan kemiskinan di daerahnya, sehingga dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengatasinya
E. pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan.

Perilaku yang mencerminkan hak asasi manusia sesuai dengan sila keempat Pancasila berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....

A. menggunakan hak pilih sesuai dengan arah kebijakan dari partai politik
B. menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik dalam masyarakat
C. berpartisipasi aktif dengan cara mengikuti kampanye seluruh partai politik
D. mengikuti debat dalam pemilu untuk menilai strategi pemenangan para kandidat
E. menerima hasil dari setiap tahapan pemilu karena pelaksanaannya diawasi negara

9. Sejak 1957, Indonesia telah mengirim lebih dari 30.000 personel TNI ke berbagai negara konflik sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Peran serta Indonesia ini merupakan perwujudan nilai Pancasila dan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk mewujudkan perdamaian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keunggulan nilai Pancasila dalam peran tersebut adalah....

A. mewujudkan solidaritas kemanusiaan melalui politik luar negeri bebas aktif
B. menunjukkan komitmen terhadap nilai persatuan dalam kerja sama internasional
C. menerapkan keadilan sosial dengan mewujudkan perdamaian di kancah global
D. memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan geopolitik khususnya kawasan Asia
E. mewujudkan tujuan nasional dengan berupaya menjaga kepentingan strategis global

10. Bunyi sila kedua dan keempat Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Perilaku yang berhubungan dengan kedua sila Pancasila tersebut adalah ....

A. menghormati perbedaan pendapat teman dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan baik
B. memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku dan agama
C. bekerja sama dengan warga lain untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
D. memberikan bantuan kepada korban banjir suatu daerah berdasarkan hasil musyawarah seluruh warga kampung
E. menghormati hak asasi manusia dengan bersikap adil dan beradab kepada sesama antarumat beragama

11. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 lalu, terjadi perselisihan hasil penghitungan suara salah satu daerah. Dua pasangan calon saling mengklaim kemenangan, sementara rekapitulasi suara oleh KPU daerah dituding tidak transparan. Salah satu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

pasangan calon kemudian menggugat hasil Pilkada tersebut karena diduga terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, cara menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai kewenangan lembaga negara adalah ...

A. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mengatur ketentuan penyelesaian perbedaan penghitungan suara
B. Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilukada
C. Komisi Pemilihan Umum membuat aturan internal tentang penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara pemilukada
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang untuk kepastian hasil
E. DPRD bersama Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah yang mengatur pemilukada yang lebih lengkap

12. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Berdasarkan ilustrasi, hak warga negara yang mencerminkan pasal tersebut yaitu warga negara berhak ....

A. mengikuti kegiatan sosial dan wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam lingkungannya
B. memperoleh pendidikan dan wajib menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari
C. menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan wajib menaati aturan hukum yang berlaku di masyarakat
D. terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan wajib ikut menjaga ketertiban serta ketentraman lingkungan sekitarnya
E. memperoleh perlindungan negara dan wajib ikut berpartisipasi menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

13. Pemerintah Indonesia mengadakan kegiatan Festival Budaya Nusantara yang melibatkan berbagai komunitas dari seluruh provinsi. Kegiatan ini mencakup pameran seni, pertunjukan tradisional, serta diskusi tentang keberagaman budaya Indonesia.

Alasan kegiatan tersebut dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa adalah ....

A. memperkenalkan produk lokal untuk meningkatkan perekonomian setiap daerah
B. mengedepankan keberagaman budaya Indonesia yang mempererat hubungan antarwarga negara
C. menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat yang terlibat dalam pameran dan pertunjukan
D. memberi kesempatan kepada wisatawan lokal dan asing untuk menikmati budaya Indonesia
E. promosi pariwisata lokal di setiap daerah untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik

14. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang hidup berdampingan. Kebinekaan dapat menjadi fondasi kokoh yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa. Namun adanya perbedaan juga dapat menjadi ancaman persatuan dan kesatuan.

Tentukan Benar atau Salah dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan upaya menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, atau suku bangsa	○	○
mengawasi dan menangani konflik yang berpotensi mengancam integrasi nasional, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga dan masyarakat	○	○
meningkatkan dialog dan komunikasi antarkelompok masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa dengan menyesuaikan perkembangan budaya lain	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

15. Perubahan iklim dan lingkungan merupakan salah satu bagian dalam perkembangan masyarakat global yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem serta menciptakan ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik yang kerap memunculkan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Tentukan Benar atau Salah dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika dapat mengatasi ancaman sebagaimana ilustrasi di atas!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan persatuan dan kesatuan yang mengakui persamaan suku, agama, bahasa, dan budaya serta identitas nasional dengan menghilangkan segala bentuk perbedaan	○	○
Bhinneka Tunggal Ika meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesatuan dan persatuan sebagai bagian masyarakat global	○	○
Bhinneka Tunggal Ika meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman dan kesatuan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam membangun masyarakat global yang dinamis	○	○

16. Panca gatra adalah aspek sosial kemasyarakatan dalam wawasan nusantara yang bersifat dinamis meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Gatra ekonomi sebagai salah satu aspek dalam wawasan nusantara merujuk pada aspek ekonomi yang menjadi bagian integral dari cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan potensi negaranya. Wawasan nusantara dalam bidang ekonomi juga mengamanatkan pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Pentingnya hal tersebut dalam menjaga keutuhan NKRI adalah ....

A. mewujudkan pembangunan yang menjamin terwujudnya pemerataan pendapatan
B. mendorong untuk terus mengembangkan kehidupan ekonomi yang kuat dan mandiri
C. menekankan pentingnya eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi antardaerah di Indonesia
D. melibatkan potensi dan partisipasi dari seluruh masyarakat, bukan hanya pihak tertentu
E. mengeksplorasi seluruh kekayaan alam dan potensi ekonomi strategis Indonesia

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

17. Seorang pengusaha membuang limbah pabrik ke sungai yang mengalir di dekat permukiman warga. Akibatnya, air menjadi tercemar dan banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Meskipun masyarakat sudah melaporkan hal ini kepada pihak berwenang, proses hukum berjalan sangat lambat. Bahkan, muncul kabar bahwa perusahaan tersebut memberikan "uang pelicin" agar kasusnya tidak diproses lebih lanjut. Warga menjadi kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tantangan utama dalam penegakan hukum yang ditunjukkan adalah....

A. kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup
B. lemahnya perlindungan hukum kepada terduga pelaku pencemaran lingkungan
C. maraknya pengaruh kekuasaan dan praktik suap dalam menjalankan proses hukum
D. maraknya pelanggaran hukum yang diselesaikan secara kekeluargaan
E. rendahnya kesadaran pengusaha dalam menjaga kelestarian lingkungan alam

18. Menjelang pemilu serentak, pemerintah dan berbagai organisasi mengadakan sosialisasi untuk pemilih pemula di tingkat SMA. Reza, seorang siswa kelas XII, mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Ia belajar pentingnya mengenali visi misi calon wakil rakyat, menghindari politik uang, dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Reza juga mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam pemilu sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan manakah yang menunjukkan tujuan partisipasi pemilih pemula seperti Reza dalam pesta demokrasi? *(Jawaban benar lebih dari satu.)*

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Memberikan suara untuk menentukan pemimpin yang membawa perubahan positif.
☐ B. Menunjukkan jati diri sebagai pelajar yang bertanggung jawab terhadap masa depan.
☐ C. Membangun kesadaran para pemilih pemula untuk terlibat dalam proses pemilihan.
☐ D. Menolak segala bentuk politik uang dan memilih berdasarkan kepentingan kelompok.
☐ E. Menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dengan mempertimbangkan kompetensi pemimpin.

19. Kehidupan suku bangsa di Indonesia sangat kaya akan keberagaman, dipengaruhi oleh faktor geografis dan sejarah. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang unik.

Berdasarkan ilustrasi, tantangan yang dihadapi dalam menjaga integrasi nasional dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika" adalah ....

A. adanya ketimpangan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat
B. munculnya sikap sukuisme dalam kehidupan bermasyarakat
C. hadirnya perasaan rendah diri suku tertentu dalam masyarakat
D. terjadinya kepunahan suku tertentu akibat kesenjangan sosial
E. munculnya perilaku modernisme suku tertentu yang berlebihan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Apabila dibiarkan, diskriminasi dapat memicu konflik dan menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional Indonesia.

Berdasarkan ilustrasi, upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut agar integrasi nasional tetap terjaga adalah....

A. mendorong tumbuhnya semangat memperjuangkan kebebasan individu dalam kehidupan bernegara
B. mengajak setiap individu untuk saling mengakui sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan merdeka
C. mengutamakan dialog antarwarga untuk memperkuat rasa saling pengertian dan mencegah prasangka
D. menempatkan orang lain sesuai posisi sosialnya sebagai bagian dari tatanan masyarakat yang teratur
E. menumbuhkan sikap saling menghormati karena setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama

21. Penyebaran paham radikalisme di media sosial untuk mengubah ideologi negara semakin marak terjadi. Hal ini memengaruhi generasi muda dan menciptakan konflik horizontal di masyarakat.

Upaya terbaik untuk melindungi keutuhan NKRI dari dampak tersebut adalah...

A. mengadakan dialog terbuka dengan kelompok radikal untuk mencari titik temu dan mengurangi konflik ideologi
B. memperkuat pendidikan Pancasila dan literasi digital di sekolah serta melibatkan tokoh agama dalam edukasi masyarakat
C. meningkatkan pengawasan ketat terhadap aktivitas media sosial dan memberikan teguran bagi penyebar konten radikal
D. mengorganisir kampanye nasional anti radikalisme melalui berbagai platform media untuk membentuk opini publik
E. membentuk forum diskusi antargenerasi untuk membahas perbedaan pandangan ideologi secara demokratis

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Globalisasi ekonomi mendorong masuknya berbagai produk luar negeri ke pasar Indonesia. Apabila tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menurunkan daya saing produk lokal dan mengancam perekonomian nasional.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan Benar atau Salah dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI berdasarkan dinamika tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
berperan sebagai konsumen yang mendukung produk dalam negeri untuk memperkuat perekonomian nasional	○	○
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang mendorong daya saing bangsa di tengah arus globalisasi	○	○
berpartisipasi dengan membeli produk-produk dalam negeri karena memiliki harga lebih murah	○	○

23. Indonesia sebagai negara kepulauan yang multietnis menghadapi tantangan disintegrasi yang sering dipicu oleh isu ketidakadilan, diskriminasi, dan penyebaran hoaks.

Cara warga negara dalam mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan ....

A. mengajak masyarakat menjaga budaya lokal dengan membatasi pengaruh budaya luar yang masuk
B. menyebarkan informasi yang benar dan membangun dialog antarkelompok untuk mencegah konflik
C. mendorong pembentukan kelompok sosial yang terdiri dari warga dengan latar belakang yang sama
D. berpartisipasi dalam diskusi di media sosial dengan menyuarakan pandangan kelompok minoritas
E. meminimalkan pernyataan atau aktivitas yang dapat menimbulkan gesekan antarkelompok di masyarakat

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan salah satu kekuatan dan kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan dalam membangun kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antaretnis dan agama.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan mana saja yang menjelaskan tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? *(Jawaban benar lebih dari satu.)*

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Integrasi bangsa Indonesia bertujuan untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan sejahtera

☐ B. Integrasi bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

☐ C. Integrasi bangsa Indonesia bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat dan bangsa yang disegani dalam percaturan internasional

☐ D. Integrasi yang berasal dari kebinekaan bangsa Indonesia bertujuan meningkatkan kerja sama antarpemeluk agama dan suku bangsa sehingga tercipta bangsa yang besar

☐ E. Integrasi nasional Indonesia bertujuan mengembangkan identitas nasional yang kuat dan bangga, sehingga masyarakat Indonesia dapat memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air

25. Sekelompok pedagang kecil mengalami masalah karena tempat mereka mencari nafkah tiba-tiba dilarang digunakan. Hal ini terjadi tanpa kesepakatan ganti rugi, sehingga mereka merasa telah terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban untuk saling menghormati kepentingan masing-masing.

Berdasarkan ilustrasi, solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu ....

A. mengirim perwakilan pedagang untuk menyampaikan usulan agar memperoleh tempat pengganti untuk berjualan

B. mengumpulkan dukungan dari elemen masyarakat sebagai upaya mempertahankan haknya untuk berjualan

C. melakukan mediasi sehingga para pihak memahami hak dan kewajibannya yang melandasi kepentingannya

D. mengajukan advokasi kepada lembaga bantuan hukum untuk memastikan para pedagang berada di pihak yang benar

E. mewakilkan kepada lembaga swadaya masyarakat untuk membantu memperjuangkan hak-hak sebagai pengguna lahan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

26. Dalam rangka menjaga kebinekaan, kerja sama dan toleransi merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan damai antara individu, kelompok, dan masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil kerja. Sedangkan toleransi dilakukan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dan damai antara individu dan kelompok yang berbeda.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, mana saja pernyataan berikut yang menunjukkan upaya menjaga kebinekaan untuk menjadi modal sosial pembangunan nasional? *(Jawaban benar lebih dari satu.)*

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa sejahtera dan bahagia.

☐ B. Meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pertukaran ide dan pengalaman antarkelompok masyarakat, sehingga dapat mempromosikan pembangunan yang inovatif dan efektif.

☐ C. Membantu meningkatkan interaksi dan pemahaman antara budaya yang berbeda serta kerja sama seni dan budaya dalam rangka meningkatkan penghargaan terhadap budaya lain.

☐ D. Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional, sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

☐ E. Menjalin kerja sama seni dan budaya dapat membantu meningkatkan penghargaan terhadap budaya serta penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antara budaya yang berbeda.

27. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Tentukan Benar atau Salah dari setiap pernyataan berikut berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden	○	○
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang	○	○
mengganti dan sekaligus melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya	○	○

28. Pemerintah terus mendorong harmoni dalam keberagaman melalui berbagai program. Salah satunya adalah Festival Toleransi dan Budaya Pelajar yang melibatkan siswa SMA

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

dari berbagai daerah. Kegiatan ini meliputi pertukaran budaya, pameran kearifan lokal, dan diskusi lintas suku, agama, serta bahasa.

Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan mana saja yang menunjukkan sikap positif sebagai modal sosial untuk pembangunan nasional? *(Jawaban benar lebih dari satu.)*

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. terlibat secara aktif dalam pertukaran budaya dan belajar mengenali keunikan budaya yang lain

☐ B. menjalin komunikasi secara wajar dengan tetap menjaga kenyamanan dalam keberagaman budaya

☐ C. menghormati simbol-simbol dari berbagai adat dan agama saat berkunjung ke daerah-daerah lain

☐ D. membagikan pengalaman kegiatan lintas budaya di media sosial sebagai inspirasi untuk masyarakat

☐ E. menyampaikan pendapat dengan hati-hati saat melakukan diskusi agar keputusan segera terwujud

29. Reog Ponorogo merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya masyarakat Ponorogo, Jawa Timur. Seiring perkembangannya, Reog tidak hanya menjadi simbol budaya masyarakat Ponorogo, tetapi juga bagian dari identitas budaya nasional Indonesia. Pada tahun 2024, Reog Ponorogo resmi diakui sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO, sebagai langkah penting dalam pelestarian warisan budaya bangsa dan menjadi modal sosial pembangunan Indonesia.

Alasan pelestarian Reog Ponorogo menjadi modal sosial pembangunan Indonesia adalah ....

A. tradisi lokal memperkuat promosi pariwisata untuk peningkatan ekonomi nasional

B. identitas budaya daerah yang diakui secara internasional mendatangkan modal pembangunan

C. kebudayaan menjadi identitas pembangunan bangsa di tengah maraknya gempuran budaya asing

D. pembangunan nasional membutuhkan identitas budaya lokal dalam menentukan prioritas pembangunan

E. pengakuan warisan budaya oleh UNESCO dapat menjadi modal pembangunan yang diakui dunia internasional

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lembar jawaban

No	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5					
6	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
11	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○
14					
15					
16	○	○	○	○	○
17	○	○	○	○	○
18					
19	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
21	○	○	○	○	○
22					
23	○	○	○	○	○
24					
25	○	○	○	○	○
26					
27					
28					
29	○	○	○	○	○

Soal PG kompleks / Benar–Salah (nomor 5, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 28): jawab langsung pada soalnya.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.2 · Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum	3	___ / 1	Ulangi hlm. 22
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	1, 6	___ / 2	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	4, 10	___ / 2	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	8	___ / 1	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	5, 9	___ / 2	Ulangi hlm. 68
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	11, 27	___ / 2	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	7	___ / 1	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	2, 12	___ / 2	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	17, 25	___ / 2	Ulangi hlm. 169
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	13, 15	___ / 2	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	26, 28, 29	___ / 3	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	14, 19, 20, 24	___ / 4	Ulangi hlm. 232
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	21, 22, 23	___ / 3	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia	16	___ / 1	Ulangi hlm. 287
Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula	18	___ / 1	Ulangi hlm. 317

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 2 — Prediksi TKA 2026

PPKN-FIN2

Petunjuk

Jumlah soal: 25. Waktu: 50 menit.

Kerjakan sekaligus tanpa membuka materi. Tandai jawaban pada lembar jawaban. Kunci dan pembahasan ada di Bagian D; hitung skor dan lihat tabel anjuran di akhir paket.

Kerjakan Simulasi 2 di LMS

Hasil dan analisis per sub bab tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-FIN2

1. Sejak perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Sebagian warga lalu mengira tidak ada lagi lembaga yang dapat mengimbangi kekuasaan Presiden maupun DPR.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Karena tidak ada lembaga tertinggi, setiap lembaga negara bebas bertindak tanpa dapat dikoreksi lembaga lain.	○	○
Undang-undang yang dibentuk DPR bersama Presiden tetap dapat diuji terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi.	○	○
DPR dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dijalankan Presiden.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 2026, usaha kerajinan rotan di Desa Sungai Ulin dijalankan bersama oleh perajin Dayak yang mahir menganyam, perantau Banjar yang berpengalaman berdagang, dan pemuda Jawa yang mengelola toko daring. Usaha itu berkembang karena setiap keputusan dibicarakan bersama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
Syarat yang membuat keberagaman di desa itu menjadi modal sosial pembangunan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. semua anggota memakai cara kerja dan cara pandang yang seragam agar tidak muncul perbedaan
B. kelompok yang anggotanya paling banyak menentukan semua keputusan agar usaha lebih cepat
C. perbedaan suku para anggota dijadikan merek dagang supaya produk lebih menarik bagi pembeli
D. anggota saling percaya dan setara sehingga keahlian yang berbeda dapat saling melengkapi
E. setiap kelompok suku mengelola usaha sendiri-sendiri agar tidak terjadi gesekan antaranggota

3. Bu Maria mengajar di sebuah SMP di desa yang berbatasan darat dengan negara tetangga. Pada 2026, ia mendapati banyak muridnya lebih akrab dengan siaran dan lagu dari negara tetangga, bahkan sebagian enggan menyebut diri orang Indonesia karena merasa daerahnya tertinggal.
Upaya terbaik yang dapat dilakukan Bu Maria sesuai perannya untuk menjaga keutuhan NKRI adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. melarang muridnya menonton siaran dan mendengarkan lagu dari negara tetangga di mana pun
B. meminta aparat keamanan mengacak siaran negara tetangga yang tertangkap di desa tersebut
C. menambah upacara bendera setiap hari agar murid terbiasa menyanyikan lagu-lagu nasional
D. mengajar dengan cara yang menumbuhkan rasa bangga pada daerah dan bangsanya sendiri
E. menghukum murid yang menyebut dirinya bukan orang Indonesia agar tidak ditiru temannya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Pasal 13 UUD NRI 1945 menyatakan Presiden mengangkat duta dan konsul, dan dalam mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pada 2027, sejumlah anggota DPR menilai seorang calon duta besar yang diajukan Presiden kurang memahami negara tujuan. Warganet lalu ramai mendesak agar DPR sendiri yang memilih duta besar. Penilaian yang paling tepat berdasarkan ketentuan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. DPR berwenang membatalkan pengangkatan itu dan menunjuk sendiri calon duta yang lebih cakap
B. DPR memberi pertimbangan, sedangkan keputusan mengangkat duta tetap berada di tangan Presiden
C. Presiden wajib mengikuti seluruh isi pertimbangan DPR karena DPR merupakan wakil seluruh rakyat
D. Presiden dapat mengangkat duta tanpa melibatkan DPR karena urusan luar negeri bersifat rahasia
E. perbedaan pendapat Presiden dan DPR tentang calon duta harus diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung

5. Sila ketiga Pancasila berbunyi "Persatuan Indonesia", sedangkan sila kelima berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Nilai kedua sila itu dapat tampak bersamaan dalam satu kegiatan pelajar.
Perilaku yang berhubungan dengan kedua sila tersebut sekaligus adalah ....

A. menggalang buku dari pelajar berbagai daerah untuk sekolah di pulau terpencil yang kekurangan buku
B. mendoakan teman yang sedang sakit menurut agama masing-masing dalam kegiatan pagi di sekolah
C. memutuskan tujuan karyawisata kelas melalui musyawarah setelah mendengarkan semua usulan siswa
D. membagikan seluruh uang kas kelas dalam jumlah yang persis sama kepada setiap siswa di kelas itu
E. mengenakan pakaian adat dari daerah asal masing-masing saat peringatan Sumpah Pemuda di halaman sekolah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Pada musim panen 2026, truk pengangkut kopi dari kebun warga Desa Wonokerto melintasi jalan kampung yang sempit di depan sebuah SD setiap pagi. Petani ingin kopi cepat sampai ke pengepul, sedangkan orang tua murid khawatir akan keselamatan anak-anak. Kepala desa mengundang kedua pihak bermusyawarah.
Berdasarkan ilustrasi, peran Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah menuntun warga untuk ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mengizinkan truk melintas kapan saja karena kopi menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar warga
B. melarang truk melewati jalan kampung sama sekali agar keselamatan murid terjamin sepenuhnya
C. meminta orang tua mengantar sendiri anaknya agar jadwal angkutan kopi tidak perlu diatur ulang
D. mendahulukan kelancaran angkutan kopi, lalu memikirkan keselamatan murid setelah panen selesai
E. menyepakati jam lintas truk di luar jam masuk dan pulang sekolah serta batas kecepatan di dekat SD

7. Di beberapa daerah, bentrokan antaranggota perguruan pencak silat berulang setiap musim pengesahan anggota baru. Konvoi anggota kerap berujung pada perusakan rumah dan warung warga, sehingga hubungan antarkelompok di masyarakat makin renggang. Upaya yang paling tepat untuk menjaga integrasi dalam keadaan tersebut adalah ....

A. membubarkan seluruh perguruan pencak silat agar tidak ada lagi kelompok yang saling bentrok
B. menambah aparat setiap ada konvoi tanpa perlu melibatkan para pemimpin perguruan
C. meminta warga menutup rumah dan warungnya setiap kali musim pengesahan anggota baru tiba
D. mengadakan lomba silat berhadiah besar agar para anggota sibuk bertanding di arena
E. mempertemukan para pemimpin perguruan untuk menyepakati aturan dan menanam persaudaraan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Pada 4 Desember 2024, UNESCO menetapkan kebaya sebagai warisan budaya takbenda. Nominasinya diajukan bersama oleh lima negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya memang dikenakan masyarakat di kelima negara itu dengan corak masing-masing.
Sikap terhadap peristiwa tersebut yang paling sesuai dengan nilai Pancasila dalam pergaulan antarbangsa adalah ....
Sumber: Antara dan CNN Indonesia, Desember 2024.

A. menganggap pengakuan bersama itu merugikan karena kebaya seharusnya hanya milik Indonesia
B. memandang kebaya sebagai warisan bersama yang mempererat persahabatan antarbangsa yang setara
C. menuntut negara lain meminta izin Indonesia setiap kali mengenakan kebaya dalam acara resmi
D. berhenti mengenakan kebaya agar tidak menimbulkan perselisihan dengan negara-negara tetangga
E. menilai budaya Indonesia lebih tinggi karena corak kebayanya lebih beragam daripada milik negara lain

9. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihuni jauh melebihi kapasitasnya. Sebagian penghuninya adalah pengguna narkotika dan pelaku tindak pidana ringan. Kepadatan membuat pembinaan tidak berjalan baik, dan sebagian bekas penghuni kembali melanggar hukum setelah bebas.
Upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. membangun lebih banyak gedung lembaga pemasyarakatan baru di setiap kabupaten dan kota
B. memperberat hukuman bagi semua pelaku tindak pidana agar masyarakat jera dan takut melanggar hukum
C. membebaskan seluruh penghuni yang dihukum karena tindak pidana ringan tanpa syarat apa pun
D. mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan keadilan restoratif untuk perkara ringan
E. menyerahkan pembinaan bekas penghuni sepenuhnya kepada keluarga dan masyarakat sekitar

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Di sebuah kampung, beberapa warga dari berbagai suku mendirikan sekolah sepak bola anak secara sukarela. Orang tua bergiliran menjaga latihan, keluarga saling meminjamkan sepatu dan bola, dan seluruh anggota sepakat menolak ejekan bernada suku, baik di lapangan maupun di grup percakapan.
Pernyataan manakah yang menunjukkan kebinekaan warga kampung itu menjadi modal sosial? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Orang tua yang bergiliran menjaga latihan menumbuhkan norma saling membantu dan rasa percaya.
☐ B. Aturan menolak ejekan bernada suku yang dipatuhi bersama menjaga kerja sama tetap kuat.
☐ C. Pelatih sepakat hanya memainkan anak dari sukunya sendiri agar tim di lapangan lebih kompak bermain.
☐ D. Peralatan yang saling dipinjamkan antarkeluarga menunjukkan jaringan yang memudahkan kegiatan.
☐ E. Keberhasilan tim membuat para anggota sebaiknya meninggalkan identitas sukunya masing-masing.

11. Di Indonesia, perusahaan swasta boleh membangun dan mengelola jalan tol, tetapi besaran tarifnya ditetapkan pemerintah dan penyesuaiannya mensyaratkan terpenuhinya standar pelayanan minimal. Negara juga tetap menyediakan jalan umum tanpa tarif bagi warga yang tidak memakai jalan tol.
Kebijakan tersebut menunjukkan ciri ideologi Pancasila yang membedakannya dari liberalisme dan sosialisme, yaitu ....

A. kebebasan berusaha diakui, tetapi diatur negara agar kepentingan umum tetap terlindungi
B. seluruh kegiatan ekonomi dikuasai negara sehingga usaha swasta tidak diberi ruang sedikit pun
C. harga dan mutu layanan dibiarkan ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan negara sama sekali
D. kepentingan pemilik modal didahulukan agar pembangunan jalan dapat berjalan cepat dan murah
E. negara dan swasta bersaing bebas sehingga warga cukup memilih layanan yang harganya termurah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Beberapa sekolah mengadakan "Hari Bekal Nusantara". Pada hari itu siswa membawa makanan khas daerah asal keluarganya, lalu saling mencicipi dan menceritakan asal-usul masakan tersebut kepada teman-temannya saat jam istirahat.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna kebersamaan dalam keberagaman pada kegiatan tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kegiatan itu memperkukuh persatuan karena siswa mengenal dan menghargai kebiasaan daerah lain.	○	○
Siswa yang kurang cocok dengan rasa masakan daerah lain dapat menolak dengan sopan tanpa mengejeknya.	○	○
Agar persatuan makin kuat, sebaiknya semua siswa membawa jenis bekal yang sama setiap kali kegiatan.	○	○

13. Pada 2026, sebuah SMA negeri membagi seluruh kelas berdasarkan agama siswa, tidak hanya pada jam pelajaran agama. Kepala sekolah beralasan cara itu memudahkan penyusunan jadwal dan membuat siswa merasa nyaman bersama teman seagama. Penilaian yang paling tepat terhadap kebijakan tersebut dikaitkan dengan integrasi nasional adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tepat, karena siswa yang seagama akan lebih mudah bekerja sama dalam semua mata pelajaran
B. tepat, karena pelajaran agama memang dipisahkan menurut agama yang dianut oleh setiap siswa
C. kurang tepat, karena pemisahan sehari-hari mengurangi kesempatan saling mengenal antarsiswa
D. kurang tepat, karena sekolah negeri tidak boleh menyelenggarakan pelajaran agama apa pun
E. kurang tepat, karena siswa menjadi tidak bebas memilih agama yang ingin dianutnya selama di sekolah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Warga Kecamatan Lembah Asri berasal dari berbagai suku dan agama. Pada 2026, mereka mengumpulkan iuran sukarela untuk membeli sebuah ambulans bekas. Sopirnya relawan dari beberapa kampung yang bertugas bergiliran, dan siapa pun yang sakit diantar ke rumah sakit tanpa ditanya asal-usulnya.
Alasan kegiatan tersebut menunjukkan kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah karena kegiatannya menjadi teladan
B. ambulans bekas harganya lebih murah sehingga kas kecamatan dapat dipakai untuk hal lain
C. warga dari kelompok terbesar menanggung semua iuran sehingga kelompok kecil tidak terbebani
D. setiap kampung akhirnya memiliki ambulans sendiri sehingga tidak perlu bergantung pada kampung lain
E. rasa saling percaya antarwarga yang beragam menghasilkan layanan yang bermanfaat bagi semua

15. Sejumlah pemuda di sebuah daerah tertinggal ramai mengunggah keluhan bahwa jalan dan sekolah di daerahnya jauh tertinggal dibanding daerah lain. Sebagian unggahan mulai menyalahkan warga pendatang yang dianggap merebut pekerjaan penduduk asli.
Pernyataan manakah yang tepat tentang ancaman integrasi nasional dan cara mengatasinya berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Kesenjangan pembangunan dapat menumbuhkan rasa diperlakukan tidak adil yang melemahkan integrasi.
☐ B. Menyalahkan warga pendatang merupakan cara yang wajar dan sah untuk menyuarakan ketidakadilan daerah.
☐ C. Penghapusan semua unggahan keluhan oleh aparat merupakan cara utama untuk menjaga integrasi.
☐ D. Pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja menyasar akar ketegangan di daerah tersebut.
☐ E. Dialog penduduk asli dan pendatang dapat mencegah prasangka berkembang menjadi konflik terbuka.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pada 2026, pengurus sebuah asrama mahasiswa melarang penghuninya menghadiri diskusi publik tentang kebijakan pemerintah daerah dengan alasan menjaga nama baik asrama. Penilaian yang paling tepat terhadap larangan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tidak tepat, karena menjaga nama baik asrama bukan alasan sah untuk membatasi hak itu
B. dibenarkan, karena pengurus berwenang mengatur semua kegiatan penghuni di mana pun berada
C. dibenarkan, selama larangan itu disetujui sebagian besar pengurus dalam rapat asrama
D. tidak tepat, karena hak memperoleh informasi sama sekali tidak boleh dibatasi oleh siapa pun
E. tepat, karena diskusi kebijakan daerah hanya pantas diikuti warga yang sudah lama menetap

17. Sebuah video yang memelesetkan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bahan lelucon beredar luas di media sosial. Sebagian warganet ikut membagikannya, sementara sebagian lain marah dan menyerang akun pembuatnya dengan kata-kata kasar.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Menghormati lagu kebangsaan termasuk perilaku menjaga identitas dan keutuhan bangsa.	○	○
Membagikan video itu termasuk kebebasan berekspresi yang tidak dapat dibatasi.	○	○
Menyerang pembuat video dengan kata-kata kasar merupakan cara tepat membela negara.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Pada 2026, panitia seleksi pegawai Pemerintah Kota Batu Jajar menyediakan soal berhuruf Braille dan tambahan waktu mengerjakan bagi peserta tunanetra. Sebagian peserta lain memprotes karena merasa diperlakukan tidak sama, padahal soal dan nilai ambang kelulusan bagi semua peserta tetap sama.
Penilaian yang paling tepat terhadap kebijakan panitia berdasarkan hak warga negara dalam UUD NRI 1945 adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. tidak sesuai, karena keadilan menuntut semua peserta mendapat soal dan waktu yang persis sama
B. sesuai, asalkan seluruh peserta lain juga diberi tambahan waktu agar tidak ada yang merasa iri
C. sesuai, karena perlakuan khusus itu memberi peserta tunanetra kesempatan bersaing yang setara
D. tidak sesuai, karena jabatan di pemerintahan hanya terbuka bagi peserta yang tidak berkebutuhan khusus
E. sesuai, sehingga peserta tunanetra sebaiknya dinyatakan lulus tanpa harus memenuhi nilai ambang

19. Warga di sejumlah daerah mengeluhkan mahalnya ongkos perjalanan antarpulau di dalam negeri. Ada keluarga yang memilih berlibur ke luar negeri karena biayanya tidak jauh berbeda, sementara warga pulau-pulau kecil sulit mengunjungi saudara atau memasarkan hasil bumi ke pulau lain.
Berdasarkan Wawasan Nusantara, alasan paling tepat pemerintah perlu memperbaiki keadaan tersebut adalah ....

A. agar uang warga tidak dibelanjakan di luar negeri sehingga devisa negara tetap aman
B. agar perusahaan angkutan dalam negeri memperoleh keuntungan lebih besar setiap tahun
C. agar wilayah darat, laut, dan udara benar-benar terhubung sebagai satu kesatuan bagi warga
D. agar warga tidak terpengaruh budaya bangsa lain ketika sedang bepergian ke luar negeri
E. agar setiap pulau mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa perlu bergantung pulau lain

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Pada 2027, Sari, pekerja sebuah pabrik, melaporkan atasannya ke kantor polisi atas dugaan pelecehan seksual. Petugas yang menerima laporan menyarankan agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan, sebab terlapor dikenal dekat dengan pejabat setempat. Sari pun khawatir kehilangan pekerjaannya.
Berdasarkan ilustrasi, tantangan penegakan hukum yang berkeadilan yang paling tampak adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. rendahnya keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib
B. belum adanya undang-undang yang mengatur larangan kekerasan seksual di lingkungan kerja
C. perlakuan aparat yang tidak setara di depan hukum karena kedudukan dan kedekatan terlapor
D. banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan sehingga persidangan berjalan sangat lambat
E. lemahnya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada terlapor kasus kekerasan seksual

21. Di beberapa kawasan wisata, pengelola hotel memagari pantai di depan bangunannya. Akibatnya, nelayan setempat tidak lagi dapat menambatkan perahu, dan warga sekitar kehilangan jalan menuju laut yang sudah dipakai turun-temurun.
Pernyataan manakah yang tepat tentang hak warga dan tanggung jawab negara berdasarkan ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Hotel boleh memagari pantai karena sudah membayar pajak dan menyerap tenaga kerja setempat.
☐ B. Negara bertanggung jawab memastikan kekayaan alam seperti pantai dimanfaatkan bagi rakyat banyak.
☐ C. Nelayan berhak menyampaikan keberatan melalui pengaduan resmi dan jalur hukum yang tersedia.
☐ D. Warga boleh merobohkan pagar itu bersama-sama karena hak mereka telah dilanggar oleh pengelola hotel.
☐ E. Penghidupan nelayan yang bergantung pada laut termasuk penghidupan layak yang perlu dilindungi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Pada 2026, warga Kelurahan Tanjung Gading mengubah lahan kosong menjadi kebun sayur bersama. Rapat warga menyepakati petak terdekat dari jalan untuk lansia dan pengguna kursi roda, sebagian hasil panen untuk panti asuhan, dan koordinator kebun dipilih tanpa memandang agama atau sukunya.
Pernyataan manakah yang tepat tentang nilai Pancasila dalam ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Petak dekat jalan bagi lansia melanggar sila kelima karena pembagian petak tidak dibuat sama rata.
☐ B. Petak dekat jalan bagi lansia mencerminkan keadilan yang memperhatikan kebutuhan warga.
☐ C. Penyisihan hasil panen untuk panti asuhan terutama mencerminkan sila ketiga, persatuan.
☐ D. Pemilihan koordinator tanpa memandang agama dan suku menghargai kesetaraan martabat warga.
☐ E. Kesepakatan dalam rapat warga menunjukkan musyawarah yang menghasilkan keputusan berkeadilan.

23. Di sejumlah kota, warga meletakkan lemari kecil di depan rumah berisi makanan kemasan, buku, dan pakaian layak pakai. Siapa pun boleh mengambil yang dibutuhkan atau menambahkan barang tanpa ditanya identitasnya. Kegiatan ini tumbuh dari kesadaran warga sendiri, bukan perintah pemerintah.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang Pancasila sebagai pandangan hidup!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kegiatan itu menunjukkan nilai Pancasila menuntun perilaku warga sehari-hari walaupun tidak diperintahkan.	○	○
Karena tidak diatur dalam peraturan mana pun, kegiatan itu tidak berhubungan dengan Pancasila.	○	○
Memberi tanpa menanyakan agama atau suku penerima mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Di sejumlah kota pelabuhan, radio komunitas menyiarkan acara bergiliran dalam beberapa bahasa daerah warganya, misalnya Bugis, Buton, Jawa, dan Manggarai. Pendengar dari berbagai asal ikut menelepon, saling berkirim salam, dan menceritakan tradisi kampung halamannya.

Alasan kegiatan tersebut dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa adalah ....

A. mempertemukan warga berbeda asal sehingga saling mengenal dan merasa memiliki kota bersama
B. menarik lebih banyak pemasang iklan sehingga radio komunitas mampu bertahan lebih lama
C. menjaga agar setiap kelompok cukup bergaul dengan sesama penutur bahasa daerahnya sendiri saja
D. mengganti peran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari warga
E. menghibur para perantau yang merindukan kampung halaman setelah lama tinggal di kota itu

25. Pada 2026, orang tua murid di Kabupaten Lembah Kencana mengadukan atap SMA negeri yang bocor kepada bupati. Bupati menjelaskan bahwa pengelolaan SMA negeri menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan kabupaten mengelola SD dan SMP negeri. Ia lalu meneruskan aduan itu kepada gubernur.

Penjelasan yang paling tepat tentang sikap bupati tersebut adalah ....

Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pendidikan termasuk urusan absolut pemerintah pusat sehingga daerah sama sekali tidak boleh menanganinya
B. urusan pendidikan dibagi antartingkat pemerintahan, dan aduan diteruskan kepada yang berwenang
C. bupati boleh menolak semua aduan warga yang tidak berkaitan dengan janji kampanyenya sendiri
D. otonomi daerah membuat kabupaten bebas mengambil alih sekolah mana pun tanpa pembagian urusan
E. perbaikan gedung sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab komite sekolah dan para orang tua

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lembar jawaban

No	A	B	C	D	E
1					
2	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
10					
11	○	○	○	○	○
12					
13	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○
15					
16	○	○	○	○	○
17					
18	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
19	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
21					
22					
23					
24	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○

Soal PG kompleks / Benar–Salah (nomor 1, 10, 12, 15, 17, 21, 22, 23): jawab langsung pada soalnya.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	6, 11, 23	___ / 3	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	5, 22	___ / 2	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	16	___ / 1	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	8	___ / 1	Ulangi hlm. 68
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	1, 4	___ / 2	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	25	___ / 1	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	18, 21	___ / 2	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	9, 20	___ / 2	Ulangi hlm. 169
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	12, 24	___ / 2	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	2, 10, 14	___ / 3	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	7, 13, 15	___ / 3	Ulangi hlm. 232
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	3, 17	___ / 2	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia	19	___ / 1	Ulangi hlm. 287

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 3 — Prediksi TKA 2026

PPKN-FIN3

Petunjuk

Jumlah soal: 25. Waktu: 50 menit.

Kerjakan sekaligus tanpa membuka materi. Tandai jawaban pada lembar jawaban. Kunci dan pembahasan ada di Bagian D; hitung skor dan lihat tabel anjuran di akhir paket.

Kerjakan Simulasi 3 di LMS

Hasil dan analisis per sub bab tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-FIN3

1. Pada 2026, serikat pekerja sebuah pabrik sepatu menuntut pembayaran upah lembur yang tertunda tiga bulan. Perundingan dengan manajemen belum berhasil. Dalam rapat serikat, sebagian anggota mengusulkan menutup jalan raya di depan pabrik agar tuntutan cepat didengar, padahal jalan itu dilalui ambulans menuju rumah sakit.
Sikap yang sesuai dengan HAM dan demokrasi Pancasila adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menutup jalan raya itu karena hak menyampaikan pendapat tidak boleh dibatasi oleh siapa pun
B. menghentikan semua tuntutan karena pekerja wajib menerima setiap keputusan pemilik pabrik
C. menyampaikan tuntutan dengan cara yang sah tanpa menghalangi hak para pengguna jalan raya
D. meminta aparat membubarkan serikat agar perselisihan dengan manajemen pabrik segera berakhir
E. menyerahkan cara aksi kepada anggota yang paling lantang agar tuntutan terdengar lebih tegas

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 2026, Dodi, petugas gudang sebuah perusahaan jasa pengiriman, mencurigai sebuah paket karena bentuknya menyerupai senjata api dan alamat pengirimnya tidak jelas. Rekan-rekannya menyarankan berbagai hal, mulai dari membuka paket itu sendiri sampai memotretnya lalu mengunggahnya ke media sosial.
Tindakan Dodi yang paling tepat untuk ikut menjaga keamanan dan keutuhan NKRI adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. membuka paket itu sendiri agar dapat segera memastikan isinya dan memusnahkannya bila berbahaya
B. mengembalikan paket itu kepada pengirimnya tanpa melapor agar perusahaan tidak terlibat masalah
C. mengunggah foto paket itu ke media sosial agar warganet ikut mengenali pengirimnya dengan cepat
D. mengamankan paket tanpa mengubahnya, lalu melaporkannya lewat atasan kepada pihak kepolisian
E. membiarkan paket itu terkirim karena urusan keamanan sepenuhnya menjadi tugas aparat negara

3. Sebuah layanan pengaduan publik tingkat nasional mempekerjakan petugas dari berbagai daerah. Petugas yang menguasai bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Batak, atau bahasa daerah lain melayani penelepon yang lebih nyaman berbahasa daerah. Para petugas juga saling bertukar cara menghadapi penelepon dari daerah masing-masing sehingga layanan makin baik.
Alasan yang paling tepat bahwa keragaman petugas itu menjadi modal sosial adalah ....

A. keragaman dengan sendirinya menguntungkan lembaga tanpa perlu dikelola melalui kerja sama apa pun
B. setiap petugas hanya melayani penelepon dari sukunya sendiri sehingga tidak perlu bekerja sama
C. lembaga dapat menekan biaya gaji karena petugas dari daerah bersedia dibayar lebih rendah
D. semua petugas akhirnya diwajibkan memakai satu bahasa daerah yang paling banyak penuturnya
E. kemampuan yang berbeda saling melengkapi dan dijalin melalui kerja sama yang saling percaya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

4. Pada 2027, ratusan pekerja sebuah pabrik mebel menggugat perusahaannya ke pengadilan hubungan industrial karena pesangon mereka tidak dibayar. Selama persidangan, hakim yang menangani perkara itu terlihat beberapa kali makan malam bersama kuasa hukum perusahaan. Para pekerja ingin perilaku hakim tersebut diperiksa.
Lembaga yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim itu adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. Mahkamah Konstitusi, karena hak konstitusional pekerja atas imbalan yang layak sedang dipersoalkan
B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena lembaga itu memeriksa pelanggaran kode etik pejabat
C. Komisi Yudisial, karena lembaga itu menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim
D. Badan Pemeriksa Keuangan, karena perkara pesangon menyangkut pengelolaan uang dalam jumlah besar
E. Dewan Perwakilan Rakyat, karena lembaga itu mengawasi jalannya pemerintahan termasuk pengadilan

5. Di sebuah pabrik pakan ternak pada 2026, pekerja dari dua suku yang berbeda membentuk kelompok masing-masing dan saling menuduh mandor membagi jatah lembur hanya kepada kelompok sesukunya. Ketegangan itu berujung perkelahian kecil di area parkir. Manajemen meminta usulan penyelesaian.
Upaya yang paling tepat untuk menjaga integrasi di pabrik tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. memisahkan giliran kerja kedua kelompok agar mereka tidak lagi bertemu di dalam pabrik
B. mempertemukan wakil kedua kelompok dan menetapkan aturan pembagian lembur yang terbuka
C. memecat semua pekerja yang terlibat perkelahian dan meminta polisi berjaga di area pabrik
D. memberi bonus kepada kedua kelompok dengan syarat mereka tidak lagi mempersoalkan lembur
E. melarang pekerja berkumpul atau berbicara dengan bahasa daerahnya selama berada di pabrik

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Dalam penguatan pendidikan vokasi, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi lulusan dan sertifikasi yang berlaku secara nasional. Pemerintah provinsi mengelola SMK negeri, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan industri setempat menyediakan tempat praktik kerja. Setiap pihak menjalankan bagiannya sesuai kewenangan.
Alasan yang paling tepat mengenai pembagian peran tersebut adalah ....

A. pemerintah pusat lebih mampu sehingga daerah cukup menjalankan perintah tanpa ikut merencanakan
B. pemerintah daerah berkuasa penuh atas pendidikan sehingga standar nasional tidak lagi diperlukan
C. pembagian itu dibuat semata-mata agar beban anggaran pemerintah pusat menjadi jauh lebih ringan
D. setiap daerah perlu bersaing dengan daerah lain sehingga kerja sama antarpemerintahan tidak penting
E. standar nasional menjamin lulusan diakui di mana pun, dan daerah lebih mengenal kebutuhannya

7. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada 2027, kas Koperasi Nelayan Mina Jaya kurang Rp40 juta. Seorang pengurus langsung memasang foto kasir koperasi di grup warga dengan tulisan "pencuri".
Tindakan yang paling sesuai dengan ketentuan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. membiarkan unggahan itu karena kekurangan kas sudah cukup membuktikan kasir sebagai pelakunya
B. memberhentikan kasir dan menyita hartanya agar kerugian koperasi dapat segera tertutupi
C. meminta warga mendatangi rumah kasir agar ia mengaku sebelum perkaranya dilaporkan
D. menghapus unggahan itu, lalu melaporkan kekurangan kas dan buktinya kepada pihak berwajib
E. menuntut kasir meminta maaf di grup warga karena semua orang sama kedudukannya di depan hukum

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Pabrik pengolahan ikan Samudra Jaya beroperasi 24 jam setiap hari. Pada Idulfitri 2027, karyawan beragama Kristen dan Hindu bersedia menggantikan giliran kerja rekan-rekan muslim agar mereka dapat berlebaran bersama keluarga. Saat Natal dan Galungan, karyawan muslim gantian menggantikan giliran kerja rekan-rekannya.
Sikap para karyawan tersebut menunjukkan ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. toleransi aktif, yaitu saling membantu agar setiap orang dapat menjalankan ibadahnya
B. toleransi pasif, yaitu sekadar membiarkan rekan yang berbeda agama tanpa ikut peduli
C. pencampuran ajaran agama karena setiap karyawan ikut merayakan hari raya agama yang lain
D. penyeragaman karena semua karyawan diwajibkan bekerja penuh pada hari raya yang sama
E. persaingan antarkelompok agama untuk memperoleh giliran libur yang paling panjang

9. Di sebuah pabrik pengolahan kayu pada 2026, seorang pengawas sering membentak dan mempermalukan pekerja yang berbuat salah di depan rekan-rekannya, bahkan memberi julukan yang merendahkan. Perwakilan pekerja lalu meminta manajemen menetapkan aturan agar teguran disampaikan secara pribadi dan sopan.
Nilai Pancasila yang paling tepat menjadi dasar permintaan perwakilan pekerja tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sila kedua, karena setiap pekerja berhak diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia
B. sila keempat, karena permintaan itu disampaikan melalui perwakilan yang dipilih oleh para pekerja pabrik
C. sila kelima, karena setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama besarnya dengan upah pengawas
D. sila ketiga, karena teguran di depan umum dapat memecah belah pekerja menjadi beberapa kelompok
E. sila pertama, karena membentak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh semua ajaran agama

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Di tempat kerja, karyawan sering menghadapi pilihan antara kepentingan pribadi, kepentingan rekan, dan kepentingan bersama. Nilai Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan menuntun pilihan itu, baik di kantor pemerintah maupun di perusahaan swasta.

Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang perilaku karyawan yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Karyawan yang menolak ikut memalsukan catatan jam lembur, walaupun diajak rekan satu timnya, menjalankan Pancasila sebagai pandangan hidup.	○	○
Pancasila sebagai pandangan hidup hanya mengikat pegawai pemerintah, sedangkan karyawan swasta cukup menaati aturan perusahaan.	○	○
Mendahulukan rekan yang sedaerah ketika membagi tugas yang ringan merupakan wujud sila ketiga di tempat kerja.	○	○

11. Dalam sebuah seminar kepemudaan, seorang pembicara berpendapat bahwa integrasi nasional baru akan kuat bila setiap kelompok bersedia meninggalkan adat, bahasa daerah, dan kebiasaan asalnya, lalu memakai satu budaya nasional yang sama. Menurutnya, perbedaan budaya adalah sumber utama konflik di Indonesia.

Penilaian yang paling tepat terhadap pendapat tersebut adalah ....

A. tepat, karena persatuan hanya dapat dicapai bila tidak ada lagi perbedaan budaya di masyarakat

B. tepat, karena konflik di Indonesia selama ini selalu disebabkan oleh perbedaan bahasa daerah

C. keliru, karena integrasi menyatukan kelompok tanpa menghapus identitas budaya masing-masing

D. keliru, karena urusan integrasi nasional sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat

E. kurang tepat, karena yang perlu dihapus hanya bahasa daerah, sedangkan adat boleh dipertahankan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Sebuah unggahan mempertanyakan mengapa pemerintah membangun mercusuar, dermaga, dan pos penjagaan di sebuah pulau kecil terluar yang hanya dihuni puluhan keluarga. Menurut pengunggahnya, biaya itu lebih baik dipakai seluruhnya untuk kota besar yang penduduknya jutaan orang.
Tanggapan yang paling sesuai dengan Wawasan Nusantara adalah ....

A. pulau terluar menentukan garis batas wilayah, sehingga menjaganya ikut menjaga keutuhan wilayah
B. pendapat itu tepat karena pembangunan sebaiknya mengikuti jumlah penduduk di setiap pulau
C. pulau yang penduduknya sedikit boleh dilepas bila tidak memberikan pendapatan bagi negara
D. penjagaan pulau terluar cukup diserahkan kepada warga setempat tanpa perlu biaya dari negara
E. laut di sekitar pulau kecil itu merupakan laut bebas sehingga tidak perlu dijaga oleh negara Indonesia

13. Banyak koperasi kini memakai aplikasi ponsel untuk menabung, mengajukan pinjaman, dan menjual produk anggota secara daring. Rapat anggota tahunan pun dapat diikuti dari jarak jauh. Namun, prinsip satu anggota satu suara dan pembagian sisa hasil usaha menurut jasa anggota tetap dipertahankan.
Perkembangan tersebut menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ....

A. koperasi boleh berubah menjadi perusahaan biasa yang dikuasai oleh pemilik modal terbesar
B. asas kekeluargaan tetap dipegang, sedangkan cara pelayanannya mengikuti kemajuan teknologi
C. nilai dasar kekeluargaan diganti dengan nilai efisiensi yang lebih sesuai dengan zaman digital
D. semua cara kerja koperasi negara lain boleh ditiru tanpa disaring dengan nilai bangsa sendiri
E. teknologi asing harus ditolak agar koperasi tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama, tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui, sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pada 2027, RUU tentang Pelatihan Vokasi telah disetujui bersama DPR dan Presiden, tetapi belum ditandatangani setelah 30 hari karena masih diprotes sebagian asosiasi pengusaha.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan walaupun tidak ditandatangani Presiden.	○	○
Karena belum menandatanganinya, Presiden masih dapat membatalkan RUU itu melalui keputusan presiden.	○	○
Asosiasi pengusaha yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan pengujian undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.	○	○

15. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 antara lain menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaan dan memilih tempat tinggal di wilayah negara. Pada 2026, Kepala Desa Sukaluhur melarang pemuda desanya bekerja di kota karena desa kekurangan tenaga untuk mengolah sawah. Pemuda yang tetap pergi diancam tidak dilayani surat-menyuratnya.
Penilaian yang paling tepat terhadap kebijakan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sah, karena kepala desa berwenang mengatur warganya demi kepentingan pembangunan desa
B. melanggar hak warga; desa sebaiknya membuka peluang kerja agar pemuda mau bertahan
C. sah, bila larangan itu lebih dahulu disetujui sebagian besar warga dalam musyawarah desa
D. melanggar hak warga sehingga pemuda boleh tidak lagi mematuhi semua aturan yang dibuat desa
E. tepat, karena kebebasan memilih pekerjaan hanya berlaku bagi warga yang tinggal di kota

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Koperasi Peternak Lereng Arum beranggotakan peternak sapi perah dari tiga desa yang berbeda suku dan agama. Anggota yang sapinya sakit dapat meminjam susu dari anggota lain untuk memenuhi setoran, lalu menggantinya kemudian tanpa perjanjian tertulis. Peternak berpengalaman juga mengajari anggota baru tanpa bayaran.
Pernyataan manakah yang menunjukkan modal sosial di koperasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Koperasi memiliki tangki pendingin susu dan gudang pakan yang dibeli dari simpanan anggota.
☐ B. Pinjaman susu tanpa perjanjian tertulis menunjukkan adanya rasa saling percaya antaranggota.
☐ C. Hubungan antarpeternak dari tiga desa membentuk jaringan yang memudahkan mereka bekerja sama.
☐ D. Keputusan koperasi cepat diambil karena pengurusnya dipilih hanya dari desa yang paling besar.
☐ E. Kebiasaan peternak senior mengajari anggota baru tanpa bayaran mencerminkan norma saling membantu.

17. Di sejumlah perkebunan besar di luar Jawa, para pekerja berasal dari berbagai pulau dan tinggal berdampingan dengan warga setempat. Kadang muncul gesekan kecil yang mudah dibesar-besarkan sebagai persoalan suku. Pengelola perkebunan bersama perwakilan pekerja ingin menyusun kegiatan yang benar-benar ikut menjaga keutuhan NKRI.
Usulan kegiatan manakah yang tepat? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Forum rutin pekerja dan warga setempat untuk membicarakan masalah bersama sebelum membesar.
☐ B. Regu jaga bersenjata tajam dari pekerja untuk menindak sendiri warga yang dianggap mengganggu.
☐ C. Lomba olahraga antarblok permukiman yang pesertanya dikelompokkan menurut suku masing-masing.
☐ D. Pelatihan bagi pekerja untuk memeriksa kebenaran kabar sebelum membagikannya di grup percakapan.
☐ E. Pemisahan permukiman pekerja menurut daerah asal agar setiap kelompok merasa lebih nyaman.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Pada 2026, siswa jurusan kuliner SMK Bina Karya membuka kantin praktik yang menjual makanan murah di sekolah sebagai bagian dari pembelajaran. Pedagang kantin lama mengeluh pendapatannya turun tajam, sedangkan siswa menilai praktik itu tuntutan kurikulum. Kepala sekolah diminta menengahi.
Penyelesaian yang paling mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menutup kantin praktik karena pedagang lama lebih dahulu berjualan dan menggantungkan hidup di sana
B. meneruskan kantin praktik apa adanya karena kegiatan pembelajaran lebih penting daripada usaha pedagang
C. menyerahkan persoalan itu kepada dinas pendidikan provinsi agar sekolah tidak perlu ikut memutuskan
D. menyepakati jadwal dan menu berbeda sehingga praktik siswa berjalan dan pedagang tetap berjualan
E. meminta siswa memikirkan nasib pedagang setelah kebutuhan nilai praktik mereka sendiri terpenuhi

19. Sejumlah perusahaan dan instansi nasional menempatkan pegawai barunya di kantor cabang di luar daerah asal mereka selama beberapa tahun pertama. Pegawai asal Sumatra bertugas di Sulawesi, pegawai asal Maluku bertugas di Jawa, dan seterusnya. Mereka bekerja, bertetangga, dan bergaul dengan warga setempat.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang kaitan kebijakan tersebut dengan kebersamaan dalam keberagaman!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Agar mudah bersatu dengan warga setempat, pegawai pindahan sebaiknya meninggalkan bahasa dan adat daerah asalnya.	○	○
Pergaulan sehari-hari dengan warga setempat membuat pegawai saling mengenal budaya lain sehingga rasa sebagai satu bangsa menguat.	○	○
Manfaat utama kebijakan itu bagi persatuan adalah menekan biaya perekrutan pegawai di setiap kantor cabang.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Di banyak desa, kegiatan Karang Taruna makin sepi. Sebagian pemuda lebih senang menghabiskan waktu dengan gawai dan merasa urusan bersama di lingkungannya bukan tanggung jawab mereka. Akibatnya, kerja bakti, ronda, dan kegiatan sosial desa kekurangan tenaga muda.

Upaya yang paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. menyusun kegiatan yang sesuai minat dan kebutuhan pemuda sehingga mereka merasakan manfaat kebersamaan
B. mewajibkan setiap pemuda menghadiri semua kegiatan desa dengan ancaman denda bagi pemuda yang tidak datang
C. mengadakan lomba poster tentang semangat kebersamaan setiap kali peringatan Hari Sumpah Pemuda tiba
D. melarang pemuda memakai gawai selama berada di balai desa agar mereka terpaksa saling mengobrol
E. menyerahkan seluruh kegiatan sosial desa kepada perangkat desa yang memang digaji oleh negara

21. Di banyak tempat kerja, keputusan penting diambil lewat musyawarah karyawan. Musyawarah yang sesuai sila keempat tidak cukup ditandai kesepakatan bersama; isi keputusannya juga harus dijiwai sila-sila lain. Berikut beberapa keputusan musyawarah karyawan sebuah perusahaan makanan.

Keputusan yang justru bertentangan dengan keterkaitan sila keempat dan sila-sila lainnya adalah ....

A. mengambil suara terbanyak setelah dua kali musyawarah tentang jadwal cuti bersama tidak mencapai mufakat
B. menunda keputusan pemindahan bagian produksi sampai karyawan yang akan dipindahkan ikut didengar
C. mendahulukan cuti bagi karyawan yang istrinya melahirkan ketika jadwal cuti bersama sedang padat
D. memilih ketua panitia acara tahunan secara rahasia agar setiap orang bebas menentukan pilihannya
E. sepakat bulat menutupi kesalahan takaran pada kemasan produk agar target penjualan tetap tercapai

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Keberagaman pekerja di kantor dan pabrik dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat terancam oleh sikap dan kebiasaan tertentu. Ancaman itu sering muncul dalam bentuk yang dianggap sepele, padahal lama-kelamaan dapat merusak kerja sama dan rasa saling percaya di antara pekerja.
Perilaku manakah yang merupakan ancaman terhadap keberagaman di tempat kerja? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Rapat kantor dilaksanakan dengan bahasa Indonesia agar semua pegawai dapat memahaminya.
☐ B. Promosi jabatan selalu diberikan kepada pegawai yang seagama dengan pemilik perusahaan.
☐ C. Pegawai dari berbagai daerah bergiliran memperkenalkan makanan khas dalam acara kantor.
☐ D. Pegawai baru dari daerah tertentu langsung dicap malas sebelum hasil kerjanya terlihat.
☐ E. Seorang pegawai dijuluki dengan sebutan yang merendahkan asal daerahnya oleh rekan-rekannya.

23. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia, atas nama Organisasi Konferensi Islam (kini Organisasi Kerja Sama Islam), menengahi perundingan antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang lama berkonflik di Filipina selatan. Rancangan akhir disepakati di Jakarta, lalu perjanjian damainya ditandatangani di Manila pada 2 September 1996.
Makna peran Indonesia tersebut bagi politik luar negeri bebas aktif adalah ....
Sumber: University of Notre Dame, Peace Accords Matrix; Philippine News Agency.

A. Indonesia memilih tidak mencampuri konflik negara lain karena bebas berarti bersikap netral
B. Indonesia aktif mengupayakan perdamaian dengan menjadi penengah yang diterima kedua pihak
C. Indonesia memihak salah satu pihak yang bertikai karena kesamaan agama mayoritas penduduknya
D. Indonesia berhak mengatur pemerintahan Filipina selatan setelah perjanjian damai ditandatangani
E. Indonesia mengirim pasukan tempur untuk memaksa kedua pihak segera menghentikan peperangan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Setiap tahun, ribuan lulusan SMK belum langsung mendapat pekerjaan. Di media sosial, seorang warganet menulis, "Pasal 27 ayat (2) UUD menjamin hak atas pekerjaan. Jadi, setiap lulusan yang masih menganggur adalah bukti negara melanggar UUD." Unggahan itu memancing perdebatan di kalangan pelajar.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut berdasarkan makna hak warga negara dalam UUD NRI 1945!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Pasal 27 ayat (2) berarti negara wajib langsung mengangkat setiap lulusan yang belum bekerja menjadi pegawai pemerintah.	○	○
Negara tetap bertanggung jawab memperluas kesempatan kerja, misalnya melalui pelatihan, informasi lowongan, dan iklim usaha yang sehat.	○	○
Lulusan juga perlu aktif meningkatkan keterampilannya, karena hak atas pekerjaan tidak berarti setiap orang dijamin langsung mendapat pekerjaan tertentu.	○	○

25. Kecelakaan kerja masih sering terjadi di proyek bangunan, misalnya pekerja jatuh dari perancah karena tidak memakai sabuk pengaman. Undang-undang mengatur kewajiban keselamatan kerja, dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi. Penegakan aturan itu dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pelanggaran terjadi.
Upaya manakah yang termasuk penegakan hukum preventif? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pengawas ketenagakerjaan memeriksa kelengkapan alat pelindung di proyek secara berkala.
☐ B. Pengadilan menjatuhkan pidana kepada kontraktor yang lalai sehingga pekerjanya meninggal.
☐ C. Dinas setempat menyosialisasikan aturan keselamatan kerja kepada mandor dan para pekerja.
☐ D. Izin proyek baru diberikan setelah kontraktor menunjukkan rencana keselamatan kerjanya.
☐ E. Polisi menyidik kecelakaan di proyek untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lembar jawaban

No	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
10					
11	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○
14					
15	○	○	○	○	○
16					
17					
18	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
19					
20	○	○	○	○	○
21	○	○	○	○	○
22					
23	○	○	○	○	○
24					
25					

Soal PG kompleks / Benar–Salah (nomor 10, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25): jawab langsung pada soalnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	10, 13, 18	___ / 3	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	9, 21	___ / 2	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	1	___ / 1	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	20	___ / 1	Ulangi hlm. 68
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	4, 14	___ / 2	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	6	___ / 1	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	15, 24	___ / 2	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	7, 25	___ / 2	Ulangi hlm. 169
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	8, 19	___ / 2	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	3, 16	___ / 2	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	5, 11, 22	___ / 3	Ulangi hlm. 232
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	2, 17	___ / 2	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia	12	___ / 1	Ulangi hlm. 287
Sub bab 4.5 · Peran Indonesia dalam perdamaian dunia	23	___ / 1	Ulangi hlm. 307

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 4 — Prediksi TKA 2026

PPKN-FIN4

Petunjuk

Jumlah soal: 25. Waktu: 50 menit.

Kerjakan sekaligus tanpa membuka materi. Tandai jawaban pada lembar jawaban. Kunci dan pembahasan ada di Bagian D; hitung skor dan lihat tabel anjuran di akhir paket.

Kerjakan Simulasi 4 di LMS

Hasil dan analisis per sub bab tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-FIN4

1. Desa Sukagiri Atas di lereng gunung dihuni warga Muslim, Kristen, dan Hindu. Pada awal 2027, longsor merusak pura desa. Pemuda masjid dan pemuda gereja ikut mengangkut batu dan kayu, sedangkan ibu-ibu dari berbagai agama bergiliran memasak untuk para pekerja. Upacara penyucian pura tetap hanya dijalankan oleh umat Hindu.
Sikap warga tersebut mencerminkan makna kebersamaan dalam keberagaman karena ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga menyatukan cara beribadah agar tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan mereka
B. bantuan diberikan agar umat Hindu kelak membalasnya saat rumah ibadah lain dibangun
C. pembangunan bersama membuat biaya perbaikan pura menjadi jauh lebih murah bagi desa
D. warga saling menolong secara nyata sambil tetap menghormati batas keyakinan tiap umat
E. kerja sama itu diperintahkan kepala desa sehingga setiap warga wajib ikut tanpa terkecuali

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Pada 22 Februari 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai Merdeka Belajar Episode 17. Program ini lahir karena banyak bahasa daerah terancam punah ketika penuturnya tidak lagi mewariskannya kepada generasi muda. Siswa diajak memakai bahasa daerahnya secara kreatif.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna program tersebut bagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika!
Sumber: ANTARA, 22 Februari 2022; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Pelestarian bahasa daerah melemahkan persatuan karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan.	○	○
Siswa dapat mahir berbahasa daerah sekaligus tetap memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.	○	○
Agar adil, seluruh siswa di Indonesia sebaiknya mempelajari satu bahasa daerah yang sama.	○	○

3. Pada 2026, pemerintah kabupaten memberi Desa Lubuk Damar satu mesin penggiling padi untuk dipakai bersama. Petani asli desa dan petani pendatang membentuk kelompok sendiri-sendiri, saling menuduh memakai mesin lebih lama, dan menolak menanggung biaya perawatan bersama. Dalam setahun mesin itu rusak dan terbengkalai, padahal desa tetangga yang warganya juga beragam berhasil memakai mesin serupa.
Penyebab utama kegagalan tersebut berdasarkan konsep modal sosial adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. keragaman asal petani di desa itu sendiri membuat kerja sama tidak mungkin terwujud
B. jumlah mesin terlalu sedikit sehingga setiap kelompok petani perlu memiliki mesinnya sendiri
C. pemerintah desa tidak menghukum petani yang terlambat mengembalikan mesin penggiling itu
D. belum tumbuh rasa saling percaya dan aturan bersama yang mengikat kedua kelompok petani
E. petani pendatang belum menyesuaikan diri sepenuhnya dengan seluruh adat petani asli desa

4. Pada 2026, sebuah kementerian menugaskan Pemerintah Kabupaten Lembah Kabut menyalurkan benih kentang unggul dan pelatihan bagi petani di desa-desa pegunungan. Dananya berasal dari APBN; kabupaten mendata petani, membagikan benih, dan melaporkan hasilnya kepada kementerian. Sejumlah anggota DPRD kabupaten meminta bupati mengubah sendiri jumlah benih tiap desa tanpa persetujuan kementerian.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Penilaian yang tepat terhadap permintaan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. kurang tepat, karena dalam tugas pembantuan kabupaten bertanggung jawab kepada kementerian
B. tepat, karena desentralisasi memberi kabupaten wewenang penuh atas setiap program di wilayahnya
C. tepat, karena DPRD kabupaten berkedudukan di atas kementerian dalam urusan di daerahnya sendiri
D. kurang tepat, karena urusan pertanian termasuk urusan absolut yang seluruhnya dipegang pusat
E. kurang tepat, karena kabupaten hanya boleh menerima dana pusat tanpa ikut melaksanakan programnya

5. Pasal 23E UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Pada 2026, BPK menemukan kelebihan pembayaran pada proyek dermaga ikan di sebuah kabupaten kepulauan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang tindak lanjut temuan tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
BPK berwenang langsung menjatuhkan hukuman penjara kepada pejabat kabupaten yang bertanggung jawab atas proyek itu.	○	○
DPRD kabupaten dapat memakai hasil pemeriksaan itu sebagai bahan untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah.	○	○
Bila ditemukan unsur pidana, temuan itu dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Pada 2026, sebuah gim daring yang populer menampilkan peta yang menggambarkan beberapa pulau terluar Indonesia sebagai wilayah negara lain. Sebagian warganet lalu mengajak meretas server pengembang gim dan menyebarkan data pribadi para pegawainya, sementara sebagian lain menganggap hal itu sepele karena hanya permainan. Upaya terbaik warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI dalam peristiwa tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. ikut meretas server pengembang agar peta yang salah itu segera hilang dari permainan
B. menyampaikan keberatan lewat saluran resmi dan mendukung pemerintah meminta koreksi peta
C. melarang pelajar memainkan semua gim buatan luar negeri agar tidak terpengaruh peta asing
D. membiarkan peta itu karena gim hanyalah hiburan yang tidak berhubungan dengan kedaulatan
E. membuat gim tandingan yang menggambarkan pulau negara lain sebagai bagian wilayah Indonesia

7. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pada 2026, pengurus koperasi nelayan Desa Ujung Karang mengunci perahu milik Pak Amin di dermaga karena ia menunggak iuran enam bulan. Penguncian dilakukan tanpa pemberitahuan sehingga Pak Amin tidak dapat melaut.
Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan ketentuan tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Pengurus koperasi berhak menahan perahu itu karena menunggak iuran berarti melanggar aturan koperasi.
☐ B. Penguncian perahu tanpa pemberitahuan dan kesepakatan merupakan pengambilalihan yang sewenang-wenang.
☐ C. Hak milik pribadi bersifat mutlak sehingga tidak dapat dibatasi oleh aturan apa pun dalam keadaan apa pun.
☐ D. Tunggakan iuran seharusnya diselesaikan melalui musyawarah anggota atau jalur hukum yang sah.
☐ E. Pak Amin tetap berkewajiban melunasi tunggakan iurannya sesuai aturan koperasi yang disepakati.

8. Dusun Watuagung di pegunungan mendapat listrik dari pembangkit tenaga air kecil yang dikelola warga. Pada 2026, Pak Rusdi menjalankan mesin penggergajian kayu setiap malam sehingga lampu di rumah-rumah lain meredup dan anak-anak sulit belajar. Pak Rusdi beralasan ia membayar iuran perawatan pembangkit paling besar, sedangkan sebagian warga mendesak mesinnya dilarang.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Penyelesaian yang paling mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. Pak Rusdi tetap memakai listrik setiap malam karena iuran perawatan yang dibayarnya paling besar
B. warga yang terganggu memutus sendiri sambungan listrik ke tempat penggergajian milik Pak Rusdi
C. warga bermusyawarah mengatur jam kerja mesin agar kebutuhan listrik rumah tangga tercukupi
D. pengelola pembangkit melarang semua mesin usaha memakai listrik dusun sepanjang tahun
E. warga diminta memaklumi lampu redup karena usaha Pak Rusdi ikut menambah pendapatan dusun

9. Di beberapa kota tujuan kuliah, sejumlah pemilik rumah kos menolak penyewa yang berasal dari daerah tertentu karena prasangka bahwa mereka suka membuat keributan. Penolakan itu ramai dibicarakan di media sosial. Sebagian mahasiswa dari daerah itu lalu memilih tinggal berkelompok sendiri dan enggan bergaul dengan warga sekitar. Pernyataan manakah yang tepat tentang peristiwa tersebut sebagai ancaman terhadap integrasi nasional? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Mahasiswa yang tinggal berkelompok sendiri menunjukkan bahwa integrasi sedang berjalan baik.
☐ B. Penolakan itu bersumber dari prasangka terhadap kelompok, bukan perilaku tiap penyewa.
☐ C. Masalah itu selesai bila mahasiswa yang pernah membuat keributan dipulangkan ke daerahnya.
☐ D. Akibat langsung yang tampak adalah menguatnya sekat antara mahasiswa pendatang dan warga.
☐ E. Peristiwa itu tidak berkaitan dengan integrasi karena hanya menyangkut urusan sewa kamar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Pada 21 Desember 2016, Presiden meresmikan bangunan baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Pos lama yang sederhana diganti kawasan pelayanan lintas batas yang lebih layak, dan di sekitarnya direncanakan pasar untuk menggerakkan ekonomi warga.
Kaitan pembangunan tersebut dengan upaya menjaga integrasi nasional adalah ....
Sumber: Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id), 21 Desember 2016; detikFinance, 21 Desember 2016.

A. mengurangi kesenjangan wilayah perbatasan sehingga warganya makin merasakan kehadiran negara
B. menutup perbatasan sepenuhnya agar warga negara tetangga tidak dapat lagi berkunjung ke Indonesia
C. memperlihatkan kekuatan militer Indonesia kepada negara tetangga yang berbatasan langsung
D. memindahkan penduduk perbatasan ke kota besar agar lebih mudah memperoleh layanan negara
E. menyeragamkan budaya warga perbatasan dengan budaya daerah lain agar identitasnya sama

11. Di sejumlah kabupaten kepulauan, perkara pidana berjalan sangat lama. Penyidik harus menunggu jadwal kapal untuk mengirim barang bukti ke laboratorium forensik di kota lain, sidang sering ditunda karena saksi tidak dapat menyeberang saat gelombang tinggi, dan warga yang ingin melapor harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kantor polisi terdekat.
Tantangan penegakan hukum yang paling tepat ditunjukkan ilustrasi tersebut adalah ....

A. rendahnya kesadaran hukum warga kepulauan sehingga mereka enggan melaporkan kejahatan
B. belum adanya aturan pidana yang berlaku bagi perkara yang terjadi di wilayah kepulauan
C. terbatasnya sarana dan jangkauan layanan hukum sehingga proses peradilan lambat
D. adanya suap kepada aparat agar perkara di wilayah kepulauan sengaja diperlambat
E. hakim di wilayah kepulauan tidak bebas karena putusannya ditentukan pemerintah daerah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Pada malam berhujan tahun 2026, Pak Udin, pengemudi perahu penyeberangan di sebuah sungai besar di Kalimantan, didatangi warga kampung seberang yang anaknya kejang dan perlu segera dibawa ke puskesmas. Jam penyeberangan sudah tutup, tetapi Pak Udin langsung mengantar mereka tanpa meminta ongkos tambahan, walaupun keluarga itu berbeda suku dan agama dengannya.
Nilai Pancasila yang paling tepat tercermin dari tindakan Pak Udin adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sila pertama, karena Pak Udin dan keluarga itu sama-sama taat menjalankan ibadah agamanya
B. sila kelima, karena setiap penumpang perahu harus membayar ongkos yang sama besarnya
C. sila keempat, karena keputusan mengantar diambil melalui musyawarah warga kampung
D. sila ketiga, karena perahu penyeberangan menyatukan dua kampung yang berbeda suku
E. sila kedua, karena Pak Udin menolong orang yang nyawanya terancam tanpa membedakan

13. Dulu pasien rawat inap, warga yang sedang ditahan, dan pekerja yang bertugas jauh dari rumah sering tidak dapat memberikan suara karena harus mencoblos di TPS tempat tinggalnya. Kini petugas pemilu dapat mendatangi pasien dan membuka TPS di lokasi khusus, seperti lembaga pemasyarakatan dan kawasan kerja terpencil. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetap dipegang.
Penilaian yang tepat terhadap perubahan tersebut berdasarkan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ....

A. tepat, karena keterbukaan ideologi berarti asas pemilu boleh diganti demi kemudahan petugas
B. kurang tepat, karena cara memilih yang sesuai Pancasila hanya mencoblos di TPS tempat tinggal
C. kurang tepat, karena setiap perubahan cara pemungutan suara harus didahului perubahan UUD
D. tepat, karena pasien dan pekerja itu lebih penting daripada pemilih lain sehingga didahulukan
E. tepat, karena cara pelaksanaannya berkembang, sedangkan nilai kedaulatan rakyat tetap

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

14. Di sejumlah desa pesisir Maluku dan Papua, warga menjalankan tradisi sasi: selama beberapa bulan, hasil laut tertentu seperti teripang tidak boleh diambil agar sempat berkembang biak. Waktu buka dan tutup sasi diputuskan dalam pertemuan warga dan tokoh adat. Saat sasi dibuka, semua keluarga boleh ikut memanen, termasuk keluarga pendatang yang berbeda agama.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang nilai Pancasila dalam tradisi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kesempatan memanen bagi semua keluarga, termasuk pendatang yang berbeda agama, mencerminkan perlakuan adil tanpa membeda-bedakan.	○	○
Penentuan waktu buka dan tutup sasi dalam pertemuan warga terutama mencerminkan sila ketiga karena warga dilebur menjadi satu.	○	○
Larangan memanen sementara agar hasil laut tetap tersedia bagi semua warga dan generasi berikutnya mencerminkan keadilan sosial.	○	○

15. Jasa joki tugas dan ujian daring kini mudah ditemukan di media sosial. Pelajar cukup membayar, lalu makalah atau kuis daringnya dikerjakan orang lain. Sebagian pelajar menganggapnya wajar karena "banyak yang melakukannya" dan yang penting nilainya bagus. Guru di sebuah kota mendapati banyak tugas dengan gaya tulisan yang sama persis. Solusi yang paling menyasar akar masalah tersebut adalah ....

A. memblokir seluruh media sosial di sekolah agar pelajar tidak dapat menemukan jasa joki
B. mengadakan lomba poster kejujuran setiap tahun di seluruh sekolah di kota tersebut
C. menanamkan kejujuran dan menilai proses belajar agar karya sendiri lebih dihargai
D. memberi nilai nol dan mengeluarkan setiap pelajar yang ketahuan memakai jasa joki
E. menyerahkan seluruh penanganan jasa joki kepada polisi siber sebagai kejahatan daring

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Jalur tidak resmi di perbatasan darat dan perairan kerap dipakai untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Sejumlah warga desa perbatasan pernah ditawari upah besar untuk menjadi kurir. Peredaran narkotika merusak generasi muda dan melemahkan ketahanan bangsa, sehingga termasuk ancaman nonmiliter terhadap keutuhan NKRI. Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang peran warga desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Menolak tawaran menjadi kurir dan mengingatkan keluarga tentang bahayanya merupakan wujud bela negara.	○	○
Melaporkan kegiatan mencurigakan di jalur tidak resmi kepada aparat atau pemerintah desa merupakan peran warga yang tepat.	○	○
Warga sebaiknya menangkap dan menghukum sendiri orang yang diduga kurir agar desa cepat aman.	○	○

17. Dewi, seorang perawat, bertugas di puskesmas sebuah desa di perbatasan Indonesia–Timor Leste sejak 2025. Pada 2026, ia mendapat tawaran kerja di rumah sakit kota dengan gaji jauh lebih besar. Dewi menolaknya karena puskesmas itu satu-satunya layanan kesehatan bagi ribuan warga sekitar, dan ia memilih melatih kader posyandu agar warga lebih mandiri.
Sikap Dewi mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI karena ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. ia menggantikan tugas TNI menjaga wilayah perbatasan yang belum terjangkau aparat
B. ia mengabdi sesuai profesinya sehingga warga perbatasan merasakan kehadiran negara
C. bela negara hanya dapat dilakukan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
D. tinggal di daerah perbatasan dengan sendirinya berarti menjaga batas wilayah negara
E. ia menunjukkan bahwa kepentingan pribadi tidak boleh dipikirkan sama sekali oleh warga

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Pada 2026, Pak Lukas, petani di kampung pedalaman yang jauh dari kota kabupaten, digugat sebuah perusahaan atas kebun yang digarap keluarganya turun-temurun. Ia tidak mampu membayar pengacara, kurang memahami bahasa hukum dalam surat panggilan sidang, dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa.
Upaya yang paling tepat agar asas persamaan di hadapan hukum terwujud bagi Pak Lukas adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menyediakan bantuan hukum cuma-cuma agar Pak Lukas dapat membela haknya di sidang
B. hakim wajib memenangkan Pak Lukas karena ia pihak yang lebih lemah dalam perkara itu
C. warga kampung menduduki kantor perusahaan sampai gugatan terhadap Pak Lukas dicabut
D. Pak Lukas menyerahkan kebunnya agar terhindar dari biaya dan lamanya proses perkara
E. perkara dialihkan ke rapat kampung yang dipimpin kepala kampung sebagai pemutus perkara

19. Ketika erupsi gunung api memaksa warga beberapa desa di lerengnya mengungsi berbulan-bulan, para pengungsi yang berbeda suku dan agama sering ditempatkan di satu gedung. Awalnya tiap desa membuat dapur dan antrean bantuan sendiri. Gesekan pun muncul karena sebagian pengungsi merasa desa lain menerima bantuan lebih banyak.
Upaya yang paling tepat agar keragaman pengungsi itu menjadi modal sosial, bukan beban, adalah ....

A. menempatkan pengungsi tiap desa di gedung terpisah agar gesekan serupa tidak terulang
B. membentuk pengurus posko dari wakil semua desa untuk mengatur bantuan secara terbuka
C. mewajibkan semua pengungsi mengikuti tata cara desa yang jumlah warganya paling banyak
D. menyerahkan seluruh urusan posko kepada petugas pemerintah tanpa melibatkan pengungsi
E. meminta aparat berjaga di setiap dapur umum agar tidak ada pengungsi yang berani mengeluh

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Di banyak pasar tradisional, pedagang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Mereka saling menitipkan lapak ketika ada yang beribadah atau pulang kampung, meminjamkan modal tanpa bunga kepada pedagang yang sedang kesulitan, dan bergiliran menjaga kebersihan los. Ketika sebagian pasar terbakar, para pedagang cepat bangkit karena saling membantu membangun kembali lapaknya.
Pernyataan manakah yang menunjukkan keragaman pedagang tersebut menjadi modal sosial pembangunan? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Kepercayaan antarpedagang yang berbeda membuat mereka mau saling menitipkan lapak dan modal.
☐ B. Pasar menjadi kuat karena perbedaan suku dan agama di antara para pedagang sudah dihapuskan.
☐ C. Jaringan saling bantu lintas kelompok mempercepat pemulihan pasar setelah terjadi kebakaran.
☐ D. Norma saling menolong yang dijaga bersama membuat kerja sama para pedagang bertahan lama.
☐ E. Manfaat utama kebiasaan itu adalah menarik banyak wisatawan untuk berbelanja di pasar tradisional.

21. Pada 2027, Pak Darsa, nelayan berusia 78 tahun, dijatuhi pidana penjara tiga tahun karena mengambil kayu dari hutan lindung untuk memperbaiki perahunya. Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Keluarganya, didukung banyak warganet, berharap Pak Darsa mendapat pengampunan karena usia lanjut dan penyakit yang dideritanya.
Jalan yang sesuai dengan kewenangan lembaga negara adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan itu karena menyangkut hak hidup warga lanjut usia
B. DPR memberikan amnesti kepada Pak Darsa melalui keputusan rapat paripurna anggotanya
C. Komisi Yudisial mengubah hukuman karena hakim kurang mempertimbangkan usia terdakwa
D. Mahkamah Agung langsung membebaskan Pak Darsa tanpa permohonan dari pihak mana pun
E. Pak Darsa memohon grasi kepada Presiden, yang memutusnya dengan pertimbangan MA

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Di sejumlah kampung, rapat warga untuk memutuskan rencana pembangunan menara telekomunikasi hanya mengundang para kepala keluarga laki-laki. Perempuan, warga penyewa rumah, dan pemilik warung di dekat lokasi menara tidak diundang, padahal mereka ikut merasakan dampaknya. Keputusan rapat kemudian diambil secara mufakat oleh warga yang hadir.
Penilaian yang paling tepat terhadap rapat tersebut berdasarkan ciri demokrasi Pancasila adalah ....

A. belum sesuai, karena warga terdampak tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berpendapat
B. sudah sesuai, karena keputusan diambil secara mufakat oleh seluruh warga yang hadir di rapat
C. sudah sesuai, karena kepala keluarga laki-laki dengan sendirinya mewakili seluruh warga kampung
D. belum sesuai, karena keputusan semacam itu seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
E. belum sesuai, karena setiap keputusan kampung harus melalui pemungutan suara seluruh kecamatan

23. Menjelang pemilihan kepala desa 2027 di Desa Pasir Putih, Yoga, pemilih terdaftar berusia 17 tahun, ditawari amplop berisi uang oleh tim seorang calon. Ia menolak, kemudian bersama karang taruna menggelar forum tanya jawab dengan semua calon tentang rencana pengelolaan pantai, lalu membagikan ringkasan jawabannya ke grup warga.
Pernyataan manakah yang tepat menilai peran Yoga sebagai pelopor pemilih pemula? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Karena baru berusia 17 tahun, Yoga sebaiknya tidak ikut kegiatan apa pun dalam pemilihan.
☐ B. Menolak amplop menjaga agar pilihan warga ditentukan oleh penilaian, bukan oleh imbalan.
☐ C. Forum tanya jawab membantu warga menilai calon dari programnya, bukan dari kedekatannya.
☐ D. Sebagai pelopor, Yoga sebaiknya mengumumkan calon yang menurutnya paling layak dipilih warga.
☐ E. Ringkasan jawaban semua calon tanpa memihak membantu warga memilih dengan cerdas.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Pertandingan bola voli antardesa kadang berakhir ricuh ketika pendukung dua desa yang berbeda suku saling mengejek. Tidak jarang, keesokan harinya beredar pesan berantai yang mengajak pemuda masing-masing desa berkumpul untuk "membalas", disertai foto lama dari kejadian lain yang disebut sebagai korban kericuhan itu.
Langkah pertama yang paling tepat untuk mencegah konflik meluas adalah ....

A. membatalkan semua pertandingan antardesa di daerah itu untuk selamanya
B. mempertemukan tokoh kedua desa dan meluruskan pesan berantai yang menyesatkan
C. menangkap seluruh pemuda yang terlibat saling ejek tanpa melibatkan tokoh warga
D. membiarkan perselisihan itu karena pertengkaran antarpemuda akan reda sendiri
E. meminta pemuda tiap desa berjaga di batas desa agar siap bila diserang pihak lain

25. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada awal 2027, banjir menghanyutkan jembatan gantung satu-satunya di Kampung Sirnagalih, desa di pegunungan. Anak-anak kini menyeberangi sungai dengan rakit buatan warga untuk pergi ke sekolah.
Langkah yang paling sesuai dengan pasal tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. warga kampung menanggung sendiri seluruh biaya pembangunan jembatan karena mereka yang memakainya
B. anak-anak berhenti sekolah sementara sampai warga mampu membangun jembatan yang baru
C. menunggu bantuan dari lembaga luar negeri karena jembatan desa bukan urusan pemerintah
D. pemerintah segera menyediakan akses yang aman ke sekolah sambil melibatkan warga kampung
E. warga terus memakai rakit karena hak atas pendidikan sudah terpenuhi selama sekolah tetap buka

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lembar jawaban

No	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2					
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5					
6	○	○	○	○	○
7					
8	○	○	○	○	○
9					

No	A	B	C	D	E
10	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○
14					
15	○	○	○	○	○
16					
17	○	○	○	○	○
18	○	○	○	○	○

No	A	B	C	D	E
19	○	○	○	○	○
20					
21	○	○	○	○	○
22	○	○	○	○	○
23					
24	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○

Soal PG kompleks / Benar–Salah (nomor 2, 5, 7, 9, 14, 16, 20, 23): jawab langsung pada soalnya.

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	8, 13	___ / 2	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	12, 14	___ / 2	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	22	___ / 1	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	15	___ / 1	Ulangi hlm. 68
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	5, 21	___ / 2	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	4	___ / 1	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	7, 25	___ / 2	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	11, 18	___ / 2	Ulangi hlm. 169
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	1, 2	___ / 2	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	3, 19, 20	___ / 3	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	9, 10, 24	___ / 3	Ulangi hlm. 232
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	6, 16, 17	___ / 3	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula	23	___ / 1	Ulangi hlm. 317

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Simulasi 5 — Prediksi TKA 2026

PPKN-FIN5

Petunjuk

Jumlah soal: 25. Waktu: 50 menit.

Kerjakan sekaligus tanpa membuka materi. Tandai jawaban pada lembar jawaban. Kunci dan pembahasan ada di Bagian D; hitung skor dan lihat tabel anjuran di akhir paket.

Kerjakan Simulasi 5 di LMS

Hasil dan analisis per sub bab tersimpan di LMS.

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn&node=PPKN-FIN5

1. Pada 2026, Puskesmas Sumber Rejo di sebuah daerah transmigrasi melayani warga dari berbagai suku dan agama. Petugas menyediakan penerjemah bahasa daerah bagi pasien lansia, menyusun jadwal layanan kesehatan keliling yang tidak bertabrakan dengan hari ibadah tiap kelompok, dan mengajak tokoh adat serta tokoh agama menyampaikan pentingnya pemeriksaan kehamilan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang makna kebersamaan dalam keberagaman pada ilustrasi tersebut!
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Penyediaan penerjemah bahasa daerah menunjukkan bahwa perbedaan bahasa merupakan hambatan yang harus dihapus.	○	○
Penyesuaian jadwal layanan dengan hari ibadah tiap kelompok mencerminkan toleransi yang aktif.	○	○
Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama membuat program kesehatan diterima sebagai milik bersama.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

2. Banyak aplikasi jasa kini memakai ulasan dan nilai bintang dari pengguna untuk menentukan mitra yang paling sering mendapat pesanan. Belakangan muncul keluhan bahwa sebagian pengguna memberi nilai rendah kepada mitra hanya karena nama, logat, atau agama mitra tersebut, bukan karena mutu layanannya. Akibatnya, sebagian mitra makin jarang mendapat pesanan.
Pernyataan manakah yang tepat tentang ancaman tersebut dan cara menghadapinya? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Ulasan pengguna sepenuhnya urusan pribadi sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan integrasi nasional.
☐ B. Memberi nilai rendah karena nama, logat, atau agama mitra merupakan bentuk perlakuan diskriminatif.
☐ C. Diskriminasi yang dibiarkan dapat menutup peluang kerja kelompok tertentu dan menumbuhkan rasa tersisih.
☐ D. Penyedia aplikasi sebaiknya hanya menerima mitra dari kelompok mayoritas agar nilai layanannya terus membaik.
☐ E. Penyedia aplikasi dapat menghapus ulasan bernada SARA dan menilai mitra dari mutu layanannya saja.

3. Menjelang pemilu berikutnya, Gilang yang baru berusia 17 tahun memiliki banyak pengikut di media sosial, sebagian besar pelajar seusianya. Ia ingin mengajak mereka memakai hak pilih. Beberapa temannya menyarankan agar Gilang sekalian mengunggah ajakan memilih calon tertentu yang menurutnya paling baik, karena unggahannya pasti dipercaya pengikutnya.
Langkah Gilang yang paling sesuai dengan perannya sebagai pelopor pemilih pemula adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mengunggah ajakan memilih calon yang menurut penilaiannya sendiri paling layak dipilih
B. mengajak pengikutnya tidak memilih bila belum ada calon yang benar-benar sempurna menurut mereka
C. menyerahkan urusan sosialisasi pemilu sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu dan sekolah
D. mengajak pengikutnya mengecek daftar pemilih serta menimbang rekam jejak dan program calon
E. mengunggah ulang semua informasi tentang calon secepatnya agar para pengikutnya tidak tertinggal

4. Di sejumlah pesisir, nelayan, petambak, dan pemuda dari berbagai suku bersama-sama menanam dan menjaga hutan mangrove. Mereka menyepakati larangan menebang, bergiliran menyulam bibit yang mati, dan menegur siapa pun yang melanggar tanpa memandang asal-usulnya. Setelah beberapa tahun, abrasi berkurang dan hasil tangkapan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

kepiting meningkat.
Kebinekaan warga menjadi modal sosial pembangunan dalam kegiatan tersebut karena ....

A. warga yang berbeda latar saling percaya dan menaati aturan bersama sehingga kerja sama bertahan
B. semua warga pesisir itu berasal dari suku yang sama sehingga mudah diatur oleh satu orang ketua
C. hutan mangrove menghasilkan kepiting yang dapat dijual sehingga pendapatan warga terus bertambah
D. kelompok yang paling banyak anggotanya menentukan seluruh aturan penjagaan hutan mangrove itu
E. pemerintah menanggung semua pekerjaan penanaman sehingga warga tidak perlu lagi bekerja sama secara erat

5. Penambangan emas tanpa izin di hulu sebuah sungai memakai merkuri yang mencemari air dan ikan yang dikonsumsi warga di hilir. Razia beberapa kali dilakukan, tetapi yang ditangkap umumnya buruh tambang upahan, sementara pemilik modal dan penyedia alat berat tidak pernah diperiksa. Beberapa bulan kemudian, penambangan kembali beroperasi. Berdasarkan ilustrasi, tantangan utama penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus tersebut adalah ....

A. buruh tambang upahan tidak memahami bahaya merkuri sehingga mereka tidak dapat dihukum
B. penindakan berhenti pada pelaku kecil dan belum menjangkau pihak yang mengendalikan usaha
C. peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup belum pernah dibuat oleh DPR dan Presiden
D. warga di hilir tidak melaporkan pencemaran itu sehingga aparat tidak mengetahui kejadiannya
E. pencemaran sungai merupakan bencana alam sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

6. Pada 2026, Pak Darman, warga Kampung Cibeureum, didiagnosis kusta dan mulai berobat di puskesmas. Beberapa tetangga menjauhi keluarganya dan melarang anak-anak bermain di dekat rumahnya. Kader kesehatan kampung justru rutin mengunjungi Pak Darman, memastikan ia minum obat sampai tuntas, dan menjelaskan kepada warga bahwa pasien yang berobat teratur tidak perlu dikucilkan.
Nilai Pancasila yang paling tepat tercermin dari sikap kader kesehatan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sila pertama, karena mendampingi orang sakit merupakan kewajiban setiap pemeluk agama
B. sila ketiga, karena kader mempersatukan warga kampung yang terbelah menjadi dua kelompok
C. sila keempat, karena kader menjelaskan persoalan kepada warga sebelum keputusan diambil
D. sila kedua, karena kader memperlakukan pasien sesuai martabatnya dan menolak pengucilan
E. sila kelima, karena setiap warga berhak memperoleh obat secara gratis dari puskesmas terdekat

7. Persoalan lingkungan hidup sering berujung pada persoalan hukum dan ketatanegaraan. Warga, organisasi lingkungan, dan pelaku usaha dapat menempuh jalur yang berbeda-beda, bergantung pada jenis persoalan yang mereka hadapi, karena setiap lembaga negara hanya berwenang menangani perkara tertentu. Salah memilih jalur dapat membuat perkara tidak diperiksa sehingga hak warga tetap terabaikan.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang lembaga yang berwenang menangani setiap persoalan!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Warga yang menilai sebuah undang-undang pertambangan melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam UUD dapat mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.	○	○
Peraturan menteri tentang batas pembuangan limbah yang dinilai bertentangan dengan undang-undang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.	○	○
Dugaan hakim perkara pencemaran sungai menemui pihak yang berperkara di luar sidang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

8. Pada 2026, beberapa siswa SMA Tunas Bangsa ditawari upah bulanan untuk "meminjamkan" rekening bank dan nomor ponsel mereka kepada akun yang mengaku agen kerja daring. Belakangan diketahui rekening semacam itu dipakai menampung uang hasil penipuan jaringan luar negeri. Pengurus OSIS ingin ikut melindungi teman-temannya dari ancaman nonmiliter tersebut.
Upaya terbaik yang dapat dilakukan pengurus OSIS adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. meminta polisi menangkap semua siswa yang pernah meminjamkan rekeningnya kepada orang lain
B. mengadakan lomba poster antipenipuan daring setiap memperingati hari kemerdekaan negara
C. bersama guru dan pihak bank menyosialisasikan bahaya jual-sewa rekening serta cara melapor
D. menyarankan semua siswa menutup rekening bank masing-masing sampai mereka lulus sekolah
E. membiarkan urusan rekening karena hal itu merupakan hak pribadi setiap siswa yang sudah dewasa

9. Pasal 23 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Misalkan pada 2027 DPR menolak rancangan anggaran yang memuat proyek pembangunan bandara baru di banyak provinsi karena dinilai terlalu membebani keuangan negara.
Berdasarkan ketentuan tersebut, akibat yang terjadi adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pemerintah menjalankan anggaran tahun sebelumnya sampai ada anggaran baru yang disetujui
B. Presiden tetap menjalankan rancangannya karena penyusunan anggaran adalah wewenangnya
C. Mahkamah Konstitusi memutuskan rancangan anggaran mana yang berlaku pada tahun tersebut
D. DPD mengambil alih pembahasan anggaran karena DPR tidak mencapai kata sepakat dengan Presiden
E. seluruh kegiatan pemerintahan dihentikan sementara sampai DPR menyetujui rancangan anggaran

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

10. Pada 2026, sekelompok pemandu wisata di kawasan Danau Biru melarang pemandu dari kabupaten lain membawa rombongan wisatawan masuk. Mereka beralasan "danau ini milik orang sini", bahkan sempat terjadi adu mulut yang menyinggung asal suku. Padahal, para pemandu dari luar itu sudah memiliki izin resmi.
Penyelesaian yang paling tepat agar keadaan tersebut tidak mengancam integrasi nasional adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. menyepakati aturan pemanduan yang adil bagi semua pemandu berizin melalui musyawarah bersama
B. melarang semua pemandu dari luar kabupaten masuk demi menjaga ketertiban kawasan danau
C. menempatkan aparat di pintu masuk kawasan untuk mencegah bentrokan tanpa ada langkah lain
D. menyerahkan seluruh pemanduan kepada biro perjalanan besar dari kota agar tidak ada lagi perebutan
E. meminta wisatawan memilih sendiri pemandu yang sesuku agar tidak terjadi perselisihan lagi

11. Komunitas Sahabat Darah di Kota Bumi Rahayu beranggotakan warga dari berbagai agama dan suku. Sejak 2026, mereka memakai grup percakapan untuk mencari pendonor setiap kali ada pasien yang membutuhkan darah dengan cepat. Anggota mendonor tanpa imbalan, dan keluarga pasien dari kelompok mana pun dilayani sama.
Pernyataan manakah yang menunjukkan kebinekaan sebagai modal sosial dalam ilustrasi tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Jaringan anggota yang beragam membuat pasien dari kelompok mana pun lebih cepat memperoleh pendonor.
☐ B. Kegiatan itu membuktikan bahwa perbedaan agama para anggota sebaiknya tidak lagi ditampakkan di depan umum.
☐ C. Mendonor tanpa imbalan karena yakin akan dibantu saat membutuhkan mencerminkan norma timbal balik.
☐ D. Kepercayaan keluarga pasien kepada pendonor berbeda latar menunjukkan modal sosial yang menjembatani.
☐ E. Nilai utama komunitas itu terletak pada banyaknya kantong darah yang dapat dijual kepada rumah sakit setempat.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

12. Makin banyak pembuat video perjalanan yang menjelajahi desa-desa terpencil di berbagai provinsi, dari pegunungan di Papua sampai pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Mereka menampilkan keindahan alam, kehidupan sehari-hari warga, dan bahasa daerah setempat. Banyak penonton dari kota besar mengaku baru mengenal daerah-daerah itu dan tergerak ingin berkunjung.
Kegiatan tersebut ikut menjaga keutuhan NKRI karena ....

A. menambah penghasilan para pembuat video dari iklan dan kerja sama dengan biro perjalanan
B. membuat daerah terpencil tidak lagi memerlukan pembangunan jalan dan sekolah dari pemerintah
C. menumbuhkan rasa saling kenal dan rasa memiliki terhadap seluruh wilayah dan warga Indonesia
D. membuktikan bahwa daerah terpencil lebih indah daripada kota-kota besar di wilayah Indonesia
E. menggantikan tugas pemerintah daerah dalam mempromosikan tempat wisata di wilayahnya sendiri

13. Sejak 2026, sawah di Desa Watu Lumbung ramai dikunjungi wisatawan. Pengelola penginapan dan pedagang warga menikmati tambahan penghasilan, tetapi sejumlah petani mengeluh karena wisatawan berfoto di pematang hingga merusak tanaman padi. Sebagian petani mulai memagari sawahnya, sedangkan pengelola wisata khawatir jumlah pengunjung berkurang.
Berdasarkan ilustrasi, peran Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. mendukung petani memagari seluruh sawah karena hak milik atas lahan harus selalu didahulukan
B. meminta petani merelakan sebagian tanaman rusak karena wisata menambah penghasilan seluruh desa
C. menuntun warga menyepakati jalur kunjungan dan bagi hasil yang menghargai kerja para petani
D. menyerahkan pengaturan kunjungan kepada pemerintah kabupaten agar warga desa tidak berselisih
E. mendahulukan kelancaran usaha wisata, kemudian memikirkan kerugian petani pada musim tanam berikutnya

14. Pada jam berangkat kerja, gerbong kereta komuter selalu penuh sesak. Setiap gerbong menyediakan kursi prioritas bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penumpang yang membawa anak kecil. Namun, masih ada penumpang muda yang pura-pura tidur di kursi prioritas, sementara penumpang lain merelakan kursinya tanpa diminta petugas. Petugas pun berkali-kali mengingatkan penumpang melalui pengeras suara agar mendahulukan yang lebih membutuhkan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dalam ilustrasi tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Merelakan kursi kepada lansia walaupun tidak ada petugas yang melihat mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup.	○	○
Karena membayar tiket yang sama, setiap penumpang berhak mempertahankan kursi prioritas yang sudah didudukinya.	○	○
Antre dengan tertib saat naik kereta tidak berkaitan dengan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	○	○

15. Rencana kenaikan tarif air bersih di sebuah kota memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warga mengumpulkan tanda tangan petisi dan menyiapkan data pengeluaran rumah tangga untuk disampaikan dalam rapat dengar pendapat. Sebagian lain menyebarkan alamat rumah direktur perusahaan air minum daerah dan mengajak warganet mendatangi rumahnya.
Perilaku yang sesuai dengan HAM dalam demokrasi Pancasila berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....

A. menyebarkan alamat pejabat agar warga dapat menekan pengambil keputusan secara langsung
B. menyampaikan keberatan lewat petisi dan rapat dengar pendapat disertai alasan yang jelas
C. menerima kenaikan tarif tanpa berpendapat karena keputusan itu wewenang penuh pemerintah daerah
D. menolak membayar tagihan air bersama-sama sampai tarif dikembalikan seperti semula lagi
E. mendukung warga mana pun yang paling keras bersuara agar keputusan cepat berubah arah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

16. Perdagangan daring berkembang pesat. Siapa pun bebas membuka toko daring, tetapi pedagang kecil kerap kalah bersaing dengan penjual besar yang sengaja menjual rugi untuk menguasai pasar. Karena itu, muncul kebijakan yang tetap membebaskan orang berdagang daring, tetapi melarang praktik menjual di bawah harga pokok dan menyediakan pendampingan bagi usaha mikro.
Kebijakan tersebut mencerminkan ciri ideologi Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu ....

A. kebebasan berusaha diakui, tetapi dibatasi agar tidak merugikan kepentingan orang banyak
B. persaingan dibiarkan sepenuhnya kepada pasar karena pembeli berhak memilih harga yang termurah
C. seluruh perdagangan daring dikelola negara agar tidak ada lagi persaingan antarpedagang
D. pedagang kecil dilindungi dengan melarang pedagang besar membuka toko secara daring
E. nilai dasar keadilan sosial disesuaikan dengan perkembangan teknologi perdagangan masa kini

17. Setiap awal musim pendakian, komunitas pendaki dari berbagai daerah, suku, dan agama bersama warga desa di kaki gunung membersihkan sampah di sepanjang jalur pendakian. Selama beberapa hari mereka berkemah bersama, berbagi bekal, dan bertukar cerita tentang kampung halaman masing-masing. Kegiatan itu sudah berlangsung beberapa tahun dan pesertanya terus bertambah.
Alasan kegiatan tersebut dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa adalah ....

A. meningkatkan jumlah pendaki yang berkunjung karena jalur pendakian menjadi jauh lebih bersih
B. menghapus perbedaan suku dan agama di antara para pendaki yang ikut dalam kegiatan
C. membuktikan bahwa kelompok yang paling banyak anggotanya paling peduli lingkungan
D. menggantikan tanggung jawab pengelola kawasan gunung dalam mengurus sampah pendaki
E. mempertemukan warga berbeda latar dalam kerja bersama sehingga tumbuh rasa saling kenal

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

18. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada 2026, kandang ayam milik seorang warga di Desa Sukamulya menimbulkan bau dan lalat sampai ke rumah-rumah tetangga. Pemiliknya beralasan bahwa beternak adalah haknya untuk mencari nafkah.
Penilaian yang paling tepat berdasarkan ketentuan tersebut adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. pemilik kandang bebas berusaha karena hak mencari nafkah lebih utama daripada hak lainnya
B. tetangga yang tidak tahan bau sebaiknya pindah rumah agar usaha pemilik kandang tidak terganggu
C. warga boleh langsung membongkar kandang itu tanpa menunggu penyelesaian bersama atau keputusan desa
D. keluhan tetangga tidak berdasar karena pasal tersebut hanya mengatur hak atas tempat tinggal
E. hak berusaha tetap diakui, tetapi dijalankan tanpa merusak hak tetangga atas lingkungan sehat

19. Pada 2027, Kota Tanjung Lestari meluncurkan bus kota baru. Rutenya ditetapkan setelah forum warga di setiap kecamatan. Halte dilengkapi jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, pelajar dan lansia tidak dipungut tarif, dan para sopir angkutan kota yang trayeknya digantikan direkrut menjadi pengemudi bus setelah pelatihan.
Pernyataan manakah yang tepat tentang nilai Pancasila dalam kebijakan tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Penetapan rute melalui forum warga di setiap kecamatan kota itu mencerminkan nilai sila keempat.
☐ B. Merekrut sopir angkutan kota lama berarti pembangunan tidak meninggalkan pihak yang terdampak.
☐ C. Tarif gratis bagi pelajar dan lansia tidak adil karena penumpang lain tetap harus membayar.
☐ D. Jalur pemandu di halte mencerminkan sila kedua karena menghargai martabat penyandang tunanetra.
☐ E. Karena sudah diputuskan forum warga, rute tidak boleh ditinjau ulang walaupun muncul banyak keluhan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

20. Beberapa kabupaten dan kota bertetangga di sebuah provinsi kehabisan lahan tempat pembuangan akhir sampah. Sampah dari permukiman di satu daerah sering terbawa sungai ke daerah lain. Mereka lalu membangun tempat pengolahan sampah bersama dengan koordinasi pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat membantu teknologi pengolahan dan sebagian pendanaan.
Kerja sama tersebut perlu dilakukan karena ....

A. urusan persampahan termasuk urusan absolut yang hanya boleh ditangani oleh pemerintah pusat
B. otonomi daerah dicabut apabila suatu daerah tidak mampu menangani persoalannya sendiri
C. persoalannya melintasi batas wilayah dan kemampuan tiap daerah sehingga perlu dipadukan
D. pemerintah provinsi berwenang mengambil alih seluruh urusan kabupaten dan kota di wilayahnya
E. daerah yang lebih kaya wajib menanggung seluruh biaya pengolahan sampah daerah tetangganya

21. Ketergantungan pada bahan pangan dari luar negeri dapat menjadi ancaman nonmiliter. Bila harga dunia melonjak atau pengiriman terganggu, pasokan di dalam negeri ikut goyah. Di sisi lain, makin sedikit anak muda yang mau bertani, padahal Indonesia memiliki beragam pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian.
Perilaku warga negara manakah yang tepat untuk menjaga ketahanan bangsa dari ancaman tersebut? (Jawaban benar lebih dari satu.)

Pilih semua jawaban yang benar.

☐ A. Menolak seluruh bahan pangan impor walaupun pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.
☐ B. Membiasakan mengonsumsi pangan lokal yang beragam sesuai kemampuan dan selera keluarga.
☐ C. Menimbun bahan pangan dalam jumlah besar ketika harga naik agar keluarga sendiri aman.
☐ D. Pelajar mempelajari pertanian modern dan mengembangkan usaha tani di daerahnya.
☐ E. Mengurangi sisa makanan yang terbuang di rumah, di sekolah, dan di tempat makan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

22. Pada 2026, sebuah bus pariwisata milik PO Sinar Harapan mengalami rem blong di jalan menurun dan menabrak beberapa kendaraan. Penyelidikan menemukan bahwa izin kelaikan bus itu sudah lama kedaluwarsa dan perusahaan menunda perbaikan rem untuk menghemat biaya. Namun, proses hukum hanya menjerat sopirnya, sedangkan pengelola perusahaan tidak diperiksa sama sekali.
Penilaian yang paling tepat dari sudut penegakan hukum yang berkeadilan adalah ....
Disusun untuk latihan soal; tokoh dan tempat fiktif.

A. sudah adil karena sopir merupakan orang yang paling dekat dengan penyebab kecelakaan itu
B. belum adil karena sopir seharusnya dibebaskan dari seluruh tanggung jawab hukum atas kecelakaan
C. sudah adil karena perusahaan telah memberi santunan kepada para korban dan keluarganya
D. belum adil karena pihak yang lalai menjaga kelaikan bus juga perlu diperiksa secara hukum
E. belum adil karena penumpang ikut bersalah memilih perusahaan bus dengan tarif paling murah

23. Pada 6 Desember 2023, UNESCO memasukkan budaya sehat jamu ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Manusia. Pengetahuan meracik jamu diwariskan turun-temurun dan melibatkan banyak pihak: petani tanaman obat, peracik, penjual jamu gendong, hingga keluarga yang meminumnya. Pengajuannya pun digerakkan oleh komunitas jamu di berbagai daerah bersama pemerintah.
Upaya yang paling tepat agar budaya jamu menjadi modal sosial pembangunan adalah ....
Sumber: UNESCO, Jamu wellness culture (2023); Tempo (2023).

A. menetapkan satu resep jamu nasional agar semua daerah memakai racikan yang sama persis
B. memperkuat jejaring dan rasa saling percaya antara petani, peracik, dan tenaga kesehatan
C. memasarkan jamu ke luar negeri untuk membuktikan bahwa budaya kita paling unggul
D. menyerahkan pengembangan jamu sepenuhnya kepada perusahaan besar yang bermodal kuat
E. membatasi pembuatan jamu hanya bagi keluarga peracik yang sudah meracik secara turun-temurun

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

24. Sebuah pulau kecil menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan pekerja jarak jauh dari berbagai negara. Penginapan dan kafe tumbuh pesat, harga tanah melonjak, dan banyak warga menjual lahannya lalu bekerja sebagai buruh di usaha milik pendatang. Upacara adat pun mulai dipentaskan sekadar sebagai tontonan berbayar.
Upaya yang paling menyasar akar masalah tersebut sesuai nilai Pancasila adalah ....

A. menutup pulau bagi wisatawan asing agar budaya setempat tidak terpengaruh oleh budaya luar
B. menambah jadwal pentas upacara adat setiap akhir pekan agar budaya setempat tetap dikenal
C. menyerahkan pengembangan kawasan kepada investor asing yang paling berpengalaman mengelola
D. mewajibkan setiap wisatawan asing mengenakan pakaian adat setempat selama berada di pulau itu
E. menguatkan kepemilikan dan peran warga dalam usaha wisata serta menata pemanfaatan lahan

25. Di beberapa perairan, nelayan pendatang dari provinsi lain kerap ditolak nelayan setempat karena dianggap mengambil ikan di "laut kami". Perahu nelayan pendatang pernah dihalangi berlabuh, dan ketegangan itu mulai dikaitkan dengan perbedaan suku. Bila dibiarkan, keadaan ini dapat mengganggu integrasi nasional.
Tentukan **Benar** atau **Salah** setiap pernyataan berikut tentang upaya menjaga integrasi nasional dalam menghadapi masalah tersebut!

Tentukan setiap pernyataan Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Kesepakatan tertulis tentang wilayah tangkap dan alat tangkap yang adil dapat mencegah bentrokan antarnelayan.	○	○
Pertemuan rutin antara nelayan setempat dan nelayan pendatang membantu menumbuhkan rasa saling percaya.	○	○
Laut di suatu provinsi milik nelayan bersuku setempat sehingga nelayan pendatang boleh diusir.	○	○

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lembar jawaban

No	A	B	C	D	E
1					
2					
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○
7					
8	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○
11					
12	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○
14					
15	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○
17	○	○	○	○	○
18	○	○	○	○	○
19					
20	○	○	○	○	○
21					
22	○	○	○	○	○
23	○	○	○	○	○
24	○	○	○	○	○
25					

Soal PG kompleks / Benar–Salah (nomor 1, 2, 7, 11, 14, 19, 21, 25): jawab langsung pada soalnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Tabel skor dan anjuran

Sub bab / subtopik	Nomor soal	Benar	Jika kurang separuh benar
Sub bab 1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	13, 14, 16	___ / 3	Ulangi hlm. 33
Sub bab 1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	6, 19	___ / 2	Ulangi hlm. 45
Sub bab 1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	15	___ / 1	Ulangi hlm. 57
Sub bab 1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	24	___ / 1	Ulangi hlm. 68
Sub bab 2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	7, 9	___ / 2	Ulangi hlm. 118
Sub bab 2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	20	___ / 1	Ulangi hlm. 132
Sub bab 2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	18	___ / 1	Ulangi hlm. 158
Sub bab 2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	5, 22	___ / 2	Ulangi hlm. 169
Sub bab 3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	1, 17	___ / 2	Ulangi hlm. 198
Sub bab 3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	4, 11, 23	___ / 3	Ulangi hlm. 210
Sub bab 3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	2, 10, 25	___ / 3	Ulangi hlm. 232
Sub bab 4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	8, 12, 21	___ / 3	Ulangi hlm. 263
Sub bab 4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula	3	___ / 1	Ulangi hlm. 317

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Bagian D · Kunci dan Pembahasan

Urutan sama dengan buku. Setiap pembahasan memuat konsep, langkah, dan alasan tiap pilihan. Baca pembahasan soal yang kamu jawab salah — dan juga yang kamu jawab benar tetapi menebak.

Latihan sub bab 1.1

No. 1 Kunci: B

Konsep: rumusan Pancasila disusun dan disahkan oleh badan yang beranggotakan wakil **berbagai golongan** (Panitia Sembilan, PPKI), melalui kompromi. Karena itu Pancasila adalah kesepakatan dan **milik seluruh bangsa**; tidak ada satu golongan pun yang memilikinya sendiri.

Langkah 1 – Pisahkan fakta dari kesimpulan. Fakta bahwa wakil satu golongan ikut merumuskan memang benar; kesimpulan "paling berhak" itulah yang diuji.
Langkah 2 – Uji dengan ciri kesepakatan. Bila banyak golongan ikut merumuskan dan saling mengalah, hasilnya menjadi milik bersama.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — faktanya benar, tetapi tidak membuktikan hak istimewa; wakil golongan lain juga ikut merumuskan.
• B ✓ — kesepakatan berbagai golongan menjadikan Pancasila milik semua.
• C ✗ — persetujuan pemerintah tidak mengubah sifat Pancasila sebagai milik bersama.
• D ✗ — monopoli tafsir hanya dipindahkan kepada satu lembaga; pembinaan ideologi melibatkan seluruh warga.
• E ✗ — kesimpulannya "keliru" benar, tetapi alasannya salah fakta: rumusan akhir berbeda dari setiap usulan awal.

Jawaban: B.

Jebakan: D dan E sama-sama menilai klaim itu keliru, tetapi dengan alasan yang salah. Periksa alasan, bukan hanya penilaian.

No. 2 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: Pancasila disebut **kesepakatan bangsa** karena banyak pihak terlibat, ada pihak yang bersedia mengalah, dan rumusannya disetujui bersama. Mengalah demi persatuan bukan kekalahan.

Pernyataan 1 – Benar. Pihak yang lebih banyak mendengar keberatan pihak yang lebih sedikit lalu menyesuaikan diri, seperti golongan besar yang menerima perubahan tujuh kata.
Pernyataan 2 – Salah. Kompromi demi kesepakatan bukan kekalahan; semua pihak justru memperoleh deklarasi yang dapat diterima bersama.
Pernyataan 3 – Benar. Keterlibatan dan persetujuan wakil semua kecamatan adalah ciri kesepakatan.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memakai salah tafsir yang juga sering muncul pada peristiwa 1945, yaitu menyamakan kompromi dengan kekalahan satu golongan.

Latihan sub bab 1.2

No. 1 Kunci: B, C, E

Konsep: undang-undang harus sejalan dengan UUD yang memuat nilai Pancasila. Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD **diuji ke Mahkamah Konstitusi** (Pasal 24C). Pemohon adalah

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

pihak yang **haknya dirugikan** (kedudukan hukum). Pertentangan tidak membatalkan aturan dengan sendirinya.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — proses yang demokratis tidak menjamin isinya sesuai Pancasila; karena itu ada pengujian.
• B ✓ — undang-undang diuji terhadap UUD di MK.
• C ✓ — warga yang terhalang hak pencalonannya dirugikan secara nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai pemohon.
• D ✗ — pasal tetap berlaku sampai MK memutus; permohonan tidak membatalkan apa pun.
• E ✓ — kepemimpinan menurut garis keturunan menutup kesempatan warga lain (Pasal 28D ayat 3) dan bertentangan dengan kerakyatan (sila keempat) serta keadilan (sila kelima).

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A memakai "disetujui DPR dan Presiden" sebagai jaminan; D menganggap pertentangan membatalkan aturan dengan sendirinya.

No. 2 Kunci: A

Konsep: Pancasila adalah **sumber segala sumber hukum negara** (Pasal 2 UU 12/2011). Nilainya dijabarkan **bertingkat**: UUD → undang-undang → peraturan di bawahnya, makin ke bawah makin rinci. Pancasila tidak dimasukkan ke dalam daftar hierarki Pasal 7, karena ia berada di atas seluruh susunan sebagai sumbernya.

Analisis opsi:

• A ✓ — nilai kemanusiaan dan keadilan sosial turun menjadi pasal UUD, undang-undang, lalu aturan teknis daerah.
• B ✗ — Pancasila tidak sejajar dengan UUD dan tidak tercantum dalam daftar Pasal 7; ia sumber bagi seluruh daftar itu.
• C ✗ — peraturan daerah wajib sesuai dengan undang-undang di atasnya; melompati jenjang membuat hukum tidak tertib.
• D ✗ — makin rinci justru makin rendah kedudukannya; UUD tetap di puncak hierarki.
• E ✗ — tingkat peraturan ditentukan jenisnya, bukan oleh siapa yang mengesahkannya.

Jawaban: A.

Jebakan: B tampak memuliakan Pancasila, tetapi justru menurunkannya menjadi salah satu jenis peraturan. E memakai alasan "wakil rakyat" yang terdengar demokratis.

Latihan sub bab 1.3

No. 1 Kunci: C

Konsep: identitas nasional, dengan Pancasila sebagai intinya, dijaga dengan sikap **bangga sekaligus terbuka**: memakai dan merawat milik bangsa sendiri (misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan), sambil tetap menghormati dan belajar dari bangsa lain.

Analisis opsi:

• A ✗ — kemampuan bahasa asing berguna, tetapi meninggalkan bahasa Indonesia dalam semua kegiatan sekolah melunturkan identitas.
• B ✗ — menutup diri dari semua budaya luar bertentangan dengan sikap terbuka dan menyaring.
• C ✓ — kedua seruan sama-sama keliru ke arah berlawanan; sikap yang benar adalah bangga dan tetap terbuka.
• D ✗ — kesimpulannya benar, tetapi alasannya seremonial; identitas tidak cukup dijaga dengan satu kebiasaan berpakaian.
• E ✗ — identitas nasional adalah milik bersama yang mempersatukan, bukan soal selera.

Jawaban: C.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: A dan B masing-masing terdengar modern atau cinta tanah air. D memilih sikap yang benar ("menolak keduanya") dengan alasan yang dangkal.

No. 2 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: ideologi tertutup dirumuskan penguasa atau satu kelompok, dianggap mutlak, dan dipaksakan; kritik tidak diberi tempat. **Ideologi terbuka** seperti Pancasila digali dari masyarakat, nilai dasarnya tetap, dan penjabarannya dapat dikembangkan serta dikritik melalui jalur yang sah. Terbuka atau tertutup dinilai dari **cara ideologi itu dirumuskan dan diberlakukan**, bukan dari kemajuan teknologinya.

Pernyataan 1 – Salah. Teknologi modern bukan ukuran keterbukaan ideologi.
Pernyataan 2 – Benar. Tafsir dimonopoli penguasa dan kritik dipidana adalah ciri ideologi tertutup.
Pernyataan 3 – Benar. Penjabaran Pancasila (nilai instrumental dan praksis) boleh dikritik dan diperbaiki melalui jalur yang sah.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan "terbuka terhadap teknologi" dengan ideologi terbuka.

Latihan sub bab 1.4

No. 1 Kunci: A, C, D

Konsep: sila-sila Pancasila **saling menjiwai**, sehingga satu kegiatan dapat mencerminkan beberapa sila sekaligus. Setiap pernyataan diuji: apakah perilakunya ada di ilustrasi **dan** silanya cocok?

Periksa setiap pernyataan:
- A ✓ — memberi sesuai kemampuan dan mendahulukan yang membutuhkan adalah keadilan sosial.
- B ✗ — keadilan sosial bukan sama rata; justru setoran sesuai kemampuan itulah yang adil.
- C ✓ — keputusan lewat rapat dan pertanggungjawaban terbuka mencerminkan kerakyatan.
- D ✓ — warga beragam bekerja sama dalam satu lembaga tanpa harus menjadi seragam.
- E ✗ — memotong kesatuan sila; kegiatan yang sama juga memuat musyawarah dan persatuan.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B memakai salah tafsir "adil = sama rata". E memakai kata "hanya", padahal satu peristiwa dapat memuat beberapa sila.

No. 2 Kunci: E

Konsep: sila keempat tampak dalam perilaku **menghormati proses musyawarah** dan **menjalankan keputusan bersama dengan tanggung jawab**, termasuk ketika pendapat sendiri tidak diterima.

Analisis opsi:
- A ✗ — ilustrasi tidak menyebut rasa syukur atau ibadah.
- B ✗ — tidak ada bukti tentang cara Bu Lastri memperlakukan pedagang lain.
- C ✗ — kerukunan mungkin menjadi akibat, tetapi bukti utamanya adalah sikap terhadap hasil musyawarah.
- D ✗ — sama rata bukan makna keadilan sosial, dan bukti utama kasus bukan pembagian hak.
- E ✓ — menerima dan menjalankan hasil musyawarah walaupun usulnya kalah.

Jawaban: E.

Jebakan: C paling menggoda karena kekompakan memang baik, tetapi tidak menjadi inti kasus.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Latihan sub bab 1.5

No. 1 Kunci: B

Konsep: demokrasi Pancasila berarti **kedaulatan rakyat**: warga yang terdampak dilibatkan **sejak perencanaan**, hak semua warga dilindungi (termasuk kelompok kecil), dan keputusan dicari lewat musyawarah. Di sini juga dipertaruhkan hak anak atas pendidikan (Pasal 31 dan 28C).

Analisis opsi:

- A ✗ — mayoritas dijadikan pembenar; hak anak di dusun terjauh diabaikan.
- B ✓ — warga terdampak didengar, dan keberatannya dicarikan jalan keluar yang menjamin hak pendidikan.
- C ✗ — terdengar mendengar warga, tetapi baru setelah keputusan berjalan; warga tidak ikut memutuskan.
- D ✗ — berlebihan; satu keberatan tidak harus membatalkan semuanya, cukup dicarikan penyelesaian.
- E ✗ — keputusan dipindahkan kepada satu orang; pihak terdampak tetap tidak dilibatkan.

Jawaban: B.

Jebakan: C adalah pola "melibatkan setelah keputusan jadi". D tampak membela kelompok kecil, tetapi berubah menjadi hak veto yang mengabaikan pihak lain.

No. 2 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: demokrasi Pancasila menuntut **penghormatan terhadap perbedaan**, **perlindungan hak semua warga**, dan pemilihan yang **bebas dan rahasia**. Pemilih yang membutuhkan bantuan boleh didampingi, tetapi pilihannya tetap miliknya sendiri.

Pernyataan 1 – Benar. Menerima hasil dan memberi selamat kepada pemenang adalah sikap menghormati perbedaan.
Pernyataan 2 – Benar. Pendamping hanya membantu; asas bebas berarti pilihan ditentukan pemilih sendiri.
Pernyataan 3 – Salah. Menyingkirkan warga karena pilihannya berbeda melanggar hak mereka; pihak yang kalah suara tidak boleh dimusuhi.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menganggap kemenangan suara terbanyak memberi hak untuk mengabaikan warga yang berbeda pilihan.

Latihan sub bab 1.6

No. 1 Kunci: D

Konsep: alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pergaulan dunia, nilai Pancasila tampak sebagai **musyawarah** dan **kemanusiaan**: membantu pihak lain berunding secara damai sambil **menghormati kedaulatan** mereka.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✗ — berjasa tidak memberi hak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain.
• B ✗ — berlebihan; perdamaian dicapai lewat kesepakatan para pihak, bukan dengan menyeragamkan ideologi.
• C ✗ — perannya berupa perundingan diplomatik, bukan perluasan kekuatan militer.
• D ✓ — Indonesia menjadi tuan rumah dan ketua bersama perundingan, mempertemukan pihak yang bertikai.
• E ✗ — klaim berlebihan ("pasti", "semua bangsa"); peristiwa ini tidak membuktikan hal itu.

Jawaban: D.

Jebakan: B dan E terdengar membanggakan Pancasila, tetapi melebih-lebihkan perannya.

No. 2 Kunci: B, E

Konsep: tantangan dibedakan menurut **sumber pengaruhnya**. Kesenjangan antarwilayah bersumber dari keadaan di dalam negeri, sehingga termasuk **tantangan dari dalam**; ia menghambat keadilan sosial (sila kelima) dan dapat melemahkan rasa persatuan (sila ketiga). Solusinya harus **menyasar akar**, bukan seremonial atau berlebihan.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — asal teknologinya tidak menentukan; sumber masalahnya adalah pemerataan layanan di dalam negeri.
• B ✓ — klasifikasi dan dampaknya tepat.
• C ✗ — seremonial; tidak menambah guru maupun memperbaiki jaringan.
• D ✗ — berlebihan dan memutus siswa dari keluarga serta lingkungannya; akar di desa tidak diperbaiki.
• E ✓ — langsung memperbaiki penyebab kesenjangan (guru dan jaringan).

Jawaban: B dan E.

Jebakan: A mengklasifikasikan tantangan dari asal teknologinya, bukan dari sumber masalahnya. Banyak siswa juga berhenti setelah menemukan satu jawaban benar.

Kuis Akhir Bab 1

No. 1 Kunci: B

Konsep: perubahan rumusan sila pertama pada 18 Agustus 1945 adalah **kompromi demi persatuan**. Tokoh golongan Islam rela mengubah rumusan yang telah disepakati di Panitia Sembilan agar wilayah timur tetap bersatu dalam negara yang baru merdeka.

Analisis opsi:
• A ✗ — nilai Ketuhanan tetap menjadi sila pertama; yang berubah rumusannya, bukan kedudukan nilai agama.
• B ✓ — kerelaan mengubah rumusan demi keutuhan bangsa adalah inti peristiwa ini.
• C ✗ — keputusan diambil lewat pembicaraan dengan beberapa tokoh, lalu disahkan PPKI; bukan keputusan satu orang.
• D ✗ — kompromi tidak berarti pihak yang sedikit "selalu" diikuti; yang diutamakan adalah kesepakatan demi persatuan.
• E ✗ — Piagam Jakarta disusun Panitia Sembilan yang beranggotakan wakil golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Jawaban: B.

Jebakan: A menyamakan perubahan rumusan dengan hilangnya nilai agama; D memperluas kompromi menjadi aturan mutlak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 2 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: perumusan Pancasila adalah proses musyawarah: usulan berbeda → rumusan panitia dari berbagai golongan → pengesahan setelah kompromi.

Pernyataan 1 – Benar. Usulan yang berbeda justru menjadi bahan musyawarah; perbedaan tidak dihindari, tetapi dicarikan titik temu.
Pernyataan 2 – Salah. Rumusan disusun wakil berbagai golongan dan disahkan bersama, sehingga Pancasila milik seluruh bangsa.
Pernyataan 3 – Benar. Cara berkompromi para pendiri bangsa dapat dipakai dalam musyawarah warga sehari-hari.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 membalik makna "disepakati bersama".

No. 3 Kunci: B

Konsep: korupsi bertentangan dengan sila kelima. Pencegahan yang menyasar akar adalah **keterbukaan** dan **pengawasan oleh warga**, sehingga penyimpangan sulit dilakukan dan mudah diketahui.

Analisis opsi:
- A ✗ — merugikan warga miskin yang tidak bersalah.
- B ✓ — keterbukaan data memungkinkan warga mengawasi.
- C ✗ — memindahkan wewenang kepada orang yang tidak bertanggung jawab secara hukum.
- D ✗ — membiarkan pelanggaran hak warga.
- E ✗ — barang pun dapat dikurangi; akar masalahnya tidak tersentuh.

Jawaban: B.

Jebakan: E tampak praktis, tetapi tidak menyentuh akar masalah, yaitu kurangnya pengawasan.

No. 4 Kunci: D

Konsep: ideologi terbuka berarti **nilai dasar** Pancasila tetap, sedangkan nilai instrumental dan praksisnya dapat dikembangkan. Mengubah nilai dasar sama dengan mengganti dasar negara.

Analisis opsi:
- A ✗ — menganggap semua nilai dapat berubah.
- B ✗ — kebebasan berpendapat tidak berarti dasar negara dapat diganti menurut selera.
- C ✗ — tidak ada mekanisme pemungutan suara untuk mengganti sila; nilai dasar tetap.
- D ✓ — keterbukaan hanya pada penjabaran dan pelaksanaan.
- E ✗ — kebalikannya: Pancasila justru terus ditafsirkan dan dijabarkan sesuai zaman.

Jawaban: D.

Jebakan: C dan E sama-sama menilai pendapat itu kurang tepat, tetapi dengan alasan yang salah.

No. 5 Kunci: B, C, E

Konsep: keterbukaan Pancasila tampak pada **nilai instrumental** baru (undang-undang, program, layanan) yang tetap mewujudkan **nilai dasar**. Kebijakan yang mengubah rumusan sila atau meninggalkan nilai dasar bukan keterbukaan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — meninggalkan nilai dasar musyawarah (sila keempat).
• B ✓ — cara baru (daring) untuk keadilan layanan bagi warga terpencil (sila kelima).
• C ✓ — aturan baru untuk melindungi martabat manusia di era digital (sila kedua).
• D ✗ — mengubah rumusan sila berarti mengubah nilai dasar.
• E ✓ — layanan baru agar warga penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama (sila kedua dan kelima).

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A beralasan "lebih cepat", tetapi mengorbankan nilai dasar. D memakai alasan "mudah diterima", tetapi mengubah rumusan sila.

No. 6 Kunci: A

Konsep: ideologi terbuka memiliki **nilai dasar** yang tetap (sila-sila Pancasila), sedangkan **nilai instrumental** (undang-undang, program) dan **nilai praksis** (pelaksanaan) dapat berubah mengikuti zaman, selama tetap berpijak pada nilai dasar.

Analisis opsi:
• A ✓ — keadilan sosial tetap menjadi tujuan; programnya berubah dari bayar sendiri ke jaminan bersama.
• B ✗ — nilai dasar tidak diganti; justru program baru memperkuat keadilan sosial.
• C ✗ — terbuka tidak berarti meniru tanpa saringan nilai bangsa.
• D ✗ — kebalikan dari ilustrasi; negara justru menanggung iuran warga miskin.
• E ✗ — keadilan sosial bukan sama rata; iuran disesuaikan kemampuan.

Jawaban: A.

Jebakan: B membalik konsep: yang berubah adalah cara, bukan nilai dasarnya.

No. 7 Kunci: A

Konsep: nilai Pancasila dalam hubungan internasional: kemanusiaan, persatuan, dan **musyawarah**, sejalan dengan amanat Pembukaan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

Analisis opsi:
• A ✓ — perundingan damai yang menghormati kedaulatan.
• B ✗ — mengandalkan kekuatan bertentangan dengan perdamaian dan keadilan.
• C ✗ — memihak memperuncing perselisihan.
• D ✗ — mencampuri kedaulatan negara lain.
• E ✗ — tekanan sepihak memperpanjang konflik.

Jawaban: A.

Jebakan: C tampak cepat dan praktis, tetapi tidak adil dan tidak damai.

No. 8 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: sila-sila Pancasila saling menjiwai. Dalam satu peristiwa beberapa sila bisa tampak sekaligus. Persatuan dalam keberagaman berarti bekerja sama **tanpa** menghapus perbedaan.

Langkah 1 – Pernyataan 1. Warga berbeda agama dan suku bekerja sama, tetapi tetap dengan agama dan identitasnya masing-masing. Persatuan tidak menuntut perbedaan dihilangkan → **Salah**.
Langkah 2 – Pernyataan 2. Keyakinan beragama (sila pertama) diwujudkan dengan menolong sesama manusia tanpa membeda-bedakan (sila kedua) → **Benar**.
Langkah 3 – Pernyataan 3. Keputusan diambil lewat rapat (sila keempat) dan mendahulukan yang paling membutuhkan (keadilan, sila kelima) → **Benar**.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan **persatuan** dengan **penyeragaman**, salah tafsir yang sering muncul pada soal Bhinneka Tunggal Ika.

No. 9 Kunci: C

Konsep: Pancasila sebagai dasar negara dituangkan dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD. Undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD, dan dengan demikian dengan nilai Pancasila, diuji melalui **jalur hukum**: pengujian undang-undang terhadap UUD di **Mahkamah Konstitusi**.

Analisis opsi:

- A ✗ — menolak mematuhi hukum bukan jalan yang sah; undang-undang tetap berlaku sampai dibatalkan.
- B ✗ — presiden tidak dapat mencabut undang-undang dengan keputusan presiden; undang-undang diubah bersama DPR atau dibatalkan MK.
- C ✓ — jalan hukum yang tersedia untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
- D ✗ — MA menguji peraturan **di bawah** undang-undang, bukan undang-undang.
- E ✗ — undang-undang dapat keliru; karena itu ada mekanisme pengujian.

Jawaban: C.

Jebakan: D menyebut lembaga peradilan yang benar-benar ada, tetapi tertukar wewenangnya dengan MK.

No. 10 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat 2). Hak milik tidak membenarkan diskriminasi. Kebebasan berpendapat yang dijalankan dengan santun adalah hak yang sah.

Pernyataan 1 – Salah. Hak milik dibatasi kewajiban menghormati hak orang lain.
Pernyataan 2 – Benar. Menolak karena disabilitas adalah diskriminasi.
Pernyataan 3 – Benar. Keberatan disampaikan sopan dan berisi permintaan penjelasan.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 memakai hak milik sebagai alasan mutlak.

No. 11 Kunci: D

Konsep: keadilan sosial tidak selalu berarti **sama rata**. Adil berarti setiap orang menerima sesuai **hak dan kontribusinya**, dengan aturan yang jelas dan disepakati bersama.

Analisis opsi:

- A ✗ — menyamakan adil dengan sama rata.
- B ✗ — besar bagian ditentukan aturan bersama, bukan oleh anggota yang diuntungkan.
- C ✗ — nilai Pancasila berlaku dalam semua kegiatan bermasyarakat.
- D ✓ — bagian sesuai kontribusi menurut aturan rapat anggota.
- E ✗ — generalisasi berlebihan dengan kata "selalu".

Jawaban: D.

Jebakan: A dan E sama-sama berangkat dari salah paham bahwa keadilan = sama rata.

No. 12 Kunci: D

Konsep: tantangan globalisasi diatasi dengan solusi yang **menyasar akar**: di sini, kemampuan pelajar menyaring informasi dan mengelola uang, serta peran keluarga. Solusi seremonial, larangan menyeluruh, atau hukuman semata tidak menyentuh akar.

Analisis opsi:

- A ✗ — larangan menyeluruh berlebihan dan tidak menyentuh akar.
- B ✗ — seremonial; berguna sebagai kampanye, tetapi tidak cukup.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✗ — penegakan hukum perlu, tetapi tanggung jawab keluarga dan sekolah tidak hilang.
• D ✓ — membangun daya tangkal dari dalam diri pelajar.
• E ✗ — hukuman tanpa pembinaan tidak memulihkan dan tidak mencegah.

Jawaban: D.

Jebakan: C menggoda karena judi daring melanggar hukum; tetapi soal menanyakan solusi yang menyasar akar.

No. 13 Kunci: A

Konsep: dalam pergaulan antarbangsa, nilai Pancasila tampak sebagai **kemanusiaan yang universal** (sila kedua) dan semangat **persatuan** yang menghormati perbedaan (sila ketiga), sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan keempat. Isi Dasasila Bandung (HAM, kedaulatan, persamaan derajat bangsa) memperlihatkan nilai itu dapat diterima banyak bangsa sebagai dasar kerja sama.

Langkah – Analisis opsi:
• A ✓ — Dasasila menekankan HAM dan persamaan derajat, sejalan dengan kemanusiaan dan persatuan; kerja samanya setara.
• B ✗ — berlebihan: konferensi menghasilkan prinsip bersama, bukan kewajiban memakai ideologi Indonesia.
• C ✗ — bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif; KAA justru menjadi cikal bakal gerakan negara yang tidak memihak blok.
• D ✗ — terlalu sempit; nilai kemanusiaan berlaku bagi semua bangsa.
• E ✗ — konsep tertukar: persamaan derajat tidak berarti penyeragaman sistem pemerintahan; Dasasila justru menghormati kedaulatan tiap negara.

Jawaban: A.

Jebakan: B terdengar membanggakan, tetapi melebih-lebihkan peran Pancasila.

No. 14 Kunci: A, C, D

Konsep: semua peraturan, termasuk peraturan daerah, bersumber dan diukur dengan Pancasila melalui UUD dan undang-undang. Peraturan yang bertentangan dapat **diuji**: peraturan di bawah undang-undang diuji ke **Mahkamah Agung**.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — susunan hukum berjenjang; peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
• B ✗ — tujuan ekonomi tidak membenarkan isi yang bertentangan dengan dasar negara.
• C ✓ — jalan hukum yang tersedia untuk menguji peraturan daerah.
• D ✓ — sila kelima: kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak dan merugikan warga banyak bertentangan dengan keadilan sosial.
• E ✗ — izin dari peraturan yang bermasalah tidak menjadikan perbuatan itu sesuai Pancasila; lagi pula pengendalian limbah diatur undang-undang.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B menggoda karena tujuannya baik; E memakai "sudah diizinkan" sebagai pembenaran.

No. 15 Kunci: E

Konsep: para pendiri bangsa menghadapi perbedaan dengan **musyawarah** dan **kompromi**, mencari rumusan yang dapat diterima semua golongan **tanpa menghapus identitas** mereka, lalu tetap mengambil keputusan.

Analisis opsi:
• A ✗ — suara terbanyak tanpa musyawarah membuat pihak yang kalah merasa ditinggalkan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• B ✗ — keputusan dipindahkan kepada satu tokoh; musyawarah anggota tidak terjadi.
• C ✗ — menghapus identitas setempat demi "netral"; persatuan tidak menuntut penyeragaman, apalagi dengan bahasa asing.
• D ✗ — menunda sambil menunggu satu pihak mengalah bukan kompromi.
• E ✓ — mencari titik temu yang menghormati bahasa setempat dan rasa memiliki semua anggota.

Jawaban: E.

Jebakan: C tampak adil karena tidak memihak, tetapi caranya menghapus identitas. Pendiri bangsa tidak menghapus nilai agama atau budaya, melainkan merumuskannya agar diterima semua.

No. 16 Kunci: B

Konsep: identitas nasional adalah ciri yang membedakan bangsa Indonesia dan menyatukan warganya. Batik dengan ratusan motif daerah adalah contoh **Bhinneka Tunggal Ika** dalam budaya: beragam, tetapi diakui sebagai milik bersama bangsa (sila ketiga).

Analisis opsi:
• A ✗ — batik adalah salah satu wujud identitas; tidak menggantikan Pancasila.
• B ✓ — motif yang beragam dan dipakai bersama mencerminkan persatuan dalam keberagaman.
• C ✗ — pengakuan bukan perlombaan keunggulan; sikap itu merendahkan bangsa lain.
• D ✗ — penyeragaman bertentangan dengan semangat keberagaman.
• E ✗ — warisan budaya justru dilestarikan dengan terus dikembangkan.

Jawaban: B.

Jebakan: C terdengar membanggakan, tetapi mengandung sikap chauvinis (merasa bangsa sendiri paling unggul).

No. 17 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: setiap sila dapat diamati dalam perilaku. Perilaku yang memakai nama nilai (agama, suara terbanyak) tetapi merugikan orang lain justru bertentangan dengan sila itu.

Pernyataan 1 – Benar. Menghormati martabat teman (sila kedua) dan menjaga persatuan antarsuku (sila ketiga).
Pernyataan 2 – Salah. Sila pertama mengajarkan hormat-menghormati antarumat beragama, bukan membeda-bedakan teman.
Pernyataan 3 – Salah. Sila keempat menuntut musyawarah, bukan memaksakan kehendak kelompok terbesar.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 dan 3 menempelkan nama sila pada perilaku yang justru melanggarnya.

No. 18 Kunci: A, B, E

Konsep: satu peristiwa dapat mencerminkan beberapa sila sekaligus. Setiap pernyataan diuji: apakah perilaku di ilustrasi benar-benar cocok dengan sila yang disebut?

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — musyawarah desa = sila keempat.
• B ✓ — hak milik warga dihormati (sila kedua dan kelima).
• C ✗ — musyawarah tidak menghapus hak warga atas ganti rugi; ilustrasi justru menyebut ganti rugi.
• D ✗ — kerja bersama lebih tepat mencerminkan persatuan dan gotong royong (sila ketiga), bukan sila pertama.
• E ✓ — pembangunan menjangkau yang paling jauh = keadilan sosial.

Jawaban: A, B, dan E.

Jebakan: D benar bahwa kerja dilakukan sukarela, tetapi sila yang ditempelkan keliru.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 19 Kunci: E

Konsep: demokrasi Pancasila **mengutamakan musyawarah untuk mufakat**. Bila mufakat tidak tercapai setelah diusahakan sungguh-sungguh, keputusan boleh diambil dengan **suara terbanyak**, dan hasilnya diterima dengan tanggung jawab oleh semua pihak.

Analisis opsi:
• A ✗ — menyerahkan kepada satu orang meninggalkan kedaulatan warga.
• B ✗ — menunda tanpa batas membuat persoalan tidak selesai.
• C ✗ — menghindari keputusan merugikan semua warga.
• D ✗ — pengaruh tokoh bukan cara demokratis.
• E ✓ — langkah berikutnya setelah musyawarah sungguh-sungguh tidak mencapai mufakat.

Jawaban: E.

Jebakan: B terdengar "paling musyawarah", padahal demokrasi Pancasila tidak menuntut mufakat tanpa batas waktu.

No. 20 Kunci: A

Konsep: setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat (Pasal 28G). Pasal 28J mewajibkan setiap orang menghormati HAM orang lain. Niat baik tidak menghapus kewajiban meminta izin.

Analisis opsi:
• A ✓ — hak pribadi dilanggar; seharusnya meminta izin.
• B ✗ — tujuan baik tidak membenarkan pelanggaran hak orang lain.
• C ✗ — kebebasan berekspresi dibatasi oleh hak orang lain (Pasal 28J ayat 2).
• D ✗ — HAM justru mengatur hubungan antarwarga, termasuk kewajiban menghormati hak orang lain.
• E ✗ — pelanggaran tidak ditentukan jumlah penonton.

Jawaban: A.

Jebakan: B paling menggoda karena niatnya baik.

No. 21 Kunci: A

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menjadi pedoman bertindak dalam keseharian, termasuk saat tidak ada yang mengawasi. Kejujuran Dimas mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Analisis opsi:
• A ✓ — perilaku pribadi sehari-hari yang dipandu nilai Pancasila.
• B ✗ — fungsi dasar negara berkaitan dengan penyelenggaraan negara, bukan sikap pribadi.
• C ✗ — nilai dasar tidak berubah menurut kebutuhan pribadi.
• D ✗ — perjanjian luhur mengikat seluruh bangsa, bukan hanya tokoh tertentu.
• E ✗ — Dimas bertindak karena nilai, bukan karena takut hukuman; opsi ini juga tidak menggambarkan fungsi yang tampak.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan E menyebut fungsi negara yang benar, tetapi tidak sesuai dengan perilaku pribadi dalam ilustrasi.

No. 22 Kunci: B

Konsep: sebagai **dasar negara**, Pancasila menjadi **sumber segala sumber hukum**: setiap peraturan diukur dengan nilainya. Fungsi lain (pandangan hidup, jiwa bangsa, perjanjian luhur) juga benar, tetapi tidak tampak dalam kegiatan menelaah peraturan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✗ — pandangan hidup menuntun perilaku pribadi; kegiatan dalam soal adalah menguji isi peraturan negara.
• B ✓ — rancangan diuji dengan nilai Pancasila dan dikembalikan bila bertentangan.
• C ✗ — fungsi jiwa bangsa tidak berkaitan dengan pemeriksaan isi peraturan.
• D ✗ — salah karena "saja": Pancasila tetap mengikat sampai sekarang.
• E ✗ — keterbukaan ideologi hanya pada nilai instrumental dan praksis, bukan nilai dasar.

Jawaban: B.

Jebakan: A, C, dan D menyebut fungsi Pancasila yang memang ada, tetapi tidak sesuai dengan bukti di ilustrasi.

No. 23 Kunci: B

Konsep: sila-sila Pancasila **saling menjiwai**. Musyawarah (sila keempat) harus dijiwai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua). Keputusan yang diambil tanpa mendengar pihak yang terkena dan mengabaikan keadaannya tidak sesuai Pancasila, walaupun memakai suara terbanyak.

Analisis opsi:
• A ✗ — suara terbanyak hanyalah cara; isinya mengabaikan kemanusiaan dan pihak terkena tidak didengar.
• B ✓ — musyawarah yang tidak dijiwai sila kedua.
• C ✗ — keadilan tidak selalu sama besar; keadaan warga yang kesulitan perlu dipertimbangkan.
• D ✗ — penyewa tetap warga kompleks; alasan ini keliru.
• E ✗ — kewajiban iuran memang ada, tetapi pengusiran tanpa mendengar bertentangan dengan sila kedua.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan E masing-masing menyebut sila yang tampak benar, tetapi menilai hanya sebagian peristiwa.

No. 24 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: Pancasila mengakui **hak milik dan kebebasan berusaha** (berbeda dari sosialisme-komunisme), tetapi kebebasan itu dibatasi **kepentingan bersama** dan cabang produksi penting dikuasai negara (berbeda dari liberalisme).

Pernyataan 1 – Salah. Kebebasan berusaha memang ada, tetapi dibatasi asas kekeluargaan dan penguasaan negara; itu tidak sama dengan liberalisme.
Pernyataan 2 – Benar. Tujuan penguasaan negara adalah kemakmuran rakyat.
Pernyataan 3 – Salah. Hak milik pribadi diakui; yang dikuasai negara hanya cabang produksi penting.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 1 dan 3 masing-masing mengambil satu sisi ketentuan lalu menyimpulkannya berlebihan.

No. 25 Kunci: A, C, E

Konsep: dalam demokrasi Pancasila, **kebebasan berpendapat** (Pasal 28E ayat 3) dijamin, tetapi pelaksanaannya **dibatasi** untuk menghormati hak dan martabat orang lain (Pasal 28J ayat 2). Perbedaan diselesaikan dengan musyawarah dan adu gagasan, bukan dengan merendahkan identitas.

Langkah – periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — kritik berbasis data dan argumen adalah wujud hak berpendapat dan bagian sehat dari demokrasi.
• B ✗ — melarang semua kritik adalah pembatasan berlebihan; yang dibatasi hanya pendapat yang melanggar hak orang lain.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✓ — ejekan SARA merendahkan martabat orang lain, sehingga termasuk yang boleh dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2).
• D ✗ — kebebasan dianggap mutlak; padahal UUD sendiri menyebut adanya pembatasan.
• E ✓ — mencerminkan demokrasi Pancasila: perbedaan dijawab dengan gagasan dan saling menghormati.

Jawaban: A, C, dan E.

Jebakan: B dan D adalah dua kutub yang sama-sama keliru, yaitu pembatasan total dan kebebasan mutlak. Banyak siswa hanya memilih satu jawaban pada soal jenis ini, padahal jawaban benarnya lebih dari satu.

No. 26 Kunci: A, C

Konsep: menghadapi pengaruh global, nilai Pancasila menuntun sikap **selektif**: menyaring sesuai nilai, kebutuhan, dan kemampuan, sambil tetap terbuka dan menghargai bangsa lain.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — menyaring secara bijak.
• B ✗ — menolak semua yang asing berlebihan dan tidak realistis.
• C ✓ — cinta produk dalam negeri tanpa sikap merendahkan.
• D ✗ — tetap mengikuti tekanan pergaulan.
• E ✗ — menghindar sepenuhnya bukan sikap selektif; media sosial juga bermanfaat.

Jawaban: A dan C.

Jebakan: B dan E terdengar tegas, tetapi keduanya sikap menolak total, bukan menyaring.

No. 27 Kunci: D

Konsep: peraturan disusun **berjenjang**; peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Susunan ini menjamin seluruh hukum mengalir dari Pancasila dan UUD.

Analisis opsi:
• A ✗ — kedekatan dengan warga tidak menentukan kekuatan hukum.
• B ✗ — asas "aturan baru mengesampingkan aturan lama" hanya untuk peraturan yang sederajat.
• C ✗ — membiarkan warga memilih membuat hukum tidak pasti.
• D ✓ — peraturan pemerintah lebih tinggi; peraturan bupati harus menyesuaikan.
• E ✗ — DPRD tidak berwenang memilih aturan mana yang berlaku.

Jawaban: D.

Jebakan: B memakai asas hukum yang benar, tetapi untuk keadaan yang salah.

No. 28 Kunci: C

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun warga menyelesaikan benturan kepentingan sehari-hari dengan **menyeimbangkan hak dan kewajiban** melalui **musyawarah** (sila keempat), sehingga hak satu pihak dijalankan tanpa mengorbankan hak pihak lain (sila kedua dan kelima).

Langkah 1 – Kenali dua kepentingan yang sah. Remaja berhak berlatih dan mengembangkan diri; warga berhak atas ketenangan dan istirahat. Keduanya sah.
Langkah 2 – Cari opsi yang tidak mengorbankan salah satunya. Penyelesaian yang mencerminkan pandangan hidup Pancasila mempertemukan keduanya lewat kesepakatan.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — hanya membela hak remaja; kewajiban menghormati hak orang lain diabaikan.
• B ✗ — kewajiban dibebankan kepada warga saja; alasan "prestasi" tidak menghapus hak warga atas ketenangan.
• C ✓ — musyawarah menghasilkan jam latihan yang menjaga hak remaja sekaligus ketenangan warga.
• D ✗ — memenangkan warga dengan larangan sepihak; hak remaja diabaikan dan tidak ada

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

musyawarah.

• E ✗ — urutannya terbalik: kepentingan bersama dipikirkan **setelah** kepentingan pribadi terpenuhi.

Cek ulang: hanya C yang menghormati kedua pihak sekaligus memakai musyawarah.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan D masing-masing terdengar adil karena membela pihak yang benar-benar dirugikan. E menyelipkan kata "setelah", pola pengecoh yang juga dipakai soal asli tentang pedagang dan pengguna jalan.

No. 29 Kunci: E

Konsep: sila ditentukan dari **bukti utama** dalam ilustrasi. Pertanyaan menunjuk **isi** kesepakatan, yaitu pembagian bergiliran agar nelayan kecil tetap mendapat bagian: itu **keadilan sosial**.

Analisis opsi:

• A ✗ — ilustrasi tidak menyebut rasa syukur.

• B ✗ — nelayan tidak dilebur; mereka tetap dari dua desa yang berbeda.

• C ✗ — ilustrasi tidak menyebut pemungutan suara; lagi pula yang ditanya isi kesepakatan, bukan caranya.

• D ✗ — nelayan besar tetap mendapat giliran; tidak ada yang dirugikan tanpa imbalan.

• E ✓ — kesempatan yang adil bagi semua, termasuk yang lemah.

Jawaban: E.

Jebakan: C menggoda karena ada kata "sepakat", tetapi alasan yang ditulis (pemungutan suara) tidak ada di ilustrasi dan pertanyaannya tentang isi kesepakatan.

No. 30 Kunci: C

Konsep: karena Pancasila adalah **sumber segala sumber hukum**, setiap peraturan, sampai peraturan desa, harus sejalan dengan nilai-nilainya. Aturan yang membeda-bedakan warga menurut suku bertentangan dengan sila kedua (perlakuan yang adil dan beradab), sila ketiga (persatuan), dan sila kelima (keadilan bagi seluruh rakyat), sehingga tidak dapat dibenarkan dan harus diperbaiki atau dibatalkan melalui jalur yang sah.

Langkah 1 – Baca ketentuan yang dikutip. Pancasila menjadi ukuran semua peraturan.
Langkah 2 – Uji isi peraturan desa. Hak membuka usaha dibatasi menurut suku → diskriminasi.
Langkah 3 – Analisis opsi:

• A ✗ — desa memang berwenang mengatur, tetapi kewenangan tidak boleh dipakai membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila.

• B ✗ — suara terbanyak tidak dapat mengesahkan aturan yang diskriminatif.

• C ✓ — peraturan diukur dengan Pancasila; aturan diskriminatif tidak dapat dibenarkan.

• D ✗ — kesimpulannya benar (aturan itu bermasalah), tetapi tindakannya main hakim sendiri; pembatalan ditempuh lewat jalur hukum.

• E ✗ — alasan ekonomi tidak membenarkan perlakuan yang membeda-bedakan warga negara.

Jawaban: C.

Jebakan: D menggoda karena sudah benar menilai aturan itu bermasalah; yang salah adalah caranya.

Latihan sub bab 2.1

No. 1 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: amandemen adalah perubahan atas **sebagian** isi UUD dengan cara **adendum**: perubahan ditambahkan pada naskah asli, bukan menulis ulang. Salah satu kesepakatan dasarnya adalah tidak mengubah Pembukaan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pernyataan 1 – Benar. Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan, dan Pembukaan tidak diubah.
Pernyataan 2 – Salah. Adendum justru kebalikannya: naskah asli tetap, perubahan ditambahkan dengan nomor sisipan.
Pernyataan 3 – Benar. Bab hak asasi manusia (Pasal 28A–28J) ditambahkan pada Perubahan Kedua, sehingga jaminan hak menjadi jauh lebih rinci.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memakai anggapan unggahan itu ("UUD baru") seolah-olah sama dengan arti adendum.

No. 2 Kunci: B

Konsep: UUD hanya dapat diubah melalui **Pasal 37**: usul perubahan diagendakan bila diajukan sekurang-kurangnya **1/3 jumlah anggota MPR** secara tertulis beserta alasannya, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, dan putusan disetujui sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari **seluruh** anggota MPR. Dekrit, referendum, atau tekanan massa bukan jalan yang sah. Warga tetap boleh menyampaikan aspirasi kepada wakilnya.

Analisis opsi:
• A ✗ — syarat sepertiga dihitung dari **anggota MPR** yang mengajukan usul, bukan dari jumlah warga pendukung.
• B ✓ — aspirasi warga sah, tetapi baru menjadi usul perubahan bila diajukan sepertiga anggota MPR.
• C ✗ — kedaulatan rakyat **dilaksanakan menurut UUD** (Pasal 1 ayat 2); Pasal 37 tidak mengenal referendum.
• D ✗ — berlebihan; menyampaikan pendapat tentang isi UUD adalah hak warga.
• E ✗ — MPR tidak wajib menyetujui, dan ambang persetujuan dihitung dari seluruh anggota, bukan anggota yang hadir.

Jawaban: B.

Jebakan: A mencampur "sepertiga anggota MPR" dengan jumlah pendukung; C memakai prinsip kedaulatan rakyat yang benar, tetapi melupakan frasa "menurut Undang-Undang Dasar".

Latihan sub bab 2.2

No. 1 Kunci: E

Konsep: pokok pikiran keempat Pembukaan: negara berdasar atas **Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab**. Karena itu, penyelenggara negara wajib **memelihara budi pekerti yang luhur** dan menghormati martabat manusia.

Analisis opsi:
• A ✗ — berlaku bagi semua pegawai tidak menjadi inti aturan; inti aturan adalah perilaku pegawai.
• B ✗ — asal gaji pegawai tidak menjelaskan mengapa pegawai wajib jujur dan santun.
• C ✗ — sanksi yang sama hanyalah cara menegakkan aturan, bukan semangat isi aturannya.
• D ✗ — pokok pikirannya tepat sebagian, tetapi alasannya tidak sesuai isi aturan; kode etik itu tidak mengatur ibadah.
• E ✓ — kejujuran, kesantunan, dan penghormatan martabat adalah budi pekerti luhur penyelenggara negara.

Jawaban: E.

Jebakan: D menyebut pokok pikiran yang hampir sama, tetapi alasannya tidak cocok dengan isi aturan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 2 **Kunci: B, C, E**

Konsep: satu kebijakan dapat dibaca dari dua sisi. **Tujuan negara** menjawab "apa yang hendak dicapai" (dilihat dari hasil langsung). **Pokok pikiran** menjawab "dengan semangat apa negara bertindak". Jawabannya bisa berbeda, dan keduanya dapat benar.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — biaya yang tidak lagi ditanggung keluarga adalah dampak lanjutan; hasil langsungnya anak bersekolah.

• B ✓ — hasil langsung program adalah anak yang dapat bersekolah → mencerdaskan kehidupan bangsa.

• C ✓ — anak yang tidak mampu tetap memperoleh kesempatan → keadilan sosial.

• D ✗ — keadilan sosial tidak berarti semua orang menerima hal yang sama; program menyasar yang paling membutuhkan.

• E ✓ — negara mengatasi paham golongan dan tidak hanya melayani suku, agama, atau daerah tertentu → persatuan.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A memakai dampak lanjutan sebagai tujuan utama; D menyamakan keadilan dengan sama rata.

Latihan sub bab 2.3

No. 1 **Kunci: 1B 2S 3S**

Konsep: DPD menjadi suara daerah di pusat. Wewenangnya: **mengajukan**, **ikut membahas**, dan **mengawasi** pelaksanaan undang-undang tertentu, lalu menyampaikan hasilnya kepada DPR. DPD **tidak ikut menyetujui** undang-undang dan bukan lembaga yang menerbitkan atau mencabut izin.

Pernyataan 1 – Benar. Sesuai bunyi Pasal 22D yang dikutip.
Pernyataan 2 – Salah. Izin diterbitkan dan dicabut oleh pemerintah; dipilih rakyat tidak memberi DPD wewenang itu.
Pernyataan 3 – Salah. Persetujuan undang-undang ada di tangan DPR dan Presiden; DPD ikut membahas, tetapi tidak menyetujui.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menukar "ikut membahas" dengan "ikut menyetujui"; mengusulkan, membahas, menyetujui, dan mengawasi adalah wewenang yang berbeda.

No. 2 **Kunci: A**

Konsep: menurut Pasal 24C ayat (1), **Mahkamah Konstitusi** berwenang **memutus pembubaran partai politik**, di samping menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Karena partai adalah wadah kebebasan berserikat, pembubarannya diputus pengadilan berdasarkan bukti, bukan oleh keputusan politik satu lembaga. Lembaga yang **terlibat** dalam pemilu belum tentu lembaga yang **berwenang memutus**.

Analisis opsi:

• A ✓ — wewenang memutus pembubaran partai ada pada MK; dugaan harus dibuktikan di persidangan.

• B ✗ — KPU menyelenggarakan pemilu dan memverifikasi syarat peserta, tetapi tidak berwenang membubarkan partai karena dugaan pelanggaran dasar negara.

• C ✗ — pembubaran oleh Presiden memang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin; justru cara seperti itu yang dicegah UUD hasil amandemen.

• D ✗ — DPR tidak berwenang membubarkan partai; itu sama dengan lawan politik memutus nasib partai lain.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• E ✗ — MA puncak peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, tetapi pembubaran partai wewenang MK.

Jawaban: A.

Jebakan: B memilih lembaga yang terlibat dalam pemilu; C memakai peristiwa sejarah seolah-olah cara yang sah sekarang; E memakai alasan "puncak peradilan" untuk lembaga yang salah.

Latihan sub bab 2.4

No. 1 Kunci: B, D

Konsep: hubungan pusat–daerah meliputi kewenangan, keuangan, dan **pengawasan**. Dalam negara kesatuan, daerah tidak berdaulat dan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Putusan MK tahun 2017 hanya mengubah **jalur** pembatalan perda yang sudah berlaku: bukan lagi oleh pemerintah, melainkan melalui pengujian di **Mahkamah Agung** (Pasal 24A). Pengawasan pusat tetap ada, misalnya evaluasi rancangan perda APBD, pajak daerah, dan tata ruang.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — perda tetap harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi; yang berubah hanya lembaga yang membatalkannya.
• B ✓ — pengawasan sebelum perda ditetapkan tetap berjalan.
• C ✗ — perda tetap dibentuk DPRD bersama kepala daerah; MA hanya menguji.
• D ✓ — pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah wewenang MA.
• E ✗ — daerah dalam negara kesatuan tidak berdaulat; pengawasan pusat tetap ada.

Jawaban: B dan D.

Jebakan: A dan E menyimpulkan berlebihan dari putusan itu, seolah-olah daerah lepas dari aturan negara kesatuan; C menukar wewenang menguji dengan wewenang membentuk.

No. 2 Kunci: C

Konsep: keamanan termasuk urusan **absolut** pemerintah pusat yang dijalankan Polri. Daerah memegang urusan konkuren **ketenteraman dan ketertiban umum**, antara lain melalui Satpol PP untuk menegakkan perda, tetapi tidak membentuk pasukan bersenjata yang menangkap pelaku kejahatan.

Analisis opsi:

• A ✗ — otonomi tidak mencakup urusan absolut.
• B ✗ — sumber dana tidak mengubah pemilik urusan.
• C ✓ — keamanan milik pusat; daerah dapat memperkuat ketertiban dan bekerja sama dengan kepolisian.
• D ✗ — berlebihan; daerah tetap punya urusan ketertiban umum.
• E ✗ — perda tidak dapat mengatur urusan absolut pusat.

Jawaban: C.

Jebakan: B dan E memberi syarat yang terdengar sah (dana sendiri, persetujuan DPRD), padahal pemilik urusannya tetap pusat.

Latihan sub bab 2.5

No. 1 Kunci: A, C, D

Konsep: kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan menurut UUD** (Pasal 1 ayat 2). Di luar pemilu, salurannya antara lain: memberi masukan saat undang-undang dibahas (partisipasi bermakna),

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menyampaikan pendapat di muka umum secara damai (Pasal 28E ayat 3; UU 9/1998), dan menguji undang-undang ke MK (Pasal 24C).

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — partisipasi dalam pembahasan RUU.
• B ✗ — memaksakan kehendak dengan melumpuhkan kepentingan umum bukan saluran menurut UUD.
• C ✓ — unjuk rasa damai menurut undang-undang adalah hak yang dijamin.
• D ✓ — jalur hukum untuk undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional.
• E ✗ — Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B dan E terdengar sebagai bentuk "kekuatan rakyat", tetapi dijalankan di luar jalur yang diatur UUD.

No. 2 Kunci: D

Konsep: sejarah demokrasi Indonesia memberi dua pelajaran sekaligus. Masa parlementer: bebas tetapi tidak stabil. Masa terpimpin dan Orde Baru: stabil tetapi kekuasaan terpusat dan pendapat dibatasi. Amandemen menjawab keduanya: sistem presidensial dengan masa jabatan tetap (stabil), sekaligus pembatasan masa jabatan (Pasal 7), larangan membubarkan DPR (Pasal 7C), dan jaminan berpendapat (Pasal 28E ayat 3).

Analisis opsi:

• A ✗ — mengulang ciri yang dulu melemahkan demokrasi.
• B ✗ — masalah 1950-an bukan hanya jumlah partai, tetapi sistem yang membuat kabinet mudah dijatuhkan; menyederhanakan partai bukan obat semua masalah.
• C ✗ — kesimpulan dari satu sisi saja; sistem parlementer saat itu justru tidak stabil.
• D ✓ — memadukan kedua pelajaran: stabil, tetapi dibatasi dan diawasi.
• E ✗ — memperpanjang jabatan membuka kembali bahaya pemusatan kekuasaan.

Jawaban: D.

Jebakan: A, B, C, dan E masing-masing hanya belajar dari satu masa, sedangkan pertanyaan meminta pelajaran dari perbandingan keduanya.

Latihan sub bab 2.6

No. 1 Kunci: C

Konsep: membaca pasal berarti menjawab: **siapa** subjeknya, **apa** yang dijamin, dan **sampai mana** batasnya. Subjek Pasal 27 ayat (2) adalah **tiap warga negara**, termasuk yang belum bekerja. Yang dijamin adalah **hak** atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: negara wajib membuka kesempatan kerja dan melindungi pekerja, tetapi tidak wajib memberi setiap orang jabatan tertentu. Hak tidak sama dengan jaminan hasil.

Analisis opsi:

• A ✗ — melebihi bunyi pasal; pasal tidak menjanjikan jabatan pegawai pemerintah bagi setiap pencari kerja.
• B ✗ — mengurangi isi pasal; subjeknya tiap warga negara, bukan hanya yang sudah bekerja.
• C ✓ — kedua pendapat keliru membaca pasal: yang satu menambah isi, yang lain mempersempit subjeknya.
• D ✗ — alasannya benar sebagian, tetapi menilai tuntutan para pemuda tepat padahal tuntutan itu melebihi bunyi pasal.
• E ✗ — memindahkan tanggung jawab negara kepada keluarga.

Jawaban: C.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: A menambah isi pasal, B mengurangi subjeknya, dan D tampak adil karena membenarkan keduanya. E memakai pola "tanggung jawab dipindahkan".

No. 2 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: hak dalam UUD menjamin **kesempatan dan perlakuan**, tidak selalu **hasil tertentu**. Hak juga dibatasi hak orang lain (Pasal 28J). Pasal tidak boleh dibaca melebihi bunyinya.

Pernyataan 1 – Salah. Melebihi bunyi pasal; pasal menjamin hak bertempat tinggal, bukan rumah gratis di lokasi pilihan.
Pernyataan 2 – Benar. Bantuan bagi yang paling membutuhkan adalah cara negara memenuhi hak itu.
Pernyataan 3 – Salah. Hak sendiri tidak membenarkan pelanggaran hak milik orang lain.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 1 dan 3 sama-sama "membesarkan" hak: yang satu menambah isi pasal, yang lain mengabaikan batasnya.

Latihan sub bab 2.7

No. 1 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: Indonesia adalah **negara hukum** (Pasal 1 ayat 3). Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana berhak atas **praduga tak bersalah** dan berhak tidak disiksa (Pasal 28G ayat 2, 28I ayat 1). Hukuman hanya dijatuhkan melalui proses peradilan.

Pernyataan 1 – Salah. Main hakim sendiri melanggar hak tersangka dan dapat dipidana; "membuat jera" bukan alasan yang sah.
Pernyataan 2 – Benar. Perkara diserahkan kepada aparat yang berwenang.
Pernyataan 3 – Benar. Statusnya baru terduga; hak-haknya tetap dilindungi.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan main hakim sendiri dengan ketegasan.

No. 2 Kunci: D

Konsep: penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menghukum, tetapi **memulihkan hak** yang dilanggar melalui jalan yang sah. Solusi yang baik menyelesaikan perselisihan bagi kedua pihak: lebih dulu musyawarah atau mediasi, dan bila gagal, gugatan ke pengadilan. Hak milik pengembang tidak menghapus kewajiban menghormati hak orang lain (Pasal 28J ayat 1).

Analisis opsi:
- A ✗ — main hakim sendiri; tujuannya benar, tetapi caranya melanggar hukum.
- B ✗ — hanya menghukum; aliran air sawah, yaitu hak yang dilanggar, tidak dipulihkan.
- C ✗ — hak milik dan izin tidak membenarkan perbuatan yang merugikan hak petani.
- D ✓ — memulihkan aliran air melalui mediasi, dengan jalan pengadilan bila mediasi gagal.
- E ✗ — DPR tidak menerbitkan atau membatalkan izin pembangunan; lembaganya salah.

Jawaban: D.

Jebakan: B terdengar tegas dan sah, tetapi hanya memperjuangkan hukuman tanpa memulihkan hak; A benar tujuannya, tetapi salah caranya.

Kuis Akhir Bab 2

No. 1 Kunci: B

Konsep: Pasal 37 mengatur prosedur perubahan pasal-pasal UUD (usul 1/3, hadir 2/3, setuju 50 % + 1 dari seluruh anggota MPR). Namun, ayat (5) **mengecualikan** bentuk NKRI: bentuk negara kesatuan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

tidak dapat diubah lewat prosedur apa pun. Masalah pemerataan dijawab di dalam negara kesatuan, yaitu dengan otonomi daerah (Pasal 18).

Langkah 1 – Tentukan bagian yang hendak diubah. Usul menyentuh **bentuk negara**, bukan pasal biasa.
Langkah 2 – Terapkan ayat (5). Untuk bentuk NKRI, prosedur ayat (1)–(4) tidak berlaku.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — syarat jumlah pengusul hanya berlaku untuk pasal yang boleh diubah.
• B ✓ — bentuk NKRI dikunci ayat (5); tujuan pemerataan dapat dikejar melalui otonomi daerah.
• C ✗ — ambang hadir dan setuju itu benar untuk pasal biasa, tetapi tidak membuka jalan mengubah bentuk NKRI.
• D ✗ — referendum bukan cara mengubah UUD menurut Pasal 37.
• E ✗ — Dekrit 1959 adalah peristiwa darurat masa lalu, bukan cara konstitusional sekarang.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan C memakai angka Pasal 37 yang benar, tetapi untuk bagian yang justru dikecualikan.

No. 2 Kunci: B

Konsep: tantangan penegakan hukum adalah hambatan dalam **proses hukum**, berbeda dari **pelanggaran** yang dilakukan pelaku. Saksi yang diintimidasi termasuk hambatan dari sistem perlindungan; jalan keluarnya antara lain perlindungan dari LPSK.

Langkah 1 – Pisahkan pelanggaran dan proses. Menimbun solar = pelanggaran. Saksi diancam lalu menolak bersaksi = hambatan proses.
Langkah 2 – Pilih hambatan yang tergambar. Pemeriksaan tersendat karena saksi takut.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — itu pelanggarannya, bukan hambatan proses hukum.
• B ✓ — hambatan yang tergambar jelas di ilustrasi.
• C ✗ — tidak tergambar; warga justru melapor.
• D ✗ — keliru dan tidak tergambar; polisi sudah memproses laporan.
• E ✗ — tidak tergambar; laporan sudah diterima.

Jawaban: B.

Jebakan: A paling menggoda karena menyebut kesalahan yang nyata, padahal yang ditanya hambatan prosesnya. C dan E adalah tantangan umum yang tidak ada buktinya di ilustrasi.

No. 3 Kunci: E

Konsep: undang-undang lahir dari **persetujuan bersama DPR dan Presiden** (Pasal 20 ayat 2). Tanpa persetujuan bersama, RUU tidak dapat menjadi undang-undang dan tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan yang sama (ayat 3). Ini wujud saling mengawasi dan mengimbangi.

Langkah 1 – Baca keadaan. Persetujuan bersama tidak tercapai karena wakil pemerintah menolak.
Langkah 2 – Terapkan ayat (3). RUU berhenti pada masa sidang itu; pembahasan dapat dimulai lagi pada masa sidang lain.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — suara DPR saja tidak cukup; yang disyaratkan persetujuan bersama.
• B ✗ — MK menguji undang-undang yang sudah berlaku, bukan menengahi pembahasan RUU.
• C ✗ — DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi pembentukannya tetap memerlukan persetujuan Presiden.
• D ✗ — peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang, bukan menggantikan RUU yang gagal.
• E ✓ — sesuai bunyi ayat (3).

Jawaban: E.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: C memakai kalimat Pasal 20 ayat (1) yang benar, tetapi melupakan syarat persetujuan bersama.

No. 4 Kunci: D

Konsep: bila subjek pasal adalah **negara**, pasal itu memuat **tanggung jawab negara**. Fasilitas pelayanan umum yang **layak** berarti dapat dipakai semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Tanggung jawab itu tidak boleh dipindahkan kepada warga atau pihak lain.

Langkah 1 – Garis bawahi subjek. "Negara bertanggung jawab" → tanggung jawab negara (di sini dijalankan pemerintah daerah).
Langkah 2 – Nilai keadaan. Loket yang tidak dapat dijangkau pengguna kursi roda belum layak.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — memindahkan beban kepada warga; hak memperoleh pelayanan secara mandiri diabaikan.
• B ✗ — memindahkan tanggung jawab negara kepada pihak swasta.
• C ✗ — memindahkan biaya kepada warga yang justru berhak dilayani.
• D ✓ — negara menyediakan fasilitas yang dapat dijangkau semua warga.
• E ✗ — tanggung jawab berasal dari UUD; tidak perlu menunggu perda.

Jawaban: D.

Jebakan: A, B, dan C tampak praktis, tetapi semuanya memindahkan tanggung jawab negara ke pihak lain.

No. 5 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: DPR mempunyai **fungsi anggaran**: membahas dan menyetujui APBN bersama Presiden. Pembahasan yang alot adalah bagian wajar dari **saling mengawasi dan mengimbangi**. Pasal 7C melarang Presiden membekukan atau membubarkan DPR.

Pernyataan 1 – Salah. Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).
Pernyataan 2 – Benar. DPR menjalankan fungsi anggaran dan mengawasi usulan pemerintah.
Pernyataan 3 – Salah. Sederajat berarti tidak ada yang berkuasa sendiri; APBN memerlukan persetujuan DPR.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 membalik makna "sederajat" menjadi "boleh bertindak sendiri".

No. 6 Kunci: A

Konsep: membaca pasal dimulai dari **subjeknya**. Pasal 29 ayat (2) memakai kata **"tiap-tiap penduduk"**. Menurut Pasal 26 ayat (2), penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, hak beribadat dijamin juga bagi orang asing yang tinggal di sini.

Langkah 1 – Garis bawahi subjek. "Tiap-tiap penduduk", bukan "warga negara".
Langkah 2 – Terapkan. Pekerja asing yang tinggal di Indonesia adalah penduduk → haknya dijamin.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — sesuai subjek pasal.
• B ✗ — sebagian hak memang khusus warga negara (misalnya hak memilih), tetapi hak beribadat dijamin bagi tiap penduduk.
• C ✗ — bekerja di Indonesia tidak otomatis membuat seseorang menjadi warga negara.
• D ✗ — peraturan perusahaan tidak boleh meniadakan hak yang dijamin UUD.
• E ✗ — melebihi isi pasal: hak beribadat tidak berarti bebas meninggalkan pekerjaan tanpa izin.

Jawaban: A.

Jebakan: B menggeneralisasi bahwa semua hak dalam UUD hanya untuk warga negara. E menyetujui kesimpulan yang benar ("keliru") dengan alasan yang melebihi pasal.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 7 Kunci: A

Konsep: jenis perkara menentukan lembaga. Tindak pidana pemilu/pemilihan ditangani **Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, lalu diadili di **pengadilan**. DKPP memeriksa etik **penyelenggara**, MK memutus **perselisihan hasil**, KY menjaga perilaku **hakim**.

Langkah 1 – Tentukan pelaku dan perbuatannya. Pelaku adalah pemilih biasa; perbuatannya mencoblos dua kali dengan identitas orang lain → tindak pidana pemilihan.
Langkah 2 – Cocokkan dengan lembaga. Tindak pidana → Gakkumdu → pengadilan.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — jalur penanganan tindak pidana pemilihan.
• B ✗ — DKPP hanya memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara; Hendra bukan penyelenggara.
• C ✗ — MK memutus perselisihan hasil yang ditetapkan KPU, bukan mengadili pelaku pidana.
• D ✗ — KPU menyelenggarakan pemilihan; KPU tidak berwenang menjatuhkan pidana.
• E ✗ — KY berurusan dengan perilaku hakim, bukan pelanggaran oleh pemilih.

Jawaban: A.

Jebakan: B memakai kata "TPS" untuk menggoda: tempatnya memang dikelola penyelenggara, tetapi pelakunya bukan penyelenggara. C menggoda karena perbuatan itu memang dapat memengaruhi hasil.

No. 8 Kunci: B, D, E

Konsep: dalam satu pemilihan dapat muncul beberapa jenis perkara: **sengketa proses** (keputusan penyelenggara, misalnya pencoretan calon) → Bawaslu; **tindak pidana** pemilihan → Gakkumdu dan pengadilan; **etik penyelenggara** (KPU, Bawaslu, dan jajarannya) → DKPP; **perselisihan hasil** → MK; **perilaku hakim** → KY.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — perselisihan hasil diputus **Mahkamah Konstitusi**, bukan MA.
• B ✓ — keputusan KPU yang mencoret bakal calon adalah sengketa proses; diajukan ke Bawaslu.
• C ✗ — pemalsuan dokumen syarat calon adalah dugaan tindak pidana (Gakkumdu); DKPP hanya memeriksa penyelenggara, sedangkan calon adalah peserta.
• D ✓ — anggota Bawaslu adalah penyelenggara; keberpihakan melanggar kode etik → DKPP.
• E ✓ — perilaku hakim diawasi Komisi Yudisial.

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A menukar MA dan MK. C menggoda karena kata "syarat pencalonan" terdengar seperti urusan penyelenggara, padahal pelakunya peserta dan perbuatannya pidana.

No. 9 Kunci: B

Konsep: menurut Pasal 24C, MK berwenang **menguji undang-undang terhadap UUD**; putusannya final. Wewenang ini adalah bagian dari **saling mengawasi dan mengimbangi**: produk DPR dan Presiden diawasi lembaga peradilan. Sesudah amandemen tidak ada lembaga tertinggi; lembaga negara sederajat.

Langkah 1 – Pahami peristiwanya. Undang-undang yang dibentuk DPR bersama Presiden dibatalkan seluruhnya karena bertentangan dengan UUD.
Langkah 2 – Pahami langkah tambahan MK. MK memberlakukan kembali undang-undang lama hanya untuk mencegah kekosongan hukum, bukan membuat undang-undang baru.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — lembaga negara sederajat; MK menjalankan wewenangnya sendiri, bukan berada di atas lembaga lain.
• B ✓ — inti peristiwa: undang-undang pun tunduk pada UUD dan dapat diuji.
• C ✗ — undang-undang baru tetap dibentuk DPR bersama Presiden.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• D ✗ — putusan MK final dan mengikat sejak diucapkan.
• E ✗ — MA menguji peraturan di bawah undang-undang, bukan undang-undang.

Jawaban: B.

Jebakan: C menggoda karena MK memang "memberlakukan kembali" undang-undang lama; tetapi itu berbeda dengan menyusun undang-undang baru.

No. 10 Kunci: D

Konsep: dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung rakyat dan tidak dapat diberhentikan hanya karena kebijakannya tidak disukai parlemen. Pasal 7A membatasi **alasan** (pelanggaran hukum tertentu atau tidak memenuhi syarat). Pasal 7B mengatur **jalannya**: DPR menyatakan pendapat → **MK memeriksa dan memutus** apakah terbukti → bila terbukti, DPR meneruskan ke MPR → MPR memutus.

Langkah 1 – Uji alasannya. Kecewa terhadap kebijakan impor bukan pelanggaran hukum yang disebut Pasal 7A.
Langkah 2 – Uji jalurnya. DPR tidak dapat langsung meminta MPR; pendapat DPR harus diputus MK lebih dahulu.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — dukungan 2/3 hanyalah syarat membawa pendapat DPR ke MK; tidak menghapus syarat alasan hukum.
• B ✗ — itu gambaran sebelum amandemen (pertanggungjawaban politik kepada MPR).
• C ✗ — tidak ada mekanisme pemberhentian lewat pemilu.
• D ✓ — alasannya tidak memenuhi Pasal 7A dan jalurnya wajib melewati MK.
• E ✗ — MK hanya memutus terbukti atau tidaknya pendapat DPR; yang memutus pemberhentian adalah MPR.

Jawaban: D.

Jebakan: A memakai angka dalam Pasal 7B yang benar sehingga terlihat sah. B mengulang praktik lama sebelum Pasal 7A–7B ada.

No. 11 Kunci: E

Konsep: Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara **mengembangkan sistem jaminan sosial**; wujudnya JKN. Dalam sistem itu, hak memperoleh layanan **diimbangi kewajiban** peserta yang mampu membayar iuran, karena dananya dipakai bersama. Negara menanggung iuran warga miskin (penerima bantuan iuran), bukan seluruh biaya semua orang.

Langkah 1 – Baca isi pasal yang dikutip Pak Darto. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial; pasal tidak menyebut negara membayar semua biaya setiap orang.
Langkah 2 – Periksa kewajiban yang menyertai. Pak Darto mampu, tetapi berhenti membayar iuran.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — melebihi bunyi pasal.
• B ✗ — pajak dan iuran jaminan sosial adalah dua kewajiban yang berbeda.
• C ✗ — memindahkan seluruh tanggung jawab ke pribadi; negara tetap bertanggung jawab mengembangkan sistemnya.
• D ✗ — JKN berlaku bagi seluruh penduduk, bukan hanya pegawai negeri.
• E ✓ — hak dan kewajiban berpasangan dalam sistem jaminan sosial.

Jawaban: E.

Jebakan: A melebihi bunyi pasal; C kebalikannya, menghapus tanggung jawab negara. Keduanya ekstrem.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 12 Kunci: E

Konsep: empat pokok pikiran Pembukaan: persatuan, **keadilan sosial**, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ditentukan dari **inti tujuan kebijakan**, bukan dari dampak sampingnya. Keadilan sosial berarti setiap orang memperoleh kesempatan dan kebutuhan dasarnya, bukan pembagian sama rata.

Langkah 1 – Rumuskan inti kebijakan. Kapal bersubsidi dijalankan agar harga kebutuhan pokok di pulau terpencil terjangkau.
Langkah 2 – Cocokkan. Mengurangi ketimpangan akses kebutuhan pokok antarwilayah = keadilan sosial.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — kapal memang menghubungkan pulau, tetapi ilustrasi menyebut tujuan kebijakan adalah harga yang terjangkau; itu dampak lanjutan.
• B ✗ — ilustrasi tidak menyebut pemungutan suara.
• C ✗ — alasan moral itu terlalu umum dan tidak menunjuk inti masalah, yaitu ketimpangan harga.
• D ✗ — keadilan bukan harga sama persis yang diwajibkan; lagi pula itu bukan isi kebijakan.
• E ✓ — kebijakan membuka kesempatan yang lebih adil bagi warga di wilayah yang tertinggal.

Jawaban: E.

Jebakan: A menyebut dampak yang benar, tetapi bukan tujuan utama kebijakan. D menyamakan keadilan dengan sama rata.

No. 13 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: hubungan keuangan pusat–daerah memakai transfer ke daerah. **Dana Bagi Hasil (DBH)**: bagian daerah dari penerimaan negara tertentu, misalnya hasil sumber daya alam di wilayahnya. **Dana Alokasi Umum (DAU)**: pemerataan kemampuan keuangan; daerah yang pendapatannya kecil menerima lebih banyak. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**: untuk kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional.

Pernyataan 1 – Benar. Daerah penghasil ikut menikmati hasil kekayaan di wilayahnya → DBH.
Pernyataan 2 – Benar. Dana umum yang lebih besar bagi daerah berpendapatan kecil = DAU untuk pemerataan.
Pernyataan 3 – Salah. Dana untuk puskesmas sesuai prioritas nasional adalah DAK; penggunaannya terikat pada kegiatan yang ditentukan.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menyamakan dana transfer khusus dengan dana bebas.

No. 14 Kunci: C

Konsep: alinea kedua memuat cita-cita nasional: **merdeka** (bebas dari penjajahan), **bersatu** (utuh), **berdaulat** (menentukan sendiri hukum dan kebijakannya tanpa didikte pihak lain), **adil**, dan **makmur**.

Langkah 1 – Cari inti sikap. Pemerintah menolak syarat mengubah undang-undang sesuai kehendak pemberi pinjaman.
Langkah 2 – Cocokkan. Hak menentukan isi undang-undang sendiri = berdaulat.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — berlebihan: pemerintah tidak menolak semua kerja sama luar negeri, hanya syarat yang mendikte undang-undang. Lagi pula itu bukan makna "merdeka".
• B ✗ — ilustrasi tidak membicarakan bunga pinjaman.
• C ✓ — menolak didikte dalam membuat undang-undang adalah wujud kedaulatan.
• D ✗ — keseragaman aturan bagi pekerja tidak menjadi inti sikap pemerintah.
• E ✗ — pernyataannya benar sebagai fakta sejarah, tetapi tidak menjelaskan sikap dalam ilustrasi.

Jawaban: C.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: "merdeka" dan "berdaulat" mirip. Merdeka menyangkut bebas dari penjajahan; berdaulat menyangkut kewenangan menentukan hukum dan kebijakan sendiri. E benar tetapi tidak menjawab.

No. 15 Kunci: B, D

Konsep: kerja sama pusat–daerah dilakukan karena **keunggulan yang saling melengkapi**: pusat menetapkan kebijakan, standar, dan sebagian dana agar layanan merata; daerah paling dekat dengan warga sehingga tahu siapa yang membutuhkan dan cara yang cocok. Perumahan rakyat adalah urusan **konkuren** wajib pelayanan dasar.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — benar sebagai kegiatan, tetapi hanya menyebut **isi program**, bukan alasan kerja sama.
- B ✓ — kedekatan daerah dengan warga adalah alasan pusat membutuhkan daerah.
- C ✗ — kerja sama tidak berarti pusat lepas tangan; ilustrasi justru menyebut daerah melaporkan hasil.
- D ✓ — standar nasional adalah alasan daerah membutuhkan pusat.
- E ✗ — perumahan rakyat urusan konkuren, bukan absolut; daerah bahkan menambah dana sendiri.

Jawaban: B dan D.

Jebakan: A meniru pola pengecoh soal "alasan kerja sama": kalimatnya benar dan konkret, tetapi tidak menjawab "mengapa".

No. 16 Kunci: B, C, E

Konsep: alur peradilan pidana: laporan → penyelidikan dan **penyidikan oleh polisi** → **penuntutan oleh jaksa** → pemeriksaan dan **putusan oleh hakim**. Lembaga lain melengkapi sesuai bidangnya: KPK untuk perkara **korupsi**, Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM, **LPSK** untuk perlindungan saksi dan korban.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — KPK menangani korupsi; penipuan oleh warga biasa bukan korupsi, sebesar apa pun kerugiannya.
- B ✓ — tugas penyidik kepolisian.
- C ✓ — tugas penuntutan oleh kejaksaan.
- D ✗ — yang memutus bersalah atau tidak adalah hakim pengadilan.
- E ✓ — saksi yang diancam dapat dilindungi LPSK.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A memakai ukuran "kerugian besar", padahal wewenang KPK ditentukan jenis perkaranya (korupsi). D menyebut lembaga yang benar-benar ada, tetapi tugasnya tertukar dengan pengadilan.

No. 17 Kunci: A

Konsep: agama termasuk **urusan absolut** pemerintah pusat. Pusat dapat menjalankannya melalui **instansi vertikal** (kantor kementerian di daerah) menurut asas dekonsentrasi; urusannya tetap milik pusat walaupun kantornya berada di daerah. Asas ditentukan oleh pemilik urusan, bukan lokasi kantor.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Langkah 1 – Tentukan pemilik urusan. Kantor urusan agama adalah bagian Kementerian Agama → urusan pusat.
Langkah 2 – Tentukan jalur keluhan. Pembinaan dan penggantian pejabatnya menjadi wewenang kementerian.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — instansi vertikal menjalankan urusan pusat; keluhan diarahkan ke kementerian.
• B ✗ — lokasi kantor tidak menentukan pemilik urusan.
• C ✗ — perda hanya mengatur urusan yang menjadi kewenangan daerah.
• D ✗ — daerah tidak dapat mengambil alih urusan absolut, apa pun alasannya.
• E ✗ — pelayanan pencatatan nikah adalah pelayanan negara; warga berhak mengadu.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan D sama-sama memakai alasan "di wilayah kabupaten"; lokasi kantor dikira penentu kewenangan.

No. 18 Kunci: D

Konsep: otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya, **kecuali** urusan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan pusat (Pasal 18 ayat 5). Moneter dan fiskal nasional termasuk **urusan absolut**: tidak ada daerah yang boleh membuat alat pembayaran sendiri.

Langkah 1 – Tentukan urusannya. Alat pembayaran pengganti rupiah = urusan moneter.
Langkah 2 – Periksa pemiliknya. Moneter = urusan absolut pusat.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — "seluas-luasnya" tetap dikecualikan untuk urusan pusat.
• B ✗ — persetujuan DPRD tidak membuat daerah berwenang atas urusan absolut.
• C ✗ — berlaku terbatas di satu wilayah tetap berarti membuat alat pembayaran sendiri.
• D ✓ — moneter adalah urusan absolut pusat.
• E ✗ — penguatan usaha kecil termasuk urusan konkuren yang boleh dijalankan daerah; yang salah adalah caranya.

Jawaban: D.

Jebakan: E menolak rencana dengan alasan yang keliru. A memakai bunyi Pasal 18 tanpa pengecualiannya.

No. 19 Kunci: C

Konsep: ukurannya adalah **apa yang diuji dan terhadap apa**. Undang-undang yang dipersoalkan terhadap UUD → **MK** (Pasal 24C). Peraturan di bawah undang-undang yang dipersoalkan terhadap undang-undang → **MA** (Pasal 24A).

Langkah 1 – Aturan pertama. Undang-undang diuji terhadap UUD → MK.
Langkah 2 – Aturan kedua. Peraturan menteri (di bawah undang-undang) diuji terhadap undang-undang → MA.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — MK tidak menguji peraturan menteri.
• B ✗ — wewenang kedua mahkamah tertukar.
• C ✓ — masing-masing aturan diuji ke lembaga yang berwenang.
• D ✗ — MA memang puncak peradilan umum, agama, militer, dan TUN, tetapi tidak menguji undang-undang terhadap UUD.
• E ✗ — DPR dapat mengubah undang-undang lewat jalur politik, tetapi itu bukan pengujian hukum; peraturan menteri juga bukan buatan DPR.

Jawaban: C.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: B dan C hanya berbeda urutan lembaga; siswa yang menghafal "MA dan MK menguji peraturan" tanpa ukuran "terhadap apa" mudah tertukar. A menggoda karena menyebut "hak konstitusional".

No. 20 Kunci: A

Konsep: upaya **preventif** mencegah sebelum pelanggaran terjadi (layanan daring, laporan harta, keterbukaan tarif). Upaya **represif** menindak setelah pelanggaran terjadi (penyidikan, penuntutan, putusan). **Keadilan restoratif** memulihkan keadaan dengan melibatkan pelaku dan korban.

Langkah 1 – Lihat waktu tindakan. Semua langkah dilakukan sebelum ada pelanggaran.
Langkah 2 – Lihat tujuannya. Mengurangi pertemuan tatap muka dan membuka informasi → mempersempit peluang suap.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — jenis dan alasannya tepat.
• B ✗ — tidak ada penindakan dalam ilustrasi.
• C ✗ — melaporkan harta bukan proses peradilan.
• D ✗ — jenisnya benar (preventif), tetapi alasannya adalah ciri represif.
• E ✗ — tidak ada pertemuan pelaku dan korban.

Jawaban: A.

Jebakan: D memasangkan nama jenis yang benar dengan alasan yang salah.

No. 21 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: konstitusi ada yang tertulis (UUD) dan ada yang tidak tertulis, yaitu **konvensi**: kebiasaan ketatanegaraan yang dijalankan terus-menerus dan diterima sebagai aturan. Konvensi **melengkapi** UUD dan tidak boleh bertentangan dengannya, karena kedudukan UUD paling tinggi.

Pernyataan 1 – Benar. Pidato kenegaraan tidak diwajibkan pasal mana pun, tetapi dijalankan terus dan diterima; itulah konvensi.
Pernyataan 2 – Salah. Tidak tertulis tidak sama dengan melanggar. Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan pasal mana pun.
Pernyataan 3 – Salah. UUD berkedudukan paling tinggi; kebiasaan yang bertentangan dengannya tidak dapat didahulukan.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 menyamakan "tidak tertulis" dengan "melanggar"; pernyataan 3 membalik urutan kedudukan UUD dan kebiasaan.

No. 22 Kunci: A, D, E

Konsep: sejak 1999 disepakati Pembukaan **tidak diubah** karena (1) memuat dasar negara Pancasila, (2) memuat pernyataan kemerdekaan dan tujuan negara, dan (3) merupakan kesepakatan bersama seluruh golongan pada 1945. Pembukaan berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Perubahan zaman dijawab dengan pasal-pasal dan undang-undang.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — Pembukaan memuat dasar negara; mengubahnya mengubah fondasi seluruh hukum.
• B ✗ — Pasal 37 mengatur perubahan **pasal-pasal**; Pembukaan bukan pasal dan disepakati tidak diubah.
• C ✗ — kebalikannya: Pembukaan adalah norma paling dasar, bukan sekadar kata pengantar.
• D ✓ — itulah yang dilakukan, misalnya hak asasi dirinci dengan menambah Pasal 28A–28J.
• E ✓ — Pembukaan lahir dari kompromi; membukanya kembali dapat memecah persatuan.

Jawaban: A, D, dan E.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: B memakai prosedur Pasal 37 yang benar untuk bagian yang tidak diatur olehnya. C merendahkan kedudukan Pembukaan.

No. 23 Kunci: C

Konsep: dalam negara hukum (Pasal 1 ayat 3), kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan **penguasa pun tunduk pada hukum**. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) dapat diperjuangkan melalui pengadilan; putusan tetap perlu dilaksanakan dan dikawal.

Langkah 1 – Pahami peristiwa. Warga menggugat pejabat negara; pengadilan di tiga tingkat menyatakan pemerintah lalai.
Langkah 2 – Hubungkan dengan asas. Jabatan tidak membuat seseorang kebal hukum; warga memakai jalur hukum yang sah.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — praduga tak bersalah adalah asas perkara pidana; gugatan perdata yang diputus pengadilan tidak melanggarnya.
• B ✗ — putusan memerintahkan langkah pengendalian pencemaran, bukan memberhentikan pejabat.
• C ✓ — negara tunduk pada hukum dan hak warga dipulihkan lewat pengadilan.
• D ✗ — putusan harus dilaksanakan; masalahnya tidak selesai dengan sendirinya.
• E ✗ — gugatan ke pengadilan tidak mensyaratkan unjuk rasa lebih dahulu.

Jawaban: C.

Jebakan: D melebih-lebihkan akibat putusan. A memakai asas yang benar untuk jenis perkara yang salah.

No. 24 Kunci: C

Konsep: Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi **setiap orang**. Aksi damai adalah salah satu saluran kedaulatan rakyat di luar pemilu, dengan batas Pasal 28J ayat (2): menghormati hak orang lain dan ketertiban umum.

Langkah 1 – Kenali hak yang dipakai. Pelajar menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan siap berdialog.
Langkah 2 – Nilai pendapat guru. Hak berpendapat tidak bergantung pada usia memilih.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — hak memilih dan hak berpendapat berbeda; berpendapat dijamin bagi setiap orang.
• B ✗ — membatasi kritik demi stabilitas adalah ciri yang ingin dicegah amandemen.
• C ✓ — aksi damai yang tertib adalah partisipasi yang dijamin UUD.
• D ✗ — kebebasan tetap dibatasi hukum (Pasal 28J ayat 2).
• E ✗ — menghentikan sendiri kegiatan orang lain adalah main hakim sendiri.

Jawaban: C.

Jebakan: D dan E sama-sama menolak pendapat guru, tetapi alasannya berlebihan.

No. 25 Kunci: D

Konsep: sebelum mengubah UUD pada 1999–2002, MPR menyepakati lima kesepakatan dasar, antara lain **tidak mengubah Pembukaan** dan melakukan perubahan dengan cara **adendum**: perubahan ditambahkan pada naskah asli (pasal sisipan seperti 6A, 7A, 28A–28J), bukan menulis ulang dari awal.

Langkah 1 – Cari padanan Pembukaan. Mukadimah anggaran dasar memuat tujuan berdirinya forum, sama seperti Pembukaan memuat tujuan negara.
Langkah 2 – Cari padanan adendum. Naskah lama tetap menjadi dasar; perubahan berupa pasal tambahan.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — menulis ulang seluruh naskah adalah penggantian, bukan amandemen dengan adendum.
• B ✗ — perubahan UUD diputuskan dalam sidang MPR, bukan diserahkan kepada satu orang.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✗ — kebalikan kesepakatan dasar: Pembukaan justru tidak diubah.
• D ✓ — mukadimah dipertahankan dan perubahan ditambahkan pada naskah lama, sama dengan cara adendum.
• E ✗ — menghapus mukadimah berarti menghilangkan bagian yang memuat tujuan dan arah organisasi.

Jawaban: D.

Jebakan: C terdengar modern ("mengikuti zaman"), padahal yang disesuaikan dengan zaman adalah pasal-pasal, bukan bagian yang memuat tujuan dasar. A menyamakan amandemen dengan mengganti naskah.

No. 26 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: Pasal 30 memuat **hak sekaligus kewajiban** ("berhak dan wajib"). Usaha pertahanan dan keamanan dijalankan dengan sistem rakyat semesta: TNI dan Polri sebagai **kekuatan utama**, rakyat sebagai **kekuatan pendukung**. Warga ikut serta tanpa mengambil alih tugas aparat dan tanpa melanggar hukum.

Pernyataan 1 – Benar. Melapor kepada polisi adalah cara warga ikut menjaga keamanan.
Pernyataan 2 – Salah. Membobol akun dan menyebarkan identitas orang adalah pelanggaran hukum dan main hakim sendiri.
Pernyataan 3 – Benar. Rakyat adalah kekuatan pendukung; penindakan tetap tugas Polri.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memakai kata "berhak" dari pasal untuk membenarkan tindakan yang melampaui peran warga.

No. 27 Kunci: A, C, E

Konsep: Pasal 27 ayat (1) memuat **hak** (kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan) sekaligus **kewajiban** (menjunjung hukum dan pemerintahan) yang berlaku **tanpa kecuali**. Persamaan kedudukan tidak sama dengan perlakuan seragam: perlakuan khusus bagi kelompok rentan dibenarkan agar mereka memperoleh kesempatan yang sama (Pasal 28H ayat 2).

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — keistimewaan karena hubungan kerabat melanggar persamaan kedudukan.
• B ✗ — loket prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas adalah perlakuan khusus yang sah, bukan keistimewaan.
• C ✓ — menyuap agar didahulukan berarti tidak menjunjung hukum.
• D ✗ — "tidak ada kecualinya": pejabat pun terikat.
• E ✓ — kewajiban berlaku bagi petugas dan warga.

Jawaban: A, C, dan E.

Jebakan: B menyamakan persamaan kedudukan dengan sama rata. D memberi pengecualian yang justru ditolak bunyi pasal.

No. 28 Kunci: E

Konsep: sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan empat gejala yang melemahkan demokrasi: kekuasaan terpusat, masa jabatan tanpa batas, pendapat dibungkam, dan pemilu tanpa pilihan nyata. Pada masa Orde Baru, pemilu rutin diadakan, tetapi kritik dibatasi dan kekuasaan tidak diawasi sehingga KKN berkembang. Amandemen menjawabnya dengan pembatasan masa jabatan (Pasal 7) dan jaminan kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat 3).

Langkah 1 – Kenali ciri usul. Menjabat lama + tanpa kritik + pemilu rutin.
Langkah 2 – Cocokkan dengan sejarah. Ciri itu pernah ada dan berakibat pemusatan kekuasaan.
Langkah 3 – Analisis opsi:

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- A ✗ — melihat satu sisi (pembangunan) dan mengabaikan akibat lemahnya pengawasan.
- B ✗ — pemilu rutin tidak cukup bila pilihan dan kritik dibatasi; Orde Baru buktinya.
- C ✗ — berlebihan: demokrasi tidak melarang pemimpin yang kuat, tetapi menuntut kekuasaannya dibatasi dan diawasi.
- D ✗ — keliru: kabinet yang jatuh bangun justru kelemahan masa parlementer.
- E ✓ — menolak dengan alasan yang sesuai pelajaran sejarah.

Jawaban: E.

Jebakan: B menggoda karena "pemilu rutin" terdengar demokratis. C dan D sama-sama menolak, tetapi dengan alasan yang salah.

No. 29 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: Pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman **merdeka**: hakim memutus berdasarkan hukum dan bukti, tidak boleh ditekan siapa pun, baik pejabat maupun massa. Menyampaikan pendapat secara damai tetap dijamin (Pasal 28E ayat 3), selama tidak memaksa hakim atau mengganggu jalannya sidang.

Pernyataan 1 – Salah. Putusan didasarkan pada hukum dan bukti, bukan jumlah orang yang berunjuk rasa.
Pernyataan 2 – Benar. Campur tangan pejabat merusak kemerdekaan hakim; lagi pula semua orang sama di hadapan hukum.
Pernyataan 3 – Benar. Unjuk rasa damai adalah hak, dengan batas tidak memaksa hakim.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan keadilan dengan suara terbanyak.

No. 30 Kunci: B

Konsep: kedaulatan rakyat tidak berhenti di pemilu. Pembentukan peraturan harus memenuhi **partisipasi yang bermakna**: hak untuk **didengar**, **dipertimbangkan**, dan **mendapat penjelasan**. Mengumumkan rancangan secara mendadak atau sosialisasi setelah keputusan jadi hanyalah partisipasi formal.

Langkah 1 – Periksa waktu. Naskah diunggah sehari sebelum disahkan → warga tidak sempat memberi masukan.
Langkah 2 – Periksa sosialisasi. Diadakan setelah perda disahkan → pendapat warga tidak lagi dapat dipertimbangkan.
Langkah 3 – Analisis opsi:
- A ✗ — wakil rakyat yang dipilih tetap wajib membuka partisipasi; pemilu tidak menggantikannya.
- B ✓ — ketiga unsur partisipasi bermakna tidak terpenuhi.
- C ✗ — diumumkan tanpa waktu yang cukup bukan partisipasi.
- D ✗ — berlebihan: partisipasi bermakna tidak berarti persetujuan seluruh warga.
- E ✗ — sosialisasi setelah keputusan adalah pemberitahuan, bukan partisipasi.

Jawaban: B.

Jebakan: C dan E menyebut kegiatan yang memang terjadi, tetapi bentuknya formal. D menolak proses itu dengan syarat yang berlebihan.

Latihan sub bab 3.1

No. 1 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: toleransi aktif berarti menghormati perbedaan sekaligus ikut menciptakan suasana yang mendukung dan menjalin kerja sama. Batasnya: **tidak mencampuradukkan keyakinan**. Bhinneka Tunggal Ika berarti perbedaan diakui dan ada kebersamaan, bukan perbedaan dihapus.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pernyataan 1 – Benar. Istiqlal tidak sekadar membiarkan perayaan Natal (toleransi pasif), tetapi ikut memudahkan umat Katolik beribadah.
Pernyataan 2 – Salah. Menghormati ibadah orang lain tidak berarti ikut menjalankannya; itu justru mencampuradukkan keyakinan.
Pernyataan 3 – Salah. Terowongan itu disebut tempat dialog dan perjumpaan: dua rumah ibadah tetap berbeda, tetapi saling terhubung.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 dan 3 sama-sama memaknai kebersamaan sebagai "menjadi sama", padahal kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika tetap mengakui perbedaan.

No. 2 Kunci: D

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika menuntut **dua syarat sekaligus**: perbedaan **diakui** dan ada **kebersamaan**. Menghapus semua tanda perbedaan atau membiarkan setiap kelompok berjalan sendiri belum memenuhi kedua syarat itu, walaupun tidak ada pertengkaran.

Analisis opsi:
• A ✗ — tidak bertengkar belum berarti bersatu; kata "tidak akan pernah" juga berlebihan.
• B ✗ — menyamakan dua cara yang berbeda; cara pertama menghilangkan pengakuan sekaligus perjumpaan.
• C ✗ — alasan keliru: ilustrasi menyebut ibadah tetap dijalankan pemeluknya; mewajibkan ikut ibadah agama lain adalah mencampuradukkan keyakinan.
• D ✓ — setiap agama tetap diakui (bhinneka), dan siswa lintas agama bekerja sama sebagai panitia (tunggal ika).
• E ✗ — berlebihan; konstitusi justru menjamin kebebasan beragama, dan sekolah dapat menjadi tempat belajar saling menghormati.

Jawaban: D.

Jebakan: C memilih cara yang benar dengan alasan yang salah. A dan E tampak "aman", tetapi memaknai kerukunan sebagai menghindari perbedaan.

Latihan sub bab 3.2

No. 1 Kunci: C

Konsep: sikap positif yang menjadi modal sosial adalah sikap yang **membuka diri** kepada orang dari latar berbeda dan **memperkuat hubungan** dengannya. Periksa dua hal: **arah** sikap (memperluas hubungan atau menutup diri) dan **tujuan**nya.

Analisis opsi:
• A ✗ — sikapnya baik, tetapi tujuannya mencari penilaian, bukan membangun hubungan.
• B ✗ — hanya menguatkan ikatan sesama daerah (modal sosial pengikat) dan memisahkan siswa pindahan dari teman barunya.
• C ✓ — membuka diri, membangun jaringan dan kepercayaan, serta saling mengenal budaya.
• D ✗ — menuntut penyeragaman; perbedaan logat tidak perlu dihapus.
• E ✗ — pasif; tidak mengganggu, tetapi tidak membangun hubungan apa pun.

Jawaban: C.

Jebakan: A tampak sopan, tetapi tujuannya keliru. B beralasan baik ("cepat nyaman"), tetapi arahnya menutup diri.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 2 Kunci: A, C

Konsep: keragaman **tidak otomatis** menjadi modal sosial. Ia menjadi modal sosial bila dikelola: ada **kesederajatan** (setiap kelompok terwakili dan didengar), perjumpaan, dan **kepercayaan**. Bila satu kelompok mendominasi dan pengelolaan tertutup, keragaman menjadi beban.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — modal awal hampir sama, tetapi hasilnya berbeda karena ada atau tidak adanya rasa percaya antarkelompok.

• B ✗ — memperparah penyebab macet di ilustrasi: kepengurusan dari satu kelompok membuat warga lain curiga.

• C ✓ — kesederajatan dalam kepengurusan dan keterbukaan menjawab langsung penyebab kecurigaan.

• D ✗ — menyalahkan keragaman; masalahnya ada pada cara mengelola, bukan pada keragamannya.

• E ✗ — modal uang adalah modal ekonomi; ilustrasi justru menunjukkan modal yang sama memberi hasil berbeda.

Jawaban: A dan C.

Jebakan: B terdengar efisien ("keputusan cepat"), tetapi melanggar kesederajatan. Jangan menebak jumlah jawaban: nilai setiap pernyataan dengan ukuran yang sama.

Latihan sub bab 3.3

No. 1 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: gotong royong memenuhi prinsip **adil** (berkontribusi sesuai kemampuan, tidak harus sama bentuknya), **musyawarah** (cara dan pembagian disepakati bersama), dan **terbuka** (pengelolaan dana dapat diketahui semua).

Pernyataan 1 – Benar. Adil tidak berarti semua menyumbang hal yang sama; tanah, tenaga, dan uang sama-sama sumbangan.

Pernyataan 2 – Salah. Jadwal diputuskan dalam rapat warga; sumbangan terbesar tidak memberi hak memutuskan sendiri.

Pernyataan 3 – Benar. Dana bersama yang tidak dilaporkan melanggar prinsip terbuka dan dapat merusak kepercayaan.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memakai besarnya sumbangan sebagai alasan untuk mengambil keputusan sepihak.

No. 2 Kunci: A

Konsep: gotong royong harus memenuhi lima prinsip **sekaligus**. Salah satunya **kepentingan bersama** yang **dibenarkan hukum dan moral**. Kerja bersama untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain adalah **kebersamaan untuk menyimpang**, walaupun cara kerjanya rapi, sukarela, dan terbuka.

Analisis opsi:

• A ✓ — sambungan liar adalah pengambilan air tanpa hak; warga lain dan pelanggan yang membayar dirugikan.

• B ✗ — musyawarah dan sumbangan sesuai kemampuan memang terpenuhi, tetapi tujuannya menyimpang; satu prinsip yang dilanggar sudah cukup.

• C ✗ — "kepentingan bersama" hanya bagi satu permukiman, sedangkan warga lain dirugikan.

• D ✗ — alasan keliru: perbuatan melanggar hukum tetap salah walaupun dimusyawarahkan dengan siapa pun.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• E ✗ — kerja warga sendiri tanpa tukang justru ciri gotong royong; alasan ini tidak menyentuh masalahnya.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan C memakai prinsip gotong royong yang memang terpenuhi untuk membungkus tujuan yang melanggar hukum. D menolak kegiatan itu dengan alasan yang salah.

Latihan sub bab 3.4

No. 1 Kunci: A

Konsep: akar ketegangan ini adalah **kesenjangan** dan **rasa diperlakukan tidak adil**, yang lalu memicu ujaran kebencian. Upaya yang baik bersifat **dialogis**: mempertemukan pihak-pihak, menyentuh akar masalah, adil bagi semua, dan tidak memisahkan atau menyeragamkan kelompok.

Analisis opsi:

• A ✓ — dialog mempertemukan semua pihak; pelatihan dan rekrutmen yang adil menjawab kesenjangan keterampilan dan rasa tidak adil.

• B ✗ — diskriminasi terhadap pendatang; memindahkan ketidakadilan ke pihak lain.

• C ✗ — represif; gejala ditekan, akarnya tetap ada.

• D ✗ — menyasar hal lain; uang tunai tidak memberi keterampilan dan tidak memperbaiki perekrutan.

• E ✗ — menuntut asimilasi; integrasi tidak menghapus identitas kelompok.

Jawaban: A.

Jebakan: B tampak membela warga setempat, tetapi menimbulkan diskriminasi baru. D tampak dermawan, tetapi tidak menyentuh akar.

No. 2 Kunci: B, C, E

Konsep: integrasi nasional menyatukan berbagai kelompok menjadi satu bangsa dengan **tetap mengakui identitas** masing-masing. Integrasi berbeda dari **asimilasi** (budaya asal hilang dan melebur). Perpaduan budaya yang melahirkan bentuk baru tanpa menghilangkan ciri asal disebut **akulturasi**. Faktor pendorongnya antara lain bahasa Indonesia dan perjumpaan antarwarga.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — itu asimilasi paksa; ilustrasi justru menunjukkan tradisi tetap dirayakan.

• B ✓ — bahasa persatuan memungkinkan warga berbeda asal saling memahami dan bekerja sama.

• C ✓ — perpaduan budaya yang melahirkan bentuk baru tanpa menghapus ciri asal.

• D ✗ — tidak bertikai belum berarti terintegrasi; integrasi memerlukan hubungan dan kerja sama.

• E ✓ — berdagang bersama dan saling menghadiri perayaan memperkuat ikatan tanpa penyeragaman.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A menyamakan integrasi dengan asimilasi. D menyamakan "tidak bertikai" dengan bersatu.

Kuis Akhir Bab 3

No. 1 Kunci: D

Konsep: modal sosial = **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma timbal balik** yang memudahkan kerja sama. Modal sosial berbeda dari modal ekonomi (uang), modal fisik (bangunan, alat), modal manusia (keahlian), dan manfaat citra (pengakuan).

Langkah 1 – Cari unsur hubungan antarwarga. Kelompok mengelola dana bersama (perlu saling percaya), menentukan urutan bersama, dan bergiliran bekerja (norma timbal balik).

Langkah 2 – Analisis opsi:

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- A ✗ — dana hibah = modal ekonomi.
- B ✗ — rumah tahan gempa = modal fisik (hasil pembangunan).
- C ✗ — keahlian fasilitator = modal manusia.
- D ✓ — kepercayaan dan norma saling membantu di antara anggota kelompok.
- E ✗ — manfaat citra; lagi pula tidak disebut di ilustrasi.

Jawaban: D.

Jebakan: A menggoda karena tanpa dana rumah tidak terbangun, tetapi dana bukan modal **sosial**. Cara kelompok mengelola dana itulah yang memerlukan modal sosial.

No. 2 Kunci: C

Konsep: keragaman **tidak otomatis** menjadi modal ataupun beban. Ia menjadi **modal sosial** bila dikelola (perjumpaan rutin, kesederajatan, kolaborasi, saling menghormati) dan menjadi beban bila kelompok hidup terpisah dan saling curiga.

Analisis opsi:

- A ✗ — menyalahkan keragaman; kata "selalu" berlebihan.
- B ✗ — kesimpulan diskriminatif dari pendapat yang keliru.
- C ✓ — menilai pendapat itu dengan syarat yang benar.
- D ✗ — sama-sama menilai "kurang tepat", tetapi alasannya juga berlebihan: keragaman tidak dengan sendirinya menjadi modal.
- E ✗ — mengabaikan peran modal sosial; anggaran bukan satu-satunya penentu.

Jawaban: C.

Jebakan: D adalah kebalikan A; keduanya sama-sama menganggap akibat keragaman terjadi dengan sendirinya.

No. 3 Kunci: B, C, E

Konsep: modal sosial pengikat = ikatan erat di dalam kelompok yang mirip; **modal sosial penghubung** = ikatan yang menjembatani kelompok yang berbeda. Pembangunan yang melibatkan banyak kelompok paling membutuhkan modal sosial penghubung. Keduanya baik; masalah muncul bila ikatan pengikat membuat kelompok menutup diri.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — keragaman tidak otomatis menjadi modal; ilustrasi justru menyebut antarpaguyuban tidak bekerja sama.
- B ✓ — saling membantu antaranggota adalah modal sosial pengikat yang nyata manfaatnya.
- C ✓ — yang belum ada adalah jembatan antarkelompok (modal sosial penghubung).
- D ✗ — membubarkan paguyuban menghapus identitas dan ikatan yang bermanfaat; itu penyeragaman.
- E ✓ — batas ikatan pengikat: menjadi beban bila kelompok menutup diri.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A memakai kata "solid" yang benar untuk tiap paguyuban, lalu menyimpulkan berlebihan untuk seluruh kota. D tampak tegas demi persatuan, tetapi menghapus keragaman.

No. 4 Kunci: C

Konsep: toleransi pasif = membiarkan dan tidak mengganggu; **toleransi aktif** = menghormati perbedaan sekaligus ikut menciptakan suasana yang mendukung. Batas keduanya: **tidak mencampuradukkan keyakinan**, yaitu tidak ikut menjalankan ibadah agama lain.

Analisis opsi:

- A ✗ — ikut memimpin ritual agama lain berarti mencampuradukkan keyakinan; itu melewati batas toleransi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• B ✗ — sikap yang baik, tetapi baru toleransi **pasif** (tidak mengganggu); belum ikut mendukung.
• C ✓ — mendukung kelancaran perayaan umat lain tanpa ikut beribadah: toleransi aktif.
• D ✗ — membatasi hak umat lain merayakan hari besarnya; justru tidak toleran.
• E ✗ — menggabungkan perayaan berbagai agama menghapus kekhasan tiap agama (mencampur sekaligus menyeragamkan).

Jawaban: C.

Jebakan: A terdengar paling akrab, padahal ikut menjalankan ritual agama lain bukan toleransi. B benar sebagai sikap, tetapi yang ditanyakan toleransi **aktif**.

No. 5 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: identitas berlapis: seseorang dapat sekaligus orang Sasak, warga sebuah kota, dan orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika tidak menuntut identitas daerah dihapus.

Pernyataan 1 – Salah. Menghapus identitas suku sama dengan penyeragaman; rasa kebangsaan tidak bertentangan dengan rasa kedaerahan.
Pernyataan 2 – Benar. Identitas daerah adalah lapisan dari identitas nasional.
Pernyataan 3 – Benar. Yang mengancam persatuan adalah sikap merendahkan kelompok lain, bukan menyebut asal suku.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 terdengar nasionalis, tetapi menyamakan persatuan dengan menghapus perbedaan.

No. 6 Kunci: B

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika = perbedaan **diakui** sekaligus ada **kebersamaan**. Kompak tidak harus seragam.

Analisis opsi:
• A ✗ — kemeriahan dan penonton adalah manfaat lain, bukan alasan sesuai semboyan.
• B ✓ — budaya setiap keluarga tampil (bhinneka), dan semua merayakan kemerdekaan bersama (tunggal ika).
• C ✗ — berbaris terpisah menurut suku memisahkan warga; kebersamaan justru hilang.
• D ✗ — mengubah pawai menjadi ajang membandingkan jumlah; bertentangan dengan kesetaraan.
• E ✗ — menolak pendapat orang lain dengan cap negatif bukan sikap menghargai perbedaan.

Jawaban: B.

Jebakan: A benar sebagai akibat, tetapi tidak menjelaskan kesesuaian dengan semboyan.

No. 7 Kunci: A

Konsep: modal sosial = **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma timbal balik** antarkelompok yang memudahkan kerja sama.

Analisis opsi:
• A ✓ — meminjamkan alat tanpa jaminan (kepercayaan) dan bergiliran menjaga irigasi (norma), dilakukan lintas suku.
• B ✗ — manfaat citra.
• C ✗ — hasil panen dan bantuan bibit = modal ekonomi.
• D ✗ — jalan dan gedung = modal fisik.
• E ✗ — jumlah penduduk baru **potensi**; belum menunjukkan kerja sama.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan C adalah tanda desa yang maju, tetapi kemajuan itu tidak sama dengan modal sosial.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 8 Kunci: E

Konsep: sebuah kegiatan memperkukuh persatuan karena apa yang terjadi **di antara manusianya**: bertemu, saling mengenal, prasangka berkurang, bekerja sama, lalu tumbuh rasa memiliki. Manfaat lain (popularitas, penghasilan, pelestarian) nyata, tetapi tidak menjelaskan persatuan.

Analisis opsi:

- A ✗ — popularitas; tidak menunjukkan hubungan antaranggota yang menguat.
- B ✗ — manfaat ekonomi.
- C ✗ — manfaat pelestarian budaya; penting, tetapi bidangnya lain.
- D ✗ — keliru: kebersamaan tidak menuntut perbedaan agama dihapus atau ajaran disamakan.
- E ✓ — pertemuan rutin, termasuk di tempat milik komunitas lain, menumbuhkan saling kenal dan saling menghargai.

Jawaban: E.

Jebakan: C paling menggoda karena lagu daerah memang bagian dari kebinekaan, tetapi yang ditanyakan alasan **persatuan**. D menyamakan kebersamaan dengan menghapus perbedaan.

No. 9 Kunci: A, C, D

Konsep: sikap positif yang menjadi modal sosial adalah sikap yang **membuka diri** dan **memperkuat hubungan** dengan kelompok lain. Periksa dua hal: **arahnya** (memperluas hubungan atau hanya ke kelompok sendiri) dan **tujuannya** (memperkuat hubungan atau sekadar terlihat baik).

Periksa setiap pernyataan:

- A ✓ — menepati janji kepada semua orang menumbuhkan **kepercayaan**.
- B ✗ — tampak sopan, tetapi tujuannya hanya penilaian; hubungan tidak benar-benar diperkuat.
- C ✓ — mau mengenal budaya rekan memperluas jaringan dan saling pengertian.
- D ✓ — memberi ruang yang setara kepada semua anggota (kesederajatan).
- E ✗ — arahnya menutup diri ke kelompok sendiri; tidak menambah modal sosial penghubung.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B adalah pola soal asli yang paling sering menjebak: sikapnya baik, tetapi tujuan di akhir kalimat membuatnya tidak tepat. E memakai alasan "nyaman" yang terdengar wajar.

No. 10 Kunci: D

Konsep: Pasal 29 ayat (2) menjamin setiap penduduk beribadat **menurut agamanya**. Bhinneka Tunggal Ika membangun kebersamaan dengan **menghargai** perbedaan, bukan dengan memaksakan satu tata cara kepada semua orang. Tujuan "kompak" tetap dapat dicapai lewat kegiatan bersama yang tidak menyangkut ibadah.

Analisis opsi:

- A ✗ — tujuannya baik, tetapi caranya memaksa warga beribadat tidak menurut agamanya.
- B ✗ — suara terbanyak tidak dapat menghapus hak beribadat yang dijamin UUD.
- C ✗ — berlebihan: kegiatan keagamaan boleh, asal tidak dipaksakan kepada pemeluk agama lain.
- D ✓ — memaksakan satu tata ibadah melanggar Pasal 29 ayat (2) dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- E ✗ — alasan keliru: kebebasan beragama adalah hak warga, bukan urusan yang diambil alih pemerintah daerah.

Jawaban: D.

Jebakan: B memakai cara yang tampak demokratis. C sampai pada penilaian "kurang tepat", tetapi dengan larangan yang berlebihan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 11 Kunci: A

Konsep: masyarakat yang terbelah menjadi kubu yang saling bermusuhan disebut **polarisasi**. Bangsa yang terbiasa **mengelola perbedaan** lebih tahan terhadapnya: warganya mau bertemu dan berdialog dengan kelompok lain tanpa harus sependapat.

Analisis opsi:

• A ✓ — dialog lintas kelompok menjawab akar masalah (hanya mendengar kelompok sendiri), dan perbedaan tetap dihargai.
• B ✗ — justru memperparah masalah: warga makin terkurung dalam kelompoknya.
• C ✗ — penyeragaman pendapat bertentangan dengan makna bhinneka.
• D ✗ — memindahkan seluruh tanggung jawab kepada pihak lain; peran warga sendiri hilang.
• E ✗ — berlebihan; menghindar total tidak membangun kebersamaan.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan E terdengar "aman", tetapi keduanya menjauhkan warga dari perjumpaan dengan kelompok lain.

No. 12 Kunci: C

Konsep: keragaman menjadi modal sosial bila ada **perjumpaan rutin**, **kesederajatan**, **kolaborasi**, dan **saling menghormati**. Akar masalah di ilustrasi adalah tidak adanya kesederajatan: kelompok kecil merasa seperti tamu.

Analisis opsi:

• A ✗ — memisahkan kelompok; perjumpaan lintas agama justru hilang.
• B ✗ — dana tidak menyentuh rasa tidak dihargai.
• C ✓ — giliran pengurus dan tempat serta pembahasan terbuka mewujudkan kesederajatan.
• D ✗ — memaksa hadir tanpa memperbaiki perlakuan yang tidak setara.
• E ✗ — memenangkan kelompok terbesar; masalahnya dibiarkan.

Jawaban: C.

Jebakan: B dan D sama-sama berusaha menaikkan kehadiran, tetapi tidak menyentuh akar masalah, yaitu kesederajatan.

No. 13 Kunci: E

Konsep: tradisi daerah menjadi modal sosial karena **mempererat warga**: menjadi **identitas bersama**, mempertemukan warga dalam persiapan dan pelaksanaannya, dan mewariskan norma kerja sama. Manfaat ekonomi, penetapan resmi, atau pelestarian adalah hal lain.

Analisis opsi:

• A ✗ — manfaat ekonomi; akibat lanjutan, bukan peran sosialnya.
• B ✗ — penetapan resmi adalah pengakuan; tradisi bermakna karena perannya, bukan karena ditetapkan.
• C ✗ — pelestarian kuliner; benar, tetapi tidak menyentuh hubungan antarwarga.
• D ✗ — sikap merasa paling unggul (chauvinis) justru merusak hubungan antarkelompok.
• E ✓ — makan bersama tanpa membedakan status, memasak bersama, dan nasihat rukun menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki.

Jawaban: E.

Jebakan: B memakai informasi yang ada di ilustrasi ("pemerintah daerah menyebut ..."), pola pengecoh yang sama dengan soal asli tentang tradisi daerah.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 14 Kunci: B

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika memuat **dua syarat sekaligus**: perbedaan **diakui** (bhinneka) dan ada **kebersamaan** (tunggal ika). Kelompok yang hidup terpisah-pisah memenuhi syarat pertama saja; tidak bertengkar belum berarti bersatu.

Langkah 1 – Uji syarat pertama. Setiap kelompok bebas menjalankan kebiasaannya → keragaman diakui.
Langkah 2 – Uji syarat kedua. Tidak ada kegiatan bersama, kelompok jarang bertemu → kebersamaan belum ada.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — "tidak bertengkar" dikira persatuan; kelompok yang tidak pernah bertemu mudah berprasangka.
• B ✓ — tepat menilai kedua syarat: yang satu terpenuhi, yang lain belum.
• C ✗ — alasannya keliru: kebersamaan tidak dibangun dengan melebur (penyeragaman).
• D ✗ — hanya menilai syarat pertama; kebersamaan diabaikan.
• E ✗ — kesimpulannya benar, tetapi caranya berlebihan dan memaksa; kebersamaan tumbuh dari kegiatan bersama, bukan pemindahan paksa.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan D sama-sama memakai alasan yang benar sebagian. C dan E sampai pada kesimpulan "belum sesuai" tetapi dengan alasan atau cara yang salah.

No. 15 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: Pasal 28C ayat (2) menjamin hak memperjuangkan kepentingan **secara kolektif**. Forum warga lintas suku yang bekerja sama untuk kepentingan bersama adalah wujud modal sosial penghubung. Hak itu tetap dijalankan dengan menghormati hak orang lain.

Pernyataan 1 – Benar. Orang tua bersama-sama memperjuangkan keselamatan anak-anak; itu hak kolektif.
Pernyataan 2 – Benar. Kerja sama lintas suku bergantung pada kepercayaan, unsur utama modal sosial.
Pernyataan 3 – Salah. Hak yang dijamin UUD tidak membenarkan cara yang merugikan hak pengguna jalan lain.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 dimulai dengan fakta yang benar ("haknya dijamin UUD"), lalu ditarik ke tindakan yang tidak dibenarkan.

No. 16 Kunci: B

Konsep: kepercayaan adalah unsur modal sosial yang paling berharga dan paling mudah rusak. Bila kepercayaan rusak, kerja sama menjadi sulit dan mahal, bahkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan peristiwa awalnya.

Analisis opsi:
• A ✗ — melihat kerugian uang saja; ilustrasi menunjukkan kerja sama lain ikut terhenti.
• B ✓ — warga menolak semua iuran bersama: tanda kepercayaan rusak dan kerja sama terganggu.
• C ✗ — generalisasi: kesalahan satu orang dibebankan kepada seluruh sukunya (prasangka).
• D ✗ — menyalahkan keragaman; penyebabnya pengkhianatan satu orang, bukan perbedaan suku.
• E ✗ — bertentangan dengan ilustrasi; dampaknya meluas ke kegiatan warga lainnya.

Jawaban: B.

Jebakan: A tampak masuk akal karena yang hilang memang uang, tetapi soal menanyakan akibat bagi **modal sosial**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 17 Kunci: E

Konsep: setiap ancaman menimbulkan akibat berantai. Akibat **langsung** bagi integrasi terjadi pada **hubungan antarkelompok** (prasangka, curiga, merenggang). Akibat **lanjutan** menyusul bila dibiarkan: bentrokan, ekonomi lesu, wisata turun.

Analisis opsi:

- A ✗ — akibat ekonomi; lanjutan.
- B ✗ — akibat pariwisata; lanjutan dan bidang lain.
- C ✗ — menyangkut hubungan antarkelompok, tetapi bentrokan adalah akibat **lanjutan** dari prasangka yang dibiarkan.
- D ✗ — tidak berkaitan langsung dengan integrasi.
- E ✓ — hoaks yang menuduh satu kelompok langsung menumbuhkan prasangka terhadap kelompok itu.

Jawaban: E.

Jebakan: C paling dekat karena memang menyangkut hubungan antarkelompok; bedakan akibat yang langsung dari yang baru terjadi kemudian.

No. 18 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: FKUB adalah wadah **dialog** dan penyalur aspirasi masyarakat melalui rekomendasi; ia bukan lembaga yang menjatuhkan sanksi. Perselisihan kecil antarumat beragama paling baik diselesaikan dengan **dialog** yang menyentuh akar masalah, di sini pengaturan jadwal dan lalu lintas.

Pernyataan 1 – Benar. Berdialog dengan pemuka agama adalah tugas FKUB yang dikutip.
Pernyataan 2 – Salah. Wewenang tertukar: FKUB memberi rekomendasi, tidak menutup rumah ibadah atau menjatuhkan sanksi.
Pernyataan 3 – Benar. Kesepakatan bersama menyelesaikan akar masalah dan menjaga hubungan baik kedua umat.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memberi lembaga yang benar wewenang yang tidak dimilikinya.

No. 19 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: gotong royong = kerja bersama secara sukarela, dengan cara yang dimusyawarahkan. **Layanan yang dibeli** adalah transaksi jual beli, bukan gotong royong. Kewajiban sepihak disertai denda melanggar prinsip **sukarela** dan **musyawarah**.

Pernyataan 1 – Benar. Jadwal disepakati dalam rapat warga.
Pernyataan 2 – Salah. Bila semua pekerjaan dibeli, tidak ada lagi kerja bersama warga; membayar bersama bukan gotong royong.
Pernyataan 3 – Salah. Denda yang ditetapkan tanpa musyawarah adalah paksaan.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 memakai kata "ditanggung bersama" sehingga terdengar seperti gotong royong.

No. 20 Kunci: B

Konsep: menilai budaya lain lebih rendah dengan ukuran budaya sendiri adalah **etnosentrisme**. Akarnya biasanya ketidaktahuan dan prasangka, sehingga upaya yang tepat adalah memperbaiki sikap dan menambah pemahaman.

Analisis opsi:

- A ✗ — hukuman tanpa penjelasan tidak memperbaiki pemahaman siswa.
- B ✓ — meminta maaf menghormati warga; belajar dari tokoh adat menyentuh akar ketidaktahuan.
- C ✗ — menghilangkan perjumpaan yang justru menumbuhkan saling pengertian.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- D ✗ — memindahkan kewajiban kepada warga dan menuntut mereka mengubah budayanya.
- E ✗ — kebebasan berpendapat dibatasi kewajiban menghormati orang lain.

Jawaban: B.

Jebakan: E memakai hak berpendapat sebagai alasan mutlak; D tampak praktis tetapi membalik kewajiban.

No. 21 Kunci: B, D, E

Konsep: integrasi nasional = menyatukan kelompok yang beragam menjadi satu bangsa **tanpa menghapus** identitasnya. Tujuannya berkaitan **langsung** dengan hubungan antarkelompok: rasa senasib, rukun, kerja sama, dan tidak mudah dipecah belah. Manfaat ekonomi adalah dampak lanjutan.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — pendapatan daerah adalah dampak lanjutan (dan bidang lain), bukan tujuan integrasi.
- B ✓ — rasa senasib sebagai satu bangsa.
- C ✗ — penyeragaman adat = asimilasi paksa; bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
- D ✓ — kerja sama lintas suku dengan identitas yang tetap diakui.
- E ✓ — menjaga ikatan agar warga tidak mudah dipecah belah.

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A adalah manfaat yang baik dan mungkin terjadi, tetapi bukan tujuan integrasi yang paling langsung. C memakai alasan "tidak ada sekat" yang terdengar mempersatukan.

No. 22 Kunci: A

Konsep: gotong royong boleh memakai bentuk baru, asal nilai dan prinsipnya tetap: **sukarela**, **terbuka**, untuk **kepentingan bersama**, dan **inklusif** (tidak menyingkirkan warga yang tidak memiliki ponsel atau rekening digital).

Analisis opsi:

- A ✓ — tetap praktis, tidak menyingkirkan lansia, dan pengelolaan dana dilaporkan terbuka.
- B ✗ — menyingkirkan warga tanpa ponsel; tersimpan di aplikasi belum berarti dilaporkan kepada warga.
- C ✗ — berlebihan; masalahnya bukan teknologi, melainkan cara memakainya.
- D ✗ — layanan berbayar bukan kerja bersama warga.
- E ✗ — mempermalukan warga melanggar prinsip sukarela.

Jawaban: A.

Jebakan: B menggoda karena "digital lebih transparan", padahal keterbukaan berarti warga diberi laporan, dan cara itu menyingkirkan sebagian warga. C menolak total, bukan menyesuaikan.

No. 23 Kunci: E

Konsep: prinsip **adil** dalam gotong royong berarti setiap orang ikut menanggung beban **sesuai kemampuannya**, bukan mengerjakan hal yang sama. Prinsip **sukarela** dan **musyawarah** juga harus dijaga.

Analisis opsi:

- A ✗ — menyamakan adil dengan sama rata; warga yang sakit dibebani berlebihan.
- B ✗ — layanan yang dibeli bukan kerja bersama warga.
- C ✗ — denda yang ditetapkan sepihak melanggar prinsip sukarela.
- D ✗ — menunda tanpa batas; syarat "jam yang sama" tetap keliru.
- E ✓ — semua ikut berkontribusi dengan cara yang sesuai kemampuannya.

Jawaban: E.

Jebakan: A memakai alasan "sama rata" yang terdengar adil. C menyelipkan denda sepihak sebagai syarat.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 24 Kunci: A

Konsep: primordialisme = mengutamakan ikatan asal (suku, daerah, keluarga) secara berlebihan; **etnosentrisme** = menilai budaya lain dengan ukuran budaya sendiri lalu menganggapnya lebih rendah.

Langkah 1 – Cari bukti di ilustrasi. "Pilih yang sekampung" → ikatan asal menjadi ukuran, mengalahkan kemampuan.

Langkah 2 – Analisis opsi:

- A ✓ — tepat dengan bukti di ilustrasi.
- B ✗ — tidak ada penilaian terhadap budaya daerah lain.
- C ✗ — tidak ada ajakan kekerasan.
- D ✗ — ilustrasi tidak menyebut perbedaan penghasilan.
- E ✗ — tidak ada keinginan memisahkan diri.

Jawaban: A.

Jebakan: B paling dekat karena sama-sama sikap yang berpusat pada kelompok sendiri; bedanya, etnosentrisme menilai **budaya** orang lain lebih rendah.

No. 25 Kunci: C

Konsep: upaya menjaga integrasi yang kuat bersifat **dialogis**: menyentuh **akar** masalah, mempertemukan pihak-pihak bersama tokoh adat, adil bagi semua pihak, dan **menegakkan hukum** secara adil. Pendekatan represif atau pemisahan hanya menekan gejala.

Langkah 1 – Temukan akar. Sengketa batas lahan, ditambah ejekan dan kekerasan.

Langkah 2 – Analisis opsi:

- A ✗ — memisahkan warga memperdalam curiga; sengketa batas tidak selesai.
- B ✗ — represif semata; begitu aparat ditarik, sengketa dapat muncul lagi.
- C ✓ — dialog menyelesaikan akar (batas lahan), dan pelaku kekerasan diproses hukum.
- D ✗ — memenangkan pihak yang lebih banyak; tidak adil.
- E ✗ — bantuan uang tidak menyelesaikan sengketa batas maupun prasangka.

Jawaban: C.

Jebakan: B tampak bertanggung jawab karena ada warga yang terluka. Aparat memang dapat diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi "tanpa langkah lain" membuat akar masalah dibiarkan.

No. 26 Kunci: A, C, E

Konsep: sebuah kegiatan disebut gotong royong bila memenuhi lima prinsip **sekaligus**: sukarela, musyawarah, adil, kepentingan bersama (dibenarkan hukum dan moral), dan terbuka. Bentuk yang hanya tampak serupa: kerja yang dipaksakan, kebersamaan untuk menyimpang (termasuk **kolusi**), alat kepentingan pribadi atau golongan, dan layanan yang dibeli.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✓ — musyawarah, sukarela, dan kontribusi sesuai keadaan.
- B ✗ — kolusi: kerja sama tidak jujur yang merugikan keuangan desa, walaupun disebut "untuk kas bersama".
- C ✓ — bergiliran (adil), untuk kepentingan umum, dan catatan sumbangan terbuka.
- D ✗ — kerja bakti dijadikan alat kepentingan satu calon, dan peserta dipaksa memakai atributnya.
- E ✓ — kepedulian dan kebersamaan, dengan beban sesuai kemampuan.

Jawaban: A, C, dan E.

Jebakan: B memakai kata "bersepakat" dan "kas bersama" sehingga tampak seperti musyawarah untuk kepentingan bersama. Ukurannya prinsip dan tujuan yang dibenarkan, bukan istilah yang dipakai.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 27 Kunci: D

Konsep: ujaran kebencian menyerang dan merendahkan kelompok tertentu dan cepat menumbuhkan permusuhan. Upaya yang tepat menyasar akar, **adil bagi semua pihak**, dan tetap menjaga perjumpaan antardaerah.

Analisis opsi:

- A ✗ — berlebihan; menutup semua ruang interaksi, termasuk komentar yang baik.
- B ✗ — menghilangkan perjumpaan antardaerah yang justru memperkuat persatuan.
- C ✗ — tidak adil: hanya melindungi sebagian peserta.
- D ✓ — aturan berlaku setara untuk semua, dan peserta lintas daerah memberi teladan bersama.
- E ✗ — memindahkan seluruh kewajiban kepada pihak lain; penyelenggara tetap bertanggung jawab atas ruangnya.

Jawaban: D.

Jebakan: A terdengar tegas dan C terdengar praktis; yang pertama berlebihan, yang kedua tidak adil.

No. 28 Kunci: D

Konsep: integrasi yang kuat dibangun lewat **pendekatan dialogis**: para pihak dipertemukan dan didengar, akar masalah ditangani, hak dipulihkan, identitas diakui, dan keutuhan NKRI dijaga.

Langkah 1 – Baca isi kesepakatan. Kedua pihak sama-sama memberi: GAM menyerahkan senjata; pemerintah memberi amnesti, menarik pasukan nonorganik, dan mengizinkan partai lokal; Aceh tetap dalam NKRI.

Langkah 2 – Analisis opsi:

- A ✗ — kesepakatan justru mengurangi kehadiran pasukan; perdamaian dicapai lewat perundingan.
- B ✗ — sebaliknya, kekhasan Aceh diakui (partai lokal) dalam NKRI.
- C ✗ — pihak ketiga hanya memfasilitasi; keputusan diambil dan dijalankan oleh kedua pihak.
- D ✓ — perundingan yang mendengar kedua pihak mengakhiri konflik tanpa melepaskan Aceh dari NKRI.
- E ✗ — kesepakatan dicapai tanpa salah satu pihak dikalahkan; itu inti penyelesaian damai.

Jawaban: D.

Jebakan: C menggoda karena ada pihak luar yang terlibat; perannya sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan.

No. 29 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: integrasi nasional menyatukan **tanpa menghapus** identitas; bukan asimilasi. Faktor pendorong integrasi antara lain bahasa Indonesia, sejarah bersama, dan **perjumpaan antarwarga** lewat merantau, sekolah, dan perkawinan campur.

Pernyataan 1 – Salah. Integrasi tidak menuntut adat ditinggalkan; menuntut itu berarti asimilasi paksa.
Pernyataan 2 – Benar. Perjumpaan membuat warga saling mengenal dan merasa satu bangsa.
Pernyataan 3 – Salah. Keluarga campuran tetap membawa keragaman adat dan bahasa daerah; semboyan itu justru tetap menjadi pegangan.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menarik kesimpulan berlebihan dari kenyataan yang benar.

No. 30 Kunci: B, E

Konsep: menolak semua penyewa dari satu daerah karena perbuatan dua orang adalah **diskriminasi** yang berakar pada **prasangka** (generalisasi). Upaya yang tepat menyasar akar: mempertemukan pihak-pihak lewat **dialog** dan menegakkan hukum secara **adil dan perorangan**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — memisahkan kelompok memperkuat prasangka dan menjauhkan warga.
- B ✓ — dialog mengurangi prasangka dan membuka kembali hubungan.
- C ✗ — hak milik tidak membenarkan perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat 2).
- D ✗ — represif semata; akar masalahnya, yaitu prasangka, tidak disentuh.
- E ✓ — hukum ditegakkan kepada pelaku, bukan kepada seluruh warga sedaerahnya.

Jawaban: B dan E.

Jebakan: A dan D tampak menenangkan suasana, tetapi hanya menekan gejala. C memakai hak milik sebagai alasan mutlak. Jawaban benar soal ini hanya dua; jangan menebak jumlahnya.

Latihan sub bab 4.1

No. 1 Kunci: B

Konsep: sebuah tindakan baru menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI bila **alasannya** berhubungan dengan kepentingan bangsa. Penyelundupan adalah **ancaman nonmiliter** di bidang ekonomi: barang masuk tanpa pengawasan negara, penerimaan negara hilang, dan usaha dalam negeri tersaingi secara tidak adil.

Langkah 1 – Tindakannya sudah benar (menolak ikut menyelundupkan). Yang ditanya adalah **alasan** yang paling berhubungan dengan keutuhan NKRI.

Langkah 2 – Analisis opsi:

- A ✗ — alasan keselamatan pribadi; benar, tetapi tidak berhubungan dengan bangsa.
- B ✓ — mengaitkan penolakan dengan kedaulatan negara di perbatasan dan ketahanan ekonomi bangsa.
- C ✗ — berlebihan: membeli barang luar negeri secara sah tidak berarti tidak cinta tanah air; masalahnya adalah jalurnya yang ilegal.
- D ✗ — keliru: warga perbatasan justru berperan menjaga perbatasan dengan melapor; yang dilarang adalah melanggar aturan, bukan mendekati batas.
- E ✗ — alasan kesehatan keluarga; benar, tetapi tidak menyentuh kepentingan bangsa.

Cek ulang: dari lima alasan, hanya B yang menunjukkan kesadaran bahwa perbuatan itu merugikan negara.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan E adalah alasan yang masuk akal sehingga menggoda, tetapi bersifat pribadi; C terdengar paling "nasionalis", padahal menggeneralisasi secara berlebihan.

No. 2 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: perilaku warga dinilai dari **hubungannya** dengan keutuhan NKRI. Merendahkan ciri suatu daerah melemahkan rasa sebagai satu bangsa; menjaga kerukunan dan bijak di media sosial adalah **bela negara nonfisik**.

Pernyataan 1 – Salah. Niat menghibur tidak menghapus akibatnya: warga daerah yang ditiru merasa direndahkan, dan kolom komentar berubah menjadi ajang saling ejek antardaerah.
Pernyataan 2 – Benar. Ejekan yang terus diulang menumbuhkan prasangka, dan prasangka antarkelompok adalah bibit perpecahan.
Pernyataan 3 – Benar. Tidak memperluas konten yang merendahkan dan menegur dengan santun adalah sikap menjaga kerukunan, wujud bela negara tanpa senjata.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 memakai alasan "hanya hiburan" untuk memutus hubungan perilaku dengan keutuhan bangsa.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Latihan sub bab 4.2

No. 1 Kunci: A

Konsep: dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk **masa jabatan tetap** (Pasal 6A dan 7) dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu, susunan kursi DPR tidak menentukan bertahan atau tidaknya presiden; keduanya harus bekerja sama.

Analisis opsi:

- A ✓ — masa jabatan tetap; presiden dan DPR bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- B ✗ — cara berpikir parlementer: kepala pemerintahan berasal dari kekuatan mayoritas parlemen.
- C ✗ — presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).
- D ✗ — MPR tidak memilih presiden baru karena susunan kursi DPR; presiden dipilih rakyat.
- E ✗ — menteri diangkat presiden (Pasal 17); kabinet tidak memerlukan persetujuan DPR.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan E memindahkan kebiasaan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

No. 2 Kunci: A, E

Konsep: dalam **negara kesatuan**, kewenangan daerah **berasal dari pusat** dan diberikan lewat undang-undang. Otonomi boleh luas, tetapi ada urusan yang tetap milik pusat (misalnya pertahanan dan keamanan), daerah tidak boleh menolak hukum nasional, dan satu wilayah negara terbuka bagi semua warga negara (Pasal 28E ayat 1: setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara).

Periksa setiap pernyataan:

- A ✓ — pasar dan retribusi daerah adalah urusan yang dapat diatur kabupaten.
- B ✗ — pertahanan dan keamanan adalah urusan pusat; pasukan bersenjata daerah menyerupai negara bagian.
- C ✗ — memperlakukan warga negara sendiri seperti orang asing bertentangan dengan kesatuan wilayah dan hak warga untuk bertempat tinggal di mana pun di Indonesia.
- D ✗ — daerah tunduk pada undang-undang nasional; menolak hukum nasional adalah ciri kedaulatan negara bagian dalam federasi, bukan otonomi.
- E ✓ — muatan lokal bahasa daerah adalah urusan pendidikan yang dapat diatur daerah dan menjaga kebinekaan.

Jawaban: A dan E.

Jebakan: pendapat "otonomi berarti boleh mengatur apa saja" menyamakan otonomi luas dengan kedaulatan negara bagian. B, C, dan D tampak sebagai "keleluasaan daerah", padahal mengubah daerah otonom menjadi seperti negara sendiri.

Latihan sub bab 4.3

No. 1 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: Wawasan Nusantara memandang laut sebagai **pemersatu** pulau-pulau dan kekayaan wilayah sebagai **modal milik bersama** bangsa (kesatuan ekonomi). Kedaulatan atas perairan tidak berarti menutup laut: kapal asing tetap memiliki hak **lintas damai** sesuai hukum laut internasional.

Pernyataan 1 – Benar. Kapal dan nelayan yang lalu-lalang memperlihatkan laut sebagai jalan penghubung.
Pernyataan 2 – Salah. Berlebihan: kapal asing boleh melintas selama menaati aturan Indonesia dan tidak mengganggu keamanan; ilustrasi sendiri menyebut hal itu.
Pernyataan 3 – Benar. Kesatuan ekonomi: kekayaan wilayah dinikmati bersama, bukan dikuasai satu daerah.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: pernyataan 2 menyamakan "pemersatu" dengan "tertutup bagi pihak luar".

No. 2 Kunci: B

Konsep: menurut Wawasan Nusantara (kesatuan ekonomi), kekayaan wilayah adalah **modal dan milik bersama bangsa**, dan pembangunannya harus **serasi dan seimbang** di semua daerah. Daerah yang merasa ditinggalkan mudah tergoda ajakan memisahkan diri; karena itu pemerataan adalah bagian dari menjaga persatuan.

Langkah 1 – Kenali dua sisi masalah. Ada keluhan yang sah (kesenjangan) dan ada ajakan yang mengancam keutuhan (memisahkan diri).
Langkah 2 – Cari cara pandang yang menjawab keduanya.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — memecah kesatuan ekonomi dan membenarkan ajakan memisahkan diri.
• B ✓ — kekayaan milik bersama sekaligus menuntut pemerataan, termasuk bagi daerah penghasil; keluhan dijawab tanpa memecah bangsa.
• C ✗ — kebalikan yang sama kelirunya: "milik bersama" bukan berarti warga daerah diabaikan.
• D ✗ — gatra tertukar: masalah pemerataan kesejahteraan termasuk gatra ekonomi; festival tidak menyentuh akarnya.
• E ✗ — salah paham trigatra: kekayaan alam baru menyejahterakan bila dikelola dengan adil (pancagatra), bukan mustahil menyejahterakan.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan C adalah dua kutub yang sama-sama keliru, yaitu milik daerah saja dan milik pusat saja. D memasang gatra yang salah untuk masalah ekonomi.

Latihan sub bab 4.4

No. 1 Kunci: E

Konsep: pertahanan negara bersifat **semesta**: melibatkan seluruh rakyat (kerakyatan), seluruh sumber daya (kesemestaan), dan seluruh wilayah (kewilayahan). Sifat ini **tetap berlaku di masa damai**: sumber daya manusia, industri, dan prasarana disiapkan sejak dini, dan ancaman nonmiliter (hoaks, narkoba, serangan siber, bencana) menuntut peran warga sesuai porsinya.

Langkah 1 – Pisahkan bagian yang benar dari kesimpulan yang keliru. TNI memang komponen utama; belajar dan bekerja memang bagian dari bela negara. Yang keliru adalah kesimpulan bahwa rakyat "tidak perlu memikirkan pertahanan".
Langkah 2 – Analisis opsi:
• A ✗ — fakta yang benar, tetapi tidak membuktikan rakyat lepas dari pertahanan; rakyat tetap kekuatan pendukung (Pasal 30 ayat 2).
• B ✗ — keliru: Pasal 30 ayat (1) menyatakan setiap warga berhak dan wajib ikut serta.
• C ✗ — alasan salah: bela negara tidak sama dengan wajib militer.
• D ✗ — konsep tertukar: TNI dan Polri kekuatan utama, rakyat kekuatan pendukung.
• E ✓ — membantah pendapat itu dengan alasan yang tepat.

Jawaban: E.

Jebakan: C dan D sama-sama menilai pendapat itu keliru, tetapi dengan alasan yang salah. A menggoda karena isinya benar.

No. 2 Kunci: D

Konsep: kegiatan mata-mata dari kapal asing terhadap pangkalan militer mengancam **kedaulatan negara → ancaman militer**, yang dihadapi TNI sebagai komponen utama (UU 3/2002 Pasal 7 ayat 2;

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pasal 30 ayat 3 UUD NRI 1945). Rakyat adalah **kekuatan pendukung**: waspada, mencatat, dan melapor.

Analisis opsi:
• A ✗ — Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; ancaman militer dari pihak asing adalah tugas TNI.
• B ✗ — mengambil alih tugas aparat dan dapat membahayakan warga lain.
• C ✗ — BSSN menangani ancaman siber; alat yang dipakai berteknologi tidak mengubah jenis ancamannya menjadi ancaman siber.
• D ✓ — TNI menghadapi ancaman militer; warga berperan sesuai porsinya.
• E ✗ — pemerintah kota tidak berwenang menghadapi kegiatan mata-mata pihak asing.

Jawaban: D.

Jebakan: A memakai alasan "di atas wilayah kota" yang terdengar wajar; C terkecoh oleh kata "teknologi" sehingga ancaman militer dikira ancaman siber.

Latihan sub bab 4.5

No. 1 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: bebas berarti tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan dunia, tetapi tetap bersahabat dengan banyak negara; **aktif** berarti ikut memperjuangkan perdamaian dan ketertiban dunia. Gerakan Non-Blok yang berakar pada semangat Konferensi Asia Afrika 1955 memperlihatkan keduanya.

Pernyataan 1 – Salah. Tidak bergabung dengan Blok Barat tidak berarti memihak Blok Timur; GNB justru menolak bergabung dengan kedua blok.
Pernyataan 2 – Benar. Menghimpun negara-negara untuk memperjuangkan perdamaian adalah wujud sikap aktif.
Pernyataan 3 – Salah. Bebas tidak berarti menutup diri; Indonesia tetap bekerja sama dengan negara-negara dari kedua blok, asalkan tidak terikat pakta militer salah satunya.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 1 memakai logika "kalau tidak di sini, pasti di sana"; pernyataan 3 menyamakan bebas dengan menutup diri.

No. 2 Kunci: E

Konsep: sikap **aktif** tidak berarti ikut campur. Dalam menjalankan sikap aktif, Indonesia menghormati **kedaulatan** negara lain, **tidak campur tangan** dalam urusan dalam negerinya, mendorong penyelesaian dengan **cara damai**, dan bertindak lewat **mekanisme bersama** seperti ASEAN.

Analisis opsi:
• A ✗ — menentukan pemenang pemilu negara lain adalah campur tangan dan memihak.
• B ✗ — mengirim pasukan tanpa mandat bersama melanggar kedaulatan.
• C ✗ — netral pasif: tidak memihak, tetapi tidak ikut mengupayakan perdamaian di kawasannya sendiri.
• D ✗ — tekanan sepihak yang tidak membantu penyelesaian dan merugikan rakyat kedua negara.
• E ✓ — tidak memihak, menghormati kedaulatan, dan aktif mendorong jalan damai lewat ASEAN.

Jawaban: E.

Jebakan: C tampak menghormati kedaulatan, tetapi gagal memenuhi unsur "aktif"; B tampak "aktif", tetapi melanggar prinsip tidak campur tangan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Latihan sub bab 4.6

No. 1 Kunci: B, D

Konsep: tujuan partisipasi menjawab "untuk apa?": hasil bagi demokrasi, misalnya **legitimasi** (pemerintah dan wakil rakyat memperoleh dukungan yang sah) dan **kontrol** (kekuasaan dapat dinilai dan diganti secara damai). **Cara** menjawab "dengan apa?": tindakan pemilih. Ada pula perilaku yang **bukan keduanya** karena melanggar asas.

Periksa setiap jawaban:

• A ✗ — membawa KTP dan surat pemberitahuan adalah **cara** memakai hak pilih.
• B ✓ — legitimasi: tujuan bagi demokrasi.
• C ✗ — memakai kata "supaya", tetapi isinya imbalan pribadi; menerima uang untuk memilih melanggar asas bebas dan jujur.
• D ✓ — kontrol: tujuan bagi demokrasi.
• E ✗ — mempelajari rekam jejak adalah **cara** menjadi pemilih cerdas, bukan tujuan.

Jawaban: B dan D.

Jebakan: C berbentuk kalimat tujuan ("supaya ...") tetapi melanggar asas; A dan E adalah cara yang baik sehingga sering dikira tujuan.

No. 2 Kunci: D

Konsep: pelopor pemilih pemula mengajak teman memakai hak pilih dengan benar: menimbang program, menolak hoaks dan ujaran kebencian, serta menjaga persaudaraan. Pelopor **tidak mengarahkan** pilihan orang lain, karena pilihan setiap orang bebas dan rahasia. Perbedaan pilihan wajar dalam demokrasi; yang dijaga adalah cara berdiskusinya.

Analisis opsi:

• A ✗ — menghindari perbedaan, bukan mengelolanya; grup kelas juga berguna untuk hal lain.
• B ✗ — mengarahkan pilihan orang lain melanggar asas bebas.
• C ✗ — berlebihan; diskusi program yang santun justru bagian dari pendidikan pemilih.
• D ✓ — diskusi tetap berjalan dengan santun dan perbedaan pilihan dihormati.
• E ✗ — memihak satu kubu memperuncing perselisihan.

Jawaban: D.

Jebakan: B terdengar mendamaikan, tetapi caranya mengarahkan pilihan; A dan C terdengar tegas, tetapi menghindari perbedaan.

Latihan sub bab 4.7

No. 1 Kunci: B, E

Konsep: video rekayasa (*deepfake*) dan kabar bohong yang mengadu domba suku adalah **ancaman nonmiliter** bagi keutuhan NKRI. **Literasi digital** menuntut warga memeriksa sumber, mencari klarifikasi dari pihak tepercaya, tidak ikut menyebarkan, dan berdiskusi dengan santun.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — tampak waspada, tetapi tetap memperluas penyebaran video yang belum jelas.
• B ✓ — memeriksa kebenaran pada sumber yang tepercaya.
• C ✗ — membalas dengan ejekan suku memperdalam permusuhan.
• D ✗ — menghindar dan menggeneralisasi; literasi digital berarti menyaring, bukan menolak teknologi.
• E ✓ — menahan penyebaran dan mengingatkan warga tanpa menambah kabar yang belum pasti.

Jawaban: B dan E.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: A adalah tindakan yang tampak hati-hati tetapi ikut memperluas masalah; D terdengar tegas, tetapi berlebihan.

No. 2 Kunci: C

Konsep: teknologi **bukan penyebab tunggal**. Kabar bohong mempercepat dan memperluas konflik, tetapi konflik biasanya juga punya akar lain, seperti prasangka atau perebutan sumber daya. Penyelesaian yang tepat menangani keduanya: literasi digital dan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, serta penyelesaian sengketa yang menjadi akarnya.

Langkah 1 – Pisahkan pemicu dan akar. Pemicu: pesan berantai bohong. Akar: perselisihan lama tentang air irigasi.

Langkah 2 – Analisis opsi:

• A ✗ — menjadikan teknologi penyebab tunggal; memutus internet selamanya juga merugikan layanan dan ekonomi warga.

• B ✗ — kebalikan yang sama kelirunya: pesan bohong tetap harus ditangani karena memicu kekerasan.

• C ✓ — menempatkan teknologi sebagai pemercepat dan tetap menyelesaikan akar masalah.

• D ✗ — generalisasi berlebihan; teknologi juga dapat menyatukan warga.

• E ✗ — penyebaran kabar bohong yang memicu kekerasan adalah ancaman nonmiliter dan dapat ditindak secara hukum.

Cek ulang: hanya C yang menjelaskan peran pemicu dan akar sekaligus.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan B masing-masing hanya melihat satu penyebab; D memakai kata "selalu".

Kuis Akhir Bab 4

No. 1 Kunci: D

Konsep: bela negara adalah hak dan kewajiban **setiap warga** (Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945). Bentuknya **fisik** (dengan kekuatan fisik dan senjata) dan **nonfisik** (tanpa senjata). Pasal 9 ayat (2) UU 3/2002 menyebut beberapa jalur keikutsertaan; tidak semua jalur harus ditempuh setiap orang, dan salah satunya **pengabdian sesuai profesi**.

Langkah 1 – Baca ketentuan yang dikutip. Ada empat jalur yang setara; tidak ada syarat bahwa semuanya harus ditempuh.

Langkah 2 – Cocokkan dengan perilaku dr. Nadira. Ia melayani kesehatan warga di pulau kecil yang kekurangan tenaga kesehatan: pengabdian sesuai profesi.

Langkah 3 – Analisis opsi:

• A ✗ — menyempitkan bela negara menjadi bela negara fisik saja.

• B ✗ — pengabdian sebagai prajurit hanya salah satu jalur.

• C ✗ — penilaiannya benar, tetapi menambah syarat yang tidak ada; pengabdian sesuai profesi tetap bela negara walaupun digaji.

• D ✓ — pengabdian profesi di daerah terpencil adalah bela negara nonfisik.

• E ✗ — bela negara berlaku bagi setiap warga negara, bukan hanya pegawai pemerintah.

Jawaban: D.

Jebakan: B mengambil satu jalur dari pasal yang dikutip lalu menjadikannya syarat mutlak; C sudah benar menilai komentar itu keliru, tetapi menambahkan syarat karangan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 2 Kunci: E

Konsep: upaya terbaik memiliki tiga ciri: **menyentuh akar masalah**, **sesuai peran pelakunya**, dan **berjangka panjang**. Akar masalah di ilustrasi ada dua: batas wilayah yang belum ditetapkan (urusan pemerintah sesuai aturan) dan rusaknya hubungan antarwarga (diatasi dengan dialog).

Langkah 1 – Petakan akar masalah. Batas belum ditetapkan → klaim lahan → bentrok → saling ejek.
Langkah 2 – Analisis opsi:
• A ✗ — penjagaan meredam bentrokan sesaat (gejala), tetapi batas dan prasangka tetap ada.
• B ✗ — warga mengambil alih wewenang menetapkan batas; patok "versi warga" bisa memicu bentrok baru.
• C ✗ — memisahkan warga mempertebal sekat dan prasangka.
• D ✗ — keputusan menurut jumlah penduduk adalah menang sepihak, bukan penyelesaian menurut aturan.
• E ✓ — menjawab kedua akar: batas ditetapkan lembaga berwenang, hubungan warga dipulihkan lewat dialog.

Jawaban: E.

Jebakan: A tampak tegas dan aman, padahal hanya menyasar gejala. B tampak partisipatif, tetapi bukan porsi warga.

No. 3 Kunci: A

Konsep: ancaman **militer** memakai kekuatan bersenjata yang terorganisasi; ancaman **nonmiliter** tidak memakai senjata, tetapi menyerang sendi kehidupan bangsa, termasuk **pencurian kekayaan alam**. Menurut UU 3/2002, ancaman nonmiliter dihadapi **lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan** sesuai bentuk ancamannya; ancaman **hibrida** adalah gabungan militer dan nonmiliter.

Langkah 1 – Cek ada tidaknya kekuatan bersenjata. Tidak ada; pelakunya penyelundup dan pemburu.
Langkah 2 – Tentukan bidang. Kekayaan alam dirampas (ekonomi) dan lingkungan rusak.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✓ — ancaman nonmiliter; penanganan dipimpin lembaga yang membidangi kehutanan dan penegakan hukum.
• B ✗ — melintasi batas negara tidak menjadikannya ancaman militer.
• C ✗ — kekayaan alam milik bangsa dirampas; ini bukan sekadar urusan pemburu.
• D ✗ — hibrida berarti ada unsur militer; kerja sama dengan warga tidak membuatnya hibrida.
• E ✗ — tidak ada paham yang hendak mengganti dasar negara; asal pembeli tidak menentukan jenis ancaman.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan D memakai ciri yang memang ada di kasus (lintas batas, kerja sama dengan warga), tetapi bukan ciri yang menentukan jenis ancaman.

No. 4 Kunci: A

Konsep: peran warga dalam menjaga keutuhan wilayah adalah **waspada dan melapor** kepada pihak berwenang. Menetapkan dan memasang kembali patok batas negara adalah wewenang pemerintah, karena letaknya ditentukan dengan pengukuran bersama negara tetangga.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:

- A ✓ — memberikan keterangan yang dapat diperiksa petugas tanpa mengambil alih wewenangnya.
- B ✗ — niatnya baik, tetapi posisi "yang dikira benar" bisa keliru dan justru menimbulkan sengketa.
- C ✗ — menuduh tanpa bukti memperkeruh hubungan antarnegara.
- D ✗ — diam; warga yang menemukan masalah perlu memberi tahu pihak berwenang.
- E ✗ — merusak barang bukti dan memindahkan laporan ke pihak yang tidak berwenang.

Jawaban: A.

Jebakan: B paling menggoda karena tampak membela wilayah, padahal mengambil alih tugas pemerintah.

No. 5 Kunci: B, D

Konsep: warga ikut menjaga keutuhan **sesuai porsinya**: waspada, mencegah, dan **melapor** lewat saluran resmi. Ada dua kekeliruan: **diam** karena menganggapnya urusan aparat, dan **mengambil alih tugas aparat** (menangkap, menyita, menghukum).

Periksa setiap usulan:

- A ✗ — menyita adalah wewenang aparat penegak hukum; tindakan ini juga membahayakan nelayan.
- B ✓ — laporan berisi waktu, posisi, dan ciri kapal membantu petugas menindak secara sah.
- C ✗ — diam bukan sikap warga yang ikut membela negara; laporan nelayan justru sangat dibutuhkan.
- D ✓ — pencegahan berjangka panjang yang sesuai peran kelompok nelayan.
- E ✗ — main hakim sendiri; penindakan kapal pencuri ikan dilakukan aparat setelah ada dasar hukum.

Jawaban: B dan D.

Jebakan: A dan E terlihat berani dan membela kedaulatan, tetapi bukan porsi warga. C memakai kenyataan bahwa TNI AL menjaga laut sebagai alasan untuk berdiam diri.

No. 6 Kunci: B

Konsep: setiap warga membela negara **sesuai perannya**. Bagi pedagang, salah satu wujudnya adalah berdagang jujur dan **tidak menimbun** barang saat harga naik, karena penimbunan membuat warga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan melemahkan ketahanan ekonomi.

Analisis opsi:

- A ✗ — ilustrasi tidak menyebut perintah aparat; Pak Darto menolak atas kesadarannya sendiri.
- B ✓ — ia tetap menyalurkan barang kepada pedagang kecil sehingga warga tetap dapat membelinya.
- C ✗ — ilustrasi menyebut ia menjual "seperti biasa", bukan rugi di bawah harga modal.
- D ✗ — menetapkan harga adalah wewenang pemerintah, bukan tugas pedagang.
- E ✗ — justru ajakan rekannya yang ia tolak.

Jawaban: B.

Jebakan: C terdengar lebih "berkorban", tetapi tidak sesuai isi ilustrasi; D memindahkan tugas pemerintah kepada pedagang.

No. 7 Kunci: C

Konsep: sikap kedaerahan yang berlebihan (mengutamakan daerah atau suku sendiri sampai menutup kesempatan bagi warga lain) mengancam keutuhan, karena warga dari daerah lain merasa bukan bagian dari bangsa yang sama. Upaya yang menjaga keutuhan **memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara** dan sekaligus **memberdayakan warga setempat** agar mampu bersaing.

Analisis opsi:

- A ✗ — generalisasi mutlak ("pasti"); kelahiran tidak menjamin kemampuan, dan tuntutan itu menutup hak warga lain.
- B ✗ — persetujuan suara terbanyak tidak membenarkan aturan yang membeda-bedakan warga negara.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✓ — menjaga kesetaraan kesempatan sambil menjawab kekhawatiran warga setempat lewat pendidikan.
• D ✗ — berlebihan ke arah sebaliknya; warga setempat juga berhak menjadi pegawai.
• E ✗ — alasan keliru: dalam otonomi daerah, pemerintah daerah mengelola pegawainya, tetapi tetap tunduk pada aturan nasional yang tidak diskriminatif.

Jawaban: C.

Jebakan: C, D, dan E sama-sama menolak tuntutan itu. Yang benar hanya C karena alasannya tidak berlebihan dan tidak keliru.

No. 8 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: sebuah perilaku menjaga keutuhan NKRI bila **hubungannya jelas** dengan persatuan atau rasa memiliki terhadap bangsa. Persatuan dalam keberagaman berarti saling mengenal dan menghargai budaya, **bukan** menyeragamkannya.

Pernyataan 1 – Salah. Bentuknya hiburan, tetapi isinya memperkenalkan budaya berbagai daerah kepada sesama warga; hubungannya dengan rasa satu bangsa jelas.
Pernyataan 2 – Benar. Keterangan asal dan arti lirik membuat warga daerah lain memahami dan menghargai budaya itu (nilai cinta tanah air dan sadar berbangsa).
Pernyataan 3 – Salah. Mengganti bahasa daerah berarti menghapus keberagaman; bahasa Indonesia sudah hadir lewat terjemahan arti lirik.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 1 menilai dari bentuk kegiatannya (hiburan), bukan dari akibatnya; pernyataan 3 terdengar mendukung persatuan, tetapi caranya penyeragaman.

No. 9 Kunci: C

Konsep: pemilih cerdas menimbang **rekam jejak**, **program yang masuk akal dan sesuai kewenangan jabatan**, **sumber informasi**, dan **alasan memilih**. Undang-undang nasional dibentuk DPR bersama presiden, bukan oleh DPRD kabupaten.

Analisis opsi:
• A ✗ — memilih karena janji yang menguntungkan tanpa memeriksa apakah janji itu dapat dijalankan.
• B ✗ — ikut-ikutan; pilihan tidak didasarkan pertimbangan sendiri.
• C ✓ — memeriksa kesesuaian janji dengan kewenangan dan rekam jejak calon.
• D ✗ — generalisasi berlebihan ("semua", "pasti"); berujung pada tidak memakai hak pilih dengan bijak.
• E ✗ — ikut menyebarkan janji tanpa memeriksanya.

Jawaban: C.

Jebakan: D tampak kritis, tetapi kritis tidak sama dengan menolak semua calon tanpa menilai.

No. 10 Kunci: B

Konsep: ancaman **nonmiliter** dihadapi **lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan** sesuai bentuk ancamannya, **didukung unsur lain** kekuatan bangsa (TNI, Polri, dan warga dapat membantu). Wabah penyakit hewan dipimpin instansi yang membidangi kesehatan hewan.

Langkah 1 – Tentukan jenis ancaman. Wabah ternak: tanpa kekuatan bersenjata → nonmiliter.
Langkah 2 – Terapkan pasal. Pemimpin penanganan = lembaga yang paling ahli sesuai bentuk ancaman.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — tidak semua ancaman adalah urusan militer; TNI dapat membantu, bukan memimpin.
• B ✓ — sesuai bunyi ketentuan yang dikutip.
• C ✗ — wabah menyebar lintas provinsi; tidak dapat ditangani orang per orang.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• D ✗ — Polri menjaga ketertiban, tetapi bukan lembaga yang paling ahli menangani penyakit hewan.
• E ✗ — komponen cadangan disiapkan untuk ancaman militer melalui mobilisasi; tindakan memusnahkan semua ternak juga berlebihan.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan D menunjuk lembaga yang benar-benar ada dan sering membantu, tetapi bukan unsur utama untuk ancaman ini.

No. 11 Kunci: B

Konsep: RIS (sejak 27 Desember 1949) kembali menjadi NKRI melalui **Mosi Integral** yang diajukan di parlemen dan diterima, lalu dijalankan pemerintah. Perubahan besar ditempuh **tanpa kekerasan, lewat lembaga perwakilan**. Pengalaman ini kemudian dikunci dalam Pasal 37 ayat (5): bentuk NKRI tidak dapat diubah.

Analisis opsi:
• A ✗ — kebalikan dari peristiwa; bentuk serikat justru ditinggalkan karena dipandang memecah belah.
• B ✓ — usul diajukan di parlemen, diterima, lalu dijalankan secara damai.
• C ✗ — keputusan diambil parlemen, bukan oleh satu tokoh; Natsir hanya mengusulkan.
• D ✗ — negara kesatuan tetap mengenal otonomi daerah; kewenangan daerah berasal dari pusat.
• E ✗ — kini bentuk NKRI tidak dapat diubah (Pasal 37 ayat 5); peristiwa ini justru melatarbelakangi ketentuan itu.

Jawaban: B.

Jebakan: C memakai nama tokoh dalam ilustrasi seolah keputusannya pribadi; E menarik kesimpulan berlebihan dari diterimanya mosi.

No. 12 Kunci: B, E

Konsep: tujuan partisipasi menjawab "untuk apa?": hasil bagi demokrasi dan bangsa, seperti **legitimasi** (dukungan sah), **kontrol** kekuasaan, wakil yang berkualitas, dan **terwakilinya kepentingan generasi muda**. **Cara** berpartisipasi menjawab "apa yang dilakukan?": terdaftar di DPT, mempelajari calon, datang ke TPS, menolak politik uang. Bagian atas spanduk berisi tujuan.

Periksa setiap kalimat:
• A ✗ — tindakan pemilih (cara), cocok untuk bagian bawah.
• B ✓ — legitimasi pemimpin terpilih: tujuan.
• C ✗ — berbentuk "agar ..." seperti tujuan, tetapi isinya kemenangan calon kelompok sendiri, bukan tujuan demokrasi; pemilih bebas menentukan pilihannya.
• D ✗ — tindakan pemilih cerdas (cara), cocok untuk bagian bawah.
• E ✓ — kepentingan generasi muda diperhitungkan: tujuan.

Jawaban: B dan E.

Jebakan: A dan D benar sebagai perilaku pemilih yang baik, tetapi termasuk cara, bukan tujuan. C meniru bentuk kalimat tujuan ("agar ...") dengan isi yang keliru.

No. 13 Kunci: D

Konsep: dalam sistem presidensial, presiden dan DPR sama-sama dipilih rakyat dan **tidak saling menjatuhkan**. Pasal 7C melarang presiden membubarkan DPR; presiden hanya dapat diberhentikan karena pelanggaran hukum tertentu melalui DPR → MK → MPR (Pasal 7A–7B), bukan karena perbedaan kebijakan. Bila DPR tidak menyetujui rancangan APBN, **pemerintah menjalankan APBN tahun lalu** (Pasal 23 ayat 3).

Analisis opsi:
• A ✗ — bertentangan langsung dengan Pasal 7C yang dikutip.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• B ✗ — mosi tidak percaya adalah ciri sistem parlementer.
• C ✗ — cara berpikir parlementer; masa jabatan presiden tetap.
• D ✓ — jalan keluar yang diatur UUD; kedua lembaga tetap menjabat sampai akhir masa.
• E ✗ — MPR tidak berwenang menyusun APBN.

Jawaban: D.

Jebakan: B dan C membawa ciri sistem parlementer ke dalam sistem presidensial Indonesia.

No. 14 Kunci: C, E

Konsep: informasi pribadi warga (identitas, kontak, foto, lokasi) yang terkumpul di pihak yang tidak jelas dapat disalahgunakan untuk penipuan dan mengancam **kedaulatan data** bangsa. UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengolahan data memiliki dasar yang sah. Literasi digital (pilar **aman digital**) menuntun warga melindungi diri dan memakai kanal resmi.

Periksa setiap tindakan:
• A ✗ — ikut-ikutan; risiko tidak berkurang karena banyak orang memakainya.
• B ✗ — tampak waspada, tetapi menuduh tanpa bukti justru menyebar kabar yang belum jelas.
• C ✓ — membatasi izin akses adalah langkah aman digital yang paling dasar.
• D ✗ — menghindar total bukan literasi digital; masalahnya ada pada aplikasi tertentu.
• E ✓ — mencegah kerugian orang terdekat dan menyerahkan penindakan kepada pihak berwenang.

Jawaban: C dan E.

Jebakan: B adalah tindakan yang tampak waspada, tetapi ikut memperluas masalah; D menghindari teknologi alih-alih memakainya dengan cakap.

No. 15 Kunci: D

Konsep: UU 37/1999 menegaskan bahwa bebas aktif **bukan politik netral**. Indonesia tidak memihak (bebas), tetapi ikut mengupayakan perdamaian (aktif), sesuai amanat Pembukaan UUD alinea IV untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Analisis opsi:
• A ✗ — menyamakan bebas aktif dengan netral pasif.
• B ✗ — memisahkan persahabatan dari perdamaian; justru perdamaian menjaga persahabatan.
• C ✗ — memihak demi dagang melanggar unsur bebas.
• D ✓ — memenuhi kedua syarat: tidak memihak dan aktif dengan cara damai.
• E ✗ — mengirim pasukan sepihak melanggar prinsip tidak campur tangan; pasukan perdamaian hanya dengan mandat PBB.

Jawaban: D.

Jebakan: C dan E sama-sama menilai pendapat Bima keliru, tetapi menawarkan sikap yang melanggar unsur bebas atau cara damai.

No. 16 Kunci: E

Konsep: asas **rahasia** berarti pilihan tidak boleh diketahui orang lain; asas ini melindungi asas **bebas**, karena tidak ada yang dapat menekan atau memberi imbalan atas pilihan yang tidak diketahuinya. Memotret surat suara yang sudah dicoblos untuk ditunjukkan kepada pihak lain merusak kedua asas.

Langkah 1 – Kenali perbuatannya. Surat suara dipotret dan dikirim agar pilihan diketahui keluarga.
Langkah 2 – Cocokkan dengan asas yang dikutip. Pilihan dibuka kepada orang lain dan dijadikan alat tekanan "kompak" → rahasia dan bebas terganggu.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — sama atau tidaknya pilihan tidak penting; yang dipersoalkan adalah membuka pilihan untuk diawasi.
• B ✗ — penerimanya keluarga atau bukan, kerahasiaan tetap rusak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

- C ✗ — pemilih pemula yang memenuhi syarat berhak penuh menentukan pilihan.
- D ✗ — Bagas tetap mencoblos sendiri; asas yang terganggu bukan asas langsung.
- E ✓ — asas rahasia rusak, dan bersamanya kebebasan memilih.

Jawaban: E.

Jebakan: D menyebut asas yang benar-benar ada dalam pasal yang dikutip, tetapi bukan asas yang dilanggar.

No. 17 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: tujuan = hasil yang ingin dicapai bagi demokrasi (legitimasi, kontrol, wakil berkualitas, kepentingan generasi muda). **Cara** = tindakan pemilih (terdaftar, datang ke TPS, mempelajari calon, menolak politik uang dan hoaks).

Pernyataan 1 – Salah. Datang ke TPS adalah tindakan, jadi termasuk cara.
Pernyataan 2 – Benar. Kontrol atas kekuasaan secara damai adalah tujuan partisipasi.
Pernyataan 3 – Benar. Menolak politik uang dan hoaks adalah tindakan pemilih cerdas, jadi termasuk cara.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 berisi perilaku yang benar, tetapi digolongkan ke jenis yang salah.

No. 18 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: IPTEK berdampak **ganda**. Dampak **teknis** (cepat, murah) berbeda dari dampak **strategis** (pemerataan, persatuan). Peluang dari teknologi tetap disertai ancaman, sehingga warga perlu **aman digital**.

Pernyataan 1 – Benar. Cepat dan murah adalah dampak teknis; belum menunjukkan makna bagi persatuan.
Pernyataan 2 – Benar. Pemerataan kesejahteraan antardaerah memperkuat kesatuan ekonomi Nusantara dan rasa memiliki negara yang sama.
Pernyataan 3 – Salah. Manfaat teknologi tidak menghapus risiko penipuan dan kebocoran informasi pribadi; keamanan tetap harus dijaga.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 melihat satu sisi teknologi saja dan melupakan dampak gandanya.

No. 19 Kunci: C

Konsep: dalam **negara kesatuan**, kewenangan daerah **berasal dari pusat** yang menyerahkannya lewat undang-undang. Dalam **negara federal**, negara bagian sudah berdaulat (punya konstitusi sendiri) lalu menyerahkan sebagian urusan ke pemerintah federal. Otonomi seluas apa pun tidak mengubah negara kesatuan menjadi federal.

Analisis opsi:
- A ✗ — keliru tentang isi otonomi khusus; urusannya tidak terbatas pada budaya.
- B ✗ — alasan karangan yang tidak menjelaskan beda kesatuan dan federal.
- C ✓ — arah kewenangan menentukan bentuk negara: dari pusat ke daerah berarti kesatuan.
- D ✗ — tidak benar dan tidak menjawab inti kesalahan warganet.
- E ✗ — federal bukan hasil permintaan otonomi; negara bagian berdaulat lebih dahulu.

Jawaban: C.

Jebakan: otonomi luas disamakan dengan federal. Ukuran pembedanya adalah asal kewenangan, bukan luasnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 20 Kunci: B, C, E

Konsep: Wawasan Nusantara memandang Nusantara sebagai satu kesatuan **politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan**, dengan laut sebagai **pemersatu**. Ancaman atau musibah di satu daerah adalah urusan seluruh bangsa.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — memandang laut sebagai pemisah dan membiarkan satu pulau menanggung sendiri.
- B ✓ — rasa senasib sebagai satu bangsa (kesatuan sosial budaya).
- C ✓ — laut dipakai sebagai jalur penghubung antarpulau.
- D ✗ — kekayaan alam adalah modal bersama bangsa yang dikelola untuk kemakmuran bersama, bukan berpindah milik kepada daerah penyumbang.
- E ✓ — pemerintah yang hadir sampai daerah terdampak mencerminkan kesatuan politik.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: D memakai istilah "milik bersama" secara keliru: bantuan tidak membuat kekayaan suatu daerah berpindah kepada daerah lain.

No. 21 Kunci: A

Konsep: Wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah, sampai pulau terluar, sebagai satu kesatuan politik. Putusan Sipadan–Ligitan menunjukkan bahwa kedaulatan atas wilayah tidak cukup diklaim; Mahkamah menilai **bukti pengelolaan nyata oleh pemerintah** (*effectivités*). Sejak itu Indonesia memberi perhatian lebih pada pulau-pulau kecil terluar.

Analisis opsi:

- A ✓ — inti pertimbangan putusan: pemerintahan yang benar-benar hadir dan mengelola.
- B ✗ — kedua negara sepakat membawa sengketa ke Mahkamah; jalan damai tetap tepat walau hasilnya tidak sesuai harapan.
- C ✗ — kebalikan dari pelajaran putusan; pulau kecil justru menentukan batas wilayah.
- D ✗ — putusan menunjukkan klaim di atas kertas tidak cukup.
- E ✗ — kegiatan orang perorangan tanpa pengaturan pemerintah tidak dinilai sebagai bukti pengelolaan negara; tanggung jawabnya ada pada pemerintah.

Jawaban: A.

Jebakan: D sesuai dengan anggapan umum "asal ada di peta", padahal putusan menolaknya. B menyalahkan jalannya, bukan memetik pelajarannya.

No. 22 Kunci: C

Konsep: bebas berarti tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan; **aktif** berarti ikut mengupayakan penyelesaian secara damai, terutama lewat mekanisme bersama. Kepentingan nasional dalam bebas aktif dibaca **jangka panjang**: hubungan baik dengan banyak negara dan kepercayaan dunia.

Analisis opsi:

- A ✗ — memihak demi keuntungan sesaat; melanggar unsur bebas dan merusak hubungan dengan pihak lain.
- B ✗ — tampak tidak memihak, tetapi merugikan kepentingan nasional dan tidak aktif mendamaikan.
- C ✓ — bebas (tidak ikut memboikot) dan aktif (mendorong penyelesaian di forum bersama).
- D ✗ — tetap memihak, hanya berganti-ganti menurut keuntungan.
- E ✗ — netral pasif; tidak memenuhi unsur aktif.

Jawaban: C.

Jebakan: A memakai frasa "kepentingan nasional" dari pasal yang dikutip, tetapi menafsirkannya sebagai keuntungan jangka pendek.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 23 Kunci: D

Konsep: Wawasan Nusantara memandang Nusantara sebagai **kesatuan politik**: satu wilayah, satu bangsa, dan satu pemerintahan yang **hadir sampai pulau terluar**. Soal menanyakan **makna** bagi kesatuan, bukan manfaat teknis.

Analisis opsi:

• A ✗ — manfaat teknis yang benar, tetapi belum menjelaskan makna bagi kesatuan bangsa.
• B ✗ — ilustrasi tidak menyebut pungutan; layanan dokumen kependudukan bukan sumber pendapatan.
• C ✗ — berlebihan; warga tetap berhubungan dengan pemerintah, hanya caranya lebih mudah.
• D ✓ — warga pulau terluar tercatat dan dilayani negara seperti warga lain: kesatuan politik.
• E ✗ — Wawasan Nusantara memandang laut sebagai **pemersatu**; kapal layanan justru memakai laut sebagai penghubung.

Jawaban: D.

Jebakan: A benar tetapi hanya manfaat teknis; E memakai fakta (layanan datang ke tiap pulau) untuk menarik cara pandang yang keliru.

No. 24 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: pertahanan negara bersifat **semesta**: melibatkan seluruh rakyat (kerakyatan), seluruh sumber daya nasional (kesemestaan), dan seluruh wilayah (kewilayahan). Sumber daya seperti industri, tenaga ahli, serta sarana dan prasarana dapat menjadi **komponen pendukung** yang memperkuat komponen utama (TNI). Pertahanan disiapkan sejak masa damai, sementara warga dan perusahaan tetap menjalankan kegiatan sipilnya.

Pernyataan 1 – Benar. Kemampuan industri dalam negeri adalah sumber daya buatan yang dapat mendukung pertahanan (kesemestaan).
Pernyataan 2 – Salah. TNI adalah komponen utama, tetapi industri dan perguruan tinggi ikut memperkuat pertahanan sesuai bidangnya.
Pernyataan 3 – Salah. Semesta berarti seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara terpadu bila diperlukan, bukan semua pihak berada di bawah komando militer setiap saat.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 menyempitkan pertahanan menjadi urusan TNI saja; pernyataan 3 melebih-lebihkan arti "semesta".

No. 25 Kunci: B

Konsep: dampak **teknis** menyangkut cara kerja (lebih cepat, lebih murah, lebih jernih); dampak **strategis** menyangkut kehidupan bangsa (persatuan, kedaulatan, pemerataan). Nama Palapa menunjukkan tujuan strategisnya: alat **pemersatu bangsa**.

Analisis opsi:

• A ✗ — dampak teknis-ekonomis; belum menjelaskan makna bagi keutuhan.
• B ✓ — warga yang terpisah laut merasa sebagai satu bangsa karena mengikuti peristiwa yang sama.
• C ✗ — berlebihan; satelit menghubungkan komunikasi, bukan menggantikan angkutan.
• D ✗ — dampak teknis tentang mutu siaran.
• E ✗ — kebalikan dari tujuan satelit, yang justru menghubungkan daerah dengan pusat dan antardaerah.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan D benar sebagai manfaat teknologi, tetapi pertanyaan menanyakan dampak strategis bagi keutuhan NKRI.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 26 Kunci: 1S 2S 3B

Konsep: menurut UNCLOS 1982, perairan di sisi dalam garis pangkal kepulauan berada di bawah **kedaulatan** Indonesia. Laut teritorial (12 mil) juga di bawah kedaulatan penuh, dengan hak lintas damai bagi kapal asing. Di **ZEE** (sampai 200 mil), Indonesia memiliki **hak berdaulat atas sumber daya alam**, tetapi kapal dan pesawat negara lain tetap bebas melintas.

Pernyataan 1 – Salah. ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh; kebebasan berlayar di ZEE tetap diakui.
Pernyataan 2 – Salah. Sejak Deklarasi Djuanda dan pengakuan UNCLOS, laut di antara pulau bukan lagi laut bebas, melainkan perairan Indonesia.
Pernyataan 3 – Benar. Menangkap ikan di ZEE tanpa izin melanggar hak berdaulat atas sumber daya.

Jawaban: Salah – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan hak berdaulat di ZEE dengan kedaulatan penuh; pernyataan 2 memakai cara pandang lama (laut sebagai pemisah).

No. 27 Kunci: E

Konsep: Pasal 30 UUD NRI 1945 membagi tugas: **TNI** mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara; **Polri** menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Rakyat adalah **kekuatan pendukung**, bukan pengganti aparat. Sengketa perdata seperti batas lahan diselesaikan melalui **jalur hukum**.

Langkah 1 – Tentukan jenis gangguan. Perselisihan lahan warga–perusahaan adalah gangguan ketertiban masyarakat, bukan ancaman terhadap kedaulatan.
Langkah 2 – Tentukan siapa berperan. Ketertiban → Polri; sengketa batas → pengadilan atau instansi pertanahan.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — melebih-lebihkan jenis ancaman; urusan ketertiban bukan tugas TNI.
• B ✗ — kata "pendukung" tidak berarti warga boleh menindak atau mengusir sendiri.
• C ✗ — sifat kerakyatan disalahartikan; tugasnya pun tetap keliru karena ini urusan ketertiban.
• D ✗ — pihak swasta tidak berwenang mengusir warga dengan kekuatan bersenjata.
• E ✓ — pembagian peran sesuai Pasal 30 dan penyelesaian sengketa secara hukum.

Jawaban: E.

Jebakan: B dan C memakai istilah Sishankamrata yang benar (kekuatan pendukung, kerakyatan) untuk membenarkan tindakan yang keliru.

No. 28 Kunci: A

Konsep: sikap aktif yang sesuai bebas aktif antara lain **mengirim bantuan kemanusiaan bagi korban sipil dari semua pihak** dan bertindak **lewat mekanisme bersama** seperti PBB, tanpa memihak dan tanpa campur tangan sepihak.

Analisis opsi:
• A ✓ — aktif menolong, tidak memihak, dan lewat mekanisme bersama.
• B ✗ — memihak satu kelompok; melanggar unsur bebas dan nilai kemanusiaan.
• C ✗ — netral pasif; bantuan kemanusiaan bukan campur tangan.
• D ✗ — tindakan sepihak di negara lain melanggar prinsip tidak campur tangan.
• E ✗ — pemerintah melepaskan perannya, dan bantuan bisa tetap disalurkan secara memihak.

Jawaban: A.

Jebakan: C terdengar berhati-hati, padahal bebas aktif bukan berdiam diri; D terdengar aktif, tetapi caranya sepihak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 29 Kunci: A, C, D

Konsep: pelopor pemilih pemula **mengajak memakai hak pilih dengan benar**, bukan mengarahkan pilihan. Cara yang tepat: mengecek DPT, membagikan informasi resmi, mendiskusikan program dengan santun, menolak politik uang dan hoaks. Kalimat yang menjawab "untuk apa" adalah **tujuan**, bukan cara.

Periksa setiap usulan:

- A ✓ — memastikan teman terdaftar: cara.
- B ✗ — mengarahkan pilihan melanggar asas bebas; pelopor mengajak memilih, bukan memilih seseorang.
- C ✓ — diskusi program tanpa mengarahkan: cara pemilih cerdas.
- D ✓ — menolak politik uang: cara yang menjaga asas bebas dan jujur.
- E ✗ — kalimat ini benar sebagai **tujuan** partisipasi, tetapi pertanyaannya menanyakan **cara**.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: E benar isinya tetapi salah jenisnya (tujuan, bukan cara). B dibuka dengan "mengajak teman" seperti A, tetapi isinya mengarahkan pilihan.

No. 30 Kunci: E

Konsep: UU 23/2019 merumuskan lima nilai dasar bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, **rela berkorban untuk bangsa dan negara**, serta kemampuan awal bela negara. Rela berkorban berarti mau menyisihkan waktu, tenaga, atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.

Analisis opsi:

- A ✗ — ilustrasi tidak menyebut ajakan mengganti dasar negara.
- B ✗ — Rani justru melepas latihan basket.
- C ✗ — ilustrasi tidak menyebut kegiatan merawat lingkungan pantai.
- D ✗ — ilustrasi tidak menyebut aturan sekolah.
- E ✓ — Rani melepas kegiatan yang ia sukai demi anak-anak yang membutuhkan.

Jawaban: E.

Jebakan: setiap pengecoh menyebut nilai yang benar ada, tetapi alasannya tidak terdapat dalam ilustrasi.

Simulasi 1 — Soal Asli TKA 2025

No. 1 Kunci: A

Konsep: sebagai ideologi pemersatu, Pancasila berfungsi sebagai **perekat (common platform)** bagi semua golongan: mayoritas maupun minoritas, rakyat maupun pemerintah. Dengan Pancasila, perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk berpecah karena semua berdiri di atas dasar bersama yang sama.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✓ — "perekat" hubungan semua kelompok umat beragama dan pemerintah = fungsi pemersatu.
• B ✗ — dialog **sesama** agama (intra-agama) tidak menjawab konflik **antar**agama. *Jebakan:* kata "dialog" terdengar tepat.
• C ✗ — "dasar melihat perbedaan paham" tidak menunjukkan fungsi mempersatukan; Pancasila tidak menilai paham keagamaan.
• D ✗ — Pancasila bukan "sarana menguji" kepekaan sosial; solidaritas **kelompok** juga bisa mempertebal sekat.
• E ✗ — menghormati hari besar agama adalah contoh **perilaku** toleran, bukan peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu.

Jawaban: A.

No. 2 Kunci: B

Konsep: tantangan pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) adalah hal yang membuat **sebagian warga sulit memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak**.

Analisis opsi:
• A ✗ — lamanya penyusunan regulasi adalah soal proses legislasi, bukan hambatan utama warga memperoleh pekerjaan.
• B ✓ — ketidaksetaraan (pendidikan, wilayah, gender, disabilitas) dan keterbatasan infrastruktur membuat akses kerja tidak merata. Ini langsung menghambat hak atas pekerjaan.
• C ✗ — keterampilan yang **merata dan setara** justru kondisi yang baik, bukan tantangan. *Jebakan:* membaca cepat tanpa memperhatikan kata "merata".
• D ✗ — perbedaan standar antarpemberi kerja adalah hal wajar dalam dunia kerja.
• E ✗ — pekerja anak justru seharusnya **dilarang** bekerja; isu ini tidak tepat untuk hak atas pekerjaan bagi warga negara secara umum.

Jawaban: B.

No. 3 Kunci: A

Konsep: Pancasila adalah **dasar negara** dan sumber nilai bagi setiap perubahan konstitusi. Pancasila bukan "aturan teknis" dan bukan alat milik satu lembaga tertentu; ia menjadi **pedoman nilai** bagi semua pihak.

Langkah analisis:
1. Masalah: perubahan cara memilih presiden → menyangkut **kedaulatan rakyat** (sila keempat).
2. Peran Pancasila: menjadi tolok ukur agar perubahan apa pun tetap menjamin kedaulatan rakyat dan keadilan.

Analisis opsi:
• A ✓ — Pancasila sebagai dasar pertimbangan nilai bagi setiap perubahan, dengan ukuran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
• B ✗ — Pancasila bukan "alat hukum tertinggi" dalam arti peraturan; hukum dasar tertulis tertinggi adalah UUD 1945. Pancasila adalah **sumber dari segala sumber hukum**. Selain itu, tujuan "tidak menyalahi sistem yang sudah berlaku" menolak semua perubahan.
• C ✗ — Pancasila bukan acuan **teknis**.
• D, E ✗ — membatasi peran Pancasila pada satu cabang kekuasaan; padahal Pancasila mengikat semua lembaga dan warga negara.

Jawaban: A.

No. 4 Kunci: C

Konsep: soal "nilai + alasan" menuntut dua hal benar sekaligus: (1) nilainya cocok dengan ilustrasi, dan (2) **alasannya** benar-benar tergambar dalam ilustrasi.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Langkah analisis:
1. Inti ilustrasi: warga **beragam** (agama, budaya, sosial) tetapi **hidup berdampingan, saling menghargai**, dan kompak dalam kegiatan bersama.
2. Keberagaman yang tidak memecah belah = nilai **Persatuan** (sila ketiga).

Analisis opsi:
• A ✗ — ilustrasi tidak menyebut kebebasan beribadah.
• B ✗ — "saling membantu" tidak disebut; ilustrasi menekankan hidup rukun dalam perbedaan.
• C ✓ — nilai Persatuan dengan alasan yang tepat: perbedaan tidak menghalangi kerukunan.
• D ✗ — nilainya benar, tetapi alasannya keliru: warga berpartisipasi **bersama**, bukan dibagi "sesuai peran kelompok budayanya". *Jebakan:* nilai benar, alasan salah.
• E ✗ — pemerataan hak dan fasilitas tidak dibahas dalam ilustrasi.

Jawaban: C.

No. 5 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: fungsi Pancasila dalam pergaulan global adalah menjadi **landasan nilai** bagi hubungan dan kerja sama antarbangsa: toleran, setara, adil, dan damai (sejalan dengan alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945).

Pernyataan 1 – Benar. Nilai toleransi dan keadilan menjadi landasan hubungan internasional yang harmonis dan berkeadilan, sesuai ilustrasi ("solusi universal ... kerukunan dan harmoni").

Pernyataan 2 – Benar. Kerja sama internasional yang berkeadilan adalah perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila.

Pernyataan 3 – Salah. Ilustrasi menyebut Indonesia berpotensi menjadi *role model* **kerukunan**, bukan "bangsa yang unggul" atau lebih tinggi derajatnya dari bangsa lain. Gagasan meninggikan derajat bangsa sendiri di atas bangsa lain bertentangan dengan sila kedua (persamaan derajat manusia) dan cenderung chauvinistik. Lagi pula, itu dampak yang dibayangkan, bukan **fungsi** Pancasila. *Jebakan:* kalimatnya terdengar membanggakan.

Jawaban: Benar, Benar, Salah.

No. 6 Kunci: E

Konsep: Pancasila (terutama sila ke-2 dan ke-5) menuntut keadilan bagi **semua pihak**. Bila dua kelompok warga sama-sama punya hak (pedagang: hak atas penghidupan layak; pengguna jalan: hak atas keamanan dan kelancaran), peran Pancasila adalah **menyelaraskan** keduanya sehingga hak dan kewajiban seimbang, bukan memenangkan salah satu pihak.

Langkah analisis:
1. Identifikasi pihak: pedagang dan pengguna jalan, masing-masing punya kepentingan yang sah.
2. Identifikasi masalah: hak pedagang dijalankan dengan mengabaikan kewajiban (tidak mengganggu fungsi jalan).
3. Kata kunci soal: "semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan" → solusi harus adil bagi **kedua** pihak.

Analisis opsi:
• A ✗ — hanya memikirkan pedagang. *Jebakan:* terdengar membela hak hidup layak, tetapi berat sebelah.
• B ✗ — kepentingan bersama didahulukan **setelah** kepentingan pribadi terlaksana; urutannya terbalik dari nilai Pancasila.
• C ✗ — benar secara umum (kebersamaan, keseimbangan), tetapi tidak menjawab inti ilustrasi, yaitu **dua kepentingan yang bertentangan** yang harus diselaraskan. *Jebakan:* pilihan normatif yang terlalu umum.
• D ✗ — hanya memenangkan pengguna jalan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• E ✓ — menyelaraskan dua kepentingan, tujuan harmoni sosial, dan menekankan keseimbangan hak–kewajiban: tepat menjawab ilustrasi.

Cek ulang: opsi yang benar harus menyebut kedua pihak sekaligus → hanya E.

Jawaban: E.

No. 7 Kunci: D

Konsep: pertanyaan menanyakan **alasan** kerja sama, bukan bentuk kegiatannya. Kerja sama pusat–daerah diperlukan karena masing-masing punya kelebihan yang saling melengkapi: pusat memiliki kebijakan dan sumber dana, daerah **paling mengetahui kondisi warganya**.

Analisis opsi:
• A ✗ — menjelaskan apa yang dilakukan pusat (mengulang stimulus), bukan alasan perlunya kerja sama.
• B, C, E ✗ — hanya menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah **sendiri**; tidak menunjukkan mengapa daerah perlu bekerja sama dengan pusat. *Jebakan:* semuanya kegiatan penanggulangan kemiskinan yang benar.
• D ✓ — menunjukkan hubungan timbal balik: daerah memetakan kemiskinan secara akurat, lalu pusat memberi dukungan. Inilah alasan kerja sama.

Jawaban: D.

No. 8 Kunci: B

Konsep: sila keempat (kerakyatan) mengandung hak politik warga: bebas menentukan pilihan dan bebas berpendapat. Dalam pemilu, HAM ini terwujud bila setiap orang **menghormati** pilihan politik orang lain (pemilu bersifat bebas dan rahasia).

Langkah analisis:
1. Ilustrasi: pemilu = sarana kedaulatan rakyat.
2. Pertanyaan: perilaku yang mencerminkan **HAM** (hak dan kebebasan orang lain) sesuai sila keempat.
3. Perilaku yang tepat menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan memilih dan berpendapat.

Analisis opsi:
• A ✗ — memilih karena mengikuti arah partai berarti tidak bebas; hak pilih seharusnya sesuai hati nurani.
• B ✓ — menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik = menghormati hak politik orang lain.
• C ✗ — mengikuti kampanye **seluruh** partai bukan kewajiban dan tidak berkaitan dengan menghormati hak orang lain.
• D ✗ — tujuan "menilai strategi pemenangan" bukan perwujudan HAM; debat seharusnya untuk menilai visi-misi.
• E ✗ — alasan menerima hasil "karena diawasi negara" keliru; hasil diterima karena prosesnya sah, dan sengketa tetap dapat digugat ke MK.

Jawaban: B.

No. 9 Kunci: A

Konsep: keunggulan Pancasila dalam hubungan internasional terletak pada nilai **kemanusiaan universal** (sila ke-2) yang dijalankan melalui politik luar negeri **bebas aktif**: tidak memihak blok mana pun, tetapi aktif menciptakan perdamaian.

Langkah analisis:
1. Kegiatan: mengirim pasukan perdamaian ke negara konflik → menolong rakyat negara lain yang menderita akibat konflik = **solidaritas kemanusiaan**.
2. Pasukan perdamaian PBB harus netral terhadap pihak yang bertikai → sesuai prinsip **bebas aktif**.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✓ — memuat nilai (solidaritas kemanusiaan) dan caranya (politik luar negeri bebas aktif).
• B ✗ — "persatuan" (sila ke-3) terutama tentang persatuan bangsa Indonesia, bukan inti misi perdamaian.
• C ✗ — hubungan sebab-akibatnya terbalik: perdamaian bukan cara menerapkan keadilan sosial. *Jebakan:* memakai kata "keadilan sosial" dan "perdamaian" dari stimulus.
• D ✗ — persaingan geopolitik bukan nilai Pancasila; misi perdamaian tidak bertujuan bersaing.
• E ✗ — "kepentingan strategis" adalah kepentingan nasional pragmatis, bukan keunggulan nilai.

Jawaban: A.

No. 10 Kunci: D

Konsep: soal antarsila meminta perilaku yang memuat **dua** unsur sekaligus:
• Sila ke-2: kepedulian dan penghargaan pada martabat manusia (misalnya menolong sesama).
• Sila ke-4: pengambilan keputusan bersama melalui **musyawarah**.

Analisis opsi:
• A ✗ — menghormati pendapat (sila ke-4) dan bekerja sama (lebih dekat ke sila ke-3/gotong royong); unsur kemanusiaan tidak menonjol, dan tidak ada musyawarah sebagai cara mengambil keputusan.
• B ✗ — hanya sila ke-2 (perlakuan setara).
• C ✗ — kerja sama membangun fasilitas umum = gotong royong/keadilan sosial; tidak ada unsur musyawarah.
• D ✓ — **membantu korban banjir** (sila ke-2) yang diputuskan **melalui musyawarah warga** (sila ke-4).
• E ✗ — hanya sila ke-2 (dan kerukunan beragama).

Cek ulang: hanya D yang memuat kedua sila secara jelas.

Jawaban: D.

No. 11 Kunci: B

Konsep: perselisihan **hasil** pemilihan kepala daerah diperiksa dan diadili oleh **Mahkamah Konstitusi** (UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 157; MK menegaskan kewenangan ini tetap ada melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022). Pada Pilkada 2024, MK meregistrasi 310 perkara perselisihan hasil.

Langkah analisis:
1. Objek sengketa: **hasil** penghitungan suara yang sudah ditetapkan KPU daerah.
2. Lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil: MK. Putusannya final; MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang.

Analisis opsi:
• A ✗ — Presiden tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil; membuat aturan baru juga tidak menyelesaikan kasus yang sedang terjadi.
• B ✓ — sesuai kewenangan MK.
• C ✗ — KPU adalah pihak yang hasilnya digugat (termohon), jadi tidak mungkin menjadi pemutus.
• D ✗ — Bawaslu menangani pelanggaran pada tahapan pemilihan; pemungutan suara ulang **akibat sengketa hasil** diperintahkan oleh putusan MK. *Jebakan:* PSU memang bisa terjadi, tetapi bukan atas perintah Bawaslu dalam sengketa hasil.
• E ✗ — perda tidak dapat mengatur atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan.

Jawaban: B.

No. 12 Kunci: E

Konsep: Pasal 27 ayat (3) mengatur **bela negara**: menjaga keberlangsungan, keamanan, dan kedaulatan negara. Hak dan kewajiban yang dipilih harus berkaitan dengan **pertahanan/kedaulatan**, bukan hak-kewajiban umum lainnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✗ — kegiatan sosial dan patuh peraturan lingkungan → terlalu umum, bukan bela negara.
• B ✗ — hak pendidikan adalah isi Pasal 31, bukan Pasal 27 ayat (3).
• C ✗ — menyampaikan aspirasi adalah isi Pasal 28/28E ayat (3).
• D ✗ — menjaga ketertiban lingkungan → lebih dekat ke kewajiban menghormati hak orang lain; tidak menyentuh kedaulatan.
• E ✓ — warga yang ikut membela negara berhak memperoleh **perlindungan negara**, dan wajib menjaga **keamanan serta kedaulatan bangsa** = inti bela negara.

Jawaban: E.

No. 13 Kunci: B

Kata kunci soal: alasan kegiatan itu **memperkukuh persatuan dan kesatuan**, bukan manfaat lainnya.

Analisis opsi:
• A, C ✗ — manfaat **ekonomi** (produk lokal, lapangan kerja).
• B ✓ — mempertemukan komunitas dari seluruh provinsi dan menampilkan keberagaman budaya membuat warga saling mengenal dan menghargai, sehingga hubungan antarwarga negara makin erat.
• D, E ✗ — manfaat **pariwisata**.

Jebakan: semua opsi adalah manfaat yang benar dari sebuah festival budaya, tetapi hanya B yang berkaitan dengan persatuan.

Jawaban: B.

No. 14 Kunci: 1B 2B 3S

Pernyataan 1 – Benar. Perlakuan yang setara tanpa diskriminasi menghilangkan rasa ketidakadilan yang sering memicu disintegrasi.

Pernyataan 2 – Benar. Deteksi dini dan penanganan konflik, disertai kerja sama aparat/lembaga dengan masyarakat, adalah upaya menjaga integrasi.

Pernyataan 3 – Salah. Bagian awalnya benar (dialog antarkelompok), tetapi tujuannya dibelokkan: "dengan menyesuaikan perkembangan **budaya lain**". Integrasi dalam bingkai kebinekaan dijaga dengan menghargai budaya bangsa sendiri yang beragam, bukan menyesuaikan diri dengan budaya luar. *Jebakan:* awal kalimat benar, ujung kalimat keliru.

Jawaban: Benar, Benar, Salah.

No. 15 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika = "berbeda-beda tetapi tetap satu". Persatuan dibangun dengan **mengakui dan menghargai** perbedaan, bukan menghapusnya.

Pernyataan 1 – Salah. "Menghilangkan segala bentuk perbedaan" bertentangan dengan makna *bhinneka* (beragam). Bhinneka Tunggal Ika tidak menyeragamkan.

Pernyataan 2 – Benar. Penghargaan terhadap perbedaan mengurangi konflik yang dapat muncul akibat ketidakstabilan (seperti disebut ilustrasi) dan memperkuat persatuan.

Pernyataan 3 – Benar. Kesadaran akan keberagaman dan kesatuan mendorong masyarakat bekerja sama dan berkontribusi, termasuk dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim.

Jawaban: Salah, Benar, Benar.

No. 16 Kunci: A

Konsep: wawasan nusantara memandang kekayaan di seluruh wilayah sebagai **milik bersama bangsa**, sehingga tingkat perkembangan ekonomi harus **serasi dan seimbang di seluruh daerah**. Dalam kaitannya dengan **keutuhan NKRI**, pemerataan sangat penting: kesenjangan antardaerah dapat memicu rasa ketidakadilan dan gerakan memisahkan diri.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✓ — pemerataan pendapatan meniadakan kesenjangan antardaerah dan antarkelompok yang dapat mengancam keutuhan.
• B ✗ — ekonomi kuat dan mandiri adalah ciri **ketahanan** ekonomi; tidak menjelaskan hubungannya dengan keutuhan wilayah.
• C, E ✗ — eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam tanpa pemerataan justru dapat memperlebar kesenjangan.
• D ✗ — partisipasi seluruh masyarakat adalah **ciri demokrasi ekonomi** (definisinya), tetapi soal menanyakan **pentingnya bagi keutuhan NKRI**. Hasil akhir yang menjaga keutuhan adalah pemerataan (A). *Jebakan:* paling mirip dengan kata "demokrasi ekonomi" di stimulus.

Jawaban: A.

No. 17 Kunci: C

Kata kunci soal: tantangan dalam **penegakan hukum** (proses hukum), bukan penyebab pencemaran.

Langkah analisis:
1. Bukti dalam ilustrasi: proses hukum lambat + kabar "uang pelicin" agar kasus tidak diproses → aparat dipengaruhi suap dan kekuatan modal.
2. Dampaknya: warga kehilangan kepercayaan pada penegak hukum.

Analisis opsi:
• A ✗ — warga justru aktif melapor.
• B ✗ — yang lemah adalah perlindungan bagi **korban**, bukan bagi pelaku.
• C ✓ — suap ("uang pelicin") dan pengaruh kuasa membuat hukum tidak ditegakkan.
• D ✗ — tidak ada penyelesaian kekeluargaan dalam ilustrasi.
• E ✗ — rendahnya kesadaran pengusaha adalah **penyebab pencemaran**, bukan tantangan dalam proses penegakan hukum. *Jebakan:* benar secara fakta, salah sasaran pertanyaan.

Jawaban: C.

No. 18 Kunci: A, C, E

Angka pilihan di pembahasan: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E.

Konsep: tujuan partisipasi pemilih pemula adalah ikut menentukan pemimpin yang baik, memilih secara cerdas dan bebas, serta menumbuhkan budaya partisipasi.

Analisis:
• 1 ✓ — memberikan suara untuk memilih pemimpin yang membawa perubahan positif = tujuan utama pemilu.
• 2 ✗ — "menunjukkan jati diri" berorientasi pada citra diri, bukan tujuan berdemokrasi.
• 3 ✓ — sesuai tindakan Reza yang mengajak teman-temannya ikut serta.
• 4 ✗ — menolak politik uang benar, tetapi "memilih berdasarkan **kepentingan kelompok**" keliru; pemilih seharusnya memilih untuk kepentingan bersama. *Jebakan:* setengah benar.
• 5 ✓ — sesuai materi sosialisasi: mengenali visi-misi (kompetensi) dan menggunakan hak pilih dengan bijak (hati nurani).

Jawaban: pernyataan 1, 3, dan 5.

No. 19 Kunci: B

Konsep: ilustrasi menekankan keberagaman **suku bangsa** (lebih dari 1.340 suku). Tantangan integrasi yang lahir langsung dari keberagaman suku adalah **sukuisme** (primordialisme/etnosentrisme): sikap mengutamakan dan menganggap sukunya paling baik sehingga merendahkan suku lain.

Analisis opsi:
• A ✗ — ketimpangan memang bisa mengancam integrasi, tetapi tidak berasal dari ilustrasi tentang

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

keberagaman suku. *Jebakan:* benar secara umum.

• B ✓ — sukuisme adalah tantangan yang langsung berkaitan dengan banyaknya suku bangsa.
• C ✗ — rasa rendah diri tidak umum dan tidak tergambar dalam ilustrasi.
• D ✗ — kepunahan suku tidak dibahas dan bukan tantangan integrasi.
• E ✗ — "modernisme" tidak berkaitan dengan ilustrasi.

Jawaban: B.

No. 20 Kunci: E

Konsep: diskriminasi berakar pada anggapan bahwa orang yang berbeda (suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial) **lebih rendah** sehingga boleh diperlakukan tidak adil. Upaya yang paling tepat adalah menanamkan kesadaran bahwa **setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama** (sila ke-2), sehingga semua orang harus diperlakukan setara.

Analisis opsi:

• A, B ✗ — menekankan kebebasan individu; tidak menyentuh inti masalah, yaitu perlakuan yang tidak setara.
• C ✗ — dialog untuk mencegah **prasangka** itu baik, tetapi menyasar prasangka (salah satu pemicu), bukan inti diskriminasi yang didefinisikan ilustrasi, yaitu **perlakuan tidak adil**. Opsi E lebih langsung dan mendasar.
• D ✗ — membeda-bedakan orang berdasarkan posisi sosial justru bentuk diskriminasi.
• E ✓ — kesadaran akan persamaan harkat dan martabat langsung meniadakan dasar diskriminasi.

Jawaban: E.

No. 21 Kunci: B

Langkah analisis:

1. Sasaran yang terdampak: **generasi muda**.
2. Saluran penyebaran: **media sosial**.
3. Bentuk ancaman: paham yang ingin **mengganti ideologi negara**.

Upaya terbaik harus menjawab ketiganya sekaligus dan bersifat **pencegahan jangka panjang**.

Analisis opsi:

• A ✗ — mencari "titik temu" dengan paham yang ingin mengganti ideologi negara berarti menawar Pancasila; dasar negara tidak dapat ditawar.
• B ✓ — pendidikan Pancasila (memperkuat ideologi), literasi digital (kebal terhadap konten radikal di media sosial), dan tokoh agama (meluruskan tafsir) menjawab ketiga unsur sekaligus.
• C ✗ — pengawasan dan teguran bersifat represif dan sementara; tidak membangun daya tangkal generasi muda.
• D ✗ — kampanye untuk membentuk opini bersifat satu arah dan kurang menyentuh pemahaman.
• E ✗ — "membahas perbedaan pandangan ideologi secara demokratis" menempatkan ideologi negara sebagai hal yang dapat diperdebatkan.

Jawaban: B.

No. 22 Kunci: 1B 2B 3S

Pernyataan 1 – Benar. Konsumen yang memilih produk dalam negeri menjaga pasar bagi produsen lokal sehingga ekonomi nasional kuat (gatra ekonomi).

Pernyataan 2 – Benar. Ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan daya saing (berwirausaha, meningkatkan mutu produk) menjawab ancaman menurunnya daya saing produk lokal.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pernyataan 3 – Salah. Tindakannya sama dengan pernyataan 1, tetapi **alasannya** keliru. Membeli produk dalam negeri hanya "karena lebih murah" adalah pertimbangan untung-rugi pribadi; bila produk asing lebih murah, sikap itu akan berbalik. Peran warga negara harus dilandasi kesadaran mencintai dan memperkuat ekonomi bangsa. *Jebakan:* tindakan benar, motif salah.

Jawaban: Benar, Benar, Salah.

No. 23 Kunci: B

Langkah analisis: pemicu disintegrasi dalam ilustrasi ada tiga: ketidakadilan, diskriminasi, dan **hoaks**. Cara yang tepat sebaiknya menjawab sebanyak mungkin pemicu itu dan dapat dilakukan **warga negara**.

Analisis opsi:

• A ✗ — membatasi budaya luar tidak berkaitan dengan ketiga pemicu.
• B ✓ — informasi yang benar melawan hoaks; dialog antarkelompok mengurangi prasangka dan diskriminasi, serta mencegah konflik.
• C ✗ — kelompok yang anggotanya berlatar sama justru mempertebal sekat (eksklusif).
• D ✗ — menyuarakan satu kelompok saja bersifat sepihak.
• E ✗ — sikap baik, tetapi pasif (sekadar "meminimalkan"); tidak aktif menangkal hoaks maupun diskriminasi.

Jawaban: B.

No. 24 Kunci: A, D

Angka pilihan di pembahasan: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E.

Konsep: integrasi nasional = proses **menyatukan** unsur-unsur bangsa yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. "Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika" berarti persatuan dicapai **tanpa menghapus perbedaan**, melalui toleransi dan kerja sama (seperti disebut ilustrasi).

Analisis:

• 1 ✓ — tujuan pokok integrasi: kesatuan dan persatuan sehingga hidup harmonis.
• 2 ✗ — peningkatan kualitas hidup melalui ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah tujuan **pembangunan nasional**, bukan tujuan integrasi.
• 3 ✗ — menjadi bangsa yang disegani adalah **dampak lanjutan**, dan tidak terkait langsung dengan bingkai kebinekaan dalam ilustrasi.
• 4 ✓ — kerja sama antarpemeluk agama dan suku bangsa = persatuan yang lahir **dari** kebinekaan, persis seperti yang ditekankan ilustrasi ("kerja sama antaretnis dan agama").
• 5 ✗ — membangun rasa bangga dan cinta tanah air adalah tujuan pembentukan **identitas nasional/nasionalisme**; tidak menyinggung keberagaman yang dipersatukan.

Jawaban: pernyataan 1 dan 4.

No. 25 Kunci: C

Konsep: masalahnya ada pada **dua sisi**: hak pedagang dilanggar (dilarang tiba-tiba tanpa ganti rugi), sedangkan kewajiban saling menghormati kepentingan juga diingkari. Solusi terbaik adalah yang mempertemukan kedua pihak agar memahami hak dan kewajiban masing-masing, yaitu **mediasi** (musyawarah dengan penengah, sesuai sila ke-4).

Analisis opsi:

• A ✗ — langkah baik, tetapi sepihak (hanya usulan pedagang) dan belum tentu menyelesaikan persoalan ganti rugi.
• B ✗ — mengumpulkan dukungan massa berpotensi menimbulkan konflik dan tidak menyelesaikan masalah.
• C ✓ — mediasi mempertemukan para pihak, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan menghasilkan kesepakatan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• D ✗ — tujuan "memastikan pedagang di pihak yang benar" bersifat memenangkan diri, bukan menyelesaikan masalah bersama.
• E ✗ — pedagang belum tentu berhak atas lahan itu ("hak sebagai pengguna lahan"); menyerahkan perjuangan kepada LSM juga tidak mempertemukan para pihak.

Jawaban: C.

No. 26 Kunci: B, C, E

Angka pilihan di pembahasan: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E.

Kriteria jawaban (dari ilustrasi): upaya itu harus (1) menjaga **kebinekaan**, yaitu melibatkan kelompok-kelompok yang **berbeda**, dan (2) dilakukan lewat **kerja sama** atau **toleransi**.

Analisis:
• 1 ✗ — tentang pembangunan berbasis aspirasi; tidak menyebut keberagaman, kerja sama antarkelompok, maupun toleransi.
• 2 ✓ — pertukaran ide **antarkelompok masyarakat** = kerja sama di tengah perbedaan yang menghasilkan inovasi.
• 3 ✓ — interaksi dan pemahaman **antarbudaya** (toleransi) serta kerja sama seni-budaya.
• 4 ✗ — kesadaran dan tanggung jawab terhadap pembangunan itu baik, tetapi tidak berkaitan dengan kebinekaan. *Jebakan:* terdengar positif dan berkaitan dengan "pembangunan nasional".
• 5 ✓ — kerja sama seni-budaya dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan interaksi **antara budaya yang berbeda**.

Cek ulang: pernyataan yang benar sama-sama memuat kata "antarkelompok/antarbudaya/budaya yang berbeda".

Jawaban: pernyataan 2, 3, dan 5.

No. 27 Kunci: 1B 2S 3S

Dasar hukum: Pasal 24C UUD NRI 1945.
• Ayat (1): MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
• Ayat (2): MK **wajib** memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pernyataan 1 – Benar. Sesuai Pasal 24C ayat (2) (bagian dari proses pemakzulan, Pasal 7B).

Pernyataan 2 – Salah. Menguji peraturan **di bawah UU terhadap UU** adalah wewenang **Mahkamah Agung** (Pasal 24A ayat 1). MK menguji **UU terhadap UUD**. *Jebakan:* keduanya sama-sama "menguji".

Pernyataan 3 – Salah. Memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan melantik pengganti adalah wewenang **MPR** (Pasal 3 ayat 2–3 dan Pasal 8). MK hanya memutus pendapat DPR secara hukum.

Jawaban: Benar, Salah, Salah.

No. 28 Kunci: A, B, C

Angka pilihan di pembahasan: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E.

Konsep: modal sosial = **kepercayaan, norma saling menghormati, dan jaringan kerja sama** yang tumbuh dari interaksi langsung antarwarga yang berbeda. Sikap positif yang menjadi modal sosial terlihat dari cara seseorang **berinteraksi** dalam keberagaman: terbuka, mau belajar, komunikatif, dan menghormati.

Analisis:
• 1 ✓ — aktif dalam pertukaran budaya dan mau mengenal budaya lain → membangun saling pengertian (sesuai kegiatan festival).
• 2 ✓ — komunikasi yang wajar dan menjaga kenyamanan → membangun rasa percaya

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

antarkelompok (sesuai diskusi lintas suku, agama, bahasa).
• 3 ✓ — menghormati simbol adat dan agama orang lain → norma saling menghormati, inti modal sosial.
• 4 ✗ — membagikan pengalaman di media sosial adalah kegiatan **publikasi**; tidak menunjukkan sikap dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda. Nilainya bergantung pada isi unggahan, sehingga tidak dapat dipastikan sebagai sikap modal sosial.
• 5 ✗ — berhati-hati menyampaikan pendapat itu baik, tetapi **tujuannya keliru**: diskusi lintas budaya bertujuan saling memahami, bukan agar keputusan "segera" terwujud. *Jebakan:* awal kalimat benar, tujuan di akhir kalimat salah.

Jawaban: pernyataan 1, 2, dan 3.

No. 29 Kunci: C

Konsep: modal sosial berbeda dari modal ekonomi. Modal sosial adalah ikatan, identitas bersama, norma, dan rasa saling percaya yang membuat masyarakat kompak membangun. Budaya seperti Reog menjadi modal sosial karena memperkuat **identitas dan jati diri bangsa** sehingga masyarakat tetap teguh di tengah arus budaya asing.

Analisis opsi:
• A ✗ — pariwisata dan ekonomi = modal **ekonomi**, bukan modal sosial.
• B ✗ — "mendatangkan modal pembangunan" berarti uang/investasi; pengakuan internasional bukan inti modal sosial.
• C ✓ — budaya menjadi **identitas** bangsa yang menyatukan dan memperkuat ketahanan budaya. Sesuai stimulus: Reog menjadi "bagian dari identitas budaya nasional".
• D ✗ — budaya lokal tidak menentukan prioritas pembangunan.
• E ✗ — menempatkan nilai Reog pada pengakuan dunia, bukan pada fungsinya bagi masyarakat sendiri. *Jebakan:* memakai fakta UNESCO dari stimulus.

Jawaban: C.

Simulasi 2 — Prediksi TKA 2026

No. 1 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: sesudah amandemen, lembaga negara **sejajar** dan saling mengawasi. Kekuasaan dibatasi bukan oleh satu lembaga tertinggi, melainkan oleh **checks and balances**: DPR mengawasi Presiden, MK menguji undang-undang, BPK memeriksa keuangan negara, dan sebagainya.

Pernyataan 1 – Salah. Justru setiap lembaga dapat dikoreksi lembaga lain sesuai wewenangnya.
Pernyataan 2 – Benar. Pengujian undang-undang oleh MK mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang.
Pernyataan 3 – Benar. Fungsi pengawasan DPR mengimbangi kekuasaan Presiden.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan "tidak ada lembaga tertinggi" dengan "tidak ada pengawasan".

No. 2 Kunci: D

Konsep: modal sosial adalah kepercayaan, jaringan, dan norma saling membantu yang memudahkan kerja sama. Keberagaman menjadi modal **bila dikelola**: anggota **setara**, saling percaya, dan perbedaan keahlian dipakai untuk **saling melengkapi**. Tanpa syarat itu, keberagaman bisa menjadi beban.

Analisis opsi:
• A ✗ — penyeragaman menghilangkan kekuatan keberagaman; usaha itu justru maju karena keahliannya berbeda.
• B ✗ — kesetaraan hilang bila kelompok terbesar memutuskan sendiri; ilustrasi menyebut keputusan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

dibicarakan bersama.

• C ✗ — manfaat promosi bukan syarat modal sosial; tidak menyentuh kepercayaan dan kerja sama.
• D ✓ — kepercayaan, kesetaraan, dan keahlian yang saling melengkapi adalah syarat keberagaman menjadi modal.
• E ✗ — bekerja terpisah berarti tidak ada kerja sama lintas kelompok.

Jawaban: D.

Jebakan: A ("kesatuan cara pandang") mirip pengecoh soal asli: terdengar mempersatukan, padahal menyeragamkan. C menarik karena memakai keberagaman, tetapi hanya untuk promosi.

No. 3 Kunci: D

Konsep: upaya terbaik menjaga keutuhan NKRI adalah upaya yang **menyasar akar** dan **sesuai peran pelakunya**. Akar masalah di ilustrasi adalah lemahnya rasa memiliki terhadap bangsa; peran guru adalah mendidik. Menumbuhkan kebanggaan tidak perlu merendahkan budaya negara tetangga.

Analisis opsi:

• A ✗ — larangan menyeluruh tidak realistis dan tidak menumbuhkan rasa memiliki.
• B ✗ — memindahkan masalah kepada aparat, padahal yang dibutuhkan pendidikan.
• C ✗ — seremonial; menyanyikan lagu tanpa pemahaman tidak menumbuhkan rasa memiliki.
• D ✓ — sesuai peran guru dan menyasar akar, yaitu rasa bangga dan memiliki.
• E ✗ — hukuman membuat murid makin menjauh dan tidak memperbaiki sebabnya.

Jawaban: D.

Jebakan: B dan C tampak tegas dan "nasionalis", tetapi tidak menyasar akar dan tidak sesuai peran guru.

No. 4 Kunci: B

Konsep: sesudah amandemen, beberapa wewenang Presiden dijalankan dengan melibatkan DPR sebagai wujud **checks and balances**. Bentuk keterlibatannya berbeda-beda: ada yang berupa **persetujuan** (misalnya menyatakan perang), ada yang berupa **pertimbangan** (misalnya mengangkat duta, Pasal 13). Pertimbangan wajib **diperhatikan**, tetapi keputusan tetap di tangan Presiden.

Analisis opsi:

• A ✗ — DPR tidak berwenang mengangkat duta; wewenang itu milik Presiden.
• B ✓ — sesuai bunyi Pasal 13: DPR memberi pertimbangan, Presiden yang mengangkat.
• C ✗ — "memperhatikan pertimbangan" tidak sama dengan "wajib mengikuti seluruhnya"; itu menyamakan pertimbangan dengan persetujuan.
• D ✗ — bertentangan dengan pasal yang dikutip; DPR tetap dilibatkan.
• E ✗ — MA tidak memutus perbedaan pendapat semacam ini; perselisihan wewenang antarlembaga pun menjadi wewenang MK, bukan MA.

Jawaban: B.

Jebakan: C paling menggoda karena terdengar demokratis, tetapi menukar konsep "pertimbangan" dengan "persetujuan".

No. 5 Kunci: A

Konsep: setiap sila dapat diamati sebagai perilaku. **Persatuan Indonesia** tampak ketika orang dari berbagai daerah bekerja sama sebagai satu bangsa; **keadilan sosial** tampak ketika kesempatan dan manfaat sampai kepada pihak yang paling tertinggal. Soal meminta perilaku yang memuat **keduanya**.

Analisis opsi:

• A ✓ — pelajar berbagai daerah bergerak bersama (sila ketiga) agar sekolah terpencil memperoleh bacaan seperti sekolah lain (sila kelima).
• B ✗ — mencerminkan sila pertama (dan kemanusiaan), bukan persatuan dan keadilan sosial.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✗ — musyawarah adalah wujud sila keempat.
• D ✗ — keadilan sosial bukan "persis sama"; lagi pula tidak ada unsur persatuan.
• E ✗ — hanya mencerminkan persatuan dalam keberagaman (sila ketiga); unsur keadilan sosial tidak ada.

Jawaban: A.

Jebakan: E dan D masing-masing hanya memuat salah satu sila. Soal "kedua sila sekaligus" menuntut kamu memeriksa dua syarat, bukan satu.

No. 6 Kunci: E

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun warga menyelesaikan benturan kepentingan sehari-hari dengan **menyelaraskan** kepentingan yang sama-sama sah melalui **musyawarah** (sila keempat), sehingga penghidupan satu pihak tidak mengorbankan keselamatan pihak lain (sila kedua dan kelima).

Langkah 1 – Kenali dua kepentingan yang sah. Petani berhak mencari nafkah; murid berhak atas keselamatan.
Langkah 2 – Cari penyelesaian yang menjaga keduanya. Pengaturan jam dan kecepatan membuat kopi tetap terangkut dan murid tetap aman.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — memenangkan petani karena jumlahnya banyak; keselamatan murid diabaikan.
• B ✗ — memenangkan orang tua murid dengan larangan total; penghidupan petani diabaikan.
• C ✗ — memindahkan kewajiban kepada orang tua, padahal sumber bahayanya angkutan truk.
• D ✗ — urutannya keliru: keselamatan murid baru dipikirkan **setelah** kepentingan ekonomi terpenuhi.
• E ✓ — kesepakatan yang menjaga kepentingan kedua pihak sekaligus.

Jawaban: E.

Jebakan: A dan B masing-masing terdengar adil karena membela pihak yang benar-benar punya kepentingan; D menyelipkan kata "setelah" seperti pengecoh soal asli.

No. 7 Kunci: E

Konsep: ancaman integrasi berupa **fanatisme kelompok** paling tepat diatasi dengan cara **dialogis** yang menyasar akar: pihak-pihak yang berselisih dipertemukan, menyepakati aturan, dan menumbuhkan rasa bersaudara sebagai sesama warga bangsa. Cara represif semata, pembubaran, atau seremonial tidak menyelesaikan akar.

Analisis opsi:
• A ✗ — berlebihan; pencak silat adalah budaya bangsa, yang bermasalah sikap fanatiknya.
• B ✗ — pengamanan perlu, tetapi tanpa dialog akar perselisihan tetap ada.
• C ✗ — memindahkan beban kepada warga yang menjadi korban.
• D ✗ — kegiatan seremonial yang tidak menyentuh sebab bentrokan.
• E ✓ — dialog dan kesepakatan antarpemimpin menyasar akar dan memulihkan hubungan.

Jawaban: E.

Jebakan: B terdengar tegas, tetapi hanya menahan gejala tanpa menyelesaikan sebabnya.

No. 8 Kunci: B

Konsep: dalam pergaulan antarbangsa, nilai Pancasila tampak sebagai **kemanusiaan** dan **persaudaraan yang setara** (sila kedua dan ketiga), sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang menghendaki ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Nominasi bersama menunjukkan budaya dapat menjadi jembatan persahabatan, bukan bahan perebutan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:

• A ✗ — sikap menang sendiri yang mengabaikan kenyataan kebaya hidup di banyak negara.
• B ✓ — menghargai warisan bersama dan memakainya untuk mempererat hubungan antarbangsa yang setara.
• C ✗ — berlebihan dan merendahkan kedaulatan budaya bangsa lain.
• D ✗ — menghindar; pengakuan bersama justru mengajak tetap melestarikan.
• E ✗ — sikap chauvinis: merasa budaya bangsa sendiri paling unggul.

Jawaban: B.

Jebakan: A dan E terdengar membela budaya bangsa, tetapi mengandung sikap merendahkan bangsa lain.

No. 9 Kunci: D

Konsep: penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menghukum, tetapi juga **memulihkan**. Pengguna narkotika membutuhkan **rehabilitasi**, dan perkara ringan tertentu dapat diselesaikan dengan **keadilan restoratif** (memulihkan korban dan pelaku). Cara ini mengurangi kepadatan dan mencegah pelanggaran berulang.

Analisis opsi:

• A ✗ — menambah tempat tidak mengubah sebab orang masuk dan kembali ke lembaga pemasyarakatan.
• B ✗ — hukuman berat semata justru menambah kepadatan; tidak menyasar akar.
• C ✗ — berlebihan dan mengabaikan hak korban.
• D ✓ — menyasar penyebab kepadatan dan pengulangan pelanggaran.
• E ✗ — memindahkan tanggung jawab negara sepenuhnya kepada keluarga.

Jawaban: D.

Jebakan: A terdengar praktis dan B terdengar tegas, tetapi keduanya tidak menyentuh akar masalah.

No. 10 Kunci: A, B, D

Konsep: modal sosial punya tiga unsur: **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma saling membantu**. Keberagaman warga menjadi modal bila unsur-unsur itu tumbuh dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat, tanpa membeda-bedakan dan tanpa menghapus identitas.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — saling membantu secara bergiliran menumbuhkan norma timbal balik dan kepercayaan.
• B ✓ — aturan bersama yang dipatuhi adalah norma yang menjaga kerja sama lintas suku.
• C ✗ — memilih pemain menurut suku adalah sikap eksklusif yang merusak kepercayaan; tidak ada di ilustrasi.
• D ✓ — saling meminjamkan peralatan menunjukkan jaringan antarkeluarga.
• E ✗ — modal sosial tidak menuntut penghapusan identitas; keberagaman tetap diakui.

Jawaban: A, B, dan D.

Jebakan: C memakai alasan "kompak", tetapi justru membeda-bedakan. Periksa tiap pernyataan satu per satu; jawaban benarnya lebih dari satu.

No. 11 Kunci: A

Konsep: Pancasila **mengakui hak milik dan kebebasan berusaha** (berbeda dari sosialisme yang menyerahkan ekonomi kepada negara), tetapi kebebasan itu **dibatasi kepentingan umum** dan diatur negara (berbeda dari liberalisme yang menyerahkan semuanya kepada pasar). Ciri ini dibaca dari **kebijakan**, bukan dari nama ideologinya.

Analisis opsi:

• A ✓ — swasta boleh berusaha (bukan sosialis), tarif dan mutu diatur serta jalan tanpa tarif tetap ada

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

(bukan liberal).

- B ✗ — ciri sosialisme; bertentangan dengan ilustrasi yang memberi ruang bagi swasta.
- C ✗ — ciri liberalisme; ilustrasi justru menyebut tarif ditetapkan pemerintah.
- D ✗ — kepentingan umum yang didahulukan, bukan pemilik modal.
- E ✗ — tidak ada persaingan bebas di sini; negara menetapkan aturan main.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan C masing-masing mengambil satu sisi kebijakan lalu menyimpulkannya berlebihan.

No. 12 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: "berbeda-beda tetapi tetap satu" berarti perbedaan **diakui dan dihargai**, bukan dihapus. Kegiatan yang membuat orang saling mengenal menumbuhkan rasa memiliki satu sama lain.

Pernyataan 1 – Benar. Saling mencicipi dan bercerita membuat siswa mengenal budaya daerah lain dan menghargainya.
Pernyataan 2 – Benar. Toleransi tidak mewajibkan orang menyukai semua hal; yang penting perbedaan selera disikapi dengan hormat, tanpa merendahkan.
Pernyataan 3 – Salah. Menyamakan bekal justru menghapus keberagaman yang menjadi inti kegiatan; persatuan bukan penyeragaman.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menyamakan **persatuan** dengan **keseragaman**.

No. 13 Kunci: C

Konsep: integrasi nasional tumbuh dari **interaksi** antarwarga yang berbeda: saling mengenal mengurangi prasangka. Memisahkan pelajar menurut agama sepanjang hari menciptakan **sekat** sejak usia sekolah, sehingga prasangka mudah tumbuh. Yang wajar dipisah hanyalah **jam pelajaran agama**.

Analisis opsi:

- A ✗ — alasan "lebih mudah" mengorbankan kesempatan belajar hidup dalam keberagaman.
- B ✗ — benar untuk jam pelajaran agama saja, tetapi kebijakan dalam soal memisahkan **seluruh** kelas.
- C ✓ — pemisahan sehari-hari mengurangi interaksi lintas agama yang dibutuhkan integrasi.
- D ✗ — keliru: pendidikan agama justru diajarkan di sekolah negeri sesuai agama siswa.
- E ✗ — konsep tertukar: masalahnya bukan kebebasan memilih agama, melainkan sekat antarsiswa.

Jawaban: C.

Jebakan: B benar sebagian (pelajaran agama memang terpisah) sehingga menggoda; bacalah kata "seluruh kelas" di ilustrasi.

No. 14 Kunci: E

Konsep: kebinekaan menjadi **modal sosial pembangunan** ketika keragaman warga melahirkan **kepercayaan**, **jaringan**, dan **kerja sama** yang menghasilkan manfaat bersama.

Analisis opsi:

- A ✗ — penghargaan hanyalah akibat tambahan, bukan alasan kebinekaan menjadi modal.
- B ✗ — alasan ekonomi semata; tidak menyinggung kerja sama warga yang beragam.
- C ✗ — tidak sesuai ilustrasi; iuran bersifat sukarela dari warga.
- D ✗ — bertentangan dengan ilustrasi yang menyebut satu ambulans dipakai bersama.
- E ✓ — kepercayaan dan kerja sama lintas suku dan agama menghasilkan layanan bagi semua warga.

Jawaban: E.

Jebakan: A dan B menyebut hal yang menguntungkan, tetapi bukan inti modal sosial (kepercayaan dan kerja sama).

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 15 Kunci: A, D, E

Konsep: kesenjangan antarwilayah adalah salah satu ancaman integrasi nasional karena menumbuhkan rasa diperlakukan tidak adil. Bila tidak ditangani, rasa itu mudah berubah menjadi **prasangka** terhadap kelompok lain. Penanganannya menyasar akar (pemerataan) dan mencegah prasangka (dialog), bukan membungkam keluhan.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✓ — kesenjangan menumbuhkan rasa tidak adil yang melemahkan rasa satu bangsa.
- B ✗ — menyalahkan kelompok lain adalah prasangka yang justru mengancam integrasi.
- C ✗ — membungkam keluhan tidak menyelesaikan kesenjangan dan mengabaikan hak berpendapat.
- D ✓ — pemerataan menyentuh penyebab ketegangan.
- E ✓ — dialog mencegah prasangka berkembang menjadi konflik.

Jawaban: A, D, dan E.

Jebakan: C terdengar tegas menjaga ketertiban, tetapi hanya menghilangkan gejala. Banyak siswa berhenti setelah satu jawaban; periksa semua pernyataan.

No. 16 Kunci: A

Konsep: hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin Pasal 28F. Hak ini **dapat dibatasi**, tetapi menurut Pasal 28J ayat (2) pembatasan harus ditetapkan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. "Nama baik asrama" bukan salah satunya.

Analisis opsi:

- A ✓ — alasan larangan tidak termasuk alasan pembatasan yang sah.
- B ✗ — kewenangan pengurus terbatas pada urusan asrama; "di mana pun" berlebihan.
- C ✗ — persetujuan mayoritas tidak mengubah larangan yang melanggar hak menjadi sah.
- D ✗ — kesimpulannya benar (larangan tidak tepat), tetapi alasannya keliru: hak ini bukan hak yang mutlak.
- E ✗ — hak memperoleh informasi milik setiap orang, bukan hanya warga yang lama menetap.

Jawaban: A.

Jebakan: D sama-sama menilai "tidak tepat", tetapi dengan alasan kebebasan mutlak. Periksa alasannya, bukan hanya penilaiannya.

No. 17 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: lagu kebangsaan adalah salah satu identitas nasional yang mempersatukan warga. UU No. 24 Tahun 2009 melarang mengubah lagu kebangsaan dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatannya. Membela kehormatan simbol negara dilakukan dengan cara yang santun dan melalui saluran yang sah.

Pernyataan 1 – Benar. Sikap hormat pada simbol bersama memelihara rasa satu bangsa.
Pernyataan 2 – Salah. Kebebasan berekspresi dibatasi undang-undang (Pasal 28J ayat 2); membagikan konten yang merendahkan simbol negara tidak dapat dibenarkan.
Pernyataan 3 – Salah. Kata-kata kasar justru memecah warga dan dapat melanggar hukum; yang tepat adalah menegur dengan santun atau melapor melalui saluran resmi.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 tampak membela negara, tetapi caranya keliru; pernyataan 2 menganggap kebebasan berekspresi mutlak.

No. 18 Kunci: C

Konsep: Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

dan keadilan. Pasal ini menjamin **perlakuan khusus** agar kelompok yang menghadapi hambatan memperoleh **kesempatan yang sama**. Perlakuan khusus menghapus hambatan, bukan memberi keistimewaan hasil. Adil tidak selalu berarti diperlakukan persis sama.

Analisis opsi:

• A ✗ — menyamakan adil dengan sama persis; soal cetak biasa justru menutup kesempatan peserta tunanetra.
• B ✗ — tambahan waktu bagi semua peserta menghapus tujuan perlakuan khusus; peserta lain tidak menghadapi hambatan yang sama.
• C ✓ — Braille dan waktu tambahan menghapus hambatan sehingga peserta tunanetra bersaing setara.
• D ✗ — diskriminatif dan bertentangan dengan hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2) dan Pasal 28H ayat (2).
• E ✗ — berlebihan: perlakuan khusus menyamakan kesempatan, bukan menjamin kelulusan.

Jawaban: C.

Jebakan: A berangkat dari salah paham "adil = sama rata"; E memperluas perlakuan khusus menjadi jaminan hasil.

No. 19 Kunci: C

Konsep: Wawasan Nusantara memandang wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai **satu kesatuan** (laut adalah pemersatu, bukan pemisah). Kesatuan itu harus terasa nyata: warga antarpulau mudah bertemu, dan kegiatan ekonomi antardaerah tersambung sebagai satu kesatuan ekonomi nasional.

Analisis opsi:

• A ✗ — devisa memang penting, tetapi itu alasan ekonomi semata, bukan inti Wawasan Nusantara dalam ilustrasi.
• B ✗ — keuntungan perusahaan bukan tujuan; yang diutamakan keterhubungan warga.
• C ✓ — mahalnya perjalanan antarpulau melemahkan kesatuan wilayah, sosial, dan ekonomi bangsa.
• D ✗ — sikap menutup diri yang berlebihan dan tidak menjawab masalah warga pulau kecil.
• E ✗ — bertentangan dengan Wawasan Nusantara yang menekankan keterhubungan antardaerah.

Jawaban: C.

Jebakan: A paling menggoda karena masuk akal secara ekonomi, tetapi tidak menjawab "berdasarkan Wawasan Nusantara".

No. 20 Kunci: C

Konsep: negara hukum menuntut **persamaan di depan hukum**: laporan diproses tanpa memandang siapa pelakunya. Tantangan penegakan hukum dibaca dari **bukti di ilustrasi**. Di sini aparat menyarankan "kekeluargaan" karena terlapor dekat dengan pejabat. Padahal UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan (kecuali pelakunya anak).

Analisis opsi:

• A ✗ — Sari justru berani melapor; tantangan dipindahkan kepada korban.
• B ✗ — keliru: undang-undangnya sudah ada; masalahnya pada pelaksanaan.
• C ✓ — aparat memperlakukan perkara berbeda karena kedudukan terlapor.
• D ✗ — perkara belum sampai ke pengadilan; tidak ada bukti di ilustrasi.
• E ✗ — terbalik: yang dirugikan adalah korban, bukan terlapor.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan E memindahkan sumber masalah kepada pihak yang salah; B menyalahkan aturan, padahal yang bermasalah sikap aparat.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 21 Kunci: B, C, E

Konsep: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**; Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas **penghidupan yang layak**. Warga yang haknya dirugikan menempuh **jalur yang sah**, bukan main hakim sendiri.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — pajak dan lapangan kerja tidak membenarkan tertutupnya akses warga atas pantai.
- B ✓ — tanggung jawab negara sesuai Pasal 33 ayat (3).
- C ✓ — hak warga untuk memperjuangkan haknya melalui saluran resmi.
- D ✗ — merusak secara sepihak adalah main hakim sendiri; tetap harus melalui jalur hukum.
- E ✓ — melaut adalah penghidupan nelayan yang dijamin Pasal 27 ayat (2).

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: D benar bahwa hak warga dilanggar, tetapi caranya keliru; A memakai manfaat ekonomi sebagai pembenaran.

No. 22 Kunci: B, D, E

Konsep: sila-sila Pancasila **saling menjiwai**; satu peristiwa dapat mencerminkan beberapa sila. Setiap pernyataan diuji dua kali: apakah perilakunya ada di ilustrasi, dan apakah sila yang ditempelkan tepat.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — keadilan sosial tidak berarti sama rata; mendahulukan yang membutuhkan justru adil.
- B ✓ — pembagian memperhatikan kebutuhan lansia dan pengguna kursi roda (sila kelima).
- C ✗ — menyisihkan panen untuk panti asuhan terutama wujud kemanusiaan dan kepedulian (sila kedua), bukan persatuan.
- D ✓ — menilai orang tanpa membedakan agama dan suku menghargai martabat yang setara (sila kedua, dijalankan bersama sila ketiga).
- E ✓ — keputusan diambil dalam rapat (sila keempat) dan isinya berkeadilan (sila kelima).

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A berangkat dari salah paham "adil = sama rata"; C menyebut perilaku yang benar ada, tetapi sila yang ditempelkan keliru.

No. 23 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menjadi pedoman sikap dalam keseharian, termasuk tindakan sukarela yang tidak diwajibkan aturan. Fungsi ini berbeda dari fungsi dasar negara yang tampak dalam peraturan.

Pernyataan 1 – Benar. Kepedulian sukarela menunjukkan nilai Pancasila hidup dalam perilaku warga.
Pernyataan 2 – Salah. Pancasila tidak hanya hadir dalam peraturan; sebagai pandangan hidup ia menuntun perilaku sehari-hari.
Pernyataan 3 – Benar. Menolong tanpa membeda-bedakan mencerminkan sila kedua.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 menyempitkan Pancasila hanya pada fungsi dasar negara.

No. 24 Kunci: A

Konsep: sebuah kegiatan **memperkukuh persatuan** bila mempertemukan orang yang berbeda sehingga mereka saling mengenal, saling menghargai, dan merasa memiliki satu sama lain, tanpa menghapus identitasnya.

Analisis opsi:

- A ✓ — pendengar beragam asal saling menyapa dan berbagi cerita; tumbuh rasa memiliki bersama.
- B ✗ — manfaat ekonomi bagi radio, tidak menjawab soal persatuan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✗ — kebalikannya: siaran itu justru didengar dan ditanggapi lintas kelompok.
• D ✗ — bahasa daerah dihargai bersama bahasa Indonesia, bukan menggantikannya.
• E ✗ — benar sebagai manfaat, tetapi tidak menjelaskan mengapa persatuan menjadi kukuh.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan E adalah manfaat yang nyata, tetapi tidak menjawab "alasan memperkukuh persatuan", pola yang sama dengan pengecoh soal asli tentang festival budaya.

No. 25 Kunci: B

Konsep: dalam negara kesatuan yang didesentralisasi, urusan pemerintahan dibagi. **Urusan absolut** (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) hanya milik pusat. **Pendidikan** adalah **urusan konkuren**: dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pendidikan menengah dikelola provinsi, sedangkan pendidikan dasar dikelola kabupaten/kota.

Analisis opsi:
• A ✗ — pendidikan bukan urusan absolut; daerah justru ikut mengelolanya.
• B ✓ — bupati mengikuti pembagian urusan konkuren dan tetap melayani warga dengan meneruskan aduan kepada pemerintah yang berwenang.
• C ✗ — bupati tidak menolak aduan; ia meneruskannya. Kewenangan juga tidak ditentukan janji kampanye.
• D ✗ — otonomi daerah dijalankan dalam batas pembagian urusan yang diatur undang-undang.
• E ✗ — memindahkan tanggung jawab negara kepada orang tua; sekolah negeri dibiayai pemerintah.

Jawaban: B.

Jebakan: A memakai istilah yang benar (urusan absolut) untuk urusan yang salah; D membesar-besarkan makna otonomi.

Simulasi 3 — Prediksi TKA 2026

No. 1 Kunci: C

Konsep: hak berserikat dan menyampaikan pendapat dijamin (Pasal 28E ayat 3), termasuk menuntut upah. Namun, Pasal 28J mewajibkan setiap orang menghormati hak orang lain; pelaksanaan hak dibatasi agar tidak merugikan hak orang lain, misalnya hak pengguna jalan dan pasien.

Analisis opsi:
• A ✗ — kebebasan dianggap mutlak; menutup jalan ambulans melanggar hak orang lain.
• B ✗ — pembatasan berlebihan; tuntutan upah lembur adalah hak yang sah.
• C ✓ — hak dijalankan tanpa merugikan hak orang lain.
• D ✗ — membubarkan serikat mematikan hak berserikat.
• E ✗ — keputusan diserahkan kepada yang paling lantang, bukan dimusyawarahkan.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan B adalah dua kutub yang sama-sama keliru: kebebasan mutlak dan kepatuhan buta.

No. 2 Kunci: D

Konsep: menjaga keutuhan NKRI dilakukan **sesuai peran**. Warga tidak mengambil alih tugas aparat, tetapi juga tidak lepas tangan: ia waspada, menjaga barang bukti, dan melapor kepada yang berwenang.

Analisis opsi:
• A ✗ — mengambil alih tugas aparat dan membahayakan diri; barang bukti dapat rusak.
• B ✗ — menghindari masalah tanpa melapor; ancaman dibiarkan.
• C ✗ — menyebarkan foto dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu penyelidikan.
• D ✓ — waspada dan melapor sesuai peran sebagai warga.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• E ✗ — lepas tangan; warga tetap berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan (Pasal 30 ayat 1).

Jawaban: D.

Jebakan: A tampak berani dan C tampak cepat, tetapi keduanya melampaui peran warga. E memindahkan seluruh kewajiban kepada aparat.

No. 3 Kunci: E

Konsep: keragaman menjadi **modal sosial** bila dikelola: perbedaan kemampuan saling melengkapi, lalu dijalin dengan kepercayaan dan kerja sama. Tanpa pengelolaan, keragaman dapat menjadi beban.

Analisis opsi:

• A ✗ — keragaman tidak otomatis menjadi modal; ilustrasi justru menunjukkan ada kerja sama (bertukar cara).
• B ✗ — kebalikan dari ilustrasi; petugas saling bertukar pengalaman.
• C ✗ — manfaat ekonomi tanpa kerja sama bukan modal sosial, dan tidak disebut dalam ilustrasi.
• D ✗ — penyeragaman bahasa menghapus kekuatan keragaman itu sendiri.
• E ✓ — perbedaan yang saling melengkapi dan dijalin dengan kerja sama.

Jawaban: E.

Jebakan: A terdengar membanggakan keragaman, tetapi melupakan syaratnya: keragaman harus dikelola. C menggiring ke manfaat ekonomi yang tidak ditanyakan.

No. 4 Kunci: C

Konsep: tentukan dulu **jenis perkaranya**, baru lembaganya. Yang dipersoalkan bukan isi gugatan pesangon, melainkan **perilaku hakim** (dugaan pelanggaran kode etik). Menurut Pasal 24B UUD NRI 1945, **Komisi Yudisial** berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Mahkamah Agung juga mengawasi hakim dari dalam, tetapi tidak ada di pilihan.)

Analisis opsi:

• A ✗ — MK menguji undang-undang terhadap UUD, tidak memeriksa perilaku hakim.
• B ✗ — DKPP memeriksa kode etik **penyelenggara pemilu**, bukan hakim.
• C ✓ — perilaku hakim adalah wewenang Komisi Yudisial.
• D ✗ — BPK memeriksa keuangan negara, bukan pesangon perusahaan swasta.
• E ✗ — DPR mengawasi pemerintah, tetapi tidak memeriksa perilaku hakim; kekuasaan kehakiman merdeka.

Jawaban: C.

Jebakan: B memakai kata "kode etik" yang sama persis, tetapi lembaganya untuk perkara lain. A menggoda karena kasusnya tentang hak pekerja, padahal yang ditanya adalah perilaku hakim.

No. 5 Kunci: B

Konsep: integrasi dijaga dengan upaya **dialogis** yang **menyasar akar** ketegangan. Akar masalah di sini adalah pembagian lembur yang dirasa tidak adil dan tidak terbuka, sehingga berkembang menjadi kecurigaan antarsuku.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Langkah 1 – Temukan akar. Aturan lembur tidak jelas → kecurigaan → kelompok berdasarkan suku → perkelahian.

Langkah 2 – Analisis opsi:

• A ✗ — memisahkan kelompok memperdalam sekat; integrasi justru melemah.
• B ✓ — dialog dan aturan yang terbuka menghilangkan sumber kecurigaan.
• C ✗ — represif; perkelahian ditindak, tetapi ketidakadilan pembagian lembur tetap ada.
• D ✗ — imbalan uang membungkam keluhan tanpa memperbaiki aturan.
• E ✗ — melarang identitas daerah tidak menyentuh akar dan menimbulkan rasa tidak dihargai.

Jawaban: B.

Jebakan: C terlihat tegas dan cepat, D tampak damai; keduanya tidak menyentuh akar, yaitu ketidakterbukaan pembagian lembur.

No. 6 Kunci: E

Konsep: Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasi (Pasal 18). Pendidikan termasuk **urusan konkuren**: dibagi antara pusat dan daerah. Pusat menetapkan **standar** agar mutu setara di seluruh negeri; daerah menjalankan sesuai **kebutuhan setempat**. Kerja sama keduanya saling melengkapi.

Analisis opsi:

• A ✗ — menggambarkan sentralisasi; daerah dalam ilustrasi ikut menjalankan kewenangannya sendiri.
• B ✗ — otonomi tidak berarti berkuasa penuh; standar nasional tetap diperlukan dalam negara kesatuan.
• C ✗ — alasan anggaran mungkin ada, tetapi "semata-mata" membuatnya keliru dan tidak menjelaskan pembagian peran.
• D ✗ — ilustrasi justru menunjukkan kerja sama, bukan persaingan.
• E ✓ — standar nasional (pusat) dipadukan dengan pengetahuan kebutuhan setempat (daerah).

Jawaban: E.

Jebakan: A dan B adalah dua kutub keliru ("pusat menentukan semua" vs "daerah berkuasa penuh"), pola pengecoh khas soal hubungan pusat–daerah.

No. 7 Kunci: D

Konsep: asas praduga tak bersalah: seseorang belum boleh diperlakukan sebagai pelaku sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dugaan kejahatan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan bukti, lalu diproses hukum; bukan diadili di media sosial atau dengan main hakim sendiri.

Analisis opsi:

• A ✗ — kekurangan kas belum membuktikan siapa pelakunya; label "pencuri" melanggar asas itu.
• B ✗ — menyita harta tanpa putusan adalah main hakim sendiri.
• C ✗ — mendesak pengakuan lewat tekanan massa melanggar hak orang yang diduga.
• D ✓ — menghentikan penghakiman di media sosial dan menempuh jalur hukum.
• E ✗ — memakai asas yang benar-benar ada (persamaan di depan hukum), tetapi untuk membenarkan tindakan yang justru menghakimi.

Jawaban: D.

Jebakan: E menyebut asas negara hukum yang sah, tetapi asasnya tertukar dan tindakannya tetap menghakimi sebelum ada putusan.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 8 Kunci: A

Konsep: toleransi **pasif** berarti membiarkan dan tidak mengganggu pihak yang berbeda; toleransi **aktif** berarti ikut membantu agar pihak yang berbeda dapat menjalankan keyakinannya, tanpa mencampuradukkan ajaran. Inilah wujud kebersamaan dalam keberagaman.

Analisis opsi:

- A ✓ — saling menggantikan giliran kerja adalah bantuan nyata.
- B ✗ — para karyawan tidak sekadar membiarkan; mereka ikut membantu.
- C ✗ — mereka tidak ikut beribadah atau merayakan agama lain; mereka hanya menggantikan giliran kerja.
- D ✗ — tidak ada kewajiban seragam; justru masing-masing libur pada hari rayanya sendiri.
- E ✗ — ilustrasi menunjukkan kerja sama, bukan persaingan.

Jawaban: A.

Jebakan: C menganggap membantu umat lain sama dengan mencampur ajaran, salah paham yang sering muncul tentang toleransi.

No. 9 Kunci: A

Konsep: sila ditentukan dari **bukti utama** yang ditanyakan. Pertanyaan menunjuk **dasar isi permintaan**, yaitu agar pekerja tidak dipermalukan dan diberi julukan merendahkan. Itu persoalan **martabat manusia**: sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Analisis opsi:

- A ✓ — isi permintaan menuntut perlakuan yang menghormati martabat pekerja.
- B ✗ — benar bahwa permintaan disampaikan lewat perwakilan, tetapi itu **cara** menyampaikan, bukan dasar isi permintaannya.
- C ✗ — ilustrasi sama sekali tidak menyinggung upah; lagi pula adil tidak berarti upah sama rata.
- D ✗ — kemungkinan perpecahan tidak disebut dalam ilustrasi.
- E ✗ — alasan keagamaan tidak menjadi bukti dalam ilustrasi; permintaan berpijak pada martabat sesama manusia.

Jawaban: A.

Jebakan: B menggoda karena memang ada perwakilan pekerja (cara, bukan isi). C memakai kata "hak pekerja" yang tampak cocok dengan dunia kerja, tetapi menyimpang dari isi kasus.

No. 10 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menjadi pedoman sikap setiap warga dalam keseharian, termasuk di tempat kerja mana pun.

Pernyataan 1 – Benar. Menolak berbuat curang walaupun diajak teman adalah kejujuran yang dipandu nilai Pancasila (sila kedua dan kelima).
Pernyataan 2 – Salah. Pandangan hidup berlaku bagi seluruh warga, bukan hanya pegawai pemerintah.
Pernyataan 3 – Salah. Mengistimewakan rekan sedaerah adalah sikap primordial; sila ketiga menuntut perlakuan yang menyatukan, bukan membeda-bedakan.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 menempelkan nama sila ketiga pada perilaku yang justru melanggarnya.

No. 11 Kunci: C

Konsep: integrasi nasional menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu bangsa **tanpa menghapus** identitasnya (Bhinneka Tunggal Ika; Pasal 32 menghormati bahasa daerah). Konflik umumnya dipicu ketidakadilan, diskriminasi, atau prasangka yang tidak dikelola, bukan oleh perbedaan itu sendiri.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:
• A ✗ — menyamakan persatuan dengan penyeragaman.
• B ✗ — generalisasi berlebihan dengan kata "selalu".
• C ✓ — menilai pendapat keliru dengan alasan yang tepat.
• D ✗ — penilaiannya benar (keliru), tetapi alasannya salah: integrasi juga tanggung jawab warga.
• E ✗ — tetap menghapus identitas, hanya sebagian; alasannya keliru.

Jawaban: C.

Jebakan: D dan E sama-sama tidak setuju dengan pembicara, tetapi alasannya salah. Periksa alasan, bukan hanya penilaian.

No. 12 Kunci: A

Konsep: Wawasan Nusantara memandang darat, laut, dan udara Indonesia sebagai **satu kesatuan wilayah**. Sejak Deklarasi Djuanda (1957) yang kemudian diakui UNCLOS 1982, garis pangkal kepulauan ditarik dari titik-titik terluar pulau terluar. Karena itu, pulau kecil terluar menentukan luas wilayah laut, dan ancaman terhadap satu pulau adalah ancaman bagi seluruh bangsa.

Analisis opsi:
• A ✓ — menjelaskan kedudukan pulau terluar bagi keutuhan wilayah.
• B ✗ — memandang pulau dari jumlah penduduk, bukan dari kesatuan wilayah.
• C ✗ — tidak ada bagian wilayah yang boleh dilepas karena alasan pendapatan.
• D ✗ — memindahkan tanggung jawab negara kepada warga.
• E ✗ — laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia bukan laut bebas; itulah inti Deklarasi Djuanda.

Jawaban: A.

Jebakan: B terdengar adil secara ekonomi, tetapi tidak sesuai cara pandang kesatuan wilayah.

No. 13 Kunci: B

Konsep: ideologi terbuka berarti **nilai dasar** Pancasila tetap, sedangkan **nilai instrumental** (aturan, program) dan **nilai praksis** (cara pelaksanaan) dapat berkembang mengikuti zaman, selama tetap berpijak pada nilai dasar. Koperasi adalah wujud asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1).

Analisis opsi:
• A ✗ — koperasi yang dikuasai pemilik modal terbesar meninggalkan prinsip satu anggota satu suara; ilustrasi justru menyebut prinsip itu dipertahankan.
• B ✓ — yang berubah hanya caranya (aplikasi, rapat jarak jauh); prinsip kekeluargaan tetap.
• C ✗ — nilai dasar tidak diganti; ilustrasi menegaskan prinsip koperasi tetap.
• D ✗ — terbuka tidak berarti meniru tanpa saringan nilai bangsa.
• E ✗ — kebalikan dari keterbukaan; teknologi justru dipakai untuk mewujudkan nilai yang sama.

Jawaban: B.

Jebakan: C memakai kata "zaman digital" yang cocok dengan ilustrasi, tetapi membalik konsep: yang boleh berubah adalah cara, bukan nilai dasar. E terdengar menjaga kepribadian bangsa, padahal itu ciri ideologi tertutup.

No. 14 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: undang-undang lahir dari **persetujuan bersama** DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat 2). Pasal 20 ayat (5) mencegah Presiden membatalkan secara diam-diam RUU yang sudah ia setujui. Undang-undang yang sudah berlaku dan dinilai bertentangan dengan UUD diuji ke **Mahkamah Konstitusi** (Pasal 24C).

Pernyataan 1 – Benar. Lewat 30 hari, RUU sah dengan sendirinya dan wajib diundangkan.
Pernyataan 2 – Salah. Presiden tidak dapat membatalkan undang-undang dengan keputusan presiden;

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

tanda tangan tidak lagi menentukan.

Pernyataan 3 – Benar. Keberatan terhadap isi undang-undang ditempuh lewat jalur hukum, yaitu pengujian ke MK.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 menganggap tanda tangan Presiden sebagai syarat mutlak, padahal ayat (5) mengatur keadaan sebaliknya.

No. 15 Kunci: B

Konsep: Pasal 28E ayat (1) menjamin **hak** setiap orang memilih pekerjaan dan tempat tinggal. Pemerintah desa wajib melayani warganya dan tidak boleh mencabut hak itu atau menahan layanan sebagai ancaman. Kebutuhan desa diatasi dengan cara yang tidak melanggar hak, misalnya membuka peluang kerja di desa.

Analisis opsi:

- A ✗ — kewenangan desa tidak boleh dipakai untuk mencabut hak konstitusional warga.
- B ✓ — menilai larangan melanggar hak dan menawarkan jalan yang sah.
- C ✗ — suara terbanyak tidak dapat menghapus hak yang dijamin UUD.
- D ✗ — kesimpulannya benar (melanggar hak), tetapi akibatnya berlebihan: warga tetap wajib menaati aturan desa yang sah.
- E ✗ — hak berlaku bagi setiap orang di mana pun tinggal.

Jawaban: B.

Jebakan: D sama-sama menilai kebijakan melanggar hak, tetapi menarik kesimpulan yang berlebihan. C menggoda karena memakai musyawarah.

No. 16 Kunci: B, C, E

Konsep: modal sosial adalah kepercayaan, jaringan hubungan, dan norma timbal balik yang memudahkan orang bekerja sama. Modal sosial berbeda dari modal fisik (alat, gedung) dan modal uang. Keragaman menjadi modal bila dikelola dengan kesederajatan.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — tangki dan gudang adalah modal fisik, bukan modal sosial.
- B ✓ — meminjam tanpa perjanjian tertulis hanya mungkin bila ada **kepercayaan**.
- C ✓ — hubungan lintas desa adalah **jaringan** yang menjembatani kelompok berbeda.
- D ✗ — pengurus dari satu desa saja meninggalkan kesederajatan; itu justru melemahkan modal sosial lintas kelompok.
- E ✓ — membantu tanpa imbalan langsung adalah **norma timbal balik**.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A menggoda karena alat itu dibeli bersama, tetapi wujudnya tetap modal fisik. D tampak menguntungkan (keputusan cepat), padahal tidak setara. Jangan berhenti setelah menemukan satu jawaban.

No. 17 Kunci: A, D

Konsep: perilaku yang menjaga keutuhan NKRI mencegah perpecahan **di akarnya** (dialog, saling percaya, menangkal kabar yang memecah belah) dan **sesuai peran warga**, bukan mengambil alih tugas aparat atau memperkuat sekat antarkelompok.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✓ — dialog rutin mencegah gesekan kecil membesar menjadi konflik antarkelompok.
- B ✗ — menindak sendiri adalah main hakim sendiri dan tugas aparat.
- C ✗ — kegiatannya bersama, tetapi tim yang dibentuk menurut suku justru mempertajam sekat.
- D ✓ — gesekan sering dibesar-besarkan lewat kabar yang belum benar; kemampuan memeriksa

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

kabar menangkalnya.
• E ✗ — pemisahan permukiman memperdalam sekat dan memudahkan prasangka.

Jawaban: A dan D.

Jebakan: C menggoda karena berupa kegiatan bersama, padahal pengelompokan menurut suku memperkuat perbedaan. Jawaban benar soal ini hanya dua; jangan memaksakan tiga.

No. 18 Kunci: D

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun penyelesaian benturan kepentingan sehari-hari dengan **musyawarah** (sila keempat) yang **menyeimbangkan hak dan kewajiban** kedua pihak (sila kedua dan kelima), bukan memenangkan salah satunya.

Langkah 1 – Kenali dua kepentingan yang sah. Siswa wajib berpraktik sesuai kurikulum; pedagang berhak mencari nafkah.
Langkah 2 – Cari opsi yang tidak mengorbankan salah satunya.
Langkah 3 – Analisis opsi:
• A ✗ — memenangkan pedagang; hak belajar siswa diabaikan.
• B ✗ — memenangkan siswa; pedagang kehilangan penghidupan.
• C ✗ — memindahkan tanggung jawab; persoalan sekolah dapat dimusyawarahkan di sekolah.
• D ✓ — kesepakatan yang menjaga kedua kepentingan sekaligus.
• E ✗ — urutannya terbalik: kepentingan pihak lain baru dipikirkan **setelah** kepentingan sendiri terpenuhi.

Jawaban: D.

Jebakan: A dan B masing-masing terdengar adil karena membela pihak yang benar-benar punya alasan sah. E menyelipkan kata "setelah", pola pengecoh yang juga muncul pada soal asli.

No. 19 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika berarti perbedaan **diakui**, bukan dihapus. Sebuah kegiatan memperkukuh persatuan bila mempertemukan orang yang berbeda sehingga mereka **saling mengenal** dan **merasa memiliki** satu sama lain.

Pernyataan 1 – Salah. Persatuan tidak menuntut penyeragaman; pegawai dapat menyesuaikan diri tanpa meninggalkan identitasnya.
Pernyataan 2 – Benar. Pertemuan dan pergaulan sehari-hari menumbuhkan saling kenal dan rasa sebangsa.
Pernyataan 3 – Salah. Biaya perekrutan adalah urusan perusahaan; pernyataan itu tidak menjelaskan kaitan dengan persatuan.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 mungkin benar secara bisnis, tetapi tidak menjawab yang ditanyakan (kaitan dengan persatuan), pola pengecoh yang juga muncul pada soal asli tentang festival budaya.

No. 20 Kunci: A

Konsep: sikap individualistis (urusan bersama dianggap bukan urusan sendiri) adalah tantangan penerapan Pancasila, terutama sila ketiga dan nilai gotong royong. Solusi yang **menyasar akar** menumbuhkan kembali rasa memiliki dan manfaat kebersamaan, bukan memaksa, seremonial, atau memindahkan tanggung jawab.

Analisis opsi:
• A ✓ — membuat pemuda kembali merasakan manfaat kebersamaan, sehingga keterlibatan tumbuh dari dalam.
• B ✗ — paksaan dengan denda; kehadiran terjadi tanpa rasa memiliki.
• C ✗ — seremonial; tidak mengubah alasan pemuda menjauh.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• D ✗ — larangan menyasar alatnya (gawai), bukan sikapnya.
• E ✗ — memindahkan kewajiban warga kepada perangkat desa.

Jawaban: A.

Jebakan: D tampak menyasar penyebab karena ilustrasi menyebut gawai, padahal akar masalahnya adalah sikap tidak peduli pada urusan bersama.

No. 21 Kunci: E

Konsep: sila-sila Pancasila **saling menjiwai**. Musyawarah (sila keempat) harus menghasilkan keputusan yang jujur, menghormati martabat manusia (sila kedua), dan adil bagi orang lain (sila kelima). Kesepakatan bulat untuk tujuan curang tetap bertentangan dengan Pancasila.

Analisis opsi:
• A ✗ — suara terbanyak sah dipakai setelah mufakat diusahakan sungguh-sungguh.
• B ✗ — mendengar pihak yang terdampak justru memperbaiki mutu musyawarah.
• C ✗ — mendahulukan yang paling membutuhkan sesuai keadilan (sila kelima) dan kemanusiaan.
• D ✗ — pemungutan suara rahasia menjamin kebebasan memilih.
• E ✓ — mufakat dipakai untuk menipu konsumen; isinya melanggar sila kedua dan kelima.

Jawaban: E.

Jebakan: E memakai kata "sepakat bulat" yang terdengar paling sesuai sila keempat. A dan C tampak "tidak murni musyawarah" atau "tidak sama rata", padahal keduanya sesuai Pancasila.

No. 22 Kunci: B, D, E

Konsep: ancaman terhadap keberagaman antara lain **diskriminasi** (perlakuan berbeda karena suku/agama), **stereotip/prasangka** (menilai orang dari asal kelompoknya), dan **ejekan** yang merendahkan identitas.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memudahkan semua pegawai; bukan ancaman.
• B ✓ — diskriminasi berdasarkan agama.
• C ✗ — mengenalkan budaya daerah memperkuat saling kenal.
• D ✓ — stereotip: menilai sebelum melihat kerja nyata.
• E ✓ — ejekan yang merendahkan asal daerah.

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A kadang dianggap "menyeragamkan", padahal bahasa Indonesia adalah alat pemersatu yang tidak menghapus bahasa daerah.

No. 23 Kunci: B

Konsep: politik luar negeri **bebas aktif**: *bebas* berarti tidak memihak kekuatan mana pun, *aktif* berarti ikut mengupayakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi (Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat). Bebas aktif bukan netral pasif.

Analisis opsi:
• A ✗ — kebalikan dari ilustrasi; Indonesia justru terlibat sebagai penengah. Bebas tidak sama dengan diam.
• B ✓ — penengah yang diterima kedua pihak menunjukkan sikap bebas (tidak memihak) dan aktif (mengupayakan damai).
• C ✗ — penengah tidak memihak; ilustrasi tidak menyebut keberpihakan.
• D ✗ — perdamaian menghormati kedaulatan Filipina; Indonesia tidak mengatur pemerintahannya.
• E ✗ — ilustrasi menyebut perundingan, bukan pengerahan pasukan tempur.

Jawaban: B.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: A memakai salah paham umum bahwa "bebas" berarti netral dan tidak ikut campur. C menyelipkan alasan kesamaan agama yang tidak ada dalam ilustrasi.

No. 24 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: pasal-pasal UUD dibaca sebagai **hak**, **kewajiban**, atau **tanggung jawab negara**. Pasal 27 ayat (2) memberi **hak** atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; negara bertanggung jawab **membuka dan memperluas kesempatan**, tetapi hak tidak sama dengan **jaminan hasil** berupa pekerjaan tertentu bagi setiap orang.

Pernyataan 1 – Salah. Isi pasal dilebih-lebihkan; tidak ada kewajiban negara mengangkat setiap lulusan menjadi pegawai.
Pernyataan 2 – Benar. Tanggung jawab negara diwujudkan dengan memperluas kesempatan kerja.
Pernyataan 3 – Benar. Hak dimanfaatkan dengan usaha warga sendiri; hak bukan jaminan pekerjaan tertentu.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 sejalan dengan unggahan sehingga terasa benar, padahal melebihi isi pasal. Pernyataan 3 sering dianggap "menyalahkan warga", padahal hanya menegaskan bahwa hak berbeda dari jaminan hasil.

No. 25 Kunci: A, C, D

Konsep: penegakan hukum **preventif** mencegah sebelum pelanggaran terjadi (pengawasan, penyuluhan, syarat perizinan). Penegakan hukum **represif** menindak setelah pelanggaran terjadi (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan). Keduanya diperlukan.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✓ — pemeriksaan berkala mencegah pelanggaran sebelum ada korban.
• B ✗ — putusan pidana setelah kecelakaan adalah represif.
• C ✓ — penyuluhan aturan adalah upaya pencegahan.
• D ✓ — syarat izin memastikan kewajiban dipenuhi sebelum proyek berjalan.
• E ✗ — penyidikan setelah kecelakaan adalah represif.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B dan E juga penegakan hukum yang benar dan penting, tetapi termasuk represif. Kata "setelah" pada D tidak menjadikannya represif, karena yang terjadi setelahnya adalah pemenuhan syarat, bukan pelanggaran.

Simulasi 4 — Prediksi TKA 2026

No. 1 Kunci: D

Konsep: kebersamaan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) berarti perbedaan **diakui dan dihormati**, lalu warga yang berbeda **bekerja sama secara sukarela**. Inilah toleransi aktif: tidak cukup tidak saling mengganggu, tetapi ikut membantu, tanpa mencampuradukkan keyakinan.

Analisis opsi:
• A ✗ — ilustrasi justru menyebut upacara penyucian tetap hanya dijalankan umat Hindu; ibadah tidak disatukan.
• B ✗ — tidak ada bukti bantuan diberikan demi balasan; menolong karena pamrih bukan inti kebersamaan.
• C ✗ — manfaat biaya mungkin ada, tetapi tidak menjelaskan mengapa sikap itu mencerminkan kebersamaan dalam keberagaman.
• D ✓ — warga beda agama membantu secara nyata (mengangkut bahan, memasak) dan tetap

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

menghormati batas ibadah.

• E ✗ — ilustrasi tidak menyebut perintah kepala desa; kebersamaan yang dipaksakan bukan toleransi.

Jawaban: D.

Jebakan: A menyamakan persatuan dengan penyeragaman ibadah; C menjawab manfaat ekonomi, bukan makna kebersamaan.

No. 2 Kunci: 1S 2B 3S

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika berarti keragaman (termasuk bahasa daerah) **diakui dan dirawat**, sementara bahasa Indonesia menjadi **bahasa persatuan**. Keduanya tidak saling meniadakan.

Pernyataan 1 – Salah. Merawat bahasa daerah tidak melemahkan persatuan; yang dijaga adalah keragaman dalam kesatuan.
Pernyataan 2 – Benar. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat dikuasai bersamaan.
Pernyataan 3 – Salah. Menyeragamkan satu bahasa daerah untuk semua siswa justru menghilangkan keragaman yang hendak dilestarikan.

Jawaban: Salah – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 1 mempertentangkan bahasa daerah dengan bahasa persatuan; pernyataan 3 menyamakan adil dengan seragam.

No. 3 Kunci: D

Konsep: modal sosial adalah kepercayaan, jaringan, dan norma (aturan) bersama yang membuat orang mau bekerja sama. Keragaman menjadi modal bila unsur-unsur itu tumbuh; tanpa itu, keragaman justru menjadi beban.

Analisis opsi:

• A ✗ — generalisasi keliru; desa tetangga yang juga beragam berhasil, jadi keragaman bukan penyebabnya.
• B ✗ — kekurangan alat bukan inti masalah; mesin rusak karena tidak ada kerja sama merawatnya.
• C ✗ — hukuman tidak menumbuhkan kepercayaan; ilustrasi juga tidak menyebut keterlambatan.
• D ✓ — saling tuduh dan menolak berbagi biaya menunjukkan tidak ada kepercayaan dan aturan bersama.
• E ✗ — menyalahkan satu pihak dan menuntut penyeragaman adat; kerja sama tidak mensyaratkan peleburan.

Jawaban: D.

Jebakan: A tampak masuk akal, tetapi dipatahkan oleh bukti desa tetangga; E memindahkan kesalahan kepada satu kelompok saja.

No. 4 Kunci: A

Konsep: dalam **tugas pembantuan**, pemerintah pusat menugaskan daerah melaksanakan sebagian urusan pusat; dana berasal dari pusat, dan daerah **melaksanakan serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan**. Berbeda dengan **desentralisasi**, urusan itu tidak menjadi milik daerah.

Analisis opsi:

• A ✓ — ciri tugas pembantuan tampak (dana APBN, kabupaten melaksanakan dan melapor), sehingga perubahan harus sepengetahuan kementerian.
• B ✗ — asas tertukar; program ini bukan urusan yang diserahkan kepada daerah.
• C ✗ — DPRD tidak berkedudukan di atas kementerian.
• D ✗ — pertanian termasuk urusan konkuren (dibagi pusat dan daerah), bukan urusan absolut.
• E ✗ — kabupaten justru ditugasi melaksanakan program, bukan sekadar menerima dana.

Jawaban: A.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: D menyebut kesimpulan yang benar ("kurang tepat") dengan alasan keliru; B menukar tugas pembantuan dengan desentralisasi.

No. 5 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: BPK **memeriksa** keuangan negara (Pasal 23E ayat 1). Hasilnya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang (ayat 3). Bila ditemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang (UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 14). BPK bukan pengadilan.

Pernyataan 1 – Salah. Menjatuhkan pidana adalah wewenang hakim melalui proses peradilan, bukan BPK.
Pernyataan 2 – Benar. Keuangan kabupaten diawasi DPRD kabupaten; hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan pengawasannya.
Pernyataan 3 – Benar. Temuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menukar wewenang memeriksa dengan wewenang mengadili.

No. 6 Kunci: B

Konsep: peta yang salah menyangkut **kedaulatan wilayah** (ancaman nonmiliter di bidang informasi). Upaya warga yang terbaik harus **sah**, **sesuai perannya**, dan **menyasar masalah**: peta dikoreksi. Warga menyampaikan keberatan; pemerintah yang berwenang menempuh jalur resmi dengan pengembang.

Analisis opsi:
• A ✗ — meretas dan menyebarkan data pribadi melanggar hukum dan hak orang lain.
• B ✓ — sah, sesuai peran warga, dan langsung menyasar perbaikan peta.
• C ✗ — larangan menyeluruh berlebihan dan tidak memperbaiki peta yang salah.
• D ✗ — meremehkan; peta yang menyebar membentuk anggapan keliru tentang wilayah negara.
• E ✗ — membalas dengan klaim yang salah melanggar kedaulatan negara lain.

Jawaban: B.

Jebakan: A terdengar tegas membela negara, tetapi caranya melanggar hukum; C terdengar melindungi pelajar, tetapi tidak menyasar akar masalah.

No. 7 Kunci: B, D, E

Konsep: Pasal 28H ayat (4) melindungi **hak milik** dari pengambilalihan **sewenang-wenang**, yaitu tanpa dasar hukum, tanpa kesepakatan, atau tanpa proses yang sah. Perlindungan hak milik tidak menghapus **kewajiban** pemiliknya, dan hak itu pun dapat dibatasi undang-undang (Pasal 28J ayat 2).

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — pelanggaran aturan koperasi tidak memberi pengurus hak mengambil alih perahu secara sepihak.
• B ✓ — perahu dikunci tanpa pemberitahuan dan tanpa kesepakatan: sewenang-wenang.
• C ✗ — berlebihan; hak milik dapat dibatasi undang-undang, misalnya lewat putusan pengadilan atas utang.
• D ✓ — sengketa diselesaikan lewat musyawarah atau jalur hukum, bukan tindakan sepihak.
• E ✓ — hak milik Pak Amin dilindungi, tetapi kewajibannya sebagai anggota koperasi tetap ada.

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A memakai kesalahan Pak Amin untuk membenarkan tindakan sepihak; C menjadikan hak milik mutlak.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 8 Kunci: C

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun warga menyelesaikan benturan kepentingan sehari-hari dengan **menyeimbangkan hak dan kewajiban** melalui **musyawarah**. Pak Rusdi berhak berusaha; warga lain berhak atas penerangan. Penyelesaian yang baik tidak mengorbankan salah satunya.

Analisis opsi:

• A ✗ — iuran yang besar tidak memberi hak untuk mengorbankan kebutuhan warga lain; pihak lain kalah sepihak.
• B ✗ — tindakan sepihak (main hakim sendiri) yang mengabaikan hak Pak Rusdi dan musyawarah.
• C ✓ — musyawarah menghasilkan pengaturan yang menjaga usaha Pak Rusdi sekaligus kebutuhan rumah tangga.
• D ✗ — larangan menyeluruh berlebihan; semua usaha dikorbankan.
• E ✗ — kewajiban dipindahkan kepada warga yang dirugikan; alasan pendapatan tidak menghapus hak mereka.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan E memenangkan pihak pengusaha dengan alasan yang terdengar masuk akal (iuran, pendapatan); B dan D memenangkan warga dengan cara sepihak.

No. 9 Kunci: B, D

Konsep: prasangka dan **diskriminasi** terhadap kelompok asal daerah tertentu adalah ancaman integrasi nasional. Akibat langsungnya adalah **sekat sosial**: kelompok yang ditolak menarik diri, interaksi antarkelompok berkurang, dan kecurigaan bertambah.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✗ — tinggal berkelompok karena ditolak justru tanda sekat, bukan integrasi.
• B ✓ — penolakan didasarkan anggapan tentang kelompok, bukan perilaku orang per orang.
• C ✗ — memulangkan orang tidak menghapus prasangka terhadap seluruh kelompok; solusi represif dan menggeneralisasi.
• D ✓ — mahasiswa enggan bergaul dengan warga sekitar: sekat menguat.
• E ✗ — diskriminasi berdasarkan asal daerah menyangkut hubungan antarkelompok bangsa.

Jawaban: B dan D.

Jebakan: jawaban benar hanya dua; A dan E mengecilkan masalah, C tampak tegas tetapi tidak menyentuh akar prasangka.

No. 10 Kunci: A

Konsep: salah satu penghambat integrasi nasional adalah **kesenjangan antarwilayah**. Warga di wilayah yang tertinggal dapat merasa kurang diperhatikan negara. Pembangunan yang merata, termasuk di perbatasan, memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI.

Analisis opsi:

• A ✓ — pos dan sarana ekonomi yang layak mengurangi ketertinggalan perbatasan dan menghadirkan negara di sana.
• B ✗ — PLBN adalah pintu perlintasan resmi; tujuannya melayani, bukan menutup perbatasan.
• C ✗ — PLBN adalah sarana pelayanan lintas batas (imigrasi, bea cukai, karantina), bukan pangkalan militer.
• D ✗ — pembangunan justru membawa layanan ke perbatasan, bukan memindahkan penduduknya.
• E ✗ — integrasi tidak berarti penyeragaman budaya.

Jawaban: A.

Jebakan: C mengaitkan perbatasan dengan kekuatan militer, padahal bangunan yang diresmikan adalah sarana pelayanan dan ekonomi; E menyamakan integrasi dengan penyeragaman.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 11 Kunci: C

Konsep: tantangan penegakan hukum dapat berasal dari **aturan**, **aparat**, **sarana**, atau **budaya hukum masyarakat**. Tantangan yang dipilih harus sesuai **bukti** di ilustrasi.

Analisis opsi:

• A ✗ — ilustrasi justru menyebut warga ingin melapor; hambatannya jarak, bukan kesadaran.
• B ✗ — tidak ada bukti kekosongan aturan; hukum pidana berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
• C ✓ — kapal, laboratorium jauh, saksi tak dapat menyeberang, kantor polisi jauh: semuanya keterbatasan sarana dan jangkauan.
• D ✗ — tantangan yang sering terjadi, tetapi tidak disebut dalam ilustrasi ini.
• E ✗ — tidak ada bukti campur tangan terhadap hakim; lagi pula hakim tidak berada di bawah pemerintah daerah.

Jawaban: C.

Jebakan: D adalah tantangan nyata yang sering muncul di soal lain, tetapi tidak didukung bukti di ilustrasi ini.

No. 12 Kunci: E

Konsep: sila ditentukan dari **bukti utama tindakan** dalam ilustrasi, bukan dari kata yang kebetulan muncul (suku, agama). Tindakan inti Pak Udin adalah **menolong orang yang keselamatannya terancam tanpa membeda-bedakan**: itu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Analisis opsi:

• A ✗ — ilustrasi tidak menceritakan ibadah siapa pun.
• B ✗ — Pak Udin tidak meminta ongkos tambahan; alasan "ongkos sama besar" tidak ada di ilustrasi dan keadilan tidak berarti sama rata.
• C ✗ — tidak ada musyawarah; Pak Udin memutuskan sendiri dengan cepat.
• D ✗ — fungsi perahu menghubungkan kampung bukan tindakan yang ditanyakan.
• E ✓ — menolong sesama dalam keadaan darurat tanpa memandang suku dan agama.

Jawaban: E.

Jebakan: kata "berbeda suku dan agama" memancing sila pertama atau ketiga, padahal bukti utama tindakannya adalah pertolongan kemanusiaan.

No. 13 Kunci: E

Konsep: Pancasila sebagai **ideologi terbuka**: **nilai dasar** (kedaulatan rakyat, sila keempat) tetap, sedangkan **nilai instrumental** (aturan teknis) dan **nilai praksis** (cara pelaksanaan) boleh berkembang agar nilai dasar itu makin terwujud, di sini agar lebih banyak warga dapat menggunakan hak pilihnya.

Analisis opsi:

• A ✗ — penilaiannya benar, tetapi alasannya keliru: asas pemilu yang menjabarkan nilai dasar tidak diganti; ilustrasi justru menyebut asas tetap dipegang.
• B ✗ — memandang Pancasila sebagai ideologi tertutup; cara pelaksanaan dapat berkembang.
• C ✗ — berlebihan; cara teknis pemungutan suara diatur peraturan pelaksana, bukan UUD.
• D ✗ — alasan keliru; semua pemilih setara, perubahan itu memberi kesempatan yang sama, bukan mendahulukan.
• E ✓ — cara berubah (petugas mendatangi pemilih, TPS khusus), nilai kedaulatan rakyat tetap.

Jawaban: E.

Jebakan: A dan D sama-sama menilai "tepat", tetapi alasannya salah; B dan C mewakili cara pandang ideologi tertutup.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 14 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: satu tradisi dapat mencerminkan beberapa sila. Setiap pernyataan diuji: apakah perilaku dan sila (atau nilai) yang disebut sama-sama cocok?

Pernyataan 1 – Benar. Tidak membeda-bedakan agama dan asal mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) dan persatuan.
Pernyataan 2 – Salah. Memutuskan bersama dalam pertemuan warga mencerminkan musyawarah (sila keempat); warga juga tidak "dilebur", mereka tetap beragam.
Pernyataan 3 – Benar. Menjaga hasil laut agar tetap dapat dinikmati semua warga, termasuk generasi berikutnya, mewujudkan keadilan sosial (sila kelima).

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 memakai perilaku yang benar, tetapi silanya tertukar dan alasannya menyamakan persatuan dengan peleburan.

No. 15 Kunci: C

Konsep: kemudahan teknologi di era globalisasi membawa tantangan bagi nilai **kejujuran** (sila kedua). Akar masalahnya ada pada **sikap** ("yang penting nilai") dan **cara menilai** yang hanya melihat hasil. Solusi yang menyasar akar mengubah keduanya.

Analisis opsi:
- A ✗ — larangan menyeluruh berlebihan; jasa joki tetap dapat dicari di luar sekolah.
- B ✗ — seremonial; berguna sebagai kampanye, tetapi tidak mengubah sikap dan cara menilai.
- C ✓ — membangun kejujuran dan menghargai proses, sehingga joki kehilangan daya tariknya.
- D ✗ — hukuman berat tanpa pembinaan tidak mengubah sikap.
- E ✗ — memindahkan tanggung jawab; peran sekolah dan pelajar sendiri tidak hilang.

Jawaban: C.

Jebakan: D terdengar tegas dan menimbulkan efek jera, tetapi tidak menyentuh akar masalah.

No. 16 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: narkotika adalah **ancaman nonmiliter**. Warga menjaga keutuhan NKRI **sesuai perannya**: menolak terlibat, membentengi keluarga, dan melapor; penangkapan dan penghukuman adalah tugas aparat dan pengadilan.

Pernyataan 1 – Benar. Menolak dan mengingatkan keluarga adalah bela negara nonfisik yang paling dekat dengan peran warga.
Pernyataan 2 – Benar. Melapor lewat saluran resmi membantu aparat bekerja.
Pernyataan 3 – Salah. Menghukum sendiri adalah main hakim sendiri dan melanggar hak orang yang belum terbukti bersalah.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 memakai tujuan yang baik (desa aman) untuk membenarkan cara yang melanggar hukum.

No. 17 Kunci: B

Konsep: menjaga keutuhan NKRI tidak hanya dengan senjata. **Bela negara nonfisik** dilakukan warga **sesuai profesinya**, misalnya melayani warga di daerah perbatasan sehingga mereka sehat, terlayani, dan merasakan kehadiran negara (nilai rela berkorban).

Analisis opsi:
- A ✗ — menjaga batas wilayah secara militer adalah tugas TNI; Dewi berperan sebagai perawat.
- B ✓ — pengabdian sesuai profesi di wilayah perbatasan memperkuat ikatan warga dengan negara.
- C ✗ — berlebihan; bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, apa pun profesinya.
- D ✗ — yang bermakna adalah pengabdiannya, bukan sekadar tempat tinggalnya.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• E ✗ — berlebihan; rela berkorban tidak berarti kepentingan pribadi tidak boleh dipikirkan sama sekali.

Jawaban: B.

Jebakan: A menempelkan tugas aparat pada warga sipil; C dan E memakai kata mutlak.

No. 18 Kunci: A

Konsep: persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1) tidak berarti hakim memihak yang lemah, tetapi setiap pihak mendapat **kesempatan yang sama untuk membela diri**. Bagi warga tidak mampu, negara menyediakan **bantuan hukum cuma-cuma** (UU Nomor 16 Tahun 2011).

Analisis opsi:

• A ✓ — bantuan hukum menyamakan kesempatan Pak Lukas dengan perusahaan yang mampu membayar pengacara.
• B ✗ — hakim harus memutus berdasarkan bukti dan hukum, bukan berdasarkan siapa yang lebih lemah.
• C ✗ — tekanan massa adalah main hakim sendiri dan mencampuri proses hukum.
• D ✗ — menyerah berarti haknya hilang tanpa pernah diuji di pengadilan.
• E ✗ — gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan tidak dapat diputus oleh kepala kampung.

Jawaban: A.

Jebakan: B terdengar adil karena membela yang lemah, padahal persamaan di hadapan hukum menuntut hakim tidak memihak.

No. 19 Kunci: B

Konsep: keragaman menjadi **modal sosial** bila tumbuh **kepercayaan**, **jaringan kerja sama**, dan **aturan bersama yang adil**. Kecurigaan muncul karena pengelolaan terpisah dan tidak terbuka; jalan keluarnya adalah wadah bersama yang melibatkan semua pihak.

Analisis opsi:

• A ✗ — memisahkan kelompok mempertebal sekat; kecurigaan tidak hilang.
• B ✓ — wakil semua desa bekerja dalam satu wadah dan bantuan dibagi secara terbuka: membangun kepercayaan dan kerja sama.
• C ✗ — penyeragaman oleh kelompok terbesar menimbulkan rasa tidak adil.
• D ✗ — memindahkan tanggung jawab; pengungsi tidak dilibatkan sehingga kepercayaan antarwarga tidak tumbuh.
• E ✗ — pendekatan keamanan membungkam keluhan tanpa menyelesaikan sumbernya.

Jawaban: B.

Jebakan: A terlihat praktis dan cepat, padahal memperkuat sekat antarkelompok.

No. 20 Kunci: A, C, D

Konsep: modal sosial terdiri atas **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma timbal balik** yang menghasilkan kerja sama. Keragaman menjadi modal bila perbedaan tetap ada, tetapi orang-orang yang berbeda saling percaya dan bekerja sama.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — menitipkan lapak dan meminjamkan modal menunjukkan kepercayaan lintas kelompok.
• B ✗ — perbedaan tidak dihapus; pedagang tetap beribadah menurut agamanya masing-masing.
• C ✓ — jaringan saling bantu terbukti saat pasar dibangun kembali.
• D ✓ — kebiasaan bergiliran dan saling menolong adalah norma timbal balik.
• E ✗ — ilustrasi tidak menyebut wisatawan; manfaat ekonomi luar bukan inti modal sosial.

Jawaban: A, C, dan D.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Jebakan: B menyamakan kekuatan bersama dengan penghapusan perbedaan; E memilih manfaat ekonomi yang tidak ada di ilustrasi.

No. 21 Kunci: E

Konsep: pengampunan bagi terpidana yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap ditempuh lewat **grasi**. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945, **Presiden** memberi grasi dan rehabilitasi **dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung**; grasi diajukan atas permohonan terpidana atau keluarganya (UU Grasi). Lembaga lain tidak berwenang mengubah putusan itu.

Analisis opsi:

- A ✗ — MK menguji undang-undang terhadap UUD, bukan mengadili ulang perkara pidana.
- B ✗ — amnesti pun diberikan Presiden (dengan pertimbangan DPR), bukan diputus DPR sendiri.
- C ✗ — KY menjaga perilaku hakim, tidak berwenang mengubah hukuman.
- D ✗ — MA tidak membebaskan terpidana atas prakarsa sendiri di luar perkara yang diajukan kepadanya.
- E ✓ — grasi oleh Presiden dengan pertimbangan MA, atas permohonan terpidana atau keluarga.

Jawaban: E.

Jebakan: B menyebut bentuk pengampunan yang memang ada (amnesti), tetapi lembaga pemberinya tertukar; C menyebut lembaga yang berkaitan dengan hakim, tetapi tanpa wewenang atas isi putusan.

No. 22 Kunci: A

Konsep: demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah, dan musyawarah yang sah memberi **kesempatan yang sama** kepada setiap warga yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk perempuan dan penyewa.

Analisis opsi:

- A ✓ — warga terdampak tidak diundang; kesetaraan hak berpendapat diabaikan.
- B ✗ — mufakat hanyalah cara; mufakat di antara sebagian warga tidak menggantikan hak warga lain yang terdampak.
- C ✗ — anggapan bahwa kepala keluarga laki-laki otomatis mewakili semua mengabaikan hak perempuan dan penyewa.
- D ✗ — menyerahkan kepada pemerintah meninggalkan kedaulatan warga.
- E ✗ — berlebihan; urusan kampung tidak perlu diputuskan seluruh kecamatan.

Jawaban: A.

Jebakan: B menggoda karena kata "mufakat" adalah ciri demokrasi Pancasila, padahal yang dinilai adalah siapa yang boleh ikut bermusyawarah.

No. 23 Kunci: B, C, E

Konsep: pelopor pemilih pemula **memilih dengan cerdas** (menolak politik uang, menilai program) dan **mengajak orang lain berpartisipasi secara cerdas**, tanpa mengarahkan pilihan mereka. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan terdaftar berhak ikut memilih dan berpartisipasi.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — pemilih berusia 17 tahun yang terdaftar berhak memilih dan berpartisipasi.
- B ✓ — menolak politik uang menjaga kebebasan dan kejujuran pilihan.
- C ✓ — warga menilai calon dari program.
- D ✗ — mengarahkan pilihan orang lain bukan peran pelopor; pilihan tiap pemilih bebas dan rahasia.
- E ✓ — informasi yang tidak memihak membantu warga memilih secara bebas dan cerdas.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: D terdengar seperti "memimpin", padahal pelopor mengajak berpartisipasi, bukan menentukan pilihan orang lain.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 24 Kunci: B

Konsep: konflik antarkelompok yang berbeda suku mudah membesar bila dibakar **informasi palsu**. Langkah pertama yang tepat bersifat **dialogis** dan **memutus pemicu**: mempertemukan pihak-pihak melalui tokohnya dan meluruskan kabar bohong.

Analisis opsi:

• A ✗ — berlebihan; kegiatan yang mempertemukan warga justru hilang selamanya.
• B ✓ — dialog antartokoh meredakan ketegangan, dan pelurusan pesan berantai memutus pemicu.
• C ✗ — represif semata; menghukum ejekan tidak menghentikan ajakan "membalas" yang terlanjur beredar.
• D ✗ — pembiaran; pesan berantai sudah mengajak pemuda berkumpul.
• E ✗ — berjaga dengan sikap siaga memperuncing kecurigaan antardesa.

Jawaban: B.

Jebakan: C terlihat tegas, tetapi tidak menyentuh dua pemicu utama: ketegangan antarkelompok dan kabar palsu.

No. 25 Kunci: D

Konsep: Pasal 28I ayat (4) menempatkan **negara, terutama pemerintah**, sebagai penanggung jawab pemenuhan HAM, termasuk hak anak atas pendidikan dan rasa aman. Warga boleh membantu, tetapi tanggung jawab utama tidak berpindah kepada mereka.

Analisis opsi:

• A ✗ — memindahkan tanggung jawab pemerintah kepada warga.
• B ✗ — mengorbankan hak anak atas pendidikan.
• C ✗ — pemenuhan hak warga adalah tanggung jawab negara sendiri.
• D ✓ — pemerintah menjalankan tanggung jawabnya; keterlibatan warga memperkuat pelaksanaannya.
• E ✗ — rakit membahayakan keselamatan anak; hak tidak terpenuhi bila aksesnya tidak aman.

Jawaban: D.

Jebakan: A dan E terdengar seperti kemandirian warga, padahal memindahkan kewajiban negara dan mengabaikan keselamatan anak.

Simulasi 5 — Prediksi TKA 2026

No. 1 Kunci: 1S 2B 3B

Konsep: kebersamaan dalam keberagaman berarti perbedaan **diakui dan dilayani**, bukan dihapus. **Toleransi aktif** tidak berhenti pada membiarkan perbedaan, tetapi ikut menyesuaikan diri dan bekerja sama.

Pernyataan 1 – Salah. Penerjemah justru menghormati bahasa daerah pasien; bahasa daerahnya tidak dihapus.
Pernyataan 2 – Benar. Petugas aktif menyesuaikan layanan agar semua kelompok dapat beribadah dan tetap terlayani.
Pernyataan 3 – Benar. Tokoh yang dipercaya tiap kelompok membuat program dirasakan sebagai milik bersama.

Jawaban: Salah – Benar – Benar.

Jebakan: pernyataan 1 menyamakan persatuan dengan penyeragaman bahasa.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 2 Kunci: B, C, E

Konsep: diskriminasi adalah perlakuan tidak adil karena perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Akibat langsungnya: kelompok tertentu kehilangan kesempatan; akibat lanjutannya: rasa tersisih yang melemahkan integrasi nasional. Penanganannya menghapus perlakuan tidak adil, bukan menyingkirkan korbannya.

Periksa setiap pernyataan:

- A ✗ — perilaku yang menutup peluang kerja kelompok tertentu berdampak pada kehidupan bersama, bukan sekadar urusan pribadi.
- B ✓ — penilaian bukan karena layanan, melainkan karena identitas → diskriminasi.
- C ✓ — urutan akibat yang tepat: peluang kerja tertutup → rasa tersisih.
- D ✗ — justru memperluas diskriminasi.
- E ✓ — menghapus perlakuan tidak adil dan mengembalikan ukuran pada mutu layanan.

Jawaban: B, C, dan E.

Jebakan: A menggoda karena ulasan memang ditulis pribadi; D tampak "praktis" bagi bisnis, padahal menyingkirkan korban.

No. 3 Kunci: D

Konsep: pelopor pemilih pemula mengajak teman **menggunakan hak pilih secara cerdas dan bebas**: terdaftar sebagai pemilih, menimbang rekam jejak dan program, menolak politik uang dan informasi palsu. Pelopor **tidak mengarahkan** pilihan orang lain, karena pemilu berasas bebas dan rahasia.

Analisis opsi:

- A ✗ — mengarahkan pilihan; memanfaatkan pengaruh agar pengikut memilih calon yang sama.
- B ✗ — mengajak tidak memakai hak pilih, bertentangan dengan peran pelopor.
- C ✗ — memindahkan peran; pelajar justru dapat menjadi penggerak sesama pemilih pemula.
- D ✓ — mendorong partisipasi sekaligus membekali teman untuk memilih secara cerdas dan bebas.
- E ✗ — menyebarkan semua informasi tanpa menyaring berisiko menyebarkan informasi palsu.

Jawaban: D.

Jebakan: A menggoda karena niatnya "memilih yang terbaik", padahal mengarahkan pilihan orang lain; E tampak informatif, tetapi tidak menyaring.

No. 4 Kunci: A

Konsep: kebinekaan menjadi **modal sosial** bila warga yang berbeda latar membangun **kepercayaan**, **jaringan**, dan **norma bersama** yang membuat kerja sama berjalan dan bertahan.

Analisis opsi:

- A ✓ — kesepakatan bersama, giliran kerja, dan teguran tanpa membeda-bedakan adalah norma dan kepercayaan.
- B ✗ — bertentangan dengan ilustrasi yang menyebut berbagai suku.
- C ✗ — hasil kepiting adalah manfaat ekonomi, bukan alasan kebinekaan menjadi modal sosial.
- D ✗ — aturan disepakati bersama, bukan ditentukan kelompok terbesar.
- E ✗ — bertentangan dengan ilustrasi; warga sendiri yang bekerja.

Jawaban: A.

Jebakan: C benar sebagai akibat kegiatan, tetapi tidak menjawab "mengapa kebinekaan menjadi modal sosial".

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

No. 5 Kunci: B

Konsep: penegakan hukum yang berkeadilan menuntut **persamaan di hadapan hukum**: semua pelaku, termasuk yang bermodal dan berpengaruh, dapat diperiksa dan dihukum. Tantangan penegakan hukum dibaca dari **bukti di ilustrasi**.

Analisis opsi:

- A ✗ — ketidaktahuan tidak menghapus pelanggaran; lagi pula ini bukan tantangan yang tergambar.
- B ✓ — razia hanya menangkap buruh, pemodal tidak diperiksa, dan tambang kembali beroperasi.
- C ✗ — keliru; aturan perlindungan lingkungan hidup sudah ada; ilustrasi menunjukkan masalah pelaksanaan.
- D ✗ — ilustrasi menyebut razia beberapa kali, artinya aparat mengetahui kejadiannya.
- E ✗ — pencemaran merkuri disebabkan manusia, bukan bencana alam.

Jawaban: B.

Jebakan: D memindahkan tantangan kepada korban (warga), pola pengecoh yang sering muncul pada soal penegakan hukum.

No. 6 Kunci: D

Konsep: sila ditentukan dari **bukti utama** dalam ilustrasi, bukan dari kata yang muncul. Bukti utamanya: kader menolak pengucilan dan memperlakukan orang sakit sebagai manusia yang bermartabat. Itu inti **kemanusiaan yang adil dan beradab**.

Analisis opsi:

- A ✗ — ilustrasi tidak menyebut alasan keagamaan; alasan yang ditulis tidak ada buktinya.
- B ✗ — ilustrasi tidak menggambarkan warga yang terbelah dua kelompok; yang terjadi adalah pengucilan satu keluarga.
- C ✗ — kader memberi penjelasan, bukan memimpin musyawarah untuk mengambil keputusan.
- D ✓ — pendampingan dan penolakan stigma menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia.
- E ✗ — ilustrasi tidak membahas biaya obat; alasan itu ditambahkan dari luar ilustrasi.

Jawaban: D.

Jebakan: C menggoda karena ada kegiatan "menjelaskan kepada warga", dan E karena menyebut puskesmas; keduanya menempelkan alasan yang tidak menjadi bukti utama.

No. 7 Kunci: 1B 2S 3B

Konsep: lembaga dipilih dari **jenis perkaranya**: undang-undang diuji terhadap UUD di **Mahkamah Konstitusi**; peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang di **Mahkamah Agung**; perilaku hakim diawasi **Komisi Yudisial**.

Pernyataan 1 – Benar. Yang diuji undang-undang, ukurannya UUD → MK.
Pernyataan 2 – Salah. Peraturan menteri berada di bawah undang-undang → diuji di MA, bukan MK.
Pernyataan 3 – Benar. Pertemuan hakim dengan pihak berperkara di luar sidang menyangkut perilaku hakim → KY.

Jawaban: Benar – Salah – Benar.

Jebakan: pernyataan 2 menukar wewenang MA dan MK, kesalahan yang paling sering terjadi pada soal kewenangan lembaga.

No. 8 Kunci: C

Konsep: kejahatan siber lintas negara adalah **ancaman nonmiliter** yang memanfaatkan warga, termasuk pelajar. Upaya terbaik pelajar: **mencegah di akar** (pemahaman teman sebaya), **sesuai perannya**, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Analisis opsi:

• A ✗ — menangkap adalah tugas aparat, dan menyamaratakan semua siswa sebagai pelaku tanpa melihat keadaannya.
• B ✗ — seremonial dan tidak menyasar cara kerja penipuan itu.
• C ✓ — membekali teman agar menolak tawaran dan tahu cara melapor, bersama guru dan bank.
• D ✗ — berlebihan; rekening bank bermanfaat, yang berbahaya adalah menyewakannya.
• E ✗ — membiarkan teman terjerat kejahatan; hak pribadi tidak membenarkan ikut menampung uang hasil penipuan.

Jawaban: C.

Jebakan: A terdengar tegas, tetapi mengambil alih tugas aparat; D terdengar aman, tetapi berlebihan.

No. 9 Kunci: A

Konsep: rancangan APBN diajukan Presiden dan dibahas bersama DPR. Persetujuan DPR adalah wujud **fungsi anggaran** dan **checks and balances**: Presiden tidak dapat memakai uang negara sesuai kehendaknya sendiri. Bila DPR menolak, negara tidak berhenti berjalan; pemerintah memakai anggaran tahun lalu.

Analisis opsi:

• A ✓ — sesuai bunyi pasal yang dikutip.
• B ✗ — Presiden mengusulkan, tetapi tidak dapat menjalankan anggaran tanpa persetujuan DPR.
• C ✗ — MK tidak berwenang memutuskan anggaran; perselisihan ini diatur langsung oleh pasal tersebut.
• D ✗ — DPD memberi pertimbangan, tetapi tidak mengambil alih pembahasan anggaran.
• E ✗ — pasal justru mencegah pemerintahan berhenti dengan memakai anggaran tahun lalu.

Jawaban: A.

Jebakan: B menggoda karena Presiden memang menyusun rancangan; D menyebut lembaga yang memang ikut dalam proses anggaran, tetapi dengan wewenang yang dilebih-lebihkan.

No. 10 Kunci: A

Konsep: sikap "milik orang sini" adalah **primordialisme** yang dapat memecah warga menurut asal daerah dan suku. Penyelesaian yang menjaga integrasi bersifat **dialogis** dan **adil**: semua pihak yang berhak diperlakukan setara melalui aturan yang disepakati.

Analisis opsi:

• A ✓ — musyawarah menghasilkan aturan yang adil dan setara bagi semua pemandu berizin.
• B ✗ — membenarkan primordialisme dan melanggar hak pemandu berizin.
• C ✗ — represif dan hanya meredam sesaat; akar perselisihannya tidak disentuh.
• D ✗ — memindahkan persoalan; pemandu setempat maupun dari luar sama-sama tersisih.
• E ✗ — memperkuat pengelompokan menurut suku.

Jawaban: A.

Jebakan: B dan C tampak menjaga ketertiban, tetapi B membenarkan diskriminasi dan C tidak menyelesaikan akar masalah.

No. 11 Kunci: A, C, D

Konsep: modal sosial terdiri atas **jaringan**, **kepercayaan**, dan **norma timbal balik**. Modal sosial yang **menjembatani** menghubungkan orang dari kelompok berbeda. Kebinekaan menjadi modal bila perbedaan diakui sambil bekerja sama.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — jaringan anggota lintas kelompok mempercepat pertolongan.
• B ✗ — persatuan tidak menuntut perbedaan disembunyikan atau dihapus.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• C ✓ — memberi tanpa imbalan dengan keyakinan akan dibantu kelak adalah norma timbal balik.
• D ✓ — kepercayaan antarorang yang berbeda latar = modal sosial yang menjembatani.
• E ✗ — ilustrasi menyebut donor tanpa imbalan; menilai komunitas dari hasil jual adalah ukuran ekonomi.

Jawaban: A, C, dan D.

Jebakan: B menyamakan persatuan dengan penyeragaman; E menukar modal sosial dengan modal ekonomi.

No. 12 Kunci: C

Konsep: keutuhan NKRI dijaga bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh perilaku warga sehari-hari yang **memperkuat rasa persatuan** dan **rasa memiliki** terhadap seluruh wilayah Indonesia (bela negara nonfisik). Warga yang saling mengenal lebih sulit dipecah oleh prasangka dan rasa terabaikan.

Analisis opsi:
• A ✗ — manfaat ekonomi bagi pembuat video, bukan alasan kegiatan itu menjaga keutuhan NKRI.
• B ✗ — keliru; daerah terpencil tetap berhak atas pembangunan, video tidak menggantikannya.
• C ✓ — mengenalkan daerah dan warga yang jauh menumbuhkan rasa sebangsa dan rasa memiliki.
• D ✗ — membanding-bandingkan daerah tidak menjawab pertanyaan dan dapat memicu sikap merendahkan.
• E ✗ — kegiatan warga mendukung, tetapi tidak menggantikan tugas pemerintah daerah.

Jawaban: C.

Jebakan: A benar sebagai manfaat, tetapi tidak menjawab "mengapa menjaga keutuhan NKRI"; E memindahkan peran pemerintah kepada warga.

No. 13 Kunci: C

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menuntun warga menyelesaikan benturan kepentingan sehari-hari dengan **menyeimbangkan hak dan kewajiban** melalui **musyawarah** (sila keempat), sehingga kepentingan satu pihak dijalankan tanpa mengorbankan pihak lain (sila kedua dan kelima).

Analisis opsi:
• A ✗ — hanya membela petani; pagar menutup usaha wisata yang juga sah, dan kata "selalu" menjadikan hak milik mutlak.
• B ✗ — kewajiban mengalah dibebankan kepada petani saja; tambahan penghasilan desa tidak menghapus hak petani atas hasil kerjanya.
• C ✓ — kesepakatan jalur kunjungan menjaga tanaman, bagi hasil menghargai petani, dan wisata tetap berjalan.
• D ✗ — memindahkan penyelesaian kepada pihak luar; musyawarah warga yang berkepentingan tidak terjadi.
• E ✗ — urutannya keliru: kepentingan petani dipikirkan **kemudian**, setelah kepentingan usaha wisata terpenuhi.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan B masing-masing terdengar adil karena membela pihak yang memang dirugikan. E menyelipkan kata "kemudian", pola pengecoh yang juga dipakai soal asli.

No. 14 Kunci: 1B 2S 3S

Konsep: sebagai **pandangan hidup**, Pancasila menjadi pedoman perilaku sehari-hari, termasuk di ruang publik dan saat tidak ada yang mengawasi. Hak sebagai penumpang dijalankan bersama kewajiban menghormati sesama, terutama kelompok rentan (sila kedua dan kelima).

Pernyataan 1 – Benar. Perilaku itu lahir dari kesadaran nilai kemanusiaan, bukan karena takut ditegur petugas.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Pernyataan 2 – Salah. Tiket yang sama tidak menghapus kewajiban mendahulukan yang lebih membutuhkan; keadilan tidak selalu berarti sama rata.
Pernyataan 3 – Salah. Antre tertib adalah wujud menghormati hak orang lain, jadi termasuk pengamalan nilai Pancasila.

Jawaban: Benar – Salah – Salah.

Jebakan: pernyataan 2 memakai alasan "hak yang sama" untuk mengabaikan kewajiban; pernyataan 3 menganggap perilaku kecil tidak berkaitan dengan Pancasila.

No. 15 Kunci: B

Konsep: dalam demokrasi Pancasila, warga **berhak menyampaikan pendapat** dan ikut memengaruhi kebijakan (Pasal 28E ayat 3), tetapi hak itu dijalankan dengan **menghormati hak orang lain** (Pasal 28J), termasuk hak atas perlindungan diri pribadi, dan lewat cara yang tertib.

Analisis opsi:
• A ✗ — menyebarkan alamat dan mengajak mendatangi rumah melanggar hak pribadi dan rasa aman orang lain.
• B ✓ — hak berpendapat dijalankan lewat saluran yang sah dan disertai argumen.
• C ✗ — diam karena "wewenang pemerintah" adalah kepatuhan, bukan pelaksanaan hak dalam demokrasi.
• D ✗ — menolak kewajiban membayar bukan cara yang sah untuk memperjuangkan pendapat.
• E ✗ — yang diutamakan adalah alasan, bukan siapa yang paling keras bersuara.

Jawaban: B.

Jebakan: A menggoda karena tampak "tegas" dan efektif; C menyamakan sikap warga negara yang baik dengan sekadar patuh.

No. 16 Kunci: A

Konsep: ideologi Pancasila **mengakui kebebasan berusaha dan hak milik** (berbeda dari sosialisme-komunisme), tetapi kebebasan itu **dibatasi kepentingan bersama** dan keadilan sosial (berbeda dari liberalisme yang menyerahkan semuanya kepada pasar).

Analisis opsi:
• A ✓ — orang tetap bebas berdagang daring (kebebasan diakui), tetapi praktik yang mematikan pedagang kecil dilarang (dibatasi kepentingan bersama).
• B ✗ — ciri liberalisme; kebijakan dalam ilustrasi justru membatasi persaingan yang tidak sehat.
• C ✗ — ciri sosialisme; kebijakan itu tidak mengambil alih perdagangan oleh negara.
• D ✗ — berlebihan; pedagang besar tidak dilarang berjualan, yang dilarang hanya praktik menjual rugi.
• E ✗ — nilai dasar Pancasila tidak diubah; yang menyesuaikan adalah kebijakannya (nilai instrumental).

Jawaban: A.

Jebakan: B dan C mengambil satu sisi kebijakan lalu menyimpulkannya berlebihan; E menukar nilai dasar dengan nilai instrumental.

No. 17 Kunci: E

Konsep: Bhinneka Tunggal Ika berarti perbedaan **diakui**, bukan dihapus. Sebuah kegiatan memperkukuh persatuan bila mempertemukan orang yang berbeda latar, menumbuhkan **saling kenal** dan **rasa memiliki** tujuan bersama.

Analisis opsi:
• A ✗ — manfaat wisata, bukan alasan memperkukuh persatuan.
• B ✗ — persatuan tidak menghapus perbedaan; para pendaki tetap dengan identitasnya masing-

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

masing.

• C ✗ — ilustrasi tidak membandingkan kelompok; kesimpulan ini dibuat-buat.

• D ✗ — kegiatan sukarela tidak menggantikan tanggung jawab pengelola; lagi pula tidak menjawab pertanyaan.

• E ✓ — kerja bersama, berkemah, dan bertukar cerita menumbuhkan saling kenal antarwarga yang beragam.

Jawaban: E.

Jebakan: A benar sebagai manfaat, tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang persatuan; B menyamakan persatuan dengan penyeragaman.

No. 18 Kunci: E

Konsep: Pasal 28H ayat (1) menjamin **hak** setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak mencari nafkah juga sah, tetapi setiap orang **wajib menghormati hak orang lain** ketika menjalankan haknya (Pasal 28J ayat 1). Penyelesaiannya: usaha diatur agar tidak mencemari, bukan salah satu hak dihapus.

Analisis opsi:

• A ✗ — tidak ada hak yang "lebih utama" sampai boleh merusak hak orang lain.

• B ✗ — memindahkan beban kepada tetangga yang justru dirugikan.

• C ✗ — tindakan main hakim sendiri; penyelesaian ditempuh lewat musyawarah atau pemerintah desa.

• D ✗ — salah membaca isi pasal; pasal itu juga menyebut lingkungan hidup yang baik dan sehat.

• E ✓ — kedua hak diakui dan dijalankan berdampingan.

Jawaban: E.

Jebakan: A dan B masing-masing memenangkan satu pihak; D memotong isi pasal yang dikutip.

No. 19 Kunci: A, B, D

Konsep: sila-sila Pancasila **saling menjiwai**; satu kebijakan dapat mencerminkan beberapa sila sekaligus. Setiap pernyataan diuji: perilaku dan sila yang disebut harus sama-sama cocok dengan ilustrasi.

Periksa setiap pernyataan:

• A ✓ — keputusan lewat forum warga = musyawarah (sila keempat).

• B ✓ — sopir yang kehilangan trayek tidak ditinggalkan, tetapi diberi pekerjaan baru (keadilan sosial, sila kelima).

• C ✗ — adil tidak selalu sama rata; keringanan bagi kelompok yang lebih membutuhkan justru wujud keadilan.

• D ✓ — fasilitas bagi penyandang disabilitas menghormati martabat manusia (sila kedua).

• E ✗ — musyawarah tidak menutup peninjauan ulang; keputusan yang ternyata merugikan dapat dimusyawarahkan kembali.

Jawaban: A, B, dan D.

Jebakan: C memakai salah paham "adil = sama rata"; E menjadikan hasil musyawarah mutlak.

No. 20 Kunci: C

Konsep: pertanyaan menanyakan **alasan** kerja sama, bukan bentuknya. Persampahan adalah **urusan konkuren** yang diserahkan kepada daerah, tetapi bila persoalannya **lintas daerah** dan melampaui kemampuan satu daerah (lahan, teknologi, dana), daerah bekerja sama dan provinsi mengoordinasikan, sedangkan pusat membantu sesuai perannya.

Analisis opsi:

• A ✗ — urusan absolut hanya enam (antara lain pertahanan, moneter, agama); persampahan bukan

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

salah satunya.
• B ✗ — kerja sama tidak mencabut otonomi; daerah tetap berwenang atas urusannya.
• C ✓ — lahan habis dan sampah mengalir antardaerah: masalahnya lintas wilayah dan butuh sumber daya bersama.
• D ✗ — provinsi mengoordinasikan, bukan mengambil alih seluruh urusan kabupaten/kota.
• E ✗ — tidak ada kewajiban seperti itu; kerja sama dibangun dengan pembagian peran.

Jawaban: C.

Jebakan: A dan D sama-sama menganggap kerja sama berarti urusan dipindahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

No. 21 Kunci: B, D, E

Konsep: ketahanan pangan termasuk **gatra ekonomi** ketahanan nasional. Warga menjaganya **sesuai perannya**: mengurangi ketergantungan secara wajar, ikut memproduksi, dan tidak berperilaku yang merugikan orang banyak.

Periksa setiap pernyataan:
• A ✗ — menolak total berlebihan dan dapat membuat warga kekurangan pangan.
• B ✓ — memperluas pasar pangan lokal dan mengurangi ketergantungan.
• C ✗ — menimbun memperparah kelangkaan dan merugikan warga lain.
• D ✓ — menambah generasi petani dan produksi pangan dalam negeri.
• E ✓ — mengurangi pemborosan berarti mengurangi kebutuhan pasokan.

Jawaban: B, D, dan E.

Jebakan: A terdengar cinta tanah air, tetapi berlebihan; C tampak bijak bagi keluarga, padahal merugikan orang banyak.

No. 22 Kunci: D

Konsep: penegakan hukum yang berkeadilan memeriksa **semua pihak yang patut diduga bertanggung jawab** sesuai bukti, tanpa memandang kedudukan (persamaan di hadapan hukum). Bukti di ilustrasi menunjuk kelalaian perusahaan: izin kelaikan kedaluwarsa dan perbaikan rem ditunda.

Analisis opsi:
• A ✗ — kedekatan dengan kejadian tidak berarti hanya sopir yang bertanggung jawab; buktinya menunjuk perusahaan juga.
• B ✗ — berlebihan: sopir tetap diperiksa sesuai perannya; yang salah adalah hanya sopir yang dijerat.
• C ✗ — santunan tidak menggantikan proses hukum atas kelalaian.
• D ✓ — semua pihak yang lalai, termasuk pengelola perusahaan, perlu diperiksa.
• E ✗ — memindahkan kesalahan kepada korban.

Jawaban: D.

Jebakan: B sama-sama menilai "belum adil", tetapi dengan alasan yang keliru (membebaskan sopir sepenuhnya); C menyamakan santunan dengan keadilan hukum.

No. 23 Kunci: B

Konsep: modal sosial = kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik yang memudahkan kerja sama. Warisan budaya menjadi modal sosial pembangunan bila **menghubungkan** banyak pihak yang berbeda dan menumbuhkan kepercayaan, bukan hanya karena terkenal atau laku dijual.

Analisis opsi:
• A ✗ — penyeragaman menghapus kekayaan racikan daerah; tidak membangun kerja sama.
• B ✓ — jejaring dan rasa saling percaya antarpihak adalah inti modal sosial.
• C ✗ — tujuan ekonomi disertai sikap merasa paling unggul (chauvinis), bukan modal sosial.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

• D ✗ — memindahkan pengembangan kepada satu pihak; jaringan komunitas justru melemah.
• E ✗ — eksklusif; menutup keterlibatan pihak lain.

Jawaban: B.

Jebakan: C menggoda karena terdengar membanggakan dan menguntungkan; modal sosial bukan modal ekonomi.

No. 24 Kunci: E

Konsep: globalisasi pariwisata membawa peluang sekaligus tantangan bagi keadilan sosial (sila kelima) dan jati diri bangsa. Solusi yang **menyasar akar** menjawab penyebab masalah, yaitu warga kehilangan lahan dan kendali atas usaha di daerahnya sendiri, bukan sekadar menolak pengaruh luar atau menggelar kegiatan seremonial.

Analisis opsi:
• A ✗ — menolak total pengaruh luar berlebihan dan menutup peluang ekonomi warga.
• B ✗ — seremonial; justru memperkuat kecenderungan adat menjadi tontonan.
• C ✗ — memindahkan kendali kepada pihak luar; warga makin tersisih.
• D ✗ — berlebihan dan tidak menyentuh persoalan lahan serta kesejahteraan warga.
• E ✓ — warga tetap menjadi pemilik dan pelaku utama, dan penataan lahan mencegah warga tersingkir.

Jawaban: E.

Jebakan: B tampak melestarikan budaya, tetapi tidak menjawab akar masalah; A dan D terdengar tegas menjaga budaya, padahal berlebihan.

No. 25 Kunci: 1B 2B 3S

Konsep: integrasi nasional dijaga dengan **keadilan** dan **dialog**. Wilayah laut Indonesia adalah satu kesatuan; pemanfaatannya diatur bersama agar adil, bukan dibagi menurut suku.

Pernyataan 1 – Benar. Aturan yang disepakati dan adil menghilangkan sumber perselisihan.
Pernyataan 2 – Benar. Dialog yang rutin menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi prasangka.
Pernyataan 3 – Salah. Ini sikap primordial; mengusir sesama warga negara bertentangan dengan persatuan.

Jawaban: Benar – Benar – Salah.

Jebakan: pernyataan 3 memakai alasan "melindungi nelayan setempat" untuk membenarkan pengusiran.

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Penutup

Kamu sudah sampai di halaman terakhir. Bila kamu mengerjakan latihan, kuis, dan simulasi TKA dengan sungguh-sungguh, kamu sudah menimbang ratusan kasus: dari rapat warga sampai sidang lembaga negara, dari grup percakapan kelas sampai perundingan antarbangsa. Itu bukan hal kecil.

Sebelum menutup buku ini, ingatlah lima pegangan berikut.

1. **Kenali kata tanyanya.** Tujuan, cara, alasan, upaya, akibat, atau tanggapan? Banyak jawaban salah lahir dari pilihan yang benar untuk pertanyaan lain.
2. **Kembalikan ke dasarnya.** Setiap kasus PPKn berpijak pada nilai Pancasila, pasal UUD NRI 1945, atau prinsip yang kamu pelajari. Temukan dasar itu sebelum membaca pilihan.
3. **Pilih yang menyentuh akar dan sesuai peran.** Upaya terbaik menyelesaikan penyebab, adil bagi semua pihak, dan dapat dilakukan oleh pelaku yang ditanyakan.
4. **Baca setiap pilihan sampai titik.** Pada PG kompleks dan Benar/Salah, setiap baris adalah soal kecil. Satu anak kalimat dapat mengubah benar menjadi salah.
5. **Kelola waktumu.** Kira-kira dua menit untuk setiap soal. Tandai soal yang meragukan, lanjutkan, lalu kembali di putaran kedua.

Sepekan menjelang ujian, tidak perlu menambah materi baru. Kerjakan ulang satu simulasi TKA dengan waktu sungguhan, pelajari lagi pembahasan soal yang pernah salah, lalu beristirahatlah dengan cukup. Pada hari ujian, datanglah lebih awal, baca petunjuk dengan tenang, dan percayalah pada latihan yang sudah kamu jalani.

Belajarmu tidak harus berhenti di sini. Latihan dan kuis yang sama dapat kamu buka di LMS Next Level Study untuk mengulang sub bab yang masih lemah.

Saya berjanji untuk terus memperbaiki buku ini agar makin bermanfaat. Kamu pun telah berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tepati janji itu, bukan hanya pada hari ujian, tetapi juga sesudahnya: ketika kamu memilih untuk pertama kali, ketika kamu menyaring kabar sebelum membagikannya, ketika kamu berdiri di tengah perbedaan dan memilih bermusyawarah. Di situlah ilmu yang kamu kumpulkan di buku ini menjadi baktimu bagi negeri.

Selamat berjuang. Saya bangga kepadamu.

Handaka Lumu

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Lampiran

Lampiran 1. Glosarium

Istilah	Arti dalam buku ini	Sub bab
Amandemen	perubahan pasal-pasal UUD tanpa mengganti seluruh naskahnya; UUD NRI 1945 diamandemen empat kali (1999–2002)	2.1
Astagatra	delapan unsur kehidupan bangsa: trigatra (geografi, kekayaan alam, kependudukan) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan)	4.3
Bela negara	sikap dan tindakan warga yang dijiwai cinta tanah air untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa; bentuknya fisik dan nonfisik	4.1
Bhinneka Tunggal Ika	berbeda-beda tetapi tetap satu; keragaman diakui sekaligus ada kebersamaan	3.1
Chauvinisme	nasionalisme sempit yang mengagungkan bangsa sendiri sambil merendahkan bangsa lain	4.1
Deklarasi Djuanda	pernyataan 13 Desember 1957 bahwa laut di antara dan di sekitar pulau adalah wilayah Indonesia	4.3
Desentralisasi	penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom	2.4
Diskriminasi	perlakuan tidak adil karena suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status	3.4
Etnosentrisme	menilai budaya lain dengan ukuran budaya sendiri dan merendahkannya	3.4
Gotong royong	kerja bersama secara sukarela, musyawarah, adil, terbuka, untuk kepentingan bersama	3.3
Hak angket	hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah	2.3, 4.2
Ideologi terbuka	ideologi yang nilai dasarnya tetap, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman	1.3
Integrasi nasional	proses menyatukan kelompok-kelompok yang beragam menjadi satu bangsa tanpa menghapus identitasnya	3.4
Kedaulatan rakyat	kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD	2.5
Komponen cadangan	warga negara dan sumber daya yang disiapkan secara sukarela untuk memperbesar komponen utama (TNI)	4.4
Legitimasi	pengakuan dan dukungan yang sah dari rakyat terhadap pemerintahan	4.6
Modal sosial	kepercayaan, jaringan, dan norma saling membantu yang memudahkan kerja sama	3.2
Musyawarah mufakat	pengambilan keputusan bersama melalui pertimbangan semua pihak sampai tercapai kesepakatan	1.4, 2.5

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Negara hukum	negara yang semua tindakan penguasa dan warganya berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945)	2.7
Negara kepulauan	negara yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau dan perairan di antaranya sebagai satu kesatuan; diakui UNCLOS 1982	4.3
Otonomi daerah	hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam bingkai NKRI	2.4
Pemakzulan	pemberhentian presiden atau wakil presiden di tengah masa jabatan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR	4.2
Pemilih pemula	warga negara yang baru pertama kali memakai hak pilih	4.6
Politik bebas aktif	politik luar negeri yang tidak memihak blok kekuatan dunia dan aktif mengupayakan perdamaian	4.5
Politik uang	pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih; dilarang dan diancam pidana	4.6
Primordialisme	sikap mengutamakan ikatan asal (suku, daerah, keluarga) secara berlebihan	3.4
Sishankamrata	sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta: TNI dan Polri kekuatan utama, rakyat kekuatan pendukung	4.4
Sistem presidensial	sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, masa jabatan tetap, menteri bertanggung jawab kepada presiden	4.2
Sumber segala sumber hukum	kedudukan Pancasila sebagai asal nilai bagi semua peraturan perundang-undangan	1.2
Uji materi	pengujian undang-undang terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi	2.3
Wawasan Nusantara	cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah	4.3
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif: laut sampai 200 mil dari garis pangkal; Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alamnya	4.3

Lampiran 2. Sumber peristiwa nyata

Seperti soal asli TKA 2025, soal latihan, kuis bab, dan simulasi prediksi di buku ini tidak memakai grafik, tabel, atau data statistik. Sebagian besar ilustrasinya adalah kasus warga yang disusun untuk latihan (tokoh dan tempat fiktif, diberi keterangan di soalnya). Sebagian kecil memakai peristiwa nyata; sumbernya ditulis di bawah setiap soal itu dan diringkas di sini.

Peristiwa	Sumber	Dipakai di
Konferensi Asia Afrika, Bandung, 18–24 April 1955, dan Dasasila Bandung	Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Museum Konferensi Asia Afrika	Kuis Akhir Bab 1
Batik dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda UNESCO, 2 Oktober 2009	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009; UNESCO	Kuis Akhir Bab 1

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Peran Indonesia dalam perdamaian Kamboja (Jakarta Informal Meeting, 1988–1989)	Library of Congress, *Indonesia: A Country Study*; Perpustakaan Digital PBB	Latihan 1.6
Putusan MK membatalkan UU Sumber Daya Air, 18 Februari 2015	Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013; hukumonline.com	Kuis Akhir Bab 2
Gugatan warga atas pencemaran udara Jakarta (putusan 2021, kasasi 2023)	Kepaniteraan Mahkamah Agung, perkara 2560 K/PDT/2023; Greenpeace Indonesia	Kuis Akhir Bab 2
Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 (1960)	Penetapan Presiden Nomor 3 dan 4 Tahun 1960; laman DPR RI	Latihan 2.1
Putusan MK tentang pembatalan peraturan daerah (2017)	Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016	Latihan 2.4
Program Rekompak pascagempa Yogyakarta dan Jawa Tengah, 2006	Bank Dunia (Java Reconstruction Fund)	Kuis Akhir Bab 3
Nota Kesepahaman Helsinki, 15 Agustus 2005	Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM; UU Nomor 11 Tahun 2006	Kuis Akhir Bab 3
Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal–Gereja Katedral	NU Online (5 September 2024); Metrotvnews.com (24 Desember 2024)	Latihan 3.1
Mosi Integral Natsir, 3 April 1950	ANTARA; Kompas TV	Kuis Akhir Bab 4
Putusan Mahkamah Internasional tentang Sipadan–Ligitan, 17 Desember 2002	International Court of Justice	Kuis Akhir Bab 4
Satelit Palapa A1, 1976	tirto.id; GNFI	Kuis Akhir Bab 4
KTT I Gerakan Non-Blok, Beograd, 1961	Republika; ANTARA	Latihan 4.5
Kebaya dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO, 4 Desember 2024	ANTARA; CNN Indonesia	Simulasi 2
Perjanjian damai Pemerintah Filipina–MNLF, 2 September 1996, dengan Indonesia sebagai penengah	University of Notre Dame, Peace Accords Matrix; Philippine News Agency	Simulasi 3
Program Revitalisasi Bahasa Daerah, 22 Februari 2022	ANTARA; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Simulasi 4
Peresmian Pos Lintas Batas Negara Entikong, 21 Desember 2016	Sekretariat Kabinet RI; detikFinance	Simulasi 4
Budaya sehat jamu dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO, 6 Desember 2023	UNESCO; Tempo	Simulasi 5

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Fakta yang dijelaskan di materi (tanggal, pasal, undang-undang, putusan, dan peristiwa) diperiksa ke sumber resmi atau berita kredibel saat buku ditulis. Kutipan pasal mengikuti UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang yang disebut.

Lampiran 3. Catatan edisi

Edisi 1 (2026/2027), dibagikan gratis untuk pelajar Indonesia sebagai dedikasi Next Level Study Indonesia untuk bangsa; boleh diperbanyak dan dibagikan untuk belajar, tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Soal asli TKA 2025 dimuat dengan keterangan sumber.

Revisi Oktober 2026: materi seluruh sub bab ditulis ulang menjadi penjelasan lengkap bergambar, dan semua soal buatan NLS (latihan, kuis bab, dan simulasi prediksi) diganti dengan paket baru yang mengikuti ciri soal asli TKA 2025. Soal-soal itu tersimpan di Bank Soal NLS (Kuis Akhir Bab: TKA-PPKN-KB1B sampai TKA-PPKN-KB4B; latihan sub bab: TKA-PPKN-LT02 sampai TKA-PPKN-LT05; Simulasi 2–5: TKA-PPKN-P09 sampai TKA-PPKN-P12) dan dapat dikerjakan ulang di LMS Next Level Study. Masukan dan laporan kesalahan dapat disampaikan melalui LMS Next Level Study.

Daftar sumber gambar

Gambar materi yang diambil dari sumber berlisensi terbuka dipakai sesuai lisensinya dengan menyebut pembuatnya; gambar lain digambar oleh tim Next Level Study Indonesia.

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 1.1	Linimasa perumusan Pancasila, Mei–Agustus 1945	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.2	Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta	Rocheli mit	CC BY-SA 3.0; diubah: diperkecil	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gedpancasila.jpg
Gambar 1.3	Dari usulan ke rumusan Pancasila yang disahkan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.4	Peta konsep perumusan Pancasila	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 1.5	Penjabaran nilai Pancasila ke dalam peraturan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.6	Hierarki peraturan perundang-undangan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.7	Alur pengujian peraturan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.8	Peta konsep Pancasila sebagai dasar negara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.9	Tiga lapis nilai Pancasila	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.10	Ideologi terbuka dan ideologi tertutup	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.11	Kain panjang batik dari Jawa (Honolulu Museum of Art)	Hiart	CC0; diubah: diperkecil	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kain_panjang_(long_cloth)_from_Java,_first_half_of_the_20th_century,_Honolulu_Museum_of_Art.jpg
Gambar 1.12	Peta konsep Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan identitas	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.13	Susunan hierarkis-piramidal sila Pancasila	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 1.14	Sila, contoh perilaku, dan contoh pelanggaran	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.15	Alur memilih sila yang paling tepat	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.16	Peta konsep makna dan keterkaitan sila	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.17	Hak, kewajiban, dan pembatasan menurut Pasal 28J	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.18	Ciri demokrasi Pancasila dalam satu musyawarah	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.19	Peta konsep HAM dan demokrasi Pancasila	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.20	Tantangan penerapan Pancasila dan solusinya	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 1.21	Gedung Merdeka, Bandung	Chainwit.	CC BY 4.0; diubah: dipotong; diperkecil	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandung_-_Gedung_Merdeka_(2025)_-_img_01.jpg
Gambar 1.22	Peta konsep tantangan Pancasila di era globalisasi	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 2.1	Linimasa konstitusi Indonesia 1945–2002	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.2	Empat tahap amandemen UUD 1945	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.3	Prosedur perubahan UUD menurut Pasal 37	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.4	Peta konsep dinamika konstitusi Indonesia	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.5	Empat alinea Pembukaan dan pokok pikirannya	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.6	Tujuan negara dan contoh kebijakan nyata	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.7	Peta konsep Pembukaan UUD NRI 1945	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.8	Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebelum amandemen	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.9	Struktur ketatanegaraan sesudah amandemen UUD	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 2.10	Alur pembentukan undang-undang	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.11	Alur pemberhentian Presiden menurut Pasal 7A dan 7B	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.12	Jenis perkara dan lembaga yang berwenang	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.13	Peta konsep kewenangan lembaga negara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.14	Tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.15	Pembagian urusan pemerintahan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.16	Daerah berotonomi khusus dan istimewa	Afrogindahood (peta dasar Indonesia provinces outline map); diwarnai dan diberi label oleh Tim Next Level Study Indonesia	CC BY-SA 4.0; diubah: provinsi diwarnai; label, legenda, dan judul ditambahkan; diperkecil	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indonesia_provinces_outline_map.svg

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 2.17	Peta konsep hubungan pusat dan daerah	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.18	Linimasa masa demokrasi Indonesia	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.19	Jalur kedaulatan rakyat	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.20	Peta konsep demokrasi dalam UUD NRI 1945	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.21	Pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.22	Hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam Pasal 31	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.23	Peta konsep hak dan kewajiban warga negara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.24	Lembaga penegak hukum dan tugasnya	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.25	Alur peradilan pidana	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 2.26	Penegakan hukum preventif dan represif	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 2.27	Peta konsep penegakan hukum yang berkeadilan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.1	Menara Kudus	PL09Puryono	CC0 1.0 (domain publik); diubah: diperkecil; label Indonesia ditambahkan	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjid_Menara_Kudus.jpg
Gambar 3.2	Toleransi pasif dan toleransi aktif	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.3	Dari perjumpaan ke rasa memiliki	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.4	Peta konsep makna kebersamaan dalam keberagaman	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.5	Tiga unsur modal sosial	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 3.6	Sawah berundak Jatiluwih	Globe-trotter	CC BY-SA 4.0; diubah: dipotong; diperkecil; label Indonesia ditambahkan	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rice_terraces_in_Jatiluwih,_Tabanan_Regency,_Bali,_Indonesia.jpg
Gambar 3.7	Keragaman menjadi modal sosial atau beban	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.8	Peta konsep kebinekaan sebagai modal sosial	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.9	Kerja bakti warga kampung	Fajrul Fala	CC BY-SA 4.0; diubah: dipotong; diperkecil; label Indonesia ditambahkan	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aktivitas_Kerja_Bakti_Warga_1.jpg
Gambar 3.10	Memindahkan rumah bersama	Herusutimbul	CC BY-SA 4.0; diubah: diperkecil; label Indonesia ditambahkan	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gotong_Royong_Pindah_Rumah.jpg
Gambar 3.11	Gotong royong dan penyimpangannya	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.12	Peta konsep nilai dan prinsip gotong royong	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 3.13	Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.14	Ancaman, akibat langsung, dan akibat lanjutan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.15	Linimasa penyelesaian konflik lewat dialog: Malino I, Malino II, Helsinki	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 3.16	Peta konsep ancaman terhadap keberagaman dan integrasi nasional	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.1	Tiga jenis ancaman terhadap NKRI	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.2	Lima nilai dasar bela negara dalam perilaku pelajar	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.3	Peran warga dan tugas aparat	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.4	Peta konsep perilaku menjaga keutuhan NKRI	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 4.5	Negara kesatuan dan negara federal	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.6	Sistem presidensial dan sistem parlementer	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.7	Peta konsep bentuk negara dan sistem pemerintahan	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.8	Wilayah laut menurut TZMKO 1939 dan Deklarasi Djuanda 1957 (skematis)	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.9	Zona laut menurut UNCLOS 1982 (penampang skematis)	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.10	Astagatra: trigatra dan pancagatra	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.11	Peta konsep Wawasan Nusantara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.12	Tiga sifat pertahanan semesta	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 4.13	Susunan pertahanan negara	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.14	Peta konsep Sishankamrata	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.15	Jejak politik luar negeri bebas aktif	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.16	Matriks bebas dan aktif	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.17	Peta konsep politik luar negeri bebas aktif	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.18	Alur menjadi pemilih	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.19	Tujuan dan cara partisipasi pemilih pemula	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.20	Pemilih cerdas: empat pertanyaan sebelum memilih	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.21	Peta konsep pelopor pemilih pemula	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Gambar	Judul	Pembuat	Lisensi	Sumber
Gambar 4.22	Satelit Palapa B2 setelah dilepas dari pesawat ulang-alik Challenger (STS-41-B), 1984	NASA	Domain publik (karya NASA); diubah: dipotong (bagian bawah ruang muat dibuang); diperkecil ke lebar 1.600 px; disimpan sebagai JPG	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS-41-B_Palapa_B-2_deployment.jpg
Gambar 4.23	Dua sisi kemajuan IPTEK bagi keutuhan NKRI	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—
Gambar 4.24	Peta konsep IPTEK dan keutuhan NKRI	Tim Next Level Study Indonesia	digambar sendiri	—

Tabel silang sub bab dan soal

Sub bab	Soal
1.1 · Perumusan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 3; Latihan 1.1 no. 1; Latihan 1.1 no. 2; Kuis Bab 1 no. 1; Kuis Bab 1 no. 2; Kuis Bab 1 no. 15
1.2 · Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 1; Latihan 1.2 no. 1; Latihan 1.2 no. 2; Kuis Bab 1 no. 9; Kuis Bab 1 no. 14; Kuis Bab 1 no. 22; Kuis Bab 1 no. 27; Kuis Bab 1 no. 30; Simulasi 1 no. 3
1.3 · Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan hidup, dan identitas nasional	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 10; Latihan 1.3 no. 1; Latihan 1.3 no. 2; Kuis Bab 1 no. 4; Kuis Bab 1 no. 5; Kuis Bab 1 no. 6; Kuis Bab 1 no. 16; Kuis Bab 1 no. 21; Kuis Bab 1 no. 24; Kuis Bab 1 no. 28; Simulasi 1 no. 1; Simulasi 1 no. 6; Simulasi 2 no. 6; Simulasi 2 no. 11; Simulasi 2 no. 23; Simulasi 3 no. 10; Simulasi 3 no. 13; Simulasi 3 no. 18; Simulasi 4 no. 8; Simulasi 4 no. 13; Simulasi 5 no. 13; Simulasi 5 no. 14; Simulasi 5 no. 16

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab	Soal
1.4 · Makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 9; Latihan 1.4 no. 1; Latihan 1.4 no. 2; Kuis Bab 1 no. 8; Kuis Bab 1 no. 11; Kuis Bab 1 no. 17; Kuis Bab 1 no. 18; Kuis Bab 1 no. 23; Kuis Bab 1 no. 29; Simulasi 1 no. 4; Simulasi 1 no. 10; Simulasi 2 no. 5; Simulasi 2 no. 22; Simulasi 3 no. 9; Simulasi 3 no. 21; Simulasi 4 no. 12; Simulasi 4 no. 14; Simulasi 5 no. 6; Simulasi 5 no. 19
1.5 · HAM dan demokrasi Pancasila	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 18; Latihan 1.5 no. 1; Latihan 1.5 no. 2; Kuis Bab 1 no. 10; Kuis Bab 1 no. 19; Kuis Bab 1 no. 20; Kuis Bab 1 no. 25; Simulasi 1 no. 8; Simulasi 2 no. 16; Simulasi 3 no. 1; Simulasi 4 no. 22; Simulasi 5 no. 15
1.6 · Tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi	Bedah Latihan Buku Bab 1 no. 13; Latihan 1.6 no. 1; Latihan 1.6 no. 2; Kuis Bab 1 no. 3; Kuis Bab 1 no. 7; Kuis Bab 1 no. 12; Kuis Bab 1 no. 13; Kuis Bab 1 no. 26; Simulasi 1 no. 5; Simulasi 1 no. 9; Simulasi 2 no. 8; Simulasi 3 no. 20; Simulasi 4 no. 15; Simulasi 5 no. 24
2.1 · Dinamika konstitusi Indonesia dan amandemen	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 2; Latihan 2.1 no. 1; Latihan 2.1 no. 2; Kuis Bab 2 no. 1; Kuis Bab 2 no. 21; Kuis Bab 2 no. 25
2.2 · Pembukaan UUD NRI 1945 dan pokok-pokok pikirannya	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 16; Latihan 2.2 no. 1; Latihan 2.2 no. 2; Kuis Bab 2 no. 12; Kuis Bab 2 no. 14; Kuis Bab 2 no. 22
2.3 · Kewenangan lembaga-lembaga negara	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 9; Latihan 2.3 no. 1; Latihan 2.3 no. 2; Kuis Bab 2 no. 3; Kuis Bab 2 no. 5; Kuis Bab 2 no. 7; Kuis Bab 2 no. 8; Kuis Bab 2 no. 9; Kuis Bab 2 no. 10; Kuis Bab 2 no. 19; Simulasi 1 no. 11; Simulasi 1 no. 27; Simulasi 2 no. 1; Simulasi 2 no. 4; Simulasi 3 no. 4; Simulasi 3 no. 14; Simulasi 4 no. 5; Simulasi 4 no. 21; Simulasi 5 no. 7; Simulasi 5 no. 9
2.4 · Hubungan pemerintah pusat dan daerah	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 12; Latihan 2.4 no. 1; Latihan 2.4 no. 2; Kuis Bab 2 no. 13; Kuis Bab 2 no. 15; Kuis Bab 2 no. 17; Kuis Bab 2 no. 18; Simulasi 1 no. 7; Simulasi 2 no. 25; Simulasi 3 no. 6; Simulasi 4 no. 4; Simulasi 5 no. 20
2.5 · Demokrasi dalam ketentuan UUD NRI 1945	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 7; Latihan 2.5 no. 1; Latihan 2.5 no. 2; Kuis Bab 2 no. 24; Kuis Bab 2 no. 28; Kuis Bab 2 no. 30
2.6 · Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 10; Latihan 2.6 no. 1; Latihan 2.6 no. 2; Kuis Bab 2 no. 4; Kuis Bab 2 no. 6; Kuis Bab 2 no. 11; Kuis Bab 2 no. 26; Kuis Bab 2 no. 27; Simulasi 1 no. 2; Simulasi 1 no. 12; Simulasi 2 no. 18; Simulasi 2 no. 21; Simulasi 3 no. 15; Simulasi 3 no. 24; Simulasi 4 no. 7; Simulasi 4 no. 25; Simulasi 5 no. 18
2.7 · Penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM	Bedah Latihan Buku Bab 2 no. 20; Latihan 2.7 no. 1; Latihan 2.7 no. 2; Kuis Bab 2 no. 2; Kuis Bab 2 no. 16; Kuis Bab 2 no. 20; Kuis Bab 2 no. 23; Kuis Bab 2 no. 29; Simulasi 1 no. 17; Simulasi 1 no. 25; Simulasi 2 no. 9; Simulasi 2 no. 20; Simulasi 3 no. 7; Simulasi 3 no. 25; Simulasi 4 no. 11; Simulasi 4 no. 18; Simulasi 5 no. 5; Simulasi 5 no. 22

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab	Soal
3.1 · Makna kebersamaan dalam keberagaman	Bedah Latihan Buku Bab 3 no. 8; Latihan 3.1 no. 1; Latihan 3.1 no. 2; Kuis Bab 3 no. 4; Kuis Bab 3 no. 5; Kuis Bab 3 no. 6; Kuis Bab 3 no. 8; Kuis Bab 3 no. 10; Kuis Bab 3 no. 11; Kuis Bab 3 no. 14; Simulasi 1 no. 13; Simulasi 1 no. 15; Simulasi 2 no. 12; Simulasi 2 no. 24; Simulasi 3 no. 8; Simulasi 3 no. 19; Simulasi 4 no. 1; Simulasi 4 no. 2; Simulasi 5 no. 1; Simulasi 5 no. 17
3.2 · Kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan	Bedah Latihan Buku Bab 3 no. 1; Latihan 3.2 no. 1; Latihan 3.2 no. 2; Kuis Bab 3 no. 1; Kuis Bab 3 no. 2; Kuis Bab 3 no. 3; Kuis Bab 3 no. 7; Kuis Bab 3 no. 9; Kuis Bab 3 no. 12; Kuis Bab 3 no. 13; Kuis Bab 3 no. 15; Kuis Bab 3 no. 16; Simulasi 1 no. 26; Simulasi 1 no. 28; Simulasi 1 no. 29; Simulasi 2 no. 2; Simulasi 2 no. 10; Simulasi 2 no. 14; Simulasi 3 no. 3; Simulasi 3 no. 16; Simulasi 4 no. 3; Simulasi 4 no. 19; Simulasi 4 no. 20; Simulasi 5 no. 4; Simulasi 5 no. 11; Simulasi 5 no. 23
3.3 · Nilai dan prinsip gotong royong	Bedah Latihan Buku Bab 3 no. 7; Latihan 3.3 no. 1; Latihan 3.3 no. 2; Kuis Bab 3 no. 19; Kuis Bab 3 no. 22; Kuis Bab 3 no. 23; Kuis Bab 3 no. 26
3.4 · Ancaman terhadap keberagaman dan strategi integrasi nasional	Bedah Latihan Buku Bab 3 no. 3; Latihan 3.4 no. 1; Latihan 3.4 no. 2; Kuis Bab 3 no. 17; Kuis Bab 3 no. 18; Kuis Bab 3 no. 20; Kuis Bab 3 no. 21; Kuis Bab 3 no. 24; Kuis Bab 3 no. 25; Kuis Bab 3 no. 27; Kuis Bab 3 no. 28; Kuis Bab 3 no. 29; Kuis Bab 3 no. 30; Simulasi 1 no. 14; Simulasi 1 no. 19; Simulasi 1 no. 20; Simulasi 1 no. 24; Simulasi 2 no. 7; Simulasi 2 no. 13; Simulasi 2 no. 15; Simulasi 3 no. 5; Simulasi 3 no. 11; Simulasi 3 no. 22; Simulasi 4 no. 9; Simulasi 4 no. 10; Simulasi 4 no. 24; Simulasi 5 no. 2; Simulasi 5 no. 10; Simulasi 5 no. 25
4.1 · Perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 11; Latihan 4.1 no. 1; Latihan 4.1 no. 2; Kuis Bab 4 no. 1; Kuis Bab 4 no. 2; Kuis Bab 4 no. 3; Kuis Bab 4 no. 4; Kuis Bab 4 no. 5; Kuis Bab 4 no. 6; Kuis Bab 4 no. 7; Kuis Bab 4 no. 8; Kuis Bab 4 no. 30; Simulasi 1 no. 21; Simulasi 1 no. 22; Simulasi 1 no. 23; Simulasi 2 no. 3; Simulasi 2 no. 17; Simulasi 3 no. 2; Simulasi 3 no. 17; Simulasi 4 no. 6; Simulasi 4 no. 16; Simulasi 4 no. 17; Simulasi 5 no. 8; Simulasi 5 no. 12; Simulasi 5 no. 21
4.2 · Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem presidensial	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 2; Latihan 4.2 no. 1; Latihan 4.2 no. 2; Kuis Bab 4 no. 11; Kuis Bab 4 no. 13; Kuis Bab 4 no. 19
4.3 · Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 9; Latihan 4.3 no. 1; Latihan 4.3 no. 2; Kuis Bab 4 no. 20; Kuis Bab 4 no. 21; Kuis Bab 4 no. 23; Kuis Bab 4 no. 26; Simulasi 1 no. 16; Simulasi 2 no. 19; Simulasi 3 no. 12
4.4 · Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 3; Latihan 4.4 no. 1; Latihan 4.4 no. 2; Kuis Bab 4 no. 10; Kuis Bab 4 no. 24; Kuis Bab 4 no. 27
4.5 · Peran Indonesia dalam perdamaian dunia	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 5; Latihan 4.5 no. 1; Latihan 4.5 no. 2; Kuis Bab 4 no. 15; Kuis Bab 4 no. 22; Kuis Bab 4 no. 28; Simulasi 3 no. 23
4.6 · Pelajar sebagai pelopor pemilih pemula	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 7; Latihan 4.6 no. 1; Latihan 4.6 no. 2; Kuis Bab 4 no. 9; Kuis Bab 4 no. 12; Kuis Bab 4 no. 16; Kuis Bab 4 no. 17; Kuis Bab 4 no. 29; Simulasi 1 no. 18; Simulasi 4 no. 23; Simulasi 5 no. 3

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

Sub bab	Soal
4.7 · Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap keutuhan NKRI	Bedah Latihan Buku Bab 4 no. 20; Latihan 4.7 no. 1; Latihan 4.7 no. 2; Kuis Bab 4 no. 14; Kuis Bab 4 no. 18; Kuis Bab 4 no. 25

NEXT LEVEL STUDY
Educational Institutions

Gratis dari Next Level Study Indonesia · next-level-study.com/library · tidak untuk diperjualbelikan

NEXT LEVEL STUDY INDONESIA

Era Baru Pendidikan

TKA PPKn

Tetaplah menari, sekalipun lagu pengiringmu telah hilang. Sebab di luar sana, selalu ada seseorang yang menemukan bahagianya karena kamu tidak berhenti melangkah.

— HANDAKA LUMU

Buku ini menjelaskan secara rinci apa saja yang perlu kamu persiapkan untuk TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: materi yang diuji, strategi menjawab, dan latihan yang terarah.

Belajar lebih jauh di LMS NLS

next-level-study.com/belajar/lms-player.html?course=buku-ppkn

GRATIS · TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

PPKN · Edisi 1 · Gratis untuk pelajar Indonesia · 2026/2027